FUNDAMENTALISME, TERORISME DAN RADIKALISME

Perspektif atas Agama, Masyarakat dan Negara

Herdi Sahrasad & Al Chaidar

PENGANTAR

Tulisan-tulisan yang dikumpulkan dalam buku ini merupakan risalah, esai dan artikel yang bertebaran di media online, suratkabar/media cetak dan jurnal-jurnal. Dengan ketekunan, editor buku ini memilih berbagai tulisan yang tak terdokumentasikan dengan baik itu, sehingga akhirnya bisa disunting dan diterbitkan.

Sebagaimana kita ketahui, pasca jatuhnya Orde Baru Soeharto, isu terorisme mencuat di ruang publik. Aksi terorisme adalah strategi paling radikal dan banal serta ekstrim yang diambil para aktor dan aktivis Islam pasca Orde Baru. Di luar aksi terorisme, sebenarnya ada dua strategi gerakan radikal Islam yang menjadi penting ketika rezim yang berkuasa memberikan angin segar kebebasan setelah lama gerakan Islam dipinggirkan secara politik oleh rezim Orde Baru itu. Strategi pertama melalui jalur kepartaian dan strategi kedua membentuk ormas-ormas Islam radikal yang memperjuangkan syariat Islam melalui jalur kultural; dakwah Islam dan aksi unjuk rasa, baik ke parlemen maupun ke istana negara. Kolaborasi ini tampaknya menjadi kekuatan yang cukup signifikan untuk melakukan perubahan secara

bertahap di dalam sistem sosial dan kenegaraan bangsa Indonesia. Pada gilirannya, atribut, slogan, dan nama-nama Islam begitu ramai diteriakkan sebagai bagian dari pentas kekuatan dan panggung pergulatan.

Pergerakan Islam radikal memang sedang merambah ke wilayah-wilayah yang berpenduduk mayoritas Muslim di seluruh dunia. Indonesia, Filipina dan Malaysia, yang secara statistik berpenduduk mayoritas Muslim telah mengalami gejala globalisasi Islam radikal. Realitas ini dapat dilihat dari perkembangan kelompok Abu Sayyaf pimpinan Abu Bakar Janjalani di Filipina, Laskar Jihad dan Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin, Ikhwanul Muslimin, dan lain sebagainya di Indonesia, dan Kelompok Mujahidin Malaysia (KMM), sebuah organisasi di bawah payung PAS di Malaysia.

Mereka dianggap telah mengembangkan operasi selama beberapa dekade terakhir, menghimpun dana, melatih milisi, materi dan pengalaman untuk melawan Barat dan kekuatan sekuler, di samping memperjuangkan Islam secara radikal, agung dan sentral, dari Malaysia sampai Senegal, dari Sovyet (Rusia) sampai daerah-daerah pinggiran di Eropa yang dihuni oleh imigran yang sudah mapan. Kebangkitan Islam ini oleh Gilles Kepel (1996) dinilai sebagai bagian dari gerakan bawah tanah guna mengislamkan kembali kehidupan dan tradisi keseharian dan mengorganisasikan kembali eksistensi individual sesuai dengan ajaran Kitab Suci.

Studi Hermann Frederick Eilts (1987) menunjukkan bahwa, kebangkitan Islam dimulai semenjak lengsernya Shah Iran Reza Pahlevi, yang kemudian ditandai dengan tampilnya

Imam Khoemaini sebagai pemimpin Revolusi Iran tahun 1979. Ditambah lagi, pada fase pertengahan terakhir 1970-an terjadi pergolakan di Iran, Mesir, Saudi Arabia, Syria, Pakistan, dan Afghanistan yang menyadarkan Barat tentang bangkitnya "Islam militan" atau "kebangkitan Islamisme."

Dalam hal ini, di Indonesia kelompok-kelompok Muslim radikal melihat masyarakat kita mengalami sekularisasi, dekadensi moral dan krisis kepemimpinan. Hal tersebut lantas memantapkan keyakinan mereka bahwa solusinya adalah Islam. Pergaulan bebas, permisivisme, aborsi, kenakalan remaja, lemahnya supremasi hukum (KKN), dan semakin tidak bermoralnya para pemimpin bangsa memberikan keyakinan bahwa sekularisasi telah gagal menjadi bagian dari kehidupan bangsa. Karena itulah, bagi kaum muslim radikal, menerapkan syariat Islam secara *kaffah* dianggap sebagai solusi yang tepat. Radikalisasi yang tumbuh di kalangan muslim adalah efek domino dari kebobrokan sistem sosial masyarakat yang yang sudah tidak lagi mengindahkan moral dan peraturan agama. Itu sebabnya, mereka yakin bahwa Islam mampu menyelesaikan semua problem masyarakat agar menjadi lebih Islami; agar tidak ada KKN, agar pergaulan antar remaja lebih Islami, dan tidak ada lagi perilaku tidak bermoral di bumi Indonesia. Tentu saja, kalau dibentangkan, masih banyak alasan dan masalah yang membuat radikalisasi umat Islam itu terjadi.

Buku ini disemangati oleh para senior, rekan dan sahabat yang membuat spirit kami dalam bekerja dan menulis tidak kunjung padam, meski sempoyongan dihadang banyak kendala dan kesulitan. Karenanya, kami berterima kasih kepada dr. Hariman Siregar, Ken Ward, Prof Juwono

Sudarsono, Dr. Rizal Ramli, Ir Suko Sudarso, dr.Gurmilang Kartasasmita, Prof. M. Dawam Rahardjo, AM Hendropriyono, Prof. Azyumardi Azra, Hamid Algar, Mai Dar, Blake Respini, Steven Fish, Laurie Sears, Loren Ryter, dan Glenny Kauripan.

Begitu pula kepada Nanang Tahqiq, A. Muis Naharong, Fachry Ali, Yudi Latif, Pipip A Rifai Hasan, M. Amin Nurdin, Abdul Hadi WM, Bursah Zarnubi, Muchlis Hasyim, Tjatur Sapto Edi, Rocky Gerung, Achyanuddin, Rauf Arumsyah, Fuad Bawazier, Dang Fathurahman, Airlangga Pribadi, A Fahmi Panimbang, Asrori, Boy Mahromi, Miming Ismail, Cherry Augusta, Zuly Qodir, Muhamad Muntasir, Zulfikar Salahudin, Imam Shalahudin, M Subhi Ibrahim, Aan Rukmana, Fuad Mahbub Siraj, Khudory Husnan, Muh Nabil, Didi Irawadi Syamsuddin, Adhyaksa Dault, Zulkiflimansyah, Taufik Rahzen, Uju Junaedi, Umar Bakri Suryadi, Tinton Winaryanto, Donny Bambang PS, Bambang Widiatmoko, Sigid ES Mardeo, M Yudhie Haryono, Ham-dani, Ilhan Erda MS, Sukoso DM, T.Taufiqulhadi, Sugeng Suparwoto, Ndundut Budianto, Wewed Urip Widodo, Ahmad Fadillah, Angko Setiyarso Widodo, Dhuha Hadiyansyah, Umar Hamdani, Fathor Rasi, Isti Nugroho, rekan-rekan Founding Fathers House Jakarta, CSS-UI, Indonesia Democracy Monitor (INDEMO) dan keluarga besar Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina.

Akhirul kalam, tak ada gading yang tak retak, buku ini kami serahkan kepada sidang pembaca yang budiman, agar kiranya dapat diberikan koreksi, kritik dan saran.

Aceh-Jakarta, Januari 2017

DAFTAR ISI

Pengantar - iii

Daftar Isi - vii

- Perang Wacana Islam Liberal Versus Islam Fundamental - 1
- Perkembangan Jaringan Terorisme Global, Nasional dan Upaya Pencegahannya - 77
- Geopolitik Islam vis-à-vis Barat: Fundamentalisme dan Terorisme di Abad Kapitalisme - 191
- Terorisme, Barat dan Islam - 226
- Abu Sayyaf dan Muslim Moro di Filipina Selatan: Konflik dan Teror yang Panjang - 248
- Islamisme, Soft Power dan Doktrin "Imperialisme Demokratik" George W. Bush -292
- Islamisme, Kapitalisme dan Negara Bangsa Modern - 318
- Santoso dan Globalisasi Terorisme - 341
- Fundamentalisme, Radikalisme dan Terorisme di Indonesia: Sebuah Refleksi - 350
- Kontra Wacana Terorisme: Kerangka Konsepsional Penggunaan Diskursus Keagamaan dalam Program Anti-Teror - 397
- Terorisme, Deradikalisasi dan Humanisasi - 440
- Wahabisme dan Muslim Tradisional: Tegangan dan Perbenturan - 450
- Hambali: Aktor Kepercayaan Osama bin Laden di Asia Tenggara - 464

- Islam dan Radikalisme: Dari Ayat Suci Sampai *Allahcracy* - 494

Bibliografi - 555

Biografi - 571

PERANG WACANA ISLAM LIBERAL VERSUS ISLAM FUNDAMENTAL

Pendahuluan

Dalam pelbagai percakapan dengan para aktivis HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), IMM (Ikatan Mahasiwa Muhammadiyah) dan PII (Pelajar Islam Indonesia), saya mendapat pertanyaan, mengapa berminat mengkaji kembali perang wacana (polemik) Jaringan Islam Liberal (JIL) versus Islam fundamental?

Langkah apakah yang dikerjakan oleh Jaringan Islam Liberal (JIL) versus Islam fundamental untuk mengatasi kemiskinan, ketidakadilan, korupsi dan pelanggaran HAM di negeri ini? Adakah sumbangsih kedua mazhab Islam itu untuk rakyat kebanyakan yang ditipudaya oleh elite penguasa dan para kapitalis? Bukankah program kedua kelompok Islam itu dikhawatirkan menjadi proyek "bisnis agama" untuk mencari dana juga?

Pertanyaan-pertanyaan para aktivis santeri itu mengusik penulis untuk menelusuri perang wacana dan tarik-ulur JIL dan Islam fundamental lebih jauh, dalam batas-batas ke-

mampuan yang ada. Tulisan ini merupakan analisa diskursus dan catatan awal (pendahuluan) ihwal Islam liberal versus liberal dari berbagai teks, perdebatan di ruang publik dan sumber kepustakaan.

Fatwa MUI

Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke VII Agustus tahun 2005 mengeluarkan fatwa yang mengharamkan pluralisme yang menganggap semua agama sama, mengharamkan sekularisme dan liberalisme beserta semua turunannya. Kalangan MUI dan Islam fundamental mengemukakan bahwa "amuk" muncul dari kelompok liberal atas fatwa tersebut, dan pertarungan belum lagi sampai ke final. Mula-mula, serangan kalangan Islam Liberal atas fatwa MUI itu telah menjadi kontroversi yang luar biasa. Pada waktu itu pernyataan Ulil Abshor Abdalla (koordinator Jaringan Islam Liberal-JIL) yang menganggap fatwa MUI itu "konyol dan tolol", dinilai kalangan MUI sebagai kata-kata tidak pantas. Ulil kemudian meminta maaf terhadap MUI. Sementara statemen M. Dawam Rahardjo (cendekiawan Muslim/tokoh ICMI) yang mengatakan bahwa fatwa MUI itu memecah belah masyarakat dan menimbulkan keresahan dan karena itu MUI harus dibubarkan, merupakan kritik pedas atas fatwa MUI itu. Pernyataan Ulil dan Dawam menimbulkan reaksi balik kaum Islam Fundamental yang merasa dilecehkan. Perkembangan ini berbarengan dengan fatwa MUI untuk melarang gerakan Ahmadiyah. Akibatnya, rangkaian peristiwa-peristiwa itu menjontrongkan umat Islam - baik itu kalangan Fundamental maupun Liberal - ke dalam kontroversi dan

ketegangan.[1]

Saling kritik dan perang pemikiran antara kelompok Islam Liberal dan fundamental itu melanda umat dari Masjid Istiqlal sampai masjid kampung di pedesaan. Pertarungan Islam Liberal versus Fundamental itu, pada hemat saya, harus dilihat dalam konteks yang lebih luas yakni perebutan ruang publik, utamanya ruang politik dan sosial, dalam upaya *the struggle for the real* di medan sosial-politik di Indonesia. Perang wacana Islam liberal versus fundamental itu mengesankan perebutan struktur kesempatan politik (*political opportunity structure*) yang berlangsung secara terbuka maupun tersembunyi.

Dalam studi gerakan sosial, penting adanya struktur kesempatan politik yang memungkinkan atau tidak memungkinkan aktor sosial untuk bergerak. Struktur kesempatan politik (*political opportunity structure*) itu didefinisikan oleh Sidney Tarrow sebagai "*consistent – but not necessarily formal, permanent, or national – signals to social or political actors which either encourage or discourage them to use their internal resources to form social movements*"[2]

Struktur kesempatan politik itu dikenal terbagi dua, yaitu yang bersifat statis dalam pengertian berkait dengan kelembagaan negara (bersifat eksternal terhadap aktor gerakan) seperti terbukanya sistem politik, transparansi

---

[1] "Ulama Dihina, Tumpas Gerombolan Liberal", *Majalah Sabili,* No. 3, Tahun XIII, 25 Agustus 2005.

[2] Lihat Tarrow dalam Keck and Sikkink, *Activists Beyond Borders: Transnational Advocacy Networks in International Politics* (Ithaca: Cornell University Press, 1998). Ada lima lima struktur kesempatan politik dalam pandangan Tarrow: 1) *increasing access*, 2) *shifting alignments*, 3) *divided elites*, 4) *influential allies and;* 5) *repression and facilitation*. Lihat juga Sidney Tarrow, *Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics* (Cambridge University Press, 1998).

pengadilan; dan struktur kesempatan politik yang bersifat dinamis, yang erat terkait dengan kondisi internal di dalam aktor-aktor gerakan (masyarakat sipil) itu sendiri, seperti lemah/kuatnya solidaritas, aliansi, dan sejenisnya. Gerakan sosial yang berhasil biasanya memiliki dua bentuk struktur kesempatan itu.

Karena itu, saya melihat fatwa MUI sekaligus sebagai "*power game*" dan upaya merebut "struktur kesempatan politik" dimana MUI nampaknya berusaha memperlihatkan kembali "kedigdayaan, wibawa dan kekuatannya" yang relative merosot di era pasca Soeharto, di tengah pusaran arus modernisme dewasa ini. Sementara liberalisme, sekularisme dan pluralisme semakin mendapat tempat di kalangan masyarakat madani (*civil society*) menyusul revolusi demokrasi pasca jatuhnya Orde Baru Soeharto Mei 1998. Fatwa MUI itu oleh kalangan pluralis dan prodemokrasi, dianggap menandai babak baru gejala penguatan kembali "Islamisme" di Indonesia pasca Soeharto.[3]

Bahkan Ahmad Sahal, seorang aktifis Islam Liberal, mengemukakan bahwa pada permukaannya fatwa MUI yang mengharamkan liberalisme, sekularisme dan pluralisme terkesan bertarget sempit: membidik Jaringan Islam Liberal (JIL) yang memiliki lokomotif Ulil Abshar Abdalla dan kelompok-kelompok Islam lain yang sejenis. Pada lapisan dasarnya, Sahal melihat fatwa itu sesungguhnya menghantam sesuatu yang lebih jauh melampaui JIL yakni demokrasi konstitusional yang sedang dirintis di Indonesia. Demokrasi menjadi terancam oleh fatwa itu karena tiga soal yang

[3] Percakapan dengan aktivis Muslim prodemokrasi di ISAC Ciputat, Agustus 2005.

diharamkan oleh MUI itu sesungguhnya merupakan pilar utama demokrasi.[4]

Dawam Rahardjo menilai dasar keputusan MUI itu ironis dan bukan kesalahpahaman, melainkan ketidakpahaman MUI atas sekularisme, liberalisme dan pluralisme (disingkat oleh kaum Islam Fundamental sebagai *Sepilis*, istilah berkonotasi pelecehan dan plesetan "*Sipilis*", penyakit kelamin yang berbahaya).[5]

Kalangan Islam Liberal menilai, fatwa MUI itu akan mengancam fondasi dasar bagi proses demokratisasi, sesuatu yang dicita-citakan oleh reformasi, sehingga musuh reformasi bukan hanya otoritarianisme, otokrasi dan korupsi-kolusi-nepotisme, melainkan juga oleh absolutisme tafsir agama, yang merasa memiliki kebenaran mutlak dan menganggap yang lain sesat. [6]

***

Sebagai orang muda yang senantiasa mengapresiasi "pribumisasi Islam" Abdurrahman Wahid dan "pembaruan pemikiran Islam" Nurcholish Madjid seraya "belajar Islam" kembali, saya ingin menyampaikan bahwa tulisan ini tidak bermaksud menjadi jembatan atau pertimbangan untuk menjatuhkan pilihan guna membela, menolak atau menjatuhkan kecenderungan diri terhadap dua paradigma berpikir yaitu "Islam Liberal dan Fundamental" atau justru menanggalkan kedua-duanya, melainkan mencoba memaparkan perang wacana Islam Fundamental versus Islam

---

[4] Ahmad Sahal, "MUI dan Fatwa Antidemokrasi," *Tempo*, Agustus 2005, h. 156-157.

[5] Ahmad Sahal, "MUI dan Fatwa Antidemokrasi."

[6] Ahmad Sahal, "MUI dan Fatwa Antidemokrasi."

Liberal dan tarik-tolak di dalamnya sebagai diskursus intelektual dan agama yang selayaknya ditangkap dan dicermati oleh zaman kita agar lebih mawas diri, arif dan dewasa. [7]

Saya terpikat untuk menceburkan diri ke dalam perdebatan Islam Liberal dan Fundamental dengan segenap risikonya, berangkat dari ″keterbatasan epistemologi″ dalam pergumulan saya sebagai "aktivis HMI" di masa mahasiswa era 1980-an dan kini berharap cemas agar perdebatan para aktor kedua kubu (Islam Liberal dan Fundamental) tidak memicu kekerasan dan permusuhan, namun justru membukakan mata hati dan pikiran kita untuk lebih membuka cakrawala dalam membangun Islam, peradaban dalam suatu proses dialog yang berakal sehat dan berakhlak, tidak main mutlak-mutlakan dan memonopoli kebenaran, Sebab, dalam dunia epistemis, bukankah kebenaran itu harus terus dicari, tidak pantas dimonopoli dan tidak bersifat final? Seperti sejarah yang terus bergerak, bukankah interpretasi harus selalu digali, diperbarui? Dan bukankah dalam hitungan hari, bulan dan tahun interpretasi, tafsir dan pemahaman kita tentang Quran dan ajaran Islam tetap harus diuji, diperdalam dan diasah kembali dalam konteks dunia yang terus berubah ini?

Dalam konteks globalisasi dewasa ini, ada kecenderungan kuat bahwa Islam di Indonesia cenderung kian liberal, sebagaimana diamati cukup lama oleh Greg Barton[8] dalam

---

[7] Percakapan dengan para aktivis prodemokrasi di ISAC (Indonesian Study & Advocacy Center) Ciputat, yang terdiri dari mahasiswa dan alumni UIN Ciputat, STF Driyarkara, UI, UIN Yogyakarta, UMJ pada pertengahan Agustus 2005.

[8] Greg Barton, "Islam in Indonesia, Becoming More Liberal?," *makalah*, CSEAS, Monash University, Australia, 1992. Dalam ceramahnya di Monash itu (Greg Barton menyelesaikan PhD di Monash), penulis menangkap kesan prediksi Barton

arti makin menerima gagasan demokrasi, pluralisme dan HAM. Yang musti dipahami kita adalah bahwa Barat/AS mengapresiasi Islam Liberal, namun sangat takut kepada Islam Fundamental, sehingga masyarakat Barat/AS banyak menghujat kaum fundamentalis Islam sebagai biang kerok kekerasan dan terorisme. Padahal, terorisme negara oleh AS/Barat lah—sebagaimana diungkap Noam Chomsky—yang mengilhami munculnya aksi teror balasan oleh kaum Muslim terhadap AS/Barat seperti dalam kasus serangan bom WTC 11 September 2001, bom Spanyol 2004, bom Bali 2002, dan teror bom di London 7 Juli 2005.

Bernard Lewis pernah menyatakan, pada abad ke-20, ada yang salah pada dunia Islam. Dibandingkan dengan rivalnya, Kristen, dunia Islam kini menjadi miskin, lemah, dan bodoh. Sejak abad ke-19, dominasi Barat terhadap dunia Islam tampak jelas. Barat menginvasi kaum Muslim dalam setiap aspek kehidupan, bukan hanya pada aspek publik, tetapi - yang lebih menyakitkan - juga dalam aspek-aspek pribadi. Namun, masyarakat Barat tetap saja melihat Islam sebagai momok *(scourge)* bagi Barat. [9]

---

bahwa masyarakat Islam di Indonesia cenderung makin liberal dalam arti makin menerima gagasan demokrasi, pluralisme dan HAM, sebagai keberhasilan dari pembaruan Islam yang dipelopori Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid, Djohan Effendi, Dawam Rahardjo, Ahmad Wahib dan seterusnya.

[9] Kalau kita simak buku *What Went Wrong? Western Impact and Middle Eastern Response* (London: Phoenix, 2002), karya Bernard Lewis, terdapat banyak data menarik tentang kondisi Islam di masa lalu dan kini. Lewis mengakui keagungan Islam di masa lalu. Ia misalnya mencatat, bahwa selama beberapa abad Islam merupakan kekuatan militer dan ekonomi terbesar di muka bumi. Tetapi, menurut Lewis, pada abad ke-20, ada yang salah pada dunia Islam. Dibandingkan dengan rivalnya, Dunia Kristen (Barat), dunia Islam kini menjadi miskin lemah, dan bodoh. Sejak abad ke-9, dominasi Barat terhadap dunia Islam tampak jelas. Barat menginvasi kaum Muslim dalam setiap aspek kehidupan, bukan hanya pada aspek publik, tetapi —yang lebih menyakitkan— juga dalam aspek-aspek pribadi. Di sini terasa benar sabda Nabi Saw: "*bahwa suatu saat nanti umatku seperti seonggok makanan*

Bagaimana menghadapi kaum yang hidup dalam mitos atau paranoid semacam ini? Pada satu sisi, paranoia Barat itu menunjukkan, bahwa memang Islam - bagaimana pun kondisinya - tidak dipandang sebelah mata. Kaum Muslim tetap diperhitungkan, meskipun sedang dalam kondisi lemah. Barat selama berabad-abad telah menyamakan politik Islam dengan kealiman, fanatisme, tirani absolut dan praktek militer Islam disamakan dengan teror dan perkosaan, tradisi Islam disamakan dengan keterbelakangan dan Islam dianggap pengingkaran total terhadap Eropa, penghinaan terhadap ilmu pengetahuan, penindasan terhadap *civil society*, membatasi pemikiran manusia dan seterusnya.[10]

Seyogianya, kaum Muslim melakukan introspeksi atas kondisinya dan tidak terlalu menunjukkan sikap menunduk atau cari muka terhadap AS/Barat.[11] Dalam hubungan ini, Islam Liberal mendapat bantuan AS/Barat untuk menyebarluaskannya dalam bingkai pluralisme dan demokrasi, sementara Islam Fundamental yang sering diasosiasikan dengan Pan-Islamisme di Arab dan bantuan Arab Saudi/Timur Tengah, dianggap sebagai "kekuatan" yang menakutkan, militan dan musti dikaji sekaligus diwaspadai atau diprasangkai.

Berawal dari Kongko di Kawasan Utan Kayu

Kemunculan organisasi JIL berawal dari kongko-kongko antara Ulil Abshar Abdalla (Lakpesdam NU), Ahmad Sahal

---

yang diperebutkan oleh banyak srigala."

[10] Charles Kurzman, "Pengantar," dalam *Islam Liberal dan Konteks Islaminya* (Jakarta: Paramadina, 2001).

[11] Adian Husaini, "Paradoks Kebangkitan Islam," *www.icmi.org*, diakses pada 20 Desember 2004.

(*Jurnal Kalam*), dan Goenawan Mohamad (ISAI) di Jalan Utan Kayu 68 H, Jakarta Timur, Februari 2001. Tempat ini kemudian menjadi markas JIL. Para pemikir muda lain, seperti Lutfi Asyaukani, Ihsan Ali Fauzi, Hamid Basyaib, dan Saiful Mujani, menyusul bergabung. Dalam perkembangannya, Ulil disepakati sebagai koordinator.[12]

Gelora JIL banyak diprakarsai anak muda, usia 20-35-an tahun. Mereka umumnya para mahasiswa, kolomnis, peneliti, atau jurnalis. Tujuan utamanya: menyebarkan gagasan Islam liberal seluas-luasnya. "Untuk itu kami memilih bentuk jaringan, bukan organisasi kemasyarakatan, maupun partai politik," tulis situs *islamlib.com*, seraya mengemukakan gagasan JIL dalam *Manifesto Jaringan Islam Liberal*.

JIL mendaftar 28 kontributor domestik dan luar negeri sebagai "juru kampanye" Islam liberal. Mulai Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Jalaluddin Rakhmat, Said Aqiel Siradj, Azyumardi Azra, Masdar F. Mas'udi, sampai Komaruddin Hidayat. Di antara kontributor mancanegaranya: Asghar Ali Engineer (India), Abdullahi Ahmed An-Na'im (Sudan), Mohammed Arkoun (Prancis), dan Abdallah Laroui (Maroko). Jaringan ini menyediakan pentas - berupa koran, radio, buku, *booklet*, dan *website* - bagi kontributor untuk mengungkapkan pandangannya pada publik. Kegiatan pertamanya: diskusi maya (milis). Lalu sejak 25 Juni 2001, JIL mengisi rubrik *Kajian Utan Kayu* di *Jawa Pos Minggu* dan dimuat juga dalam 40-an koran jaringannya. Isinya artikel dan wawancara seputar perspektif Islam

---

[12] Untuk uraian-uraian selanjutnya baca Asrori S. Karni, "Komunitas", *GATRA*, 17 Nopember 2003.

liberal.

Tiap Kamis sore 2001-2002, JIL menyiarkan wawancara langsung dan diskusi interaktif dengan para kontributornya, lewat radio 68H dan 15 radio jaringannya. Tema kajiannya berada dalam lingkup agama dan demokrasi. Misalnya jihad, penerapan syariat Islam, tafsir kritis, keadilan gender, jilbab, atau negara sekuler. Perspektif yang disampaikan berujung pada tesis bahwa Islam selaras dengan demokrasi.

Dalam situs *islamlib.com* dinyatakan, lahirnya JIL sebagai respon atas bangkitnya "ekstremisme" dan "fundamental-isme" agama diIndonesia. Seperti munculnya kelompok militan Islam, perusakan gereja, lahirnya sejumlah media penyuara aspirasi "Islam militan", serta penggunaan istilah "jihad" sebagai dalil kekerasan.

JIL tak hanya terang-terangan menetapkan musuh pemi-kirannya, juga lugas mengungkapkan ide-ide "gila"-nya. Gay kampanyenya menggebrak, menyalak-nyalak, dan provokatif. Akumulasi gaya ini memuncak pada artikel kontroversial Ulil di *Kompas* yang dituding FUUI telah menghina lima pihak sekaligus: Allah, Nabi Muhammad, Islam, ulama, dan umat Islam. "Tulisan saya sengaja provokatif, karena saya berhadapan dengan audiens yang juga provokatif," kata Ulil.

Dengan gaya demikian, reaksi bermunculan. Tahun 2002 bisa dicatat sebagai tahun paling polemis dalam perjalanan JIL. Spektrumnya beragam: mulai reaksi ancaman mati, somasi, teguran, sampai kritik berbentuk buku. Teguran, misalnya, datang dari rekomendasi (*taushiyah*) Konferensi Wilayah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, 11-13 Oktober 2002.

Bunyinya: "Kepada PWNU Jawa Timur agar segera meng-instruksikan kepada warga NU mewaspadai dan mencegah pemikiran Islam Liberal dalam masyarakat. Apabila pemikiran Islam Liberal dimunculkan oleh Pengurus NU (di semua tingkatan) diharap ada sanksi, baik berupa teguran keras maupun sanksi organisasi (sekalipun dianulir dari kepengurusan)."

Somasi dilancarkan Ketua Departemen Data dan Informasi Majelis Mujahidin Indonesia, Fauzan al-Anshari, kepada *RCTI* dan *SCTV*, pada 4 Agustus 2002, karena menayangkan iklan "Islam Warna-warni" dari JIL. Iklan itu pun dibatalkan. Kubu Utan Kayu membalas dengan menga-dukan Fauzan ke polisi.

Sementara kritik metodologi datang, salah satunya, dari Haidar Bagir, Direktur Mizan, Bandung. Ia menulis kolom di *Republika*, 20 Maret 2002: "Islam Liberal Butuh Metodologi". JIL dikatakan tak punya metodologi. Istilah "liberal", Haidar menulis, cenderung menjadi "keranjang yang ke dalamnya apa saja bisa masuk". Tanpa metodologi yang jelas akan menguatkan kesan, Islam liberal adalah "konspirasi manipulatif untuk menggerus Islam justru dengan meng-*abuse* sebutan Islam itu sendiri".

Reaksi berbentuk buku, selain karya Hartono Ahmad Jaiz, ada pula buku Adian Husaini, *Islam Liberal: Sejarah Konsepsi, Penyimpangan dan Jawabannya*. Ada tiga agenda JIL yang disorot: pengembangan teologi inklusif-pluralis dinilai menyamakan semua agama dan mendangkalkan akidah; isu penolakan syariat Islam dipandang bagian penghancuran global; upaya penghancuran Islam fundamentalis dituding

bagian proyek Amerika atas usulan zionis Israel.

Buku lain, karya Adnin Armas, *Pengaruh Kristen-Orientalis terhadap Islam Liberal*. Isinya, kumpulan perdebatan Armas dengan para aktivis JIL di milis Islam liberal. Energi personel JIL akhirnya memang tersedot untuk meladeni berbagai reaksi sepanjang 2002 itu. Mulai berbentuk adu pernyataan, debat ilmiah, sampai balasan mengadukan Fauzan ke polisi. Tapi, semuanya justru melejitkan popularitas kelompok baru ini.

Menjelang akhir 2003, hiruk-pikuk kontroversi JIL cenderung mereda. Nasib aduan FUUI dan aduan JIL terhadap Fauzan ke Mabes Polri menguap begitu saja. Dalam suasana lebih tenang, JIL mulai menempuh fase baru yang lebih konstruktif, tak lagi meledak-ledak. "Tahap awal yang menggebrak, kami kira sudah cukup. Kini kami konsentrasi mengembangkan jaringan antarkampus," kata Nong Darol Mahmada, Wakil Koordinator JIL. Misinya, membendung laju skripturalisme Islam sejenis Hizbut Tahrir yang merasuki kampus-kampus umum. Ada 10 kampus di Jawa yang dimasuki jaringan. Agustus 2003, JIL menggelar SWOT untuk mengevaluasi kinerja dan merumuskan agenda ke depan.

Ramadhan 2003, JIL mengisi waktu dengan mengkaji kitab-kitab *ushul fiqh* klasik ala pesantren. Seperti *Ar-Risalah* karya Imam Syafi'i, *Al-Muwafaqat* karya *Al-Syatibi*, tulisan lepas Najmuddin Al-Thufi dan *Jam'ul Jawami'* karya Al-Subkhi. Acara bertajuk "Gelar Tadarus Ramadan: Kembali ke Islam Klasik" ini berlangsung di Gedung Teater Utan Kayu. Usai diskusi, acara dilanjutkan dengan tarawih bersama.

Di atas segalanya, aksi-reaksi yang mengiringi perjalanan JIL

telah menguakkan kenyataan bahwa JIL mempunyai "konstituen" tersendiri yang justru mendapat pencerahan spiritual dari Islam ala JIL ini.

Misalnya, saat berlangsung *talk show* radio bersama Prof. Hasanuddin A.F. tentang pidana mati dalam Islam, Desember 2002. Seorang penanya bernama Henri Tan mengeluh akan keluar lagi dari Islam, bila Ulil diancam-ancam fatwa mati. "Islam model Ulil ini yang membuat saya tertarik masuk Islam. Kalau model ini mau dimatikan, lebih baik saya keluar lagi dari Islam," katanya.

Fakta serupa muncul dalam bedah buku *Syariat Islam Pandangan Muslim Liberal* di Universitas Negeri Jakarta, Juni 2003. Seorang peserta, sebut saja Djohan, menyesalkan fatwa mati atas Ulil. "Saya meninggalkan Kristen dan masuk Islam justru karena keislaman model Mas Ulil. Dia bukan pendangkal akidah, malah menguatkan akidah saya," kata Djohan. Tuduhan bahwa JIL mendangkalkan akidah, dengan fakta ini, perlu diuji kembali.

Ketika digelar jumpa pers JIL menanggapi fatwa FUUI, di Utan Kayu, Jakarta, Desember 2002, ada seorang penanggap yang mengaku berislam secara "minimal", alias abangan. Tadinya ia merasa terasingkan dari wadah mayoritas umat Islam, tapi kehadiran JIL seolah merangkulnya, dan mengakuinya sebagai muslim. Ia pun terdorong meningkatkan kualitas keislamannya.

Tentang Istilah Islam Liberal

Istilah Islam liberal sebenarnya merupakan istilah yang dipopulerkan oleh Charles Kurzman yang menulis buku

Liberal Islam a Sourcebook. Sebenarnya buku ini adalah kumpulan artikel. Kurzman menganggap ada sejumlah intelektual Muslim yang merepresentasikan Islam yang liberal. Di antara intelektual Arab ada nama Ali Abdurraziq, Mahmud Toha, dan Ahmad Na'im. Buku ini terbit tahun 1998.

Sebelum buku Kurzman, ada buku lain yang juga berbicara tentang Islam liberal yaitu *Islamic Liberalism* yang ditulis Leonard Binder. Meskipun tidak spesifik berbicara tentang Islam Liberal, Binder memetakan aliran-aliran pemikiran yang dia kategorikan sebagai liberal. Ada buku lain yang ditulis oleh Albert Hourani, sebuah buku klasik, yaitu *Arabic Thought in the Liberal Age*. Dia merujuk masa-masa kebangkitan Arab pada awal-awal abad ke-19 atau akhir abad ke-18 sebagai masa-masa yang liberal. Jadi kalau kita melihat perkembangan tersebut dapat dilihat bahwa istilah Islam liberal tidak dimulai dari Kurzman. Istilah tersebut sudah dimulai oleh Hourani pada tahun 1900-an.

"Saya cukup terkejut ketika membuka buku A.A.A. Fyzee, seorang intelektual Pakistan, yakni *Islam in Transition.* Dalam karya itu Fyzee bukan hanya menggunakan istilah "Islam liberal," tapi juga "Islam Protestan" yang menurutnya jika dalam agama Kristen ada kelompok protestan, maka dalam Islam juga ada golongan protestan yang berani memprotes kemapanan dan menghadirkan penafsiran yang lain dari "Islam yang Katolik."

"Saya sendiri menganggap bahwa istilah tidak terlalu penting," kata Luthfi Assyaukanie.

Dalam pandangan Islam Liberal, ada keyakinan bersama bahwa al-Quran diturunkan kepada kaum Muslim untuk

menghentikan keraguan terhadap Rasulullah SAW yang menuntut wahyu dan menyerahkan masalah-masalah tersebut kepada masyarakat agar menuntut mereka tumbuh dan berkembang serta terbuka terhadap perubahan. Islam Liberal menerima pluralisme, demokrasi dan HAM. Pluralisme merupakan sebuah jaminan kekayaan kultural dan keanekaragaman diperlukan untuk pembangunan. Kita Muslim, tetapi kita bukanlah Islam itu sendiri. Kita tidak memonopoli agama. Demokrasi yang kita pahami berarti pluralisme, pilihan dan kebebasan, demikian Abbasi Madani, seorang intelektual Islam Liberal Aljazair.[13]

Di bawah karunia kebebasan, Islam Liberal di Indonesia, senada dengan Muhamad Natsir, Nurcholish Madjid dan AM Fatwa (sebagaimana dikutip dalam *Wacana Islam Liberal,* Kurzman, 2001), berpendapat bahwa masyarakat harus diberikan perlindungan dalam mengembangkan aktivitas penelitian berikut perenungannya. Masyarakat harus diberi kebebasan untuk berpikir dan berpendapat. Masyarakat seperti inilah yang dikehendaki oleh demokrasi. Seraya mengupayakan kemerdekaan kreatif, Islam Liberal sependapat dengan Hassan Hanafi bahwa tidak ada teologi abadi, statis yang sesuai untuk setiap waktu dan tempat. Teologi selalu merupakan ekspresi dan spirit waktu itu. Bahwa Islam Liberal, merujuk Hassan Hanafi (1977), melihat tidak ada penafsiran tunggal terhadap sebuah teks, tetapi ada banyak penafsiran yang menunjukkan perbedaan pemahaman di antara para penafsir yang berbeda. Konflik penafsiran secara esensial merupakan sebuah konflik politik bukan

---

[13] Dikutip dalam Daniel Brumberg, "Islam, Elections and Reform in Algeria," *Journal of Democracy*, Vol. 2, Musim Dingin 1991, dalam Charles Kurzman, ed, *Wacana Islam Liberal,* (Jakarta: Paramadina, 2001), h. 1-26.

konflik teoritis. Teori tertentu saja merupakan sebuah sampul epistemologi dan tiap penafsiran mengekspresikan komitmen sosial politik sang penafsir.

Dan meminjam perspektif Al Shadiq al Mahdi (cendekiawan Muslim Sudan, 1983), karena Islam tidak menetapkan satu sistem tertentu baik bagi pemerintahan, ekonomi, hubungan internasional maupun perundang-undangan, umat Islam tidak terikat oleh pendekatan-pendekatan tradisional, namun harus mengupayakan usaha guna membangun sebuah sintesis baik yang Islami maupun modern. Dalam hal ini, seperti penegasan Muhammad Abduh (Mesir 1849-1905), Islam Liberal menolak paham Islam yang tertutup dan statis, Islam Liberal berani memisahkan ijtihad dari taklid, akal dari otoritas, untuk kembali dalam upaya memperoleh pengetahuan agama pada sumber-sumber utamanya dan menimbangnya dengan skala pemikiran manusia, yang telah diciptakan Tuhan untuk mencegah dampak negatif atau pemalsuan dalam agama. Agama harus dijadikan teman bagi sains, mendorong manusia untuk menyelidiki rahasia-rahasia eksistensi.

Lepas dari beragam kontroversinya, bagaimanapun, ada segmen masyarakat tertentu yang membutuhkan Islam model JIL dalam merawat spiritualitas mereka. Tentu mereka bukan hanya kalangan mualaf dan abangan, juga para akademisi, peneliti, aktivis, dan mahasiswa yang berpikir kritis, pluralis, dan menjunjung kebebasan. Maka, biarkan JIL melayani konstituennya.

Istilah Islam Liberal[14] mengandung konotasi negatif bagi sebagian dunia Islam dimana ia diasosiasikan dengan

---

[14] Baca Charles Kurzman (ed.), *Wacana Islam Liberal*.

dominasi asing, kapitalisme tanpa batas, kemunafikan yang mendewakan kebenaran dan permusuhan kepada Islam. Namun seperti ditegaskan Charles Kurzman, Islam liberal harus dilihat sebagai alat bantu analisis, bukan kategori yang mutlak.

Islam liberal? "*Liber*" dari bahasa Latin, artinya "bebas", "merdeka". Dari istilah ini kita bisa mengajukan beberapa pertanyaan sederhana: Islam (umat Islam) mau bebas dari apa? Dari kungkungan politik? Dari doktrin dan warisan-warisannya sendiri? Dari kebodohan? Selain itu, Islam (umat Islam) mau bebas untuk berbuat apa? Sekadar bebas untuk beribadah? Hidup secara demokratis dan merdeka untuk menafsirkan kembali doktrin-doktrin yang ada agar agama dan modernitas tidak bertentangan? Apa landasan konseptual yang dapat diberikan terhadap masalah "*free from*" dan "*free for*" oleh kaum yang mengatakan diri mereka sebagai kaum Islam liberal?[15]

---

[15] Pandangan ini dipetik dari diskusi kalangan Islam Liberal yang antara lain melibatkan Rizal Mallarangeng, Goenawan Mohamad, Denny JA, Nirwan Arsuka, Sukidi Mulyadi, Ulil Abshar Abdalla, Luthfi Assyaukanie, Ahmad Sahal dst tahun 2001. Diskusi *Wacana Islam Liberal di Timur Tengah* ini dihadiri oleh kaum muda dan aktivis Islam yang datang dari berbagai kalangan. Diskusi ini diselenggarakan di Jakarta, Rabu, 21 Februari 2001. Dalam konteks ini, kelompok Islam Fundamental menerbitkan jurnal *Islamia* sebagai respon atas Islam Liberal. *Islamia* adalah sebuah majalah tiga bulanan yang diluncurkan penerbitan perdananya pada 6 Maret 2004 di Hotel Sofyan Cikini Jakarta. Format majalah dan penampilannya mengingatkan majalah *Ulumul Qur'an,* hanya saja *Islamia* sepenuhnya tampil meng-*counter* sekularisme, liberalisme Islam yang acap diusung "mendiang" *Ulumul Qur`an.* Walau majalah *Ulumul Qur'an* sudah lama mati, kalangan Islam Fundamental menganggap pemikiran sekuler yang selalu diusung jurnal yang mengaku ilmiah itu justru tumbuh subur. "Tengok saja gegap-gempita penampilan kelompok Islam Liberal yang dipelopori Ulil Abshar Abdalla." Kata seorang aktivis Islam Fundamental seraya menambahkan. Perhatikan pula para pengikut Nurcholis Madjid melalui berbagai sarana media terus-menerus menggerus Islam yang hakiki dengan dalih pembaharuan, liberal, dan semacamnya. Kelompok mereka ini dianggap oleh Islam Fundamental, terus merajalela.

Lantas, apa itu interpretasi liberal atas Islam dalam soal politik (demokrasi)? Islam liberal adalah interpretasi Islam yang mendukung atau paralel dengan *civic culture (pro-pluralism, equal opportunity*, moderasi, *trust, tolerance*, memiliki *sense of community* yang nasional). Luthfi Assyaukanie memahami "Islam Liberal" sebagai Islam yang kritis, progresif, dan dinamis. "Islam Liberal" sebenarnya adalah istilah A.A. Fyzee, intelektual Muslim India, yang dipopulerkan Charles Kurzman dalam karyanya *Liberal Islam*).[16] Istilah itu mungkin tidak terlalu penting, karena kita bisa menggantinya dengan, misalnya, "Islam Progresif," "Islam Pluralis," atau "Islam Emansipatoris" dan seterusnya. Namun Farid Esack, intelektual asal Afsel, misalnya, kurang setuju dengan penggunaan istilah "liberal" karena berkonotasi perlawanan dan pemberontakan. Namun kalangan Islam Liberal di Indonesia senang menggunakannya, karena memang ada sesuatu yang harus dilawan dan ada alasan untuk memberontak. Mereka menganggap bahwa mayoritas Islam yang ada sekarang adalah Islam ortodoks, baik dalam wajahnya yang fundamentalis (dalam sikap politik) maupun konservatif (dalam pemahaman kea-gamaan).[17] Karena itu,

---

Terakhir, demikian kalangan Islam Fundamental, Paramadina menerbitkan buku *Fiqih Lintas Agama* yang tentu saja sangat menghebohkan. Belum lagi geger Hermeneutika yang kini diidap pula oleh sejumlah tokoh Muhammadiyah seperti Amin Abdullah dan Abdul Munir Mulkhan. Semakin banyaknya figur-figur penerus Nurcholish Madjid yang lahir dengan aneka media yang dimiliki saat ini, rupanya sangat mengusik nurani sejumlah mahasiswa kandidat Ph.D di *Internasional Institute of Islamic Though and Civilization (ISTAC-IIUM)* Kualalumpur Malaysia, khususnya yang berasal dari Indonesia, seperti Adian Huaini, Hamid Fahmy Zarkasyi (putra pendiri Pondok Modern Gontor, Alm. KH Zarkasyi), Adnin Armas, serta beberapa dosen di sana seperti Dr. Ugi Suharto (asal Indonesia) dan Prof Dr Wan Mohamad. Nor wan Daud, alumnus University of Chicago Amerika yang satu angkatan dengan Syafii Maarif dan Amien Rais.

[16] Charles Kurzman (ed.), *Wacana Islam Liberal.*

[17] Charles Kurzman (ed.), *Wacana Islam Liberal.*

kata Luthfie, Islam Liberal datang sebagai sebuah bentuk protes dan perlawanan terhadap dominasi itu, untuk memecahkan persoalan yang paling mendasar, agar bebas dari otoritas masa silam dan bebas untuk menafsirkan dan mengkritisi otoritas pihak-pihak yang memonopoli kebenaran dalam soal tafsir Islam tersebut. ″Ketika kita mengatakan "bebas dari" dan "bebas untuk," kita memposisikan diri menjadi seorang "protestan" yang berusaha mencari hal-hal yang baik-baik dari warisan agama dan membuang hal-hal yang buruk (saya membayangkan semangat protestanisme itu adalah semangat yang seluruhnya bersifat positif, seperti yang dijelaskan dengan sangat bagus oleh Max Weber," tutur Luthfie, salah satu aktor Islam Liberal.

Dalam hal ini, Sukidi Mulyadi melihat secara kritis bahwa: *Pertama*, Istilah "Islam liberal" yang oleh dinilai eksklusif dan mengarah ke arah pengkotak-kotakan, sebenarnya kembali mengingatkan kita pada refleksi harian tokoh Islam liberal kita, Ahmad Wahib. Dalam konteks inilah kita meletakkan pemikiran liberal dalam Islam, yang oleh Kurzman disebut "Liberal Islam."

Kedua, Islam Liberal hanya liberal dalam pembacaannya terhadap teks dan wacana. Tapi, maaf, tidak liberatif terhadap yang tertindas. Malah sebaliknya, cenderung menindas yang tertindas, dengan tawaran wacana yang sama sekali *disconnect* dengan wacana rakyat tertindas. Gus Dur itu, dalam kategori Greg Barton adalah tokoh kelas wahid Islam Liberal. Tapi, dalam gerakan politiknya, cenderung otoriter dan sama sekali tidak demokratis. Pendekatannya demokratis liberal, tapi aktualisasi gerakan politiknya cenderung tidak demokratis. Jadi, kata Sukidi, omong kosong

belaka Islam Liberal.

Ketiga, Bagaimana meletakan Islam Liberal, dalam konteks usaha liberatif? Dr. Farid Esack menentang rezim penindas apartheid di Afrika Selatan dengan merekontruksi teologi-teologi pluralis dalam al-Quran untuk menggalang *inter-faith solidarity* menentang rezim penindas. Nah, bagaimana kita meletakkan wacana Islam Liberal di Indonesia, untuk menggalang solidaritas antar iman dalam rangka melawan rezim penindas dari tokoh Islam Liberal itu sendiri.

Islam liberal memang menggemparkan. Hanya dalam waktu dua bulan saja, buku *Islam Liberal dan Fundamental: Sebuah Pertarungan Wacana,* yang ditulis Ulil Abshar Abdalla dkk telah cetak ulang kedua kali. Buku antologi seputar kontroversi tulisan Ulil Abshar Abdalla dkk yang dimuat di harian *Kompas* (2002) ini menjadi kajian memikat kaum santeri, terutama kaum mudanya.[18]

Gagasan pokok dari tulisan kontroversial itu adalah bahwa ajaran Islam, sebagaimana termaktub dalam kitab suci al-Quran atau yang di bawahnya, secara terus menerus harus selalu ditafsirkan sesuai perkembangan masyarakat di berbagai tempat dan masa. Keharusan ini bukan karena ajaran Islam perlu dicocok-cocokkan secara oportunistik dengan perkembangan situasi, melainkan karena tuntutan zaman dan kekhasan lokalitas memang secara objektif meniscayakan demikian.

Untuk itu Islam Liberal menawarkan: *Pertama,* penafsiran Islam yang non-literal, substansial, dan sesuai denyut nadi

---

[18] Baca, Ulil Abshar Abdalla dkk, *Islam Liberal dan Fundamental: Sebuah Pertarungan Wacana* (Yogyakarta: Elsaq, 2003); Akhmad Fauzi, "Shahih Islam Liberal," *islamlib.com,* 5/8/2003.

peradaban manusia yang sedang dan terus berubah. *Kedua*, penafsiran Islam yang dapat memisahkan mana unsur-unsur yang di dalamnya merupakan kreasi budaya setempat dan mana yang merupakan nilai fundamental Islam. Ketiga, umat Islam dapat lagi menganggap dirinya sebagai "masyarakat" atau "ummah" yang terpisah dari lainnya. Umat manusia adalah keluarga universal yang diikat oleh kemanusiaan itu sendiri. Kemanusiaan adalah nilai yang sejalan dengan Islam bukan berlawanan. Pada gilirannya manusia adalah sederajat sehingga larangan kawin karena beda agama, apalagi al-Quran tidak secara tegas melarang-nya, menjadi tidak relevan lagi dan harus diamendemen, karena tidak selaras dengan semangat kehadiran Islam. *Keempat*, perlunya pemisahan dalam struktur sosial untuk membedakan mana kekuasaan politik dan daerah mana yang menjadi wilayah agama. Kesimpulannya, umat Islam harus secara tegas membedakan antara Islam dan pemahaman Islam.

Menanggapi tawaran gagasan Islam Liberal tersebut, respon publik menjadi sangat beragam. Dalam hal ini, setidaknya ada tiga kelompok. Pertama, mereka yang mendukung gagasan Ulil sehingga secara afirmatif tulisan-tulisan mereka adalah upaya meneguhkan apa yang digagas oleh Ulil. Bagi mereka, apa yang digagas Ulil sebenarnya merupakan kebutuhan mendesak dalam upaya mengawinkan agama dengan realitas sosial, sehingga diperlukan penafsiran yang kontekstual dan membumi bukan sebatas romantisme masa lalu yang memabukkan.

Kelompok pertama adalah sebagian intelektual Muslim yang melihat gagasan Islam Liberal oleh Ulil Abshar dkk itu

hanya sekedar contoh dari suara anak muda cerdas yang jenuh dengan situasi kekinian di mana Islam tidak mampu lagi ditangkap substansi vitalnya oleh masyarakat. Artinya, bagaimana doktrin Islam dapat diterima dalam alam kehidupan yang sudah sangat berbeda dengan masa di mana Islam pertama kali diturunkan.

Kelompok kedua adalah para intelektual Muslim yang lain memberikan kritik konstruktif. Dalam hal ini minimal diwakili oleh Musthafa Bisri, Haidar Bagir dan A. Gaus AF. Perbedaannya, Musthafa Bisri mencoba mengkritisi dari metode penyampaian yang bernada "geram" dan hanya ingin membuat geram mereka yang dalam benak bayangan Ulil dianggap sebagai biang ketidakramahan Islam di Indonesia. Saking "semangatnya" kejernihan pikiran yang seharusnya dijadikan panduan, menjadi tidak nampak. Sehingga alih-alih memerangi umat beragama yang terlalu "bersemangat" tanpa disertai pemahaman yang cukup atas agamanya, di mana sering merugikan agama itu sendiri, justru Ulil bersikap sama, karena semangatnya memerangi: "musuh Islam" telah mengaburkan kejernihan pikiran yang ingin disampaikan. Sementara Gaus selain mengkritik dari lemparan ide yang dianggapnya "lama," juga sasaran kampanye. Baginya bukan saatnya lagi masyarakat, tetapi institusi atau otoritas yang membelenggu kebebasan masyarakat dalam menjalankan apa yang diyakini dari ajaran agamanya dan bukannya mengulang dari sisi wajib atau tidaknya karena itu daerah *fikih ijtihadi*. Dengan cara begitu apa yang menjadi obsesi Ulil cs akan terasa lebih berarti.

Sementara Haidar Bagir mempertanyakan dari sisi meto-

dologi berpikirnya. Tulisan Ulil soal Islam Liberal, demikian Haidar Bagir, adalah kuncup-kuncup pemikiran, sementara bagaimana kemudian kuncup itu dihasilkan kurang mendapat ruang pembahasan, sehingga banyak hal yang kemudian membutuhkan penjelasan secara metodologis. Haidar mencontohkan dalam masalah jilbab, jenggot, rajam dan jubah, Ulil mencampuradukkan antara isu-isu yang memperoleh dukungan petunjuk al-Quran yang dianggap valid adalah hal transmisi (*qath'iy wurud*) dan nyaris juga valid dalam hal makna (*qathi al dilalah*), seperti jilbab dan potong tangan, dengan dukungan-tekstualnya bersifat kontroversial seperti memelihara jenggot, memendekkan celana, bahkan hukum rajam (dalam al-Quran masalah rajam sama sekali tidak disinggung).

Kenyatannya, keharusan memakai Jilbab, dalam makna pakaian yang menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan secara eksplisit diungkap dalam al-Quran. Maka, jika hendak ditafsirkan secara lain, tentu diperlukan argumentasi yang meyakinkan. Begitu juga menisbahkan ketidaksempurnaan "Islam Madinah" kepada rasul tetap membutuhkan penjelasan lebih lanjut, karena rasul dipandu langsung oleh Allah. Kecuali nantinya dibedakan wilayah Muhammad sebagai rasul dan sebagai manusia biasa.

Kelompok ketiga, adalah kaum Islam Fundamental atau mereka yang dari awal telah membuat garis demarkasi dengan Islam Liberal. Sehingga secara tegas dan agak emosional mereka kemudian menolak dan cenderung menghakimi lontaran pemikiran Ulil tersebut. Apalagi kemudian dalam menanggapinya menggunakan metode atau pijakan

awal yang berbeda. Sehingga sulit rasanya keduanya bisa dipertemukan. Bahkan mereka berdua nyaris berseberangan. Sebagai contoh ketika mengomentari pernyataan Ulil bahwa "Tidak Ada Hukum Tuhan" mereka secara sporadis menghadapkannya dengan firman Allah:

> *"Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka ia termasuk orang yang Kafir."* (QS. al-Maidah: 91)
>
> *"Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu. Dan Allah Maha mengetahui lagi bijaksana"* (QS. al-Mumtahanah: 10)

Berbagai Respon atas Islam Liberal (JIL)

Jaringan Islam Liberal (JIL) merupakan kelompok atau komunitas intelektual Islam, - yang dalam beberapa hal dinilai kalangan Islam fundamental - memiliki pemikiran yang liberal dan sekuler atau bisa juga disebut berbeda. Terutama menyangkut pemikiran keislaman yang oleh kalangan Islam tradisional atau juga modern diyakini merupakan sesuatu yang sudah baku. Misalnya soal sekularisasi, otentisitas al-Quran ada tidaknya syariat Islam, termasuk juga soal teologi atau ketuhanan, JIL membongkar keyakinan yang telah diyakini selama ini oleh kaum Muslim pada umumnya dengan pemikiran pemikiran yang liberal.[19]

Adnin Armas (P*engaruh Kristen Orientalis terhadap Islam Liberal, 2004*) dari Islam Fundamental melihat, JIL terlalu lepas kendali. JIL dinilainya telah terpengaruh oleh pemikiran kaum Kristen dan orang orientalis yang memang telah lama mendorong sekularisasi. Bagaimanapun sekularisasi merupakan gagasan yang sentral bagi kelompok Islam

---

[19] Sufandi Maruih, "Dialog Dengan Aktivis JIL," *Harian Terbit,* 30 Januari 2004.

Liberal yang dikomandoi oleh Ulil Abshor Abdalla. Di mata Armas, pemikiran yang dikembangkan kelompok JIL ini memang telah lama dikembangkan oleh orang orientalis Barat dan misionaris Kristen yang kemudian kini dilakukan dalam proses sekularisasi dan liberalisasi Islam. Pembongkaran akar-akar ajaran Islam seperti dekonstruksi al-Quran dan tafsirnya merupakan pemikiran yang telah memasuki wilayah sensitif dalam keyakinan Islam. Dan JIL melakukan hal itu.

Dari hasil dialog yang dilakukan oleh Adnin Armas terhadap para aktivis JIL seperti Hamid Basyaib, Taufiq Adnan Amal dan juga Lutfi As Syaukanie, termasuk Ulil Abshar Abdalla dalam sebuah *mailing list*, Armas melihat agenda masa depan Islam Liberal JIL, teologi untuk negara modern, Islam dan keharusan sekularisasi serta pemahaman Islam *kaffah*, masih harus diperdebatkan dengan akhlak dan akal sehat secara kontinyu.

Soal Syariat Islam

Aktivis Islam Liberal Luthfi Assyaukanie meyakini tak ada Syariat Islam. Ia menganggap bahwa konsep Syariat Islam tidak ada. Itu, ungkapnya, adalah karangan orang-orang yang datang belakangan yang memiliki idealisasi yang berlebihan terhadap Islam (sama seperti negara Islam, ekonomi Islam, Bank Islam, dan lain-lain). Menurutnya, semua hukum yang diterapkan dalam masyarakat pada dasarnya adalah hukum positif. Termasuk hukum yang dibelakukan oleh Nabi. Kalaupun sumber konstitusinya berasal dari al-Quran, tambah Luthfi, hal ini karena Muhammad adalah seorang Rasul. Dan beliau tidak

memiliki konstitusi yang lebih baik, yang *available* pada saat itu selain al-Quran. Pada banyak kasus, delik-delik perundangan yang diterapkan Muhammad dan kawan kawannya malah mengambil semangat hukum adat (*urf*), termasuk dalam kasus rajam, potong anggota badan secara silang, pembakaran manusia (dalam kasus sodomi) dan denda (diyat, yang diambil dari kodifikasi Romawi dan Nabatean). Hanya sedikit yang beliau ambil dari al-Quran .

Mengapa? Luthfi mengemukakan, hal itu karena Rasul Muhammad sedang berinteraksi dengan manusia, dengan orang Yahudi dan orang-orang tribal Madinah. Selama hukum merupakan refleksi dari dinamika sebuah masyarakat, maka apa yang dipraktekkan oleh Nabi (yang Anda sebut *sunnah fi'liyyah*) adalah keputusan manusiawi belaka. Tidak ada sesuatu yang istimewa yang harus dianggap sebagai sesuatu yang 'unik' Islami.

Apanya yang unik? Ibadah haji saja, ungkap Luthfi, warisan jahiliyyah, zakat warisan Romawi yang direvisi, sholat warisan Daud yang dimodifikasi, dan dalam sistem ekonomi Rasulullah menyetujui semua praktek ekonomi orang-orang Romawi yang saat itu mendominasi hampir semua urusan administrasi dan tata negara, kecuali riba. (orang-orang Romawi atau siapa pun sesungguhnya akan berkeberatan jika riba yang dimaksud adalah transaksi merugikan orang lain).

Armas sangat sepakat dengan pendapat Luthfi Assyaukanie di atas. Namun Armas mengatakan Luthfi terlalu berani untuk menyimpulkan bahwa tidak ada Syariat Islam.

"Saya masih belum melihat kukuhnya argumentasi Anda. Tolong disebutkan referensi yang menyatakan syariat itu

tidak ada agar kita dapat mendiskusikan referensi itu secara mendalam. Saya melihat Rasulullah SAW bukan hanya manusia biasa seperti kita. Saya juga berpendapat bahwa haji tidak dapat dikatakan warisan jahiliyyah, zakat warisan Romawi yang direvisi, sholat warisan Daud yang dimodifikasi, dan sistem ekonomi Rasulullah SAW menyetujui semua sistem ekonomi Romawi, kecuali Riba," demikian Armas dalam esainya.

Armas menanggapi pendapat Luthfi dengan mengatakan, kalaupun ada sedikit persamaan, hal itu tidak berarti tidak adanya nilai fundamental dan nilai yang mendasar. Memang Rasulullah SAW juga membawa risalah yang pernah disampaikan nabi-nabi sebelumnya, sehingga muncul kemiripan. Tetapi tidak sama sekali menafikan perbedaan yang sangat mendasar. Oleh karena itu, Islam (konsep *syahadah* dan syariatnya) adalah agama yang baru sama sekali. Bukan tiruan yang diubah sesuaikan. Di sini Armas ingat usaha orientalis yang ingin mensosialisasikan ide seperti pengaruh Yahudi dan Kristen sedemikian besar sehingga Islam tidak bisa dianggap superioritas dari agama lain.

Ulil Abshar Abdalla sendiri optimis bahwa Islam yang diusungnya akan berkibar di masa depan. "Saya semakin optimis, bahwa Islam liberal ini akan menjadi mazhab ke depan yang segera akan menggantikan madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Ja'fary dan yang lain," kata Ulil.

Armas menanggapi pendapat Ulil itu dengan mengatakan pernyataan ini terlalu berani. Bagaimana Ulil yakin mengatakan hanya kepada sesuatu yang belum terjadi? Walau belum cukup dewasa sebagai sebuah gerakan, JIL secara

bertubi-tubi telah mendapatkan kritik dan sorotan amat tajam dari pelbagai pihak. Pandangan keagamaan yang liberal, pluralis, humanis dan demokratis yang disiarkan lewat berbagai media (seminar, *talk show*, tulisan dll) kerap menimbulkan resistensi dari para tokoh agama.[20] Bukan hanya kelompok fundamental radikal saja tetapi juga oleh ulama yang dikenal moderat. Oleh mereka, JIL dianggap (dituduh) menciptakan keresahan di tengah masyarakat muslim, melakukan kegiatan yang bermuara pada pendangkalan akidah, penghinaan agama Islam beserta doktrin keislaman dan semacamnya.[21]

Tidak hanya agamawan yang mengkritik JIL, para aktivis-intelektual juga banyak yang melontarkan kritik tajam pada komunitas yang dikoordinatori Ulil Abshar-Abdalla ini. Jika para agamawan mengkritik JIL lebih banyak karena faktor "teologis," maka aktivis intelektual mengkritik JIL lebih pada *platform*, visi, misi, dan agenda gerakannya.

Masdar Farid Mas'udi misalnya, mengkritik karena JIL

---

[20] Sumanto Al Qurtuby, "Quo Vadis Jaringan Islam Liberal?," *Islamlib.com,* 10 maret 2005. Jaringan Islam Liberal (JIL) pada 9 Maret 2005 genap berusia 4 tahun. Sebuah usia yang relatif belia untuk mengukur sebuah capaian prestasi. Memperingati kelahiran ke-4, sejak Februari 2005, mengadakan serangkaian kegiatan seperti SWOT, pameran buku, diskusi, pemutaran berbagai film bernuansa kritik agama seperti *Osama, The Magdalene Sister, Monsieur Ibrahim, The Afghan Alphabet, Flying to the Heaven, The Believer,* dll.

Di antara kegiatan JIL yang sangat penting adalah SWOT akhir Februari 2005 di Bogor. Dalam pertemuan yang dihadiri para pionir dan mentor JIL ini (Sumanto Al Qurtuby diundang sebagai "peninjau bersama Fathi Aris Omar, aktivis-intelektual dari Malaysia), dibahas beberapa agenda penting mengenai rencana ke depan, di samping tentu saja sebagai ajang evaluasi dan kritik internal sejak dideklarasikan 4 tahun silam.

[21] Sudah banyak buku yang ditulis khusus untuk mendiskreditkan JIL seperti *Bahaya Islam Liberal* yang ditulis Hartono Ahmad Jaiz, mantan wartawan, *Pengaruh Kristen-Orientalis terhadap Islam Liberal* (karya Adnin Armas). Juga *Islam Liberal: Sejarah, Konsepsi, Penyimpangan dan Jawabannya* (buku karya Adian Husaini) dan lain-lain. Ini belum termasuk berbagai tulisan di media massa.

dianggap terlalu banyak menekankan pada aspek wacana dan persoalan "remeh-temeh" keislaman lain (jilbab, jenggot, cadar dll) ketimbang pada persoalan kebutuhan dasar yang dihadapi umat Islam seperti pengangguran, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan dan lain-lain. Atas dasar ini, maka Masdar membentuk Jaringan Islam Emansipatoris yang tujuan utamanya mendialogkan Islam dengan problem *real* yang dihadapi umat. Ada juga kaum aktivis intelektual seperti Bisri Effendy, Ahmad Baso dan "jaringan Islam postra" (post-traditional) mengkritik JIL karena dianggap mengabaikan tradisi lokal yang begitu melimpah di Indonesia. Menurut mereka, tradisi, kultur dan kebudayaan lokal adalah bagian dari *local wisdom* (kearifan lokal) yang sudah semestinya harus ditempatkan secara proporsional dalam wacana keislaman.

Tradisi lokal-termasuk Islam lokal atau agama lokal lain-harus dibela sebab banyak kelompok keislaman yang "atas nama pemurnian ajaran Islam" kemudian melakukan tindakan pemaksaan teologis kepada mereka. Hal ini bertentangan dengan wawasan inklusif dan watak demokratis yang dikembangkan Islam.

Selain dua kelompok di atas, ada lagi para aktivis-intelektual (terutama mazhab Jogya dengan LKiS sebagai "sponsor utama" dan dalam hal tertentu keislaman yang dikembangkan *The* (*Abdurrahman Wahid Institute*) yang mengkritik JIL karena dipandang terlalu "ke-Barat-Barat-an," corong modernisme, mengembangkan wawasan sekularisme, kapitalisme global dan lain-lain. Menurut para aktivis Islam di Wahid Institute, wajah Islam yang mestinya ditampilkan adalah "Islam Kiri" sebagai kritik atas hegemoni kebu-

dayaan Barat yang mencengkeram di hampir semua kawasan Islam bukan malah "berlindung" di balik jubah modernisme Barat. Masih banyak lagi kritikan yang dialamatkan ke JIL.

Fenomena ini sekaligus menepis anggapan Prof. Abu Su'ud (*Suara Merdeka*, 4/3/2005), yang menganggap JIL ini sebagai wadah anak muda NU liberal. Harap diketahui, mungkin hanya 20% para aktivis JIL yang berlatar belakang NU, selebihnya adalah para aktivis intelektual Islam modernis yang tidak ada hubungannya dengan NU. Mereka tergabung dalam "sindikat JIL" karena memiliki wawasan dan semangat yang sama untuk membangun peradaban Islam yang gemilang di masa depan sekaligus mengikis gerakan fundamentalisme agama yang menyesatkan.

Selain itu, para aktivis-intelektual NU-meskipun berpandangan "liberal"-tidak mesti tergabung dalam sindikat JIL, sebab mereka mempunyai wadah sendiri seperti Jaringan Islam Emansipatoris (JIE), Post-Tradisionalisme, Islam Kiri dan lain-lain. Dalam beberapa kesempatan, kaum muda NU ini berdebat sengit mengenai agenda gerakan keislaman dan corak keislaman yang sesuai dengan semangat zaman dan tidak jarang di antara mereka terjadi perbedaan yang sangat tajam.

Respon Islam Fundamental atas Islam Liberal

Lebih jauh lagi, kalangan Islam Fundamental melihat, firqah *halikah* adalah firqah *Liberaliyah. Liberaliyah* adalah sebuah paham yang berkembang di Barat dan memiliki asumsi, teori dan pandangan hidup yang berbeda, yang keluar atau menyimpang darinya sehingga termasuk firqah-firqah yang

halikah (kelompok yang binasa).[22]

Dalam tesisnya yang berjudul "*Pemikiran Politik Barat*" Ahmad Suhelmi, MA PhD menjelaskan prinsip-prinsip pemikiran ini.[23] *Pertama*, prinsip kebebasan individual. *Kedua*, prinsip kontrak sosial. *Ketiga*, prinsip masyarakat pasar bebas. *Keempat*, meyakini eksistansi Pluralitas Sosio - Kultural dan Politik Masyarakat.

Menurut para aktivis Islam fundamental, Islam dan Liberal adalah dua istilah yang antagonis, saling berhadap-hadapan tidak mungkin bisa bertemu. Namun demikian ada sekelompok orang di Indonesia yang rela menamakan dirinya dengan Jaringan Islam Liberal (JIL). Suatu penamaan yang "pas" dengan orang-orangnya atau pikiran-pikiran dan agendanya. Islam adalah pengakuan bahwa apa yang mereka suarakan adalah *haqq* tetapi pada hakikatnya suara mereka itu adalab bathil karena liberal tidak sesuai dengan Islam yang diwahyukan dan yang disampaikan oleh Rasul Muhammad, akan tetapi yang mereka suarakan adalah bid'ah yang ditawarkan oleh orang-orang yang ingkar

[22] Agus Hasan Bashori, "Bahaya Islam Liberal", *Risalah,* 22 April 2004. Secara universal, ummat Islam memandang Islam sebagai *dien al-haq* yang diwahyukan oleh Allah ta'ala kepada Rasul-Nya yang terakhir Muhammad *"Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkan-Nya terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi."* (QS. 48:28). Sebagai rahmat bagi semesta alam *"Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam."* (QS. 21:107) Dan sebagai satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah ta'ala*:"Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam"* (QS. 3:19) Islam adalah agama yang utuh yang mempunyai akar, dimensi, sumber dan pokok-pokok ajarannya sendiri. Siapa yang konsisten dengannya maka ia termasuk *Al-Jama'ah atau Firqah Najiyah* (kelompok yang selamat). Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat* (Jakarta: Gramedia, 2001).

[23] "Gado-Gado Islam Liberal," *Sabili, No. 15, Thn IX/2001.*

kepada Muhammad Rasulullah. [24]

Kalangan Islam Fundamental menyikapi Islam Liberal melalui tatapan mereka atas visi, misi agenda dan bahaya mereka, seperti terurai di bawah ini.

Sanad (asal-usul) *Firqah* Liberal

Islam liberal menurut Charless Kurzman muncul sekitar abad ke-18 di kala kerajaan Turki Utsmani Dinasti Shafawi dan Dinasti Mughal tengah berada di gerbang keruntuhan. Pada saat itu tampillah para ulama untuk mengadakan gerakan permurnian, kembali kepada al-Quran dan sunnah. Pada saat ini muncullah cikal bakal paham liberal awal melalui Syah Waliyullah (India, 1703-1762), menurut-nya Islam harus mengikuti adat lokal suatu tempat sesuai dengan kebutuhan penduduknya. Hal ini juga terjadi di kalangan Syi'ah. Ada Muhammad Bihbihani (Iran, 1790) mulai berani mendobrak pintu ijtihad dan membukanya lebar-lebar.

Ide ini terus bergulir. Rifa'ah Rafi' al-Tahtawi (Mesir, 1801-1873) memasukkan unsur-unsur Eropa dalam pendidikan Islam. Shihabuddin Marjani (Rusia, 1818-1889) dan Ahmad Makhdun (Bukhara, 1827-1897) memasukkan mata pelajaran sekuler ke dalam kurikulum pendidikan Islam (Charless Kurzman: xx-xxiii)

Di India muncul Sir Sayyid Ahmad Khan (1817) yang membujuk kaum muslimin agar mengambil kebijakan bekerja sama dengan penjajah Inggris. Pada tahun 1877 ia membuka

[24] Soal ini, artikulasi para aktivis fundamental di radio dan media cetak mudah didengar dan diketemukan.

suatu kolese yang kemudian menjadi Universitas Aligarh (1920). Sementara Amir Ali (1879-1928) melalui buku *The Spirit of Islam* berusaha mewujudkan seluruh nilai liberal yang dipuja di Inggris pada masa Ratu Victoria. Amir Ali memandang bahwa Nabi Muhammad adalah Pelopor Agung Rasionalisme. (William Montgomery Waft: 132).

Di Mesir muncullah M. Abduh (1849-1905) yang banyak mengadopsi pemikiran mu'tazilah berusaha menafsirkan Islam dengan cara yang bebas dari pengaruh salaf. Lalu muncul Qasim Amin (185-1908) kaki tangan Eropa dan pelopor emansipasi wanita, penulis buku *Tahrir al-Mar'ah*. Lalu muncul Ali Abd. Raziq (1888-1966). Lalu yang mendobrak sistem khilafah, menurutnya Islam tidak memiliki dimensi politik karena Muhammad hanyalah pemimpin agama. Lalu diteruskan oleh Muhammad Khalafullah (1926-1997) yang mengatakan bahwa yang dikehendaki oleh al-Quran hanyalah sistem demokrasi tidak yang lain, (Charless: xxi, l8). Di Aljazair muncul Muhammad Arkoun (lahir 1928) yang menetap di Perancis, ia menggagas tafsir al-Quran model baru yang didasarkan pada berbagai disiplin Barat seperti dalam lapangan semiotika (ilmu tentang fenomena tanda), antropologi, filsafat dan linguistik. Intinya, ia ingin menelaah Islam berdasarkan ilmu-ilmu pengetahuan Barat modern. Dan ingin mempersatukan keanekaragaman pemikiran Islam dengan keanekaragaman pemikiran di luar Islam.[25]

Di Pakistan muncul Fazlur Rahman (lahir 1919) yang menetap di Amerika dan menjadi guru besar di Universitas

---

[25] Mu'adz Muhammad Arkoun, "Anggitan Tentang Cara-Cara Tafsir Al-Qur'an," *Jurnal Salam,* vol.3 No. 1/2000, h.100-111.

Chicago. Ia menggagas tafsir kontekstual, satu-satunya model tafsir yang adil dan terbaik menurutnya. Ia mengatakan al-Quran itu mengandung dua aspek: legal spesifik dan ideal moral, yang dituju oleh al-Quran adalah ideal moralnya karena itu yang lebih pantas untuk diterapkan. (Fazhul Rahman: 21; William M. Watt: 142-143).[26] Di Indonesia muncul Nurcholis Madjid (murid dari Fazlur Rahman di Chicago) yang memelopori gerakan *firqah* liberal bersama dengan Djohan Efendi, Ahmad Wahid dan Abdurrahman Wahid.[27]

Nurcholish Madjid telah memulai gagasan pembaruannya sejak tahun 1970-an. Pada saat itu Cak Nur telah menyuarakan pluralisme agama dengan menyatakan: "Rasanya toleransi agama hanya akan tumbuh di atas dasar paham kenisbian (relativisme) bentukbentuk formal agama ini dan pengakuan bersama akan kemutlakan suatu nilai yang universal, yang mengarah kepada setiap manusia, yang kiranya merupakan inti setiap agama" Lalu sekarang muncullah apa yang disebut JIL (Jaringan Islam Liberal) yang mengusung ide-ide Nurcholish Madjid dan para pemikir-pemikir lain yang cocok dengan pikirannya.

Demikian sanad Islam Liberal menurut Hamilton Gibb, William Montgomery Watt, Charless Kurzman dan lain-lain. Dalam konteks ini, harus dicatat bahwa orientalis Barat tidak semuanya menyudutkan Islam dengan mengatakan Islam adalah agama yang tetap, tak berubah atau meragukan al-Quran sebagai kalam Tuhan. Montgomery Watt

---

[26] Mu'adz Muhammad Arkoun, "Anggitan Tentang Cara-Cara Tafsir Al-Qur'an."

[27] Adian Husaini dalam makalah, *Islam Liberal dan misinya,* menukil dari Greg Barton, *Sabili* no. 5: 88.

misalnya, melihat bahwa al-Quran adalah sebuah kebenaran. Sehingga alih-alih mengikuti pandangan kaum konservatif Kristen yang menganggap bahwa al-Quran adalah replikasi dari kitab-kitab suci umat terdahulu, Watt justru membangun mazhabnya sendiri dengan mengatakan bahwa al-Quran adalah benar dari Tuhan dan ia merepresentasikan orisinalitasnya sendiri. Untuk membuktikan pandangannya, Watt menampilkan bukti bahwa pada ayat-ayat Makiyyah, selalu terdapat poin-poin berikut ini: 1) bahwa Tuhan adalah Maha Kuasa dan Pengasih; 2) bahwa manusia akan menghadap Tuhan pada hari akhir nanti untuk mendapatkan pengadilan atas perbuatannya; 3) Manusia harus tunduk pada Tuhan dan menyembah-Nya; 4) manusia harus mau mengeluarkan zakat dan menjalankan kebenaran, serta 5) Muhammad telah diutus oleh Allah. Adalah benar semata, kata Watt, bahwa empat poin di atas juga telah disebutkan dalam Bibel, tetapi poin terakhir yang menyatakan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, menunjukkan bahwa al-Quran memiliki orisinalitas yang terpisah dari wahyu yang terdapat dalam agama Yahudi maupun Kristen.[28] Tak kurang dari Watt, Hans Kung juga menyatakan bahwa al-Quran telah menyediakan umat Islam dengan pemikiran tentang kewajiban moral, dinamika eksternal dan kedalaman religiusnya. Kenyataan ini terjadi, karena umat Islam meyakini al-Quran sebagai kitab suci, dan lebih dari itu mereka memahaminya bukan sebagai perkataan manusia, melainkan perkataan Tuhan yang suci.

[28] Baca tulisan Pradana Boy ZTF, "Orientalisme dan Dialog AntarKitab," *Paper* (Canberra: ANU, 2004).

Misi Firqah Liberal

Dalam persepsi Islam garis keras, misi *Firqah* Liberal adalah untuk menghadang (tepatnya: menghancurkan) gerakan Islam Fundamental (www. islamlib.com). Mereka menulis: "sudah tentu, jika tidak ada upaya-upaya untuk mencegah dominannya pandangan keagamaan yang militan itu, boleh jadi, dalam waktu yang panjang, pandangan-pandangan kelompok keagamaan yang militan ini bisa menjadi dominan. Hal ini jika benar terjadi, akan mempunyai akibat buruk buat usaha memantapkan demokratisasi di Indonesia. Sebab pandangan keagamaan yang militan biasanya menimbulkan ketegangan antar kelompok-kelompok agama yang ada. Sebut saja antara Islam dan Kristen. Pandangan-pandangan keagamaan yang terbuka (inklusif) plural, dan humanis adalah salah satu nilai-nilai pokok yang mendasari suatu kehidupan yang demokratis."

Firqah liberal menerapkan lima ciri-ciri yang menjadi identitas Islam fundamental,[29] yaitu:

1. Mereka yang digerakkan oleh kebencian yang mendalam terhadap Barat
2. Mereka yang bertekad mengembalikan peradaban Islam masa lalu dengan membangkitkan kembali masa lalu itu
3. Mereka yang bertujuan menerapkan syariat Islam
4. Mereka yang mempropagandakan bahwa Islam adalah agama dan negara,
5. Mereka menjadikan masa lalu itu sebagai penuntun (petunjuk) untuk masa depan.

[29] Demikian yang dilontarkan mantan Presiden Amerika Serikat, Richard Nixon sebagaimana dikutip Muhammad Imarah.

Agenda dan Gagasan *Firqah* Liberal

Kalangan Islam fundamental melihat dalam tulisan berjudul "Empat Agenda Islam Yang Membebaskan" yang ditulis oleh Luthfie Asyaukanie salah seorang penggagas JIL yang juga peneliti Freedom Institute[30] memperkenalkan empat agenda Islam Liberal.

Pertama, agenda politik. Menurutnya urusan negara adalah murni urusan dunia, sistem kerajaan dan parlementer (demokrasi) sama saja. *Kedua,* mengangkat kehidupan antara agama. Menurutnya perlu pencarian teologi pluralisme mengingat semakin majemuknya kehidupan bermasyarakat di negeri-negeri Islam. *Ketiga,* emansipasi wanita dan, *Keempat,* kebebasan berpendapat (secara mutlak).

Sementara dari sumber lain kita dapatkan empat agenda mereka[31] adalah:

1. Pentingnya konstekstualisasi ijtihad
2. Komitmen terhadap rasionalitas dan pembaruan
3. Penerimaan terhadap pluralisme sosial dan pluralisme agama-agama

---

[30] Akan tetapi menurut para Islamis fundamental, pokok pikiran mereka sebenarnya lebih tua dari itu. Paham mereka yang rasionalis dalam beragama kembali pada guru besar kesesatan yaitu *Iblis Ia'natullah 'alaih.* (Ali Ibn Abi aI-'Izz: 395) karena itu JIL bisa diplesetkan dengan *"Jalan Iblis Laknat".* Sedang paham sekuleris dalam bermasyarakat dan bernegara berakhir sanadnya pada masyarakat Eropa yang mendobrak tokoh-tokoh gereja yang melahirkan moto *Render Unto The Caesar what The Caesar's and to the God what the God's* (Serahkan apa yang menjadi hak Kaisar kepada kaisar dan apa yang menjadi hak Tuhan kepada Tuhan). Karena itu di kalangan Islamis fundamental ada yang menyatakan: "Cak Nur meminjam pendekatan Kristen yang membidani lahirnya peradaban barat" Sedangkan paham pluralisme yang diusung Islam liberal bersambung sanadnya kepada lbn Arabi (468-543 H) yang merekomendasikan keimanan Fir'aun dan mengunggulkannya atas nabi Musa 'alaihis salam.

[31] Greg Barton, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Antara Paramadina, 1999).

4. Permisahan agama dari partai politik dan adanya posisi non-sektarian negara

Kelompok fundamental menilai, paham Islam liberal membuat agama Islam dan agama lain sama saja. Persepsi aktivis Islam Fundamental menegaskan bahwa hal itu bertentangan dengan Islam, yang menurut mereka inilah yang diinginkan oleh orang-orang yahudi dan orang-orang Nasrani. Orang-orang Yahudi dan Nasrani selalu meng-gaungkan kesesatan ini khusus di kalangan akademisi-akademisi dan di kalangan umat Islam. Karena itu kelompok fundamental mengartikulasikan apa yang mereka sebut bahaya Firqah *Liberal,* yakni:

1. Mereka tidak menyuarakan Islam yang diridhai oleh Allah, tetapi menyuarakan pemikiranpemikiran yang diridhai oleh Iblis, Barat dan pan Thaghut lainnya.
2. Mereka lebih menyukai atribut-atribut fasik dari pada gelar-gelar keimanan karena itu mereka benci kepada kata-kata jihad, sunnah, salaf dan lain-lainnya dan mereka rela menyebut Islamnya dengan Islam Liberal. Allah berfirman:

   "*Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman*". (QS. Al-Hujurat 11)
3. Mereka beriman kepada sebagian kandungan al-Quran dan meragukan kemudian menolak sebagian yang lain, supaya penolakan mereka terkesan sopan dan ilmiah mereka menciptakan "jalan baru" dalam menafsiri al-Quran . Mereka menyebutnya dengan Tafsir Kontekstual, Tafsir Hermeneutik, Tafsir Kritis dan Tafsir Liberal.

   Sebagai contoh, Musthofa Mahmud dalam kitabnya *Al-Tafsir Al-Ashri Li al-Quran* menafsiri ayat *Faqtho'u aidiya-*

humaa dengan "maka putuslah usaha mencuri mereka dengan memberi santunan dan mencukupi kebutuhannya." (Syeikh Mansyhur Hasan Salman, di Surabaya, Senin 4 Muharram 1423).

Dan tafsir seperti ini juga diikuti juga di Indonesia. Maka pantaslah mengapa Rasulullah bersabda:

"Yang paling saya khawatirkan atas adalah orang munafik yang pandai bicara. Dia membantah dengan al-Quran ."

Orang-orang yang seperti inilah yang merusak agama ini. Mereka mengklaim diri mereka sebagai pembaharu Islam padahal merekalah perusak Islam. Mereka mengajak kepada kepada al-Quran padahal merekalah yang mencampakkan al-Quran. Mengapa demikian? Karena mereka bodoh terhadap sunnah.

4. Mereka menolak paradigma keilmuwan dan syarat-syarat ijtihad yang ada dalam Islam, karena mereka merasa rendah berhadapan dengan budaya barat, maka mereka melihat Islam dengan hati dan otak orang Barat.
5. Mereka tidak mengikuti jalan yang ditempuh oleh Nabi, para sahabatnya dan seluruh orang-orang mukmin. Bagi mereka pemahaman yang hanya mengandalkan pada ketentuan teks-teks normatif agama serta pada bentuk-bentuk formalisme sejarah Islam paling awal adalah kurang memadai dan agama ini akan menjadi agama yang ahistoris dan eksklusif.[32] Mereka lupa bahwa sikap seperti inilah yang diancam oleh Allah:

   "Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mu'min, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan

[32] Syamsul Arifin, "Menakar Otentitas Islam Liberal," *Jawa Pos,* 1/2/2000.

yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruknya tempat kembali." (QS. an-Nisa: 115).

6. Mereka tidak memiliki ulama dan tidak percaya kepada ilmu ulama. Mereka lebih percaya kepada nafsunya sendiri, sebab mereka mengaku sebagai "pembaharu" bahkan "super pembaharu" yaitu neo modernis. Allah berfirman:

   Dan bila dikatakan kepada mereka, "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan." Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar. Apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman," mereka menjawab, "Akan berimankah kami sebagaimana orang-orang bodoh itu telah beriman." Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak tahu.(QS. al-Baqarah: 11-13).

7. Kesamaan cita-cita mereka dengan cita-cita Amerika, yaitu menjadikan Turki sebagai model bagi seluruh negara Islam. Prof. Dr. John L. Esposito menegaskan bahwa Amerika tidak akan rela sebelum seluruh negara-negara Islam tampil seperti Turki.
8. Mereka memecah belah umat Islam karena gagasan mereka adalah bid'ah dan setiap bid'ah pasti memecah belah.
9. Mereka memiliki basis pendidikan yang banyak melahirkan pemikir-pemikir liberal, memiliki media yang cukup dan jaringan internasional dan dana yang cukup.
10. Mereka tidak memiliki manhaj yang jelas sehingga gagasannya terkesan "asbun" dan asal "comot." Lihat saja

buku Charless Kurzman, Rasyid Ridha yang salafi (revivalis) itupun dimasukkan ke dalam kelompok liberal, begitu pula Muhammad Nashir (tokoh Masyumi) dan Yusuf Qardhawi (tokoh Ihwan al-Muslimin). Bahayanya adalah mereka tidak bisa diam, padahal diam mereka adalab emas, memang begitu berat jihad menahan lisan. Tidak akan mampu melakukannya kecuali seorang yang mukmin.

"Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah ia mengucapkan yang baik atau hendaklah ia diam." (HR. Bukhari dan Muslim) (Lihat Husain al-Uwaisyah: 9 dan seterusnya).

Ahlul batil selain menghimpun kekuatan untuk memusuhi *ahlul haq*. Allah ta'ala berfirman:

*"Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka pelindung bagi sebagian yang lain. Jika kamu (hai para muslimin) tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar." (*QS. al-Anfaal 73).

Sementara itu Ustadz Hartono Ahmad Jaiz menyebut mereka berbahaya sebab mereka itu "sederhana" tidak memiliki landasan keilmuwan yang kuat dan tidak memiliki aqidah yang mapan. (*Bahaya Islam Liberal*, 2004)

Dihadapkan kepada kompleksitas di atas, kalangan Islam Fundamental tetap tegas menolak gagasan Islam Liberal, termasuk soal pluralisme. Dalam persepsi mereka, pluralisme ini memang sesuatu faham yang bertentangan dengan Islam bukan hanya karena disebutkan di dalam al-Quran surat Al-Baqarah ayat 120 dan yang lainnya, tapi juga karena pluralisme itu, menurut Islam Fundamental, intinya teologi

yang dibagi menjadi tiga: [33]

- Ada teologi eksklusif, yaitu orang yang hanya memandang agamanya saja yang benar, di luar agamanya salah, tidak ada kebenaran tidak ada keselamatan.
- Kemudian meningkat lagi teologi inklusif yaitu orang yang berpandangan agamanya benar agama orang lain juga benar, ada kebenaran tetapi agamanya masih lebih benar sehingga dia masih mengikuti agamanya. Ini inklusif tetapi sudah terbuka wawasannya.
- Lalu teologi pluralis yang tertinggi, memandang bahwasanya kebenaran itu di mana-mana agamanya benar dan agama yang lain juga benar dan dia ikut aktif terlibat di dalam aktifitas agama orang lain juga. Itu benar-benar pluralis sejati.

Kalangan fundamental menuding barisan liberal membuat barisan-barisan khusus untuk misi meliberalisasi dan menyebarkan pahamnya, sementara yang zionis menyebarkan paham zionisnya. Bukan menarik orangnya ke dalam zionis tetapi bagaimana orang berkhidmat kepada zionisnya dan tunduk patuh kepada zionisnya.[34]

---

34. Agus Hasan Bashori, "Bahaya Islam Liberal."

34. Agus Hasan Bashori, "Bahaya Islam Liberal." Intinya untuk mengetahui secara detil silakan dibaca beberapa buku yang sudah membahas masalah ini:

- Bahaya Islam Liberal oleh Hartono Ahmad Jaiz.
- Islam Liberal oleh Adian Husaini.
- Melawan Konspirasi JIL, Fausan Anshory.
- Tentang Islam Liberal oleh Daud Rasyid.
- Pengaruh Kristen Orientalis Terhadap Islam Liberal oleh Adnin Armas.
- Menentang Gerakan Kontekstualisasi Al Quran terbitan Pustaka As Sunnah Surabaya.
- Menangkal Islam Liberal dan Fiqh Lintas Agama, Hartono Ahmad Jaiz .

Dalam soal terorisme yang dewasa ini banyak menyudutkan citra Islam, kalangan JIL memiliki pandangan paralel dengan AS/Barat dalam melihat Islam Fundamental yang sering dikaitkan dengan terorisme itu. Tindakan "anarkisme" dengan gerakan Islam memiliki ciri-ciri khusus sebagaimana ditulis oleh mantan Presiden AS Ricard Nixon dalam *Seize The Moment* yang dikutip oleh Muhammad Imarah dalam *Fundamentalisme dalam Perspektif Pemikiran Barat dan Islam* (1999:35), bahwa "Islam Fundamental" adalah mereka yang mempunyai ciri gerakan: 1) Anti peradaban Barat, 2) Ingin menerapkan syariat Islam, 3) Akan membangun peradaban Islam, 4) Tidak memisahkan antara Islam dan negara, dan 5) Menjadikan para pendahulu (salaf) sebagai panduan masa depan (khalaf). Kelima ciri inilah yang dijadikan tolok ukur untuk menilai apakah gerakan Islam itu pantas disebut "fundamentalis" atau tidak.

Kritik atas Islam Liberal Berirama Ancaman Mati

> *"Pada akhir zaman, akan muncul sekelompok anak muda usia yang bodoh akalnya. Mereka berkata menggunakan firman Allah, padahal mereka telah keluar dari Islam, bagai keluarnya anak panah dari busurnya. Iman mereka tak melewati tenggorokan. Di mana pun kalian jumpai mereka, bunuhlah mereka. Orang yang membunuh mereka akan mendapat pahala di hari kiamat."*[35]

- Jurnal *Islamia* yang digarap para aktivis pemikiran Islam yang tergabung dalam INSIS yang belajar di Malaysia.

[35] Kutipan bernada provokatif di atas terpampang sebagai moto sebuah buku mungil yang judulnya menyiratkan peringatan keras: *Bahaya Islam Liberal*. Buku saku setebal 100 halaman itu ditulis Hartono Ahmad Jaiz, 50 tahun, seorang mantan wartawan. Meski kecil, buku tersebut bisa berdampak besar karena mengandung pesan "penghilangan nyawa" terhadap aktivis Islam Liberal. Hal semacam ini sangat mengerikan, seyogianya tak perlu terjadi jika ada kedewasaan dan kearifan para

Motto itu bukan sembarang untaian kata. Melainkan terjemahan hadis Nabi Muhammad SAW, yang tersimpan dalam kitab *Al-Jami' al-Shahih* karya Imam Bukhari. Mayoritas kaum muslim menilai hadis hasil seleksi Bukhari memiliki kadar kesahihan amat tinggi. Jadi, perintah membunuh dalam hadis itu bisa dipahami sebagai kewajiban *syar'i* (bermuatan agama) yang bernilai ibadah.

Buku itu terbit Januari 2002, bersamaan dengan maraknya pemberitaan tentang komunitas anak muda yang menamakan diri Jaringan Islam Liberal (JIL). Penempatan hadis riwayat Ali bin Abi Thalib tersebut sebagai motto buku mengundang pertanyaan: apakah Islam liberal yang dikupas buku itu, sudah masuk kriteria kelompok yang dimaksud isi hadis, sehingga wajib dibunuh?

Sang penulis tak menjawab ya atau tidak. “Itu harus diputuskan lewat mekanisme hukum,” ujar Hartono. Hadis tersebut, kata alumnus IAIN Yogyakarta ini, bersifat umum. Karena itu, Hartono menyadari, penerapannya bisa menimbulkan fitnah dan perselisihan. Maka perlu pelibatan aparat hukum untuk meredam sengketa. Sesuai dengan kaidah fikih: *hukmu al-hakim yarfa'u al-khilaf* (putusan pihak berwenang berfungsi menyudahi polemik).

Pada akhir buku, Hartono menyerukan pengadilan atas Islam Liberal yang ia nilai “jauh dari kebenaran”. Namun, secara tersirat, ia tetap menyarankan sanksi bunuh, ketika menutup buku dengan menampilkan kisah Umar bin Khattab yang membunuh orang yang menolak berhukum dengan syariat Islam. Di antara dosa JIL, di mata Hartono, juga menolak syariat Islam.

---

aktivis Islam Fundamental dalam menyikapi Islam Liberal.

Ibn Hajar al-Asqalani, dalam bukunya, *Fathul Bari* --sebuah elaborasi (*syarah*) atas Shahih Bukhari-- menjelaskan, hadis tersebut diwartakan Ali ketika hendak menumpas pembangkangan kaum Khawarij (Haruriyah). Yakni kelompok yang sangat literal memahami al-Quran dan menilai Ali telah kafir.

Khawarij dikenal mudah mengafirkan sesama muslim, dan tak segan membunuh muslim yang mereka vonis kafir. Komunitas jenis inilah yang dimaksud hadis tersebut saat itu. Pada awal 2002, Hartono memakai hadis itu untuk buku tentang komunitas liberal, bukan kelompok literal sejenis Khawarij.

Dengan demikian, berita gempar fatwa mati yang pernah menimpa JIL pada akhir 2002 telah mendapat pengantar "akademik" dari buku Hartono, 11 bulan sebelumnya. Bila di awal 2002 Hartono mewacanakan eksekusi bunuh terhadap Islam liberal, menjelang akhir tahun, lontaran itu mengkristal dalam bentuk "fatwa mati".

Sejumlah agamawan yang tergabung dalam Forum Ulama Umat Indonesia (FUUI), pada 30 November 2002, berkumpul di Masjid Al-Fajar, Bandung, dan mengeluarkan pernyataan berisi fatwa itu. Pernyataan FUUI berbunyi, "Menuntut aparat penegak hukum untuk membongkar jaringan dan kegiatan yang secara sistematis dan masif melakukan penghinaan terhadap Allah, Rasulullah, umat Islam, dan para ulama."

Mereka terpicu tulisan provokatif Ulil Abshar Abdalla, Koordinator JIL, di *Kompas*, 18 November 2002, berjudul "Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam," yang dirujuk sebagai contoh penghinaan agama. FUUI menyatakan,

"Menurut syariat Islam, oknum yang menghina dan memutarbalikkan kebenaran agama dapat diancam dengan hukuman mati."

Menurut Ketua FUUI, KH Athian Ali, fatwanya tak hanya untuk Ulil. "Terlalu kecil jika kami hanya menyorot Ulil. Kami ingin membongkar motif di balik Jaringan Islam Liberal yang dia pimpin," kata Athian. Sepanjang tahun 2002, karena itu, menjadi tahun seruan kematian atas JIL.

Fatwa itu menyulut kontroversi luas. Sikap FUUI menuai banyak kecaman. Inti kecaman itu: berbeda pendapat boleh, tapi jangan menebar maut. Cukuplah sejarah memberi pelajaran pahit: dari Al-Hallaj (Baghdad), Siti Jenar (Demak), Hamzah Fansuri (Aceh), Farag Faudah (Mesir), sampai Mahmoud Taha (Sudan) yang kehilangan nyawa karena pikiran berbeda.

Akhirnya FUUI mengklarifikasi: mereka tak mengeluarkan "fatwa mati". "Kami hanya menuntut proses hukum," kata Athian. Ia membuktikan ucapannya dengan mengadukan Ulil ke Mabes Polri, sepekan kemudian. FUUI memang tak menyebut kata "fatwa mati", tapi Athian menyatakan, dasar hukum sikapnya terhadap JIL sama dengan sikap kepada Pendeta Suradi. Pada Februari 2001, FUUI terang-terangan memakai kata "fatwa mati" untuk Suradi.

Komunitas macam apa sebenarnya JIL ini? Mengapa sampai ada kelompok lain yang menyerukan kematiannya? Setarakah "bahaya Islam Liberal" dengan jargon "bahaya narkoba" atau "bahaya laten komunis" yang pelakunya juga kerap diganjar hukuman mati? *GATRA* pernah dua kali menggali tuntas komunitas ini: *Laporan Khusus* Islam "Liberal Hadang Fundamentalisme" (8 Desember 2001) dan

Laporan Utama "Fatwa Mati Islam Liberal" (21 Desember 2002). Anggapan dan ancaman terhadap JIL itu agaknya berlebihan.

Respon Islam Liberal Terhadap Islam Fundamental[36]

Dalam sebuah diskusi Islam Liberal[37] di Utan Kayu, budayawan Goenawan Mohamad mengatakan setiap agama itu mulai dengan semangat yang membebaskan. Mula-mula merelatifkan hukum-hukum. Tapi ketika menjadi organisasi kemudian menjadi konservatif sehingga timbul inkuisisi. Tapi ada juga satu unsur yang lain, mungkin kecemasan. "Saya kira di kalangan massa Islam, di banyak negara, kecemasan itu begitu kuat, sehingga mungkin perlu pegangan yang kuat. Juga kecemasan akan inkuisisi di Spanyol ketika orang Kristen baru saja mengalahkan orang Islam," kata Goenawan[38].

Ia menambahkan, mungkin menarik, seperti yang sekarang timbul, bagaimana Islam yang tumbuh di kalangan orang Islam Eropa yang hidupnya enak, dan melihat bahwa negeri sekuler bisa menyelamatkan mereka. Jangan lupa juga bahwa kebebasan berpikir yang terjamin itu ada di Eropa. Maka kalangan Islam di Timur Tengah kebanyakan juga ke Eropa. "Sekarang tumbuh, saya dengar, penafsiran Islam di

---

[36] Charles Kurzman, editor. *Liberal Islam, A Sourcebook*, Oxford University Press, 1998 hal.26. Terimakasih untuk kritik dan bantuan Chavchay Saifullah, Mujib Hermani, Helmi Haska, Farid W. Abe, Muhidin Dahlan, Dhika, Bopaq dan rekan-rekan Pustaka Melibas dan Balai Kebudayaan Indonesia yang selalu bersemangat untuk diskusi terbatas soal Islam Fundamental dan Liberal ini. Tanggung jawab ada pada penulis sendiri

[37] Goenawan Mohamad dalam diskusi *Wacana Islam Liberal di Timur Tengah, Islamlib.com,* 21/02/2001.

[38] Lihat, *Diskusi Wacana Islam Liberal di Timur Tengah, Islamlib.com,* 21/02/2001.

Eropa yang tersendiri. Ini karena banyak orang Islam di Eropa. Saya dengar orang Islam terbesar kedua ada di Perancis. Bahkan di Belanda ada seorang intelektual Islam keturunan Turki yang menjadi anggota Partai Kristen Demokrat," tuturnya seraya bertanya: "Apakah karena perbedaan sosiologis tersebut akan memudahkan atau menyulitkan Islam Liberal di masa depan?" Jawaban untuk itu tidaklah mudah.

Gagasan pokok dari paham Islam Liberal oleh Ulil Abshar Abdalla dan jaringannya adalah bahwa ajaran Islam, sebagaimana termaktub dalam kitab suci al-Quran atau yang di bawahnya, secara terus menerus harus selalu ditafsirkan sesuai perkembangan masyarakat di berbagai tempat dan masa. Keharusan ini bukan karena ajaran Islam perlu dicocok-cocokkan secara oportunistik dengan perkembangan situasi, melainkan karena tuntutan zaman dan kekhasan lokalitas memang secara obyektif meniscayakan demikian.

Untuk itu Ulil dan kawan-kawannya menawarkan; *Pertama*, penafsiran Islam yang non-literal, substansial, dan sesuai denyut nadi peradaban manusia yang sedang dan terus berubah. *Kedua*, penafsiran Islam yang dapat memisahkan mana unsur-unsur yang di dalamnya merupakan kreasi budaya setempat dan mana yang merupakan nilai fundamental Islam. *Ketiga*, umat Islam dapat lagi menganggap dirinya sebagai "masyarakat" atau "ummah" yang terpisah dari lainnya. Umat manusia adalah keluarga universal yang diikat oleh kemanusiaan itu sendiri. Kemanusiaan adalah nilai yang sejalan dengan Islam- bukan berlawanan. Pada gilirannya manusia adalah sederajat sehingga larangan

kawin karena beda agama, apalagi al-Quran tidak secara tegas melarangnya, menjadi tidak relevan lagi dan harus diamendemen, karena tidak selaras dengan semangat kehadiran Islam. *Keempat*, perlunya pemisahan dalam struktur sosial untuk membedakan mana kekuasaan politik dan daerah mana yang menjadi wilayah agama. Kesimpulannya, umat Islam harus secara tegas membedakan antara Islam dan pemahaman Islam.

Menanggapi tawaran tersebut, respon publik menjadi sangat beragam dan kubu Islam Fundamental, sebagaimana telah dipaparkan di atas, telah memberikan jawaban dan respon terhadap pandangan Islam Liberal tersebut. Dan di bawah ini giliran jawaban Islam Liberal lebih lanjut dalam mengkritisi respon Islam Fundamental itu. *Insya Allah*, dari debat dan pertarungan wacana antara Islam Liberal dan Fundamental ini, akan terjadi pengayaan dan perluasan cakrawala intelektual bagi kalangan masyarakat madani di Indonesia.[39]

Agama dan Tafsir

Tatkala agama mengalami proses pelembagaan (institusionalisasi) yang berlebihan, maka yang tejadi adalah pembungkaman kekayaan tafsir Kitab Suci. Di luar tafsir resmi yang diakui oleh lembaga berwenang, mustahil ada tafsir lain yang diakui kebenarannya. Kitab Suci yang semula terbuka kepada semua tafsir, dibungkam suaranya

---

[39] Adian Husaini dkk beranggapan Kelompok Pembaharuan bersama aneka jenis keturunannya dari kelompok Islam Liberal sampai pencinta Hermeneutika yang menghantam Tafsir Qur'an, semua itu harus dihadapi secara memadai dengan ilmu yang mengungguli mereka. Dalam pandangan Islam Fundamental, gagasan Islam Liberal mengingatkan pada pembaruan Islam Nurcholish Madjid. Dalam konteks ini, ada banyak persamaan antara Islam Liberal dengan pembaruan Islam Nurcholish Madjid.

menjadi hanya "berbunyi satu tafsir" saja *(monophonic exegesis).*[40] Masyarakat agama-agama yang berada di luar daerah tafsir "resmi" itu, akan dicap murtad atau berbuat bid'ah. Jika sudah demikian, maka lahirlah karikatur-karikatur sejarah semacam lembaga inkuisisi pada masa Al-Makmun (untuk kasus Islam) atau pada masa Reformasi (untuk kasus Kristen). Bahkan, ironisnya, karikatur itu masih dapat kita saksikan pada masa kini di Indonesia, misalnya --untuk menyebut contoh yang paling mutakhir— polemik "panas" sekitar pembaharuan Islam yang dilancarkan Nurcholish Madjid.

Keseluruhannya itu menunjukkan bahwa ketika agama telah menjadi sebuah lembaga yang dimonopoli oleh otoritas tertentu, maka dia akan kehilangan wataknya sebagai agama. "pembebas", tetapi sebaliknya, sebagai hakim yang membagi-bagikan vonis kepada umatnya yang berbuat bid'ah atau penyelewengan tafsir.

Tapi, anehnya, fenomena pelembagaan ini *(institutionalizing religion phenomenon),* terjadi pada semua agama di dunia. Jika selama ini kita menyaksikan adanya perang, atau setidaknya konflik panas, antar-agama, maka sebenarnya, yang bekerja di situ, untuk sebagian besar, adalah kepentingan "lembaga" agama yang mempertahankan interesnya

[40] Inilah yang oleh Arkoun, meminjam konsep Derrida, disebutnya sebagai logo-sentrisme (*al 'aqliyyatul markaziyyah*). Logosentrisme, bagi Arkoun, adalah asumsi adanya "Nalar Agung" (Logos) yang berwenang untuk memonopoli suatu tafsir atas teks tertentu. Inilah yang akhirnya menciptakan oposisi biner antara apa yang oleh Arkoun, dalam berbagai bukunya, disebut sebagai "l'impense discourse" dan "penso' discourse" (*Al-Khithabul La Mufakkar fihi dan Al-Khithab Al-Mufakkar fihi* - diskursus yang boleh dipikirkan dan yang tak boleh dipikirkan). Baca Muhammad Arkoun, *Aina Huwal Fikrul Islamy Al-Mu'ashir* (Beirut Darus Saqi, 1993). terimakasih atas bantuan Ulil Abshar Abdalla untuk terjemahan dan pemahaman teks Arkoun ini.

masing-masing, bukan nurani umat yang acapkali lebih mampu membaca "kebenaran" sebagai sesuatu yang *"beyond the religion as institution";* sesuatu yang melebihi agama sekedar sebagai lembaga; agama sebagai representasi dari kebenaran yang terhunjam dalam "bumi nurani terbersih" dari manusia yang sejak kelahirannya membawa fitrah kebenaran sebagaimana pernah ditunjuk-kan agama-agama (dalam Islam, misalnya, terdapat sebuah hadits: *istafti qalbaka* — mintalah petunjuk pada hatimu).

Tantangan semua umat beragama saat ini adalah terletak pada kenyataan bahwa semua agama telah "disapu habis" oleh badai proses pelembagaan yang telah mematikan pesan-pesan profetisnya yang membebaskan selama ini. Bagaimana umat beragama sekarang, menghadapi perubahan cepat pada level kosmis, melakukan tafsir ulang atas teks agamanya masing-masing? Ini menjadi niscaya, jika agama-agama itu tidak ingin ditinggalkan oleh umatnya atau dikubur oleh proses sejarah yang bergerak cepat saat ini.

Metode Dekonstruksi

Dalam ilmu humaniora saat ini, metode "dekonstruksi" yang diperkenalkan oleh Jacques Derrida, —salah seorang filsuf post-strukturalis terkemuka saat ini,-- telah populer sebagai acuan. Metode ini memberikan sumbangan yang cukup penting, terutama dalam bidang kritik sastra. Metode ini, kemudian, dipinjam oleh berbagai disiplin humaniora. Bahkan seorang pemikir Islam avant-gardis kelahiran Aljazair yang sekarang tinggal di Perancis, Mohamad Arkoun, telah menggunakan metode itu untuk melakukan

rekonstruksi kembali tradisi keilmuan klasik Islam.[41]

Jika metode dekonstruksi diterapkan ke dalam teks-teks agama dan ideologi, maka pertama-tama yang mesti dilakukan adalah "memisahkan" hubungan-monolinier antara teks dengan "makna"-[baca : tafsir]-nya. Keyakinan, bahwa ada hubungan yang "final' antara suatu teks dengan tafsir tertentu, mesti dibongkar. Sebab, keyakinan semacam itu, akan menimbulkan berbagai dampak negatif. *Pertama,* fanatisme terhadap tafsir tertentu, serta menolak kemungkinan keabsahan tafsir yang lain. *Kedua,* akan menutup kemungkinan terbukanya teks terhadap berbagai penafsiran. Dengan tertutupnya keragaman tafsir itu, maka sebuah teks akan mengalami semacam pembusukan. *Ketiga,* suatu teks yang telah dibungkam melalui peresmian satu tafsir saja, akan menyebabkan teks itu tak bermakna lagi dalam menghadapi derasnya perubahan sosial pada zaman modern dewasa ini. Dekonstruksi terhadap teks, berarti membuka kemungkinan terhadap keragaman tafsir atas suatu teks. Sebab, hubungan yang linier dan final antara teks dengan tafsirnya telah putus.

---

[41] Hasheem Saleh, murid, dan sahabat Arkoun, menyebut metode ini sebagai "manhajut tafkik". Metode dekonstruksi digunakan oleh Arkoun untuk melakukan kritik atas berbagai ortodoksi yang pernah muncul dalam sejarah Islam, di antaranya yang menonjol adalah ortodoksi Sunni, ortodoksi Syi'ah dan ortodoksi Khawarij. Bagi Arkoun, ortodoksi-ortodoksi inilah yang bertanggung jawab atas lahirnya oposisi-oposisi biner dalam sejarah Islam: mukmin/kafir, muslim/murtad, sunnah/bid'ah, dst. Ketiga ortodoksi tersebut membuat kualifikasikualifikasi yang berbeda mengenai kategori-kategori biner tersebut. Oleh karena itu, kategori "mukmin" bagi ortodoksi Sunni berbeda dengan ortodoksi Khawarij, misalnya. Masing-masing ortodoksi membangun apa yang oleh Arkoun —-meminjam istilah Derrida--disebut sebagai "logosentrisme", yakni semacam Logos Yang Sadar secara penuh dan mempunyai kewenangan tungggal untuk melakukan tafsir atas teks Kitab Suci secara tepat. Baca, Arkoun, *Tarikhiyyatul Fikril 'Araby*.

Dekonstruksi teks juga membawa konsekuensi lain yang lebih bersifat sosiologis, yakni membogkar monopoli tafsir pada otoritas tertentu yang berbicara mengenai "kebenaran tunggal" atas nama Tuhan, negara atau penguasa. Sebab, dengan mengandaikan adanya otoritas tertentu, maka juga berarti mengandaikan adanya "Sang Aku-Transenden" yang lebih tahu dari pihak yang lain-lain terhadap makna dan tafsir dari suatu teks. Ketika "Sang Aku-Transenden" itu, yang dalam manifestasi sosiologisnya bisa berupa apa saja seperti kyai, penguasa, pendeta, bikhu, rabbi, uskup, rahib, dan lain-lain, telah "dibunuh", maka terbukalah berbagai kemungkinan untuk keragaman suatu tafsir. Tafsir menjadi sesuatu yang relatif "demokratis"; dalam pengertian adanya kemungkinan bahwa kebenaran tidaklah menjadi monopoli satu tafsir tertentu.

Keragaman itu sendiri merupakan dasar dari kenyataan bahwa "kebenaran" toh juga bukan tunggal. Pemahaman mengenai kebenaran tunggal itu, sebenarnya berkaitan dengan asumsi akan adanya "Sang Aku-Transenden" yang tahu segala-galanya mengenai teks, sehingga tafsir yang diproduksinya mempunyai "kewenangan tunggal" atas daerah kebenaran. Maka, ketika "Sang Aku-Transenden" itu didekonstruksi lewat konsep mengenai, —untuk meminjam istilah Mohamad Arkoun,— "historisitas logos" dan, dengan demikian, juga berarti "historisitas tafsir", maka kewenangan tunggal itu kehilangan "daya dukung"nya.

Di situlah muncul alternatif "pluralitas tafsir". Dalam konteks pluralisme itulah, hegemoni tafsir diruntuhkan, dan teks menjadi "hidup" kembali serta terbuka atas semua tafsir. Dengan runtuhnya "hegemoni" tersebut, runtuh pula

"feodalisme teks" pada agama yang menjadi awal mula dari kebekuan pemikiran selama ini.[42]

Kekhawatiran atas Pertarungan Diskursus antara Islam Fundamental dan Islam Liberal

Tulisan Ulil Abshar Abdalla "Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam Kita" yang dimuat *Kompas* (18 November 2002) dan kemudian dibukukan dalam *Islam Liberal dan Fundamental: Sebuah Pertarungan Wacana,* memang menarik untuk diperde-batkan, meski mungkin memunculkan militansi dalam beragama. Munculnya tudingan sesat, kafir, bahkan darahnya dihalalkan adalah contoh, betapa telah terjadi perdebatan tidak sehat dalam mengkonstruksi pemikiran keagamaan.[43] Situasi demikian, apabila tidak disikapi secara hati-hati, hanya akan menjebak dan menyeret kita pada sikap fanatisme buta yang kemudian memunculkan primordialisme atas nama agama. Untuk itu, perlu dikedepankan 'barometer' yang dapat dijadikan pijakan dan ukuran dalam bertindak.

Dalam pertarungan wacana sebagai respon atas Islam Liberal, maka kaum aktivis fundamental juga mengemukakan gagasan dan pemikirannya yang mendasar. Setidaknya ada semacam kekhawatiran yang disertai kecurigaan dari keduanya (Islam fundamental dan Islam liberal) mengenai masa depan Islam di Indonesia.

Pertama, Islam fundamental khawatir jika ajaran Islam yang begitu luhur itu pada akhirnya nanti harus tercerabut dari

[42] Ulil Abshar Abdalla dan Herdi Sahrasad, "Meruntuhkan Hegemoni Tafsir, Menghidupkan Kembali Teks," *Ulumul Quran,* Nomor 3 Vol.5 tahun 1994 h. 94-95.

[43] Muhtadin AR, "Islam Jalan Damai," *Media Indonesia,* 7 Januari 2003.

akarnya akibat kampanye yang dilakukan oleh Islam liberal untuk membentuk masyarakat tanpa teks.

Kedua, sementara Islam liberal juga khawatir jika ajaran Islam itu hanya dimaknai secara tekstual/skriptural, sedangkan persoalan dunia yang kian hari semakin kompleks menuntut pemaknaan ajaran agama secara kontekstual. Ada banyak persoalan yang secara *letterlijk* tidak ada dalam teks agama, dan itu berarti menuntut para pemeluk agama untuk memaknainya secara kontekstual, yang disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Perbedaan sudut pandang dan prinsip itu ini sangat berarti karena munculnya perdebatan yang saling berhadapan tersebut, jika dikaji secara mendalam, sejatinya bukan ditujukan untuk membangun dan membentuk paradigma berpikir positif demi terwujudnya tatanan masyarakat yang santun dan berkeadaban (*civilized*), tetapi lebih sebagai 'perebutan otoritas' wacana keagamaan. Yakni, perebutan posisi penafsiran agama sebagai wilayah 'sakral' yang tidak semua orang boleh menyentuhnya. Penafsiran atas doktrin agama hanya boleh dilakukan oleh mereka yang telah mendapatkan kriteria-kriteria tertentu, bukan oleh semua pemeluk agama.[44]

Di sinilah pandangan Muhtadin AR, mengutip pemikiran Ritzer dalam *A Multiple Paradigm Science (1975),* tentang 'wacana' menarik untuk dikedepankan. Menurutnya, wacana dalam teori sosial, sangat bersifat politik. Ia bukan lagi menjadi persoalan benar atau salah, tetapi telah menjelma menjadi persoalan menang atau kalah. Kemenangan suatu teori terhadap teori lainnya, menurutnya, lebih disebabkan

---

[44] Muhtadin AR, "Islam Jalan Damai".

karena para pendukung dari teori yang menang itu lebih memiliki kekuatan dan kekuasaan dari pengikut teori yang dikalahkan. Dan sekali lagi, bukan karena teori tersebut lebih benar atau lebih baik dari yang dikalahkan.[45]

Kalau kita berpijak pada ungkapan Ritzer di atas, maka sangat wajar apabila perdebatan seputar pemikiran keagamaan bisa berakhir di meja kepolisian, kekuasaan.[46]

Menghadapi situasi yang kurang harmonis ini, kajian sosiologis terhadap masyarakat sebenarnya akan menemu-kan relevansinya. *Pertama*, otoritas pemahaman keagamaan sampai saat ini masih dimonopoli orang dan kelompok tertentu. Setiap pemeluk agama belum sepenuhnya diberikan hak dalam menentukan pilihan atas otoritas pemahaman keagamaannya. Akibatnya, masing-masing kelompok otoritas ini memberikan definisi terhadap lawan, disesuaikan dengan kepentingan kelompoknya, dan tidak sedikit yang bernada 'provokatif'.

Pemberian label lawan yang ditetapkan Islam Fundamantal dan Islam Liberal misalnya, sangat jelas sekali menunjukkan antagonisme itu. Islam Fundamental mendefinisikan bahwa 'lawan' yang harus disingkirkan adalah orang dan kelompok yang tidak mau berpegang pada teks keagamaan, dan itu adalah Islam liberal. Sementara Islam Liberal mendefinisikan bahwa orang atau kelompok yang harus disingkirkan adalah mereka yang sangat berpegang teguh pada teks, tanpa melakukan pemaknaan ulang terhadap konteks yang terjadi di sekelilingnya, dan itu adalah Islam Fundamental.

---

[45] Muhtadin AR, "Islam Jalan Damai."
[46] Muhtadin AR, "Islam Jalan Damai."

Kedua, sampai saat ini, kajian terhadap pemahaman keagamaan masih menempatkan masyarakat sebagai 'objek' ketimbang 'subjek'. Otoritas pemahaman keagamaan belum menjadi hak setiap pemeluk agama, tetapi masih menjadi milik para 'penguasa' agama. Masyarakat yang sejatinya juga pemeluk agama belum sepenuhnya diberi kebebasan untuk menentukan pilihan atas otoritas pemahaman keagamaannya sendiri.

Hal demikian terlihat dari munculnya *counter* wacana 'kurang sehat' dari masing-masing orang dan kelompok yang secara ideologi maupun metodologi pemahaman keagamaan, sangat berbeda. Masing-masing penguasa agama belum sepenuhnya 'rela' jika kelompok lain melemparkan wacana yang menurut (kelompok)-nya dianggap salah dan membahayakan.

Ada kesan bahwa "pertikaian" paradigma berpikir semacam ini tidak disikapi secara arif, sehingga apabila dibiarkan terus berkembang, tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan cenderung memperuncing masalah, karena kedua kelompok yang berseberangan tersebut (Islam Liberal dan Islam Fundamental) selamanya akan selalu berhadapan. Dan di hadapan kedua pihak, ada kawasan kosong yang bisa menimbulkan berbagai kemungkinan di mana sangat mungkin masing-masing akan memunculkan jurus baru untuk mementahkan argumen lawannya, begitu seterusnya.

Para aktivis Muslim melihat kenyataan demikian sebagai peringatan keras yang menuntut kalangan Islam yang peduli agar bersikap arif, waspada, sabar dan hati-hati. Karena jika tidak, ke depan kita tidak hanya akan disuguhi pemandangan munculnya sebuah tatanan masyarakat yang

terkotak-kotak dalam gerakan dan pemahaman keagamaan, sebuah masyarakat yang terpolarisasi dalam sekat keagamaan yang sangat sempit dan tidak membebaskan, tetapi juga munculnya masyarakat dengan paradigma berpikir tidak toleran, yang tidak bisa menerima keberbedaan.

Pada aras demikian, mempertemukan antara Islam Fundamental dan Islam Liberal merupakan suatu keharusan.[47]

Bertemu bukan sekadar mendialogkan gagasan, tetapi menawarkan gagasan itu kepada publik (masyarakat) secara sehat tanpa disertai pretensi apa pun terhadap kelompok lain. Artinya, sampai seberapa jauh kedua gagasan tersebut memiliki *concern* dan pemihakan terhadap persoalan-persoalan masyarakat? Dengan posisi seperti itu, masya-rakat tidak lagi akan menjadi objek dari pemahaman keagamaan, tetapi berubah menjadi subjek bagi pilihan yang akan ditentukannya, termasuk ketika mereka tidak menentukan pilihan. Kecenderungan ke mana masyarakat akan membutuhkan konsep dan gagasan yang ditawarkan keduanya, dapat dilihat dari respons, simpati, dan kebutuhan masyarakat.

Adakah Jalan Tengah?

Para pengamat Islam melihat persoalan 'wacana' Islam Liberal dan Fundamental pada akhirnya adalah persoalan politis, yang tidak lagi bertutur tentang benar atau salah, tetapi sudah bergeser menjadi persoalan menang dan kalah. Dan, inilah tantangan terbesar kita. Untuk itu, ″keganasan″ Islam Fundamental yang ingin menerjang mereka yang

[47] Muhtadin AR , “Islam Jalan Damai."

tidak mau kembali kepada pemaknaan agama secara tekstual, harus dijinakkan. Juga semangat Islam Liberal yang sangat tinggi untuk merobohkan bangunan keagamaan secara tekstual, harus dikendalikan. Dalam persepsi para aktivis Muslim, pertarungan wacana Islam Liberal dan Fundamental ini hendaknya tidak menyeret terlalu dalam aspek emosi dan kepentingan kelompok, melainkan justru suatu dialog pemikiran yang dinamis dan berakal sehat.

Sebab, demikian persepsi Muhtadin seorang aktivis Muslim, bukankah Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* telah mengakomodasi semua pemikiran yang ada, bahkan tidak hanya sesama (umat) Islam, tetapi juga dengan umat non-muslim. Bukankah Islam juga sebagai agama *solihun likulli zamanin wa makanin* (sesuai untuk semua zaman dan tempat), tidak hanya membutuhkan teks keagamaan, tetapi juga adanya pemaknaan yang sangat kontekstual? Dan, itulah sebenarnya Islam sebagai jalan untuk meraih kedamaian, bukan kekerasan dan dendam untuk saling menghancurkan.

Agama untuk Manusia[48]

Setiap agama mengandung dua unsur penting; - dalam istilah Prof. Dr. Amin Abdullah - yakni normativitas dan historitas. Secara normatif, agama berisi doktrin, ajaran yang diturunkan Tuhan untuk manusia. Karenanya, ia “sunyi” dari intervensi manusia dan kebenarannya bersifat universal. Tujuan penurunan agama adalah untuk dijadikan sebagai mediasi menuju Tuhan (*hablun min Allah*) dan mem-

[48] Untuk uraian-uraian ini, baca Hatim Gazali, “Menyikapi Hal Yang Dianggap Benar,” *Wacana,* 6 Juli 2004.

bangun hubungan baik dengan sesamanya (*hablun min al-naas*). Robert N. Bellah menegaskan, agama diturunkan sebagai instrumen *ilahiah* untuk memahami dunia (2000). Ia turunkan sebagai *way of life*, untuk memanusiakan manusia dan sebagai *problem solver* atas segala persoalan yang dihadapi manusia. Jadi, agama mempunyai dua fungsi dan makna yang harus dilaksanakan secara sejajar, yakni makna transendental, sakral dan makna imanental, profan.

Namun secara historis, agama penuh dengan campur tangan manusia. Sebab, agama tidak diturunkan dalam ruang hampa. Ia diturunkan dalam aneka spektrum historis-budaya tertentu, sehingga manusia mengambil bagian penting dalam agama. Sebab agama diturunkan hanya untuk manusia, yakni kemaslahatan manusia. Demikianlah, Islam pun diturunkan oleh Allah SWT melalui Rasululah SAW tidak dalam kevakuman sosial-kultural. Islam bergumul dalam realitas objektif yang menyejarah, ikut mewarnai dan membentuk kebudayaan manusia. Dalam bahasa antropolog Clifford Geertz, agama bukanlah sesuatu yang otonom. Misalnya, Islam turun di Jazirah Arab yang sangat kompleks dari peradaban manusia. Di Arab ada pelbagai macam suku, agama, ras yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Maka ajaran agama sangat terikat dengan kondisi dan situasi sosial setempat, bersifat temporal-partikular. Sebab agama dengan budaya setempat berdialektika secara terus-menerus. [49]

Islam yang ada di Arab tentu akan berbeda (misalnya dari aspek-aspek hukumnya) dengan Islam yang ada di Indo-

---

[49] Hatim Gazali, "Menyikapi Hal Yang Dianggap Benar."

nesia. Maka kebenaran agama dalam optik historitas bersifat partikular.

Dalam memahami suatu agama, kedua aspek penting dari agama ini selayaknya dibedakan, bukan dipisahkan. Sebab, hubungan antara keduanya ibaratnya sebuah koin (mata uang) dengan dua permukaan. Kedua permukaan koin ini tidak bisa dipisahkan, namun bisa dibedakan. Kedua aspek tersebut bukanlah dua entitas yang berdiri sendiri dan saling berhadap-hadapan, tetapi keduanya terajut dalam satu kesatuan, sehingga kedua aspek darinya tidak bisa dibuat tegang. Karena itulah, mengabaikan salah satu aspeknya berarti kita terjebak dalam salah satu ekstrem tertentu. Akibatnya, pemahaman tentang Islam tidak komprehensif, dan sepotong-sepotong. Kemudian, Islam sebagai hasil konstruksi budaya lokal yang bersifat historis juga harus ditafsirkan dalam konteks sosial dimana Islam turun. Begitupula dengan teks agama. Al-Quran adalah gagasan Tuhan yang diterjemahkan oleh Muhammad dalam bahasa manusia sebagai respon terhadap lokalitas yang mengitarinya saat itu tidaklah *untouchable*. Karena itulah tafsir terhadap Islam mesti beragam, sesuai dengan sejauh mana Islam dipahami. Kesemua tafsir tersebut adalah absah dan bisa diterima manakala dikontekstualisasikan dengan realitas sosial yang berada di sekitarnya.[50]

Begitu pula yang terjadi dengan pemikiran keagamaan yang belakang ini terlihat kontroversial. Islam Liberal tidak akan menemukan konsensus bersama dalam memahami Islam dengan kalangan fundamental.[51] Di sini Islam Fundamental

---

[50] Untuk uraian-uraian ini, baca, Hatim Gazali, "Menyikapi Hal Yang Dianggap Benar."

[51] Hatim Gazali, "Menyikapi Hal Yang Dianggap Benar."

akan meyakini dirinya yang benar sementara Islam Liberal adalah salah sama sekali, sehingga memerangi terhadapnya adalah salah satu bentuk ekspresi pelaksanaan ajaran agamanya, jihad (*holy war*).

Beda Penekanan

Jika kedua ekstrem gerakan keagamaan di Indonesia ini sama-sama memperhatikan kedua aspek di atas, maka menghakimi orang lain dapat dihindari. Memang, Islam secara normatif mengajarkan perdamaian, kerukunan. Namun ketika pesan tersebut diterjemahkan dalam realitas sosial yang beragam, maka ia bersifat historis-sosiologis. Meski secara normatif Islam mengajarkan perdamaian dan antikekerasan, dalam realitasnya agama mudah sekali dijalankan dan dipraktikkan dengan cara-cara yang angker, sangar, dan menyeramkan.[52] Pesan perdamaian dalam Islam berbeda maknanya dalam realitas sosial antara Islam liberal dengan Islam Fundamental. Islam Liberal merujuk kepada subtansi dari doktrin agama - atau meminjam istilahnya Al-Syatiby adalah *Maqashid al-Syariah* - sekaligus kurang mempedulikan teks agama (non-literal), sementara Islam Fundamental lebih menekankan pada makna tekstual dari agama, bukan pada subtansi. Akibatnya dalam mema-hami pesan agamanya tidak menemukan titik persamaan.

Islam Liberal memaknai agamanya sesuai dengan paradigma (*manhaj*) yang dibangunnya, begitu pula dengan Islam Fundamental. Dua paradigma antara tekstual dan kontekstual di atas akan semakin nampak manakala diterjemahkan pada tingkat praksis. Kalangan Fundamental

---

[52] Hatim Gazali, "Menyikapi Hal Yang Dianggap Benar."

meyakini agama melalui seruan jihadnya dengan pedang, bom atau senjata yang siap dihunuskan kepada musuh-musuhnya. Kekerasan baginya merupakan jalan satu-satunya untuk melawan kalangan tertentu yang dianggap musuh. Sementara Islam liberal (atau Islam subtantif) memaknai agamanya penuh dengan kesantunan, dan pesan perdamaian dan anti kekerasan, sehingga segala bentuk kekerasan dianggap menyalahi agamanya. Maka, konfrontasi antara dua aliran keagamaan ini tidak terbendung lagi.

Sebenarnya, dua pola pemikiran keagamaan di atas dalam studi pemikiran Islam, bukanlah hal baru. Sejak awal-awal pertumbuhan Islam, dua paradigma tersebut muncul sebagai upaya memahami kehendak Tuhan. Munculnya aliran dalam teologi Islam, madzhab-madzhab dalam fikih bisa dijadikan referensi bahwa Islam ketika menyejarah kebenarannya bersifat partikular dan sangat historis.

Bahkan perbedaan pandangan dalam memahami pesan Tuhan sudah terjadi sejak masa Muhammad. Namun perbedaan itu bisa diminimalisir, karena Muhammad merupakan pemegang otoritas dalam memahami ide Tuhan. Sikap Muhammad ketika menghadapi perbedaan itu sangat inklusif.

Pertanyaannya, bagaimana kita menyikapi dua arus pemikiran di atas? Apakah kita hendak mengikuti salah satunya atau justru kita ke luar dari salah satu paradigma pemikiran di atas. Atau perlukah memunculkan aliran baru yang bisa mempertemukan dan mengadili dua paradigma tersebut, sehingga pandangan-pandangan kontroversial tidak lagi bercokol di muka bumi ini ?.

Maka untuk menyikapinya dua paradigma berfikir di atas (*manhaj al-fikr*), kita patut menyegarkan kembali ingatan kita pada ungkapan ulama salaf *"ra'yuna shawab yahtamilu al-khatha', wa ra'yukum khatha' yahtamilu al-shawab"* [Pendapat kami adalah benar, tapi mempunyai potensi untuk salah dan pendapat Anda salah, tapi mengandung kemungkinan untuk benar].

Jadi, potensi benar sama dengan potensi untuk salah baik pada Islam Liberal ataupun Islam Fundamental. Di sini Islam Fundamental tidak selamanya salah dan keras, dan Islam

Liberal tidak seterusnya benar. Karena itulah dua paradigma pemikiran keagamaan di atas harus didudukkan secara sejajar. Islam liberal tidak diposisikan sebagai paradigma yang lebih unggul, dan begitu pula sebaliknya, Islam fundamental tidak berarti lebih superior dari Islam liberal.

Seharusnya, munculnya perbedaan (*ikhtilaf*) pandangan patut disambut dengan baik dan arif, bukan memaki salah satunya. Sebab, adanya keragaman pemikiran merupakan bukti bahwa Islam (Islam yang dimaksud adalah *Islam in mind* yang menyejarah, bukan Islam sebagi teks) sangat bermacam-macam tergantung orang yang memahaminya. Jika arif dalam memandang adanya kepelbagaian pandangan, maka tidak akan mengklaim salah satu di antaranya sebagai kebenaran mutlak.[53] Karl. Popper dengan teori falsifikasinya mengatakan, kebenaran baru dianggap benar manakala ada celah untuk menyalahkannya. Sebab menya-

---

[53] Baca, Hatim Gazali, Hatim Gazali, "Menyikapi Hal Yang Dianggap Benar." Lihat juga Pradana Boy ZTF, *Pluralitas Kebenaran Islam*, h. 2-4.

lahkan salah satunya merupakan bentuk dari sikap ekstrem.

Perbedaan pemahaman itu adalah wajar, sejauh tidak saling menyalahkan antara yang satu dengan lainnya, membenarkan hanya pendapatnya yang benar serta tidak bertindak anarkis dan destruktif. Ketika perbedaan tersebut berakibat pada pengrusakan, pengeboman, pembakaran dan kekerasan lainnya, di saat itu pula kekerasan atas nama agama semakin menjadi besar.

Kekerasan akan dibalas dengan kekerasan pula, begitu seterusnya, di mana kekerasan setelahnya akan lebih dahsyat dari yang sebelumnya. Mendikotomikan dua kerangka berfikir di atas untuk mencari-cari pada siapa kebenaran berpihak, adalah merupakan pekerjaan yang sia-sia dan semakin memperparah perdebatan di antara kedua kubu aliran di atas.

Ketidakarifan dalam memandang dua pola pemikiran keagamaan di atas, tidak saja berakibat pada pertentangan, adu argumentasi, adu kebenaran, tapi seringkali berujung pada pertengkaran fisik, pembunuhan.

Perang Wacana dan Fatwa MUI

Seperti telah dibahas di awal, fatwa Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke VII Agustus tahun 2005 ini telah mengharamkan pluralisme yang menganggap semua agama sama, mengharamkan sekularisme dan liberalisme beserta semua turunannya.

Kontra fatwa kemudian muncul dari muncul dari kelompok liberal atas fatwa tersebut, dan pertarungan belum lagi sampai ke final. Mula-mula, serangan kalangan Islam

Liberal atas fatwa MUI itu telah menjadi kontroversi yang luar biasa. Pernyataan Ulil Abshor Abdalla bahwa fatwa MUI itu "konyol dan tolol," dinilai kalangan MUI sebagai kata-kata tidak pantas. Ulil kemudian meminta maaf terhadap MUI. Sementara Dawam Rahardjo mengatakan bahwa fatwa MUI itu timbul karena ketidakpahaman dan prasangka, serta bisa memecah belah masyarakat dan meresahkan serta mengancam sendi-sendi kehidupan berbangsa bernegara yang bersemboyan pada *Bhineka Tunggal Ika*. Karena itu, menurut Dawam, MUI harus dibubarkan.

Pernyataan Ulil dan Dawam menimbulkan reaksi balik MUI dan kaum Islam Fundamental yang merasa dilecehkan. Perkembangan ini berbarengan dengan fatwa MUI untuk melarang gerakan Ahmadiyah. Akibatnya, kesemua peristiwa-peristiwa itu menjontrongkan ummat Islam - baik itu kalangan Fundamental maupun Liberal - ke dalam kontroversi dan ketegangan. [54]

Menarik bahwa dalam soal pluralisme, ada perbedaan interpretasi dan persepsi antara pihak Islam Liberal dan Fundamental. Kaum Islam Fundamental melihat pluralisme dalam kehidupan beragama merupakan paham yang merelatifkan kebenaran agama, suatu relativisme yang berbahaya bagi keyakinan Muslim dalam menjalankan ibadah. Sedangkan kaum Liberal melihat pluralisme dalam pengertian gagasan Nurcholish Madjid, dimana pluralisme (sebagaimana yang penulis pahami) merupakan upaya mengatasi batas-batas formal agama sebagai intitusi untuk membangun toleransi,

---

[54] "Ulama Dihina, Tumpas Gerombolan Liberal," majalah *Sabili,* No. 3 Tahun XIII 5 Agustus 2005.

keadaban dan kebersamaan dalam perjuangan bersama mengatasi ketidakadilan, kemiskinan dan keterbelakangan.

Nurcholish Madjid pernah mengemukakan bahwa pluralisme tidak dapat dipahami hanya dengan mengatakan bahwa masyarakat kita majemuk, beraneka ragam, terdiri dari berbagai suku dan agama, yang justru hanya menggambarkan kesan fragmentasi, bukanlah pluralisme. Pluralisme juga tidak boleh dipahami sekedar sebagai ″kebaikan negatif,″ hanya ditilik dari kegunaannya untuk menyingkirkan fanatisisme. Pluralisme harus dipahami sebagai "pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban″. Bahkan pluralisme adalah juga suatu keharusan bagi keselamatan umat manusia, antara lain melalui mekanisme pengawasan dan pengimbangan yang dihasilkannya. Dalam kitab suci al-Quran justru disebutkan bahwa Allah menciptakan mekanisme pengawasan dan pengimbangan di antara sesama manusia guna memelihara keutuhan bumi dan merupakan salah satu wujud kemurahan Tuhan yang melimpah kepada umat manusia,″ *Seandainya Allah tidak mengimbangi segolongan manusia dengan segolongan yang lain, maka pastilah bumi hancur, namun Allah mempunyai kemurahan yang melimpah kepada seluruh alam*.″ (QS. 2:251).[55] Karena itu, pluralisme merupakan bagian dari keimanan yang paling inti. Namun demikian, pemahaman dan pengertian tentang pluralisme ini masih menjadi perdebatan di kalangan Islam Liberal dan Fundamental di Indonesia.

Dalam persepsi Ahmad Sahal, sejarah liberalisme adalah sejarah kebebasan individu modern dan pembebasannya

---

[55] Pernyataan Nurcholish Madjid yang dikutip dalam tulisan Budhy Munawar Rachman, ″Perjumpaan Kristen-Islam perlu Toleransi Sejati,″ *Kompas,* 20 Agustus 2005, h. 4.

dari absolutisme kekuasaan. Sejak akhir abad ke-17, seiring dengan makin kokohnya perdagangan dan pencerahan di tanah Eropa, muncul kesadaran di kalangan masyarakat Barat akan pentingnya kebebasan individu, dan mereka telah letih dengan perang agama dan pengap dengan despotisme *ancient regime*.[56] Akan tetapi pandangan Sahal bahwa penjumlahan dari liberalisme dan sekularisme adalah demokrasi,[57] mengesankan ia melakukan simplifikasi yang cenderung mengundang kegusaran sekaligus memperkuat ketidakpahaman kaum Muslim fundamental bahwa demokrasi liberal tidak sesuai dengan ajaran Islam, dan bahwa seolah-olah Islam tidak memiliki sumber rujukan nilai dan inspirasi bagi demokrasi. Padahal, tradisi Islam sejak zaman Rasullulah sudah mengenal adanya demokrasi (*syura*) dan negara modern sebagaimana dalam kasus Negara Madinah hingga era Kekhalifahan bahkan sampai era Cordova (*Spain of three religion).* Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid sangat mengapresiasi sejarah pengalaman Negara Madinah (dengan Piagam Madinahnya) sebagai model "demokrasi konstitusionalisme" dalam Islam di masa awal perkembangan Islam dalam membangun kehidupan kenegaraan di tengah masyarakat yang plural, majemuk.

Kenyataan akan fatwa MUI dan kontra-fatwa itu menunjukkan bahwa perang urat syaraf antara Islam Liberal dan Islam Fundamental (literal) di Indonesia telah menyeruak dan terus berjalan, untuk berebut pengaruh di ruang politik dan sosial-kultural dengan segala implikasinya.[58] Persaingan kedua arus Islam itu juga menimbulkan kritik dari

---

[56] Ahmad Sahal, "MUI dan Fatwa Antidemokrasi," *Tempo*, 21 Agustus 2005.
[57] Ahmad Sahal, "MUI dan Fatwa Antidemokrasi."
[58] Pradana Boy ZTF, *Pluralitas Kebenaran Islam*, h. 2-4

kalangan Muslim taat yang tidak terlibat dalam rivalitas kedua paham tersebut, terutama kritik tentang seberapa jauh komitmen Islam Liberal dan Fundamental untuk mengatasi kemiskinan, ketidakadilan dan ketertindasan ummat di tengah menguatnya neo-liberalisme di Indonesia. Juga seberapa jauh "peran dan kerja nyata" kedua kalangan Islam itu bagi pemberdayaan ummat yang tertinggal, lemah dan termarginalkan oleh modernisme yang jelas bias material, bias modal dan bias Barat.

Para Muslim moderat berpendapat bahwa menuding bahwa fatwa MUI akan menghantam dasar-dasar demokrasi (liberal) di Indonesia, mungkin berlebihan, namun bereaksi untuk mengutuk pembaruan pemikiran Islam juga tidak memecahkan persoalan dan malah meningkatkan suhu pertengkaran dan ketegangan antar umat Islam.[59]

Dalam konteks ini, ada gejala serupa dengan kontroversi fatwa MUI – meskipun tidak banyak diberitakan media massa-, yakni sebuah diskusi buku karya Hartono Ahmad Jaiz yang berjudul *Ada Pemurtadan di IAIN* yang berlangsung di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2004 yang menunjukkan dengan gamblang adanya "perang pemikiran" Islam Liberal versus Fundamental secara sarkastis-antagonistis, suatu isyarat benderang adanya persaingan berebut ruang sosial-kultural dari kedua belah pihak. Bahkan tak lama kemudian, dalam Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) IV di Jakarta merekomendasikan agar MUI mengeluarkan fatwa untuk melarang gerakan Islam yang mengusung ide-ide sekularisme, pluralisme dan liberalisme di Indonesia.

[59] Percakapan dengan aktivis Muslim HMI dan UIN Syarif Hidayatulah Ciputat, 4 Agustus 2005.

Lebih jauh, di sejumlah *mailing list* bahkan muncul ancaman mati dan penghalalan darah bagi para pendukung gagasan Islam Liberal.

Kenyataan seperti ini, dengan mudah, bisa diduga terjadi oleh adanya penafsiran yang berbeda terhadap Islam. Bahwa Islam dipahami sebagai ajaran tunggal yang hanya mengenal interpretasi tunggal. Lebih lanjut, keyakinan bahwa hanya ada interpretasi tunggal yang benar atas Islam ini kemudian memunculkan klaim kebenaran sepihak dan pada saat bersamaan menafikan kebenaran kelompok lain. Gejala seperti ini memang sama sekali bukan hal baru dalam sejarah perkembangan pemikiran Islam di dunia. Pasang surut Mu'tazilah sebagai faham resmi dan faham yang ditentang oleh negara, peristiwa yang dialami oleh sejumlah intelektual Muslim di Timur Tengah, dari Ali Abd al-Raziq, Ahmad Khalafullah sampai Nasr Hamid Abu Zaid, hijrah-nya Fazlur Rahman dari negeri asalnya, Pakistan menuju Amerika Serikat, menjadi saksi sejarah yang nyata.[60]

Bagaimanapun tafsir tunggal kebenaran Islam sangatlah berbahaya karena bisa menimbulkan monopoli politik dan kekuasaan atas nama agama, sebagaimana pernah terjadi di masa lampau dalam pengalaman di Timur Tengah era dinasti kekhalifahan.

Klaim sebagai pemilik kebenaran tunggal Islam bisa terjadi karena para pendukung gagasan kebenaran tunggal Islam umumnya berada pada posisi yang menganggap seluruh dimensi dalam Islam bersifat –dalam bahasa Arkoun- *unthought* dan *unthinkable*. Jika bidang yang tak terfikirkan

[60] Percakapan dengan aktivis Muslim HMI dan UIN Syarif Hidayatulah Ciputat, 4 Agustus 2005.

ini dikembangkan dan diperluas dalam sebuah tradisi pemikiran partikular, maka horizon nalar intelektual akan mengalami ancaman dan fungsi kritisnya mengalami penyempitan dan melemah, karena ruang yang bisa dipikirkan menjadi sangat ketat dan hanya tersisa sedikit ruang yang terbuka bagi penafsiran (Arkoun, 2003). Tidak bisa dipungkiri, *unthought* ini, lanjut Arkoun, terbentuk dari sejumlah isu yang terakumulasi yang kemudian dinyatakan sebagai *unthinkable* dalam sebuah logosphere yang sudah *given*. Oleh Arkoun, *logosphere* diformulasikan sebagai ruang mental kebahasaan yang digunakan secara bersama-sama oleh sekelompok orang yang menggunakan bahasa yang sama untuk mengartikulasikan pemikiran-pemikiran, penggambaran, memori kolektif dan pengetahuan mereka berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai fundamental yang diklaim sebagai *unifying weltanschaung*.[61]

Islam adalah agama dan pandangan hidup yang telah melahirkan peradaban yang gemilang di zaman Rasululah dan para khalifah. Untuk mempertahankan dan mengembangan peradaban Islam tidak berarti menolak mentah-mentah masuknya unsur-unsur peradaban asing. Sebaliknya untuk bersikap adil terhadap peradaban lain tidak berarti bersikap permisif terhadap masuknya segala macam unsur dari peradaban lain tanpa proses adaptasi dan akulturasi.

Dalam hal ini, bisa dipahami pandangan Pradana Boy, dosen Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) yang sedang menempuh studi di ANU Canberra, bahwa dengan adanya kesadaran *progressive-regressive* dalam konteks perdebatan Islam Fundamental dan Liberal ini, akan terbentang

[61] Pradana Boy ZTF, *Pluralitas Kebenaran Islam*, h. 2-4.

sebuah fakta bahwa pencarian kebenaran Islam sepanjang sejarah agama ini, melahirkan kebenaran yang tidak tunggal.

Tidak tunggalnya kebenaran ini, bukan menunjukkan bahwa Islam mengalami reduksi pemaknaan atau Islam semakin jauh dari sumbernya, tetapi justru menampakkan betapa Islam telah terbukti sebagai agama yang *durable* dan mampu memasuki relung-relung zaman tanpa kehilangan aktualitasnya.

Karena itu, dalam menghadapi Islam Liberal, publik harus mendorong Adian Husaini, Adnin Armas, Hamid F. Zarkasyi dan kawan-kawan di kubu Islam Fundamental bersikap secara intelektual atas Kelompok Pembaharuan bersama aneka jenis keturunannya dari kelompok Islam Liberal sampai pencinta Hermeneutika, yang semua itu harus dihadapi secara memadai dengan ilmu pengetahuan yang mengimbangi mereka, secara santun dan elegan, jauh dari sikap emosional dan brutal. Sebaliknya, Islam Liberal pun dalam merespon Islam Fundamental seyogianya tidak bersikap reaksioner dan mengesankan kegenitan intelektual.

Dalam konteks modernitas, apa yang diperlukan memang bukan semata-mata penafsiran yang progresif terhadap Islam, tetapi juga mempertimbangkan masa lalu sebagai sumber inspirasi untuk mencapai kebenaran Islam. Arkoun mengistilahkannya sebagai metode *progressive-regressive*. Dengan metode ini yang dimaksudkan oleh Arkoun adalah penggabungan perspektif historis jangka panjang dengan perspektif jangka pendek, sebab semua bentuk diskursus kontemporer yang lahir dalam konteks Islam, niscaya selalu merujuk kepada periode awal Islam dan "Golden Age"

peradaban Islam yang digunakan sebagai referensi mitologis untuk mengaktifkan dan menghadirkan kembali nilai dalam bentuk paradigma etis dan hukum, yang perlu diuji kembali berdasarkan prinsip "kritik nalar Islam." [62]

Pada akhirnya, saya kira benar prediksi pemikir dan akademisi Yudi Latif Ph.D[63] bahwa di Indonesia sekarang dan masa depan, percaturan wacana Islam dalam memperebutkan ruang politik dan sosial-kultural bagi "aspirasi, kepentingan dan cita-cita" masing-masing, akan tergantung kepada seberapa jauh kekuatan modal sosial-kultural dan modal ekonomi dari kalangan Islam Liberal dan Fundamental dalam berlomba untuk merebut ruang sosial dan politik. Juga dalam menegakkan kebajikan sosial dan keadaban. Percaturan wacana itu akan lebih banyak diwarnai oleh lingkaran Adian Husaini cs dan Ulil Abshar Abdalla cs yang banyak mengisi ruang publik generasi saat ini, dengan karakter, metode, cara, langgam dan epistemologi masing-masing, yang sangat mungkin cenderung mengarah kepada "moderasi" mengingat perkembangan peradaban ummat manusia yang bergerak cepat-pesat akibat derasnya pragmatisme, modernisme, dan globalisme yang membawa panji-panji demokrasi dan pluralisme, saling imbang dan saling kontrol, di tengah kompleksitas dunia yang terus berubah. Pertarungan Islam Liberal versus Fundamental dalam berebut struktur peluang politik dan ruang publik masih akan berlangsung lama dan belum ada titik terang apakah proyek Islamisme ini akan terus

---

[62] Pradana Boy ZTF, *Pluralitas Kebenaran Islam*, h. 2-4.
[63] Yudi Latif, "Kejarangan Membawa Nilai", *Kompas*, 2 Juli 2005.

berlanjut atau justru buntu di tengah jalan. *Wallahualam bissawab.*[*]

REFERENSI:

Abdalla, Abshar, Ulil dan Sahrasad, Herdi, "Meruntuhkan Hegemoni Tafsir, Menghidupkan Kembali Teks," *Ulumul Quran,* Nomor 3 Vol.5 tahun 1994.

Abdalla, Abshar, Ulil, dkk, *Islam Liberal dan Fundamental: Sebuah Pertarungan Wacana* (Yogyakarta: Elsaq, 2003).

Adian Husaini, "Paradoks Kebangkitan Islam," *www.icmi. org*, diakses pada 20 Desember 2004.

Al Qurtuby, Sumanto, "Quo Vadis Jaringan Islam Liberal?," *Islamlib.com,* 10 maret 2005.

Arifin, Syamsul, "Menakar Otentitas Islam Liberal," *Jawa Pos,* 1 Februari 2000.

Arkoun, Muhammad, *Aina Huwal Fikrul Islamy Al-Mu'ashir* (Beirut: Darus Saqi, 1993).

Barton, Greg, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Antara Paramadina, 1999).

Bashori, Agus Hasan, "Bahaya Islam Liberal", *Risalah,* 22 April 2004.

Boy ZTF, Pradana, "Orientalisme dan Dialog AntarKitab," *Paper* (Canberra: ANU, 2004).

Brumberg, Daniel, "Islam, Elections and Reform in Algeria," *Journal of Democracy*, Vol. 2, Musim Dingin 1991

Gazali, Hatim, "Menyikapi Hal Yang Dianggap Benar," *Wacana,* 6 Juli 2004.

Keck and Sikkink, *Activists Beyond Borders: Transnational Advocacy Networks in International Politics* (Ithaca: Cornell University Press, 1998).

Kurzman Charles, (ed), *Wacana Islam Liberal,* (Jakarta: Paramadina, 2001).

Kurzman, Charles (ed.), *Liberal Islam, A Sourcebook* (Oxford University Press, 1998).

Kurzman, Charles "Pengantar," dalam *Islam Liberal dan Konteks Islaminya* (Jakarta: Paramadina, 2001).

Latif, Yudi, "Kejarangan Membawa Nilai", *Kompas,* 2 Juli 2005.

Lewis, Bernard, *What Went Wrong? Western Impact and Middle Eastern Response* (London: Phoenix, 2002)

Maruih, Sufandi, "Dialog Dengan Aktivis JIL," *Harian Terbit,* 30 Januari 2004.

Mu'adz, Muhammad Arkoun, "Anggitan Tentang Cara-Cara Tafsir al-Quran ," *Jurnal Salam,* vol.3 No. 1/2000.

Muhtadin AR, "Islam Jalan Damai", *Media Indonesia* 7 Januari 2003.

Rachman, Munawar, Budhy, "Perjumpaan Kristen-Islam perlu Toleransi Sejati", *Kompas,* 20 Agustus 2005.

S. Karni, Asrori, "Komunitas", *GATRA,* 17 Nopember 2003.

Sahal, Ahmad, "MUI dan Fatwa Antidemokrasi," *Tempo,* 21 Agustus 2005.

Suhelmi, Ahmad, *Pemikiran Politik Barat* (Jakarta: Gramedia, 2001).

Tarrow, Sidney, *Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics* (Cambridge University Press, 1998).

__________, "Ulama Dihina, Tumpas Gerombolan Liberal", *Majalah Sabili,* No. 3, Tahun XIII, 25 Agustus 2005.

__________,"Gado-Gado Islam Liberal," *Sabili, No. 15, Thn IX/2001.*

PERKEMBANGAN JARINGAN TERORISME GLOBAL, NASIONAL DAN UPAYA PENCEGAHANNYA

Peristiwa serangan teroris terhadap gedung World Trade Center di New York dan Gedung Pentagon di Washington, Amerika Serikat (AS), yang diduga menelan korban lebih dari sepuluh ribu jiwa pada tanggal 11 September 2001 dan bom di Kuta, Bali, yang menelan korban meninggal 184 orang telah memunculkan kaum fundamentalis Islam sebagai 'musuh' dalam peta bumi gerakan politik dunia saat ini. Kaum yang berusaha melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam secara kaffah (totalitas) dalam kehidupan keseharian-nya ini dipandang sebagai kaum yang tidak bisa hidup berdampingan secara damai dengan masyarakat 'modern' yang menerapkan cara-cara hidup Barat. Bagi kaum funda-mentalis, Barat (termasuk seluruh kultur dan bahkan orang-

orangnya) adalah haram dan najis berada di dunia ini. Bagi kaum Barat, fundamentalis adalah gerakan sosial keagamaan yang menyebarkan teror demi terwujudnya sistem politik agama.

Ernest Gellner pernah mengatakan bahwa dalam hubungannya dengan iman dan realitas sosial, Islam pada dasarnya merupakan sebuah gerakan sosial yang menyeluruh. Ini karena Islam beranggapan bahwa tegaknya tata sosio-politik di dalam masyarakat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari misi agama. Dalam konteks demikian, kata Gellner, agama dan negara merupakan kesatuan organis yang saling berkait satu dengan lainnya karena keduanya menggarap sistem sosio-politik yang satu.

Darul Islam —suatu komunitas keagamaan Islam yang bersifat tertutup dan radikal di Indonesia— memang tidak mengakui adanya pemisahan kegiatan manusia dalam domain-domain kegiatan keagamaan di satu pihak, dengan domain-domain kegiatan sekuler (duniawi) di pihak lain. Menurut Hasan Zaman, Islam mewujudkan dirinya sebagai *dien* atau cara hidup yang seimbang, dengan konsepsi yang komprehensif mengenai ibadah, meliputi keseluruhan aspek kehidupan individu dan sosial, berdasarkan pada prinsip-prinsip tauhid, mulkiyah, khilafah, risalah, syariah, dan ijtihad. Prinsip-prinsip mana diterapkan melalui metode-metode aksi dan implementasi ibadah berupa shalat, zakat, dan jihad. Cita-cita permanen mereka untuk mendirikan sebuah negara Islam yang dipimpin oleh muslim terbaik telah membuat mereka melakukan serangkaian tindakan yang merupakan *blue-print* dari pemahaman mereka tentang ide dan cita-cita tersebut.

Di dalam Islam ada dua istilah yang menjadi pilar kemajuan dan kekuatan Islam, keduanya berasal dari kata yang sama, yakni jihad dan ijtihad. Kedua-duanya berasal dari kata jahada, yang bermakna bersungguh-sungguh, memaksimalkan daya dalam melaksanakan sesuatu. Pada masa awal pergerakan Darul Islam di tahun 1940-an dan 1950-an, jihad mereka berdasarkan ijtihad melalui proses diskursus yang panjang.

Dalam perkembangan gerakan Darul Islam berikutnya (1962 hingga 1998), kata jihad dan ijtihad digunakan untuk lapangan yang berbeda, di mana jihad bermakna bersungguh-sungguh bekerja keras, memaksimalkan daya, dana dan cara untuk menegakkan ajaran Islam. Sedang ijtihad bermakna bersungguh-sungguh bekerja cerdas, memaksimalkan daya, dan cara untuk mengilmui ajaran Islam. Jihad diaplikasikan di bidang amal, sedang ijtihad diterapkan di bidang ilmu, kedua-duanya diklaim oleh komunitas Darul Islam jadi prasyarat bagi kejayaan Islam, namun secara bawah sadar mereka telah meninggalkannya. Faktor-faktor dan situasi-situasi fungsional dan struktural apakah yang telah mempengaruhi proses devaluasi ini?

Asal Mula dan Bentuk-bentuk Terorisme

Terorisme telah dilakukan sepanjang sejarah dengan tingkat keberhasilan yang beragam. Taktik teroris adalah termasuk tindakan pembunuhan, penculikkan, penyanderaan, dan pemboman. Terorisme adalah alat yang digunakan oleh kaum pembangkang (anarkis) sejak awal abad ke dua puluh yang juga memulai terjadinya Perang Dunia I dengan dibunuhnya Bangsawan Ferdinand di Sarajevo. Terorisme

mendapatkan tempat baru di dunia sebagai akibat perang dingin, perpecahan daerah kekuasaan persemakmuran, dan penyebaran media masa. Terorisme menjadi suatu taktik untuk mendapatkan perhatian, meraih pengikut, dan menantang pemerintahan yang berdiri. Terorisme Moderen berakar dari Timur Tengah. Awal mulainya terorisme yang kita kenal sekarang adalah dari penyerangan terhadap atlit Israel pada Olimpiade di Munich pada tahun 1972. Dalam dasawarsa terakhir ini, dinamika yang mendorong terorisme telah berubah secara signifikan. Jatuhnya Uni Soviet telah diiringi dengan menghilangnya beberapa kelompok teroris terkenal seperti Faksi Tentara Merah, Brigade Merah, dan Tentera Merah Jepang. Negara yang tadinya tidak ragu dalam memberikan bantuan terhadap kegiatan terorisme telah berkurang dan dalam beberapa kasus, menghentikan dukungannya. Contoh terkini adalah keputusan yang diambil oleh pemerintahan Syria untuk mengusir seorang teroris terkenal, Abdullah Ocalan, yang memimpin kelompok Partai Buruh Kurdi dari markasnya di lembah Bekaa. Tetapi, munculnya sekte agama radikal seperti Aum Shinryko di Jepang telah menimbulkan ancaman baru. Penggunaan gas Sarin oleh Aum di sebuah terowongan di Jepang pada tahun 1995 adalah kejadian yang membuka mata negara-negara di seluruh dunia untuk menilai kembali cara penyerangan terorisme. Terorisme tetap menjadi taktik bagi: (1) Kelompok yang menentang perdamaian di Timur Tengah; (2) Kaum Sayap Kiri; (3) Tentara kesukuan yang bertujuan penghapusan suku lain; (4) Pemerintahan tertekan yang bertujuan menekan kembali rakyatnya; (5) Penyalur Narkotika Internasional yang bertujuan merubah atau mengintimidasi kebijakan pemerintahan yang ingin me-

nangkal kegiatan ilegal mereka.

Terorisme berevolusi karena adanya suatu keperluan; keperluan untuk mempengaruhi pengamat, keperluan untuk bertahan hidup, keperluan untuk menghukum mereka yang tidak percaya, dsb. Terorisme berkembang dalam lingkungan yang penuh dengan kekacauan politik dan ideology internal. Teroris biasanya menghasilkan daya dorongnya sendiri dan menekankan kehadiran dan keberadaan mereka. Untuk bisa membuktikan kemandiriannya, operasi mereka berikutnya harus lebih mengejutkan daripada yang sebelumnya. Seringkali kelompok ini membalikkan kepentingannya, mereka mendahulukan kepentingan pribadi diatas tujuan utamanya. Pada akhirnya, terorisme menjadi akhir bagi dirinya sendiri. Faktor yang memicu kekerasan terorisme: (1) Politis: Pemerintahan yang menekan, tidak disukai, atau korup; (2) Sosial: Tidak adanya kelas menengah atau adanya diskriminasi yang terlampau tinggi; (3) Ekonomi: Kemiskinan yang parah, tingkat pengangguran yang tinggi; (4) Ideologi: alur pikir politis yang berbeda dan bertentangan; (5) GeoPolitis: Adanya populasi asing yang besar dan/atau perselisihan perbatasan; (6) Keagamaan: pertikaian agama, kekerasan agama; (7) Pengaruh Asing: dukungan asing mengenai kegiatan yang menentang pemerintahan.

Tindak teroris yang paling umum adalah pemboman, pembunuhan, penculikkan, penyanderaan, pembajakan, pembajakan pesawat terbang, serangan bersenjata, penganiayaan, dan pembakaran.

Pemboman adalah teknik penyerangan yang paling sering digunakan. Bom adalah benda yang murah, mudah untuk dirakit atau diperoleh, mudah untuk diletakkan, dan lang-

sung mendapat perhatian media. Sebagai tambahan mendapatkan sorotan, bom juga menimbulkan ketakutan dan membunuh orang atau merusak benda kepemilikan. Bomb teroris hamper selalu disebut "alat peledak rakitan" atau "Bom rakitan" untuk membedakannya dari munisi standar militer. Bom dapat diantar dengan kendaraan, ditaruh dengan tangan atau dilontarkan (baik dilemparkan atau dengan cara mekanis atau ledakan), atau dapat dikirim melalui jasa pos sebagai surat. Ancaman bom baik yang asli maupun palsu dibuat untuk membuat orang percaya, tidak peduli alat apa yang dipakai. Teroris telah mempelajari bahwa dengan jumlah ancaman palsu yang tercampur dengan ancaman asli dapat membuat pihak berwenang kebingungan dan menebak-nebak.

Pembunuhan adalah metode lazim lainnya yang digunakan teroris. Yang dimaksud dengan pembunuhan adalah dibunuhnya seorang sasaran yang direncanakan sebelumnya, biasanya dengan bom atau senjata ringan. Ini adalah taktik teroris tertua dan masih digunakan oleh semua kelompok teroris. Langkah-langkah dalam merencanakan dan melakukan pembunuhan adalah sama dengan penculikan. Teknik untuk melaksanakannya berkisar dari penyerang tunggal dengan menggunakan senjata atau bom, sampai penyerangan, penyerbuan, dan penyergapan bersenjata yang direncanakan dengan matang.

Penculikan juga merupakan modus umum teror. Yang dimaksud dengan penculikan adalah penangkapan dan penahanan seorang individu sementara bernegosiasi untuk mendapatkan tuntutan tertentu. Operasi penculikan ini membutuhkan suatu tingkat keamanan pada tahap interogasi, yang

tidak diperlukan pada situasi penyanderaan. Negosisasi biasanya terjadi melalui percakapan yang tidak legal pada periode waktu tertentu, untuk menukar korban dengan rekan teroris yang dipenjara, penerimaan tuntutan teroris, atau permintaan uang tebusan. Penculikan yang berhasil dapat memberikan masukan dan bagi teroris, dibebaskannya rekan yang dipenjara, dan publisitas. Di kebanyakan negara, penculikan oleh penjahat yang meminta uang tebusan memiliki tingkat ancaman yang sama tingginya dengan penculikan dengan latar belakang politis. Penjahat menggunakan metoda operasi yang sama dengan teroris, dan penculikan untuk mendapatkan uang tebusan mungkin akan menghasilkan kengerian yang jauh lebih besar di seluruh negara.

Tindakan penyanderaan adalah bentuk teror yang cukup sering dilakukan teroris. Penyanderaan adalah penguasaan seseorang atau suatu fasilitas dengan hadirnya seorang sandera. Bedanya dari penculikan adalah penculik biasanya menyembunyikan tawanannya tetapi penyandera menghadapi pihak yang berwenang dengan sanderanya. Tindakan lainnya adalah pembajakan. Pembajakan adalah pengambilan alih suatu kendaraan beserta penumpang dan isinya secara paksa. Tujuan dari pembajakan adalah untuk mengacaukan ekonomi, mempermalukan pemerintah, mendapatkan jawaban atas tuntutan yang diajukan ke pemerintah, dan untuk memperoleh dukungan. Pembajakan truk pengangkut makanan adalah taktik yang sering digunakan di Amerika Latin. Pembajakan ini diikuti oleh penyebaran makanan ke orang-orang miskin secara gratis. Teroris juga menyebarkan propaganda yang memberitahukan tujuannya.

Dengan teknologi yang berkembang sekarang, sarana penerbangan merupakan saranan yang mudah untuk melakukan teror. Pembajakan Udara misalnya. Pembajakan udara adalah sejenis pembajakan dengan sasaran pesawat terbang. Pembajakan pesawat terbang adalah taktik yang digunakan pada tahun enam puluh dan tujuh puluhan, lalu mereda sampai awal tahun delapan puluhan. Meskipun keamanan telah diperketat sedemikian rupa, pembajakan pesawat tetap terus terjadi.

Bagi kalangan pejuang kemerdekaan, dengan memiliki senjata maka akan mudah melakukan teror. Penyerangan Bersenjata atau ancaman akan melakukan penyerangan bersenjata dapat dilaksanakan oleh seorang penembak tunggal ataupun sekelompok penyerang. Biasanya serangan tersebut dapat berupa pembunuhan jarak dekat, dekat penembakan jarak jauh, dengan menggunakan tembakkan terbidik atau dengan serangan dahsyat dengan senjata jenis militer. Penyergapan terencana jarang gagal. Hal ini adalah betul dalam hal penyergapan teroris, yang menggunakan pengalih perhatian, dan telah direncanakan dan dilaksanakan dengan tepat. Teroris memiliki waktu di pihaknya dan ia akan menghabiskan waktu berminggu-minggu untuk mempersiapkan operasinya. Cara pembunuhannya adalah dalam bentuk penyergapan dengan peledak, penyergapan dengan senjata atau penembakan dengan mobil.

Bentuk lazim lain terorisme adalah penganiayaan. Penganiayaan biasa dilakukan oleh teroris untuk menghukum angggotanyayang telah melakukan pelanggaran keamanan, membelot, atau berubah menjadi informan. Penganiayaan adalah cara yang efektif karena merupakan contoh hidup

dari metoda yang digunakan oleh teroris untuk dilihat semua orang. Penembakkan tempurung lutut adalah contoh penganiayaan yang sering digunakan oleh PIRA.

Pembakaran juga sering dilakukan oleh kalangan teroris. Pembakaran adalah salah satu taktik yang digunakan oleh teroris. Biasanya dilakukan oleh teroris yang kurang terorganisir dan kurang terlatih. Operasi pembakaran biasanya dilakukan oleh teroris pada saat dia masih baru berdiri untuk menumbuhkan rasa percaya diri. Walau bagaimanapun juga, operasi pembakaran menghasilkan berita bagi media masa dan juga menumbuhkan ketakutan pada masyarakat umum. Istilah *terorisme* berarti kekerasan yang bertujuan politis dan telah direncanakan sebelumnya terhadap sasaran bukan pelawan oleh organisasi sub-nasional atau rahasia, yang dilakukan untuk mempengaruhi orang banyak (biasanya adalah pemerintahan yang sesung-guhnya).

Istilah *terorisme internasional* berarti terorisme yang melibat-kan penduduk atau wilayah negara lebih dari satu. Istilah *kelompok teroris* berarti kelompok atau bagian dari kelompok apapun yang melakukan tindakan terorisme. Suatu tindakan dapat disebut sebagai tindakan terorisme apabila tindakan tersebut memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) tindakan tersebut melanggar hukum; (2) tindakan tersebut menggu-nakan atau mengancam akan menggunakan kekerasan atau kekuatan; (3) Kekerasan tersebut ditujukan kepada orang-orang, biasanya penduduk tidak berdosa, atau kepemillikan; (4) Tindakan tersebut dirancang untuk memaksa suatu pemerintahan atau masyarakat; (5) Tindakan tersebut men-dukung ideology yang bertujuan politis atau agama.

Posisi AS terhadap terorisme adalah jelas. Kebijakan AS telah berevolusi berdasarkan pengalaman memerangi terorisme selama bertahun-tahun dan merupakan hasil dari tanggapan berbagai badan administrasi. Kebijakan tersebut didasarkan pada empat prinsip: (1) Tidak mendukung teroris, jangan membuat kesepakatan dengan teroris, dan jangan penuhi tuntutannya; (2) Perlakukan teroris sebagai penjahat, kejar mereka secara agresif, adili mereka atas kejahatannya, dan berlakukan hukuman pada mereka; (3) Memberikan tekanan terhadap negara yang mendukung teroris dengan cara memberikan pembatasan ekonomi, diplomasi dan politis terhadap mereka dan menasehati negara lain untuk melakukan hal yang sama; (4) Meningkatkan kemampuan perlawanan terorisme negara-negara yang bekerjasama dengan AS dan membutuhkan bantuan.

Pemerintah AS percaya dan membuktikan bahwa kebijakan untuk tidak menyerah kepada teroris adalah cara terbaik untuk meredam tindakan-tindakan terorisme. Apabila kita menyerah kepada teroris, maka mereka akan mengulang kembali tindakannya. Namun, berbicara kepada siapapun mengenai kesehatan, keadaan dan pelepasan sandera berbangsa Amerika secara aman telah menjadi kebijakan Amerika sejak lama. Berbicara dengan penyandera bukan berarti kami akan menyerah sehingga memberikan rasa percaya diri kepada teroris.

Amerika Serikat menerapkan peraturan hukum apabila berhadapan dengan teroris. Perkejaan praktek polisi dan pembagian intelijen merupakan peran yang sangat penting dalm melawan terorisme. Amerika Serikat menyediakan fasilitas pembagian intelijen dan penyebaran daftar “orang

yang dicari" kepada pemerintahan yang bekerjasama. Amerika Serikat mendukung pemerintah lain untuk menunjuk para teroris dengan nama mereka, mempelajari tujuan mereka, ideologi, sponsor, dan rencana operasi yang mereka susun. Petugas penegak hukum disarankan untuk menangkap dan mmengadili para teroris. Hukum mengenai prosekusi, pertukaran barang bukti, dan pengasingan harus diterapkan secara gencar untuk menghukum mereka. Kerja sama internasional yang berkesinambungan dan pekerjaan praktek polisi adalah kunci keberhasilan dalam memerangi ancaman teroris.

Dukungan dana kenegaraan telah memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi efektifitas operasi teroris. AS dan para sekutunya telah mengambil langkah berani dalam hal perlawanan terhadap negara-negara yang mendukung terorisme, meliputi pengurangan jumlah diplomat yang diperbolehkan memasuki negara AS dan sekutunya dan memberikan sanksi politis dan ekonomis yang terbatas. Dibawah pengarahan PBB, embargo terbatas dan sanksi ekonomis penuh dapat dan akan diterapkan pada negara yang melatih, merawat, melindungi teroris dan menerapkan terorisme.

Terorisme Berbasis Agama

Terorisme yang berbasis agama sangat banyak dan beragam. Dari kalangan umat Islam, dikenal beberapa kelompok teroris yang umumnya terdiri dari kelompok radikal dan kaum fundamentalis. Kaum fundamentalis Islam, sebagai musuh negara-negara sekuler, adalah *"an aggressive revolutionary movement as militant and violent as the Bolshevik, Fascist,*

and Nazi movements of the past", kata Amos Perlmutter, seorang ilmuwan politik. Selanjutnya, Perlmutter menyebutkan bahwa kaum fundamentalis ini sangat "*authoritarian, anti-democratic, anti-secular,*" dan tidak bisa bersahabat dengan "*Christian-secular universe*"[1] dan tujuannya adalah untuk mendirikan sebuah "negara Islam transnasional yang bersifat otoriter".[2]

Martin E. Marty dan R. Scott Appleby yang sangat serius dalam 'Proyek Fundamentalisme', menyebutkan bahwa fundamentalisme selalu mengikuti suatu pola.[3] Mereka adalah "*embattled forms of spirituality,*" yang muncul sebagai respon terhadap suatu krisis kecurigaan (*perceived crisis*). Kaum fundamentalis terlibat dalam konflik dengan musuh-musuh sekular yang dicurigai membuat kebijakan-kebijakan yang bertentangan secara frontal dengan agama. Kaum fundamentalis tidak menganggap pertentangan frontal ini sebagai sebuah "arena bermain" (*play ground),* melainkan sebuah "medan perang" (*battle field*) yang serius, yang bukan sekadar sebuah perlawanan politik konvensional, melainkan menganggapnya sebagai sebentuk "perang kosmik" (*cosmic war*) antara kekuatan-kekuatan yang *haq* dan kekuatan yang *bathil*. Mereka takut terhadap —dan selalu merasa adanya ancaman— kaum *kafir* untuk membasmi mereka yang berasal dari kekuatan-kekuatan Barat sekular; maka mereka berusaha membentengi diri dengan doktrin dan praktek yang pernah hidup di masa lalu (doktrin dan praktek *jihad*).

---

[1] Lindsay Murdoch, "Bin Laden 'Funded Christian-haters," *Sydney Morning Herald*, 28 September 2001.

[2] Paolo Pasicolan adalah seorang *policy analyst* pada Asian Studies Center of the Heritage Foundation.

[3] Baca, Martin E. Marty and R. Scott Appleby (eds), *Fundamentalisms Observed* (Chicago: University of Chicago Press, 1991).

Untuk menghindari diri mereka dari "dunia buruk" dan menutup diri dari kontaminasi "perang kosmik" itu, kaum fundamentalis seringkali mundur dan menyempal dari *mainstream* masyarakat untuk menciptakan budaya tandingan (*counterculture*); dan kaum fundamentalis bukanlah kaum yang bermimpi di siang bolong. Mereka menyerap rasionalisme pragmatis dari modernitas, dan, di bawah bimbingan para pemimpin kharismatik mereka, menyaring apa yang perlu dari dunia teknikal untuk membuat rencana aksi yang seringkali bersifat destruktif.4 Dari apa yang kita saksikan pada peristiwa penyerangan serempak terhadap gedung WTC (World Trade Center) dan Pentagon, Bom Bali, Bom Malam Natal, Bom Marriot dan lain-lain adalah kum-pulan dari ahli-ahli yang memiliki kemampuan teknikal setaraf pilot dan teknisi yang mengerti fungsi-fungsi transponder, *black box*, radar, elemen kimia, komponen elektronika lanjut dan *global positioning tool-box* serta kemampuan manajerial lainnya.

Kaum fundamentalis merasa bahwa mereka berperang melawan kekuatan-kekuatan yang mengancam nilai-nilai yang sangat suci dari komunitas mereka dan reaksi mereka akan bersifat teror politik.[5] AS yang muncul sebagai aktor tunggal pemenang "perang dingin" semenjak runtuhnya kekuatan Komunis di blok Soviet dianggap banyak kalangan fundamentalis telah menyergap kesadaran orang-orang Islam sebagai kekuatan adidaya yang tak mungkin dikalahkan dan siap menjadikan masyarakat muslim sebagai

[4] Baca, Jonathan R. White, *Terrorism: An Introduction* (Wadsworth Publishing, 1991).

[5] Baca, Alex P. Scmid & A.J. Jongman, *Political Terrorism*: *A New Guide to Actors, Authors, Concepts, Data Bases, Theories, and Literature* (USA: Transaction Publisher, 2005), 2nd Edition.

musuh berikutnya. Aksi serangan berbentuk teror di New York dan Washington itu sesungguhnya merupakan sebuah respon yang berisi pesan yang ingin membuktikan bahwa AS ternyata bertumpu pada "jaring laba-laba" yang begitu lemah.[6]

Selama "perang dingin" antara negara formal dengan kelompok teroris yang tak memiliki batas negara, para aktor perang sering kali emosional, panik dan kurang menghargai posisi masing-masing. Dari beberapa temuan studi Karen Armstrong,[7] modernisasi telah membawa polarisasi masyarakat pada posisi-posisi ekstrim yang saling berlawanan, dan untuk menghindari eskalasi konflik, hanya ada satu cara: kita harus mencoba memahami *the pain and perceptions of the other side*.[8] Karena selama ini mereka sering menyatakan: "*nobody knows our trouble we see, nobody knows our problem*", maka akan sangat mengejutkan jika kemudian sebagai konsekuensinya, "*nobody knows of what our plan of action*."

Bagi kita semua yang telah mencicipi kebebasan dan prestasi modernitas, Karen Armstrong merekomendasikan, "kita tak boleh berhenti untuk berempati dan bersimpati terhadap kesusahan dan penderitaan yang dialami sebagian komunitas kaum fundamentalis Islam."9 Ibarat pecandu narkoba, mereka tidak boleh dianggap sebagai kaum yang melanggar hukum yang harus dikejar-kejar, melainkan harus dipandang sebagai kaum yang membutuhkan perawatan untuk

---

[6] Lihat artikel Noam Chomsky, "On the US attacks", di website www.zmag.org.

[7] Karen Armstrong, *The Battle for God* (New York: Ballantine Books, 2001), h. 6.

[8] Karen Armstrong, *The Battle for God,* h. 88.

[9] Karen Armstrong, *Islam: A Short History* (New York: Modern library, 2000), h. 56.

mengobati penyakit ketergantungan dan ketakutan irasional mereka.10 "Modernisasi", menurut Karen Armstrong, "seringkali dirasakan tidak sebagai sebuah pembebasan melainkan sebuah serangan agresif".[11]

Berbeda dengan kaum fundamentalis, kaum radikal Islam justru memandang bahwa memahami agama secara meng-akar jauh lebih penting sebelum membuat rencana aksi yang cenderung bersifat kekerasan. Penyeragaman pandangan terhadap komunitas yang memberikan respon terhadap modernisasi, pemerintahan sekular dan budaya Barat ke dalam sebutan "fundamentalis" sesungguhnya merupakan sebuah penyederhanaan yang berlebihan. Spektrum dunia pergerakan Islam sesungguhnya menyimpan warna-warna yang kaya dalam khazanah yang cukup plural. Tidak semua kalangan yang kritis dan anti terhadap AS, Israel, budaya Barat, materialisme, kapitalisme, isu-isu feminisme, hak asasi manusia dan demokrasi dapat dikategorikan sebagai kaum 'fundamentalis'.

Kaum radikal Islam yang bangkit dengan garis yang ber-beda, bahkan secara diametral berlawanan dengan funda-mentalis adalah taksonomi pergerakan Islam yang mesti dilihat secara berhati-hati. Adanya fakta bahwa funda-mentalisme telah muncul dalam ledakan-ledakan kecil dan besar di semua budaya (budaya agama monotheis, maupun

---

[10]. Contoh yang jelas dari ketakutan irasional ini, misal salah satunya, adalah: "… saya sangat takut akan ancaman Allah jika saya tidak melaksanakan jihad terhadap kaum kafir dan sekutunya sesuai dengan Surah At-Taubah ayat 39 yang berbunyi "jika kamu tidak berperang di jalan Allah, maka Allah pasti akan mengazab (menyiksa) kamu dengan siksaan yang amat dahsyat…" Lihat pengakuan Imam Samudra dalam "Tabel Motif & Tujuan Peledakan Bom Bali 12 Oktober 2002", Dokumen Polri, 2003, h. 2.

[11]. Karen Armstrong, *The Battle for God,* h. 90.

politheis) mengindikasikan sebuah kekecewaan yang meluas terhadap masyarakat modern di mana banyak di antara kita malah merasakannya sebagai sesuatu yang membebaskan, menyenangkan dan memberdayakan. Proyek-proyek yang secara kasat mata dipandang baik oleh kaum liberal, di mana kaum radikal Islam juga termasuk di dalamnya, —seperti demokrasi, penciptaan perdamaian, kepedulian terhadap lingkungan, pembebasan wanita, atau kekebasan berbicara— dapat dipandang buruk, bahkan haram, oleh kaum fundamentalis.

Kaum fundamentalis seringkali mengekspresikan dirinya secara kekerasan, tapi kekerasan itu adalah cara atau jalan yang paling sederhana yang memancar dari ketakutan mereka yang mendalam akan hancurnya komunitas, tradisi, nilai dan budaya yang mereka anggap luhur. Dilihat dari latar-belakang pendidikan, mereka adalah kaum intelektual —yang oleh Bruce Hoffman[12] disebut sebagai *"violent intellectual"*— yang berusaha mencapai tujuannya karena dimotivasi oleh doktrin-doktrin agama yang mereka persepsikan secara berbeda (*out of mainstream*).

Setiap gerakan kaum fundamentalis yang pernah saya teliti, terdapat sebuah ketakutan irrasional akan proses penghancuran terhadap mereka secara sistematis. Menurut Scott Appleby, kemapanan kaum sekular bertujuan untuk menghapuskan keberadaan mereka sebagai kaum beragama dari muka bumi ini, sekalipun di AS sendiri. Kaum fundamentalis yakin bahwa respon mereka secara kekerasan adalah sebentuk perlawanan terhadap kekuatan-kekuatan yang telah menakut-nakuti mereka selama ini. Kaum funda-

[12] Baca, Bruce Hoffman, *Inside Terrorism* (Columbia University Press, 1998).

mentalis percaya bahwa mereka selama ini melawan demi mempertahankan agama dan mempertahankan masyarakat yang beradab.

Sekarang banyak masyarakat dalam komunitas dunia Islam yang menolak persepsi bahwa Barat sebagai tak bertuhan, tidak adil, dan dekaden. Kaum Islam radikal baru tidaklah sesederhana kaum fundamentalis yang membenci Barat.[13] Bagaimanapun, kaum radikal baru Islam tidak merupakan gerakan yang homogen. Muslim radikal pada pokoknya berupaya meletakkan rumah mereka sendiri dalam suatu tata-aturan yang berbeda sesuai dengan yang mereka persepsikan. Tidak sebagaimana kaum fundamentalis yang mengidap dislokasi kultural yang parah, kaum radikal juga merasa nyaman dengan zaman modern.

Adalah mustahil untuk menggeneralisasi bentuk-bentuk ekstrim kelompok agama karena mereka bukan hanya berbeda antara tiap-tiap negara, tapi juga berbeda antara tiap-tiap kota bahkan di tiap-tiap kampung dan desa. Hanya sebagian kecil saja dari kelompok fundamentalis yang setia dengan aksi-aksi teror, sementara banyak kaum radikal Islam bahkan sangat bersahabat, menginginkan perdamaian, berpengharapan pada hukum dan tata-aturan, dan menerima nilai-nilai positif dari masyarakat modern. Jika kaum fundamentalis tidak pernah punya waktu untuk berbicara tentang demokrasi, pluralisme, toleransi beragama, penciptaan perdamaian, kebebesan individu atau pemisahan antara agama dan negara, maka komunitas lainnya bahkan

---

[13] Karen Armstrong, dalam bukunya *Muhammad: A Biography Of The Prophet* (2000), mengingatkan tanggung-jawab Barat terhadap munculnya bentuk radikalisme baru Islam, yang dalam pengertian tersembunyi akan bangkit secara tiba-tiba seperti dalam fantasi-fantasi lama masyarakat Barat.

yang radikal sekalipun justru menganggap semua itu adalah sublimasi nilai-nilai agama dalam bahasa profan. Semoga AS —dan negara-negara yang sedang dilanda semangat anti teroris karena serangkaian bom yang meledak di tempat-tempat ibadah Nasrani atau di tempat-tempat di mana terjadinya penetrasi kapitalisme, liberalisme dan sekular-isme Barat— tidak panik dan salah dalam membedakan mana yang fundamentalis dan mana yang radikal.

Sebenarnya, kaum teroris bukanlah kelompok baru dalam dunia pergerakan radikal dan fundamentalis Indonesia. Kaum teroris adalah gabungan dari inti ajaran fundamen-talis dan radikal yang bertemu dalam satu titik perencanaan perang melawan apa yang mereka persepsikan sebagai 'kezaliman'. Di Indonesia, kelompok teroris ini berjumlah kecil: (1) Jamaah Islamiyyah, dan (2) Darul Islam (terbatas pada faksi tertentu). Bagan di bawah ini memperlihatkan bagaimana anatomi pemikiran ideologis kaum teroris.

Perkembangan Jaringan Terorisme Global

Teroris internasional melaksanakan serangan sebanyak 199 kali pada tahun 2002, sebuah jumlah yang nyata menurun (44% dari 355 serangan yang tercatat selama tahun 2001. Jumlah total orang yang tewas dalam serangan tahun lalu sebanyak 725 orang, jauh berkurang dibandingkan sejumlah 3295 orang yang tewas pada tahun sebelumnya, yang termasuk ribuan kerusakan fatal akibat serangan 11 Septem-ber di New York, Washington dan Pennsylvania. Sejumlah 2013 orang terluka oleh serangan teroris pada tahun 2002, berkurang dari jumlah 2283 orang yang terluka pada tahun sebelumnya. Sejumlah 77 kali serangan anti AS, berkurang

65% dari jumlah 219 serangan. Alasan utama menurunnya angka tersebut adalah akibat menurunnya secara tajam serangan pengeboman terhadap jaringan pipa minyak di Kolombia (41 kali tahun yang lalu dibandingkan dengan 178 kali tahun 2001). Tigapuluh warga Negara AS terbunuh dalam serangan teroris tahun lalu. Terorisme dengan jaringannya yang beragam telah muncul di seluruh dunia: Afrika, Asia dan Eropa.

Terorisme di Afrika bisa dilihat dari serangan-serangan simultan terhadap penerbangan komersial dan sebuah hotel di Mombasa, Kenya menewaskan 12 warga Kenya dan tiga wisatawan warga Israel telah menjadi bukti yang dramatik dan tragis akan penderitaan negara-negara Afrika di gurun Sahara akibat teroris, akibat kelompok suku asli dan teroris pemberontak yang menggunakan taktik-taktik teroris dan kelompok teroris internasional. Komitmen dan dukungan Kenya, Jibouti dan Etiopia sangat penting bagi keberhasilan pengejaran usaha-usaha perlawanan AS terhadap terorisme di wilayah Tanduk Afrika dan semenanjung Arab. Keinginan untuk bekerjasama dalam usaha global menentang terorisme telah meluas dari Sudan hingga Afrika Selatan dan dari Gambia sampai sejumlah kelompok di Somalia. Dalam tahun 2002, hampir seluruh pemerintah Afrika di wilayah gurun Sahara mempertahankan komitmen mereka untuk memerangi terorisme global, melalui usaha-usaha bilateral dan multilateral. AS menggandeng negara-negara Afrika melalui sejumlah cara untuk menguatkan kemampuan mereka melawan terorisme.

Walaupun telah dilakukan percobaan untuk meningkatkan usaha menentang terorisme sejak 11 September 2001, hal-hal

yang membuat banyak negara Afrika lebih disukai sebagai lokasi teroris terus berlangsung. Hal ini meliputi kekurangan sumber-sumber dana dan teknik, wilayah-wilayah yang tidak stabil dan kekerasan yang berkepanjangan, korupsi, lemahnya sistem pengadilan dan peraturan keuangan, dan batas-batas negara yang tidak rapat, serta garis pantai yang tak teratur yang memfasilitasi gerakan orang dan barang-barang gelap. Perang sipil dan kekerasan etnik yang berlangsung di beberapa wilayah dilanjutkan untuk mengalihkan perhatian atas peristiwa terorisme perorangan.

Sudan, salah satu dari tujuh negara pendukung terorisme dibahas dalam bagian tentang negara-negara pendukung. Pada bulan April, menyusul kematian Jonas Savimbi, Angola mengakhiri konflik sipil 27 tahunnya dengan Serikat Nasional untuk Kemerdekaan Total Angola (UNITA), sebuah organisasi yang bertanggungjawab atas sejumlah serangan brutal terhadap warga sipil. Separatis di Provinsi Cabinda melanjutkan kampanye gerilya mereka menentang Pemerintah. Pada bulan Mei, terjadi serangan granat terhadap konvoi pekerja minyak AS di Cabinda.Walaupun tidak ada pernyataan bertanggungjawab, tampaknya para penyerang adalah kaum separatis Cabinda.

Jibouti, negara yang bertindak sebagai garis depan yang penting dalam perang global melawan terorisme dan sebagai anggota Liga Arab, telah mengambil sikap tegas menentang organisasi-organisasi dan individu-individu teroris internasional. Jibouti menjadi tuan rumah kekuatan koalisi terdiri atas lima Negara dan satu-satunya pangkalan militer AS di gurun Sahara Afrika.Pemerintah negera ini telah menutup lembaga-lembaga keuangan jaringan teroris dan

berbagi informasi keamanan tentang adanya kegiatan teroris di wilayah itu. Komite perlawanan terhadap terorisme di bawah Presiden Guelleh bergerak untuk memperkuat koordinasi dan tindakan berdasarkan informasi mengenai organisasi-organisasi teroris.

Pada bulan Oktober, AS mendirikan Satuan Tugas Gabung-an Bersama – Tanduk Afrika (CJTF-HOA). Bermarkas di Jibouti, CJTF-HOA mengkoordinasi Koalisi melawan terorisme yang beroperasi di enam Negara Afrika Timur dan Yaman. Kenya diserang sekali lagi oleh teroris pada tanggal 28 November 2002, ketika teroris menembakkan rudal ke sebuah pesawat terbang Israel yang membawa lebih dari 200 orang penumpang dan meluncurkan mobil dengan sebuah bom ke sebuah hotel yang terkenal dengan wisatawan Israel di kota pantai Mombasa. Rudal tersebut tidak mengenai pesawat, tetapi 12 warga Kenya dan tiga warga Israel terbunuh oleh bom bunuh diri dalam serangan di hotel. al-Qaeda mengklaim bahwa mereka bertanggung-jawab atas serangan simultan itu. Jika benar, hal tersebut mewakili serangan al-Qaeda kedua di tanah Kenya sejak ledakan bom mobil di Kedutaan Besar AS di Nairobi pada tanggal 7 Agustus 1998, yang menewaskan 291 orang dan melukai lebih dari 5000 orang.

Kurang berfungsinya pemerintah pusat Somalia, berlarut-nya ketidakstabilan dan kekerasan dan garis pantai yang panjang, batas negara yang tidak rapat dan dekatnya dengan Semenanjung Arab menjadikan Afrika sebagai lokasi yang potensial bagi teroris internasional mencari tempat transit atau titik peluncuran pelaksanaan operasi di manapun. Mali, Nigeria, Ruwanda, Afrika Selatan ,Tanzania

dan Uganda seluruhnya menunjukkan dukungan yang berlanjut dalam perang global melawan terorisme. Sekalipun demikian, kekurangan sumber-sumber dan pelatihan terus berlangsung yang menghambat kemajuan negara-negara tersebut.

Di Asia, jaringan terorisme telah muncul di Indonesia, negara-negara Timur tengah, India, Pakistan, Afghanistan, Filipina, Thailand, Malaysia, Singapore, dll. Tahun 2002, Asia Selatan tetap menjadi pusat peperangan dalam perang global melawan terorisme. Kemerdekaan Afganistan dari rejim Taliban menghapus basis utama dan tempat berlindung al-Qaeda, tetapi sel-sel sisa terus menghadirkan bahaya di seluruh Afganistan.Teroris yang melarikan diri juga menimbulkan masalah di Pakistan dan negara-negara lain yang mereka singgahi. Semua negara di kawasan Asia Selatan secara kuat mendorong usaha Koalisi menentang terorisme al-Qaeda dan sisa-sisa Taliban, dan penetapan Otoritas Transisi baru di Afganistan telah membantu kemajuan yang sangat berarti bagi keamanan kawasan. Usaha lebih lanjut dan bantuan internasional jangka panjang bagaimanapun juga akan diperlukan bagi kesinambungan kemajuan.

Pakistan tetap menjadi sekutu kunci dalam usaha anti teror , menawarkan bantuan kepada AS bagi operasi di Afganistan, melaksanakan kerjasama penegakan hukum secara rapat, dan mengambil tindakan keras terhadap kaum ekstrimis dalam negeri. Sementara itu kekejaman kaum ekstrimis di Kashmir, diperburuk dengan infiltrasi dari Pakistan melalui Garis Pengawasan, terancam menjadi titik pemicu konflik India-Pakistan yang lebih luas selama hampir sepanjang

tahun.

Gencatan senjata di Sri Lanka antara Macan Pembebasan Elam Tamil dan pemerintah Sri Lanka berlangsung selama tahun 2002, dan difasilitasi oleh Norwegia, kedua belah pihak telah mulai mengadakan pembicaraan langsung, yang bertujuan pada berakhirnya perang sipil Negara yang berkepanjangan dan peserta terorisnya. Pada saat yang sama, pemberontakan Mao di Nepal berlanjut menjadi konflik berdarah digolongkan menurut taktik-taktik teroris yang digunakan. (Pemerintah Nepal dan kaum Mao melaksanakan gencatan senjata pada bulan Januari 2003.

Pada tahun 2002, serangan teroris yang paling mematikan sejak serangan 11 September 2001 di AS, terjadi di kawasan Asia Timur- yaitu pengeboman yang terjadi di Bali, Indonesia. Meskipun negara-negara Asia Timur telah menyodorkan dukungan berarti bagi perang melawan terorisme, telah membuat kemajuan dalam menahan dan menghalangi teroris, dan membangun serta memperbaiki kemampuan melawan terorisme yang mereka miliki, banyak Negara kemudian melipatgandakan usaha semacam itu menyusul serangan 12 Oktober di Bali. Penahanan yang sangat nyata berlanjut sejalan dengan usaha-usaha yang tidak kasat mata untuk meningkatkan peraturan dan kewenangan rejim demi membatasi arus uang para teroris, tenaga kerja, dan barang-barang, melalui bank, batas Negara dan para perantara yang terdapat di kawasan

Pada tahun 2002, orang-orang Afghan, dibantu oleh koalisi internasional yang dipimpin oleh AS, dengan meyakinkan mengalahkan rejim Taliban yang brutal, yang sebelumnya telah menyediakan tempat perlindungan bagi teroris dan

kaum ekstrimis dari seluruh dunia- termasuk dari Amerika Utara, Eropa, Afrika, Timur Tengah, dan Asia. Kaum ekstrimis telah menjadikan Afganistan sebagai sebagai lapangan pelatihan dan basis operasi terorisme di seluruh dunia. Pemimpin-pemimpin senior al-Qaeda, termasuk Usama bin Laden - yang diinginkan oleh AS atas perannya dalam serangan 11 September sekaligus dalam pengeboman Kedutaan Besar AS di Kenya dan Tanzania pada tahun 1998 - telah dipusatkan di Afganistan, dan dilindungi oleh rejim Taliban yang tidak sah. Pemerintah Afghan yang baru telah mengikrarkan dukungannya bagi perang melawan terorisme.

Di India, New Delhi meneruskan dukungannya bagi Koalisi global menentang terorisme pada tahun 2002 sambil menjalankan usahanya sendiri menghadapi ancaman-ancaman internal dan eksternal. Pemerintah India menjadikan Undang-undang Pencegahan Terorisme untuk memperlengkapi pemerintah pusat dan daerah dengan perangkat penegakan hukum tambahan dalam perang melawan terorisme. Rancangan Undang-undang anti pencucian uang telah disetujui oleh Parlemen pada tahun 2002 dan ditandatangani menjadi Undang-undang pada Januari 2003. Begitu dilaksanakan, Undang-undang ini akan menentukan unit intelijen keuangan untuk memantau transaksi teroris yang dicurigai. Pada bulan Mei, India dan AS meluncurkan Forum Keamanan Cyber Indo-AS untuk menjaga infrastruktur-infrastruktur penting dari serangan cyber. Kelompok Kerja Bersama AS-India bertemu dua kali sepanjang tahun 2002.

India menghadapi ancaman teroris yang sangat jelas. Ancaman itu terutama bersumber dari aktivitas militant yang menentang berlanjutnya pengaturan India atas provinsi Kashmir yang bermusuhan. Pada bulan Desember 2001, teroris menampilkan serangan dramatis terhadap Parlemen India. Pada bulan Januari 2003 orang-orang bersenjata memulai tembakan terhadap polisi di luar gedung Pusat Amerika di Calcutta, yang menewaskan empat polisi India yang ditugasi melindungi gedung tersebut. Pemerintah India menuding bahwa Lashkar-e-Tayyiba (LT) berada di balik serangkaian serangan keras tersebut. Di antara serangan itu terdapat serangan Mei terhadap pangkalan tentara di Jammu yang menewaskan 36 orang, serangan Juli di Kashmir membunuh 27 penduduk sipil, dan dua serangan di kuil Ragunath di Jammu yang masing-masing menewaskan sedikitnya 19 orang. India juga menuduh LT yang memprakarsai serangan 26 September di kuil Akshardham, Gujarat, yang menewaskan 31 orang. AS telah menunjuk Lashkar-e-Tayyiba sebagai Organisasi Teroris Luar negeri dan menunjuknya menurut Eksekutif Order 13224.

Pemerintah Nepal pada tahun 2002 secara tegas mendukung kegiatan anti teror AS dan sangat tanggap terhadap usaha-usaha multilateral untuk pemolisian terorisme internasional. Nepal adalah Negara kelima yang tergabung dalam 12 konvensi dan protokol internasional terkait dengan teror-isme. Bagaimanapun fokus utama Nepal tetap pada pem-berontakan tujuh tahun Mao, yang telah mengklaim hampir 7000 jiwa sebelum akhir tahun 2002. Pemberontakan Mao terus mengancam warga negara dan harta milik AS di Nepal. Mengulang retorika dan tindakan anti AS mendo-

rong kaum Mao memandang Barat mendukung Kathmandu sebagai kendala kunci bagi tujuan mereka menetapkan doktrin komunisme. Lebih lanjut, kaum Mao telah memalsukan jaringan kerja sama dengan kelompok ekstrimis di wilayah Asia Selatan. Pada tahun 2002, Mao mengklaim tanggung jawab atas pembunuhan dua orang pengawal Kedutaan Besar AS. Dalam pernyataan pers, mereka mengancam misi-misi luar negeri, termasuk Kedubes AS, untuk menyurutkan negara-negara asing lain mendukung pemerintah Nepal. Kaum Mao juga menargetkan symbol-simbol AS, yang juga mengebom pabrik Coca Cola setempat pada bulan November 2001 dan Januari serta April 2002. Pada bulan kaum Mao menghancurkan sebuah truk Pepsi Cola dan isinya. Keuangan pemerintah yang terbatas, control perbatasan yang lemah, dan infrastruktur keamanan yang terbatas telah menjadikan Nepal sebagai titik logistic dan transit yang nyaman bagi beberapa militant dari luar negeri dan teroris internasional. Negara ini juga memiliki target-target lunak yang menjadikan Negara ini sebagai tempat menarik bagi operasi teroris. Keamanan masih tetap lemah di banyak fasilitas publik, termasuk Bandara Internasional Kathmandu, tetapi AS dan negara-negara lain bekerja dengan aktif dengan pemerintah Nepal untuk memperbaiki keamanan. Departemen Imigrasi Nepal telah membuat perbaikan terbaru pada daftar kemampuannya.

Pada tahun 2002, Pakistan tetap menjadi mitra penting dalam koalisi global menentang terorisme, memainkan peran kunci dalam diplomasi, penegakan hukum, dan pertarungan militer untuk memberantas al-Qaeda. Pada tahun 2002, Pakistan tetap menjadi mitra penting dalam Koalisi global menentang terorisme, memainkan peran

kunci dalam diplomatik, penegakan hukum, dan pertarungan militer untuk membasmi al-Qaeda. Pakistan menghibahkan dukungan logistik dan hak-hak penerbangan untuk membantu Operasi Kebebasan Abadi, di samping berkonsultasi sangat ekstensif dengan AS dan PBB dalam cara-cara memerangi pendanaan teroris, dan membuat draft undang-undang anti pencucian uang. Pada bulan Januari Pemerintah Pakistan menahan dan mentransfer hampir 500 orang tersangka al-Qaeda dan Taliban kepada penjagaan AS, menahan ratusan ekstrimis, dan melarang lima organisasi ekstrimis: Lashkar el-Tayyiba (LT), Jaish el-Mohammed (JEM), Sipah el-Sahaba Pakistan (SSP), Tehrik-i-Jafria Pakistan (TJP), dan Tehriki Nifazi Shariati Mohammadi (TNSM). Pemerintah AS telah menunjuk LT dan JEM sebagai Organisasi teroris luar negeri dan menunjuk kedua organisasi tersebut menurut Perintah Eksekutif 13224.

Usaha-usaha perlawanan terhadap terorisme antara AS–Pakistan telah meluas. Kerjasama itu meliputi usaha pengamanan perbatasan, penyelidikan kejahatan, di samping beberapa proyek pelatihan jangka panjang. Pada tahun 2002, AS dan Pakistan membentuk Kelompok Kerja pada Kerja sama Perlawanan terhadap Terorisme dan Penegakan Hukum. Pertemuan-pertemuan yang diadakan menjadi forum yang mendiskusikan usaha-usaha AS-Pakistan yang sedang berjalan, di samping peningkatan kemampuan dan kerja sama. Islamabad memfasilitasi pemindahan lebih dari 400 orang teroris yang tertangkap kepada penjagaan AS, dan Pakistan masih menjadi rangking ketiga di dunia (sesudah AS dan Swiss) dalam menahan aset teroris. Sekalipun demikian, penyalahgunaan sistem transfer uang informal yang dikenal dengan *hawala* tetap menjadi masalah serius di

kawasan ini.

Perkembangan positif di Sri Lanka yang bermula pada tahun 2001 berlanjut hingga tahun 2002. Menurut sejarah, Macan Pembebasan Tamil Elam (LTTE) adalah salah satu kelompok terror dunia yang paling mematikan, yang mengawali penggunaan rompi bom bunuh diri dan telah menggunakan serangan bom bunuh diri jauh lebih banyak daripada organisasi teroris manapun. Gencatan senjata antara LTTE dan Pemerintah, yang ditentukan pada bulan Desember 2001, terlaksana pada bulan Februari 2002. Negosiasi perdamaian formal dimulai pada bulan September 2002 dan berlanjut hingga tahun 2003.

Pemerintah Filipina melanjutkan dukungan kuatnya dalam perang melawan terorisme pada tahun 2002. Pemerintah Filipina dan AS berjasama dengan erat untuk menyelesaikan krisis penyanderaan yang melibatkan warga negara AS di Filipina dan meningkatkan usaha untuk menyeret kelompok Abu Sayyaf ke pengadilan sebagai teroris yang bertanggungjawab atas penculikan yang terjadi. AS menjatuhkan dakwaan terhadap kelompok ini dan menawarkan hadiah bagi lima pemimpin kelompok Abu Sayyaf serta melatih dan membantu kekuatan Filipina untuk mengalahkan kelompok Abu Sayyaf. AS juga menambahkan Partai Komunis Filipina/Tentara Rakyat Baru (CPP/NPA) ke dalam daftar Organisasi Teroris Luarnegerinya, sekaligus memasukkan pemimpin CPP/NPA dan CPP Jose Maria Sison dalam daftar kesatuan dan individu yang ditunjuk di bawah Perintah Eksekutif 13224. Pemerintah Filipina juga menghukum Agus Dwikarna hukuman penjara selama 10 tahun dengan tuduhan kepemilikan bahan peledak dan mene-

ruskan konsultasi dan kerja sama dengan negara-negara lain di kawasan ini dalam masalah perlawanan terhadap terorisme.

Indonesia membuat langkah hebat dengan menyeret para pelaku pengeboman Bali ke pengadilan dan mengekspos cakupan dan kekuatan mematikan kelompok teroris Jemaah Islamiyah (JI), yang diyakini bertanggungjawab atas pengeboman itu. Polri bekerja sama erat dengan mitranya dari negara lain di kawasan ini dalam penyelidikan di Bali dan memperluas penyelidikan di balik seragan Bali untuk memandang JI secara umum, yang kadangkala melalui kerjasama dengan negara-negara lain di kawasan ini. Pemerintah Indonesia menahan Abu Bakar Bashir, pemimpin spiritual JI, dengan beberapa tuduhan, termasuk percobaan pembunuhan terhadap Presiden Indonesia dan tuduhan yang berkait dengan serangkaian pengeboman yang terjadi pada bulan Desember 2000. AS terus bekerjasama erat dengan Indonesia untuk meningkatkan kemampuan Indonesia menghadapi terorisme melaui program pelatihan dan bantuan, dan mendukung undang-undang dan Peraturan yang berlaku di dalam negeri.

Jepang sungguh-sungguh membuat komitmen dalam perang melawan terorisme pada tahun 2002 dan terus menyediakan bantuan kuat bagi Operasi Kebebasan Abadi, memberikan bantuan utama untuk membangun kembali Afganistan, dan bantuan lain bagi negara-negara Asia Timur untuk memperkuat kemampuan anti teror mereka. Jepang juga menjadi peserta aktif dalam G-8, EU, Forum Regional ASEAN (ARF), dan usaha-usaha PBB mengkoordinasi kegiatan anti terror, serta menjadi pemimpin regional dalam

menaati standar internasional dalam menerapkan rejim anti teror yang efektif.

Australia terpukul keras atas pengeboman Bali, di mana 85 warga negaranya tewas. Tragedi itu menguatkan Australia untuk memberikan jalan keluar mantap untuk meminjamkan dukungan tegas dalam perang melawan terorisme, termasuk dukungan bagi penyelidikan Bali. Australia menyiapkan kekuatan tempur bagi Operasi Kebebasan Abadi dan sangat aktif dalam kerjasama regional. Australia juga menjalankan bentuk luas bagi mekanisme hukum dan peraturannya terhadap anti teror, dan melakukan reorganisasi yang sangat jelas untuk memperkuat kemampuan dalam negeri dan luar negeri dalam melawan terorisme.

Malaysia dan Singapura terus melakukan penahanan terhadap para tersangka JI, memotong operasi serta kemampuan berfungsi mereka. Malaysia menyetujui konsep pusat perlawanan terorisme regional dan melanjutkan pelaksanaannya sampai akhir tahun. Pemerintah Filipina, Indo-nesia, dan Malaysia menandatangani kesepakatan dalam kerja sama anti terorisme, yang selanjutnya diikuti oleh Thailand dan Kamboja. Beberapa negara lain di kawasan ini juga menandatangani kerjasama anti terorisme sejenis, dan kerjasama antar pemerintah – khususnya penegakan hukum dan agen-agen intelijen – meningkat pada tahun 2002, yang memungkinkan keberhasilan tambahan dalam menghalangi atau menahan teroris di kawasan ini.

Thailand juga menjadi sekutu setia dalam perang melawan teror dan tetap bekerja sama erat dengan AS dan Negara tetangganya dalam usaha-usaha anti teror, intelijen, dan penegakan hukum. Pada tahun 2002, akses AS terhadap

pangkalan udara dan wilayah angkasa Thai berlanjut hingga menjadi begitu penting bagi proyeksi kekuatan yang sangat cepat dalam panggung Operasi Kebebasan Abadi. Thailand menyumbang bagi Dana Rekonstruksi Afganistan PBB dan menyetujui untuk mengirim insinyur militer berpartisipasi dalam rekonstruksi Afganistan. Organisasi teroris di kawasan ini, meskipun demikian, menunjukkan keluwesan dan kelenturan mereka dalam menghadapi usaha-usaha anti teror yang lebih efektif yang dilakukan negara–negara Asia Timur. Kaum teroris mengganti target dan pola operasi mereka, dan terus bekerja keras hingga tuntas sehingga rejim anti teror di kawasan ini sungguh-sungguh terlibat secara efektif dengan ancaman bahwa teroris terus mengambil sikap terhadap Negara Asia Timur dan terhadap mitra dan sekutu mereka. Lalu lintas perdagangan obat bius, orang, dan senjata, contohnya, seperti juga kejahatan terorganisir, korupsi oleh pejabat pemerintah, dan beberapa kekurangan dalam hukum dan Peraturan yang berlaku, tetap menjadi titik kelemahan yang dapat dieksploitasi oleh teroris.

Sementara negara-negara regional melakukan banyak hal untuk menyingkap, menahan, dan mengacaukan JI pada tahun 2002, organisasi ini terus berfungsi, dan banyak pemimpinnya tetap bertahan. JI dan kelompok teroris lainnya terus menjadi ancaman yang nyata bagi kawasan ini, dan hanya melalui peningkatan kolaborasi dan kerja sama ancaman-ancaman itu dapat diatasi.

Pelajaran berharga yang dipetik dalam tahun-tahun belakangan ini adalah bahwa kerja sama dan komunikasi semacam itu barangkali menjadi senjata terpenting dalam

persenjataan melawan terorisme. Melalui kerja sama semacam itu, bangsa-bangsa dapat memperkuat keamanan, penegakan hukum, intelijen, dan lembaga keuangan yang mencanangkan garis depan dalam perang global melawan terorisme.

Kecenderungan terorisme juga melanda Eropa dan Eurasia. Negara-negara Eropa melanjutkan kerja sama dalam wujud kemitraan yang erat dengan AS dalam kampanye global anti teror. Sebagai tambahan dalam berbagi informasi intelijen dan dalam kerja sama dengan AS dalam penyelidikan jaringan kerja sama dengan negara-negara tetangga, negara-negara Eropa menjalankan kerja sama lebih dekat dengan negara tetangganya. Salah satu hasilnya, para penguasa Eropa menahan sejumlah besar teroris, mengacaukan rencana-rencana serangan teroris, dan menyadap kabar pembiayaan yang ditujukan bagi organisasi teroris.

Kepala Negara dan pemerintah Eropa berjumpa dalam KTT Praha November 2002 untuk mendorong komitmen NATO mengembangkan kemampuan yang ada agar dapat mengatasi tantangan-tantangan baru seperti terorisme dan senjata pemusnah massal. Inggris terus meningkatkan kerja samanya dengan AS, melipatgandakan usaha anti terornya di seluruh dunia. Inggris mengesahkan penahanan beberapa ekstrimis di Inggris yang terkait dengan dakwaan terorisme. Inggris juga secara agresif bergerak untuk membekukan asset organisasi dan perorangan dalam jaringan teroris dan mengharamkan kelompok teroris. Inggris menyediakan bantuan anti-teror yang nyata dan pelatihan bagi sejumlah negara dan bekerja dengan negara-negara lain untuk menyelidiki kasus pengeboman Bali Oktober 2002.

Italia melanjutkan kerja percontohannya dalam menentang terorisme, menghambat sel-sel teroris yang dicurigai dan menangkap tersangka al-Qaeda di Milan dan tempat-tempat lain yang menyediakan dukungan bagi operasi teroris dan perencanaan serangan. Sebuah pengadilan Italia menghukum penjara anggota kelompok pejuang Tunisia, menjadi penghukuman pertama terhadap kelompok terkait al-Qaeda di Eropa sejak 11 September 2001. Anggota-anggota Brigade Merah Baru, salah satu kekuatan penuh yang mengganggu kehidupan di Italia pada tahun 70-an, dicurigai sebagai pembunuh penasehat Pemerintah Italia. Kelompok teroris lainnya juga menjalankan serangan-serangan skala kecil.

Penyelidikan Spanyol yang dahsyat atas kelompok ekstrimis menghasilkan penahanan teroris yang dicurigai dalam jumlah nyata, termasuk dua orang yang diyakini sebagai penyumbang dana jaringan al-Qaeda. Polisi Spanyol bekerja sama dengan mitranya dari Prancis, juga terus mencatat sukses-sukses berarti melawan organisasi teroris Pembebasan Tanah Air Basque (ETA), menahan dua pemimpin senior kelompok ini. Penguasa Spanyol dan Prancis menyepakati hembusan kuat terhadap Kelompok Pertahanan Antifasis Satu Oktober (GRAPO) ketika mereka menjalankan penyelidikan bersama yang hasilnya menahan lebih dari 20 orang tersangka GRAPO. Penyidik Prancis memeriksa serangan teroris yang membunuh sekurang-kurangnya 20 warga negara Prancis di Tunisia, Pakistan dan Indonesia.

Kerja sama di antara penguasa penegak hukum Eropa merupakan salah satu gambaran dari begitu banyak keberhasilan selama tahun-tahun yang lalu. Sebagai contoh, dalam

tambahan kerjasama gabungan antara Prancis, dan Spanyol melawan ETA dan GRAPO, Prancis, Belgia, dan Inggris, serta negara lain terlibat dalam penyelidikan "pengebom sepatu" Richard Reid.

Pejabat pemerintah Jerman meneruskan penyelidikan ekstensif mereka terhadap para ekstrimis yang tergabung dengan al-Qaeda sel Hamburg, yang mendukung pemba-jakan 11 September. Jerman juga menempatkan teroris kelas tinggi dalam pengadilan, termasuk anggota sel Hamburg dan empat warga Afrika Utara yang dituduh melancarkan serangan terhadap pasar Natal Strasbourg tahun 2000. Dua puluh warga negara Jerman menjadi korban serangan teroris di Jerba, Tunisia dan di Bali, Indonesia.

Turki menahan sejumlah perorangan yang memiliki ikatan dengan al-Qaeda dan meneruskan perjuangan melawan kelompok teroris domestik yang berbahaya. Untuk pertama kalinya, Yunani menahan anggota Organisasi Revolusioner 17 November, menandai kemajuan berarti mengatasi masalah terorisme dalam negeri. Penahanan itu tampaknya telah memulai penguraian dan pembongkaran salah satu kelompok teroris tertua di Eropa.

Negara-negara Eropa Tenggara secara aktif juga mendukung koalisi internasional melawan terorisme. Albania dan Bulgaria telah meluaskan selimut perijinan pendaratan dan penerbangan. Bersama Kroasia, negara-negara tersebut mengirimkan pasukan mereka dalam Kekuatan Bantuan Keamanan Internasional di Afganistan dan bantuan senjata dan amunisi bagi Tentara Nasional Afgan. Albania dan Bosnia dan Herzegovina telah menutup organisasi nirlaba yang terkait dengan jaringan teroris dan membekukan aset

teroris, dan Pemerintah Bosnia menahan dan memindahkan ke bawah kendali AS beberapa teroris yang dicurigai merencanakan serangan terhadap Kedutaan Besar AS di Sarajevo. Denmark juga membuat kontribusi yang patut dicatat dalam perang melawan terorisme. Dalam kekuatan ekonomi di bawah kepemimpinan Ketua Uni Eropa, dalam menguji daya kerja badan persetujuan Uni Eropa, mereka membekukan asset kelompok teroris, meskipun mereka tidak diseret menurut Resolusi Dewan Keamanan PBB Komite Sanksi 1267. Dalam kekuatan militer, mereka melanjutkan komitmen bagi Operasi Kebebasan Abadi melalui Kontingen Denmark-Norwegia – F-16 Belanda ke pangkalan udara Manas.

Asia Tengah, yang bertahun-tahun menderita akibat menjadi tempat berpusatnya ekstrimis Afghanistan, tidak menunjukkan aktivitas teroris yang nyata tahun 2002. Operasi Gerakan Islam Uzbekistan (IMU), sebuah kelompok yang tercatat dalam daftar kelompok teroris luar negeri AS yang tampaknya ingin menggulingkan Pemerintahan Uzbekistan dan membangun negara Islam, merupakan gangguan bagi sejumlah pemimpinnya dan banyak anggotanya terbunuh Di Afghanistan bertempur bersama Taliban melawan kekuatan koalisi. Sementara itu, Rusia ternyata tetap menjadi sasaran dalam serangan teroris tahun 2002, yang kebanyakan dilakukan oleh ekstrimis yang bertempur di Chechnya. Yang paling nyata adalah pendudukan Teater Dubrovka di Moskow 23 Oktober, di mana 40 ekstrimis menahan 800 penonton teater dan mengancam meledakkan teater tersebut

Negara-negara di kawasan ini terus menyiapkan hak-hak penerbangan dan berpangkalan sementara; berbagi infor-

masi penegakan hukum dan intelijen; dan mengidentifikasi, memonitor dan menahan anggota al-Qaeda dan teroris lainnya. Negara-negara di kawasan ini juga mengambil langkah diplomatik dan politik dalam partisipasinya bagi perjuangan internasional melawan terorisme, seperti ikut ambil bagian dalam beberapa atau semua dari 12 konvensi dan protokol internasional yang terkait degan terorisme.

Pada bulan Juli, Georgia mengekstradisi Adam Dekkushev ke Rusia atas dugaan keterlibatannya dalam pengeboman gedung apartemen di Moskow dan Volgodonsk tahun 1999, sebuah ledakan yang menyebabkan kematian sekitar 300 orang dan yang sampai saat ini belum ada seorangpun yang dihukum. Tersangka kedua dalam pengeboman yang sama, warga Negara Rusia, Yusef Krymshamkhalov diekstradisi ke Rusia bulan Desember.

Pada bulan Oktober, Georgia mengekstradisi lima orang yang dituduh terkait terorisme dan /atau teroris yang terkait dengan aktivitas Federasi Rusia. Mereka sekitar 13 orang pejuang Chechen yang ditangkap oleh penguasa Georgia di sepanjang perbatasan Rusia-Georgia dalam bulan Agustus. Sejak 11 September 2001, Presiden Akayev dari Republik Kyrgyz telah berulangkali menunjukkan dukungan kuatnya dalam perang melawan terorisme. Menyusul musibah 11 September, Pemerintah Kyrgyz segara menawarkan bantuan dan memperbolehkan AS dan Koalisi berjuang dan mendukung pesawat terbang untuk beroperasi dari pangkalan Ganci, yang berlokasi di Bandar Internasional Manas di Bishkek.

Pemerintah Kyrgyz telah bekerja mengarah terciptanya Agen Pengawas Obat baru yang dibentuk untuk mengendus

pengiriman obat-obat dan senjata yang berhubungan dengan terorisme di lintas batas Negara. Ribuan anggota Hizbut-Tahrir, gerakan politik ekstrim yang ingin mempertahankan pemerintahan teokratik di seluruh dunia Islam tak berbatas wilayah, hadir di Kyrgyzstan, Tajikistan , dan Uzbekistan. Pamflet-pamflet Hizbut-Tahrir penuh dengan seruan anti AS yang dibagikan di seluruh kawasan selatan Negara ini dan bahkan muncul di Bishkek. Tidak ada bukti yang dapat mencatat bahwa Hizbut-Tahrir telah bersepakat dengan kegiatan teroris manapun, tetapi kelompok ini jelas menunjukkan simpatinya terhadap tujuan kaum ekstrimis Islam.

Rusia terus mengalami perubahan dalam jumlah kejadian teroris tahun 2002, di mana banyak yang terkait dengan pemberontakan dan ketidakstabilan yang berlangsung di Chechnya. Konflik yang berkepanjangan, yang berawal di akhir musim panas 1999, telah diwarnai dengan kehancuran yang meluas, pemindahan ratusan ribu warga sipil, dan penyalahgunaan hak asasi manusia oleh pegawai pemerintah Rusia dan berbagai macam faksi pemberontak. Paling sedikit terdapat tiga faksi pemberontak, yang terdiri atas Chechen dan pejuang mujahidin luarnegeri – utamanya Arab – yang berhubungan dengan teroris Islam internasional dan telah menggunakan cara-cara teroris. (Mereka telah ditunjuk, pada tahun 2003, sebagai organisasi teroris untuk pembekuan asset di bawah Perintah Eksekutif 13224).

Pasukan Rusia terus melaksanakan operasi terhadap pejuang Chechen tetapi juga menghadapi kritik berat atas pelaporan pelanggaran hak asasi manusia.

Kelompok dan individu ekstrimis yang mencari jalan untuk menciptakan Negara Islam merdeka di Utara Kaukasus bertanggungjawab atas lusinan serangan teroris pada tahun 2002. Warga Negara Rusia menjadi korban serangan yang sering terjadi dengan komando peledakan, termasuk satu di antaranya yang membunuh 36 orang, 12 di antaranya anak-anak, dan melukai lebih dari 100 orang yang menghadiri parade Hari Peringatan di Kaspiisk, Dagestan. Tetapi peris-tiwa teroris yang paling serius di Rusia pada tahun 2002 terjadi tanggal 23 Oktober di mana lebih dari 40 orang militan bersenjata menyandera 800 orang pengunjung teater di Moskow dan menuntut segera diakhirinya operasi keamanan oleh seluruh orang Rusia di Chechnya. Lebih dari 120 sandera – termasuk seorang warga Negara AS (dan Warga Negara permanen sah AS) tewas akibat penggunaan gas narkotik selama operasi penyelamatan.

Para teroris, termasuk beberapa perempuan pembom bunuh diri mengenakan rompi bunuh diri berbahan peledak, menaruh beberapa peledak di seluruh teater dan meng-ancam akan mulai membunuh sandera jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Pemimpin serangan itu dikenali oleh wartawan mujahidin Chechen Kavkaz Tsentr, dan selanjut-nya oleh wartawan Rusia, sebagai Mosvar Barayev, koman-dan Rejim Islam Bertujuan Khusus (SPIR) dari Komite Pertahanan Negara Chechen (Majlis al-Shura). Pada tanggal 24 Oktober, agen berita Al-Jazirah mengenali kelompok ini sebagai kelompok yang sebelumnya tidak dikenal "Kelom-pok Sabotase dan Penyamaran Militer dari Martir Riyadh-al-Salikhin" (Batalyon Sabotase dan Kebang-kitan Riyadus-Salikhin dari Martir Chechen). Anggota kelompok ini menyatakan dalam pernyataan yang direkam bahwa, "

Tuntutan kami adalah menghentikan perang dan mengalahkan kekuatan Rusia. Kami menjalankan operasi atas perintah komandan militer Republik Chechen". Kedua kelompok ini – Rejim Islam Bertujuan Khusus dan Kelompok Penyamaran Militer Martir Riyadh al-Salikhin termasuk dalam daftar kelompok teroris yang ditentukan oleh pemerintah AS untuk pembekuan aset-asetnya.

Pada 24 Oktober, Pemerintah Rusia segera membuat draft dan memperkenalkan UNSCR 1440 untuk mendakwa penyandera Moskow sebagai tindakan teroris dan mendesak seluruh negara supaya seiring dengan tugas-tugas mereka di bawah UNSCR 1373 (2001), agar bekerja sama dengan penguasa Rusia untuk mencari dan menyeret ke pengadilan para pemberontak, perancang, dan penyokong serangan teroris. Resolusi ini diterima dengan suara bulat pada hari yang sama. Pada tanggal 1 November, komandan pemberontak Chechen Shamil Basayev, dalam suratnya kepada Kavkaz Tsentr, secara terbuka meminta tanggungjawab penuh untuk mengatur penyerangan. Menurut Basayev Batalyon Sabotase dan Kebangkitan Riyadus-Salikhin (RSMB) telah langsung berada di bawah komandonya dan bahwa Presiden Chechen Mashkadov tidak tahu apapun sebelum kejadian. Kemudian Basayev mengumumkan secara terbuka pengunduran dirinya sebagai Amir Dewan (Majelis) Muslim Chechnya dan Dagestan dan sebagai koman-dan Militer Brigade Internasional Islam, dengan mengatakan mulai sekarang dia akan mengabdikan diri sepenuhnya bagi RSMB.

Kurang dari satu bulan kemudian, sekali lagi Basayev mengomandoi unit-unit mujahidin Chechnya, menurut

surat kabar resmi Presiden Mashkadov, dan memperingatkan bahwa seluruh "fasilitas militer, industri yang strategis di wilayah Rusia, bagi kepentingan siapapun menjadi sasaran sah untuk diserang. Usama bin Laden yang juga dikenali para penyandera pada bulan November 2002 merekam pesannya, dengan mengatakan kepada Rusia," Jika kalian kesulitan hingga membunuh bangsa kalian di Moskow, ingatlah bangsa kami di Chechnya".

Pemerintah Uzbekistan masih meneruskan dukungan yang belum pernah diberikan sebelumnya bagi usaha-usaha Koalisi dalam perang terhadap terorisme selama tahun 2002. Hal itu berlanjut dengan pernyataan publik mengutuk tindakan teroris, dan pemerintah ini kemudian membolehkan pemusatan kekuatan koalisi di Karshi-Khanabad dan Termez dan penerbangan yang dilakukan oleh pasukan koalisi. Kementerian Pertahanan menugaskan lima perwira penghubung ke Markas besar Pusat Pengendali AS sehubungan dengan Operasi Kebebasan Abadi. Tashkent menyetujui semua permintaan AS untuk membekukan aset-aset kelompok yang berhubungan dengan pendanaan terorisme.

Jika dibandingkan dengan kawasan lain di dunia, Belahan Bumi Barat pada umumnya tidak menarik perhatian sebagai "zona panas" dalam perang melawan teror. Terorisme di kawasan ini tidak muncul pada tanggal 11 September 2001, bahkan negara Amerika Latin telah berjuang melawan sumber-sumber teroris dalam negeri selama puluhan tahun. Kelompok teroris internasional bahkan tanpa keraguan telah menjadikan Amerika Latin menjadi kancah peperangan untuk melanjutkan akibat-akibat yang mereka timbulkan di berbagai tempat. Pengeboman Kedutaan Besar Israel di

Buenos Aires tahun 1992 dan Pusat Kebudayaan Yahudi di Argentina tahun 1994 merupakan dua contoh terkenal. Serangan teroris Internasional yang lebih baru terjadi di Bali Indonesia dan Mombasa Kenya tahun 2002, yang menunjukkan bahwa tidak ada kawasan di dunia ini dan tidak ada jenis-jenis sasaran yang tidak dapat diraih oleh kepentingan strategi organisasi teroris Internasional.

Mengenali ancaman dan dampak terorisme terhadap pembangunan ekonomi dan sosial, di banyak negara-negara di dunia melintasi Amerika dan Karibia telah memberikan dukungan kuat bagi koalisi dukungan internasional menentang terorisme.pada bulan Juni Majelis Umum OAS di Barbados, negara anggota mengadopsi dan terbuka untuk penandatanganan Konvensi Inter Amerika Menentang Terorisme – sebuah tanggapan langsung terhadap serangan teroris 11 September 2001 di AS dan perjanjian internasional pertama menentang terorisme yang diadopsi sejak serangan-serangan tersebut.

Konvensi tersebut, sebuah instrumen hukum yang berisi dan dibangun atas konvensi dan protokol PBB sebelumnya yang berkait dengan terorisme Resolusi Dewan Keamanan PBB 1373, akan meningkatkan kerjasama regional dalam memerangi terorisme melalui pertukaran informasi, pengalaman dan pelatihan, kerjasama teknik, dan bantuan hukum yang saling menguntungkan. Konvensi akan menjadi kekuatan jika enam negara telah menempatkan instrumen mereka dengan ratifikasi. Semua negara anggota kecuali Dominika telah menandatangani, Canada menjadi negara pertama yang meratifikasi pada akhir tahun 2002. Presiden Bush meneruskan Konvensi kepada Senat untuk mendapat-

kan masukan dan isi terhadap ratifikasi tersebut pada bulan November.

Terpacu oleh Konvensi dan serangan 11 September, banyak negara telah menggali perangkat hukum untuk menumpas terorisme, menghambat pendanaan teroris, dan membuat wilayahnya seburuk mungkin bagi para teroris yang mencari tempat persembunyian yang aman.sejumlah negara, bahkan, masih terlibat dalam, bahkan, masih terlibat dalam perdebatan sengit tentang ruang lingkup UU Anti Terorisme yang baru yang akan memberikan kekuatan yang lebih luas bagi pemerintah yang diperlukan untuk menuntut diadakannya perang terhadap teror. Sebuah proyek Aksi Hukum menentang Terorisme OAS yang sedang berjalan dengan parlemen negara-negara Amerika Tengah sebagai contoh, ditujukan khususnya untuk membantu mengesahkan rancangan UU Anti Teror dan meratifikasi Konvensi Inter Amerika untuk menentang terorisme.

Belahan Bumi Barat telah membentuk contoh institusi anti teror regional dalam wadah Komite Inter Amerika Menentang Terorisme (disingkat dalam bahasa Spanyol CICTE). CICTE adalah badan OAS yang dibentuk tahun 1998. Sejak 11 September 2001, badan ini telah difungsikan kembali sebagai badan koordinasi yang efektif bagi negara anggota OAS dalam semua isu anti terorisme- tetapi dengan fokus utama dalam berbagi informasi, pelatihan, dan penguatan keuangan dan pengawasan perbatasan. Di bawah kepemimpinan AS dan Argentina selaku wakilnya, CICTE menjalankan kesekretariatan penuh selama tahun 2002 yang dibiayai oleh sumbangan sukarela dari negara-negara OAS. (Pada sesi reguler ketiga di El Salvador awal 2003, negara anggota

CICTE mengadopsi sebuah deklarasi San Salvador menentang terorisme dan membuat rekomendasi atas inisiatif menentang terorisme untuk adopsi oleh Konfrensi khusus bagi keamanan belahan Bumi, yang diadakan pada bulan Mei 2003. Deklarasidan rekomendasi itu sama-sama merupakan panggilan untuk meningkatkan kerjasama guna mencegah dan memerangi terorisme serta mengenali ancaman yang muncul yang diarahkan pada dunia Barat oleh kelompok-kelompok teroris internasional dan serangan atas keamanan Cyber.)

OAS pada tahun 2002 juga telah memainkan suatu peran penting dalam penyidikan sebuah pengalihan perhatian haram akhir tahun 2001 dari lebih 3.000 pucuk senjata AK-47 beserta amunisinya dari persediaan Kepolisian dan Tentara Nikaragua kepada Pasukan Pertahanan Kolumbia (AUC), yang telah ditunjuk AS sebagai organisasi teroris luar negeri dan ditunjuk menurut perintah eksekutif 13244 dalam pendanaan teroris.(laporan Komisi OAS yang dikeluarkan bulan Januari 2003 mengandung analisis terinci tentang kasus-kasus seiring dengan rangkaian rekomendasi dalam meningkatkan kehadiran negara inter Amerika, dan rezim pengendali persenjataan. Pemerintah Nikaragua dengan segera menyatakan keinginannya untuk menindaklanjuti laporan tersebut dan memperkuat pengawasan persenjataan dan prosedur ekspor.)

Kelompok teroris dalam negeri terus merusak Kolumbia, dan dalam jangkauan yang lebih kecil juga melanda Peru. Pada bulan Februari Pemerintah Kolumbia, Presiden Pastrana menghentikan pembicaraan perdamaian yang telah berlangsung lama dengan pasukan bersenjata Revolusioner

Kolumbia (FARC), yang juga ditunjuk AS sebagai organisasi teroris luar negeri, sesudah serangkaian tindakan provokatif, termasuk penculikan senator Kolumbia. FARC mengintensifkan kampanye sepanjang tahun dan terus menerus melaksanakan serangannya dari pedesaan hingga kota besar. Tanggal 7 Agustus, Presiden baru Kolumbia, Alvaro Urige, dilantik dengan serangan mortir pesanan FARC yang menewaskan 21 penduduk miskin di kawasan Bogota. Beberapa unsur AUC membubarkan dan melakukan rekonstitusi sebagai usaha untuk mencari pengesahan politik, tetapi ikatan mereka terhadap perdagangan obat bius dan penyalahgunaan HAM terus berlangsung. Bulan Desember, AUC mendeklarasikan gencatan senjata unilateral dan mengupayakan negosiasi perdamaian dengan Pemerintah. Tentara Pembebasan Nasional-seperti FARC – terus menggunakan metode teroris favorit mereka yakni menculik dan meledakkan infra struktur. Ketiga organisasi ini berhubungan dengan perdagangan obat bius.

Di Peru, suatu kelompok ulet “Shining Path” dicurigai sebagai pelaku Bom mobil pada 20 Maret di sebuah pusat perbelanjaan di seberang Kedutaan Besar AS, dua hari sebelum kunjungan Kenegaraan Presiden Bush. Sepuluh orang Peru tewas dalam serangan itu termasuk personel Pengamanan Kedubes AS.

Pada akhir tahun 2002, tidak ada konfirmasi maupun informasi yang dapat dipertanggungjawabkan tentang berdirinya al-Qaeda di Amerika Latin. Pencarian dana oleh Teroris tetap menjadi kepedulian di kawasan ini. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pengatur keuangan HAMAS dan Hizbullah di kawasan perbatasan Tiga Negara (Argentina,

Brasilia dan Paraguay) memungkinkan ketiga negara ini mengambil tindakan menentukan dan kooperatif sepanjang tahun 2002 untuk menyelidiki dan menghambat peredaran uang haram. Argentina, Brasil dan Paraguay juga mengundang AS untuk bergabung dalam mekanisme baru "Tiga Plus Satu"dalam upaya konsultasi dan kerjasama menentang terorisme, untuk menganalisis dan memerangi setiap ancaman teroris di perbatasan tiga negara. Mekanisme ini adalah contoh luar biasa untuk pencegahan terorisme dan tinjauan ke masa depan secara regional. Kanada dan Meksiko bekerjasama erat dengan AS untuk mengamankan perbatasan mereka dan menerapkan kerja sama perbatasan yang menyeluruh (ditandatangani bulan Desember 2001 dan Maret 2002 secara timbal balik). Persetujuan ini bertujuan untuk memastikan keamanan perbatasan nasional sambil memfasilitasi arus perjalanan dan perdagangan sah menurut hukum yang cepat dan bebas. Kuba, salah satu dari tujuh negara pendukung terorisme dibicarakan dalam bagian negara-negara pendukung.[14]

Kecenderungan terorisme di Timur Tengah adalah kecenderungan utama. Terorisme tetap menjadi suatu gambaran mendasar dalam kancah perpolitikan di Timur Tengah pada tahun 2002. kelompok-kelompok teroris dan negara-negara pendukung mereka melanjutkan kegiatan dan perencanaan teroris sepanjang tahuin 2002. organisasi teroris al-Qaeda pimpinan Osama bin Laden melanjutkan kegiatannya di kawasan ini. Sebagai tambahan, HAMAS, Jihad Islam Palestina (PIJ), Hizbullah, dan kelompok-kelompok lain menentang perdamaian menyeluruh di Timur Tengah denga

---

[14] Iran, Irak, Libya, dan Suriah, yang telah ditunjuk sebagai negara pendukung terorisme akan dibicarakan dalam bagian negara-negara pendukung terorisme.

terus menyerang warga Sipil. Sekalipun demikian, kebanyakan negara Timur Tengah, termasuk di antaranya yang mendukung kelompok teroris yang dibedakan oleh AS, menunjukkan kerjasama yang nyata dalam kampanye menentang terorisme yang dipimpin oleh AS.

Di banyak negara, Timur Tengah adalah sekutu AS dalam menghalangi kejadian terorisme yang ditujukan terhadap kepentingan dan warga AS, mengacaukan rencana operasi teroris, dan memperkuat hubungan mereka menentang teroris dengan AS. Banyak negara melanjutkan dukungan dengan memberikan personel, pangkalan, dan hak istimewa penerbangan sebagai dukungan yang kasat mata bagi Operasi Kebebasan Abadi. Kebanyakan Pemerintahan Timur Tengah membekukan asset keuangan al-Qaeda menurut resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1373, 1267, 1390 dan 1455. Perlu dicatat semua negara di Timur Tengah dengan kehadiran Diplomat dan atau Militer Amerika bersikap responsif terhadap permintaan AS untuk memperkuat keamanan bagi personel dan fasilitas selama masa berlakunya kesiagaan. Pemerintah Arab Saudi, sebagai contoh telah memulai memperkuat kerjasama dan koordinasi langsung dengan AS untuk melawan pendanaan dan operasi teroris.

Pemerintah Yaman melanjutkan kampanye menentang terorisme yang luas menentang al-Qaeda dan mencurigai anggota-anggota al-Qaeda di wilayahnya dengan beberapa sukses yang patut dicatat dan menjalankan kerjasama yang luar biasa dengan AS. Yordania dan Kuwait melanjutkan perlawanan terhadap orang-orang yang dicurigai sebagai teroris dan menyediakan dukungan pengamanan yang luar

biasa terhadapfasilitas AS sesudah pembunuhan terhadap Diplomat AS, Laurence Foley, di Amman dan penembakan yang fatal anggota keamanan AS di Kuwait. Pemerintah Uni Emirat Arab melanjutkan usaha-usaha perlawanan terorisme yang sedang berlangsung di kawasan Teluk. Prestasi menonjol dalam perlawanan terhadap teroris yang ditunjukkan Mesir, termasuk upaya-upaya menjembatani gencatan senjata di antara kelompok-kelompok penentang Palestina yang ingin menghentikan kekejaman teroris di Israel dan di wilayah pendudukan. Pemerintah Aljazair, Tunisia, dan Maroko semua mendukung aktif kampanye global anti terorisme.

Suriah bekerjasama dengan Pemerintah AS dan pasangannya dalam penyidikan al-Qaeda dan beberapa organisasi-organisasi lain. Damaskus telah melanjutkan, bahkan, untuk mendukung Hizbullah, HAMAS, PIJ, dan kelompok-kelompok penentang Palestina lainnya yang melakukan operasi teror di kawasan. Suriah telah melanjutkan untuk menegaskan bahwa berbagai kegiatan kelompok-kelompok ini merupakan perlawanan yang sah. Kadangkala mereka memaklumi aksi Bom bunuh diri Palestina, dan serangan-serangan lain terhadap sasaran-sasaran sipil di Israel, Tepi Barat, dan Jalur Gaza.

Negara-negara Teluk seperti Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab memainkan peranan yang kuat dalam koalisi Internasional melawan terorisme. Pemerintah-pemerintah ini terus melanjutkan langkah-langkah positif untuk menghambat arus keuangan terorisme dan menyediakan bantuan lain dalam perang melawan terorisme. Dalam banyak contoh, negara-negara tersebut mem-

berikan dukungan demikian meskipun diketahui secara umum adanya ketidaksenangan terhadap dukungan militer pemerintah mereka bagi Operasi Kebebasan Abadi dan kegiatan anti teror lainnya.

Sebagaimana di negara lain, kepentingan AS telah menjadi subjek dari ancaman teroris. Pemerintah negara Teluk sebagai suatu kesatuan memberikan respon yang sangat mencolok dalam penyediaan tindakan keamanan yang efektif dan tepat. Demikian juga Pemerintah Magrib yang memberikan dukungan kuat dengan menyelidiki sumber pendanaan teroris, menyediakan peningkatan keamanan pada kepentingan-kepentingan AS, dan merintangi perencanaan teroris yang aktual. Sebagai contoh, Maroko menahan dan menuntut warga Maroko dan Saudi Arabia yang diduga telah merencanakan serangan terhadap kapal perang NATO di selat Gibraltar dan juga membuat undang-undang anti terorisme yang bersifat menyeluruh.

Kelompok-kelompok organisasi terorisme yang beroperasi secara internasional terbagi dalam beberapa pengelompokan yang tidak ketat yakni Ekstrimis keagamaan, negara-negara pendukung, Radikal Palestina, Separatis, kelompok-kelompok Kiri. Dari semua ini kelompok-kelompok berikut ini dianggap aktif dan berbahaya. Ekstrimis-ekstrimis Keagamaan adalah kelompok yang oleh AS —dan negara-negara Barat umumnya— sering dianggap sebagai teroris.

Al-Qaeda yang dikenal sebagai Qa'idat al-Jihad yang didirikan oleh Osama Bin Laden akhir tahun 1980 untuk membawa orang-orang Arab secara bersama dalam peperangan di Afghanistan melawan Uni Sovyet. Membantu pendanaan, perekrutan, angkutan, dan melatih ekstrimis-ekstrimis Islam

Suni untuk perlawanan Afghanistan.Tujuan terkini adalah mendirikan suatu Pan Kalifah Islam sedunia yang bekerja sama dengan aliansi Islam kelompok-kelom-pok ekstrimis Islam untuk rezim dan mengusir orang-orang Barat dan Non Islam dari negara-negara Islam, khususnya Arab Saudi. Ungkapan-ungkapan pernyataan di bawah spanduk "Front Dunia Islam untuk Jihad melawan Yahudi dan Perang Salib" dalam Februari 1998, dikatakan bahwa menjadi kewajiban seluruh umat Muslim untuk membunuh warga negara AS – Sipil atau Militer – dan seluruh aliansi mereka. Bergabung dengan Jihad Islam Mesir (Al-Jihad) bulan Juni 2001.

Tahun 2002, al-Qaeda melakukan pengeboman tanggal 28 November di hotel Mombasa, Kenya, menewaskan 15 orang dan melukai 40 orang. Diduga kuat pendukung peledakan Bom di Bali, Indonesia, pada 12 Oktober, yang menewaskan sekitar 180 orang. Bertanggung jawab untuk serangan terhadap personel Militer AS di Kuwait, pada 8 Oktober, yang menewaskan seorang tentara AS dan melukai seorang lainnya. Memberikan petunjuk serangan bunuh diri terhadap kapal MV Limburg di kawasan Yaman, pada 6 Oktober, yang menewaskan satu orang dan melukai empat orang. Melakukan pengeboman di sebuah sinagog di Tunisia pada 11 April yang menewaskan 19 orang dan melukai 22 orang lainnya. Pada tanggal 11 September 2001, 19 orang anggota penyerang bunuh diri al-Qaeda membajak dan menabrakkan 4 pesawat jet komersial AS, 2 pesawat ke gedung WTC di New York, 1 ke Pentagon dekat Washington, DC dan pesawat keempat ke Shanksville, Pennsylvania, yang menyebabkan 3000 orang mati atau hilang. Mengarahkan serangan 12 Oktober 2000 terhadap kapal perang AS Cole di pelabuhan Aden, Yaman, yang menewaskan 17 anggota AL

AS, dan melukai 39 orang lainnya. Melakukan pengeboman pada bulan Agustus 1998 terhadap Kedutaan-kedutaan Besar AS di Nairobi, Kenya dan Darusalam, Tanzania yang menewaskan sedikitnya 301 orang dan melukai lebih dari 5000 orang lainnya. Menyatakan telah menembak jatuh helikopter AS dan menewaskan anggota bersenjata AS di Somalia tahun 1993 dan melakukan tiga pengeboman yang sasarannya pasukan AS di Aden, Yaman pada bulan Desember 1992.

Al-Qaeda terkait dengan rencana-rencana berikut yang telah digagalkan atau tidak terlaksana: membunuh Paus Yohanes Paulus II selama kunjungannya di Manila akhir 1994, membunuh Presiden Clinton selama kunjungannya di Filipina awal 1995, pengeboman di udara lusinan pener-bangan AS lintas Pasifik tahun 1995, memasang bom di Bandara Internasional Los Angeles tahun 1999. Juga merencanakan untuk melakukan operasi teroris terhadap turis-turis AS dan Israel yang berkunjung ke Yordania untuk memperingati Perayaan Milenium akhir tahun 1999. (Penguasa Yordania menghalangi serangan terencana dan menempatkan 28 tersangka ke sidang pengadilan). Pada bulan Desember 2001, tersangka rekan al-Qaeda Richard Colvin Reid berusaha menyulut bom di sepatunya dalam penerbangan lintas Atlantik dari Paris ke Miami. Selain itu, al-Qaeda juga berusaha untuk menembak jatuh pesawat carter dengan rudal darat ke udara sesaat setelah pesawat itu meninggalkan bandara Mombasa pada bulan November 2002.

Barangkali al-Qaeda memiliki ribuan anggota dan rekan. Penahanan pemimpin senior di level operasi telah menghambat sejumlah perencanaan teroris. Peristiwa itu juga

menjadi titik utama atau organisasi payung bagi jaringan di seluruh dunia yang melibatkan banyak kelompok ekstrimis Islam Suni, beberapa anggota al-Gama'a al-Islamiyya, Gerakan Islam Uzbekistan, dan Harakat al-Mujahidin. al-Qaeda memiliki jaringan di seluruh dunia dan diperkuat oleh ikatan dengan jaringan kerja ekstrimis Suni. Sebelumnya bermarkas di Afghanistan sampai pasukan Koalisi mengusir penguasa Taliban pada akhir 2001. al-Qaeda tersebar dalam kelompok-kelompok kecil di seluruh Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Timur Tengah, dan mungkin akan berusaha melakukan serangan-serangan di masa depan terhadap kepentingan-kepentingan AS.

Al-Qaeda tetap melakukan bisnis yang bertujuan menghasilkan uang, pengumpulan sumbangan dari pendukung-pendukung fanatik, dan pengalihan dana ilegal dari sumbangan kepada organisasi-organisasi dermawan Muslim. Upaya-upaya AS untuk menghentikan pendanaan al-Qaeda merintangi kemampuan kelompok-kelompok ini untuk mendapatkan uang.

Hizbullah (Partai Allah) (dikenal sebagai Jihad Islam, Organisasi Keadilan Revolusioner, Organisasi Kaum Tertindas Bumi, Organisasi Jihad Islam untuk Pembebasan Palestina). Hizbullah dibentuk tahun 1982 sebagai respon terhadap invasi Israel ke Libanon, Kelompok Shi'ah Radikal yang bermarkas di Libanon ini menyerap inspirasi ideologi dari revolusi Iran dan pengajaran almarhum Ayatullah Khomeini. Majlis al-Shura, atau Dewan Konsultatif, merupakan badan pengatur tertinggi dalam kelompok ini, dan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Hassan Nasrallah. Hizbullah dipersembahkan untuk membebaskan Jerusalem,

dan pada akhirnya menghapus Israel, dan selanjutnya menganjurkan dilaksanakannya peraturan Islam di Libanon. Meskipun demikian, Hizbullah telah berperan serta aktif dalam sistem politik Libanon sejak tahun 1992. Hizbullah bersekutu erat, dan kadangkala diarahkan oleh Iran, tetapi pelaksanaan operasi tidak selalu atas persetujuan Teheran. Meskipun Hizbullah tidak berbagi orientasi sekuler rejim Suriah, kelompok ini telah menjadi sekutu kuat secara taktis dalam membantu Suriah mencapai tujuan politiknya di kawasan ini.

Diketahui atau dicurigai telah terlibat dalam sejumlah serangan teroris anti AS dan Israel, termasuk Bom bunuh diri dengan menggunakan truk di Kedutaan Besar AS dan barak AL-AS di Beirut pada bulan Oktober 1983 dan di pavilliun Kedutaan Besar AS di Beirut bulan September 1984. Tiga anggota Hizbullah, Imad Mugniyah, Hasan Izz-al-Din, dn Ali Atwa, termasuk dalam daftar 22 teroris yang sangat dicari oleh FBI berkaitan dengan pembajakan pesawat TWA penerbangan 847 tahun 1985 yang pada saat bersamaan seorang penyelam AL – AS terbunuh. Unsur-unsur kelompok ini bertanggung jawab atas penculikan dan penahanan warga negara Barat dan AS di Libanon tahun 1980an. Hizbullah juga menyerang Kedutaan Besar Israel di Argentina tahun 1992 dan Pusat Kebudayaan Israel di Buenos Aires tahun 1994. Pada musim tahun 2000 kelompok ini menangkap tiga serdadu Israel di pertanian Shab'a dan menculik seorang non pejuang Israel yang terpikat ke Libanon atas sesuatu yang bukan haknya.

Ribuan pendukung dan ratusan teroris yang beroperasi. Wilayah operasi di pinggiran selatan kota Beirut, Lembah

Beka'a dan bagian selatan Libanon. Telah membangun jaringan di Eropa, Afrika, Amerika Selatan, Amerika Utara, dan Asia. Menerima bantuan keuangan, pelatihan, persenjataan, Handak, politik, diplomatik dan pengorganisasian dari Iran dan dukungan diplomatik, politik dan logistik dari Suriah.

HAMAS (Gerakan Perlawanan Islam) yang dibentuk pada akhir tahun 1987 sebagai satu kelanjutan dari cabang Persaudaraan Muslim Palestina. Berbagai macam unsur HAMAS menggunakan cara-cara politik dan kekerasan, termasuk terorisme, untuk mendorong tercapainya tujuan pendirian Negara Islam Palestina yang berkedudukan di Israel. Terstruktur tidak ketat, dengan beberapa unsur yang bekerja di bawah tanah dan yang lain bekerja secara terbuka melalui mesjid-mesjid dan lembaga-lembaga pelayanan sosial untuk merekrut anggota, mengumpulkan uang, merencanakan kegiatan, dan menyebarkan propaganda. Kekuatan HAMAS terkonsentrasi di jalur Gaza dan tepi Barat. Juga berhubungan dalam kegiatan politik perdamaian seperti mencalonkan Kandidat dalam Pemilihan Dewan Perdagangan Tepi Barat.

Para Aktifis HAMAS khususnya yang tergabung dalam Brigade Izz al-Din al-Qassam, telah mengadakan banyak serangan termasuk Bom bunuh diri skala besar terhadap sasaran militer dan warga sipil Israel. Pada awal tahun 1990-an, mereka juga menargetkan tersangka Kolaborator Palestina dan pesaingnya Fatah. HAMAS meningkatkan kegiatan operasionalnya selama tahun 2001-2002 dengan mengklaim sejumlah serangan terhadap kepentingan-kepentingan Israel. Kelompok ini tidak menargetkan kepentingan AS –

walaupun beberapa warga AS telah terbunuh dalam operasi HAMAS – melanjutkan untuk meyakinkan bahwa serangannya ditujukan kepada warga Israel di dalam wilayah Israel dan sekitarnya.

Kekuatan sejumlah anggota resminya tidak dikenali, puluhan ribu pendukung dan simpatisan. HAMAS sekarang ini membatasi operasi terornya terhadap militer Israel dan sasaran Sipil di tepi Barat, Jalur Gaza, dan Israel. Kepemimpinan kelompok ini tersebar di sepanjang jalur Gaza dan Tepi Barat dengan beberapa pemimpin senior bertempat tinggal di Suriah, Libanon dan negara-negara Teluk. Menerima sejumlah dana dari Iran tetapi banyak tergantung pada sumbangan kaum expatriat Palestina di seluruh dunia dan dermawan swasta di negara Arab moderat. Sejumlah aktivitas pengumpulan dana dan propaganda berlangsung di Eropa Barat dan Amerika Utara.

Kelompok Armed Islamic Group (GIA) adalah suatu kelompok extremis Islam, GIA bertujuan menggulingkan rezim Algeria dan menggantikannya dengan negara Islam. GIA memulai kegiatan jahatnya di 1992 setelah Algeria menangguhkan kemenangan Islamic Salvation Front – partai oposisi Islam terbesar- pada putaran pertama pemilihan legislative di Desember 1991.

Penyerangan yang kerap terhadap orang sipil dan pekerja pemerintahan. Sejak 1992, GIA telah melakukan kampanye terhadap pembantaian sipil, terkadang membantai suatu desa dalam wilayah operasinya, walaupun jumlah anggota yang menipis menyebabkan penurunan dalam jumlah penyerangan. Sejak menyatakan kampanye terhadap orang asing yang tinggal di Algeria di 1993, GIA telah membunuh

100 pria dan wanita expatriat - kebanyakan warga Eropa-dinegara tersebut. Kelompok ini menggunakan pembunuhan dan pemboman, termasuk bom mobil dan mereka terkenal lebih memilih menculik korban dan menggorok lehernya. GIA membajak pesawat Air France dalam penerbangan ke Algeria di Desember 1994. Di 2002, sebuah pengadilan Perancis menghukum dua anggota GIA dengan hukuman seumur hidup di penjara karena melancarkan serangkaian pemboman di Perancis di 1995. Kekuatan kelompok ini berjumlah pasti tidak diketahui, mungkin kurang dari 100. Lokasi/Wilayah Operasi kelompok ini di negara Algeria. Kelompok ini mendapatkan Bantuan Luar yang tidak diketahui.

Kelompok teroris lainnya adalah Kelompok Ad Hoc (tidak terencana). Kelompok ini tidak mempunyai suatu struktur organisasi yang tetap. Mereka adalah radikal yang berfikiran sama yang berkumpul untuk melakukan kegiatan teroris tanpa pengarahan resmi oleh pemimpin yang senior. Kelompok ini terorganisir secara longgar dan sangat terkotak-kotak. Pengikut kelompok ad hoc ini tidak patuh terhadap suatu kelompok organisasi apapun. Sebaliknya mereka sangat patuh terhadap politik dan membagi faham mereka dengan pemimpin keagamaan yang radikal. Setiap perorangan mempunyai ideologi yang umum; anti-Israel, anti-barat, anti-Amerika dan perlawanan yang keras terhadap pemerintahan Timur Tengah yang mendukung kebijakan pro-barat. Mereka menerima dukungan dari berbagai perorangan dan organisasi yang tidak berhubungan juga dari beberapa negara sponsor. Banyak anggota dari kelompok ini turut berjuang di Afghanistan dan Bosnia. Sebagai hasilnya, mereka mendapatkan pengalaman perang yang

lebih besar yang membuat mereka lebih berbahaya.

Perang Palestina atau konflik di semenanjung Palestina telah memberikan efek terbentuknya kelompok-kelompok politik dan keagamaan garis keras. Misalnya, kelompok Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP). Kelompok ini adalah suatu kelompok Marxis-Lenin yang dibentuk oleh George Habash- sebagai anggota dari PLO- ketika kelompok itu memisahkan diri dari Gerakan Nasionalis Arab. PFLP memandang pergolakan Palestina sebagai suatu pergolakan yang sah terhadap pendudukan yang tidak sah. PFLP berlawanan dalam negosiasi dengan Israel. Kegiatan kelompok ini melakukan berbagai penyerangan teroris internasional selama 1970-an. Telah melakukan penyerangan terhadap Israel atau sasaran Arab Moderat sejak 1978, termasuk membunuh seorang pemukim beserta anaknya di Desember 1996. PFLP telah meningkatkan kegiatan operasionalnya sejak intifadah yang baru dimulai, ditandai dengan pembunuhan menteri turisme Israel di Oktober 2001 sebagai balas dendam pembunuhan sekjen PFLP awal tahun itu.

Kekuatan kelompok ini tidak diketahui. Lokasi/Wilayah Operasi kelompok ini Suriah, Lebanon, Israel, Jalur Barat, dan Jalur Gaza. Bantuan Luar untuk kelompok ini biasanya mereka menerima suaka dan bantuan logistik dari Suriah.

Kelompok Popular Front for the Liberation of Palestine–General Command (PFLP-GC) yang bertujuan memisahkan diri dari PFLP di 1968, menyatakan akan untuk lebih memfokuskan diri pada pertempuran dan mengurangi politik. Berlawanan dengan PLO Yasir Arafat. Dipimpin oleh Ahmad Jabril, mantan kapten Angkatan Bersenjata Suriah. Putra Jabril, Jihad, terbunuh oleh bom mobil di

bulan Mei 2002. Terikat erat pada Suriah dan Iran. Kegiatan kelompok ini melakukan belasan penyerangan di Eropa dan Timur Tengah selama 1970-an dan 1980-an. Terkenal atas penyerangan teroris ke Israel dengan menggunakan alat yang tidak lazim seperti balon udara panas dan gantole bermotor. Saat ini perhatian utama terfokus pada operasi gerilya di Lebanon selatan dan penyerangan ukuran kecil di Israel, Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Kekuatan kelompok ini beberapa ratus orang. Lokasi/ wilayah Operasi kelompok ini bermarkas besar di Damaskus dengan markas-markas di Lebanon. Bantuan Luar untuk kelompok ini mendapatkan Logistik dan dukungan Militer dari Suriah serta bantuan finansial dari Iran.

Kelompok Abu Nidal Organization (ANO) alias Fatah—Revolutionary Council, Arab Revolutionary Brigades, Black September, dan Revolutionary Organization of Socialist Muslims (Organisasi Abu Nidal, Badan Revolusi, Brigade Revolusi Arab, September Hitam, Organisasi Revolusi dari Muslim Sosialis). Organisasi teroris Internasional yang didirikan oleh Sabri al-Banna (alias Abu Nidal). Pecahan dari PLO di tahun 1974. Terdiri dari berbagai komite tugas, termasuk politis, militer dan financial. Di November 2002, Abu Nidal meninggal di Bagdad; kepemimpinan baru organisasi ini tidak diketahui dengan jelas.

Kegiatan kelompok ini telah melakukan penyerangan teroris di 20 negara, membunuh atau melukai hampir 900 orang. Sasaran mencakup Amerika, Inggris, Perancis, Israel, orang Palestina moderat, PLO dan bnerbagai negara Arab lainnya. Penyerangan utama mencakup pelabuhan udara Roma dan Wina di 1985, sinagog Neve Shalom di Istambul dan

pembajakan Pan Am penerbangan 73 di Karachi pada September 1986, dan penyerangan kapal pesiar City of Poros di Yunani pada Juli 1988. Dicurigai membunuh deputi kepala PLO Abu Iyad dan kepala keamanan PLO Abu Hul di Tunisia pada Januari 1991. ANO membunuh seorang diplomat Jordania di Lebanon pada Januari 1994 dan telah dihubungkan dengan pembunuhan perwakilan PLO di sana. Tidak pernah melakukan suatu penyerangan besar-besaran terhadap sasaran Barat sejak akhir 1980an.

Kekuatan kelompok ini beberapa ratus termasuk struktur dukungan luar negeri yang terbatas. Lokasi/Wilayah Operasi kelompok Al-Banna ini berpindah ke Irak pada Desember 1998, dimana kelompok itu mempertahankan suatu kehadiran. Mempunyai kehadiran operasional di Lebanon termasuk dalam beberapa tempat penampungan pengungsi Palestina. Pemerintah menutup operasi ANO di Libya dan Mesir pada 1999. ANO telah menunjukkan kemampuan untuk beroperasi dalam Jangkauan yang luas, termasuk Timur Tengah, Asia dan Eropa. Masalah Keuangan dan kekacauan organisasi internal telah mengurangi kegiatan dan kemampuan kelompok ini. Bantuan Luar bagi kelompok ini menerima dukungan yang besar termasuk suaka, pelatihan, bantuan logistik dan bantuan keuangan dari Irak, Libya dan Suriah (sampai 1987) termasuk dukungan dekat untuk operasi terpilih.

Terorisme yang disponsori Pemerintah/Negara

Kategori negara-negara yang dianggap oleh Amerika Serikat terlibat dalam mendukung kegiatan teror di negara lain adalah Kuba, Iran, Irak, Libya, Korea Utara, Sudan dan

Suriah. Oleh kalangan lain, AS digolongkan sebagai negara yang mempraktekkan terorisme terhadap negara lainnya. Terorisme yang didukung oleh pemerintah sudah diketahui secara luas meningkatkan kemampuan mereka dan membuat usaha penegakan hukum untuk menangkal mereka menjadi semakin susah. Dalam usaha memberikan tekanan kepada negara-negara untuk menghentikan usaha dukungan seperti itu, Amerika memberikan batasan ekonomi dan dagang terhadap negara-negara yang ingin memberikan secara berulang-ulang pada tindakan terorisme dengan mendukung pelatihan, dana, perbekalan atau memberikan suaka. Saat ini Amerika mencatat Kuba, Iran, Irak, Libya, Korea Utara, Sudan dan Suriah sebagai negara-negara pendukung terorisme.

a. Kuba

Walau Kuba menandatangani dan meresmikan semua 12 konvensi anti terorisme internasional di 2001, ia tetap bersikap melawan terhadap koalisi yang dipimpin Amerika dalam mengadili perang melawan teror global dan telah bersikap aktif kritis terhadap banyak kebijakan dan tindakan yang dilakukan Amerika. Pada beberapa kesempatan sebagai contohnya, Kuba mengirim agen kepada misi Amerika diseluruh dunia yang memberikan informasi palsu yang dimaksudkan untuk mengacaukan penyelidikan pasca 11 September. Kuba tidak menolak penggunaan pangkalan teluk Guantanamo untuk ditempati oleh pejuang dari konflik di Afganistan.

Di 2002 Kuba melanjutkan untuk menampung beberapa teroris dan buronan Amerika. Havana membolehkan sampai 20 anggota Tanah Air Bapak Basque dan Liberty untuk

tinggal di Kuba dan memberikan sebagian suaka dan dukungan pada anggota FARC (Colombian Revolutionary Armed Forces of Colombia) dan kelompok ELN (National Liberation Army). Bogota menyadari keadaan ini dan Akhirnya tunduk; secara publik mereka telah memberikan petunjuk bahwa mereka meminta Kuba sebagai mediator dengan agen ELN di Kuba.

Seorang tertuduh ahli senjata IRA dan penduduk Havana yang sudah lama, diadili di Kolombia pada 2002. Satu tahun sebelumnya ia ditangkap di Kolombia bersama dua anggota IRA lainnya dan ditahan karena dituduh melatih FARC dalam penggunaan bahan peledak tingkat tinggi. Beberapa buronan Amerika tetap tinggal di pulau itu.

b. Iran

Iran bertahan menjadi negara sponsor terorisme yang paling aktif pada 2002. Korps Revolusi Islam dan Kementerian Intel dan Keamanan terlibat dalam perencanaan dari dan dukungan tindakan teroris dan terus mendukung beberapa kelompok yang menggunakan terorisme untuk mewujudkan tujuannya.

Catatan Iran melawan Al Kaidah telah tercampur. Sementara Iran telah menahan dan menyerahkan beberpa anggota Al Kaidah kepada pemerintahan asing, beberapa anggota Al Kaidah yang lain mendapatkan suaka disana dan mungkin mendapatkan perlindungan dari elemen pemerintahan Iran. Batas negara Iran yang panjang dan berat sangat susah dipantau dan sekelompok besar pengungsi Afgannistan di Iran menyulitkan usaha untuk menemukan dan menangkap extremis. Namun nampaknya tidak mungkin elemen Al Kaidah bisa lolos dari perhatian layanan keamanan Iran

yang menakutkan.

Selama 2002, Iran mempertahankan peran yang menonjol dalam mendukung tindakan anti-Israel, baik secara retorika maupun secara operasional. Pemimpin utama Khamenei menganggap Israel sebagai "tumor kanker" suatu sikap sentiment yang diulang-ulang oleh pemimpin Iran yang lain dalam pidato dan ceramah. Dalam menimpali retorika dengan tindakan, Iran memberikan kelompok penolakan Lebanon Hizbullah dan Palestina- terutama HAMAS, Jihad Islam Palestina dan Front Terkenal untuk Komando Umum Palestina- dengan pendanaan, suaka, pelatihan dan senjata. Teheran juga mendukung Hizbullah dan kelompok penolak-an Palestina untuk mengkoordinir perencanaan mereka dan untuk meningkatkan tindakan teroris mereka terhadap Israel.

Iran juga memberikan dukungan kepada kelompok extremis di Asia Tengah, Afganistan dan Irak dengan ikatan pada Al Kaidah, walaupun lebih sedikit daripada yang diberikan pada kelompok yang melawan Israel. Di 2002, Iran menjadi Partai dalam Protokol mengenai Penekanan Tindakan Kekerasan Melawan Hukum di Pelabuhan Udara yang menangani Penerbangan Sipil Internasional. Ia adalah partai kelima dari 12 konvensi internasional dan protokol yang berhubungan dengan terorisme.

c. Irak

Irak adalah negara yang pernah ditetapkan sebagai suatu negara yang mensponsori terorisme. Bagaimanapun juga Irak saat ini sedang dalam masa transisi. Irak adalah negara dengan posisi berseberangan dengan AS. Bahkan Osama bin Laden pernah menawarkan berdamai dengan AS dengan

bargaining Irak. Tawaran gencatan senjata Osama Bin Laden itu dilihat banyak kalangan sebagai upaya memecah AS dan sekutunya di Eropa, termasuk dengan mengeksploitasi perbedaan AS dan Eropa tentang Irak. Osama Bin Laden menyerukan kepada Eropa agar menarik pasukan militer dari negara-negara Muslim. Imbalannya, Eropa akan bebas dari serangan teror. Para pemimpin Eropa, demi memperlihatkan loyalitas dan solidaritasnya terhadap AS, mengatakan tidak mungkin mengadakan negosiasi dengan Osama bin Laden. Presiden Perancis Jacques Chirac, salah satu penentang keras perang Irak menepis tawaran gencatan senjata itu. "Tidak mungkin dilakukan perjanjian dengan teroris." Sikap tersebut diikuti oleh negara Eropa lainnya seperti Jerman, Italia, Inggris, dan Rusia. Terlebih lagi menurut Kai Hirschmann, Wakil Kepala Lembaga Riset Terorisme dan Kebijakan Keamanan Jerman mengatakan, ucapan Osama Bin Laden bagaikan ucapan perampok bank: “Berikan aku satu juta Euro dan saya tidak akan merampok bank lagi.” Rupanya Amerika Serikat merasa senang dengan reaksi-reaksi Eropa itu sehingga upaya mempengaruhi negara Eropa dapat dikatakan cukup berhasil. Tetapi tidak dengan sikap Spanyol, setelah PM Zapatero berjanji membawa pulang pasukannya dari Irak.

d. Libya

Di 2002, pemimpin Libya, Muammar Kadafi melanjutkan usaha yang ia lakukan menyusul serangan terorisme pada 11 September 2001 untuk menunjukkan bahwa Libya berperang melawan teror dan perjuangan melawan Islam extremis. Pada bulan Agustus, Kadafi mengatakan pada perwakilan Inggris yang datang bahwa ia menganggap

Osama bin Laden dan pengikutnya yang juga orang Libya sebagai ancaman terhadap Libya. Dalam pidatonya pada tanggal 1 September ia menyatakan Libya akan memerangi anggota Al Kaidah dan "heretics"nya – suatu perumpamaan pada extremis Libya yang berhubungan dengan Al Kaidah dan melawan rezimnya- sama seperti sikap Amerika dulu. Ia melanjutkan bahwa semua tahanan politik akan dibebaskan dan pemerintah Libya mulai sekarang hanya akan menahan anggota al-Qaeda. Nampaknya Libya telah memangkas dukungannya atas terorisme internasional, walaupun masih memiliki bekas kontak dengan klien terorisnya yang lama.

Catatan masa lalu Libya atas terorisme telah menghalangi usaha terus menerus Kadafi untuk melepaskan diri dari status pengucilan di 2002. Pada Maret 2002, sebuah pengadilan appellate di Skotlandia menaikkan tuduhan - yang sebelumnya ditolak pada Januari 2001 - oleh agen intel Libya Abdel Basset Ali al-Megrahi atas pembunuhan sehu-bungan dengan penanaman bahan peledak pada pesawat terbang Pan Am penerbangan 103 pada Desember 1988. Ledakan itu membunuh 259 penumpang dan awak di pesawat dan juga 11 orang didarat di Lockerbie, Skotlandia. Ada laporan-laporan mengenai usulan penyelesaian berdamai diluar pengadilan dari suatu tuntutan yang diajukan oleh anggota keluarga Pan Am 103 terhadap Libya, tapi sampai akhir tahun itu, belum ada penyelesaian.

Meski mengalami kemajuan terhadap pembayaran ganti rugi yang sesuai, pada akhir tahun Libya masih harus memenuhi ketentuan Dewan Keamanan PBB yang berkaitan dengan Pan Am penerbangan 103, yang diperlukan untuk

pencabutan sanksi PBB, termasuk menerima tanggung-jawab tindakan para perwakilannya.

Pada bulan Oktober, pengacara mewakili tujuh Warga Negara Amerika yang meninggal dalam pengeboman UTA penerbangan 772 pada 1989- dimana sebuah pengadilan Perancis menuduh enam orang Libya secara absent pada tahun 1999- menggugat Libya dan Kadafi dan meminta ganti rugi $ 3 triliun. Di bulan yang sama, dilaporkan Libya meminta perwakilan Perancis untuk menaikkan pembayar-an yang telah dilakukan pada korban pengeboman UTA melanjuti keputusan pengadilan Perancis di 1999.

Di 2002, Libya menjadi Partai pada Konvensi 1999 mengenai Penekanan Pendanaan Terorisme dan Konvensi 1991 mengenai Penandaan Peledak Plastik untuk kegunaan Pendeteksian. Ia menjadi Partai terhadap ke 12 Konvensi Internasional dan Protokol yang berkaitan dengan terorisme.

e. Korea Utara

Sepanjang tahun 2002 tanggapan Republik Demokrasi Rakyat Korea (RDRK) mengenai usaha internasional untuk memerangi terorisme adalah mengecewakan, walau dalam suatu pernyataan yang diedarkan setelah penyerangan 11 September, RDRK telah mengulangi kebijakan umumnya melawan terorisme dan dukungan apapun untuk terorisme. Pada 2001, menyusul serangan 11 September, ia juga menan-datangani Konvensi PBB mengenai Penekanan Pendanaan Terorisme dan menjadi Partai pada Konvensi terhadap Penyanderaan.

Walau penekanan dari masyarakat internasional, Korea Utara tidak mengambil langkah beasr untuk bekerja sama dalam usaha memerangi terorisme. Laporan pertama dan

tambahannya kepada Komite Anti Teror PBB mengenai tindakan yang dilakukannya untuk memenuhi kewajiban dibawah UNSCR 1373 bersifat tidak informatif dan tidak menanggapi. Laporan itu tidak menjawab usulan Amerika untuk diskusi mengenai terorisme dan tidak melaporkan adanya usaha untuk membekukan tanpa penundaan pendanaan dan aset finansial lain atau sumber ekonomi dari orang-orang yang melakukan, atau mencoba melakukan, tindakan teroris yang diminta oleh UNSCR 1373, diantara hal-hal lain, dilakukan oleh negara-negara lain.

Korea Utara tidak diketahui mensponsori tindakan teroris sejak 1987. Ia telah menjual senjata pada beberapa kelompok teroris, walau ia mengutarakan perlawanannya terhadap semua bentuk terorisme internasional. Pyongyang juga telah memberikan suaka pada anggota Tentara Merah Jepang yang ikut membajak penerbangan Maskapai Penerbangan Jepang ke Korea Utara pada 1970. Pyongyang melanjutkan menjual teknologi peluru kendali balistik ke negara yang ditandai oleh Amerika sebagai sponsor terorisme, termasuk Suriah dan Libya. Korea Utara adalah Partai ke enam dari 12 Konvensi Internasional dan Protokol yang berkaitan dengan terorisme.

e. Sudan

Sudan sedang bekerja sama dengan usaha anti terorisme Amerika sebelum 11 September 2001, yang mencakup suatu hubungan yang erat dengan berbagai badan Pemerintah Amerika untuk menyelidiki dan menangkap extremis yang dicurigai terlibat dalam tindakan teroris. Sudan merupakan Partai ke 11 dari 12 Konvensi Internasional dan Protokol yang berkaitan dengan Terorisme. Sudan juga telah bekerja

sama dalam usaha regional untuk mengakhiri perang sipil yang telah berlangsung sejak 1983-sebuah prioritas kebijakan Amerika yang mensejajarkan tujuan Amerika untuk membuat Sudan menolak pemberian suaka untuk Teroris.

Sementara masih dikhawatirkan mengenai dukungan yang diberikan oleh pemerintah Sudan untuk beberapa kelompok teroris tertentu, seperti HAMAS dan Jihad Islam Palestina, Amerika puas dengan kerja sama dan kemajuan yang dihasilkan dalam kegiatan anti teroris mereka.

Di Syria juga terdapat beberapa kelompok teroris. Pemerintah Suriah terus melanjutkan memberikan dukungan politis dan bahan baku terbatas pada beberapa kelompok Palestina, termasuk memperbolehkan mereka untuk mempertahankan markas atau kantor di Damaskus. Bebe-rapa dari kelompok ini mempunyai tindakan teroris yang tetap, tapi pemerintah Suriah memaksa agar kantor mereka yang di Damaskus hanya melakukan kegiatan politis dan informatif saja. Kelompok penolakan Palestina yang paling menyolok di Suriah adalah PFLP (Popular Front for the Liberation of Palestine) dan PFLP-GC (Popular Front for the Liberation of Palestine-General Command) PIJ dan HAMAS. Suriah juga terus mengizinkan untuk membekali Iran melewati Damaskus dari Hizbullah di Lebanon. Tapi Walau begitu, pemerintah Suriah tidak pernah terlibat langsung dalam tindakan terorisme sejak 1986.

Pada Dewan Keamanan PBB dan dalam forum multilateral, Suriah telah mengambil peran utama dalam mengambil pandangan bahwa teroris Palestina dan Lebanon yang memerangi Israel bukanlah teroris; Suriah juga telah menggunakan suaranya pada Dewan Keamanan PBB untuk

meningkatkan dukungan internasional untuk aspirasi nasional Palestina dan mengutuk tindakan Israel dalam wilayah Palestina sebagai "terorisme negara."

Pemerintah Suriah telah berulang kali meyakinkan pemerintah Amerika bahwa mereka akan melakukan tindakan apapun untuk melindungi warga dan fasilitas Amerika dari teroris di Suriah. Pada saat ancaman meninggi, mereka telah meningkatkan perlindungan polisi disekitar kedutaan Amerika. Selama lima tahun belakangan tidak pernah ada ancaman teroris terhadap warga Amerika di Suriah. Pemerintah Suriah telah sangat bekerja sama dengan Amerika dan pemerintah lain melawan al-Qaeda, Taliban dan organisasi dan perorangan teroris lain. Mereka juga telah menghilangkan tanda-tanda bantuan rakyat terhadap dukungan untuk al-Qaeda, termasuk pada media dan mesjid-mesjid.

Pada 2002 Suriah menjadi bagian dari Protokol 1988 untuk penghapusan Tindakan Kejahatan Melawan Hukum di Bandara yang melayani penerbangan sipil, membuatnya menjadi peserta ke 5 dari 12 konvensi internasional dan protocol yang berhubungan dengan terorisme

Kelompok Separatis dan Kelompok Etnis

Beberapa kelompok seperatis dan kelompok etnis mudah sekali digolongkan ke dalam kelompok teroris. Karena kegiatan politik mereka untuk memisahkan diri atau melakukan balas dendam atas genosida atau pembantaian, banyak kelompok muncul sebagai teroris. Partai Pekerja Kurdistan (Kurdistan Workers' Party (PKK)) a.k.a. Kurdistan Freedom and Democracy Congress (KADEK) dan

Kongres Kebebasan dan Demokrasi Kurdistan. Kelompok KADEK ini didirikan pada 1974 sebagai kelompok perlawanan Marxis – Leninis yang sebagian besar terdiri dari Kurdi Turki. Tujuan kelompok ini adalah untuk mendirikan negara Kurdi Demokrat di Timur Tengah. Pada awal 1990-an, PKK bergerak melewati kegiatan perlawanan basis pinggiran daerah dan menggabungkan terorisme di dalam kota. Pemerintah Turki menangkap Ketua Abdullah Ocalan di Kenya pada awal 1999; pengadilan keamanan negara Turki memutuskan hukuman mati padanya. Pada Agustus 1999 mengumumkan suatu "inisiatif perdamaian", yang memerintahkan para anggota untuk bertahan dari perbuatan kekerasan dan memohon dialog dengan Ankara mengenai masalah Kurdi. Pada suatu kongres PKK di Januari 2000, para anggota mendukung insiatif Ocalan dan mengatakan bahwa kelompok mereka sekarang hanya akan menggunakan tindakan politis untuk mencapai tujuan barunya, hak yang diperbaiki untuk para Kurdi di Turki. Pada April 2002, kongres PKK ke 8, nama PKK dirubah menjadi Kongres Kebebasan dan Demokrasi Kurdistan (KADEK) dan mengumumkan suatu komitmen pada kegiatan tanpa kekerasan untuk mendukung hak-hak orang Kurdi. Seorang juru bicara PKK/KADEK mengatakan bahwa sayap bersenjata mereka, Kekuatan Pertahanan Rakyat tidak akan menyerahkan senjatanya untuk alasan membela diri, namun, pernyataan penolakan penyerahan senjata mereka menggarisbawahi bahwa organisasi ini mempertahankan kemampuannya untuk menjalankan operasi teroris. PKK/KADEK mendirikan suatu komite pengatur yang baru di bulan April, dengan keanggotaan yang mirip dengan komite Presidensil PKK.

Sasaran utama kelompok ini adalah Kekuatan Keamanan Pemerintah Turki di Turki, perwakilan Turki daerah dan penduduk pedesaan yang menentang organisasi tersebut di Turki. Melancarkan serangan pada fasilitas diplomatis dan komersil Turki di belasan negara Eropa Barat pada 1993 dan sekali lagi di musim semi 1995. Dalam suatu usaha untuk merusak industri turisme Turki, PKK membom lokasi turis dan hotel-hotel dan menculik turis asing di awal hingga pertengahan 1990an. PKK/KADEK tidak melancarkan serangan teroris pada 2002, namun kelompok ini secara teratur mengeluarkan ancaman terselubung bahwa mereka akan melanjutkan tindakan kekerasan jika kondisi pemimpin yang dipenjara tidak diperbaiki dan mereka melanjutkan pelatihan dan perencanaan militernya.

Kekuatan kelompok ini kurang lebih 4,000 sampai 5,000 orang, kebanyakan pada saat ini berlokasi di Irak utara. Mempunyai ribuan simpatisan di Turki dan Eropa. Lokasi/daerah operasi kelompok ini di Turki, Eropa dan Timur Tengah. Bantuan Luar untuk kelompok ini berasal dari Iran, Irak, Suriah. Telah menerima suaka dan bantuan yang cukup banyak dari Suriah, Irak dan Iran. Damaskus biasanya mendukung persetujuan anti-teror September 2000 mereka dengan Ankara, berikrar untuk tidak mendukung PKK. Melakukan pengumpulan dana yang tersebar luas di Eropa.

Kelompok IRA Asli (Real IRA (RIRA) alias True IRA) dibentuk diawal 1998 sebagai sayap bersenjata yang rahasia dari Pergerakan Kesatuan 32 Daerah, suatu “kelompok penekanan politis” yang bertujuan untuk menghilangkan kekuatan Inggris dari Irlandia Utara dan menyatukan

Irlandia. RIRA juga berusaha untuk mengganggu proses perdamaian Irlandia Utara. Pergerakan Kesatuan 32 Daerah menolak adopsi Sinn Fein di September 1997 dari nilai-nilai demokrasi dan kedamaian Mitchell dan menolak perubahannya pada Desember 1999 pada Pasal 2 dan 3 dari Undang-Undang Dasar Irlandia, yang ingin mengakui Irlandia Utara. Walau ada gangguan dari dalam dan permintaan dari para anggota yang dipenjara – termasuk pendiri kelompok tersebut Michael "Mickey" McKevitt – untuk suatu gencatan senjata serta pembubaran kelompok, kelompok ini berikrar untuk melakukan tindakan keras pada bulan Oktober dan melanjutkan penyerangan.

Kegiatan kelompok ini adalah pemboman, pembunuhan dan perampokan. Banyak anggota RIRA yang tadinya merupakan anggota IRA tidak tetap yang meninggalkan organisasi itu mengikuti gencatan senjata IRA tidak tetap dan membawa banyak pengalaman taktik teroris dan pembuatan bom. Sasaran mereka termasuk orang sipil (yang paling terkenal adalah pemboman Omagh pada Agustus 1998), militer Inggris, polisi di Irlandia Utara dan masyarakat Protestan Irlandia Utara. Sejak Oktober 1999, RIRA telah melakukan lebih ari 80 serangan teroris. RIRA mengaku bertangggungjawab untuk suatu serangan pada bulan Agustus di suatu Markas Angkatan Bersenjata London yang membunuh seorang pekerja bangunan.

Kekuatan kelompok ini 100 sampai 200 aktivis termasuk dukungan terbatas dari garis keras IRA yang tidak puas dengan gencatan senjata IRA dan simpatisan republican lain. Kurang lebih 40 anggota RIRA berada dalam penjara Irlandia. Lokasi/daerah operasi kelompok ini meliputi

Irlandia Utara, Inggris dan Republik Irlandia. Bantuan Luar untuk kelompok ini dicurigai mendapatkan dana dari simpatisan di Amerika dan untuk mencoba untuk membeli senjata dari dealer senjata Amerika. RIRA juga dilaporkan telah membeli senjata canggih dari negara-negara Balkan. Di bulan Mei, tiga WN Irlandia yang dihubungkan dengan RIRA telah mengaku bersalah atas tuduhan persekongkolan untuk membuat peledakan untuk mencoba mendapatkan senjata yang memngikuti ekstradisi mereka dari Slovenia ke Inggris.

Kelompok Tanah Air Basque dan Kebebasan (Basque Fatherland and Liberty (ETA) a.k.a. Euzkadi Ta Askatasuna) didirikan tahun 1959 dengan tujuan mendirikan suatu Tanah Air yang tersendiri didasarkan pada nilai-nilai Marxis di utara propinsi Spanyol seperti Vizcaya, Guipuzcoa, Alava dan Navarra serta bagian barat daya wilayah prancis seperti Labourd, Basse-Navarra dan Soule. Tindakan perlawanan teroris Sapnyol yang baru-baru saja telah menghambat kemampuan operasional kelompok tersebut. Polisi Spanyol telah menahan 123 anggota dan rekanan ETA di 2002; Pemerintah Perancis telah menahan belasan lainnya. Di bulan Agustus, seorang hakim Spanyol menetapkan suatu larangan sementara terhadap sayap politis ETA, Batasuna.

Kegiatan kelompok ini terutama terlibat dalam pemboman dan pembunuhan perwakilan Pemerintah Spanyol, keaman-an dan kekuatan militer, politisi dan tokoh pengadilan; pada bulan Desember 2002, ETA mengulangi keinginannya untuk mengenai daerah turisme Spanyol. Di 2002 ETA membunuh 5 orang termasuk seorang anak, suatu penurunan yang patut diperhatikan dari 15 korban yang mati di 2001 dan

kurang lebih 90 orang yang terluka. Kelompok ini telah membunuh lebih dari 800 orang dan melukai ratusan lainnya sejak mereka memulai serangan mematikan di awal 1960an. ETA membiayai kegiatannya melalui penculikan, perampokan dan pemerasan.

Kekuatan kelompok ini tidak diketahui; ETA mempunyai ratusan anggota, dan pendukung. Lokasi/ Daerah Operasi kelompok ini beroperasi terutama didaerah otonomi Basque di selatan Spanyol dan Barat Daya Perancis, tapi juga telah membom kepentingan Spanyol dan Perancis ditempat lain. Bantuan Luar untuk kelompok ini berasal dari pelatihan di waktu yang berlainan di masa lalu di Libya, Lebanon dan Nikaragua. Beberapa anggota diperkirakan telah mendapat-kan suaka di Kuba sementara yang lain menetap di Amerika Selatan.

Kelompok Macan Pembebasan Tamil Eelam (Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE)) atau Organisasi front lain yang diketahui: World Tamil Association (WTA), World Tamil Movement (WTM), the Federation of Associations of Canadian Tamils (FACT), the Ellalan Force, the Sangilian Force. Didirikan di 1976, LTTE merupakan kelompok Tamil di Sri Lanka yang paling kuat dan menggunakan cara yang jelas-jelas tidak resmi untuk mengumpulkan dana, menda-patkan senjata dan mengutarakan alasan pendirian negara Tamil yang mandiri. LTTE memulai konflik bersenjatanya dengan pemerintah Sri Lanka di 1983 dan telah bersandar pada strategi yang termasuk penggunaan-penggunaan taktis teroris. LTTE saat ini mengawasi suatu persetujuan gencatan senjata dengan pemerintah Sri Langka dan sedang terlibat pembicaraan perdamaian.

Kegiatan kelompok ini mempunyai perpaduan strategi perlawanan lapangan perang dengan program teroris yang mengincar tidak hanya perorangan utama di lapangan pedesaan tapi juga pemimpin politis dan militer senior Sri Lanka di Kolombo dan pusat perkotaan lain. Para macan sangat terkenal dengan para kader Pembom bunuh dirinya, Macan Hitam. Pembunuhan politis dan pemboman adalah umum. LTTE telah menahan diri dari mengincar diplomat asing dan bangunan komersil.

Kekuatan kelompok ini tepatnya tidak diketahui, tapi LTTE diperkirakan mempunyai 8,000 sampai 10,000 prajurit bersenjata di Sri Langka dengan inti pasukan terlatih kurang lebih 3,000 sampai 6,000. LTTE juga mempunyai dukungan luar negeri yang sangat besar untuk pencarian dana, pembelian senjata dan kegiatan propaganda. Lokasi/Daerah Operasi kelompok ini dikendalikan sebagian besar dari daerah pesisir utara dan timur Sri Langka tapi telah melakukan operasi diseluruh pulau. Bermarkas di Sri Langka utara, pemimpin LTTE Velupillai Prabhakaran telah menetapkan jaringan checkpoint dan nara sumber yang luas untuk mengawasi orang asing yang memasuki daerah pengendalian kelompok Macam Tamil. LTTE jelas-jelas mendukung separatis Tamil dengan melobby pemerintahan asing dan PBB. LTTE juga menggunakan kontak internasional mereka untuk membeli senjata, peralatan komunikasi dan peralatan lain serta perbekalan yang diperlukannya. LTTE menggunakan komunitas yang besar di Amerika Utara, Eropa dan Asia untuk mendapatkan dana dan perlengkapan untuk pejuangnya di Sri Lanka.

Di sisi lain ada juga kelompok Terorisme Sikh yang disponsori oleh *expatriate* dan kelompok Sikh India yang ingin membentuk suatu Negara pemerintahan Sikh yang disebut *Khalistan* (Tanah orang yang Murni) dari bagian negara India. Kelompok aktif termasuk Babbar Khalsa, Kekuatan Azad Khalistan Babbar Khalsa, Front Pembebasan Khalistan dan Kekuatan Komando Khalistan. Banyak dari kelompok ini beroperasi dibawah lindungan organisasi pelindung, yang paling menyolok adalah Komite Panthic Kedua.

Penyerangan Sikh di India diarahkan melawan perwakilan India dan fasilitasnya, Sikh lain, dan yang beragama Hindu; tindakan mereka termasuk pembunuhan, pemboman dan penculikan. Penyerangan ini telah merosot dengan tajam sejak 1992 saat kekuatan keamanan India telah menangkap atau membunuh sekelompok pemimpin militant Sikh. Kematian total di Punjab telah menurun hingga 95 persen sejak lebih dari 3.300 orang sipil meninggal di 1991. Kemerosotan ini sebagian besar hasil dari tentara India, paramiliter serta keberhasilan polisi mengatasi kelompok ekstremis.

Sel militant Sikh aktif secara internasional dan para ekstremis mengumpulkan dana dari komunitas Sikh diluar negeri. Expatriat Sikh telah membuat bermacam-macam organisasi internasional yang melobby untuk alasan Sikh diluar negeri. Yang paling terkenal adalah World Sikh Organization dan International Sikh Youth Federation.

Kesatuan Uni Soviet yang Lampau

Rusia telah mencoba untuk memerangi terorisme dalam beberapa cara, baik didalam maupun diluar negeri. Moskow

telah berpartisipasi dalam konferensi tahap menteri dalam memerangi terorisme dan kekuatan keamanannya telah melakukan latihan atas komponen anti teroris mereka.

Di 1990-an, terorisme domestik merupakan hal yang umum di Rusia, terutama di wilayah Trans-Kaukasus dan Kaukasus Utara Rusia. Kegiatannya mencakup pembunuhan, pemboman, penyanderaan dan beberapa pembajakan pesawat terbang. Kebanyakan kekerasan berhubungan dengan peperangan sipil; namun ada kemungkinan untuk terorisme berdasarkan etnis saat kelompok nasionalis menyatakan mereka mengikuti kekuasaan komunisme yang telah berjalan selama puluhan tahun. Yang paling rentan adalah wilayah Sentral Asia, yang menawarkan lahan yang subur untuk kelompok fundamentalis Timur Tengah, terutama yang disponsori Hizbullah – Iran.

Tahun 1993, Rusia mengadili tiga orang Armenia untuk pemboman kereta Moskow-Baku di 1993. Mereka dituduh tahun 1994 dan dijatuhi hukuman penjara. Tahun 1996 separatis Chzehnya menyandera lebih dari 200 sandera bukan pejuang di Pervomayskoye. Belakangan tahun itu, enam pekerja Palang Merah Internasional terbunuh di Novyy Atagi. Beberapa negara dari bekas Uni Soviet di bebani oleh kekerasan ekonomis, yang biasanya berhubungan dengan peperangan sipil, kejahatan terorganisasi atau pertengkaran antar etnis. Elemen separatis dan anti pemerintah secara meningkat melakukan pembunuhan dan penculikan. Penjaga perdamaian Rusia juga merupakan sasaran utama.

Kelompok Kiri

a. A.K.A 17 November

Organisasi Revolusi 17 November (Revolutionary Organization 17 November/a.k.a. 17 November) adalah Kelompok kiri radikal didirikan 1975 dan dinamakan atas nama pergerakan pelajar di Yunani pada November 1973 yang memprotes pemerintahan junta militer. Badan anti Yunani, Anti Amerika, anti Turki dan kelompok anti NATO yang mencari penghapusan Basis Tentara Amerika dari Yunani, penghapusan kekuatan militer Turki dari Siprus dan memburuknya ikatan Yunani pada NATO dan negara-negara Kesatuan Eropa. Kegiatan kelompok ini pada awalnya melakukan pembunuhan terhadap senior perwakilan Amerika dan tokoh utama orang Yunani. Tambahan pemboman di 1980. Sejak 1990 telah mengembangkan sasarannya untuk mencakup fasilitas negara-negara kesatuan Eropa dan negara asing yang berinvestasi di Yunani dan telah menambahkan penyerangan roket buatan pada cara-caranya. Mendukung diri sebagian besar dari perampokan bank. Suatu percobaan pemboman yang gagal oleh 17 November di bulan Juni di pelabuhan Piraeus di Athena berkaitan dengan kerja detektif yang gigih menghasilkan penahanan yang pertama kali atas kelompok ini; pengadilan berlangsung mulai Maret 2003.

Kekuatan kelompok ini tidak diketahui, tapi dianggap kecil, Polisi menangkap 19 anggota tersangka dari kelompok itu di 2002. Lokasi/Daerah Operasi kelompok ini di Athena, Yunani. Bantuan Luar Tidak Diketahui.

b. Shining Path

Kelompok Jalur Terang (Sendero Luminoso/Shining Path,

atau SL) yang dipimpin Abimael Guzman membentuk SL di Peru di akhir 1960-an dan ajarannya membentuk dasar doktrin Maoist militant SL. Di 1980-an, SL menjadi salah satu kelompok teroris yang paling kejam di wilayah dunia bagian barat, ¾ dari kurang lebih 30.000 orang telah mati sejak SL mengangkat senjata di tahun 1980an. Pemerintah Peru membuat langkah dramatis melawan SL selama 1990, tapi sebuah laporan keterlibatan SL dalam penyaluran narkoba menunjukkan bahwa mereka mungkin mempunyai suatu sumber dana baru untuk mempertahankan suatu kebangkitan. Tujuan tertulisnya adalah untuk menghancur-kan yayasan-yayasan Peru yang ada dan menggantikannya dengan rezim petani revolusioner komunis. Mereka juga melawan semua pengaruh pemerintahan lain dan juga oleh kelompok gerilya Amerika Latin, terutama Tupac Amaru Revolutionary Movement (MRTA).

Di 2002 delapan tersangka anggota ditangkap berdasarkan kecurigaan keterlibatan pemboman 20 Maret di seberang jalan dari Kedutaan Amerika yang membunuh 10 orang. Mereka dikenakan hukuman penahanan yang ditunda yang bisa berlaku selama 1 tahun. Lima telah menjadi sangat agresif dalam mengadili tersangka teroris di tahun 2002. menurut DirektoratIntel Kepolisian Nasional Peru, 199 tersangka teroris ditahan antara Januray sampai pertengah-an November. Operasi Antiteroris menetapkan kantong kegiatan teroris di Lembah Hulu Sungai Huallaga dan Lem-bah Sungai Apurimac/Ene, dimana kolom SL melanjutkan penyerangan berkala.

Kegiatan kelompok ini adalah melakukan kampanye pem-boman acak dan pembunuhan terpilih. Meledakan Bahan

peledak di misi diplomatis beberapa negara di Peru di tahun 1990, termasuk percobaan bom mobil di kedutaan Amerika di bulan Desember. Otoritas Peru melanjutkan operasi melawan SL di 2002 di pinggiran kota dimana SL melakukan penyerangan berkala terhadap desa-desa. Kekuatan kelompok ini keanggotaan tidak diketahui, tapi diperkirakan sekitar 400 sampai 500 militan. Kekuatan SL sangat berkurang oleh adanya penangkapan dan desersi tapi nampak bertambah lagi, kemungkinan karena keterlibatan dalam penyaluran narkoba. Lokasi/Wilayah Operasi kelompok ini di Peru, dengan sebagian kegiatan di daerah pinggiran kota.

c. MRTA

Kelompok Tupac Amaru Revolutionary Movement (MRTA) atau biasa disebut dengan istilah Tupac Amaru (MRTA) adalah gerakan revolusioner Marxis-Leninis yang dibentuk pada 1983. Tujuannya adalah tetap untuk membersihkan Peru dari Imperialisme dan mendirikan rezim Marxis. Mereka menderita dari penyimpangan dan keberhasilan anti teroris sebagai tambahan pada perselisihan dalam dan kehilangan dukungan sayap kiri.

Kegiatan MRTA mencakup pemboman, penculikan, penyergapan dan pembunuhan. Mereka sebelumnya bertanggungjawab untuk serangkaian besar penyerangan anti Amerika; kegiatan belakangan ini sangat menurun. Kebanyakan anggota telah dipenjarakan. Namun di Desember 1996 23 anggota MRTA mengambil alih kediaman Kedutaan Bear Jepang di Lima dalam suatu resepsi diplomatis, dengan menyandera ratusan orang.

d. DHKP/C

Kelompok Revolutionary People's Liberation Party/Front

(DHKP/C) a.k.a. Devrimci Sol, Revolutionary Left, Dev Sol adalah kelompok teroris non agama yang dibentuk di tahun 1978 sebagai Devrimci Sol, atau Dev Sol, suatu pecahan dari Dev Genc (Pergerakan Kaum Muda). Berganti nama di 1994 setelah perselisihan dalam; “Party” adalah sebutan untuk kegiatan politis kelompok, sementara “Front” adalah untuk sebutan kegiatan militant kelompok. Kelompok ini menggabungkan suatu idelogi Marxis-Leninis dan bersikap anti Amerika, anti NATO dan anti Pendirian Turki. Mereka mendanai kegiatannya terutama melalui perampokan bersenjata dan pemerasan.

Kegiatan kelompok ini sejak akhir 1980an sasaran utama kelompok ini adalah orang-orang keamanan dan militer Turki yang telah pensiun. Mereka memulai suatu kampanye melawan ketertarikan luar negeri di tahun 1990 yang menliputi penyerangan terhadap anggota dan fasilitas militer dan diplomatis. Dalam tindakan terorisnya yang pertama kali sebagai DHKP/C di tahun 1996, mereka membunuh pengusaha Turki dan dua lainnya. DHKP/C menambahkan pembomam bunuh diri pada daftarnya di tahun 2001, dnegan penyerangan yang berhasil atas kepolisian Turki di Januari dan September. Operasi Keamanan di Turki dan tempat lain telah melemahkan kelompok itu, Namun DHKP/C tidak melakukan penyerangan teroris di tahun 2002. Lokasi/daerah operasi kelompok ini di Turki, terutama Istanbul. Mereka mencari dana di Eropa.

e. FARC

Kelompok Revolutionary Armed Forces Of Colombia (FARC) didirikan pada 1964 sebagai sayap militer dari Colombian Communist Party (Partai Komunis Kolombia),

FARC merupakan pemberontakan Marxis yang paling tua, paling mampu paling besar dan paling lengkap. FARC dipimpin oleh sekertariat, dipimpin oleh septuagenar Manuel Marulanda (alias Tirofijo) dan enam orang lain termasuk komandan militer senior Jorge Briceno (alias Mono Joyoy) Diatur sesuai cara militer dan mencakup beberapa front perkotaan. Di Februari 2002 proses penawaran perdamaian kelompok itu yang berjalan lambat bersama administrasi Pastrana dibatalkan oleh Bogota menyusul pembajakan dan penculikan seorang Senator Kolombia dari Pesawat terbang. Tanggal 7 Agustus, FARC meluncurkan penyerbuan mortir yang besar-besaran terhadap Istana Kepresidenan dimana Presiden Alvaro Uribe sedang di inagurasi. Delegasi luar negeri tingkat tinggi – termasuk dari Amerika – yang hadir pada inagurasi tidak terluka, tapi 21 penduduk desa miskin yang berada disekitarnya terbunuh oleh peluru liar saat penyerangan.

Kelompok FARC ini melakukan pemboman, pembunuhan, penyerbuan mortar, penculikan, pemerasan, pembajakan dan juga gerilya dan tindakan militer konvensional terhadap sasaran politis, militer dan ekonomis Kolombia. Di Maret 1999, FARC membunuh tiga aktivis Indian Amerika di wilayah Venezuela setelah menculik mereka di Kolombia. Warga Negara Asing sering merupakan sasaran penculikan FARC untuk dimintai tebusan. Mempunyai ikatan yang tercatat baik dengan kegiatan pengedaran norkoba termasuk pemajakan, penanaman dan pembagian.

Kurang lebih 9.000 sampai 9.000 pasukan bersenjata dan ribuan pendukung, kebanyakan di wilayah pinggir kota. Lokasi/Wilayah Operasi di Kolombia dengan beberapa

kegiatan – pemerasan, penculikan, logistik dan R&R – di Venezuela, Panama dan Ekuador. Bantuan Luar di dapat dari Kuba. Kuba memberikan beberapa konsultasi medis dan politis. Suatu pengadilan sedang berlangsung di Bogota untuk menentukan apakah anggota dari IRA – yang ditangkap di Kolombia saat keluar dari daerah kendali demiliterisasi FARC (despeje) – memberikan pelatihan peledakan tingkat tinggi kepada FARC.

f. ELN-Kolombia

Kelompok National Liberation Army (ELN)—Kolombia, adalah kelompok pergerakan Marxis yang dibentuk pada 1965 oleh inteketual perkotaan yang diilhami oleh Fidel Castro Dan Che Guevara. Memulai dialog dengan perwakilan Kolombia di tahun 1999 menyusul suatu kampanye penculikan masal – masing-masing paling tidak melibatkan seorang WN Amerika - untuk menunjukkan kekuatannya dan kemampuan kelanjutannya serta untuk memaksa administrasi Pastrana untuk bernegosiasi. Pembicaraan perdamaian antara Bogota dan ELN, bermula di 1999, berlanjut secara sporadis tapi gugur kembali akhir tahun.

Penculikan, pembajakan, pemboman dan pemerasan dengan kemampuan militer konvensional yang minim. Dalam satu tahun melakukan ratusan penculikan untuk tebusan, sering membidik pegawai asing dari perusahaan besar, terutama di industri perminyakan. Penculikan, pembajakan, pemboman dan pemerasan. Kemampuan militer konvensional yang minim. Mendapatkan beberapa penghasilan dari perpajakan industri narkotik yang tidak resmi. Sering kali menyerang infrastruktur sumber tenaga dan telah menyebabkan kerusakan besar pada pipa jalur minyak dan jaringan distribusi

listrik.

Kekuatan kelompok ini kurang lebih 3.000 sampai 5.000 anggota bersenjata dan jumlah pendukung aktif yang tidak diketahui. Lokasi/Wilayah Operasi kelompok ini terutama di daerah pinggiran dan wilayah batasan bergunung di Utara, Timur Laut dan Barat Daya Kolombia dan Venezuela. Bantuan luar didapat dari Kuba memberikan beberapa bantuan medis dan konsultasi politis.

Perkembangan Jaringan Terorisme Nasional

Jika bom adalah salah satu bentuk ekspresi terorisme, maka serangan indiskriminan tersebut ternyata sudah banyak terjadi dan dilakukan oleh kalangan agamawan di Indonesia. Selama 1962-2003, Indonesia sudah mencatat puluhan kali ledakan bom terjadi dalam skala kecil dan besar, setengahnya terjadi di Jakarta. Catatan dimulai dengan ledakan bom yang terjadi di kompleks Perguruan Cikini dalam upaya pembunuhan presiden pertama RI, Ir Soekarno, pada 1962. Berikut ini adalah sejumlah peristiwa yang terkait dengan kekerasan yang telah dilakukan Darul Islam antara lain;

Perisitiwa kekerasan pada 11 November 1976 yang terjadi di Sumatera Barat tepatnya di Masjid Nurul Iman, Padang. Pelakunya adalah Timzar Zubil, tyang disinyalir oleh pemerintah sebagai Komando Jihad. Namun hingga sekarang, Timzar tidak pernah ditemukan. Selang dua tahun kemudian pada 20 Maret 1978, kekerasan terjadi ketika sekelompok pemuda melakukan peledakan di beberapa tempat di Jakarta dengan bom molotov, dan membakar mobil presiden taksi untuk mengganggu jalannya sidang

umum MPR. Peristiwa ledakan bom terjadi lagi pada 14 April 1978, namun terjadi Masjid Istiqlal, Jakarta. Sampai sekarang, ledakan bom dengan bahan peledak TNT itu tetap jadi misterius.

Empat tahun kemudian pada 4 Oktober 1984, terjadi peristiwa ledakan bom di BCA, Jalan Pecenongan, Jakarta Barat. Diketahui pelakunya adalah Muhammad Jayadi, anggota Gerakan Pemuda Ka'bah (anak organisasi Partai Persatuan Pembangunan) lantaran protes terhadap peristiwa Tanjungpriok 1983. Jayadi yang tidak dikenal sebagai anggota Gerakan Pemuda Ka'bah kemudian dijatuhi hukuman penjara 15 tahun setelah mengaku menjadi pelaku peledakan. Saat bersamaan, juga terjadi ledakan di BCA dan Kompleks Pertokoan Glodok, Jakarta dengan pelaku Chairul Yunus alias Melta Halim, Tasrif Tuasikal, Hasnul Arifin yang juga merupakan anggota Gerakan Pemuda Ka'bah. Mereka dijatuhi hukuman penjara dan dipecat dari keanggotaan Gerakan Pemuda Ka'bah.

Selain itu, ledakan juga terjadi di BCA Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat dengan pelaku Edi Ramli, juga anggota Gerakan Pemuda Ka'bah. Siapa dalang pemboman, sebenarnya masih misterius, tapi Edi dijatuhi hukuman penjara. Rentetan kasus peledakan beberapa kantor BCA itu menyeret tokoh-tokoh Petisi 50, seperti H.M. Sanusi, A.M. Fatwa (keduanya dipenjara, saksi-saksi mengaku disiksa), dan H.R. Dharsono. Setelah BCA menjadi sasaran pada 24 Desember 1984, terjadi ledakan bom di Gedung Seminari Alkitab Asia Tenggara (SAAT), Jalan Margono, Malang, Jawa Timur. Namun tidak diketahui siapa pelakunya.

Pada 20 Januari 1985, Candi Borobudur di Jawa Tengah tak luput dari sasaran ledakan bom. Pelakunya adalah seorang mubalig, Husein Ali Alhabsy yang juga dilatar-belakangi motif protes terhadap peristiwa Tanjungpriok 1983. Husein menolak tuduhan atas keterlibatannya dalam peledakan Borobudur dan menuding Mohammad Jawad, yang tidak tertangkap, sebagai dalangnya. Pada awalnya, Husein mendapat ganjaran penjara seumur hidup. Tapi kemudian mendapatkan grasi dari pemerintahan Habibie pada 23 Maret 1999.

Pada 16 Maret 1985, ledakan bom terjadi di Bus Pemudi Ekspress di Banyuwangi, Jawa Timur. Pelakunya adalah Abdulkadir Alhasby, anggota majelis taklim. Kasus ini juga dikaitkan dengan peledakan Candi Borobudur yang juga memprotes peristiwa Tanjungpriok 1983. Bahan peledak yang digunakan adalah TNT batangan PE 808/tipe Dahana. Kemudian terjadi rentetan "bom natal" di tahun 2000 hingga terjadi peristiwa Bom Bali 12 Oktober 2002.

Dari pengakuan para tersangka tindak pidana terorisme Bom Bali 12 Oktober 2002,[15] jelas terlihat sebuah ekspresi emosi keagamaan. Ali Gufron, salah seorang tersangka teror Bom Bali, bahkan menyatakan sikapnya dengan tegas dan sederhana: "... membalas kezaliman dan kesewenangan AS dan sekutunya terhadap kaum Muslim dengan maksud agar mereka menghentikan kezalimannya."[16] Ada suatu nilai yang bekerja dan mendikte jalan pikiran mereka. Ali Ghuf-

---

[15] Misalnya, pengakuan Imam Samudra, "…Memerangi AS dan sekutunya adalah perintah Allah dan Rasul-Nya baik secara langsung ataupun tidak langsung." Lihat, "Tabel Motif & Tujuan Peledakan Bom Bali 12 Oktober 2002", Dokumen Polri, 2003, h. 1-3.

[16] Lihat, "Tabel Motif & Tujuan Peledakan Bom Bali 12 Oktober 2002", h. 4.

ron misalnya, menyatakan bahwa pemboman itu adalah "aksi pengabdian kepada Tuhan." Maka Ali Ghufron, Imam Samudra, Amrozi, dan kelompoknya merasakan suatu *delusion of grandeur*, perasaan mempunyai atau mewakili atau mendapatkan titah dan menjadi bagian dari unsur kebesaran yang berkeyakinan dirinya mengemban misi khusus dari Tuhan.[17]

Kaum teroris senantiasa merasa diri sebagai "pejuang Tuhan" yang terpanggil untuk bertindak atas nama Tuhan dan agama, menjadi "tangan Tuhan" di muka bumi untuk merealisasikan "kemurkaan-Nya" dalam sebentuk resistensi, pemboman.[18] Akibat dari interpretasi dan ekspresi emosi keagamaan yang delusif ini, maka tragedi pun terjadi dan sejumlah besar spekulasi pun muncul di tengah-tengah publik.

Tragedi serangkaian serangan bom kaum teroris di Bali, Makassar, Jakarta dan lain tempat di Indonesia telah memunculkan serangkaian spekulasi dari yang apologis hingga yang *apriori*.[19] Spekulasi pertama adalah tentang siapa pelaku serangan teror yang sangat terencana dan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan teknikal yang canggih. Pelakunya diidentifikasi secara arbitrer sebagai anti-AS, anti-Israel, anti-demokrasi, anti kekuatan ekonomi kapitalis, dan militer global. Spekulasi kedua adalah tentang motif kaum teroris dalam melakukan tindakan penghancur-

---

[17] Lihat Nova Riyanti Yusuf, "Delusion of grandeur", *Gatra*, 18 Oktober 2003, h. 37.

[18] Bagi Imam Samudra, membom adalah melaksanakan perintah Allah dalam Qur'an surah An-Nisaa ayat 74-76. Lihat "Tabel Motif & Tujuan Peledakan Bom Bali 12 Oktober 2002," h. 3.

[19] Lihat laporan *Kompas, Media Indonesia, Republika, Rakyat Merdeka, Pos Kota,* 28 Desember 2000.

an berlebihan terhadap tempat-tempat di mana kekuatan ekonomi, politik, dan militer AS berada. Spekulasi ketiga adalah tentang sasaran-sasaran apa lagi yang akan dituju terhadap AS dan Israel. Pelakunya secara *allegedly* diidentifikasikan sebagai kaum fundamentalis Islam yang saat ini menjadi musuh bebuyutan AS, Osama bin Laden yang saat ini bersembunyi di Afghanistan.[20] Kalaupun bukan Osama, masyarakat dunia berasumsi bahwa pelakunya adalah orang-orang lain dari kalangan fundamentalis Islam yang memiliki hubungan doktrinal dengan jaringan al-Qaeda.

Sebenarnya, kaum teroris bukanlah kelompok baru dalam dunia pergerakan radikal dan fundamentalis Indonesia. Kaum teroris adalah gabungan dari inti ajaran fundamentalis dan radikal yang bertemu dalam satu titik perencanaan perang melawan kezaliman. Di Indonesia, kelompok teroris ini berjumlah kecil: (1) Jamaah Islamiyyah, dan (2) Darul Islam (terbatas pada faksi tertentu).

Setelah Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo, Proklamator Negara Islam Indonesia wafat, mulailah terjadi perbedaan pandangan dan perpecahan dalam gerakan Darul Islam. Perpecahan gerakan Darul Islam saat itu sudah mencapai 38 faksi. Sistem faksionalisme yang ada dalam gerakan ini sangat mempengaruhi perkembangan gerakan ini sejak tahun 1962.

Sekitar tahun 1978-1979, Darul Islam pecah ke dalam dua kubu. *Pertama*, kubu Jamaah Fillah, diketuai oleh Djadja Sujadi. *Kedua*, Jamaah Sabilillah, dipimpin oleh Adah Djai-

---

[20] Osama bin Laden pada bulan Februari 1998 pernah mengeluarkan fatwa untuk melawan kaum Yahudi dan Nasrani dan menjadi tokoh panutan bagi hampir semua tersangka teroris. Lihat, Tim Redaksi Hot Copy, *Osama Bin Laden: Teroris atau Mujahid*, (terj.), (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 52-56.

lani Tirtapradja. Kedua tokoh ini merupakan petinggi militer TII, sebagai Anggota Komandemen Tertinggi (AKT) yang diangkat langsung oleh Kartosoewirjo. Karena ″tidak boleh ada dua Imam,″ Djadja Sujadi dibunuh oleh Adah Djaelani. Adah Djaelani dimasukkan ke penjara pada tahun 1980 dan perpecahan dalam Jamaah Sabilillah tak dapat dicegah. Darul Islam terburai menjadi beberapa kelompok dengan ketuanya masing-masing. Celakanya, pimpinan kelompok yang satu dengan lainnya saling membatalkan dan saling tidak mengakuinya.

Sejak itu, sesungguhnya sendi-sendi moral perjuangan Darul Islam sudah terpuruk dan meringkuk. Kesatuan perjuangannya tidak lagi mengental, tetapi buyar bersama ambisi pribadi-pribadi. Karena itu, apa yang dikenal rakyat Indonesia tentang Darul Islam di kemudian hari, sesungguhnya ialah Darul Islam produk dari manusia-manusia yang kurang berkualitas. Darul Islam masa kini ialah Darul Islam produk sempalan-sempalan NII yang senantiasa mengklaim dirinya sebagai ″pewaris tunggal″ penerus Kartosoewirjo.

Perpecahan yang terjadi dalam tubuh Darul Islam merupakan konsekuensi dari adanya persatuan atau intergrasi parsial antara kelompok-kelompok faksi. Integrasi dan perpecahan itu terlihat dari beberapa peristiwa atau kasus, seperti: (1) Peristiwa Komji (Komando Jihad), (2) Misi Islam, (3) Syuro Mahoni, (4) Sabilillah II, (5) Gerakan Usroh; (6) Syuro Lampung, (7) Jamaah Islamiyah, (8) Khalifatul Muslimin, (9) Syuro Cisarua, (10) KW9, (11) Resolusi ke Adah, dan (12) Jamaah Asharullah, (13) pecahnya faksi Ajengan Masduki dan Jama'ah Islamiyyah.

Jamaah Islamiyah merupakan jaringan teroris di Asia Tenggara yang berhubungan dengan al-Qaeda. Jaringan ini dirancang dengan penuh kerahasiaan sepanjang akhir tahun 1990an, menyusul tujuan yang dinyatakan untuk mendirikan negara Islam yang dicita-citakan terdiri atas Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina Selatan, dan Thailand Selatan. JI bertanggung jawab atas pemboman Bali 12 Oktober 2002, yang menewaskan hampir 200 orang dan melukai 300 orang lainnya. Perencanaan Bali tampaknya merupakan hasil akhir dari pertemuan pada awal tahun 2002 di Thailand, di mana serangan-serangan terhadap Singapura dan target lunak lain seperti pusat pariwisata di kawasan ini menjadi pertimbangan. Pada bulan Desember 2001, penguasa Singapura menyingkap rencana penyerangan JI terhadap Kedutaan Besar AS dan Israel dan gedung-gedung diplomatik Inggris dan Australia di Singapura. Penyelidikan terakhir juga mengaitkan JI dengan pengeboman pada bulan Desember 2000 di mana lusinan bom diledakkan di Indonesia dan Filipina. Jumlah anggota JI yang tepat tidak diketahui dan otoritas di Asia Tenggara terus menemukan dan menangkap elemen tambahan JI. Petugas di Singapura memperkirakan anggota JI sekitar 5.000 orang. Anggota operasional sebenarnya mungkin sekitar beberapa ratus.

Mengikuti pemberantasan JI secara regional, tidak diketahui bagaimana jaringan JI menanggapi. Sel JI diduga terentang di Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina dan selatan Thailand dan mungkin mempunyai Kehadiran dinegara-negara tetangga. Berdasarkan informasi dari penyelidikan berlanjut, sebagai tambahan mengumpulkan dana sendiri JI menerima uang dan logistik dari Timur Tengah dan kontaknya di Asia Selatan, NGO dan kelompok lain, termasuk Al-

KaidahNama Jamaah Islamiyah (JI) begitu dikenal di seantero dunia. Inilah organisasi yang membuat orang bergetar mendengarnya. Sejumlah peledakan bom besar di ASEAN, khususnya di Indonesia, diotaki organisasi ini. Bagaimana sejatinya organisasi ini? Bali Post mengungkap kembali isi dokumen paling rahasia, Pedoman Umum Perjuangan Jamaah Islamiyah (PUPJI).

Di Indonesia, bom Bali 1 dan Bom Bali 2 adalah hasil nyata tangan dingin JI. Bom malam Natal, bom di rumah Kedubes Filipina, bom BEJ, bom Atrium Senen, dan bom Marriott merupakan karya-karya mereka. Kita semua bertanya-tanya, seperti apakah organisasi ini, bagaimana kerja organisasi-nya, pendanaannya, dan strukturnya. Sebuah dokumen paling rahasia milik JI didapatkan Bali Post. Inilah dokumen yang disebut-sebut dalam persidangan Abu Bakar Ba'asyir, yakni Pedoman Umum Perjuangan JI (PUPJI). Dokumen yang menjadi fakta bahwa JI itu ada, bukan fiktif, bukan rekayasa, dan bukan cuma bualan. Organisasinya ada, pengurusnya ada, anggotanya ada, hingga sistem pelatihan dan programnya pun ada. Dokumen PUPJI dibuat pada Mei 1996 oleh Majelis Qiyadah Markaziyah Al-Jamaah Al-Islamiyah.

JI memiliki nama asli Al-Jama'ah Al-Islamiyyah. Didirikan di Malaysia oleh Abdullah Sungkar. Tokoh Islam yang juga pendiri Ponpes Al Mukmin Ngruki. Sungkar berteman akrab dengan pendiri Ponpes Ngruki lainnya, yakni Abu Bakar Ba'asyir, baik di Ngruki maupun di Malaysia. Dalam *Nidhom Asasy* semacam AD/ART, JI menamakan jamaah JI sebagai Jama'atun minam-Muslimin yang bersifat alami. Didirikan secara rahasia dan perjuangan di bawah tanah.

Kedudukannya berada di suatu tempat yang dianggap memenuhi syarat. Tidak tetap. JI berasas Alquran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman *Salafush Shalih*. Sasaran perjuangannya mewujudkan tegaknya Daulah Islamiyah sebagai basis menuju wujudnya kembali *Khilfah 'Alaa Minhajin Nubuwwah* (semacam pemerintahan Islam di seluruh dunia). Guna menuju cita-cita itu, JI menempuhnya melalui perjuangan *dakwah, tarbiyah* (pendidikan), *amar makruf nahi munkar*, *hijrah* (pindah), dan *jihad fi sabilillah*.

Jamaah dipimpin oleh seorang amir. Sungkar menjadi amir pertama. Sepeninggal Sungkar, 2001, belum bisa dibuktikan siapa amirnya. PN Jakpus pun belum bisa membuktikan bahwa Abu Bakar Ba'asyir sebagai pengganti Sungkar. Tidak ada hitam di atas putih. Seorang amir dalam menjalankan tugasnya dibantu sejumlah lembaga, yakni Majelis Qiyadah (semacam DPR, meski tidak ansih parlemen), Majlies Syuro (semacam MPR), Majelis Fatwa (semacam DPA), dan Majelis Hisbah (semacam MA). Amir dipilih dan diangkat oleh Majelis Syuro. Anehnya, Majelis Syuro diangkat dan diberhentikan oleh amir. Amir juga mengangkat DPR, MPR, DPA, dan MA versi JI (Bab IV pasal 7 dan 8). Kekuasaan amir sangat tinggi. Dia berhak mengutip dana dari anggota, baik bersifat rutin maupun insidental. Amir juga berwenang memberi sanksi bila nggota melanggar. Hubungan dengan organisasi lain menjadi wewenang amir. Selain itu, amir bertanggungjawab dalam meningkatkan keilmuan dan kesejahteraan anggota. Bila amir tak bisa menjalankan tugasnya, amir bisa menunjuk sendiri penggantinya.

Masa jabatan amir hanya bisa berakhir bila wafat, ada uzur syar'i dan diberhentikan Majelis Syuro bila dianggap menjalankan kekafiran (ukurannya bukan kesalahan tetapi kekafiran). Amir juga bisa diberhentikan bila dinilai lemah dalam menghadapi tekanan asing. JI juga memiliki lembaga musyawarah sebagai pertemuan antarlembaga dengan amir yang diadakan setahun sekali. Amir punya kewenangan veto untuk memutuskan sesuatu meski dalam pengambilan suara terbanyak, keputusan amir itu tidak didukung. Veto amir ini sangat dominan.

Syarat menjadi anggota JI tak mudah. Harus mengikuti seleksi terlebih dahulu, lalu semacam dibaiat oleh amir. Anggota juga tak cukup hanya beragama Islam. Tetapi, Islam dengan aliran *salafush shalih*. Setelah masuk menjadi anggota, mereka dikenai kewajiban membela dan melindungi amir, taat aturan, tidak melakukan perbuatan *mudlarat* kepada jamaah dan saling melindungi antarjamaah dalam segala hal, terutama mengenai JI. Mereka juga punya hak mendapatkan kesejahteraan, bimbingan agama, dan perlindungan.

Sumber keuangan mereka untuk mendanai program-programnya diambilkan dari infaq, zakat, dan sodaqoh serta sumber-sumber yang dianggap halal. Sumber lain ini tidak sembarangan, sebab JI hanya mau menerimanya setelah ada ijtihad (diskusi dan perdebatan para ahli apakah diperbolehkan atau tidak). Dana ini dihimpun dan dibuat anggaran tahunan semacam "APBN". Dari "APBN" itulah organisasi ini mendapatkan pembagian dana untuk operasional, yang diatur dalam peraturan atau maklumat. JI juga memiliki peraturan mengenai kerja sama dengan lembaga

luar secara rapi dan teratur. Dakwah ke jamaah di luar JI pun harus dibuat laporannya kepada atasan secara berjenjang. Lembaga DPR (Qiyadah) misalnya, juga memiliki tingkatan mulai pusat (markaziyah), mantiqiyah (wilayah), dan cabang (wakalah). Semua terstruktur dengan baik seperti laiknya sebuah AD/ART partai atau organisasi modern. *Nidhom Asasy* JI ini terdiri atas 15 bab, 43 pasal dan dibuat dalam bahasa Indonesia pada 24 Rajab 1416 atau 17 Desember 1995 di Kuala Lumpur, dalam pengasingan kelompok pecahan Darul Islam atau NII ini.

Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme di Indonesia

Ada banyak upaya yang sudah dan akan terus dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam melawan terorisme. Deradikalisasi adalah salah satunya. Ada banyak konsep dan praktek deradikalisasi yang bisa dilakukan dan sebagian besar telah berhasil mencegah terjadinya tindak pidana kejahatan luar biasa terorisme ini. Upaya defeksi adalah upaya memahami kelompok radikal yang dianggap sebagai salah satu praktek deradikalisasi yang paling efektif. Misalnya dengan mendekati salah satu faksi radikal dan kemudian menyebarkan wacana atau diskursus dekonstruksi ke seluruh anggota untuk men-*discourage* wacana jihad atau perang atau wacana negara Islam.

Di kalangan Muslim Indonesia, diskursus tentang Piagam Madinah dan Negara Madinah, bukan barang asing. Di era Presiden Abdurrahman Wahid saat ini, diskursus tentang Negara Madinah itu kian merebak di kampus-kampus, kalangan gerakan Islam dan aktivis masjid. Tentang Negara

Madinah ini, mungkin, hanya ada satu negara Islam yang paling ideal, yaitu Negara Madinah dengan Piagam Madinah-nya pada masa Rasulullah. Namun, untuk kebanyakan, Negeri Madinah ini hampir-hampir bagaikan "negeri dongeng" meski ada dalam sejarah.

Untuk menghindari "dongengisasi," maka ada baiknya diajukan contoh negara Islam lain di jantung Eropa: Spanyol zaman Islam (*Islamic Spain*). Negeri Muslim dan umat Muslim di Spanyol merupakan salah satu wilayah yang paling jauh dari jantung dunia Islam, tetapi sangat toleran. Bernard Lewis menunjukkan bahwa Islam yang lebih awal itu, ternyata cenderung lebih toleran dibanding Islam yang lebih belakangan. Pada masa Islam awal itu, banyak pergaulan sosial yang berlangsung dengan lancar antara kaum Muslim, Kristen, dan Yahudi. Meskipun menganut agama-agama yang berbeda, mereka membentuk sebuah masyarakat yang tunggal, di mana perkawanan antarpribadi, kemitraan dalam bisnis, hubungan guru-murid dalam kehidupan ilmu pengetahuan, dan bentuk-bentuk lain kegiatan bersama berlangsung normal dan bahkan sangat umum.

Kerja sama kultural ini tampak dalam banyak cara. Orang-orang Islam, Kristen, dan Yahudi hidup dalam suasana penuh peradaban, saling hormat, dan saling mengembangkan ilmu pengetahuan dan seni budaya. Tidak ada sedikit pun diskriminasi. Karena itu, masalah pluralisme adalah masalah bagaimana kaum Muslim mengadaptasikan diri mereka dengan dunia modern. Hal ini pasti akan melibatkan masalah-masalah bagaimana mereka memandang dan menilai sejarah Islam, dan bagaimana mereka melihat dan meni-

lai perubahan dan keharusan membawa masuk nilai-nilai Islam yang normatif dan universal ke dalam dialog dengan realitas ruang dan waktu.

Sejarah kaum Muslim, seperti halnya sejarah komunitas umat manusia manapun, selalu memiliki potensi untuk membuat kesalahan atau berbelok dari jalan yang benar. Selain karena truisme sederhana seperti yang dikatakan penyair Inggris Alexander Pope, yakni bahwa "berbuat salah itu manusiawi," semua sejarah jelas dengan sendirinya adalah sejarah manusia, dan tidak ada seorang manusia biasa pun yang sakral dan suci.

Singkatnya, manusia pada dasarnya baik, tetapi ia juga lemah. Berkaitan dengan kelemahan ini, manusia memiliki potensi untuk mengubah dirinya menjadi seorang tiran, kapan saja ia memandang dirinya serba berkecukupan dan tidak lagi membutuhkan manusia-manusia lain. Terhadap prinsip ini, harus juga ditambahkan ajaran Islam yang sangat terkenal bahwa pada mulanya umat manusia adalah satu dan bahwa semua orang pada dasarnya sederajat. Dalam hal ini, kaum Muslim klasik seperti di Spanyol ini telah berhasil sepenuhnya menginternalisasikan konsepsi mengenai manusia yang positif dan optimistik seperti disebutkan di atas. Sebuah konsepsi yang kemudian menjadikan mereka komunitas yang demikian kosmopolitan dan universal, sehingga mereka bersedia belajar dan menerima segala yang bernilai dari pengalaman-pengalaman komunitas lain.

Demikianlah, peran kaum Muslim yang awal sebagai salah satu di antara beberapa komunitas yang menginternasionalisasi ilmu pengetahuan. Dalam setiap peradaban, orang-orang tertentu meneliti pada alam itu sendiri sebab-sebab

perubahan yang menggejala, bukan pada kemauan manusia atau luar manusia. Meskipun demikian, sebelum orang-orang Arab mewarisi filsafat alam Yunani dan Alkeni Cina, kemudian meneruskannya ke Barat, tidak ada badan tunggal ilmu pengetahuan alam yang diteruskan dari satu peradaban ke peradaban lain.

Sebaliknya, dalam setiap peradaban, penelitian tentang alam mengikuti jalan sendiri-sendiri. Para filsuf Yunani dan Cina memberi penjelasan yang berbeda tentang dunia fisik yang sama. Sebagian besar hasil usaha itu pertama-tama diserap oleh Islam, yang dari tahun 750 M hingga akhir Zaman Tengah terbentang dari Spanyol hingga Turkestan. Orang-orang Arab menyatupadukan badan ilmu pengetahuan yang luas itu dan menambahnya.

Dalam kesepakatan lain, hal senada yang juga dikemukakan demikian: adalah kelebihan orang-orang Arab bahwa, meskipun mereka merupakan para pemenang secara militer dan politik, mereka tidak memandang peradaban negeri-negeri yang mereka taklukkan dengan sikap menghina, bahkan Islam menghormati pluralitas dan menghargai kultur masyarakat yang ada. Sebagai ilustrasi, segera setelah diketemukan, kekayaan kebudayaan Syiria, Persia, dan Hindu mereka salin ke dalam bahasa Arab. Para khalifah, gubernur, dan tokoh-tokoh yang lain menyantuni para sarjana yang melakukan tugas penerjemahan, sehingga kumpulan ilmu bukan-Islam (*non-Islamic learning*) yang luas dapat diperoleh dalam bahasa Arab. Semangat pluralisme dikembangkan dan toleransi ditegakkan dengan kasanah intelektual yang diperkaya.

Dalam konteks Indonesia ketika negara ini berada di bawah Presiden Abdurrahman Wahid, di mana berbagai kemaje-mukan kini mengalami pengeroposan dan kerusuhan mere-bak, dari Ambon, Maluku, Mataram sampai kawasan lain, kita tidak perlu lagi mempersoalkan pluralitas pengikut Kristen, dan Muslim serta Yahudi, tiga agama Ibrahim itu. Yang dibutuhkan adalah *leadership* (kepemimpinan) Gus Dur untuk mengatasi krisis ekonomi, sosial dan politik-ideologis, dengan mendayagunakan pluralitas (kemajemuk-an) itu, jangan sampai pemerintahannya mengalami *break-down of economic, political and social-cultural policy making*, yang justru bisa menimbulkan konflik horisontal pada tingkat menengah ke bawah. Pada aras ini, prinsip dan nilai-nilai Negara Madinah (Piagam Madinah) yang sering diartikulasikan Gus Dur (dan Nurcholish Madjid), semesti-nya dipraksiskan dan disosialisasikan pemerintahan Gus Dur agar salah pengertian dan *phobia* tentang Islam di kalangan non-Muslim bisa diminimalisasikan mudah-mu-dahan apa yang dikemukakan di sini bisa sedikit mereduksi kengerian akan bayangan sistem Negara Madi-nah (Islam) di Indonesia, di mana para tokoh Muslim menjadi pemimpinnya yakni Gus Dur, Amien Rais (Ketua MPR) dan Akbar Tanjung (Ketua DPR). Pada level wacana, Phobia Islam sebaiknya disikapi dengan pemahaman ilmu penge-tahuan, akal budi dan logika. Islam menjamin pluralisme. Bukankah Islam *rahmatan lil alamin*?

Di bawah era Presiden Abdurrahman Wahid, ternyata gagasan ″jalan ketiga″ Anthony Giddens menjadi wacana (*discourse*) memikat di kalangan kaum pro demokrasi, kalangan santri dan aktivis Islam. Politik "jalan ketiga" adalah representasi dari pembaharuan demokrasi sosial.

Politik “jalan ketiga”, demikian Giddens, diperlukan karena masalah-masalah yang berkaitan dengan perbedaan antara garis kiri dan garis kanan dalam politik sudah begitu besar. Saat ini pandangan (mengenai dunia) dari elite kiri yang lama sudah tidak bisa dipakai lagi. Sementara pandangan kanan yang baru juga tidak memadai karena mengandung banyak kontradiksi.

Pandangan politik aliran tengah sendiri juga telah menjadi begitu radikal hingga tidak lagi mampu menampung politik kiri maupun kanan. Diperlukan sebuah wahana baru untuk menampung kiri moderat (hasil pembaruan kanan) dan kiri tengah (hasil pembaruan kiri) agar politik emansipatoris dan keadilan sosial tetap menjadi pusat perhatian. Menanggapi gagasan brilian Giddens dalam konteks masyarakat Barat itu, Profesor Chibli Mallat, ahli politik Lebanon, mengatakan konsepsi ”jalan ketiga” Anthony Giddens sebagai konsepsi politik yang baru. Namun Giddens dinilai telah mengabaikan negara-negara non-Barat, khususnya negara-negara Muslim. Sejak dasawarsa 1970-an dan 1980-an, slogan ”jalan ketiga” Giddens itu sudah berkumandang di negara-negara Muslim. Revolusi Iran-lah yang mencanangkannya dengan menegaskan bahwa ”jalan ketiga” adalah Islam, yang sistem kemasyarakatan bukan model Barat (kanan) atau model Soviet (kiri), tidak Blok Barat maupun Blok Timur (*laa syarqiyah wa laa gharbiyah*).

Profesor Mallat mencatat, dalam sejarah abad ke-XX, ”jalan ketiga” adalah nama lain dari Nazisme Jerman dan Fasisme Italia, yang mencoba memberi alternatif baru terhadap ideologi komunisme (Uni Soviet) dan kapitalisme (AS). Mallat kemudian mengusulkan agar para penganut ”jalan ketiga”

lebih menekankan nilai-nilai peradaban yang mampu menghilangkan berbagai ketimpangan struktural. Dengan menyimak gagasan Giddens dan tanggapan Mallat itu, saya kira, ada baiknya para inteligensia Muslim kini harus mencermati "jalan ketiga" yang kontekstual dengan Indonesia, di mana pluralitas (kemajemukan) sangatlah sarat kompleksitas.

Tentang Islam dalam hubungannya dengan "jalan ketiga" Giddens itu, saya ingin meminjam diskursus Bernard Lewis yang menyatakan bahwa Islam yang lebih awal di era Cordova Spanyol, sangatlah toleran. Saya kira, di Indonesia Islam yang lebih awal itu datang dengan jalan damai melalui perdagangan. Dan sebagaimana di zaman Islam Cordova Spanyol, di Indonesia pun Islam awal ini ternyata cenderung lebih toleran dibanding Islam yang lebih belakangan. Pada masa Islam awal itu, banyak pergaulan sosial yang berlangsung dengan lancar antara kaum Muslim, Kristen, Hindu, Buddha dan Cina. Meskipun menganut agama-agama yang berbeda, mereka membentuk sebuah masyarakat yang beradab, di mana perkawanan antarpribadi, kemitraan dalam bisnis, hubungan guru-murid dalam kehidupan ilmu pengetahuan, dan bentuk-bentuk lain kegiatan bersama berlangsung normal dan bahkan sangat umum.

Kerjasama kultural ini, seperti dicatat Anthony Reid, tampak dalam banyak cara orang-orang Islam, Hindu-Budha dan Kristen menjalankan kehidupan dan kebudayaan. Bahkan di era pergerakan nasional untuk mewujudkan kemerdekaan, kaum pluralis ini berjuang dalam spirit Sumpah Pemuda. Dan sampai era demokrasi parlementer Bung Karno pada 1950-an, kaum Muslim dan non-Muslim itu hidup dalam

suasana penuh peradaban, saling hormat, dan saling mengembangkan ilmu pengetahuan dan seni budaya. Tidak ada sedikit pun diskriminasi, karena pembangunan bangsa dan karakternya (*nation and character building*) berjalan wajar. Karena itu, masalah pluralisme adalah masalah bagaimana kaum Muslim mengadaptasikan diri mereka dengan dunia modern, yang sampai kurun 1950-an itu dijamin oleh konstitusi. Pada kurun waktu itu Islam menghormati pluralitas dan menghargai kultur masyarakat yang ada. Semangat pluralisme dikembangkan dan toleransi ditegakkan dengan kasanah intelektual yang diperkaya.

Akan tetapi, di bawah Orde Baru Soeharto,semua itu mengalami keretakan: *state building* (pembangunan negara) telah melebihi dan menghancurkan nation building (pembangunan bangsa). Negara kian represif dan hegemonik, melibas masyarakat di seluruh etnis, kelas, dan lapisan. Politik belah bambu dan regimentasi Orde Baru Soeharto meluluhlantakkan spirit kebangsaan dan kemanusiaan. Karena itu, para intelektual dan elite Islam harus mencari jalan keluar dari krisis-krisis sosial, ekonomi, politik dan ideologi dewasa ini, agar reformasi tidak mengalami stagnasi, agar bangsa ini tidak mengalami disintegrasi. Giddens menyebut politik "jalan ketiga" dengan menekankan "tak ada hak tanpa tanggung jawab". Di dalam Islam era Rasululah, "tak ada hak tanpa tanggung jawab" itu teraksentuasikan dalam Piagam Madinah, yang menjamin kebebasan, persamaan dan keadilan. Di era Islam Cordova, Spanyol, spirit dan konsepsi "Piagam Madinah" itu kemudian menjadikan mereka komunitas yang pluralistik, kosmopolit dan universal, sehingga mereka bersedia belajar dan menerima segala yang bernilai dari pengalaman-

pengalaman komunitas lain.

Dalam konteks Indonesia era Presiden Abdurrahman Wahid ini, selain sumber non-Islam, maka Islam seyogyanya menjadi sumber inspirasi dan nilai untuk membentuk *good governance* dan supremasi hukum, yang merupakan suatu keharusan. Ini signifikan untuk mewujudkan apa yang disebut Anthony Giddens sebagai politik "jalan ketiga", yang menekankan nilai-nilai peradaban untuk menghapuskan struktur ketimpangan. Tegaknya negara hukum dan terwujudnya *good governance* ini akan melandasi tegaknya demokrasi, politik emansipatoris dan keadilan sosial guna menjamin pluralitas (kemajemukan) yang kini dalam kerawanan.

Sebagai sebuah sistem (politik) yang bersifat partisipatif, yang mengesahkan persamaan hak di antara sesama manusia, maka demokrasi mungkin merupakan struktur "terbaik" yang pernah ada. Dan tidaklah mengherankan jika pengalaman dan eksperimen demokrasi di zaman Yunani kuno itu menjadi model ideal bagi para pemikir dan teoritikus politik di zaman modern ini. Akan tetapi, ada satu konsep lagi yang pantas dijadikan wacana dan didiskusikan idealitasnya bagi Indonesia masa depan, yaitu Negara Madinah. Negara Madinah ini merupakan alternatif dalam menghadapi keganasan kapitalisme di tingkat global, regional dan nasional yang telah menimbulkan dehumanisasi, yang oleh Peter Berger disebut piramida kurban manusia yang amat dahsyat atau disebut Herbert Marcuse telah membikin umat manusia menjadi *one dimentional man*, manusia satu dimensi.

Untuk memulai wacana tentang Negara Madinah ini, yang berbeda hampir 180 derajat dengan Negara atau Masyarakat

Madani, maka perlu ada penjelasan teoritis. Berdasarkan diskursus Prof Dr Muhammad Thahir Azhary, saya melihat umat Islam Indonesia, melalui parti-partai politik Islam, perlu menghidupkan lagi pemikiran Ibnu Khaldun (1332-1406) yang diakui otoritasnya, baik sebagai pemikir tentang negara maupun sebagai ahli sejarah dan peletak dasar sosiologi. Dalam bukunya Ibnu Khaldun menemukan suatu tipologi negara dengan tolok ukur kekuasaan (*al mulk*). Ia membagi negara menjadi dua kelompok yaitu 1) negara dengan ciri kekuasaan alamiah (*mulk tabi'i*) atau negara tradisional, dan 2) negara dengan ciri kekuasaan politik (*mulk siyasi*) atau negara modern.

Tipe negara alamiah ditandai oleh kekuasaan yang sewenang-wenang dan otoriter (despotisme) dan cenderung kepada "hukum rimba." Di sini keunggulan dan kekuatan sangat berperan. Hukum hanya dipakai untuk menjerat leher rakyat yang tertindas, sementara elit penguasa bebas melakukan dosa dan maksiat sesukanya dan prinsip keadil-an diabaikan. Baik keadilan ekonomi maupun keadilan sosial-politik. Ia menyebut negara alamiah seperti ini sebagai negara yang tidak berperadaban (*uncivilized state*). Sementara itu, tipologi negara modern yang berdasarkan kekuasaan politik dibaginya menjadi tiga macam yaitu (1) negara hukum atau nomokrasi Islam (*siyasah diniyah*), (2) negara hukum sekuler (*siyasah 'aqliyah*), dan (3) negara "Republik" ala Plato (*siyasah madaniyah*). Negara Madani yang disebutkan terakhir adalah sebentuk negara sekuler yang dipertahankan oleh para politisi Islam yang bekerja sama bahu-membahu dengan orang-orang sekuler dalam membentuk suatu "negara sekuler" dalam bingkai nasional-isme. Dan itu sah saja.

Negara hukum dalam tipe yang pertama adalah suatu negara yang menjadikan syari'ah (hukum Islam) sebagai fondasinya. Malcolm H. Kerr, sebagaimana dikutip oleh Thahir Azhary, menamakannya dengan istilah nomokrasi Islam (*Islamic nomocracy*). Karakteristik siyasah diniyah atau Negara Hukum berdasarkan Islam menurut Ibnu Khaldun adalah negara yang berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah, serta akal manusia yang turut juga berperan dan berfungsi dalam kehidupan negara. Akal manusia yang dimaksudkan adalah *ijma'* ulama dan *qiyas*. Sehingga Negara Nomokrasi Islam atau Negara Islam adalah Negara Ulama. Waqar Ahmad Husaini mencatat, nomokrasi Islam bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat universal, baik di dunia maupun di akhirat (*al-masalih al-kaffah*). Ahmad Husaini bahkan menggunakan istilah "Negara Syari'ah" untuk siyasah diniyah atau nomokrasi Islam. Hal ini karena hukum di dalam Islam dikenal secara yurisprudensi sebagai syariah.

Menurut Ibnu Khaldun tipe negara yang paling baik dan ideal di antara *siyasah diniyah*, *siyasah 'aqliyah*, dan *siyasah madaniyah* ialah *siyasah diniyah* atau nomokrasi Islam. *Siyasah 'aqliyah* hanya mendasarkan pada hukum sebagai hasil rasio manusia tanpa mengindahkan hukum yang bersumber dari wahyu. Negara semacam ini dapat kita lihat pada negara-negara demokrasi Barat di Eropa maupun Amerika pada umumnya. Pada *siyasah madaniyah* (Republik ala Plato) merupakan suatu negara yang diperintah oleh segelintir golongan elit atas sebagian besar golongan budak yang tidak mempunyai hak pilih. Negara Madani ini bisa kita lihat pada masa Demokrasi Parlementer 1950-an di bawah Soekarno.

Sedangkan *archetype* Negara Madinah terbaik di masa modern adalah konsep siyasah diniyah, yang pernah didirikan dan diproklamasikan oleh Hassan Turabi di Sudan, mendiang Moh Ali Jinnah di Pakistan dan mendiang S.M. Kartosoewirjo di Indonesia. Mereka mencoba meng-idealisasikan Negara Madinah, bukan Negara Madani yang *notabene* adalah Negara Sekuler. Negara Madinah yang dibayangkan Ibnu Khaldun itu, lebih menyukai bentuk nomokrasi Islam atau dalam istilahnya siyasah diniyah sebagai "satu-satunya bentuk tata politik dan kultural yang permanen." Dalam pandangan Muslim, demikian Olivier Roy, Negara Madinah seperti itulah yang menjadi cita-cita ideal mayoritas umat Islam.

Di Indonesia, jika partai-partai politik Islam luput dengan perdebatan tentang hal ini, maka kehadirannya akan kehilangan signifikansi. Dan, lebih dari itu, secara ideologis partai-partai Islam tidak memihak sedikit pun pada Islam jika tidak mengemukakan konsep Negara Madinah ini dan implementasinya di Indonesia. Saya yakin, tidak ada seo-rang tokoh partai politik Islam pun yang pernah mem-perdebatkan tentang konsep Negara Madinah dan Negara Madani (sekuler) ini sebelumnya. Karena dari banyak per-nyataan-pernyataan mereka, mengindikasikan bahwa mere-ka tidak punya wawasan sedikit pun tentang sistem kene-garaan. Kalau aspirasi dan suara umat diserahkan pada orang-orang yang seperti tokoh-tokoh partai politik Islam sekarang ini, maka itu artinya sama dengan menyerahkan jiwa-raga rakyat kepada politisi berjiwa singa dan buaya. Maka, tidaklah berlebihan, —dengan menggunakan konsep teoritis Samuel Huntington, *the clash of civilization* (perben-turan atau pertarungan peradaban) antara peradaban

"madani" dan peradaban "madinah"— jika sekarang ini kita sebut sebagai pertarungan ideologis antara konsep ideologi negara sekuler dan negara agama (Islam), antara partai-partai politik Islam dan partai-partai politik sekuler.

Pada hemat saya, berdasarkan teori nomokrasi Islam (*islamische rechstaat*) dari Ibnu Khaldun tentang *siyasah diniyah* yang merupakan tipe ideal dari mulk siyasi, maka perdebatan tentang Negara Madinah itu kini ditunggu publik politik. Namun, untuk membawa wacana Negara Madinah ini ke ruang publik guna diperdebatkan secara terbuka dan *fair* di era KH Abdurrahman Wahid dulu hingga kini, ternyata sulit dan tergantung pada situasi, sejarah dan realitas obyektif yang mengitarinya. Aceh dapat menjadi sebuah titik tolak untuk eksperimen Negara Islam dalam konteks mikro.

Dalam sebuah surat di tahun 1953, seorang pengamat politik, Boyd R. Compton, menuliskan sesuatu yang tak terduga tentang Aceh: *"Sungguhkah keadaan Aceh rawan pada saat ini? Daud Beureueh menandaskan, desas-desus tentang ketidakpuasan yang pecah di Aceh itu, dihembuskan oleh kaum feodal yang kehilangan kekuasaan selama revolusi."*

"Selain itu, adalah ngawur pikiran bahwa Daud Beureueh mau menerima posisi rendahan di bawah Kartosuwirjo Darul Islam. Sulit pula dibayangkan para tokoh kuat PUSA menyingkir ke pegunungan untuk melancarkan kampanye gerilya gelap melawan pemerintah. Posisi runding mereka dalam berhadapan langsung dengan pemerintah pusat sekarang ini cukup kuat untuk menegaskan keinginan-keinginan secara damai. Namun, tentu saja, tidak ada kepastian bahwa pimpinan PUSA berpikir demikian."

Boyd R Compton selanjutnya memprediksikan bahwa, *"Saya menyatakan, kedamaian dan ketenangan di Aceh agaknya lebih bersifat tak nyaman ketimbang memperlihatkan kegelisahan terbuka. Saya memperoleh kesan umum dari kunjungan singkat ini, bahwa Daud Beureueh dan tokoh-tokoh PUSA memegang kontrol kuat atas pengikut mereka; ketenteraman di Aceh mungkin sekadar menunjukkan bahwa umat Islam Aceh mentaati perintah para pemimpin mereka dan menunggu semacam perkembangan lebih lanjut. Seandainya benar demikian, alternatif-alternatif di Aceh agaknya adalah perdamaian yang terus berlanjut, atau jihad suci menegakkan Negara Islam besar-besaran dan terkoordinasi di masa datang yang cukup jauh."*

Laporan di atas menggambarkan sebuah keadaan Aceh di masa lalu dalam periode yang sedang berubah. Mungkin tidaklah terlalu jauh berbeda jika sekarang gambaran yang sama akan muncul kembali. Untuk menelusuri akar perdebatan konsep negara madani atau masyarakat madani dan negara madinah, maka kita perlu memahami adanya pembelahan kaum intelektual yang menjadi "sumur watershed" sumber berbagai inspirasi. Di samping kelompok kaum cendekiawan yang merupakan sumber dari pemikiran politik dalam masa kini, ada suatu kelompok penting lain yang terdiri atas orang-orang yang terikat pada partai-partai politik.

Dengan pesatnya perubahan masyarakat serta nilai-nilai sosial, banyak sekali orang, terutama kaum muda yang telah mendapat pendidikan modern, mencari jawaban berdasarkan ideologi berupa kepercayaan-kepercayaan baru, alasan-alasan kuat guna menjawab tantangan-tantangan yang diajukan oleh kepercayaan-kepercayaan yang mereka warisi dari keluarga serta kelompok-kelompok mereka. Dan dalam

periode ini, mereka dapat menjumpainya dalam partai-partai politik. Maka persaingan antara partai-partai tersebut merupakan pertarungan ideologis sistem-sistem gagasan. Namun, persaingan sebenarnya terdapat dalam lapangan pertempuran di gunung-gunung yang dilakukan para pejuang, kaum mujahidin dan sebagainya. Kalau di Aceh, lapangan perjuangan ini dinamakan sebagai *glee* (hutan rimba); dan orang-orang-orang yang melakukan perjuangan ini dinamakan *ureung glee* (orang yang bergerilya di hutan) atau *ureung ateuh* (kaum gerilyawan).

Pertempuran di gunung-gemunung itu hampir tak menyiratkan konsep wacana ideologi apa yang mereka perjuangkan. Mungkin sekadar mensimplifikasi persoalan, maka konsep negara yang mereka perjuangkan adalah sesuatu yang jauh berbeda atau berlawanan dengan konsep yang selama ini dijalankan oleh Republik Indonesia. Maka, dengan segala keterbatasan itu pula kami mencoba melihatnya dengan wacana konsep Negara Islam atau Negara Madinah dan wacana konsep Negara Sekuler atau Negara Madani.

Untuk memulai wacana tentang Negara Madinah ini, yang berbeda hampir 180 derajat dengan Negara atau Masyarakat Madani, maka perlu ada sedikit penjelasan teoritis tentang hal ini. Berdasarkan disertasi Prof Dr Muhmmad Thahir Azhary, saya melihat umat Islam Indonesia, melalui partai-partai politik Islam, perlu menghidupkan lagi pemikiran Ibnu Khaldun (1332-1406) yang diakui otoritasnya, baik sebagai pemikir tentang negara maupun sebagai ahli sejarah dan peletak dasar sosiologi. Dalam bukunya Ibnu Khaldun menemukan suatu tipologi negara dengan tolok ukur

kekuasaan (*al-mulk*). Ia membagi negara menjadi dua kelompok yaitu 1) negara dengan ciri kekuasaan alamiah (*mulk tabi'i*) atau negara tradisional, dan 2) negara dengan ciri kekuasaan politik (*mulk siyasi*) atau negara modern.

Tipe negara alamiah ditandai oleh kekuasaan yang sewenang-wenang dan otoriter (despotisme) dan cenderung kepada "hukum rimba." Di sini keunggulan dan kekuatan sangat berperan. Hukum hanya dipakai untuk menjerat leher rakyat yang tertindas, sementara elit penguasa bebas melakukan dosa dan maksiat sesukanya dan prinsip keadilan diabaikan. Baik keadilan ekonomi maupun keadilan sosial-politik. Ia menyebut negara alamiah seperti ini sebagai negara yang tidak berperadaban (*uncivilized state*).

Sementara itu, tipologi negara modern yang berdasarkan kekuasaan politik dibaginya menjadi tiga macam yaitu (1) negara hukum atau nomokrasi Islam (*siyasah diniyah*), (2) negara hukum sekuler (*siyasah 'aqliyah*), dan (3) negara "Republik" ala Plato (*siyasah madaniyah*). Negara Madani yang disebutkan terakhir adalah sebentuk negara sekuler yang dipertahankan oleh orang-orang Islam yang bekerja sama bahu-membahu dengan orang-orang kafir dalam membentuk suatu "negara musyrik."

Negara hukum dalam tipe yang pertama adalah suatu negara yang menjadikan syari'ah (hukum Islam) sebagai fondasinya. Malcolm H. Kerr, sebagaimana dikutip oleh Thahir Azhary, menamakannya dengan istilah nomokrasi Islam (*Islamic nomocracy*). Karakteristik *siyasah diniyah* atau Negara Hukum berdasarkan Islam menurut Ibnu Khaldun adalah negara yang berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah, serta akal manusia yang turut juga berperan dan berfungsi

dalam kehidupan negara. Akal manusia yang dimaksudkan adalah *ijma'* ulama dan *qiyas*. Sehingga Negara Nomokrasi Islam atau Negara Islam adalah Negara Ulama. Waqar Ahmad Husaini mencatat, nomokrasi Islam bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat universal, baik di dunia maupun di akhirat (*al-masalih al-kaffah*). Husaini bahkan menggunakan istilah "Negara Syari'ah" untuk *siyasah diniyah* atau nomokrasi Islam. Hal ini karena hukum di dalam Islam dikenal secara yurisprudensi sebagai syariah.

Menurut Ibnu Khaldun tipe negara yang paling baik dan ideal di antara *siyasah diniyah, siyasah 'aqliyah*, dan *siyasah madaniyah* ialah *siyasah diniyah* atau nomokrasi Islam. *Siyasah 'aqliyah* hanya mendasarkan pada hukum sebagai hasil rasio manusia tanpa mengindahkan hukum yang bersumber dari wahyu. Negara semacam ini dapat kita lihat pada negara-negara demokrasi Barat di Eropa maupun Amerika pada umumnya. Pada *siyasah madaniyah* (Republik ala Plato) merupakan suatu negara yang diperintah oleh segelintir golongan elit atas sebagian besar golongan budak yang tidak mempunyai hak pilih. Negara Madani ini bisa kita lihat pada masa Demokrasi Terpimpin di bawah Soekarno (1959-1965). Sedangkan *archetype* Negara Islam terbaik adalah konsep *siyasah diniyah*. Yang pernah didirikan dan diprokla-masikan oleh S.M. Kartosoewirjo adalah nomokrasi Islam berdasarkan konsepsi *siyasah diniyah* ini. Negara Diniyah inilah yang dicoba pertahankan oleh para pejuang dan syuhada Islam Indonesia di masa lalu, bukan Negara Madani yang *notabene* adalah Negara Sekuler atau dalam sebutan yang lebih emosional adalah Negara Syaitan. Dari ketiga tipe negara yang termasuk ke dalam bentuk *mulk siyasi* itu, maka secara teoritis Ibnu Khaldun lebih menyukai

bentuk nomokrasi Islam atau dalam istilahnya *siyasah diniyah* sebagai "satu-satunya bentuk tata politik dan kultural yang permanen."

Negara Islam seperti itulah yang menjadi cita-cita ideal seluruh umat manusia. Berdasarkan kerangka teoritis nomokrasi Islam (*rechstaat*) dari Ibnu Khaldun tentang *siyasah diniyah* yang merupakan tipe ideal dari mulk siyasi, maka perdebatan tentang Negara Islam sudah waktunya untuk dibuka kembali. Jika partai-partai politik Islam luput dengan perdebatan tentang hal ini, maka kehadirannya akan kehilangan signifikansi. Dan, lebih dari itu, secara ideologis partai-partai Islam tidak memihak sedikit pun pada Islam jika tidak mengemukakan konsep Negara Madinah ini dan implementasinya di Indonesia. Saya yakin, tidak ada seorang tokoh partai politik Islam pun yang pernah mendengar tentang konsep *Negara Diniyah* atau Negara Madinah atau konsep Negara Madani ini sebelumnya. Karena dari banyak pernyataan-pernyataan mereka, mengindikasikan bahwa mereka tidak punya wawasan sedikit pun tentang sistem kenegaraan. Kalau aspirasi dan suara umat diserahkan pada orang-orang yang seperti tokoh-tokoh partai politik Islam sekarang ini, maka itu artinya sama dengan menyerahkan jiwa-raga kepada singa dan buaya. Maka, tidaklah berlebihan, —dengan menggunakan konsep teoritis Samuel Huntington, *the clash of civilization* (perbenturan atau pertarungan peradaban) antara peradaban "madani" dan peradaban "madinah"— jika sekarang ini kita sebut sebagai pertarungan ideologis antara konsep ideologi negara sekuler dan negara Islam, antara partai-partai politik Islam dan partai-partai politik sekuler, antara partai politik dan front pembebasan atau *seccesionist movement*.

Tentu saja uraian ringkas ini belum memberikan bekas yang mendalam bagi pergulatan pemikiran politik umat manusia. Sebagai sebuah sistem (politik) yang bersifat partisipatif, yang mengesahkan persamaan hak di antara sesama manusia, maka demokrasi mungkin merupakan struktur "terbaik" yang pernah ada. Dan tidaklah mengherankan jika pengalaman dan eksperimen demokrasi di zaman Yunani kuno itu menjadi model ideal bagi para pemikir dan teoritikus politik di zaman modern ini. Padahal ada satu konsep lagi yang pantas dibahas idealitasnya bagi Indonesia masa depan, yaitu Negara Madinah.

Di Indonesia, akibat tragedi Bom Bali I dan Bom Bali 2, Bom Kuningan dan Bom Hotel Marriot Jakarta, dan lain-lain, pemerintah Indonesia telah melakukan *support to anti-terrorism* dengan membatasi kebebasan bagi masing-masing pemeluk agama tertentu dalam mengimplementasikan dan mengembangkan ajaran agamanya, termasuk fundamentalisme beragama. Pemerintah mengintervensi pesantren dan memaksakan diskusi tentang jihad yang sesuai dengan pembangunan serta rencana sidik jari para santri. Terorisme yang secara sederhana dikaitkan dengan persoalan fundamentalisme agama, adalah suatu *beraucratic common-error.* Padahal terorisme merupakan produk dari ketidakadilan dan kejahatan dalam skala global yang langsung maupun tidak telah dipicu oleh kekuatan negara besar yang menabur neo-hegemonisme dan neo-kolonialisme terhadap negara-negara kecil. Seperti kasus Perang Irak, AS justru telah melakukan tindakan apa yang populer disebut *state terrorism* yang dipercaya kaum radikal agama sebagai penyebab munculnya aksi teror dengan dalih pembalasan terhadap apa yang dilakukan oleh AS dan sekutunya.

Tindakan pembalasan terhadap AS bersama sekutunya tidak saja dilakukan di Irak, kelompok teroris pun menyerang Indonesia. Terbukti setelah adanya penawaran rekonsiliasi damai dari Osama Bin Laden, aksi teroris kembali mewarnai tanah air dengan meletusnya Bom Kuningan. Menyusul Bom Bali II yang meninggalkan kesan doktrin-doktrin terorisme sulit dihilangkan, kelompok teroris mulai diperhitungkan sebagai momok, sebagai virus ganas dan monster yang menakutkan bagi warga sipil dan turis-turis asing, dengan aksi-aksi bom syahid secara beruntun dari tahun ke tahun. Sedangkan, upaya untuk mengenali dan menghancurkan terorisme yang dikampanyekan serta disponsori oleh Amerika Serikat dan sekutunya hanya akan terus melanggengkan kondisi dan nuansa *co-existence with terrorism* tanpa akhir.

Aksi–aksi terorisme yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia telah memberikan kesan bahwa Indonesia *battlefield* antara doktrin Bush dan doktrin Osama Bin Laden. Kondisi demikian jelas tidak dapat dipertahankan secara berlanjut karena hal tersebut tidak menawarkan apapun kecuali suasana penderitaan dan rasa sedih bagi warga sipil. Sementara di pihak rakyat, apa salahnya mengakui bahwa warga sipil di Indonesia —yang telah menjadi korban dan terperangkap dalam genderang perang antara pihak teroris dengan Amerika Serikat dan sekutunya— untuk menuntut suatu *peace treaty negotiation* untuk berdamai dengan teroris. Jika fatwa Osama Bin Laden —yang juga menjadi acuan kaum teroris di Indonesia— disambut pemerintah RI bukan tidak mungkin Indonesia menjadi "medan damai" di antara keduanya sebagaimana yang telah terjadi di Spanyol.

Jika perdamaian bukan opsi uantuk mengatasi situasi semakin mengguritanya radikalisme agama di Indonesia, maka jalan lain adalah penggunaan cara-cara koersi dan represi dengan menggunakan hukum. Cara lain untuk mengatasi terorisme dan radikalisme serta fundamentalisme di Indonesia adalah dengan mamakai cara-cara akademis seperti menggunakan metode *counter-insurgency research* dalam merekrut dan mendayagunakan potensi kritis mereka untuk kemudian mengajak mereka melihat cermin diri sendiri atas pengaruh dan diskusi tentang berbagai aspek dari terorisme, radikalisme dan fundamentalisme di Indonesia sekarang. *Counter insurgency research* ini bisa merupakan pengembangan dari metode Christian Snouck Hurgronje dan WF Wertheim. Kalangan lain, seperti pers dan media juga punya kompetensi untuk mempraktekkan metode *counter insurgency research* ini yang pada pokoknya berusaha mempraktekkan teori sosiologi "looking glass self" dari Charles Horton Cooley. Konsep yang diperkenalkan oleh sosiolog Amerika Charles Horton Cooley pada 1902 ini menekankan bahwa keberadaan seseorang berkembang berdasarkan interaksi dan persepsi orang lain. Seorang radikal atau teroris bertumbuh menurut apa yang orang lain —khususnya orang-orang terdekat, orang-orang kepercayaan— persepsikan mengenai dirinya. Kalau orang lain berpikir dia hebat, maka begitulah jadinya. Sebaliknya, seseorang juga cenderung percaya pada persepsi orang yang mengatakan bahwa ia bodoh, maka demikianlah ia adanya. Konsep ini disebut "looking glass" karena diri seseorang, merupakan pencerminan dari penilaian orang lain, tak ubahnya cermin diri yang kita lihat dalam gelas.[*]

REFERENSI:

Armstrong, Karen, “The True, Peaceful Face Of Islam”, *Time*, October 1, 2001 Vol. 158 No. 15.

Armstrong, Karen, *A History of God, The 4000-Year Quest of Judaism, Christianity and Islam*, (New York: Random House, 1996).

Armstrong, Karen,, *Islam: A Short History* (New York: Modern library, 2000).

Armstrong, Karen,, *Muhammad: A Biography Of The Prophet* (2000).

Armstrong, Karen, *The Battle for God,* (New York: Ballantine Books, 2001).

Aziz, Abdul; Tholkhah, Imam & Soetarman, *Gerakan Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991).

Chomsky, Noam, “On the US attacks”, www.zmag.org.

Dengel, Hold Harald, *Kartosuwiryo dan Darul Islam*, (trans.), (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999).

E. Marty & Appleby, R. Scott (eds), *Fundamentalisms Observed*, (Chicago: University of Chicago Press, 1991).

Harsono, Andreas, “Democracy will keep Indonesia 'friendly'”, *The Nation*, January 22, 2002.

Hoffman, Bruce, *Inside Terrorism* (New York: Columbia University Press, 1998).

Liddle, R. William, ”Islam and Politics in Late New Order Indonesia,” unpublished paper presented at the Conference on Religion and Society in the Modern World: Islam in Southeast Asia, Jakarta, 29-31 May 1995, organised by the Indonesian Institute of Science (LIPI), American-Indonesian Exchange Foundation (AMINEF) and IAIN Syarif Hidayatullah, *Conference on*

Religion and Society in the Modern World, Jakarta.

Murdoch, Lindsay, "Bin Laden 'Funded Christian-haters," *Sydney Morning Herald*, 28 September 2001.

P. Scmid, Alex & Jongman, A.J., *Political Terrorism*: *A New Guide to Actors, Authors, Concepts, Data Bases, Theories, and Literature* (USA: Transaction Publisher, 2005), 2nd Edition.

Tim Redaksi Hot Copy, *Osama Bin Laden: Teroris atau Mujahid*, (terj.), (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001).

Van Bruinessen, Martin, "Gerakan Sempalan di Kalangan Umat Islam Indonesia: Latar Belakang Sosial-Budaya" [Splinter Movements within the Indonesian Muslim Community], *Jurnal Ulumul Qur'an* (Jakarta), 3, 1, 1992.

White, Jonathan R., *Terrorism: An Introduction* (Wadsworth Publishing, 1991).

Yusuf, Nova Riyanti, "Delusion of grandeur", *Gatra*, 18 Oktober 2003.

_______________, *The Economist,* December 21, 1996.

_______________, *Nida'ul Islam*, February - March 1997.

_______________, "Tabel Motif & Tujuan Peledakan Bom Bali 12 Oktober 2002," Dokumen Polri, 2003.

_______________, "Transkrip Dialog Para Ulama dan Tokoh Masyarakat Se-Jateng dengan Tersangka Pelaku Terror Kelompok Jamaah Islamiyah (JI)," Bahan Kepolisian Negara RI, 25 September 2003.

GEOPOLITIK ISLAM VIS-À-VIS BARAT: FUNDAMENTALISME DAN TERORISME DI ABAD KAPITALISME [1]

Pendahuluan

Jelang kunjungan Presiden AS George Bush ke Jakarta, kita dikejutkan dengan Bom Kramat Jati Jakarta (Sabtu, 11/11/2006) yang berkekuatan rendah. Bom itu hanyalah sinyal awal (*a preliminary signal*) dari kaum Islam radikal atau Islam militan yang menentang kunjungan Presiden AS George Bush ke Indonesia. Gelombang massa Islam yang menentang Bush sudah bisa dibaca sebagai teks "Islam mainstream" di Indonesia yang menunjukkan betapa kuat-nya resistensi Islam politik terhadap kehadiran pemimpin AS itu.

Reaksi Islamis itu sekaligus mengindikasikan bahwa proyek membangun Islam yang moderat, toleran dan beradab

[1] Risalah ini ditulis oleh Herdi Sahrasad bersama Ismail Fahmi Panimbang, seorang aktivis LSM di Hong Kong dan peneliti independen, alumnus STF Driyarkara Jakarta dan MA bidang Sosiologi dari Universitas Seoul, Korea Selatan.

masih jauh dari capaian. Keislaman dan keindonesiaan akan terus bergumul dalam hubungannya dengan kekuatan AS/ Barat yang dominan.

Apa yang sudah dilakukan oleh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Paramadina, ICMI dan kalangan Islam moderat lainnya dengan pelbagai program "pencerahan dan pemberdayaan" masih jauh dari kesuksesan dan merupakan proyek jangka panjang ke masa depan. Sebagaimana Bush yang bermuka *janus* dan telah melakukan "terorisme negara"' ke Irak dan Afghanistan, reaksi Islam di Indonesia pun bermuka dua: antara yang menolak dan menerimanya sebagai tamu negara.

Dalam hubungannya dengan Dunia Islam, Bush hendaknya menyadari bahwa kebijakan AS di arena global di mana AS menempatkan diri sebagai "polisi dunia" dan satu-satunya adidaya yang "serba kuasa," telah menuai resistensi masyarakat global.

Dalam kasus Irak, "memori kolektif" masyarakat Indonesia belum lupa bahwa AS bahkan telah menantang Dewan Keamanan PBB dengan menginvasi Irak. Amerika juga menolak apapun upaya dunia internasional untuk mengirim pasukan perdamaian dunia di Irak di bawah bendera PBB. AS juga menolak apapun usulan intervensi PBB dalam urusan Irak di masa transisi sampai terwujud Pemilu. Hasilnya, dalam pergaulan dunia, Amerika masih terisolasi dengan situasi Irak yang kian eksplosif.

Isolisasi Amerika adalah konsekuensi dari kebijakannya menerapkan perang universal terhadap terorisme. Kebijakan Amerika ini muncul dari arogansi Bush memegang definisinya sendiri tentang terorisme, dengan standar ganda yang

memicu kemarahan Islam radikal atau Islam militan- meminjam bahasa Samuel P. Huntington.

Akibatnya, di mata Dunia Islam, termasuk Indonesia, Amerika selalu dipandang hegemonik-imperialistik dan ingin menciptakan bangsa-bangsa lain, termasuk Dunia Islam, agar meniru dan menjadi Amerika yang lain.[2] Dalam hal ini, Ali Shariati menyatakan bahwa ternyata proyek Amerikanisasi itu gagal karena di mana-mana Amerika justru melakukan dehumanisasi: membunuh orang Irak, orang Afghanistan, orang Arab, orang Iran, orang Afrika dan seterusnya. Almarhum Ali Shariati mengatakan bahwa kita tidak boleh tergoda untuk sekedar mengejar abad 20 atau sesudahnya dalam impian dan citra Amerika. ″Kita harus melawan status quo, kejumudan dan hegemoni yang diciptakan oleh Amerika,″ kata Ali Shariati, sang cendekiawan Muslim dari Iran yang humanis.

Persepsi Bush tentang Islam

Seperti diketahui, pandangan akademisi Harvard University, Samuel P. Huntington, selain Bernard Lewis, amat mempengaruhi persepsi Bush tentang Islam. Huntington mendukung dilakukannya *preemptive strike* AS terhadap kaum Islam militan. Nasihat Huntington telah membentuk pola pikir ″bahaya Islam″ atau ″ancaman Islam″ dalam diri Bush, dan kemudian di-diseminasi dan disosialisasi oleh pemerintah AS/Barat sedemikian rupa. Pada awal Juni 2002, doktrin *preemptive strike* (serangan dini) dan *defensive intervention* (intervensi defensif) secara resmi diumumkan.

[2] Dr Ali Shariati, *Man and Islam*, University of Mashad,1982

Melalui doktrin ofensif itu, AS telah mengubah secara radikal pola ″peperangan″ melawan ″musuh″. Jika sebelumnya di masa Perang Dingin, tatkala menghadapi blok komunis, AS menggunakan pola *containtment* (penangkalan) dan *deterrence* (penangkisan), dalam menghadapi musuh baru yakni ″Islam militan″ itu, Gedung Putih menggunakan pola *preemptive strike* dan *defensive intervention*. Dengan doktrin itu, AS dapat melakukan berbagai serangan ke sasaran langsung, meskipun tanpa melalui persetujuan PBB. Pola pikir Huntington, bahwa ″Islam″ lebih berbahaya dari ″komunis″ juga tampak mewarnai kebijakan politik dan militer AS di bawah Presiden Bush tersebut.

Huntington mendukung dan membenarkan kebijakan Bush yang membabi buta mendukung kekejaman Israel atas Palestina, yang menjadi satu sebab penting tumbuhnya kekecewaan dan kemarahan kaum Muslim dan umat manusia di mana-mana. Huntington selalu meyakinkan Bush bahwa Islam adalah potensi musuh besar dan bahaya bagi Barat dan AS.

Jika Edward Said, Noam Chomsky, dan William Blum tanpa ragu-ragu menjuluki AS sebagai *a leading terrorist state*, atau *a rogue state,* sementara almarhum Daniel S. Lev (mahaguru emeritus University of Washington) mengatakan AS dipimpin setan dan dibimbing kebijakan setan ketika menyerang Irak dan Aghanistan, justru Huntington menyatakan retorika perang ideologi AS dengan komunisme telah ditransformasikan menjadi perang terhadap Islam militan, *″The rhetoric of America's ideological war with militant commu-nism has been transferred to its religious and cultural war with militant Islam*.″

Huntington bahkan lebih jauh mengungkapkan bahwa masyarakat Amerika melihat kelompok Islam fundamentalis dan Islam politik di Irak, Iran, Sudan, Libya, Afghanistan di bawah Taliban dan negeri Muslim lainnya serta kelompok teroris Islam seperti Hamas, Hizbullah, Jihad Islam dan jaringan al-Qaeda sebagai bahaya, dan perang AS terhadap Islam militan menjadikan kaum militan sebagai musuh pertama AS pada abad ke-21 ini:

> *"Some Americans came to see Islamic fundamentalist groups, or more broadly political Islam, as the enemy, epitomized in Iraq, Iran, Sudan, Libya, Afghanistan under Taliban, and to lesser degree other Muslim states, as well as in Islamic terrorist groups such as Hamas, Hezbollah, Islamic Jihad, and the al-Qaeda network. The cultural gap between Islam and America's Christianity and Anglo-Protestanism reinforces Islam's enemy qualifications. And on September 11, 2001, Osama bin Laden ended America's search. The attacks on New York and Washington followed by the wars with Afghanistan and Iraq and more diffuse war on terrorism make militant Islam America's first enemy of the twenty-first century."* [3]

Persepsi dan perspektif akademisi Huntington mengenai Islam militan itu sangat mempengaruhi persepsi dan perspektif Bush yang paranoid pasca serangan WTC. Di tengah ketakutan Bush dan kecurigaannya terhadap Islam militan, kunjungan Presiden AS itu ke Indonesia sudah mengundang reaksi umat Islam dan aneka resistensi politik lainnya, termasuk bom Kramat Jati yang telah mencoreng wajah Islam Indonesia.

---

[3] Lihat, Samuel P Huntington, *Who Are We?: The Challenges to America's National Identity* (New York: Simon & Schuster, 2004).

Namun demikian, sebagai pantulan dari refleksi Islam, Indonesia di era SBY-Kalla bisa menggunakan *soft power*-nya – meminjam frase Joseph Nye - untuk meyakinkan Bush agar menghentikan invasi AS ke Irak dan Afghanistan serta intervensinya ke Palestina untuk meredakan ketegangan dunia, konflik regional dan konflik global. Demikian pula sebaliknya, Bush sebaiknya mendayagunakan *soft power*-nya untuk menciptakan perdamaian di Dunia Islam. Bush memiliki begitu banyak *soft power* seperti bantuan ekonomi, pendidikan, aneka seni dan pertukaran budaya. Dan *soft power* Indonesia maupun Amerika untuk itu senantiasa ada dan terbuka. Dengan cara demikian, antara AS dan Islam akan terbuka *mutual undersanding and trust building.* Namun kesemuanya terpulang kepada kebijakan AS dan keputuan moral para pemimpinnya, terutama Bush sendiri, dan itu jelas di luar jangkauan Indonesia dan Dunia Islam pada umumnya.

Fundamentalisme dan Terorisme

Media Internasional seperti *BBC London, NHK Tokyo, The New York Book Review, dan CNN* sering memberitakan gerakan Islamisme sebagai fundamentalisme Islam. Komentar miring dari Olivier Roy (*The Failure of Political Islam,* 1994) dan intelektual Barat terhadap gerakan Islam yang disebutnya sebagai fundamentalis-radikal secara empirik disebabkan oleh berbagai aksi kekerasan yang dilancarkan umat Islam, terutama di Timur Tengah; Iran, Sudan, Irak, Lebanon, Somalia, Afghanistan, Libya, dan lain sebagainya. Olivier Roy kadang menyebutnya neo-fundamentalisme Islam, yang secara ideologi bersifat konservatif, tetapi secara

politik bersifat radikal, anti-Barat dan menginginkan terbentuknya negara Islam.

Sementara itu Edward W. Said (*Covering Islam,1998)* telah mencatat insiden kekacauan yang dilakukan umat Islam telah membuat Barat melakukan stigmatisasi atas Islam. Insiden itu di antaranya:

(1) Sejak 1983 di Lebanon, sekitar 240 marinir Amerika Serikat gugur dalam sebuah ledakan bom yang diduga dilakukan oleh kelompok Islam radikal dan aksi peledakan bom bunuh diri oleh seorang Muslim di Kedutaan BesarAmerika Serikat di Beirut.

(2) Tahun 1980-an, sejumlah warga negara Amerika disandera oleh kelompok Syi'ah di Lebanon dan ditawan dalam jangka waktu yang lama.

(3) Pembajakan penerbangan TWA di Beirut 14-30 Juni 1985 dan beberapa kekejaman bom di Prancis yang kira-kira terjadi bersamaan.

(4) Peledakan penerbangan Pan Am nomor 109 di atas Lockerbie, Skotlandia (1988).

(5) Aksi pemboman World Trade Center (WTC) tahun 1993, yang diyakini dilakukan oleh Syekh Omar Abdul Rahman.

(6) Fatwa Imam Khomeini terhadap Salman Rushdi (14 Pebruari 1989) dan iming-iming hadiah Miliaran dolar bagi pembunuhnya.

(7) Juga aksi bom bunuh diri warga Palestina terhadap pemukiman Yahudi-Israel serta penyanderaan warga Barat di Mindanao, Philipina yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf.

(8) Pembunuhan pejabat pemerintah, intelektual, dan jurnalis di Mesir dan Algeria; penyanderaan, pembajakan penyerangan kepada Kristen Koptik dan para turis di Mesir oleh Jamaah al-Islamiyyah. Aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Islam, seperti Hizbullah, Jihad, dan Jundullah membuat *image* Islam sebagai agama yang irasional, fanatik dan gemar melakukan kekerasan.[4]

Dengan didukung oleh aksi-aksi kekerasan seperti ini, ditambah dengan serangan teroris terhadap WTC 11 September 2001, menjadikan para intelektual Barat sangat yakin bahwa Islam adalah agama radikal yang menebar kekerasan.

Dalam hal ini, studi AE Priyono dan Kamai Zhada mengenai Islam radikal di Indonesia mengungkapkan bahwa ketertarikan umat Islam terhadap gerakan-gerakan yang sifatnya radikal, mendapatan inspirasi dari Timur Tengah, dan sesungguhnya disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama,* doktrin agama yang sangat kaku dengan seruan kembali ke masa klasik Islam secara *kaffah.* Pandangan ini menunjukkan sikap literal mereka dalam memahami teks-teks agama sehingga harus sesuai atau sama dengan perilaku Nabi SAW. Padahal, Islam adalah agama kontekstual, yang sesuai dengan perubahan zaman. Pada gilirannya, mereka frustasi terhadap perubahan dunia yang begitu cepat, sementara respons Islam sangat terlambat dan ketinggalan dibandingkan dengan masyarakat Barat-sekuler. Tak heran, jika konsep-konsep modern, seperti sekularisasi, demokrasi, dan

---

[4]. Lihat, John L. Esposito, *Political Islam, Revolution, Radicalism, or Reform* (Lynne Rienner Pub, 1997)

HAM sebagai produk Barat, mereka tolak secara radikal. Proses radikalisasi ini disebabkan oleh doktrin agama yang dipahami secara literal dan kaku, sehingga sulit menemukan relasinya dengan dunia modern. *Kedua,* penguasa yang meminggirkan Islam justru mempersubur radikalisme. Dua rezim yang dialami umat Islam; rezim Soekarno dan Soeharto, telah menunjukkan kebijakan politik yang merugikan bagi umat Islam. Tidak diakomodirnya Islam sebagai dasar negara sejak 1957 (era Soekarno) telah melahirkan gerakan radikalisme yang berlebihan. Gerakan Darul Islam adalah bukti radikalisasi Islam di Indonesia.

Di era Soeharto, proyek depolitisasi Islam rezim Orde Baru berhasil menekan Islam politik di pentas nasional; seperti larangan rehabilitasi Masyumi, Fusi Partai (1973) yang dilakukan untuk memecah belah kekuatan politik Islam, dan penerapan asas tunggal Pancasila yang dipaksakan kepada semua partai politik dan ormas, yang mengecewakan umat Islam. Kesemuanya ini membuat umat Islam frustasi dan melakukan gerakan pembangkangan kepada rezim penguasa. Bahkan, sikap keras penguasa yang ditunjukkan kepada Islam sebagai "ekstrem kanan" telah membangkitkan sikap radikalisme di dalam komunitas Islam.

Ketiga, masyarakat yang mengalami sekularisasi, dekadensi moral dan krisis kepemimpinan memantapkan keyakinat umat secara sepihak bahwa solusinya adalah Islam. Korupsi-Kolusi-nepotisme (KKN), pergaulan bebas, free sex, aborsi, kenakalan remaja, lemahnya supremasi hukum dan semakin tidak bermoralnya para penguasa, telah memberikan keyakinan bahwa sekularisasi telah gagal menjadi bagian dari kehidupan bangsa. Karena itulah, Islam adalah

solusi yang tepat dengan cara menerapkan syariat Islam secara *kaffah.* Radikalisasi yang tumbuh di kalangan Muslim adalah efek domino dari kebobrokan sistem sosial masyarakat yang sudah tidak lagi mengindahkan peraturan agama. Itu sebabnya, mereka yakin bahwa Islam mampu menyelesaikan semua problem masyarakat agar menjadi lebih Islami; tidak ada KKN, pergaulan antar remaja lebih Islami, dan tidak ada lagi perilaku tidak bermoral di bumi Indonesia.

Keempat, radikalisasi juga dipengaruhi oleh penyebaran wacana dan gerakan Islam di Timur Tengah seperti; Hassan al-Bana, Sayyid Qutub, Muhamad Qutb (Ikhwanul Muslimin), Abu A'la al-Maududi (Jamaati Islami), Taqiyudin an-Nabhani (Hizbut Tahrir), Luthfi Sayyid (Takfir wal Hijrah), Hasan al-Turabi (National Islamic Front/NIF), Syaikh Abbasi Madani dan Ali Benhadj (FIS), Syech Yasin (HAMMAS), Refah (Turki), Taliban (Afghanistan), Al-Mujahidin (Irak), Jam'iyah Ruhaniyah Mobarez (Iran), Hizbullah (Libanon), Wahabi (Arab Saudi), Hizb an-Nahdlah (Tunisia), al-Ikhwan (Suriah), al-Haq (Yaman), Arab Revolutionary Brigades (Kuwait) dan Munadzdzamat al-Amal al-Islami (Bahrain).

Pemikiran dan gerakan Islam di Timur Tengah mempunyai pengaruh luas terhadap pemikiran dan gerakan Islam di Indonesia, meskipun ada juga beberapa perbedaan penting, baik dalam substansi maupun bentuknya. Pada gilirannya, Islam radikal di Indonesia pun dalam hal penamaan organisasi atau kelompok menggunakan nama yang sama dengan gerakan Islam di Timur Tengah, seperti Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, Front Islamic Salvation (FIS),

HAMMAS, dan Mujahidin.

Kendali demikian, gerakan Islam radikal di Indonesia tidak seperti yang terjadi di Timur Tengah yang sangat menekankan agenda-agenda politik; seperti menumbangkan rezim-rezim sekuler yang menerapkan ideologi-ideologi yang bukan hanya tidak *compatible,* bahkan *hostile* bermusuhan terhadap Islam. Gerakan radikal Islam di sini baru sebatas pada tuntutan dipenuhinya aspirasi Islam, seperti pemberlakuan syariat Islam atau Piagam Jakarta, dan belum sampai pada usaha menumbangkan rezim berkuasa. Namun demikian, hal itupun harus menjadi kewaspadaan dan mawas diri bagi *civil society*, negara dan kelompok strategis yang ada, sebagai upaya menjaga integrasi nasional dalam koridor konstitusi dan semangat *Bhineka Tunggal Ika.*

Dalam konteks Indonesia, kita ingat pasca Bom Bali I tahun 2002, Abu Dujana, sang *die hard* terorisme dengan klaim agama, ketika masih dalam perburuan aparat kepolisian, diam-diam menyusun kekuatan. Mantan pejuang Mujahidin di Afghanistan ini, menurut polisi, harus ditangkap dan diadili karena merupakan aktor radikal yang harus bertanggung jawab bersama para teroris lainnya. Perburuan aparat kepolisian atas Abu Dujana ini akan menjadi taruhan bagi kinerja Polri.

Sementara itu tim penyidik dari Detasemen Khusus 88 Antiteror Mabes Polri menemukan ribuan peluru, bertonton bahan peledak, senjata api, *remote control*, telepon seluler, uang tunai, sangkur, kaset, VCD, dan perlengkapan lainnya, termasuk peta yang menunjukkan lokasi target peledakan bom, tempat pertemuan atau penyimpanan logistik. Peta tersebut menggambarkan beberapa lokasi di kawasan Jakarta,

Semarang dan Surabaya yang mungkin jadi sasaran pemboman. Peta itu ditemukan dalam penggeledahan rumah kontrakan yang didiami Sarwo Edi alias Suparjo di kawasan Magelang. Sarwo Edi adalah sekutu Abu Dujana sekaligus aktor jaringan teroris Noordin M top dan almarhum Dr Azahari Husein, aktor *die hard* terorisme di Asia Tenggara. Sungguh mencemaskan, agenda para teroris ini begitu terencana, masif, intensif dan kontingensif, memiliki sumber daya dan energi utopia, membentangkan sayap dari Ambon, Poso sampai kawasan Filipina dan Malaysia serta Asia Tenggara umumnya.

Sejarah mencatat dalam kasus Indonesia, aksi gerombolan teroris ini berhasil meledakkan "nafsu angkara murka" mereka dalam aksi Bom Bunuh Diri Bali I pada 12 Oktober 2002, Bom Bunuh Diri Hotel JW Marriot Jakarta 5 Agustus 2003, Bom Bunuh Diri Kuningan-Kedubes Australia di Jakarta 9 September 2004, dan Bom Bunuh Diri Bali II 1 Oktober 2005. Belum terhitung aksi bom-bom lainnya oleh jaringan teroris ini, yang sempat berseliweran dalam berita media massa.

Pelbagai studi tentang terorisme menyebutkan ciri khas yang dapat ditemukan di kalangan teroris yang membedakan dari orang-orang lain adalah rasa kesetiaan dan solideritas yang buta, pengalaman penghinaan kolektif, penindasan, rasa kekalahan dan inferioritas, sejarah ketidakadilan pada level global maupun lokal dan sebagainya yang mendorong pada perasaan kewajiban memulihkan kehormatan melalui penebusan, martir, atau kesyahidan.[5]

---

[5] Baca, Riaz Hassan, *Suicide Terrorism: Its Nature and Management in Differrent Countries* (London & New York: Rouledge, 2006).

Dengan melihat kasus terorisme di Indonesia, modus terorisme terbukti dapat dilakukan oleh kelompok mana saja yang merasakan pengalaman ketidakadilan, kesenjangan dan kegetiran dalam interaksi sosial. Bila dimensinya menjadi internasional atau terjadi resonansi dan ramifikasi dari aksi terorisme internasional, misalkan oleh aksi Osama bin Laden di tingkat global, pengalaman ketidakadilan tersebut harus dilihat dalam kerangka hubungan internasional pula. Dalam hal ini, Menlu Australia Alexander Downer merujuk pada penelitian Robert A. Pape (*Dying to Win: The Strategic Logic of Suicide Terrorism,* 2006) yang mengakui bahwa terorisme bom bunuh diri tidak ada hubungannya dengan Islam meskipun para teroris itu mengklaim atas nama agama atau menyandarkan dirinya pada fundamentalisme agama sebagai landasan legitimasi untuk melakukan tindakan kekerasan. Di sini, meminjam perspektif Durkheim, terdapat tiga bentuk bunuh diri dalam aksi terorisme itu yaitu: egoistik (egoisme), altruistik (altruisme) dan anomik (anomie).

Serangan terorisme bom bunuh diri dalam konteks di Indonesia, pada hemat saya, bisa digolongkan ke dalam kategori altruistik (altruisme) yaitu: Aksi bunuh diri yang dilakukan oleh individu-individu yang secara kuat terikat pada kelompok yang sangat terintegrasi, dengan perasaan solidaritas yang tinggi dan secara penuh menerima nilai-nilai dan norma-norma kelompok itu sendiri.

Mengacu perspektif Durkheim, tampaknya para teroris tidak membedakan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan kelompok, maupun berfikir bahwa dirinya merupakan orang yang berbeda yang dapat hidup terpisah

dari kelompok. Dalam keadaan seperti ini, individu-individu bersedia mengorbankan dirinya untuk tujuan kelompok. Dalam masyarakat yang sangat terintegrasi dengan solidaritas sosial yang tinggi, penghancuran diri akan dilihat sebagai penegasan pemenuhan kewajiban. Di sini hidup dan mati mempunyai makna dan nilainya seperti yang mereka persepsikan sendiri. Bunuh diri altruistik ini dilakukan demi kepentingan kelompok atau sesuai dengan norma tingkah laku kelompok mereka. Bunuh diri altruistik merupakan tanda keterlibatan yang mendalam dalam kelompok yang terisolasi dari pergaulan sosial atau tersingkir akibat marginalisasi dan periferalisasi.

Harus penulis tegaskan bahwa Islam adalah agama yang mengecam terorisme dan dengan tegas mengharamkan aksi bunuh diri. Dalam *al-Quran* disebutkan: ″Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan″ *(wa la tulqu bi-aydikum ila at-tahlukah* [Q 2: 195]) dan ″Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri″ (*wa la taqtulu anfusakum [Q.* 4: 29]). Secara tradisional, negara-negara yang berpenduduk mayoritas Muslim pun dikenal sebagai negara-negara dengan angka kematian akibat bunuh diri paling rendah di dunia.

Karena itu, aksi bom, bunuh diri oleh para teroris jaringan Abu Dujana, Noordin M Top dan seterusnya, harus dilawan dan dihentikan oleh negara bersama masyarakat madani (*civil society*) dengan akal budi dan segenap instrumennya, secara solid, masif, terarah dan efektif. Akar-akarnya seperti kemiskinan, ketidakadilan dan ketimpangan struktural harus diberantas oleh negara dan masyarakat warga.

Harus kita sadari bahwa selain Noordin M Top, Abu Dujana juga dipersepsikan oleh jaringan dan loyalisnya sebagai simbol Islamisme radikal dan altruisme. Karenanya, penangkapan hidup atau mati atas Noordin M top dan Abu Dujana akan menjadi mata rantai "langkah taktis dan strategis" negara dan masyarakat dalam perang mencegah dan melawan terorisme dan ekstremisme di Indonesia.

Hingga saat ini perbincangan tentang fundamentalisme agama masih saja mengemuka, terutama karena paham ini dapat dengan mudah dikaitkan dengan kekerasan dan tindakan terorisme. Fundamentalisme pun cenderung dimaknai secara peyoratif dengan ciri eksklusif, absolutis, merasa paling benar dalam memahami sesuatu, dan melakukan hal yang terkadang bertentangan dengan arus utama. Tentu kalangan yang digelari paham ini merasa bangga karena mereka memaknainya sebagai sebuah ketaatan yang paling mendekati kesempurnaan ajaran Tuhan dan pemahaman tekstual terhadap kitab suci adalah paling benar.

Namun, fenomena fundamentalisme tidak berhenti hanya pada gejala perdebatan interpretasi antara kaum skripturalis dan modernis-liberal, tetapi juga berimplikasi pada sikap antipati keras yang dilakukan oleh kelompok yang pertama disebut. Dalam Islam, kelompok fundamentalis kerap kali diidentikkan dengan golongan anti-Barat. Fundamentalisme Islam pun dikenal, terutama di kalangan Barat, sebagai teroris yang sewaktu-waktu bertindak mengejutkan. Peristiwa dahsyat 11 September 2001 lalu adalah contohnya. Dalam konteks peristiwa terorisme internasional, fundamen-

talisme Islam yang semula dipahami sebagai gejala perbedaan interpretasi teologis hendaknya juga dipahami sebagai sebuah upaya dedominasi geopolitik Barat atas Islam.

Dalam tulisan ini penulis menganalisa fundamentalisme Islam sebagai sebuah fenomena yang berkaitan dengan geopolitik Islam berhadapan dengan Barat. Penulis mengawalinya dengan sekilas menyingkap fenomena fundamentalisme Islam dalam konteks politik global dengan mengangkat kembali perdebatan *clash of civilizations* (benturan peradaban) Huntington, untuk kemudian mengujinya, lalu beranjak mendedah fakta geopolitik Islam vis-à-vis Barat. Akhirnya, tulisan ini ditutup dengan catatan mengenai fenomena fundamentalisme Islam sebagai upaya dedominasi geopolitik Barat.

Fundamentalisme Islam, Clash of civilizations dan Politik Global

Istilah fundamentalisme sebenarnya pertama kali muncul pada kalangan penganut Kristen (Protestan) di Amerika Serikat (AS), sekitar tahun 1910-an. Nama fundamentalisme digunakan mereka untuk membedakan kelompoknya dengan kaum Protestan yang liberal yang menurut mereka telah merusak keimanan Kristen.[6] Kelompok ini ingin menegakkan kembali dasar-dasar (fundamental) tradisi Kristen, suatu tradisi yang mereka definisikan sebagai pemberlakuan panafsiran harfiah terhadap kitab suci serta penerimaan doktrin-doktrin inti tertentu. Teori evolusi

[6] Gerakan fundamentalis memang tidak muncul begitu saja sebagai reaksi spontan terhadap gerakan modernisasi yang dinilai telah keluar terlalu jauh, tetapi lahir seiring dengan ditempuhnya cara ekstrim ketika jalan moderat dianggap tidak membantu.

Darwin adalah klimaks dari reaksi kelompok ini. [7]

Secara faktual, fundamentalisme adalah kenyataan global dan muncul pada semua keyakinan sebagai respon atas masalah-masalah yang dimunculkan modernitas. Tak terkecuali dalam Islam, paham ini pun berkecambah luas di berbagai agama: Judaisme, Kristen, Hindu, Sikh, dan bahkan Konfusianisme. Gerakan fundamentalis memang tidak muncul begitu saja sebagai reaksi spontan terhadap gerakan modernisasi yang dinilai telah keluar terlalu jauh, tetapi lahir seiring dengan ditempuhnya cara ekstrim ketika jalan moderat dianggap tidak membantu.[8]

Fundamentalisme Islam dengan demikian hanya salah satu jenis dari fenomena global yang baru dalam politik internasional dengan masing-masing latar belakang lebih pada ideologi politis. Dalam pandangan Bassam Tibi, fundamentalisme merupakan gejala ideologis dari ide *clash of civilizations*. Gejala ini bukan disebabkan krisis yang melanda dunia saat ini, tetapi lebih-lebih muncul baik dari ekspresi krisis tersebut maupun respon atasnya.[9]

Dalam konteks politik global, fundamentalisme Islam dapat dihubungkan baik dengan realitas politik internasional maupun pemikiran di balik realitas itu. Sebut saja ide tentang *clash of civilizations* Huntington yang cukup mempengaruhi

---

[7] Fundamentalisme Islam dengan demikian hanya salah satu jenis dari fenomena global yang baru dalam politik internasional dengan masing-masing latar belakang lebih pada ideologi politis. Dalam pandangan Bassam Tibi, fundamentalisme merupakan gejala ideologis dari ide *clash of civilizations* (benturan peradaban). Gejala ini bukan disebabkan krisis yang melanda dunia saat ini, tetapi lebih-lebih muncul baik dari ekspresi krisis tersebut maupun respon atasnya.

[8] Karen Armstrong, *Sepintas Sejarah Islam*, (terj.) (Yogyakarta: Ikon Teralitera, 2002), h.193.

[9] Bassam Tibi, *The Challenge of Fundamentalism: Political Islam and the New World Disorder* (Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1998), h.2.

perilaku politik global pasca-Perang Dingin. Meski tidak valid secara faktual, ide benturan peradaban tersebut cukup kuat bergema sekaligus diafirmasi oleh banyak kalangan. Tentu pembahasan tentang *clash of civilizations* sudah lama usang. Salah satu alasannya ialah karena sebagai sebuah interpretasi atas politik global ia tidak lagi relevan. Namun dengan pretensi sebagai sebuah tinjauan akademis, penulis hendak mengulang mendedahnya berikut ini.[10]

Di pertengahan 1993 Samuel P. Huntington, mahaguru studi-studi strategis Universitas Harvard AS, menyatakan bahwa idenya tentang *clash of civilizations* menyediakan sebuah model yang valid untuk berpikir mengenai masa depan. *The Clash of civilizations?* semula ditulis Huntington dalam jurnal Foreign Affairs edisi musim panas 1993. Tulisannya itu banyak mendapat kritik dan olok-olok. Namun, biasanya dibalik kritik dan olok-olok atas suatu gagasan, implisit gagasan tersebut diakui mengandung pesona. Terbukti ketika tesanya itu ia bukukan dengan judul "The Clash of civilizations and the Remaking of World Order (1996)" tak kurang dari seorang Henry Kissinger dan Francis Fukuyama memujinya.[11]

Harus diakui bahwa buku Huntington itu banyak mendapat apresiasi dari berbagai kalangan di dunia. Eksplorasinya yang sangat luas dilengkapi data yang cukup memadai membawanya pada rasiosinasi (penyimpulan) tentang

---

[10] Sampul muka buku tersebut dibubuhi sanjungan Kissinger: ...*one of the most important books to have emerged since the end of the Cold War. Sedangkan Fukuyama pada bagian belakang sampul, di antara pemuji-pemuji lain, bilang: The book is dazzling in its scope and grasp of the intricacies of contemporary global politics.* Lihat juga, Samuel P.Huntington, *The Clash of civilizations and the Remaking of World Order* (London: Simon & Schulster, 1996).

[11] Lihat, Samuel P.Huntington, *The Clash of civilizations*...

dominasi benturan peradaban dalam kancah politik global, terutama antara Barat dan Islam. Bagi Huntington, sumber utama konflik dunia baru bukan lagi ideologi atau ekonomi, melainkan budaya. Budaya akan memilah-milah manusia dan menjadi sumber konflik dominan. Negara-negara tetap akan menjadi aktor paling kuat dalam percaturan dunia, tetapi konflik politik global yang paling prinsipil akan terjadi antara bangsa-bangsa dan kelompok-kelompok karena perbedaan peradaban mereka.

Setidaknya ada lima alasan mengapa Huntington jatuh pada kesimpulan tersebut. *Pertama*, peradaban baginya tidak hanya riil, tetapi juga mendasar; *Kedua*, kenyataan semakin menyempitnya dunia memungkinkan interaksi manusia dari peradaban yang berbeda semakin meningkat; *Ketiga*, dominasi peran Barat akan memunculkan reaksi dedominasi dari non-Barat; *Keempat*, perbedaan kebudayaan kurang menyatukan ketimbang plolitik-ekonomi; *Kelima*, kesadaran peradaban bukan *raison detre* utama terbentuknya regionalisme politik atau ekonomi

Dipengaruhi sejarawan Perancis Fernand Braudel, Huntington memandang peradaban sebagai *the broadest cultural entity*. Maksudnya kebudayaan merupakan sebuah representasi dari wilayah yang lebih sempit dan karena itu bervariasi menurut wilayah, misalnya Jerman, Inggris, dan Perancis adalah kebudayaan, sedangkan wilayah kesatuannya yang disebut Eropa adalah peradaban. Demikian pula Arab adalah kebudayaan, sedangkan Islam adalah peradaban; Taiwan adalah kebudayaan, sedang Cina adalah peradaban, dan seterusnya.

Dalam era pascaperang dingin, demikian Huntington, paling tidak ada delapan peradaban dunia yang saling berhadap-hadapan untuk membangun kekuasaan: Barat, Islam, Jepang, Ortodoks (Rusia), Hindu, Amerika Latin, Afrika, dan Cina (Konfusianisme), di mana Islam dan Konfusianisme merupakan dua peradaban yang sangat menonjol untuk mengatasi peradaban Barat.

Politik bagi Huntington bukan hanya berdasarkan kepentingan, melainkan juga penampakkan identitas (kebudayaan): etnik, agama, bahasa, golongan.

Menarik untuk menyimak komentar para pengritik tesis Huntington ini dalam Foreign Affairs edisi September/ Oktober 1993. [12]

Di antaranya adalah kritik atas pendekatan macrocosmic Huntington yang memunculkan peradaban sebagai determinan hubungan internasional dan mengabaikan peran negara-bangsa (Albert L Weeks dan Fouad Ajami). Ada yang menunjuk proses kebangkrutan peradaban Barat dan memunculkan keunggulan tertentu non-Barat (Kishore Mahbubani, Gerard Piel), tapi ada pula yang optimis dengan superioritas Barat (Robert L. Bartley). Sementara itu, para pengritik lain menawarkan analisis yang membuka perspektif positif dalam pertemuan antarperbedaan dan menyarankan agar mengambil yang terbaik dari masing-masing peradaban (Liu Binyan).

Tak kalah menarik pula respon yang terjadi di Indonesia. Di sela-sela riuhnya publik Indonesia menyikapi tesis Huntington ini, Goenawan Mohammad dalam suatu dialog

---

[12] M. Fajrul Falaakh, "Harmoni Antarperadaban: Pertemuan Inklusif," *Kompas*, 15 November 1993.

kebudayaan di Jakarta,[13] menyatakan bahwa Postmodernisme mengajarkan kita untuk menghormati heterogenitas, perbedaan, kelainan (otherness), dan sikap ragu terhadap konsensus. Huntington, katanya, tidak memeriksa secara lebih teliti apa yang dimaksudkannya dengan Barat dan Islam. Dalam kacamata Postmodernisme, kedua istilah tersebut masing-masing mengandung keragaman dan berbagai perbedaan internal yang nyata.

Dialog kebudayaan itupun berkesimpulan bahwa perbenturan atau konflik yang akan dihadapi dunia di masa datang tetap bertumpu pada masalah ekonomi. Jika ada pandangan yang meramalkan kecenderungan konflik masa depan itu sebagai konflik peradaban, sesungguhnya itu hanyalah kesan luarnya. Sebab persoalan mendasar yang menjadi faktor utama penyebab konflik tersebut adalah soal-soal yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi.

Gonjang-ganjing tesis Huntington itu di Indonesia sebelumnya juga sempat dikomentari sinis dalam sebuah konferensi Forum Indonesia di Bali, yaitu dianggap sebagai motif kekuatan di belakang kebijakan AS yang menjadi konsensus pandangan para intelektual Barat. Hal ini memaksa Dubes AS saat itu, Robert L. Barry angkat bicara. Dengan diplomatis ia menyatakan bahwa esai Huntington harus dibaca sebagai suatu peringatan, bukan ramalan.[14] Huntington kala

---

[13] Baca laporan *Kompas* "Benturan Peradaban atau Persatuan dalam Keanekaragaman?," 4 Oktober 1993, h.4. Dialog bertopik "Masyarakat Pasca-modern dan Benturan Antarperadaban" itu diadakan Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an, tanggal 21 Oktober 1993. Goenawan Mohamad bertindak sebagai pembicara utama, dengan pembahas Arief Budiman dan Dawam Rahardjo, dipandu Syafi'i Anwar.

[14] Dalam bukunya, *The Clash of civilizations..,* h.21, Huntington menulis: *we know who we are only when we know who we are not and often when we know whom we are against.*

itu memang fenomenal.

Konteks Dahulu, Konteks Sekarang: Menguji Huntington

New York-Washington, 11 September 2001. Kita tahu Selasa yang cerah itu tiba-tiba dikabuti oleh debu runtuhnya dua menara kembar WTC dan serangan ke Pentagon. Osama bin Laden dan jaringannya menjadi tersangka utama dan sasaran balas dendam. Tragedi itu tiba-tiba mengingatkan orang kembali kepada sebuah nama yang belum begitu dilupakan: Huntington. Perbincangan publik dunia, terutama di AS dan Eropa, kembali pada ide *clash of civilizations* delapan tahun silam. Hal ini menambah satu bukti lagi bahwa gagasan Huntington itu mempesona banyak orang. Bahkan tak sedikit yang berpikir bahwa benturan Barat-Islam itu sungguh telah tiba. Sebagian besar kalangan dari dunia Islam pun hampir segera membenarkan teori Huntington itu.

William Pfaff, kolumnis ternama untuk International Herald Tribune dan Los Angeles Times Syndicate, adalah orang yang kesekian yang kembali menganggap klaim Huntington tentang benturan peradaban sebagai sebuah penyederhanaan gambaran realitas. [15]

Hipotesa *clash of civilizations* Huntington muncul setelah gugurnya beberapa paradigma politik internasional. Teori sebelumnya yang muncul berdasarkan peristiwa Perang Dingin, antara dua (ideologi) negara adikuasa Amerika Serikat dan Uni Soviet, diduga akan menjadi model pen-

[15] William Pfaff, "The clash of civilizations is for Historys Dustbin," *International Herald Tribune,* 18 Oktober 2001, h.9.

dekatan yang mempengaruhi kebijakan-kebijakan poli-tik-ekonomi global. Kelak teori ini ditinggalkan sejak Uni Soviet sama sekali tak lagi menjadi adikuasa dan runtuh yang akibat kesalahan internal mereka.

Tak lama, model pendekatan baru pun lahir. Kali ini ber-dasar pada paradigma Komunisme Asia di bawah komando Cina. Sejak dekade 1950-an hingga berakhirnya perang Vietnam, paradigma ini menganggap Cina sebagai negara yang memiliki kemampuan mengorganisir revolusi dunia pedesaan untuk mengalahkan AS yang merupakan ibukota dunia urban. Revolusi itu diramalkan akan terjadi dari satu negara ke negara lain dengan cara kerja efek domino. Namun paradigma ini pun akhirnya terbukti keliru, kendati AS berperang berdasarkan model ini. Komunisme Vietnam memang mengalahkan AS, tetapi tanpa efek domino ke negara-negara lain.

Munculnya Huntington dengan mengusung model *clash of civilizations* akhirnya mengisi ruang kosong kebuntuan paradigma politik global. Modelnya merupakan kesimpulan yang ditarik dari fenomena revolusi kaum fundamentalis Islam Iran yang konon berwatak keras terhadap AS.

Peristiwa 11 September memang dapat saja diyakini menjadi epilog dari apa yang disebut benturan Barat-Islam. Tesis benturan peradaban Huntington apa boleh buat telah diya-kini sebagian orang, juga rupanya kerap dipraktikkan ter-utama oleh Barat, disadari atau tidak. Sebab, banyak kalangan Islam melihat serangan dahsyat terhadap AS itu sebagai balasan yang dibenarkan karena bahaya yang mereka pikirkan yang selama ini dilakukan AS dan Barat terhadap Islam. Tak kurang dari seorang Mahathir

Mohammad pun menyatakan bahwa upaya yang mesti segera dilakukan adalah identifikasi sebab musabab peristiwa itu sebagai bahan introspeksi Barat (AS dan Eropa).

Tak dapat disangkal bahwa kalangan Islam memang meminta AS untuk bertanggung jawab atas serangan basis-basis militernya ke dalam negara-negara mereka, atas apa yang mereka lihat sebagai opresi atas masyarakat Palestina, dan atas sanksi yang telah menghukum rakyat Irak sejak kecamuk Perang Teluk berakhir. Banyak juga mereka yang menyalahkan ketidaklogisan Barat atas keterbelakangan masyarakat muslim sejak berkembangnya ilmu/teknologi dan paham demokrasi liberal. Padahal peradaban Barat sangat berhutang kepada dunia Arab-Islam, dan peradaban Islam sangat berhutang kepada tradisi Hellenisme. Dan dalam kesadaran ahistoris seperti ini lalu berlangsung imperialisme kultural dan kolonialisme ekonomi oleh Barat terhadap non-Barat.

Maka, cukup berbahaya jika pemahaman benturan peradaban terus diyakini baik oleh kalangan Islam maupun Barat. Ide semacam ini implisit menyiratkan bahwa Barat dan Islam, juga peradaban-peradaban lain, haruslah selalu berseteru sebab itulah takdir peradaban. Huntington memang tidak sepenuhnya keliru ketika ia mengatakan bahwa masyarakat kini mengidentifikasikan diri mereka pada keleluhuran, agama, bahasa, sejarah, nilai; masyarakat lebih mengidentifikasikan dirinya dengan kelompok-kelompok budaya (etnisitas), dan pada level yang lebih luas: peradaban. Akan tetapi, tampaknya ia berlebihan jika kemudian berkesimpulan bahwa kita tahu siapa diri kita hanya ketika kita tahu bukan diri kita, dan seringkali hanya

ketika kita tahu siapa lawan kita.[16]

Pandangan Hobbesian yang Meniscayakan Perang.

Anggapan Huntington bahwa kecenderungan masyarakat dewasa ini melebur ke dalam entitas kebudayaannya yang lebih luas (peradaban), sesungguhnya terfalsifikasi oleh kenyataan bahwa kecenderungan masyarakat dunia malah menciutkan diri pada entitas etnik dan kelompok yang lebih kecil. Pecahnya Uni Soviet yang masyarakatnya memiliki akar budaya yang relatif sama adalah salah satu contohnya. Dan tesis John Naisbitt dalam Global Paradox (1994) barangkali meneguhkan terfalsifikasinya anggapan Huntington ini. Naisbitt menyatakan bahwa ada paradoks saat dunia semakin mengglobal antara hal universal versus tribal. Ia bilang: semakin menjadi universal diri kita, semakin tribal kita bertindak.

Ia mencontohkan ketakutan bangsa kita beberapa tahun yang lalu akan kolonisasi bahasa Inggris atas bahasa lokal dan Indonesia. Sikap ini hingga mengakibatkan pemerintah mengeluarkan kebijakan pengindonesiaan bahasa Inggris. Hal yang sama terjadi di Quebec, Rusia, Ukraina, juga Lithuania.

Sekali lagi, istilah Barat-Islam masing-masing mengandung keragaman dan berbagai perbedaan internal yang nyata. Jadi, apa yang dilakukan Osama bin Laden beserta jaringannya, juga gerakan Taliban, fundamentalisme Pakistan, dan teroris Palestina bukanlah representasi dari peradaban Islam. Sikap mereka hanyalah fenomena individual di dalam

[16] John Naisbitt, *Global Paradox* (New York: Avon, 1994), h.24-7.

masyarakat Islam. Kaum fundamentalis tidaklah mewakili ortodoksi arus utama dalam Islam. Mereka dikemudi oleh suatu versi fanatis dan ideologis agama yang menyerupai nasionalisme. Mereka sendiri biasanya berpendidikan Barat dan tak banyak tahu tentang isi dan kebudayaan Islam. Tidak ada terorisme (dalam anjuran ajaran) Islam. Yang ada hanyalah kenyataan muslim yang menjadi marah, dan teroris yang kebetulan muslim. Itulah orang-orang seperti Osama bin Laden.

Mengatakan konflik AS-Afganistan sebagai perang antar-peradaban (Barat-Islam) adalah sesederhana apa yang dipikirkan Huntington tentang clash of civilizations. Peradaban Islam tidaklah sesederhana sosok Osama bin Laden dan jaringannya. Di luar seorang Osama, terdapat lebih dari 100 juta penduduk muslim di kawasan Arab, dan 140 juta lainnya di Pakistan dan Afganistan. Komunitas ini sekarang tengah terlibat konflik dengan Barat. Juga terdapat 174 juta penduduk muslim di Indonesia, 100 juta di India, 103 juta di Bangladesh dan 160 juta muslim di Afrika Sub-Sahara, ditambah 6 juta di AS. Tak sedikit pula kaum muslim yang hidup di Turki, Eropa Barat, Afrika Utara, Kaukasus dan Asia Tengah.[17]

Masyarakat ini mungkin merasakan simpati atas saudaranya yang muslim, tetapi mereka bukanlah bagian dari jihad Osama bin Laden. Solidaritas Islam tentu ada, tetapi lebih didasari kemanusiaan yang mengharapkan tidak ada lagi korban tak berdosa dan tidak ada lagi perang. Hal yang sangat berbahaya adalah jika kaum muslim semakin menjadi sadar dan yakin bahwa Barat kini tengah dengan

---

[17] William Pfaff, "The Clash of Civilizations is for Historys Dustbin"...

sungguh-sungguh memerangi Islam. Kesadaran inilah yang tengah timbul di berbagai masyarakat Islam dunia, termasuk di Indonesia. Banyak kalangan menentang AS saat negara adidaya itu menyerang Afganistan dengan kesadaran bahwa AS tengah mengajak *clash* dengan Islam baik sebagai agama maupun peradaban, seperti dimaklumkan Huntington. Belakangan ini Presiden Bush berencana menggempur Irak; sebuah situasi yang kritis bagi perdamaian.

Presiden Bush dan Colin Powell memang sering mengatakan bahwa AS dan Eropa tidaklah sedang memerangi Islam baik sebagai agama maupun peradaban, melainkan tengah berperang dengan teroris individual dan organisasi-organisasi teroris. Bagi AS, isu konflik dengan Afganistan beberapa waktu lalu dan dengan Irak yang memanas belakangan ini adalah bersifat politis, bukan kebudayaan maupun religius. Banyak seruan agar tidak ada lagi perang. Namun, rupanya AS dan Inggris yang terus berdalih memerangi terorisme akhirnya melancarkan serangan ke Afganistan, tempat perlindungan sang tersangka Osama. Patut disayangkan baik AS maupun Afganistan (Taliban) tak memperhitungkan banyaknya korban sipil tak berdosa yang berjatuhan akibat krisis ini.

Geopolitik Islam vis-à-vis Barat

Hanya selang sekitar dua bulan sebelum tragedi 11 September 2001, majalah mingguan terkemuka Inggris, The Economist, mengundang Prof. Jeffrey Sachs, Direktur the Centre for International Development Universitas Harvard AS. Dalam pidatonya Prof. Sachs dengan keras berkata: Meskipun kemakmuran Amerika Serikat (AS) bergantung

pada jaringan perdagangan, keuangan, dan teknologi dunia, namun saat ini AS memperlakukan negeri-negeri lain di dunia ini seolah-olah mereka tidak ada. Padahal, lanjutnya, apa yang baik bagi kaum miskin (di berbagai negara) adalah baik pula bagi AS. [18]

Tragedi 11 September yang mengenaskan itu seakan membenarkan peringatan Prof. Sachs di atas. Hal ini bukan berarti bahwa dengan demikian terorisme identik dengan kemiskinan dan serta merta menjadi satu-satunya picu bagi laku terorisme. Tetapi bukankah wajar jika AS, juga Eropa, hendaknya melakukan introspeksi mengapa hingga kini jaringan terorisme internasional sebagian besar terkait dengan dunia Islam.

Menanggapi terorisme Islam ala Osama bin Laden dan jaringan Tanzim al-Qaedanya, sastrawan terkemuka Salman Rushdie menyatakan bahwa masalah dan penyakit Islam sekarang ini berasal dari dalam Islam sendiri. Rushdie menyoal kemodernan yang kerap ditampik masyarakat Islam, menurutnya menjadi penyebab kemunduran dan ketertinggalan mereka.[19]

Anggapan Salman Rusdhie di atas tentu beralasan, tetapi betulkah hanya kebudayaan yang menyeret kembali masyarakat Islam pada situasi kemandegan abad ke-7. Kiranya jelas, para teroris dan kaum fundamentalis Islam bukanlah representasi dari peradaban Islam. Sikap mereka hanyalah fenomena individual yang dikemudi oleh suatu versi fanatis dan ideologis agama yang menyerupai nasionalisme. Mereka sendiri biasanya berpendidikan Barat dan tak banyak

---

[18] . Lihat laporan *The Economist*, 14 Juli 2001.
[19] Lihat laporan *International Herald Tribune*, 3-4 November 2001.

tahu tentang isi dan kebudayaan Islam. Tentu tidak ada anjuran terorisme dan kekerasan dalam ajaran Islam. Tetapi mengapa ada orang-orang semacam bin Laden?

Ketika Huntington mengusung *clash of civilizations* hampir satu dasawarsa silam yang secara tegas memprediksi Barat dan Islam sebagai dua peradaban yang kerapkali berbenturan, sesungguhnya ia semakin mempertegas ranah geopolitik dan sikap hegemonik Barat atas Islam yang dilakukannya sejak bertahun-tahun silam. Kemunduran dan kesulitan-kesulitan yang melanda masyarakat Islam senyatanya lebih banyak berkaitan dengan kekalahan geopolitik dunia Islam ketimbang dengan perbedaan kebudayaannya dengan Barat. Peta geopolitik seharusnya tidak dibaca sebagai sebuah hikayat moralitas. Maksudnya, harus dibaca sebagai persoalan ekonomi-politik.

Klaim Salman Rushdie yang mengidentifikasi kemunduran masyarakat Islam sebagai kesalahan internal mereka, memang menjadi otokritik yang berguna bagi Islam. Akan tetapi jika kebudayaan dianggap sangat berperan dalam kemunduran dunia Islam, ini tentu berlebihan. Begitu juga pandangan bahwa kebangkitan masyarakat Kristen adalah bukti superioritas teologi dan kebudayaan mereka. Pembagian Kristen-Islam adalah juga merupakan pembagian ekologis antara zona bertemperatur sedang Kristen Eropa dan zona bertemperatur gersang Islam Timur Tengah, Afrika Utara dan Asia Tengah.

Prof. Sachs kembali berkomentar ketika *clash of civilizations* Huntington, yang berbahaya karena Hobbesian itu, lagi-lagi menjadi momok pascatragedi 11 September: ...*AS dan Eropa seharusnya memperlakukan dunia Islam tak sekadar demi minyak*

di Teluk Persia dan Asia Tengah, dan demi kepentingan ekonomi belaka.

Saat Islam berada dalam kemajuan pada abad ke-8, populasi Islam dan Kristen Eropa sesungguhnya relatif seimbang, masing-masing kurang lebih memiliki 30 juta penduduk. Bahkan kota-kota di negara Islam saat itu menjadi pusat perekonomian dunia. Waktu itu ada sekitar tigabelas kota Islam dengan lebih dari 50.000 penduduknya, termasuk Iskandaria, Baghdad, Kairo dan Mekah. Sedangkan benua Eropa yang relatif maju hanyalah di wilayah Barat, dan itupun mereka cuma punya kota Roma.

Dalam perjalanan waktu berabad, keseimbangan demografis tersebut berbalik arah memihak Eropa. Eropa tidak hanya dikelompokkan kembali secara politik di bawah suatu struktur feodal yang lebih stabil, tetapi juga mengembang-kan teknologi seperti alat pembajakan modern bagi tekstur tanah yang keras hutan-hutan kawasan Utara benua itu. Populasinya tumbuh cepat setelah abad ke-10, hingga berpenduduk sekitar 100 juta pada awal abad ke-17.

Pada masyarakat Islam yang terjadi adalah sebaliknya. Mereka dibatasi dan dikelilingi oleh kegersangan dan keter-batasan sumber daya alam, seperti hutan untuk kebutuhan akan kayu. Populasi Islam tidak bergeser secara berarti hingga berabad-abad, sampai mengalami kemajuan tajam pada akhir abad ke-19 dengan kemajuan revolusi industri dan teknologi yang dijalankannya. Hanya zona sedang wilayah Turki yang melakukan hal lebih baik secara demografis dari zona gersang kawasan gurun Arabia.

Awal mula kesulitan yang melilit masyarakat Islam untuk berkembang dimulai saat tidak dilibatkannya Islam, khu-

susnya oleh pelayar Portugis Vasco da Gama, pada akhir abad ke-15 dalam membangun rute perjalanan laut Afrika hingga Asia. Waktu itu Gama berupaya menyatukan Eropa dan Asia melalui perdagangan lewat jalur samudera yang seluruhnya mengambil jalan pintas rute-rute Jalur Sutera dan Laut Merah Asia Tengah serta Timur Tengah.

Kesulitan semakin mencekik setelah usaha kontrol yang dilakukan Islam terhadap perdagangan Samudera Hindia akhirnya jatuh juga pada kekuasaan angkatan laut Eropa yang tangguh. Dan upaya perbaikan perdagangan pada saat yang sama yang dilakukan Islam atas Terusan Suez melalui Laut Merah pada 1869 sudah sangat terlambat. Eropa saat itu telah menang dan akan terus mengontrol Terusan Suez dan perdagangan-perdagangan jalur laut serupa melalui pendudukan militer dan kontrol finansial.

Pada akhir abad ke-19, saat keruntuhan akhir Kekaisaran Ottoman di Turki, Eropa memiliki sumber daya alam yang relatif melimpah: batubara, gas-air, kayu, dan biji besi. Sedangkan negara-negara Islam Arabia hanya memiliki sedikit dari stok kebutuhan abad ke-19 tersebut untuk menyokong industrialisasi. Sementara penemuan ladang-ladang minyak di negara-negara Islam baru dieksplorasi setelah Eropa telah menggenggam kontrol kolonial. Tak ayal jika pada abad ke-20 negara-negara Islam telah kehilangan kontrol atas rute-rute perdagangan, komoditas-komoditas primer seperti minyak, dan bahkan kedaulatan mereka sendiri di banyak wilayah.

Dengan standar yang obyektif, hingga detik ini sesungguhnya kota-kota Islam sekarang ini tidaklah termasuk dalam bagian dari jaringan global perdagangan, pemikiran, tekno-

logi, dan kebudayaan. Sudah saatnya Amman, Damaskus, Tunisia, Kairo, Teheran, juga negara semacam Afganistan perlu dihubungkan dengan London, Paris, Boston juga dengan Tel Aviv dan lainnya dalam pertukaran intelektual, konferensi akademik, kegiatan olahraga, investasi luar negeri, dan perdagangan. Juga, sejak sekarang kebijakan perdagangan AS dan Eropa hendaknya mengakomodasi tuntutan perubahan ini. Turki harus tidak lagi dipersulit untuk menjadi anggota Uni Eropa, dan perluasan susunan perdagangan mesti tidak lagi mendiskriminasi Timur Tengah dan mengeksklusi negara-negara Islam lainnya.

Ini adalah upaya menopang jaringan kerja masyarakat sipil yang pada akhirnya akan menutup rapat era peperangan, ketakpercayaan, dan dominasi Barat terhadap Islam. Sehingga jalan untuk menekan suburnya jaringan terorisme internasional tidak melulu dengan intensitas yang keras seperti terjadi sekarang ini. Dan tentu agar segala macam bentuk terorisme tidak lagi memiliki alasan untuk berkecambah.

Dedominasi Geopolitik Barat: Catatan Penutup

Harus diakui bahwa setiap agama selalu berhadapan dengan kemungkinan menjadi ideologi, juga sebaliknya, setiap ideologi yang ingin memantapkan posisinya cenderung menempuh jalan untuk memberi warna keagamaan kepada dirinya. Ideologisasi agama selalu diimbangi dengan religiosasi ideologi.

Kalimat di atas hendak menunjukkan bagaimana agama, termasuk Islam, yang sesungguhnya menyeru pada perdamaian, kasih sayang dan kebaikan dapat digunakan oleh siapapun sebagai alat untuk mencapai kepentingan sempit

tertentu. Gejala fundamentalisme Islam adalah contoh bagaimana agama dipahami secara ideologis. Interpretasi ajaran yang dianggap paling sahih adalah sumber-sumber awal (al-ushuliyyah). Laiknya ideologi, agama dikembang-kan dari sebuah fondasi yang presis, lengkap, dan tak dapat diubah. Seperti tulisan-tulisan Karl Marx bagi fondasi Marxisme, Quran dan Sunnah merupakan fondasi Islam. [20]

Namun demikian, fenomena fundamentalisme Islam yang biasanya dipahami sebagai gejala perbedaan interpretasi teologis, juga hendaknya dipahami sebagai sebuah upaya dedominasi geopolitik Barat atas Islam. Jadi, persoalan fundamentalisme harus juga diletakkan pada kepentingan ekonomi-politik. Karenanya, klaim atas kelompok fundamentalisme Islam sebagai representasi dari arus utama Islam adalah berlebihan.

Mengenai ide benturan peradaban, sebetulnya Huntington sendiri dalam pengantar bukunya dengan rendah hati tidak memaksudkan karyanya itu sebagai sebuah kerja ilmu sosial, melainkan sebagai interpretasi atas perkembangan politik global pasca-Perang Dingin. Ia pun menyadari bahwa tidak ada satupun paradigma yang valid secara kekal. Validitas pendekatan peradaban barangkali membantu memahami politik global pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, tetapi tidaklah menjamin dapat digunakan pada era selanjutnya yang berubah.[21]

Huntington pun sudah merevisi pandangannya itu, sebab fakta yang sering terjadi adalah konflik di dalam peradaban

---

[20] Murad Hofmann, *Islam: The Alternative,* terj. Christiane Banerji dan Murad Hofmann (United Kingdom: Garnet Publishing, 1993), h.55.

[21] Lihat, Samuel P.Huntington, *The Clash of civilizations*...h.13-4.

masing-masing, baik di Barat maupun Islam. Akan tetapi, fakta konflik peradaban secara internal ini pun jangan pernah dianggap bahwa konflik adalah takdir kebudayaan. Sebab anggapan ini identik dengan apa yang pernah ada pada abad yang lalu, ketika perang antar-ras diyakini sebagai fenomena dunia di masa depan. Ramalan yang meyakinkan Hitler itu menorehkan sejarah kelam bagi Eropa. Kita tentu tidak mau menyaksikan untuk kesekian kalinya Perang Dunia terulang. [22]

Sudah saatnya kita segera harus melupakan *clash of civilizations* Huntington, sambil terus mengupayakan keadil-an, pembangunan dan perdamaian. Biarkanlah *clash of civilizations* menjadi sampah sejarah, sebagaimana maklumat William Pfaff. Jika mengikuti saran Bassam Tibi,[23] upaya demokratisasi dan penegakan hak asasi manusia yang fair merupakan alternatif mencegah fundamentalisme agama. Kedua isu tersebut akan menjadi substansi moralitas lintas budaya tingkat global yang memungkinkan masyarakat dari berbagai peradaban yang berbeda hidup bersama secara damai. [*]

---

[22] Ternyata perang intern dalam suatu peradaban Barat, misalnya, akibat konflik kepentingan lebih banyak terjadi ketimbang antarperadaban. Perang Dunia I dan II, contohnya.

[23] Lihat bukunya *The Challenge of Fundamentalism: Political Islam and the New World Disorder* (Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1998).

REFERENSI:

Armstrong, Karen, Islam A Short History (Sepintas Sejarah Islam), (Yogyakarta: Ikon Teralitera, 2002)

Barry, Robert L., "Benturan Peradaban atau Persatuan dalam Keanekaragaman?" *Kompas*, 4 Oktober 1993

Falaakh, M. Fajrul, "Harmoni Antarperadaban: Pertemuan Inklusif," *Kompas*, 15 November 1993.

Hofmann, Murad, *Islam: The Alternative*, terj. Christiane Banerji dan Murad Hofmann (United Kingdom: Garnet Publishing, 1993).

Huntington, Samuel P., *The Clash of civilizations and the Remaking of World Order* (London: Simon & Schulster, 1996).

Naisbitt, John, *Global Paradox* (New York: Avon, 1994).

Pfaff, William, "The Clash of Civilizations is for Historys Dustbin," *International Herald Tribune*, 18 Oktober 2001.

Tibi, Bassam, *The Challenge of Fundamentalism: Political Islam and the New World Disorder* (Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1998).

TERORISME, BARAT DAN ISLAM

Aksi terorisme di Bali, Jakarta, Mesir, Spanyol, Inggris dan Eropa tidaklah terlepas dari konteks internasional dewasa ini. Meminjam perspektif Fareed Zakaria, posisi AS/Barat *vis-à-vis* kaum radikal-fundamentalis Islam pasca serangan AS/Barat ke Irak dan Afghanistan, merupakan suatu kenyataan. Ledakan tiga bom beberapa tahun lalu di Sharm el-Sheikh, Mesir, yang menewaskan 88 orang dan melukai lebih dari 200 orang, hanyalah mengkonfirmasikan kembali posisi AS/Barat *vis-à-vis* Islam radikal tersebut, dimana aksi pemboman di London dan Mesir itu merupakan bagian dari desain para teroris global untuk melawan kapitalisme-imperialisme AS/Barat dan sekutunya. Dan itulah fakta yang tak terbantahkan. [1]

Sasaran bom di Mesir itu adalah tempat wisata kebanggaan Mesir dan tepat pada peringatan Hari Revolusi. Sementara sebelumnya di London, ledakan bom 7 Juli menewaskan 60

---

[1] Herdi Sahrasad, "Bom Mesir dan London: Terorisme sebagai Ideologi?", opini, *Koran Tempo*, 27 Juli 2005.

orang dan melukai 700 orang lainnya. Kita mencatat bahwa pasca bom WTC 11 September 2001 di New York, AS, kemudian aksi teror meledak di mana-mana. Di Bali, Casablanca, Madrid, Riyad Arab Saudi, dan 7 Juli lalu di London lalu. Titik-titik serangannya pun serupa yakni tempat umum, transportasi, dan wisata.

Dengan rentetan bom-bom teroris itu, maka penulis meyakini bahwa terorisme telah menjadi idelogi perlawanan terhadap kapitalisme global. Sebab aksi bom itu telah marak di seluruh penjuru dunia, tidak perduli di negara maju maupun berkembang, Barat maupun Timur. Bagaimana kita menjelaskan bahwa terorisme adalah ideologi baru dari para pelakunya sendiri.

Hendaknya dipahami bahwa al-Qaeda dan Osama bin Laden, yang diburu Amerika Serikat (AS) dan sekutunya, telah menjadi simbol personifikasi Islam *vis-a vis* kapital-isme-imperialisme global. Sebab, kendati kesalahannya belum terbukti, Osama dan al-Qaeda telah menjadi buron internasional versi AS dan sekutunya. al-Qaeda dan Osama memiliki ikatan historis dan ideologis dengan masyarakat Timur Tengah dan Afganistan yang pernah melindunginya tatkala Osama dan aktivis al-Qaeda menjadi target operasi militer AS. Akibat tindakan gegabah dan keras dari AS (Barat) ke Irak dan Afghan, meminjam perspektif cende-kiawan Mesir Hassan Hanafi, semakin memperkuat Islam sebagai ideologi alternatif bagi para teroris atas kapitalisme-imperialisme AS/Barat yang diberlakukan di berbagai wilayah dunia dimana kemiskinan meruak terutama di kalangan penduduk muslim.

Terorisme sebagai ideologi, berisi tatanan nilai yang oleh kelompok kekerasan ini dimanfaatkan sebagai pedoman menjalani tindakan bersama. Tatanan nilai ini, meminjam diskursus akademisi David Easton dan David Apter, bisa berasal dari tradisi, adat-istiadat dan bisa pula bersumber dari ajaran suatu agama. Atau, bisa juga merupakan gabungan keduanya.

Ideologi pada tataran ini muncul sebagai abstraksi atas kondisi hidup (realitas) yang berhubungan dengan kesadaran. Menurut pemikiran Karl Marx dan Engels, jalinan kedua hal ini bisa disambung sebagaimana diperlihatkan oleh *ruling class* dalam menerapkan *ruling ideas*-nya sehingga menjadi penengah antara *civil society* (masyarakat madani) dan *state*.

Dalam terorisme yang diilhami oleh perintah agama atau ideologi, sebagaimana dalam negara, tatanan sosial akan tercipta jika ada yang menghubungkan antara penggagas ide, pionir (rasul dalam konsep Islam), dan *civil society* sebagai pendamba perubahan yang lebih baik. Kehadiran Islam sebagai ideologi telah memperkuat basis moral-teologis bagi para teroris sebagai ideologi perlawanan yang dianggap "kontekstual" dalam situasi kekinian, yang menampakkan dirinya sebagai kekuatan ampuh yang bisa menjadi landasan gerakan politik melawan AS/Barat. Terutama yang pernah dialami bangsa-bangsa di Timur Tengah, Asia Selatan dan Asia Tenggara. Ideologi gerakan politik al-Qaeda yang didasarkan pada agama Islam ini mempunyai bentuk "unik" yang membedakannya dengan format ideologi lain.

Pengaruh ide-ide kaum agamawan Timur Tengah terhadap Asia Tenggara, seperti yang terlihat pada kaum reformis awal abad ke-20, sangat kurang hubungan ideologinya. Namun, pada awal milenium ketiga ini menjadi menguat kembali dengan fenomena al-Qaeda, Osama dan jaringan globalnya yang mengejutkan dunia.

"Ada seribu Osama dan al-Qaeda lain bila AS menangkap Osama dan aktivis al-Qaeda hidup atau mati, dan kami menolak penyerahan Osama dan aktivis al-Qaeda kepada Washington karena tidak ada bukti keterlibatannya dalam serangan terorisme ke AS," kata para aktivis Muslim radikal di Afghanistan dan Timur Tengah kepada media massa Barat.

Di mata Barat, al-Qaeda/Osama dianggap sebagai sumber inspirasi kejahatan dan terorisme global. Namun, di mata dunia Islam, mereka adalah heroisme dan revivalisme yang meyakinkan umat tentang relevansi dan kontekstualisasi Islam sebagai ideologi alternatif atas kapitalisme (AS dan Barat) dan sosialisme (Kuba, Korea Utara), yang menurut Peter Berger, sama-sama tidak memiliki masa depan yang memuaskan. Islam sebagai ideologi para teroris dalam beraksi, meminjam wacana akademisi Bassam Tibi, sebagai ekspresi kultur Islam yang defensif, ekspresi krisis identitas, dan ekspresi kemiskinan material dari kalangan umat (*expression of a defensive-culture, expression of identity crisis, and expression of material misery of the ummah*) dalam menghadapi kapitalisme-imperialisme global. Dalam konteks ini, Samuel P. Huntington tidaklah sepenuhnya salah tatkala melontar-kan terjadinya "benturan peradaban" antara Islam dan Barat, karena kenyataan menunjukkan demikian.

Kini terorisme bom telah marak, dan solusi harus diambil. Dialog antarumat beragama, pengembangan praksis inklusifisme dan pluralisme, pembangunan ekonomi tingkat global, regional dan lokal yang adil dan manusiawi, hubungan Utara-Selatan yang adil dan setara, pemberantasan kemiskinan global dan nasional yang holistik dan mendasar, merupakan beberapa agenda yang harus dilakukan untuk mengatasi terorisme yang bengis dan mengerikan. Akar-akar persoalan yang melahirkan terorisme harus dipangkas dan itu musti diawali dari kebijakan, kebajikan dan kearifan AS/Barat sendiri dalam hubungannya dengan Dunia Islam dan kaum tertindas di seantero bumi. Jalan nampaknya masih panjang dan harus kita perjuangkan bersama.

Teror Bom, Ketidakadilan dan Kekerasan

Korban-korban berjatuhan dalam serangan bom di Kuta dan Denpasar, Bali, menewaskan lebih dari 180 orang dan melukai sedikitnya 157 orang, yang membuktikan betapa aksi-aksi terorisme di Tanah Air makin terorganisir, masif dan eskalatif jangkauannya. Ledakan pertama dan kedua terjadi di Jalan Legian, Kuta, Kabupaten Badung, ledakan ketiga terjadi 100 meter dari Kantor Konsulat Amerika Serikat di daerah Renon, Denpasar. [2]

Ledakan bom itu telah menghancurkan sementara daya pikat Bali sebagai Pulau Dewata dan urat nadi pariwisata Indonesia, serta menimbulkan krisis kepercayaan terhadap kemampuan negara dan aparatnya dalam menciptakan

---

[2] Herdi Sahrasad, "Teror Bom, Ketidakadilan dan Kekerasan," opini, *Republika*, 15 Oktober 2002.

keamanan dan stabilitas bagi masyarakat domestik maupun internasional.

Teror bom di Bali yang menelan korban jiwa dan kerugian miliaran rupiah itu menimbulkan desas-desus dan rumor tentang keterlibatan Islam garis keras dan kelompok beraliran fasis yang menghalalkan segala cara, Machia-vellian, untuk mencapai tujuannya. Dengan ledakan bom yang amat dahsyat, yang mengguncang Kuta, Denpasar dan Menado itu, pluralitas dan keadaban bangsa Indonesia juga dipertanyakan kembali oleh berbagai kalangan domestik maupun asing.

Untuk itu, kemampuan pemerintah dalam menangkap dan mengungkap para dalang dan pelaku teror bom di Bali secepat mungkin, ditunggu oleh masyarakat domestik dan internasional mengingat bahwa pemboman yang nyata-nyata sangat biadab, bengis dan berbahaya itu, amat mengancam keselamatan masyarakat dan bangsa di masa depan.

Teror bom itu nampak dilakukan secara terorganisir, rapi dan mengandalkan manajemen konflik untuk mencapai sasaran dan tujuan politiknya.

Siapa pelakunya? Mengapa orang-orang ini mau melakukan serangan bom yang amat mengerikan itu? Apa motivasinya? Apa latar belakangnya? Apakah mereka jaringan teroris al-Qaeda, kelompok Islam garis keras dalam negeri, kelompok teroris bayaran, ekstremis ultra-nasionalis, atau bagian dari pekerjaan jaringan intelijen asing?

Lantas, mengapa sasarannya Bali dan orang asing? Adakah hal ini mencerminkan bahwa pelaku terorisme bersikap anti-Barat? Ledakan bom di Bali merupakan rangkaian lanjut dari ledakan bom-bom sebelumnya di berbagai kota di

Tanah Air. Tragis dan mengerikan.

Literatur Kekerasan

Dari literatur kriminologi, psikologi sosial dan sosiologi, hampir sebagian besar para pelaku tindak kekerasan yang sangat ekstrim/terorisme biasanya merupakan kelompok-kelompok masyarakat menengah ke bawah yang mengalami ketidakadilan dan kekecewaan akibat diskualifikasi, dislokasi sosial dan deprivasi ekonomi-politik.

Beberapa isyarat dislokasi, diskualifikasi dan deprivasi itu antara lain:

Pertama, diskualifikasi untuk memasuki lapangan kerja akibat faktor pendidikan yang rendah; *Kedua*, dislokasi sosial-ekonomi dalam bentuk penyingkiran kaum miskin dari sumberdaya ekonomi, sosial dan kultural, dan; *Ketiga*, deprivasi ekonomi-politik yang berupa proses pemiskinan masyarakat arus bawah akibat dominasi dan hegemoni kekuatan bisnis besar (konglomerasi dan modal asing) yang berkolusi dengan penguasa untuk menguasai sumber-sumber daya ekonomi dan politik.

Semua itu berujung pada radikalisasi pribadi atau kelompok atas nama ideologi perubahan atau keyakinan agama, dengan tafsir sempit, myopik dan sepihak, yang secara radikal dan brutal justru disalahgunakan untuk melakukan perbuatan ekstrim berwajah kekerasan dan biadab. Aksi teror di Bali bagaimanapun mendapat dukungan para dalang dan aktor intelektual (die-hard) di balik layar, yang memungkinkan sadisme dan ekstremisme itu kemudian dilampiaskan, diledakkan.

Dengan demikian, keresahan, ketidakpercayaan, kekacauan, kepanikan dan instabilitas yang meledak dan meruak, yang amat efektif dalam merusak dan memecah belah masyarakat dan mengadudomba antarumat beragama agar tetap ″baku konflik, baku bunuh.″

Situasi ini jelas mendistorsi agenda reformasi, sementara lapisan elite di atas yang korupsi dan hidup mewah tetap jauh dari jeratan hukum, sehingga mudah 'membeli waktu' (buying time) untuk mengelabui agenda reformasi itu sendiri.

Dalam konteks ini, analisa dan dugaan pengamat Islam Al Chaidar, bahwa tiga faksi Islam radikal yang diberi 'order' oleh oknum militer untuk melakukan pemboman gereja-gereja dan tempat-tempat umum, hendaknya dikaji dan dicamkan oleh pemerintah dan masyarakat karena boleh jadi mengandung kebenaran, bukan sekedar mencari sensasi dan popularitas. Demikian halnya informasi Majalah Time dan pengamat asing tentang adanya jaringan terorisme Al Qaidah di Indonesia, pantas dikaji kembali.

Serangan teror bom di Bali itu bagaimanapun merupakan ekses lanjutan dampak sosial-politik dari ketidakadilan dan kejahatan sosial yang dilakukan oleh rezim Orde Baru dan rezim global kapitalisme, yang berlanjut hingga pemerintahan transisi demokrasi saat ini dalam bentuk korupsi, kolusi dan penyelewengan lainnya, yang terindikasikan dengan penyelewengan keuangan triliunan rupiah, ditambah warisan Orde Baru berupa skandal BLBI Rp 650 trilyun dan rekapitalisasi perbankan sekitar Rp 140 trilyun, serta beban utang luar negeri sekitar US$ 150 miliar, telah menjadi 'wacana ketidakadilan' (discourse of injustice) di kampus,

masjid-masjid, warung kopi, buruh, petani kecil sampai ruang keluarga di kota dan desa.

Angka-angka mega-skandal finansial itu di mata kaum miskin tak terbayangkan jumlahnya, sementara secara mikro kehidupan lebih 40 juta penganggur dan jutaan rakyat makin miskin dan marginal, yang pada gilirannya telah mendorong spirit keagamaan ke arah tafsir skriptural dan radikal, yang dalam bahasa akademisi Michael Walzer, situasi ini membuka ruang dan peluang bagi ekstremisme dan terorisme. Hal ini diperparah lagi dengan masalah HAM di Aceh, Papua, Ambon, Poso dan konflik identitas lainnya di Indonesia.

Dalam konteks nasional (makro), selama ini pemerintahan kita nampak belum sungguh-sungguh memperjuangkan nasib rakyat sesuai amanat reformasi total.

Sampai sejauh ini, sebagian dari mereka yang marginal telah tertindas sejak zaman kolonial dan dalam zaman kemerdekaan pun mereka selalu terkena diskualifikasi, dislokasi sosial-ekonomi dan deprivasi ekonomi-politik setiap kali terjadi konsolidasi negara dan pemerintahan bagi pembangunan akibat tingkat pendidikan mereka yang masih rendah dan ketrampilan yang minim yang menyebabkan kualitas sumberdaya manusia kelompok miskin ini tetap tak kompetitif.

Sebagai kaum marginal yang terpental, mereka menjadi para korban pembangunan, *the victims of the victimized*. Padahal, menurut cendekiawan Nurcholish Madjid, merekalah mayoritas yang paling berkorban melawan penjajah sejak mereka datang ke bumi ini, dan di masa-masa merebut kemerdekaan dan mempertahankannya. Mereka adalah

batu sudut bangunan Republik kita yang dilupakan oleh para pembangunnya sendiri (the corner stone of the house neglected by the builders). Karena itu, mereka tumbuh dengan gumpalan rasa kecewa yang membara, yang sewaktu-waktu dapat meledak dalam tindakan-tindakan kekerasan. (Nurcholish Madjid, Kompas, 5-6 Oktober 2001).

Karena itu, pemberantasan KKN, pelaksanaan supremasi hukum dan HAM, merupakan kunci bagi terwujudnya stabilitas, keamanan dan *good governance*, untuk mewujudkan agenda reformasi total pasca rezim Soeharto. Dalam konteks ini, bom di Bali adalah refleksi dari kompleksitas ketidakadilan, kekerasan dan terorisme (lokal maupun global) yang harus dihadapi dan diatasi oleh para pemimpin dan presiden era reformasi dewasa ini bersama kabinetnya, guna mengakhiri kejahatan dehumanisasi.

Fundamentalisme, Terorisme dan Barat

Dalam batas-batas tertentu, kunjungan Menteri Luar Negeri AS Condoleezza Rice dan Perdana Menteri Inggris Tony Blair ke Jakarta beberapa tahun lalu, merupakan langkah diplomatik dan upaya historis untuk memperbaiki relasi Islam-Barat yang menegang pasca serangan AS/Barat ke Irak dan Afghanistan.

Serangan itu sendiri dilancarkan oleh AS/Barat menyusul serangan teroris yang menghancurkan WTC New York (11/9/2001), yang telah menjadi mimpi buruk (nightmare*)* bagi masyarakat Amerika Serikat/Barat. Peristiwa *Black September* itu, yang dijadikan alasan oleh Amerika Serikat/ Barat untuk menyerang apa yang mereka sebut sebagai ”negeri pendukung teroris” jaringan Osama Bin Laden,

seperti Afghanistan dan Irak, telah membangkitkan reaksi fundamentalisme Islam di pelbagai belahan bumi.

Apalagi di Dunia Islam, meminjam perspektif Fareed Zakaria (*the Future of Freedom*, 2003), kepercayaan yang *rigid*, doktriner dan puritan yang dikendalikan oleh para teokrat picik dan pemimpin komunitas religius fanatik, relatif mapan dan berpengaruh. Sehingga serangan kekuatan adidaya internasional AS/Inggris dan sekutunya ke Afghanistan dan Irak itu, memicu bangkitnya aksi terorisme transnasional yang dilakukan para teroris dengan klaim ″jihad Islam.″ Dan dengan pedih kita menyaksikan, dunia terjerembab ke dalam spiral kekerasan pada tahun-tahun berikutnya oleh aksi teroris ″fundamentalisme Islam″ seperti Bom Bali, Bom Irak, Bom Madrid, Bom London, Bom Mesir, dan seterusnya.

Situasi keruh dan karut-marut ini semakin mendorong para Islamolog, ahli strategi dan pakar terorisme untuk memfokuskan studi Fundamentalisme Islam sebagai salah satu kajian epistemologis terpenting di Barat pada awal milineum ketiga ini.

Salah satu tantangan bagi AS/Barat dan kaum Muslim moderat di Dunia Islam dewasa ini adalah tumbuh suburnya fundamentalisme Islam (Islam radikal) yang tidak segan-segan menggunakan cara-cara kekerasan dalam melampiaskan perasaan dan kepentingan mereka atas nama Tuhan sebagai sandaran bagi legitimasi tindakan. Dalam kaitan ini, Charles Kimbal, sebagaimana dikutip Suratno, mengungkapkan terdapat lima situasi, dimana agama (Islam, Kristen, Hindu, Sinto) sangat berpotensi untuk berintegrasi dengan tindak-tindak kekerasan, termasuk

terorisme dan fundamentalisme.[3]

Pertama, ketika agama mengklaim kebenaran agama sebagai kebenaran yang mutlak dan satu-satunya. Sebagai bukti, Kimbal mencontohkan suatu kasus tentang klaim kebenaran di kalangan Kristen Fundamentalis. Pada tanggal 10 Maret 1993 Michael Griffin menembak dan membunuh David Gunn yang menangani aborsi di luar klinik aborsi di Pensacola, Florida. Lima hari kemudian, pendeta Paul Hill muncul di acara televisi Donahue dan membenarkan tindakan Griffin. Kimbal sendiri mengakui bahwa klaim kebenaran adalah unsur utama dalam setiap agama, tetapi hal itu memunculkan beragam penafsiran. Ketika penafsiran dipahami secara kaku dan tanpa kritik, sebagai kebenaran mutlak, maka bisa mendorong pemeluknya untuk bersikap tidak hanya defensif dan tetapi juga ofensif, termasuk menghalalkan cara-cara kekerasan.

Kedua, agama bisa melahirkan tindak kekerasan ketika dibarengi dengan ketaatan secara membabi buta kepada pemimpin agama. Kimbal mengemukakan sejumlah fakta tentang hal ini. Misalnya, gerakan People Temple pimpinan Jim Jones yang melakukan bunuh diri massal dengan cara meminum racun mematikan (sianida) di Guyana pada tahun 1970-an, sekte Aum Shinrikyo di bawah pimpinan Asahara Shoko yang menyebarkan gas mematikan di stasiun kereta bawah tanah di Jepang tahun 1990-an dan gerakan Davidian Branch pimpinan David Koresh yang melakukan bunuh diri massal dengan cara membakar diri di Texas Amerika Serikat (AS) tahun 1990-an. Uniknya, menurut Kimbal, gerakan

---

[3] Suratno, "Agama, Kekerasan dan Filsafat," *Jurnal Falsafah dan Agama*, Universitas Paramadina, No.1, April 2007. Lihat juga, Charles Kimball, *Kala Agama Menjadi Bencana* (terj. Nurhadi) (Bandung: PT Mizan Pustaka Agama, 2003).

mereka pada awalnya justru merupakan gerakan pembebasan rakyat dari kejahatan sosial, kemudian menarik dan mengisolasi diri serta membentuk satu komunitas bersama. Lalu, mereka mengklaim bahwa merekalah yang bisa diselamatkan dan keselamatan ini hanya bisa dicapai dengan ketaatan (buta) kepada sang pemimpin.

Ketiga, agama juga menurut Kimbal bisa berintegrasi dengan kekerasan ketika umatnya mulai merindukan zaman ideal mereka di masa lalu dan bertekad merealisasikannya pada masa sekarang. Kimbal memberi contoh ide negara (agama) Yahudi seperti dicetuskan oleh Rabbi Mei Kahane yang berakibat terusirnya warga Rabdu dari daerah Judea dan Samaria.

Keempat, agama bisa berintegrasi dengan kekerasan ketika tujuan tertentu menghalalkan segala cara. Tujuan ini, menurut Kimbal bisa dimotivasi karena berbagai hal seperti (a) karena mempertahankan tempat suci. Misalnya, makam tradisional Ibrahim di Hebron di Tepi Barat. Tempat itu disucikan oleh kaum Yahudi, Kristen dan Islam. Pada hari Purim 25 Februari 1994 seorang dokter Yahudi - Amerika memasuki masjid dan menembaki Muslim Palestina yang ada di dalamnya; (b) untuk melindungi ajaran agama yang dirasa sedang dalam bahaya. Misalnya, kasus pembubaran Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Parung beberapa waktu lalu oleh sekelompok orang yang menamakan Gerakan Umat Islam (GUI). GUI menilai kelompok JAI sebagai kelompok sesat dan menyesatkan sesuai fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sehingga harus dibubarkan (dengan cara apapun); (c) untuk mempertegas identitas kelompok dari dalam, dan; (d) untuk mempertegas indetitas

kelompok melawan orang luar.

Kelima, agama bisa berintegrasi dengan kekerasan ketika perang suci (holy war) sudah dipekikkan. Contoh tentang hal ini, menurut Kimbal, tidaklah terlalu sulit, misalnya Perang Salib, Perang Teluk, atau (propaganda) perang atas terorisme yang banyak memakan korban.

Berbekal pelegitimasian keyakinan agama, para radikalis dan fundamentalis melancarkan aksi mereka dengan kekerasan yang seringkali sangat keji. Abdul Muis Naharong mencatat bahwa kelompok–kelompok radikal ini suka berpendapat bahwa semua orang di luar kelompok mereka adalah orang murtad dan kafir. Pendapat ini dianut, oleh kelompok *Jamâ'at al-Takfîr wa 'l-Hijrah* di Mesir, yang dipimpin oleh Syukri Mustafa. Sedangkan yang lain berpendapat bahwa hanya penguasa saja yang murtad dan kafir, sedangkan rakyat atau masyarakat yang beragama Islam tidak. Oleh karena itu, menurut hukum Islam, orang atau penguasa yang sudah murtad harus dibunuh. Paham kedua ini dianut oleh kelompok Organisasi Jihad, yang dipimpin oleh 'Abd al-Salam Faraj. Ajaran Faraj dilaksanakan oleh salah seorang anggota kelompoknya dengan membunuh Presiden Anwar Sadat pada tahun 1981. [4]

Pembunuhan terhadap pejabat pemerintah dan intelektual, yang dilakukan oleh kelompok Islamis radikal, telah beberapa kali terjadi di Mesir dan Aljazair. Korban pembunuhan di Mesir oleh kelompok fundamentalis radikal, selain Presiden Anwar Sadat pada tahun 1981, juga Syekh

---

[4]. Abdul Muis Naharong, "Fundamentalisme Islam," *Jurnal Universitas Paramadina*, Vol. 4 No.1 Juli 2005. Lihat juga, Abdul Muis Naharong, "Terorisme atas Nama Agama," *Jurnal Refeksi,* UIN Jakarta, Vol. 13, No. 5, Oktober 2013.

Muhammad Husayn al-Dhahabi, mantan Menteri Waqf Mesir, pada tanggal 3 Juli 1977 dan Dr. Faraj Foda pada tanggal 8 Juni 1992. Dr. Foda adalah seorang pengusaha dan konsultan kaya yang sering menyerang pemikiran orang-orang fundamentalis di media massa. Dia dibunuh oleh anggota kelompok Organisasi Jihad Islam karena kritikannya yang tajam dan pedas terhadap kelompok-kelompok fundamentalis dan pimpinan mereka.[5] Sedangkan Dr. Nasr Hamid Abu Zayd, seorang dosen di Universitas Cairo, yang dinyatakan telah murtad oleh pengadilan karena beberapa pendapatnya dianggap berten-tangan dengan Islam, berhasil melarikan diri bersama isterinya ke negeri Belanda pada tahun 1995. Di Aljazair, kelompok fundamentalis Islam radikal membunuh beberapa orang tokoh politik yang dianggap beraliran sekuler. [6]

Kelompok fundamentalisme Islam atau Islamis radikal (ekstrim) terbagi dalam dua kelompok. *Pertama*, kelompok yang bersifat nasional dan regional, yang bergerak dalam satu negara (nasional) dan beberapa negara (regional) tertentu. *Kedua*, kelompok yang bersifat transnasional atau supranasional, yang tidak terikat kepada negara tertentu. Kelompok ini dikenal pula dengan nama neofundamentalis, neoIslamis, dan jihadis. Kaum fundamentalisme Islam atau Islam radikal umumnya menganggap demokrasi sebagai sistim *kufr*. Berdasarkan prinsip ini, mereka mengharamkan mengambil dan menerapkan sistem demokrasi. [7]

---

[5] David Sagiv, *Fundamentalism and Intellectuals in Egypt* (*1973-1993)* (London: Frank Cass, 1995), h.73

[6] Abdul Muis Naharong, "Fundamentalisme Islam..."

[7] Abdul Muis Naharong, "Kekerasan dan Teror Suci," *Jurnal Universitas Paramadina*, Vol.1, No. 2, 2005.

Kelompok Islamis radikal (fundamentalisme Islam) nasional dan regional adalah mereka yang berusaha mendirikan negara Islam dengan menggunakan kekerasan, termasuk menghilangkan nyawa manusia, kalau perlu. Bagi kelompok ini, syarat pertama untuk mencapai tujuan adalah menjatuhkan secara paksa penguasa suatu negara (nasional) atau beberapa negara (regional), mengambilalih kekuasaan dan kemudian mendirikan negara Islam. Kelompok Islamis radikal juga menggunakan konsep *takfîr* yaitu mengafirkan semua orang Islam di luar kelompok mereka, dan menghalalkan darah dan harta benda mereka. Berdasarkan ajaran-ajaran tersebut, kelompok ini juga dikenal dengan nama *Khawârij al-judud* (*neo-Khawârij*). [8]

Adapun Islamis radikal (fundamentalisme Islam) transnasional atau supranational adalah kelompok Islamis yang lebih memusatkan perhatian dan kegiatannya dalam memerangi pemerintah yang selalu menekan dan hendak memberantas gerakan Islam di negaranya. Khususnya, kelompok ini memusatkan usahanya dalam berperang melawan Barat, terutama AS, yang dipandang hendak menghancurkan Islam atau negara yang berpenduduk Muslim, meskipun mereka juga bertujuan mendirikan *dawlah Islâmîyyah*. Seperti halnya dengan Islamis radikal nasional/regional, kelompok ini juga tidak segan-segan menggunakan kekerasan dan, kalau perlu, membunuh orang dalam usaha mencapai tujuannya. Anggota kelompok Islamis radikal transnasional tersebar di seluruh dunia, dan

---

[8] Abdul Muis Naharong, Fundamentalisme Islam...". Lihat juga, Abdel Azim *Ramadan*, "*Fundamentalist Influence in Egypt: The Strategies of the Muslim Brotherhood and the Takfir Groups*," dalam *Fundamentalist Influence in Egypt: The Strategies of the Muslim Brotherhood and the Takfir Groups* (Chicago: University of Chicago Press, *1993).*

pada umumnya menggunakan dua bahasa (Inggris dan Arab) dalam berkomunikasi. Mereka berasal dari berbagai negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Mereka direkrut dari berbagai kelompok Islamis, seperti *al-Qaeda*, *Ikhwân al-Muslimîn, Salafi, Jamaah Tabligh, Jamaah Islamiyah, Jama'at-i Islami*, dan lain-lain.

Islamisme Global

Doktrin George W. Bush dan kubu neokonservatif (*hawkish)* di Gedung Putih yang telah lazim disebut "imperialisme demokratik" seakan menemukan 'tantangan baru' dengan kemenangan Islamisme dalam pemilu demokratis di Dunia Islam, seperti Hamas di Palestina, Refah di Turki dan seterusnya. Namun celakanya seperti dalam kasus Hamas, kemenangan kelompok Islam fundamental ini justru mengundang kegusaran dan kemarahan AS maupun Israel. Dalam kasus Hamas, meminjam bahasa Fareed Zakaria (2006), AS menggunakan standar ganda dalam agenda 'imperialisme demokratiknya' yakni menolak atau menegasikan kemenangan kelompok Islamisme yang dianggapnya hanya akan memunculkan kekuasaan para fundamentalis Islam, semacam *mullah ala Iran* atau *teokrat ala* Taliban. Setidaknya fakta inilah yang menjadi momok bagi AS/Barat

Di negara-negara Muslim, kemenangan Islam politik (baca: Islamisme) dalam pemilu sebenarnya merupakan suatu pengalaman dan perkembangan baru. Kemenangan elektoral Hamas di Palestina yang mengejutkan AS/Barat belum lama ini, seperti halnya kemenangan Refah di Turki dan FIS di Aljazair tempo hari, semestinya membuka mata-hati

AS/Barat tentang betapa signifikannya saling pengertian dan pemahaman antara para pemimpin AS/Barat dan tokoh Islamisme di Dunia Muslim dalam mempraktikkan demokrasi agar tidak terjadi lagi pertikaian panjang yang menyesatkan dan merugikan. Dalam konteks Palestina, penyusunan skenario oleh AS dan Israel untuk menggulingkan Hamas hampir pasti kontraproduktif dan meningkatkan resonansi politik anti-Barat di Dunia Islam [9]

Fakta historis memperlihatkan bahwa di Palestina, Hamas memenangkan pemilihan umum, di Turki Refah masih berjaya dan di Libanon Hizbullah terus berkembang, juga di Iran dan Irak politik Syiah terus menguat. Sementara di kawasan Asia Tengah (Uzbekistan, Kirgyztan, Kazakhtan dan Tajikistan) gerakan Hizbut Tahrir memperoleh dukungan rakyat yang meyakinkan. Hizbut Tahrir berkem-bang di kawasan itu karena tidak ada kelompok oposisi yang efektif. Situasi ini, meminjam studi Cornell and Spector, (*Central Asia: More Than Islamic Extremists*, 2002) dimanfaatkan Hizbut Tahrir dengan memperlihatkan dirinya sebagai satu-satunya kelompok oposisi terhadap elite penguasa. Tiadanya kekuatan oposisi sekuler di Asia Tengah telah mendorong Hizbut Tahrir menjadi *political vehicle* yang *reasonable*, apalagi mereka memiliki kemampuan berorganisasi yang baik dan memperoleh sumbangan dana dari negara-negara Timur Tengah untuk mengembangkan kegiatan politiknya. [10]

Dalam konteks ini, harus diakui bahwa Islamisme telah berhasil mempengaruhi ruang privat maupun publik di

[9] Lihat laporan *New York Times* (14/2/2005)
[10] Abdul Muis Naharong, "Fundamentalisme Islam..."

tengah gejolak modernisme dan sekulerisme yang masiv di Dunia Islam. Setidaknya dalam beberapa dekade terakhir, Islamisme mampu mewarnai kehidupan sosial, budaya dan politik di berbagai negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Pengaruh Islamisme itu bisa dilihat dari maraknya penampilan busana dan jilbab muslimah sampai pemberlakuan syariat Islam, yang mau tak mau mendorong pemerintahan di Dunia Islam mengakomodasikan tuntutan kaum Islamis.

Relevansi Multikulturalisme

Berbagai kemenangan Islamisme dalam pemilu demokratis di kawasan-kawasan Muslim hendaknya membuka mata batin AS/Barat bahwa Islam *compatible* dengan demokrasi dan ada kesempatan besar untuk mencari solusi bersama guna mewujudkan tatanan dunia yang demokratis, damai dan toleran. Kami sependapat dengan Prof. R. William Liddle (Ohio State University, AS) bahwa masalahnya bukanlah benturan peradaban, melainkan konflik kepentingan yang selama ini mewarnai relasi Islam dan AS/Barat. Karena itu, AS/Barat harus menaruh kepercayaan kepada kaum Islamis bahwa merekapun bisa berkiprah secara terhormat dan beradab dalam kehidupan demokratis, dan sebaliknya para Islamis juga seyogianya tidak mencurigai AS/Barat sebagai kekuatan (teroris) adidaya yang selalu bernafsu mendominasi, menghegemoni dan menundukkan Dunia Islam.

Kaum Islamis di Hamas, Refah, Hizbullah, Syiah dan Hizbut Tahrir serta organisasi sejenis di berbagai negara Muslim, harus dipandang oleh AS/Barat sebagai 'mitra strategis'

untuk memungkinkan AS/Barat mengajukan tawaran baru dan insentif guna menciptakan suatu wawasan baru yang memungkinnya terwujudnya tatanan dunia yang demokratis, damai dan toleran itu dalam batas-batas kemampuan dan sumberdaya yang ada.

Dalam konteks itu, ada kesadaran baru di kalangan pemimpin, intelektual dan elite AS/Barat tentang pentingnya dialog peradaban, demokratisasi, pluralisme dan multikulturalisme di kalangan bangsa-bangsa Muslim dan Barat agar peristiwa WTC yang mengerikan itu tidak terulang kembali. Pada aras ini, kunjungan Menteri Luar Negeri AS Condoleezza Rice dan Perdana Menteri Inggris Tony Blair ke Jakarta Maret lalu, boleh jadi memiliki ”makna mendalam” bagi relasi Islam-Barat ke depan. Kunjungan itu menjadi perhatian masyarakat politik di Dunia Islam. Condi Rice dan Blair menggarisbawahi keberhasilan demokratisasi di Indonesia yang terus memajukan moderasi dan membangun toleransi antar-umat beragama, ras dan etnis.

Kedua pemimpin Barat itu juga menyatakan Indonesia merupakan inspirasi bagi dunia yang berjuang menjaga pluralisme (keberagaman) dan membangun demokrasi. Namun demikian, masih ada kekhawatiran di Indonesia tentang Doktrin 'Imperialisme Demokratik' Presiden Gorge W. Bush yang menekankan unilateralisme dan kekuatan militer, ekonomi dan kultural untuk menghegemoni kawasan Islam. Hampir pasti, doktrin Bush ini mengundang resistensi masyarakat Dunia Islam yang belum sepenuhnya menerima pluralisme dan multikulturalisme.

Dalam hal ini, sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia berupaya mendayagunakan pengaruh

(*soft power*-nya) agar para petinggi AS/Barat mau berdialog dan berunding dengan para tokoh Islamisme seperti Hamas, Refah, Syiah, Hizbullah, Hizbut Tahrir dan sebagainya, untuk mencapai tujuan dan cita-cita bersama bagi peradaban dunia yang lebih baik, adil dan toleran.

Dalam hal ini, bangsa Indonesia di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mencoba meyakinkan Menlu AS Condi Rice dan PM Inggris Blair agar para pemimpin AS/Barat dan tokoh-tokoh Islamisme di negara-negara Muslim mau berdialog dan menggunakan pendekatan multikulturalisme baru untuk maju bertemu di tengah jalan yang 'belum sepenuhnya buntu'. Bahwa benturan peradaban antara Dunia Islam dan Barat itu sesungguhnya hanya *self-fulfilling prophecy* AS/Barat saja.

Multikulturalisme baru itu adalah suatu pendekatan yang menawarkan perspektif kebudayaan dan agama dalam memahami perbedaan-perbedaan yang ada selama ini. Selain itu, multikulturalisme itu bukanlah cara pandang yang menyamakan kebenaran agama-agama, melainkan justru mendorong pihak-pihak yang berbeda untuk saling menghormati perbedaan dan kebhinekaan bukan karena pengakuan terhadap kebenaran agama dan keyakinan mereka, tetapi karena masing-masing pihak harus menghormati nilai dan tradisi pihak lain dalam kehidupan sosial, politik dan keagamaan.

Pendekatan multikulturalisme ini relevan bagi upaya membangun dialog antara para pemimpin AS/Barat dan para tokoh Islamisme di negara-negara Muslim, - untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan yang terbuka di era demokratisasi dewasa ini -, agar tidak terjadi salah pengertian

dari masing-masing pihak. Sudah terlalu sering kedua belah pihak berbenturan akibat salah pengertian dan salah paham serta konflik kepentingan yang tak berkesudahan.

Kita berharap, kedua belah pihak menyadari bahwa di era globalisasi demokrasi dewasa ini, masyarakat dunia lebih membutuhkan dialog, kerjasama, saling pengertian dan pemahaman ketimbang konflik dan perseteruan yang berdampak multiplikasi, menghabiskan sumberdaya, dan menggoncangkan. Kita telah melihat bahwa perang AS terhadap Irak dan Afghanistan relatif cepat diselesaikan, namun perdamaian acapkali jauh lebih sulit diwujudkan sesudah perang itu diakhiri. Sejarah sudah menunjukkan kenyataan pahit ini. *Wallahualambishawab*.

Abu Sayyaf dan Muslim Moro di Filipina Selatan: Konflik dan Teror yang Panjang[1]

Kaum Muslim Moro di Filipina Selatan seakan ditakdirkan untuk terus terlibat konflik dan peperangan dengan penguasa sepanjang zaman: dari era kolonial sampai sekarang.

Para akademisi dan peneliti mencatat bahwa perjuangan Muslim Moro untuk mendapatkan tempat dan posisi tawar yang lebih baik di hadapan penguasa kolonial asing (Spanyol dan AS) maupun Filipina tidak pernah meraih capaian yang optimal.[2]

---

[1] Risalah ini ditulis oleh Herdi Sahrasad bersama Adhe Nuansa Wibisono MA, alumnus Fisip UGM dan UI, Depok serta pengajar Universitas Al Azhar Jakarta. Filipina adalah negara kepulauan dengan 7.107 pulau, dengan jumlah penduduk sekitar 60 juta jiwa, menggunakan 87 dialek bahasa yang berbeda-beda yang mencerminkan banyaknya suku dan komunitas etnis. Orang-orang Islam di Philipina menamakan dirinya "Moro". Namun nama ini sebenarnya bersifat politis, karena dalam kenyataannya Moro terdiri dari banyak kelompok etno linguistik, umpamanya Maranow, Maquindanau, Tausuq, Somal, Yakan, Ira Nun, Jamampun, Badjao, Kalibugan, Kalagan dan Sangil.

[2] Lihat, Zachary Abuza, *Balik-Terrorism: The Return of the Abu Sayyaf* (California: University of California Libraries, 2005); Garrett Atkinson, "Abu Sayyaf: The Father of the Swordsman, A review of the rise of Islamic insurgency in the southern Philippines," *Perspective Journal of American Security Project*, March 2012; Rommel C. Banlaoi, "Al Harakatul Al Islamiyah: Essays On the Abu Sayyaf

Sejak masa kolonialisme Spanyol, yang masuk ke Filipina pada tanggal 16 Maret 1521, perlawanan kaum Moro terhadap kolonialisme Barat, tak kunjung padam. Kaum kolonial Spanyol berupaya melakukan taktik dan strategi pecah belah untuk menjinakkan Muslim Moro setelah Muslim Moro atau Bangsa Moro tidak berhasil mereka kalahkan. Spanyol tak mampu mengalahkan dan menguasai kaum Moro di Filipina Selatan dengan peperangan. Mereka kemudian menerapkan politik *devide and rule* (pecah belah dan kuasai) dan sekalipun gagal menundukkan Mindanao dan Sulu, Spanyol tetap menganggap kedua wilayah tersebut merupakan bagian dari teritorialnya.

Secara tidak sah dan tak bermoral Spanyol kemudian menjual Filipina kepada Amerika Serikat seharga US$ 20 juta pada tahun 1898 melalui traktat Paris. Demikian juga dengan AS, yang walaupun pada mulanya kedatangan mereka menampilkan diri sebagai sahabat baik dan dapat dipercaya, namun toh akhirnya pada kurun waktu 1898-1902, AS telah menggunakan waktu tersebut untuk membebaskan tanah serta hutan di wilayah Filipina Selatan untuk keperluan ekspansi para kapitalis. Bahkan periode 1903-1913 dihabiskan AS untuk memerangi berbagai kelompok perlawanan Muslim Moro.

Group," *essay*, Philippine Institute for Political Violence and Terrorisme Research, 2008; Soliman M. Santos, etc, "Primed And Purposeful Armed Groups And Human Security Efforts In The Philippines", *South-South Network for Non-State Armed Group Engagement and the Small Arms Survey*, 2010; Diana Rosnida, *Peranan Indonesia dalam Usaha Perjanjian Damai antara Pemerintah Filipina dengan MNLF,* FISIP Univ. Jember, 1997; Ririn Yuliawati A., *Konflik Kebudayaan antara Masyarakat Muslim dan Masyarakat Kristen di Filipina Selatan*, FISIP Univ. Jember, 1997; Lihat, Chosnol Chotimah, *Revolusi Rakyat Filipina dan Keruntuhan Rezim Marcos*, FISIP Universitas Jember, 1990; Cesar Adib Majul, "The Moros of The Philippines," *Conflict,* Vol. 8, No. 2/3 1988 (Crane, Russak and Company Inc, London, 1988).

Bangsa Moro terus melawan pendudukan asing itu dan konflik di Filipina terus berlanjut, setelah Spanyol berkuasa kemudian beralih kepada Amerika, Jepang dan sampai Filipina memproklamasikan dirinya sebagai Negara yang merdeka pada tanggal 4 Juli 1946.

Masa pra-kemerdekaan ditandai dengan masa peralihan kekuasaan dari penjajah AS ke pemerintah Filipina di Utara. Untuk menggabungkan ekonomi Filipina Selatan ke dalam sistem kapitalis, diberlakukanlah hukum-hukum tanah warisan jajahan AS yang sangat kapitalistis. Pada intinya ketentuan tentang hukum tanah ini merupakan legalisasi penyitaan tanah-tanah kaum muslim (tanah adat dan ulayat) oleh pemerintah AS dan pemerintah Filipina di Utara yang menguntungkan para kapitalis.

Pada masa pasca kemerdekaan pun masyarakat Muslim Moro selalu mendapat tekanan penguasa. Pada masa pemerintahan Marcus, konflik awal terjadi akibat suatu peristiwa pembunuhan di Corregidor. Para sukarelawan Muslim Filipina, yang dilatih dalam taktik geriliya oleh suatu pasukan resmi, dibunuh atas perintah komandan pasukan. Mereka menolak di kirim ke Sabah guna melakukan infiltrasi Militer.

Kekecewaan Muslim Moro terhadap kolonialisme dan penindasan internal dalam negeri, mendorong lahirnya Front Pembebasan Muslim Moro (MNLF).

MNLF adalah sebuah gerakan yang sangat berpengaruh dalam memperjangkan kebebasan Muslim Moro. Dua kelompok lainnya adalah seperti Front Pembebasan Islam Moro (MILF) dan yang paling belakangan adalah Abu Sayyaf yang terbentuk pada tahun 1989. Ketiga kelompok

gerakan ini memiliki tujuan yang sama yakni ingin mendirikan sebuah Negara Teokrasi Islam di Mindanao Filipina Selatan dan melakukan pembangunan ekonomi oleh mereka sendiri di wilayah Filipina selatan ini.

Setelah kejatuhan Marcos dari tampuk kekuasaan di Filipina dan naiknya Corazon Aquino sebagai Presiden, maka kebijakan Pemerintah Filipina terhadap Muslim Moro pun mulai bergeser. Corazon Aquino menjanjikan untuk memberi peluang otonomi bagi mereka selama tidak ada usaha untuk memisahkan diri dari Republik Filipina.

Kemudian diadakanlah negosiasi-negosiasi dan pembahasan syarat-syarat otonomi bagi Muslim Moro yang ditetapkan dalam konstitusi baru dan diratifikasi pada awal tahun 1987.

Namun usaha Pemerintahan Corazon Aquino untuk mengajak faksi-faksi terbesar dalam masyarakat Muslim Moro menemui kegagalan, dan kemudian hanya bisa mengajak Nur Misuari dengan Moro National Liberation Front (MNLF).

Sejak MNLF bisa dirangkul dan diajak kerja sama oleh Pemerintah Filipina pada perundingan di Tripoli, Libya pada bulan Desember 1977 yang kemudian menghasilkan *Tripoli Agreement*, maka sejak itu simpati masyarakat Muslim Moro serta dukungan internasional terutama dari dunia Islam terhadap MNLF berangsur-angsur mulai pudar.

Walaupun pada mulanya Organisasi Konferensi Islam (OKI) pada bulan Juli 1975 memberi pengakuan formal bagi MNLF, namun OKI pada perkembangannya kemudian juga nampak surut. Bahkan Libya yang menjadi tuan rumah dalam perundingan tersebut akhirnya kehabisan antusias-

me. Dan memang pada akhirnya Pemerintah Filipina, melalui Juru Bicara Kementerian Luar Negerinya pada bulan Maret 1980, mengeluarkan pernyataan bahwa Tripoli Agreement sebagai *null and void* (batal).

Kemacetan Tripoli Agreement itu kemudian mempunyai dampak yang sangat luas. Pada bulan Maret 1984, Salamat Hashim yang mantan anggota Pimpinan Pusat MNLF sekaligus Ketua Komite Hubungan Luar Negeri MNLF mendirikan Moro Islamic Liberation Front (MILF), setelah melihat sudah tidak ada lagi harapan untuk mengikuti kepemimpinan kepemimpinan Nur Misuari ataupun untuk mengadakan rekonsiliasi dengan faksi Nur Misuari.

Kronologi pemisahan kelompok Salamat Hasyim ini sesungguhnya sudah bermula sejak Desember 1977, pada saat itu Komite Pusat MNLF mengambil kebijaksanaan, yakni menuntut Nur Misuari mundur dari kursi kepemimpinan. Bersamaan dengan itu, mereka meminta Salamat Hasyim menggantikannya. Keputusan itu didukung oleh Komite Militer dan Sipil gerakan tersebut. Mereka menulis surat permohonan agar Nur Misuari mengundurkan diri.

Namun Nur Misuari tidak mau menyerahkan kepemimpinan tersebut kepada Salamat Hasyim. Peristiwa itu menyebabkan gerakan ini terpecah menjadi dua, yaitu kelompok yang mendukung Salamat Hasyim, dan kelompok yang masih setia dengan Nur Misuari. Pada puncaknya kelompok yang mendukung Salamat Hasyim pada bulan Maret 1984 resmi mendirikan gerakan sendiri dengan menggunakan label Islam sebagai identitas perjuangan mereka sekaligus sebagai pembeda dengan gerakan yang dipimpin Nur Misuari.

Dari sinilah kemudian ada penggembosan kekuatan MNLF. Sebagai perbandingan, MNLF sampai 2012 diperkirakan hanya mempunyai kurang lebih 15.000 personil saja, itu belum dihitung dengan mereka yang menyeberang atau pun yang menyerah dan gugur. Lebih parah lagi kemudian faksi Abu Sayyaf pimpinan Abdul Razak Janjalani juga memisahkan diri dengan MNLF pada tahun 1993.

Padahal faksi ini secara ideologis sangatlah dekat dengan MILF, yang konvergensi seperti ini sangatlah mungkin menyatukan mereka. Seperti diketahui MILF sekarang ini menjadi kekuatan militer terbesar, terkuat dan paling rapi dalam masyarakat Muslim Moro yang anggotanya sekitar 60.000 personil yang menyebar di seluruh provinsi muslim. Bahkan dilaporkan bahwa kekuatan milisia mereka mencapai 120.000 orang, mereka sendiri mengklaim mampu berjuang selama lebih dari 4000 tahun dan mempunyai pabrik senjata sendiri yang antara lain mampu memproduksi mortir 60 mm, 81 mm, pistol RPG 2 kaliber 45 dan 90 RR.

Kebijakan Pemerintah Filipina selanjutnya, setelah naiknya Jenderal Fidel Ramos sebagai presiden pada tahun 1992, memberi peluang bagi Nur Misuari untuk membangun harapan dan memperbaiki citranya yang hancur. Tidak seperti pendahulunya, Presiden Ramos adalah ahli dalam strategi militer dan mumpuni dalam bidang psikologi massa. Dia mempunyai program untuk membangun Filipina sebagai macan ekonomi di antara para tetangganya. Untuk mencapai hal tersebut, tentu dibutuhkan stabilitas di wilayah selatan. Untuk itulah Presiden Ramos merangkul Nur Misuari, yang dipandangnya sangat berguna sebagai

tameng yang efektif untuk menghadapi konflik-konflik di selatan. Sehingga posisi MILF tak ubahnya seperti HAMAS di Palestina yang sesungguhnya memiliki dukungan luas dari masyarakatnya sendiri, namun dengan kondisi makro subyektif yang sudah sangat tidak memihak pada Jihad Islam, bahkan dari dunia Islam itu sendiri, maka PLO di Palestina dan MNLF di Filipinalah yang lebih dikenal di dunia internasional sebagai simbol perjuangan masing-masing dari kedua kawasan tersebut.

MILF sendiri mendudukkan al-Quran dan Hadist sebagai sumber utama referensinya. Orientasi ideologis dan program-programnya dijalankan berdasarkan tuntunan-tuntunan Islam, yang bertujuan menegakkan masyarakat Islami atau lebih tegas lagi untuk menegakkan implementasi yang gradual terhadap syariat Islam.

Dalam menghadapi kebijakan pemerintah Filipina yang tidak pernah ada tanda-tanda untuk memberi kemerdekaan kepada Muslim Moro untuk berdaulat dan menerapkan syariat Islam, MILF menggali kembali konsep-konsep Islam yang mengatur perjuangan penegakan syariat Islam. Dari sini mereka mendapat kesimpulan bahwa satu-satunya cara adalah dengan apa yang dinamakan Jihad.

Pengambilan keputusan untuk menerapkan Jihad -dalam pengertian perjuangan bersenjata terhadap pemerintah Filipina, serta sejauh mana konsistensi perjuangan bersenjata mereka tersebut terhadap syariat perang yang dituntunkan oleh al-Quran dan hadist yang menjadi sumber utama referensi mereka, masih menjadi tanda tanya.

Kemunculan Abu Sayyaf

Dalam konteks pergolakan di Filipina Selatan ini, Kelompok Abu Sayyaf pertama kali muncul pada tahun 1989 dibawah kepemimpinan Abdurajak Janjalani, ia pernah menempuh jenjang pendidikan di Universitas Ummul Qura di Mekkah selama 3 tahun. Ia kemudian kembali ke Basilan dan Zamboanga Filipina untuk memulai berdakwah pada tahun 1984.

Abu Sayyaf adalah suatu gerakan yang bersifat radikal, dimana gerakan ini selalu mengunakan kekerasan dalam setiap aksinya. Gerakan Abu Sayyaf di Filipina ini telah sangat meresahkan warga Filipina dengan aksi-aksi pengeboman, penculikan dan pengeksekusian terhadap sandera. Gerakan Abu Sayyaf ini telah mengarah ke taraf terorisme.

Kelompok Abu Sayyaf, juga dikenal sebagai Al-Harakat Al-Islamiyya, adalah sebuah kelompok separatis yang terdiri dari milisi Islam yang berbasis di sekitar kepulauan selatan Filipina, antara lain Jolo, Basilan, dan Mindanao.

Khadaffi Janjalani dinamakan sebagai pemimpin kelompok ini oleh Angkatan Bersenjata Filipina. Abu Sayyaf adalah bahasa Arab untuk Pemegang (Abu) Pedang (Sayyaf). Khadaffi Janjalani pun harus berebut kekuasaan dengan tokoh besar lain seperti Abu Sabaya dan Galib Andang yang terkenal dengan nama Komandan Robot.

Abu Sayyaf adalah salah satu kelompok separatis terkecil dan kemungkinan paling berbahaya di Mindanao. Beberapa anggotanya pernah belajar atau bekerja di Arab Saudi dan mengembangkan hubungan dengan mujahidin ketika bertempur dan berlatih di Afganistan dan Pakistan.

Abu Sayyaf merupakan kelompok separatis yang ingin mendirikan negara Islam di sebelah Selatan Filipina, yang sebagian besar dihuni oleh etnis Muslim Moro. Anggota Abu Sayyaf percaya mereka harus meneruskan perjuangan leluhur bangsa Moro untuk membentuk negara Islam di Asia Tenggara. Abu Sayyaf dianggap lebih radikal dari MNLF karena kerap melakukan tindak kekerasan seperti pembunuhan, serangan bersenjata, pengeboman, dan melakukan eksekusi pemenggalan kepala.

Ironisnya, kelompok Abu Sayyaf mulai dikenal dunia pada pertengahan dekade 1990-an ketika gagal melakukan dua misi besarnya, yaitu menyerang 12 pesawat komersil milik Amerika Serikat dan membunuh Paus John Paul II. Diperkirakan Abu Sayyaf memiliki 2.000 pendukung dan sekitar 200 hingga 500 anggota utama yang datang dari kalangan akademisi

Dilaporkan bahwa akhir-akhir ini mereka sedang memperluaskan jaringannya ke Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Kelompok ini bertanggung jawab terhadap aksi-aksi pengeboman, pembunuhan, penculikan, dan pemerasan dalam upaya mendirikan negara Muslim di sebelah barat Mindanao dan Kepulauan Sulu serta menciptakan suasana yang kondusif bagi terciptanya negara besar yang Pan-Islami di Semenanjung Melayu (Indonesia dan Malaysia) di Asia Tenggara.

Pada 1987 Abdurajak Janjalani, mengunjungi Libya dan kemudian melanjutkan bersama Mujahiddin dan melawan Soviet selama beberapa tahun di Afghanistan. Abu Sayyaf telah memiliki hubungan dengan sebuah gerakan fundamentalis Islam, Al-Islamic Tabligh, di tahun 1980. Kelompok

di bawah pimpinan Janjalani sedang menjalankan sebuah pembentukan negara Islamic Theocratic State of Mindanao (MIS), dan memasukan sebuah kepercayaan agama yang meneriakan intoleransi dengan tujuan untuk menyebarkan Islam melalui Jihad dan yang menjadi target sasarannya semua umat Kristen Filipina.

Dalam pencarian objeknya, Kelompok Abu Sayyaf telah menetapkan ideologinya dengan tegas dan agenda operasional yang telah mendalam terikat pada sebuah maksud usaha pengabungan yang memaksa dominasi Islam dunia melalui perlawanan bersenjata. Kelompok Abu Sayyaf sangatlah kecil dan merupakan kelompok separatis Islam yang sangat radikal di Filipina Selatan. Mereka menggunakan pemboman, pembunuhan, penculikan dan pemerasan untuk mengupayakan berdirinya sebuah negara Islam yang merdeka di Mindanao bagian Barat dan daerah Sulu, di mana daerah Filipina Selatan merupakan populasi tertinggi umat Muslim tinggal.

Abu Sayyaf dan Terorisme di Asia Tenggara

Jejak rekam berdirinya kelompok Abu Sayyaf, yang secara literal berarti “pembawa pedang” atau “ayah dari pedang”, tidak dapat dipisahkan dari sosok pendirinya Abdurajak Janjalani, anak dari tokoh ulama Basilan, yang pada tahun 1980-an bersama dengan ratusan orang militan Moro lainnya mengikuti kamp pelatihan militer Afghanistan, untuk bergabung dengan pasukan Mujahidin Afghanistan dalam melawan invansi dan pendudukan Uni Soviet.

Abdurajak Janjalani menempuh jenjang pendidikan di Universitas Islam di Arab Saudi, lulus pada tahun 1981,

kemudian mempelajari hukum fiqih Islam di Ummul Qura' di Mekkah selama 3 tahun. Ia kemudian kembali ke Basilan dan Zamboanga, Filipina untuk memulai berdakwah pada tahun 1984. [3]

Pada 1987, Abdurajak Janjalani melakukan perjalanan ke Libya dan kemudian bergabung dengan Mujahidin dan bertempur melawan Uni Soviet selama beberapa tahun di Afghanistan.

Di Peswahar, Pakistan, ia diperkirakan bertemu dengan penyandang dana Mujahidin dari Arab Saudi, Osama bin Laden. Abdulrajak Janjalani kemudian melakukan pelatihan militer pada akhir tahun 1980-an di kamp pelatihan militer di Khost, Afghanistan, yang dipimpin oleh seorang panglima militer Mujahidin dari faksi *Ittihad al Islamy*, Abdur Rab Rasul Sayyaf.

Nama kelompok "Abu Sayyaf" sendiri diperkirakan diambil dari nama alias Abdulrajak Janjalani yang memilih alias Abu Sayyaf untuk menghormati panglima militer Mujahidin tersebut. Selain itu juga Abdur Rab Rasul Sayyaf juga merupakan mentor dari jihadis Indonesia, Riduan Ishamuddin, yang dikenal sebagai Hambali, pimpinan Jamaah Islamiyah. Zachary Abuza (2005) menyebutkan bahwa Abdurajak Janjalani termasuk sebagai salah satu dari 48 orang yang termasuk ke dalam *Executive Council of The Islamic International Brigade*, orang-orang inti yang akan membentuk jaringan internasional al-Qaeda ke depannya. [4]

Pada tahun 1989, Abdurajak Janjalani melakukan rekrutmen dari para anggota MNLF yang merasa tidak mendapatkan

[3] Lihat, Zachary Abuza, *Balik-Terrorism*...
[4] Lihat, Zachary Abuza, *Balik-Terrorism*...

tempat atau tidak puas dengan kepemimpinan Nur Misuari. Para eksponen MNLF ini, termasuk Wahab Akbar, Amilhussin Jumaani dan Abdul Ashmad, memutuskan bergabung dengan Janjalani dan membentuk kelompok Abu Sayyaf. Menurut Abuza (2005), Intelijen Filipina ketika itu berasumsi bahwa tujuan pembentukan kelompok Abu Sayyaf saat itu adalah untuk mengintervensi dan menya-botase proses perdamaian yang tengah berlangsung antara pemerintah Filipina dengan MNLF dan kemudian tindakan itu dapat menurunkan kredibilitas para pimpinan MNLF.[5]

Asia Tenggara dianggap sebagai satu kawasan yang berpo-tensi menyimpan fenomena radikalisme dan teror-isme. Pemerintahan George W. Bush pernah menyatakan bahwa Asia Tenggara adalah "front kedua" dalam "perang mela-wan teror". [6]

Salah satu yang menyebabkan pandangan tersebut adalah keberadaan jaringan kelompok radikal, al-Qaeda, yang telah memperkuat jaringan regionalnya di kawasan Asia Teng-gara sejak tahun 1990-an, dengan menyebarkan ideologi transnasional dan anti-baratnya, yang diwakili oleh kebe-radaan kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yang berasal dari Indonesia. Kelompok ini bertujuan untuk mendirikan kekhalifahan atau negara Islam di kawasan Asia Tenggara, meliputi wilayah Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei dan Filipina. Serupa dengan kelompok al-Qaeda, kelompok JI juga bersifat transnasional dan bahkan pada akhir 1990-an mereka memiliki mantiqi (cabang) yang beroperasi aktif

---

[5] Lihat, Zachary Abuza, *Balik-Terrorism*...

[6] Adhe Nuansa Wibisono, "ASEAN dan Institusi Kontra Terorisme di Asia Tenggara," *makalah*, Kajian Terorisme dan Keamanan Internasional UI, 24 Desember 2013.

hingga di Australia.[7]

Di wilayah Filipina juga terdapat beberapa kelompok yang dianggap radikal di antaranya adalah *Moro Islamic Liberation Front* (MILF) dan kelompok Abu Sayyaf, kedua kelompok ini bertujuan untuk mendirikan negara Islam independen terutama di provinsi-provinsi dengan mayoritas penduduk muslim di Mindanao Selatan. Dikarenakan karakter perlawanan MILF untuk melakukan perang menuntut kemerdekaan di Mindanao Selatan, pemerintah telah mengadopsi pendekatan militer yang kuat dalam melawan MILF. Pada tahun 1990-an, MILF telah meluncurkan serangkaian serangan bersenjata di wilayah Filipina Selatan, yang mengakibatkan balasan serangan militer dari tentara Filipina.

Dalam konteks politik yang seperti inilah al-Qaeda dianggap telah memberikan dukungan ideologis, finansial dan operasional terhadap jaringan kelompok radikal seperti *Moro Islamic Liberation Front* (MILF) dan *Abu Sayyaf Group* (ASG) di Filipina, Jemaah Salafiyah (JS) di Thailand, Jemaah Islamiyah (JI) dan Laskar Jundullah di Indonesia, Kumpulan Mujahidin Malaysia (KMM) di Malaysia, *Arakan Rohingya Nationalist Organization* (ARNO) dan *Rohingya Solidarity Organisation* (RSO) di Myanmar dan Bangladesh. Selain kamp pelatihan militer yang terdapat di Afghanistan, al-Qaeda juga mengirim pelatih untuk membentuk atau melatih kamp pelatihan militer di Asia, Afrika dan Timur Tengah. Saat ini banyak kamp militer kecil yang bermunculan di sejumlah daerah-daerah konflik di kawasan tersebut sebagai kompensasi atas dikuasainya Afghanistan

[7] Zachary Abuza, "The Moro Islamic Liberation Front at 20: State of the Revolution," *Jurnal Studies in Conflict & Terrorism,* Vol. 28, No. 6, 2005, h.43-54.

oleh Amerika Serikat, yang dimana diaspora ini akan menghasilkan gelombang generasi ketiga dari Mujahidin.[8]

Sejak akhir 1980-an terdapat adanya indikasi yang jelas bahwa al-Qaeda secara ideologis telah melakukan penetrasi dan berhasil membangun basis operasi di Asia Tenggara. Pada tahun 1988, Mohammad Jamal Khalifa, saudara ipar dari Osama bin Laden telah mendirikan cabang di Manila, Filipina dari *International Islamic Relief Organization* (IIRO). Organisasi ini adalah lembaga sosial dari Arab Saudi yang memberikan bantuan kepada organisasi-organisasi Islam di Asia Tenggara, dan pada saat itu juga secara tidak langsung difungsikan sebagai pusat jaringan regional untuk al-Qaeda. Selain itu, pelaku pengeboman World Trade Center 1993, Ramzi Ahmed Yousef dan aktor intelektual peristiwa 9/11 Khalid Sheikh Mohammad melakukan perjalanan ke Asia Tenggara pada tahun 1994 untuk merencanakan operasi "Bojinka," yang di dalamnya termasuk pengeboman 12 maskapai penerbangan Amerika Serikat di atas Samudera Pasifik.

Demikian pula, dalam kamp militer Abu Bakar pimpinan MILF, instruktur militer asal Kuwait, Omar Al Farooq, mendirikan kamp militer Vietnam untuk melatih kelompok Asia Tenggara dalam melakukan perang gerilya dan aksi terorisme. Tujuan dari pelatihan kamp militer ini adalah untuk membentuk komitmen inti dalam operasi "pembebasan" kelompok muslim tertindas di bawah rezim pemerintahan yang didiukung AS di seluruh wilayah Asia

---

[8] Rohan Gunaratna, "Terrorism In Southeast Asia: Threat And Response," Center For Eurasian Policy Occasional Research Paper Series II (Islamism In Southeast Asia), No. 1, (Singapore : Hudson Institute, 2006), h. 1-2.

Tenggara.[9]

Melalui upaya infiltrasi yang konsisten, al-Qaeda berhasil mempengaruhi tujuan politik dari kelompok-kelompok separatis dan kelompok agama di Asia Tenggara untuk memenangkan pertempuran di level teritorial dan kemudian melancarkan jihad univesal ke seluruh dunia. Sebagai contoh, Jemaah Islamiyah cabang Singapura, yang dipimpin oleh Mas Selamat Kastari, telah merencanakan untuk membajak dan menabrakkan pesawat Aeroflot dari Bangkok, Thailand kepada bandar Udara Internasional Changi di Singapura. Menurut pernyataan Kastari, pilihan menggunakan maskapai penerbangan Rusia adalah untuk memberikan pelajaran kepada Moskow atas apa yang dilakukan kepada saudara-saudara Muslim di Chechnya. Demikian pula, serangan di Bali dan Hotel Marriot Jakarta yang ditujukan untuk menyebabkan kematian warga sipil secara massal.

Taktik seperti ini sebelumnya tidak dikenal oleh kelompok Asia Tenggara, dan merupakan contoh yang jelas dari metodologi yang diambil dari pengaruh al-Qaeda. Kemudian dampak paling kuat dari pengaruh al-Qaeda kepada kelompok-kelompok militan Asia Tenggara adalah adanya gagasan untuk melakukan perlawanan terhadap "musuh jauh" atau seperti yang dikatakan Osama bin Laden "kepala ular" yang ditujukan kepada Amerika Serikat. Imam Samudera, anggota JI dan salah satu perencana kunci dalam serangan Bom Bali, mengungkap selama interogasinya bahwa Australia secara khusus ditargetkan dalam serangan Bali dikarenakan dukungan langsung yang didapatkannya

[9] Rohan Gunaratna, "Terrorism In Southeast Asia..."

dari Amerika Serikat.[10]

Al-Qaeda kemudian menyerukan pembentukan *World Islamic Front for Jihad against the Jews and the Crusaders* pada bulan Februari 1998, menjadikan front perlawanan ini sebagai jalur koordinasi utama bagi kelompok-kelompok perlawanan Islam di seluruh dunia. Gagasan pembentukan front ini kemudian banyak mempengaruhi kelompok-kelompok militan di Asia tenggara yang mengadaptasi ideologi dan taktik militer al-Qaeda. Penyebaran gagasan akan ideologi pemersatu al-Qaeda ditandai oleh pembentukan organisasi tingkat kawasan yang memayungi kelompok-kelompok di Asia Tenggara yaitu, *Rhabitah Al Mujahidin* [*Legion of the Fighters of God*] yang dibentuk oleh Hambali pada tahun 1999.

Beberapa kelompok seperti Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Indonesia, menolak upaya Hambali, yang berafiliasi kepada al-Qaeda, untuk menyatukan gerakan perlawanan etno-nasionalis yang mereka selama ini usung berubah masuk menjadi organisasi regional dengan tujuan yang universal. Respon yang berbeda diberikan oleh MILF, yang sempat menyetujui kerjasama dengan Jemaah Islamiyah dan al-Qaeda dalam melakukan perlawanan politik dan aliansi dengan kelompok-kelompok militan lainnya di Asia Tenggara.[11] Konsekuensi yang dihasilkan dari pengaruh al-Qaeda di kawasan Asia Tenggara terlihat cukup jelas dan berdampak besar. Kasus serangan pengeboman pada Oktober 2002 di Bali dan kasus pengeboman di Konsulat AS di Denpasar, Bali dianggap sebagai serangan pengeboman

---

[10] Rohan Gunaratna, "Terrorism In Southeast Asia...,"h.2.

[11] Rohan Gunaratna, "Terrorism In Southeast Asia...," h.2-3.

teroris kedua paling mematikan setelah peristiwa 9/11. Selanjutnya kasus pengeboman kapal Superferry 14 di Manila, Filipina adalah salah satu kasus penyerangan maritim yang paling besar hingga saat ini.[12]

Pada Februari 1998, Abu Sayyaf mendukung Osama bin Laden, untuk memerangi ″orang Yahudi dan para Tentara Salib.″ Namun, dukungan Abu Sayyaf berakhir ketika pemimpin mereka, Abdurajik Janjalani, tewas di tangan tentara Filipina pada akhir tahun 1998.

Selain memperoleh dana dari tindak kejahatan seperti pemerasan dan penculikan, Abu Sayyaf diperkirakan menerima bantuan logistik dan mempunyai hubungan baik dengan kelompok radikal lain seperti al-Qaeda dan Jemaah Islamiyah.

Pada September 2001, militer Filipina mengkonfirmasi secara spekulatif bahwa al-Qaeda telah menampakan dukungan terhadap material, kepemimpinan, dan pelatihan. Sebagai sebuah organisasi teroris transnasional, al-Qaeda telah berkembang melalui daerah-daerah Timur Tengah, Eropa Barat, Amerika Utara, dan Asia Selatan. Ditambah, hingga ke Asia Tenggara sebagai basis kunci dan daerah persiapan. Pada awalnya, Abu Sayyaf di danai melalui jaringan finansial yang didirikan oleh Muhammad Jamal Khalifa, saudara Osama bin Laden, yang telah diutus ke Filipina pada 1991, dan mendirikan sebuah jaringan amal Islam. Khalifa adalah anggota resmi yang langsung bersentuhan ke daerah untuk basis amal Saudi, the Islamic International Relief Organization (IIRO), dukungan ini tidak hanya untuk Filipina tetapi juga kaum radikal di Indonesia,

[12] Rohan Gunaratna, "Terrorism In Southeast Asia...," h.3.

Thailand dan Taiwan. Selain hubungan dengan al-Qaeda yang telah memberi dukungan Finansial dari gerakan ini, Abu Sayyaf juga menjalin hubungan dengan JI (Jamaah-Islamiyyah).[13]

Al-Qaeda diduga selain membantu dalam hal Finansial, namun juga telah membantu dengan pelatihan-pelatihan militernya kepada anggota-anggota dari Kelompok Abu Sayyaf. Pejabat Militer Filipina mengatakan bahwa Abu Sayyaf menerima bantuan materil dan Finansial dan juga latihan militer. Sebagian besar anggota Abu Sayyaf berlatih di markas militer al-Qaeda di Afghanistan.

Meskipun paska tragedi 9/11, kerja sama antar kedua kelompok ekstremis ini tak terdengar lagi, para anggota Abu Sayyaf memiliki hubungan yang baik dengan kelompok teroris afiliasi al-Qaeda di Filipina.

Saudara ipar Osama bin Laden, Muhammad Jamal Khalifa, diduga telah memberikan kucuran dana kepada Abu Sayyaf melalui usaha pencucian uang berkedok badan amal yang dia dirikan, yaitu Organisasi Internasional Islamic Relief.

Sepeninggal Janjalani, semangat perjuangan Abu Sayyaf mulai mengendur. Adik Abdurajik Janjalani, Khadaffi Janjalani dinilai tidak dapat menggantikan peran kakaknya, karena tak memiliki kemampuan militer.

Pemerintah Filipina dan Amerika Serikat telah berupaya menanggulangi aksi terorisme di Filipina dengan menyerang markas Abu Sayyaf di Filipina pada Juni 2002 yang menewaskan pemimpin Abu Sayyaf saat itu, Abu Sabaya.

---

[13] Laporan *Republika*, "Bapak Pedang Lupa Indonesia," *http://www.republika.co.id/berita/koran/teraju/16/04/18/o5u41p1-bapak-pedang-lupa-indonesia*

Abu Sayyaf kemudian mengangkat Yasser Igasan sebagai pemimpin kelompok ini pada tahun 2007, meskipun Igasan tidak memiliki kemampuan militer.

Pengamat menilai Abu Sayyaf kini telah jauh meninggalkan ideologi agama Islam yang pada awalnya yang mereka perjuangkan, dan menjadi kelompok radikal yang melakukan tindakan kriminal tanpa motif politik yang jelas.

Abu Sayyaf menyebarkan ancaman teror, pembunuhan dan penculikan pada masa pemerintahan Presiden Filipina, Gloria Macapagal Arroyo, di Filipina Selatan dan daerah dekat Laut Tiongkok Selatan. Pada Desember 1994, Abu Sayyaf meledakkan pesawat Philipina Airlines tujuan Manila - Tokyo yang mengakibatkan satu orang tewas.

Abu Sayyaf juga menyerang Kota Ipil pada 1995, menyebabkan 50 orang tewas. Tiga tahun setelahnya, Abu Sayyaf meledakkan sebuah pusat perbelanjaan di Zamboanga, mengakibatkan 30 orang tewas.

Hingga saat ini, Abu Sayyaf tetap menjadi ancaman utama bagi keamanan di Filipina Selatan. Dari jaringan al-Qaeda pimpinan Osama bin Laden sampai tahun 1995, dan dua kelompok tersebut terus melakukan kontak.

Abdurajak Janjalani bersama kelompoknya merupakan kelompok yang tidak menyetujui dilakukannya proses perdamaian antara MNLF dan Pemerintah Filipina. Abdurajak Janjalani pada tanggal 18 desember 1998 terbunuh dalam suatu pertempuran dengan polisi di kampong Lamitan Provinsi Basilan tetapi pendukung Abu Sayyaf tetap melanjutkan perjuangan melalui penculikan, pemboman dan pengumpulan uang secara paksa. Khadafi Janjalani (saudara Abdurajak Abubakar Janjalani) kemudian

menjadi pemimpin Abu Sayyaf. Tujuan utamanya masih sama yakni mendirikan sebuah Negara Islam.

Sepeninggalan Abdurajak Janjalani kelompok ini terpecah ke dalam faksi-faksi yang berbeda, kegiatannya kemudian lebih diwarnai oleh perampokan dan penculikan ketimbang perjuangan politik. hal ini terbukti pada tahun 2000, kelompok ini telah menculik 53 orang meliputi pendeta, beberapa guru dan pelajar. Untuk menebus sandera Abu Sayyaf menuntut uang tebusan dan dua orang Sandera dikabarkan telah dipenggal kepala.[14]

Saat penyanderaan ini berlangsung, pada bulan April 2000 anggota Abu Sayyaf lainnya melakukan operasi penyeberangan dari wilayah Negara Filipina bagian selatan menuju resort pulau wisata pulau Sipadan di wilayah Negara Malaysia. Di resort Malaysia mereka menculik 21 orang berkebangsaan asing terdiri dari 9 orang Malaysia, 3 orang Jerman, 2 orang Perancis, 2 Orang Afrika Selatan, 2 Orang Finlandia, 1 Wanita Lebanon, 2 orang Filipina, seluruh korban penculikan ini dibawa ke kamp Abu Sayyaf di Taawi-Tawi untuk disandera kemudian dipindah ke Jolo.

Setelah serangan militer Filipina gagal membebaskan para sandera sejumlah wakil Negara Eropa, Malaysia dan Libya bergabung dengan perundingan Filipina dalam upaya membebaskan sandera. Pihak Abu Sayyaf menerbitkan sejumlah daftar tuntutan yaitu pendirian Negara Moro yang merdeka, pelepasan beberapa teroris yang ditahan di luar negeri, pelarangan perahu nelayan yang beroperasi di lautan Sulu, perlindungan bagi warga Filipina yang berada di Sabah Malaysia dan uang tebusan sekitar 1 Juta dollar

---

[14] Laporan *Republika*, "Bapak Pedang Lupa Indonesia"

Amerika Serikat untuk satu orang sandera.

Pada masa penyanderaan ke dua puluh tiga orang ini, kelompok Abu Sayyaf juga sempat menyandera seorang wartawan Jerman dan dilepaskan setelah mendapat uang tebusan. Kemudian berturut-turut menyandera tiga orang wartawan TV Perancis, dua orang Filipina dan beberapa pendeta Filipina yang berusaha mengunjungi sandera. Di akhir bulan agustus 2001, seorang warga Negara Amerika Serikat turut disandera setelah mengunjungi kamp Abu Sayyaf sejumlah uang tebusan telah dibayarkan untuk melepaskan sandera ini. Usaha perundingan dengan kelompok ini tidak berhasil untuk membebaskan semua sandera. Empat Bulan kemudian, Agustus 2000, para penyandera meminta uang tebusan satu juta dollar Amerika Serikat sebagai imbalan bila membebaskan tiga warga Negara Malaysia.[15]

Sementara itu pada tanggal 10 September 2000 malam, tiga orang warga Negara Malaysia dilarikan dari resort wisata pulau Pandanan di lepas Pantai Sabah Malaysia oleh kelompok Abu Sayyaf dengan menggunakan kapal motor berkekuatan tinggi melampaui kecepatan kapal angkatan laut Filipina. Beberapa pihak menduga mereka menggunakan uang tebusan sandera sebelumnya untuk membeli peralatan-peralatan perlengkapan baru. Pada tanggal 21 Mei 2001, kelompok Abu Sayyaf kembali menculik tiga warga Negara Amerika Serikat dan tujuh belas warga Negara Filipina dari resort wisata Palawan di Filipina.

Hingga akhir tahun 2001, kelompok Abu Sayyaf masih membawa dua orang warga Negara Amerika Serikat dan

[15] Laporan *Republika*, "Bapak Pedang Lupa Indonesia,"

satu perawat warga negara Filipina di pulau Basilan hasil penculikan tujuh bulan lalu. Hal ini diketahui saat kelompok tersebut menawarkan perundingan pembebasan mereka di kota Zamboanga bulan April 2002. Pada bulan Juni 2002 satu orang sandera warga negara Amerika Serikat yaitu Martin Burnham tewas saat terjadi penyerangan oleh pasukan Filipina terhadap basis Abu Sayyaf tempatnya disandera. Sedangkan istrinya, Gracia Burnham, dapat diselamatkan. Sementara itu perawat Filipina yaitu Ediborah Yap juga tewas saat operasi penyelamatan oleh militer Filipina ini.[16]

Di bulan Juni 2002, Abu Sayyaf melakukan aksi penculikan terhadap warga negara asing. Empat warga negara Indonesia menjadi korban penculikan dan penyanderaan mereka. Keempat orang asing ini adalah anak Buah Kapal (ABK) Kapal SM-88 yang sedang membawa batu bara dari Indonesia ke Pulau Cebu di Filipina Tengah. Penyergapan terhadap mereka dilakukan di lepas pantai Pulau Jolo dan keempatnya kemudian di bawa ke daratan Pulau Jolo. Dua hari kemudian satu ABK Indonesia Ferdinand Joel berhasil diselamatkan. Kemudian bulan Maret 2003, seorang ABK Indonesia Zulkifli berhasil menyelamatkan diri dan melaporkan bahwa satu ABK Indonesia lainnya yaitu Muntu Jacobus Winowatan diperkirakan telah meninggal dunia tertembak dalam operasi penyelamatan militer Filipina bulan Februari 2003. Sandera ABK Indonesia terakhir Lerrech berhasil melarikan diri dari tahanan Abu Sayyaf tanggal 11 April 2003.

[16] Laporan *Republika*, "Bapak Pedang Lupa Indonesia,"

Pada Agustus 2014 lalu, seorang petinggi Abu Sayyaf juga menyatakan bahwa ia berbaiat kepada kelompok Negara Islam Irak dan Suriah, ISIS.

Di bulan Maret 2016, Kelompok Abu Sayyaf kembali melakukan aksi penculikan terhadap 10 warga negara Indonesia yang merupakan awak kapal Tug Boat Brahma yang memuat batubara milik perusahaan tambang dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Perdamaian dan stabilitas politik nampaknya belum terwujud dengan penuh di kawasan Filipina Selatan. Tingginya intensitas konflik dan kekerasan yang terdapat di wilayah tersebut ditandai dengan adanya kehadiran organisasi terorisme yang secara aktif melakukan berbagai tindakan teror seperti penculikan, kekerasan bersenjata, dan intimidasi.

Salah satu organisasi terorisme yang paling menonjol saat ini di Filipina Selatan adalah Kelompok Abu Sayyaf.

Pada 11 April 2014 yang lalu, militer Filipina meluncurkan serangan terhadap kelompok Abu Sayyaf dan menyebabkan tiga militan Abu Sayyaf tewas dan sekitar 20 orang militer Filipina luka-luka. Militer Filipina meluncurkan operasi militer di wilayah Basilan ini dalam rangka untuk menangkap Puruji Indama, Komandan Abu Sayyaf, yang dianggap bertanggung jawab atas berbagai kasus penculikan dan pembunuhan baik terhadap warga Filipina maupun warga negara asing selama beberapa tahun belakangan. [17]

[17] Laporan The Guardian Online, "Abu Sayyaf extremists battle troops in Philippines, leaving 20 soldiers injured", *http://www.theguardian.com/world/2014/apr/11/abu-sayyaf-extremists-battle-troops-philippines,* diakses pada 13 April 2014

Aksi terbaru lainnya yang diduga dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf adalah aksi penculikan seorang kepala sekolah pada 31 Maret 2014, di suatu daerah di provinsi Basilan. Korban penculikan diidentifikasi sebagai Benita Enriquez Latonio, seorang penduduk dari Barangray Talisayan yang menjabat sebagai Kepala Sekolah di Sekolah Dasar Manggal, Kota Sumisip, Basilan.[18]

Tidak hanya berhenti di sana, pada 16 Februari 2014, kelompok Abu Sayyaf juga tercatat melakukan penculikan terhadap sepasang suami istri di kepulauan Jolo. Suami istri, keduanya adalah karyawan perusahaan lokal, diculik oleh enam tersangka teroris dari kelompok Abu Sayyaf di depan rumah mereka di San Raymudo village di Jolo. [19]

Selain itu juga kelompok Abu Sayyaf dikenal sebagai kelompok teroris militan yang tidak segan-segan melakukan pembunuhan terhadap korban-korban penculikannya, biasanya kelompok Abu Sayyaf melakukan penculikan kemudian menuntut uang tebusan sebagai ganti keselamatan nyawa para sanderanya, tetapi dalam berapa kasus Abu Sayyaf melakukan pembunuhan dan bahkan pemenggalan para sandera.

Aksi-aksi terorisme yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf tentu menjadikan kelompok ini sebagai salah satu kelompok terorisme aktif yang paling berbahaya di Asia Tenggara saat ini. Untuk itu tulisan ini akan mencoba untuk

---

[18] Laporan Philstar News Online, "Abu Sayyaf abducts school principal in Sumisip," *http://www.philstar.com/nation/2014/03/3 1/1307219/updated-abu-sayyaf-abducts-school-principal-sumisip*, diakses pada 15 April 2014.

[19] Philstar News Online, "Couple kidnapped by Abu Sayyaf Group in Jolo", *http://www.philstar.com/headlines/2014/02/16/1291092/couple-kidnapped-abu-sayyaf-group-jolo*, diakses pada 15 April 2014.

memberikan gambaran dan deskripsi mengenai apa kelompok Abu Sayyaf ini? Siapa saja pemimpin dan tokoh-tokohnya, bagaimana struktur organisasinya, apa motivasi dan ideologi politiknya dalam melakukan aksi terorisme, dan bagaimana strategi kelompok Abu Sayyaf dalam melakukan aksi terorisme?

Latar Belakang dan Sejarah

Terkait dengan kepentingan memperluas jaringan al-Qaeda di Asia Tenggara, Osama bin Laden diyakini memanfaatkan jaringan dengan Abdurajak Janjalani untuk membentuk jaringan sel di Filipina. Dokumen intelijen dari *Philippine National Police* (PNP) menunjukkan bahwa aktor intelektual dari pengeboman World Trade Center 1993, Ramzi Yousef, mendukung gagasan pembentukan kelompok Abu Sayyaf yang dapat berguna sebagai kontak sel dan jaringan kelompok al-Qaeda di Filipina. Ramzi Yousef, instruktur pelatihan perakitan bom di kamp Khost Afghanistan, kemudian melakukan perjalanan bersama Abdurajak Janjalani ke Filipina dari Desember 1991 sampai Mei 1992 atas permintaan Osama bin Laden untuk memberikan pelatihan pembuatan bom terhadap anggota Abu Sayyaf di kamp militer mereka di kepulauan Basilan. Kemudian Ramzi Yousef diperkenalkan kepada para pimpinan Abu Sayyaf dan sebagai "utusan bin Laden" dan ia disebut dengan julukan "*the Chemist*" atau "Kimiawan" karena kemampuannya dalam pembuatan bom. [20]

Selain memberikan dana untuk Abdurajak Janjalani dalam pembentukan kelompok Abu Sayyaf, Osama bin Laden juga

[20] Zachary Abuza, *Balik-Terrorism*..., h. 3

memberikan pendampingan terhadap organisasi yang baru terbentuk ini. Wali Khan Amin Shah, militan senior yang berjuang bersama bin Laden di Afghanistan dikirim ke Filipina untuk melakukan rekrutmen, pelatihan militer dan membantu kelompok Abu Sayyaf.[21] Aliran finansial dan pendanaan juga mulai mengalir masuk, kelompok Abu Sayyaf mulai menerima pengiriman senjata dari Victor Blout, pedagang senjata Tajik yang memiliki kontak baik dengan rezim Taliban maupun jaringan al-Qaeda. 8 Kelompok Abu Sayyaf kemudian dikenal secara meluas oleh publik ketika aksi pengeboman pertama mereka terjadi pada Agustus 1991 yang menghancurkan kapal M/V Doulos, kapal misionaris Kristen yang berlabuh di Zamboanga, Filipina Selatan.[22]

Struktur Organisasi

Setelah kematian Abdurajak Janjalani, kepemimpinan Abu Sayyaf diambil alih oleh adiknya Khadafy Janjalani, yang dianggap tidak mewarisi kepemimpinan yang tegas dan karismatik dari kakaknya. Kemudian kelompok Abu Sayyaf terpecah menjadi dua faksi utama yang berbasis di kepulauan Basilan dan lainnya berbasis di kepulauan Sulu dan bertindak secara independen. Pada tahun 2002, faksi Basilan terdiri dari 10 kelompok bersenjata sedangkan faksi Sulu terdiri dari 16 kelompok bersenjata. Faksi Sulu dipimpin oleh "Commander Robot" (Ghalib Andang) yang melakukan tindakan penculikan dan tebusan (Kidnapped for Ransom Activities).

---

[21] Zachary Abuza, *Balik-Terrorism*..., h. 3-4

[22] Garrett Atkinson, "Abu Sayyaf: The Father of the Swordsman..., " h. 4.

Walaupun Khadafy Janjalani bertempat di wilayah Basilan, tetapi ia dikendalikan oleh Abu Sabaya (Aldam Tilao) yang juga melakukan tindakan penculikan dan meminta tebusan.

Dengan munculnya dua faksi ini, kelompok Abu Sayyaf mengalami fase degenerasi yang membuatnya menjadi seperti organisasi penjahat. Ghalib Andang dan Abu Sabaya mengubah kelompok Abu Sayyaf dari organisasi teroris-relijius menjadi apa yang disebut sebagai "entrepreneur of violence".[23]

Menurut unit anti terorisme Filipina (Anti-Terrorism Task Force/ATTF), kekuatan personil kelompok Abu Sayyaf pada tahun 2005 diperkirakan sebesar 350 orang. Tetapi kemudian militer Filipina, Armed Forces of Philippines (AFP), pada penilaian di kuartal kedua tahun 2008 menyebutkan bahwa kekuatan kelompok Abu Sayyaf berjumlah sekitar 380 orang.

Jika dibandingkan dengan kekuatan personel New People's Army (NPA) yang berjumlah sebesar 8000 orang dan kekuatan personel Moro Islamic Liberation Front (MILF) dengan 10.000 personel, tentu saja kekuatan kelompok Abu Sayyaf sangatlah minim. [24]

Faksionalisasi dan konflik internal yang terjadi pada kelompok Abu Sayyaf dengan cepat dimanfaatkan oleh militer Filipina. Dengan melakukan operasi militer yang intensif, pemerintah Filipina mampu mengurangi kekuatan kelompok Abu Sayyaf sebesar 70%. Dari puncaknya sekitar 1.269 pejuang pada tahun 2000 berkurang menjadi hanya

[23] Rommel C. Banlaoi, "Al Harakatul Al Islamiyah..."
[24] Rommel C. Banlaoi, "Al Harakatul Al Islamiyah..."

sekitar 350 personel di pertengahan tahun 2005. [25]

Data lain menyebutkan bahwa pada awal tahun 1990-an, diperkirakan kelompok Abu Sayyaf memiliki anggota sebesar 650 orang, dan pada momen krisis penyanderaan Sipadan pada tahun 2000, Abu Sayyaf diyakini tumbuh dengan jumlah militan sebesar 3.000 orang (Torres, 2001). Seorang komandan brigade militer yang terlibat dalam pertempuran di Pulau Jolo memperkirakan ada sekitar 300 orang kombatan Abu Sayyaf di pulau tersebut (Pajarito 2005). Angka-angka lain yang sesuai dengan perkiraan intelijen dan departemen pertahanan menyebutkan angka sekitar 409 dan 500 orang (Banlaoi, 2006b). Seorang mantan komandan kelompok Abu Sayyaf di Sulu menyebutkan bahwa kelompok tersebut memiliki 650 personel regular bersenjata dan ribuan orang lainnya sebagai personel cadangan.[26]

Tokoh dan Pimpinan

Amir atau pimpinan pertama dari kelompok Abu Sayyaf adalah pendirinya Abdurajak Janjalani (yang memiliki nama alias Abu Sayyaf). Ia tewas terbunuh pada serangan polisi pada Desember 1998 dan digantikan oleh adiknya Khadafy Janjalani (Abu Mochtar). Kemudian setelah itu muncul pola kepemimpinan tipikal "bandit", yang diwakili oleh mantan juru bicara Abu Sayyaf, Aldam Tilao (Abu Sabaya) dan Ghalib Andang (Komandan Robot), yang kemudian juga tewas. Kematian tipikal kepemimpinan bandit ini kemudian mewakili pembersihan kepemimpinan Abu Sayyaf dan

[25] Rommel C. Banlaoi, "Al Harakatul Al Islamiyah..."
[26] Soliman M. Santos, etc, "Primed And Purposeful Armed ..."

kembali kepada akarnya semula yaitu akar pemberontakan Bangsa Moro dan jihad Islam.

Kematian Khadafy Janjalani dan letnannya Jainal Antel Sali, Jr. (Abu Solaiman) pada September 2006 dan Januari 2007 mengantarkan era kepemimpinan baru bagi kelompok Abu Sayyaf. Posisi kepemimpinan kemudian berhasil disatukan lagi pada satu komando kepada komandan Abu Sayyaf di Sulu yaitu komandan Radullan Sahiron (Komandan Putol), yang dilaporkan nyaris terbunuh oleh marinir Filipina di Sulu pada Desember 2008. [27]

Beberapa nama yang diyakini terkait dengan kepemimpinan Abu Sayyaf di bawah Radullan Sahiron adalah: Yasser Igasan salah satu dari anggota awal Abu Sayyaf, Tuan Awliya yang merupakan salah satu anggota awal kelompok Abu Sayyaf dan pimpinan Abu Sayyaf Basilan, Isnilon Totoni Hapilon (Abu Musab).

Pola struktur kelompok Abu Sayyaf yang terdiri dari dua cabang organisasi utama, masing-masing dengan komandan lokalnya sendiri baik di Sulu dan Basilan, nampaknya akan terus berlanjut. Arus kepemimpinan utamanya sekarang diperkirakan berada di Sulu. Beberapa pengamat mengatakan bahwa generasi militan baru nampaknya telah mulai mengambil alih kepemimpinan dalam tubuh Abu Sayyaf.

Laporan Keamanan Pemerintah Filipina menyebutkan bahwa Albader Parad dan Sulaiman Pattah di Sulu, kemudian Nurhassan Jamiri dan Furuji Indama di Basilan sebagai nama pimpinan baru tersebut. Albader Parad merupakan pengikut dari "Komandan Robot" Ghalib Andang, yang

---

[27] Soliman M. Santos, etc, "Primed And Purposeful Armed ..."

lebih cenderung kepada tipikal kepemimpinan bandit daripada pola terorisme atau separatisme.[28]

Kelompok Abu Sayyaf beroperasi di sekitar provinsi kepulauan Basilan dan kepulauan Sulu, serta tiga provinsi di semenanjung Zamboanga di wilayah barat Mindanao. Daerah ini umumnya merupakan daerah pedesaan. Daerah yang diduga sebagai basis kelompok Abu Sayyaf meliputi wilayah kompleks Sampinit di Upper Kapayoan, di distrik Basilan dari Isabela, dimana kelompok Abu Sayyaf pernah memiliki basis permanen termasuk kamp militer Al Madinah. Selain itu juga terdapat basis kelompok di Punoh Muhaji di daerah pusat Basilan, dimana kelompok Abu Sayyaf pernah memiliki markas yang disebut dengan kamp militer Abdurajak.

Kemudian juga terdapat markas yang ditempati Radullan Sahiron di kota Patikul, markas yang ditempati Doktor Abu di Karawan Complex di perbatasan kota Indanan-Parang Maimbung, dan markas dari Komandan Robot berada di kota Talipao. Kelompok Abu Sayyaf diyakini telah mampu untuk membuat serangan pengeboman serta mencari basis perlindungan di sejumlah wilayah di Mindanao Tengah yang secara tradisional telah dikaitkan dengan basis dari MILF.

Data lain menyebutkan beberapa nama yang sama dan juga menyebutkan beberapa nama baru. Kepemimpinan kelompok Abu Sayyaf diperkirakan dalam kondisi terpecah dan terfragmentasi, terutama setelah kematian beberapa pimpinan kunci pada masa 2006-2007. Saat ini tidak diketahui dengan pasti apakah ada satu kepemimpinan tunggal dalam

[28] Soliman M. Santos, etc, “Primed And Purposeful Armed ...”

Abu Sayyaf, walaupun demikian dari sekian banyak pimpinan Abu Sayyaf, mereka memiliki pengalaman operasional militer yang luas dan seringkali melaksanakan operasi penyerangan mereka sendiri, di antaranya adalah :

1. Abdurajak Janjalani (Abu Sayyaf), pendiri dan pimpinan pertama kelompok Abu Sayyaf yang telah mengikuti kamp pelatihan militer di Afghanistan. Tewas terbunuh dalam serangan militer Filipina pada Desember 1998.
2. Khadafy Janjalani, adik dari Abdurajak Janjalani dan menjadi pimpinan kedua dari kelompok Abu Sayyaf setelah kematian Abdurajak Janjalani pada tahun 1998. Khadafy Janjalani kemudian tewas dalam pertempuran dengan militer Filipina di kepulauan Jolo pada Desember 2006.
3. Aldam Tilao (Abu Sabaya), juru bicara dan pimpinan militer dari kelompok Abu Sayyaf faksi Basilan. Abu Sabaya kemudian tewas terbunuh pada satu serangan militer di Zamboanga pada Juni 2002.
4. Ghalib Andang (Komandan Robot), pimpinan militer dari kelompok Abu Sayyaf faksi Sulu yang dianggap bertanggung jawab terhadap operasi penculikan 21 orang turis di Sipadan pada tahun 2000. Ghalib Andang kemudian tewas terbunuh pada kerusuhan dalam penjara Manila pada tahun 2005.[29]
5. Radullan Sahiron (Komandan Putol), pejuang veteran dari MNLF dan MILF yang kemudian menjadi komandan militer dari kelompok Abu Sayyaf faksi Sulu yang

[29] BBC News Online, "Bloody end to Manila jail break," *http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/4349471.stm*, diakses pada 14 April 2014. Lihat juga, Global Jihad Official Site, "Radulan Sahiron", *http://www.globaljihad.net/ view_page.asp?id=1409*; Zambo Times News Online, "What a new ASG leader could bring", *http://www.zambotimes.com/archives/news/7142-What*

kemudian menyatukan faksi lainnya di bawah kepe-mimpinannya.

6. Yasser Igasan, (Komandan Diang), salah satu anggota pendiri kelompok Abu Sayyaf yang juga mengikuti pelatihan kamp militer di Afghanistan pada tahun 1990-an. Diduga Yasser Igasan memiliki hubungan yang erat dengan jaringan internasional al-Qaeda.
7. Isnilon Totoni Hapilon (Abu Musab), salah satu pim-pinan militer Abu Sayyaf dari faksi Basilan. Hapilon dianggap bertanggungjawab untuk beberapa kasus penculikan, penyanderaan dan pembunuhan yang dila-kukan oleh kelompok Abu Sayyaf.
8. Albader Parad, salah satu komandan militer Abu Sayyaf dari faksi Sulu. Albader Parad diduga bertanggung jawab atas aksi penculikan terhadap relawan Palang Merah Internasional di Sulu. Ia dinyatakan tewas pada operasi militer yang dilancarkan marinir Filipina pada Februari 2010.
9. Sulaiman Pattah, salah satu komandan militer Abu Sayyaf dari faksi Sulu. Ia mendapatkan reputasinya ketika memimpin operasi penculikan presenter Ces Drilon dan dua orang kru televisi di Jolo.
10. Nurhassan Jamiri, salah satu komandan militer Abu Sayyaf dari faksi Basilan. Jamiri diduga terlibat dalam kasus penculikan dan pemenggalan 10 orang marinir pada pertempuran 2007.
11. Furuji Indama, salah satu komandan militer Abu Sayyaf dari faksi Basilan. Ia tergabung dalam faksi yang sama dengan Nurhassan Jamiri dan dianggap bertanggung

jawab terhadap berbagai kasus penculikan dan terorisme lainnya di Basilan.[30]

12. Abdul Basit Usman, ahli perakitan bom dan anggota senior kelompok Abu Sayyaf. Abdul Basit Usman dinyatakan tewas terbunuh oleh serangan misil tentara AS di perbatasan Afghanistan pada Januari 2010.
13. Gumbahali Jumdail (Doktor Abu), salah seorang pimpinan tingkat regional Abu Sayyaf yang diduga bertanggung jawab atas berbagai kasus penculikan dan terorisme yang terjadi di Filipina Selatan. Tewas terbunuh oleh serangan yang dilancarkan militer Filipina pada Februari 2012.
14. Alhamser Limbong (Komandan Kosovo), terlibat dalam pengeboman Oktober 2002 di Zamboanga. Ia juga diduga terlibat dalam penculikan turis asing di pulau Palawan dan juga tertuduh dalam kasus pengeboman kapal feri yang menewaskan 100 orang.
15. Abdul Basir Latip, seorang pemimpin kunci dari kelompok Abu Sayyaf. Memiliki keterkaitan dengan berbagai kelompok militan lainnya seperti Jamaah Islamiyah dan al-Qaeda.

Ideologi dan Motivasi Politik

Dari perspektif struktural, akar permasalahan terorisme di Filipina hanya dapat sepenuhnya dipahami dalam konteks masalah Bangsamoro. Soliman M. Santos memberikan penjelasan mengenai masalah Bangsamoro, dimana kelompok Abu Sayyaf menemukan akar identitasnya di sana yaitu:

---

[30] Aljazeera News Online, "Abu Sayyaf commander killed in raid", *http://www.aljazeera.com/news/asiapacific/2010/02/20102217219857969.html*, diakses pada 14 April 2014.

masalah marjinalisasi sejarah dan sistem peminggiran terhadap kelompok etno-linguistik muslim, yang secara kolektif disebut sebagai Moro, di tanah air mereka sendiri di kepulauan Mindanao.

Marjinalisasi sistematis ini pertama kali dilakukan oleh kekuasaan kolonial Spanyol pada abad ke 16 dan 19, kemudian oleh Amerika Serikat selama paruh pertama abad ke-20, dan kemudian dilanjutkan oleh pemerintahan Filipina yang didominasi oleh elit-elit yang berorientasi pada kehidupan Barat-Kristen sejak memegang kekuasaan pada kemerdekaan Filipina tahun 1946. Kemerdekaan ini menandakan kebangsaan dan kenegaraan Filipina yang utuh tetapi ironisnya juga menyebabkan hilangnya kemer-dekaan dan kebangsaan Moro karena tanah air Moro juga disatukan ke dalam wilayah Filipina.

Abdurajak Janjalani sangat menyadari bahwa faktor sejarah, agama, ekonomi, kondisi sosial-politik yang berkontribusi terhadap penolakan kelompok muslim terhadap otoritas negara dan kekuasaan di Filipina. Selama berabad-abad, identitas nasional Moro telah diangkat sebagai pemersatu perlawanan muslim terhadap kekuasaan kristiani, dan menuntut adanya negara Islam otonom. Ini sebagai salah satu dampak dari upaya kekuasaan kolonial untuk mengelompokkan beberapa kelompok etno-linguistik muslim di Filipina Selatan ke dalam satu identitas "Bangsa Moro." Ketika kita mencoba untuk berusaha memahami keyakinan yang dipegang teguh dan motivasi dari kelompok Abu Sayyaf, sangat penting untuk memahami perasaan yang mendalam mengenai perjuangan atas ketidakadilan yang kemudian mewujudkan identitas Moro.

Motivasi Abdurajak Janjalani di balik pembentukan kelompok Abu Sayyaf bisa dilihat sebagai upaya aktif untuk mencari keadilan, untuk semua kelompok minoritas muslim Moro di Filipina Selatan. Menurut Janjalani, *Jihad Fi-Sabilillah*, yang diterjemahkan menjadi perlawanan bersenjata adalah bentuk paling mulia dalam perjuangan di jalan Allah. [31]

Tujuan utama dari kelompok Abu Sayyaf adalah untuk membentuk suatu negara merdeka yang menggunakan hukum-hukum syariah Islam sebagai dasar otoritas moral dari undang-undang negara, dan kemudian hukum syariah tersebut dijalankan dan dipatuhi oleh warga negara yang tinggal di negara tersebut. Rommel Banlaoi kemudian memberikan penjelasan mengenai "Empat Dasar Kebenaran" yang diterbitkan oleh Abdurajak Janjalani pada tahun 1993-1994 sebagai panduan dasar bagi kelompok Abu Sayyaf:

(1) Tujuan kami tidak untuk membangun atau mempromosikan faksi dan perpecahan dalam perjuangan kelompok muslim, karena hal tersebut bertentangan dengan ajaran Islam. Tujuan dari kelompok Abu Sayyaf adalah untuk menjadi jembatan antara pasukan revolusioner baik dari MNLF dan MILF yang peran dan kepemimpinannya dalam perjuangan ini tidak dapat diabaikan.

(2) Tujuan strategis utama kami adalah pembentukan sebuah negara Islam murni yang "sifat, makna, lambang dan tujuannya" identik dengan kedamaian. Kelompok Abu Sayyaf menyatakan bahwa mereka

[31] Baca, Garrett Atkinson, "Abu Sayyaf: The Father of the Swordsman..."

akan menghormati kebebasan beragama, bahkan dalam konteks sebuah Negara Islam, mereka menyatakan "hak-hak orang Kristen akan dilindungi selama mereka mematuhi hukum negara Islam."

(3) Advokasi melalui tindakan peperangan merupakan kebutuhan selama tetap terjadi "penindasan, ketidakadilan dan klaim yang sewenang-wenang" terhadap umat muslim.

(4) Peperangan mengganggu perdamaian hanya untuk mencapai tujuan yang benar dan nyata akan nilai kemanusiaan, dalam penegakan keadilan dan kebenaran untuk semua di bawah naungan hukum al-Quran yang mulia dan Sunnah yang yang murni.

Selain itu juga kelompok Abu Sayyaf menyadari adanya ketidakadilan struktural yang terjadi. Ketidakadilan dan perampasan ekonomi dari Bangsamoro. Dalam pernyataan publik yang diterbitkan pada November 1994, kelompok Abu Sayyaf menyatakan bahwa perjuangannya adalah untuk mencari keadilan bagi Bangsamoro. Dalam salah satu pernyataan ideologisnya pada khutbahnya, Abdurajak Janjalani menekankan bahwa "tujuan awal dalam upaya penegakan keadilan akan berakhir pada sebuah tuntutan untuk mendirikan negara Islam yang murni sebagai jaminan keadilan dan kemakmuran bagi muslim Bangsamoro".[32]

Strategi Operasional

Kelompok Abu Sayyaf sejak awal pendiriannya telah mengembangkan dan mempraktikkan taktik pengalihan

[32] Rommel C. Banlaoi, "Al Harakatul Al Islamiyah..."

kontra-ofensif, dimana unit sekunder menyerang pasukan militer lawan untuk mengalihkan perhatian lawan dari unit penyerangan utama (Turner,1995).

Taktik ini berguna untuk menghindari konfrontasi langsung dengan pihak militer, kecuali dalam keadaan terpaksa dan terancam.

Pergerakan Abu Sayyaf selalu berada dalam kegelapan, mengambil jalan dan jalur yang tidak umum dilalui dan mendapatkan dukungan dari penduduk lokal. Bukti terbaik akan efektivitas teknik ini adalah fakta bahwa taktik ini dapat membuat kelompok Abu Sayyaf tetap bertahan menghadapi gempuran dari angkatan bersenjata Filipina yang melakukan operasi militer di Sulu, yang melibatkan sekitar 8.000 orang personel militer dengan dukungan militer AS yang berteknologi tinggi, yang dimulai sejak Agustus 2006 (International Crisis Group, 2008). Walaupun operasi militer inilah yang kemudian berhasil menewaskan pimpinan Abu Sayyaf kala itu Khadafy Janjalani dan letnan militer utamanya Abu Solaiman. [33]

Dikarenakan wilayah pulau dan semenanjung merupakan area operasional dimana kelompok Abu Sayyaf beroperasi, maka mereka secara ekstensif menggunakan perahu motor dan kapal laut cepat sebagai sarana transportasi umum, operasi penculikan, operasi penyerangan dan bahkan operasi pelarian diri (Philippine Marine Corps, 2002).

Model transportasi air seperti ini juga yang digunakan dalam operasi pengeboman kapal penumpang di pelabuhan dan laut lepas. Kelompok Abu Sayyaf juga dilaporkan

---

[33] Rommel C. Banlaoi, "Al Harakatul Al Islamiyah...", h. 22.

memiliki unit "kelompok teroris perkotaan" yang terdiri 70 orang geng pengendara motor yang melakukan pembunuhan dan penculikan di kota Jolo selama enam bulan hingga sekitar Agustus 2006. Operasi penculikan ini lebih menargetkan orang-orang kaya Kristen perkotaan daripada penduduk desa dan orang-orang asing yang tadinya menjadi target utama penculikan kelompok Abu Sayyaf (International Crisis Group, 2008). [34]

Aksi terorisme, pengeboman dan penculikan yang dilakukan telah memberikan kelompok Abu Sayyaf tiga keuntungan walaupun jumlah dan kekuatan personelnya tidak terlalu besar, yaitu: (a) liputan media yang meningkatkan popularitas dan kekuatan propaganda kelompok, (b) sabotase ekonomi terhadap kekuasaan negara, dan (c) mendapatkan uang dari hasil pemerasan atau tebusan (Philippine Marine Corps, 2002).

Dalam konteks rekrutmen anggota, kelompok Abu Sayyaf melakukan proses rekrutmen terhadap anak-anak muda di Mindanao yang berusia sekitar 20 tahunan. Para pemuda yang umumnya direkrut oleh kelompok Abu Sayyaf adalah para pemuda yang diri dan keluarganya menjadi korban peperangan. Proses rekrutmen dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf dengan menawarkan sejumlah uang, senjata dan jaminan perlindungan jika mereka mau bergabung dengan kelompok Abu Sayyaf. [35]

Zachary Abuza berpendapat bahwa tidak ada proses formal dalam pola rekrutmen, pelatihan dan indoktrinasi pada

---

[34] Soliman M. Santos, etc, "Primed And Purposeful Armed ...," h. 370.

[35] GMA News Online, "Abu Sayyaf actively recruiting young blood – police", *http://www.gmanetwork.com/news/story/101477/news/regions/abu-sayyaf-actively-recruiting-young-blood-police*, diakses pada 14 April 2014.

kelompok Abu Sayyaf. Beberapa anggota generasi pertama dari kelompok Abu Sayyaf adalah mantan kombatan MNLF, MILF atau para kombatan yang pernah mengikuti kamp militer di Afghanistan. Para pemuda baik yang memiliki kecendrungan ideologis maupun kriminalitas biasanya direkrut untuk melakukan satu tugas spesifik dalam proses pelatihan ad hoc yang harus mereka selesaikan.

Aksi-Aksi Terorisme

Sejak tahun 1991-2000, tercatat kelompok Abu Sayyaf telah terlibat dalam 378 tindakan terorisme yang meliputi tindakan pengeboman, penyerangan, dan pembunuhan yang mengakibatkan kematian sebanyak 288 orang warga sipil. Pada rentang periode yang sama kelompok Abu Sayyaf tercatat telah melakukan tindakan penculikan dan penuntutan uang tebusan sebanyak 640 kali dan melibatkan korban penculikan sebanyak 2.076 korban.

Di bawah ini adalah berbagai aksi terorisme yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf yang meliputi tindakan pengeboman, pembunuhan dan penculikan, di antaranya adalah:

1. 4 April 1991, melakukan pengeboman menggunakan geranat di kota Zamboanga, Filipina Selatan, yang menyebabkan dua orang tewas.
2. 14 April 1995, melakukan penyerangan terhadap kota pemukiman Kristen di kota Ipil yang mengakibatnya tewasnya 53 orang (baik warga sipil dan pasukan militer) dan 30 orang lainnya menjadi korban penyanderaan.
3. 23 April 2000, milisi Abu Sayyaf menyerang sebuah resor wisata di Sipadan dan kemudian menyandera 20

orang, meliputi perwira polisi Malaysia dan turis dari Eropa dan Timur Tengah.

4. 1 Juli 2000, kelompok Abu Sayyaf melakukan penculikan terhadap penginjil Kristen Filipina di kawasan hutan di Jolo. Tercatat sebanyak 13 orang menjadi sandera dalam kasus penculikan tersebut.
5. 28 Mei 2001, milisi Abu Sayyaf melakukan penyerangan bersenjata ke resort wisata Dos Palmas. Dalam kasus penyerangan ini tercatat sebanyak 20 orang wisatawan asing dan lokal menjadi korban penculikan. Kasus tersebut memicu operasi militer dari pemerintah Filipina untuk menyelamatkan para sandera.
6. Juni 2001, terjadi bentrokan bersenjata antara kelompok Abu Sayyaf dan militer Filipina yang terjadi di Gunung Sinangkapan, Tubaran. Peristiwa ini menyebabkan sebanyak 16 orang tewas dan 44 orang mengalami luka-luka.
7. Agustus 2002, enam orang dari Sekte Saksi Jehovah Filipina diculik oleh kelompok Abu Sayyaf, dua orang sandera di antaranya kemudian tewas dipenggal.
8. 4 Maret 2003, sebuah bom meledak di luar bangunan terminal utama Bandara Internasional Davao, Filipina. Juru bicara kelompok Abu Sayyaf melalui siaran pada stasiun radio nasional mengklaim bertanggung jawab atas serangan pengeboman tersebut. Tindakan tersebut mengakibatkan tewasnya 21 orang dan sebanyak 148 orang luka-luka.
9. 4 Februari 2004, sebuah bom yang ditempatkan di dek bawah kapal Superferry 14 meledak dan menenggelamkan kapal feri tersebut. Sebanyak 116 orang tewas akibat insiden tersebut dan menjadikannya seba-

gai serangan bom terorisme paling mematikan di Filipina. Kelompok Abu Sayyaf mengklaim bertanggung jawab atas serangan pengeboman tersebut

10. 14 Februari 2005, tiga bom diledakkan oleh operasi kelompok Abu Sayyaf di kota Makati, Davao dan General Santos. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai "Bom Hari Valentine". Berdasarkan pernyataan juru bicara kelompok Abu Sayyaf saat itu, Abu Solaiman, mengatakan bahwa bom tersebut merupakan "hadiah" untuk Presiden Gloria Macapagal Arroyo. Insiden tersebut menyebabkan 8 orang tewas dan 96 orang luka-luka.
11. 27 Februari 2010, kelompok Abu Sayyaf membunuh satu orang milisi dan 10 orang warga sipil di Maluso, Filipina.
12. 5 Desember 2011, kelompok Abu Sayyaf menculik pensiunan tentara Australia, Warren Richard Rodwell. Kelompok Abu Sayyaf meminta uang tebusan sebesar 2 juta dollar AS untuk ganti pelepasan sandera. Sampai Juni 2012, nasib dan keberadaan Rodwell belum diketahui.
13. 1 Februari 2012, kelompok Abu Sayyaf menculik warga negara Eropa (kebangsaan Swiss dan Belanda) dan pemandu wisata asal Filipina di sekitar kepulauan Tawi-Tawi.
14. 10 Juli 2012, militan Abu Sayyaf diduga terlibat dalam pembunuhan tujuh orang pekerja perkebunan karet setelah menyerang kendaraan mereka di Sumisip, Basilan. Peristiwa ini menyebabkan 7 orang tewas dan 18 orang luka-luka.

15. 28 Juli 2012, kelompok Abu Sayyaf membunuh tujuh orang marinir Filipina selama bentrokan senjata dengan aparat keamanan di Panglayahan, Jolo.
16. 25 Mei 2013, terjadi bentrokan bersenjata antara marinir Filipina di kota Patikul, Sulu. Bentrokan tersebut menyebabkan tewasnya 7 orang marinir Filipina dan 5 orang militan Abu Sayyaf.
17. 17 November 2013, kelompok Abu Sayyaf diduga melakukan pembunuhan dan penculikan kepada dua orang wisatawan asal Taiwan di Kepulauan Pom Pom, Sabah. Satu orang di antara sandera dinyatakan tewas dalam insiden tersebut.
18. 16 Februari 2014, diduga melakukan penculikan terhadap sepasang suami istri di kepulauan Jolo. Suami istri, keduanya adalah karyawan perusahaan lokal, diculik oleh enam tersangka teroris dari kelompok Abu Sayyaf di depan rumah mereka di San Raymudo village di Jolo.
19. 31 Maret 2014, kelompok Abu Sayyaf melakukan penculikan terhadap seorang wanita bernama Benita Enriquez Latonio, seorang penduduk dari Barangray Talisayan yang menjabat sebagai Kepala Sekolah di Sekolah Dasar Manggal, Kota Sumisip, Basilan.

Penutup

Dari paparan di atas bisa disimpulkan bahwa radikalisme Abu Sayyaf dan konflik di Filipina Selatan yang berdampak di kawasan Asia Tenggara berkaitan erat dengan konteks kolonialisme, masalah regional, sosial-budaya dan politik. Agama dan identitas etnik yang saling berhimpitan itu bahkan memiliki peran penting dari konflik itu.

Di Filipina, konflik bermula berkaitan erat dengan persaingan misi agama Islam dan Kristen/pasca abad ke-13. Penindasan dan diskriminasi negara terhadap kelompok minoritas Muslim menjadi lebih kentara ketika penguasa menyebut mereka sebagai Moro yang berkonotasi pejoratif, artinya identik dengan kelompok Islam yang dulu menyerbu dan menduduki Spanyol. Bangsa Moro merespon penghinaan dan penindasan itu dengan aksi kekerasan dengan slogan *jihad fi sabilillah* sebagai perlawanan terhadap kaum kafir.

Kelompok Abu Sayyaf yang relatif masih muda, karena baru berkisar sembilan belas tahun, sudah berhasil melakukan aksi-aksi teror di Filipina yang menyebabkan pemerintah Filipina harus melakukan kebijakan-kebijakan ataupun tindakan-tindakan terhadap kelompok ini. Pemerintah Filipina memang telah disibukkan oleh dua kelompok gerakan lainnya, seperti MNLF dan MILF sebelumnya.

Dalam menanggulangi kelompok Abu Sayyaf rezim-rezim di Filipina telah melakukan penyerangan-penyerangan atas kamp dari Abu Sayyaf. Namun kelompok ini sangat sulit dilumpuhkan karena memiliki basis di masyarakat dan menguasai medan seperti di pedalaman pulau Basilan dan pulau lainnya.

Pemerintah Filipina dalam menangulangi gerakan ini juga meminta bantuan pihak asing, yakni Amerika Serikat. Sejak peristiwa 11 September 2001, Amerika Serikat telah gencar-gencarnya melakukan perang terhadap terorisme, dan yang termasuk target pemusnahannya ialah gerakan Abu Sayyaf yang terdapat di Filipina.Namun upaya itu tak sepenuhnya berhasil. Pemberontakan oleh kelompok Muslim Moro dan

aksi terror oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina Selatan lebih karena ketidakadilan dan kezaliman dalam kehidupan ekonomi dan politik, yang berhimpitan dengan perbedaan agama dan ideologi. [*]

ISLAMISME, SOFT POWER DAN DOKTRIN 'IMPERIALISME DEMOKRATIK' GEORGE W. BUSH

"Islam is the only civilization which has put the survival of the West in doubt, and it has done at least twice."

Samuel P Huntington, *2004*

The Arab world today is trapped between autocratic states and illiberal societies, neither of them fertile ground for liberal democracy. The dangerous dinamic between two forces has produced a political climate filled with religious extremism and violence[1].

Fareed Zakaria, 2004

Apa makna kunjungan Presiden Amerika Serikat (AS), George W Bush, ke Indonesia November tahun 2002? Lawatan Bush jelas merupakan kelanjutan penguatan hubungan bilateral yang sebelumnya dilakukan oleh kunjungan

[1] Fareed Zakaria, "Islam, Democracy and Constitutional Liberalism," *Political Science Quarterly*, Vol.119, No.1, 2004, h.3

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke AS tahun sebelumnya dan lawatan Wapres M. Jusuf Kalla ke Washington.

Indonesia merupakan elemen penting dalam perang AS melawan terorisme global, termasuk perang terhadap al-Qaeda. Indonesia adalah *anchor of stability* (Jangkar Stabilitas) di Asia Tenggara, sebagaimana diakui oleh Wapres AS, Dick cheney, dan Menlu AS, Condy Rice, ketika bertemu Wapres Jusuf Kalla di Washington bulan lalu. Keberhasilan Indonesia menangkap pelaku-pelaku teror dan menghancurkan jaringan terorisme merupakan kontribusi yang sangat penting terhadap upaya masyarakat internasional dan pemerintah AS dalam menghadapi terorisme global. Karena itu, secara geopolitik dan geo-ekonomi peran Indonesia di mata AS sangat krusial, apalagi sumber daya alam kita (migas, emas, tembaga, uranium, kekayaan laut dan seterusnya) amatlah besar.

Di dalam paradigma pemerintah AS yang meletakkan perang terhadap terorisme dalam kerangka ideologis, maka Indonesia sebagai negara demokrasi sekaligus negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia merupakan *role model* yang dipromosikan AS. Masyarakat Indonesia dengan tradisi agama dan kebhinekaan yang kuat sekaligus memiliki toleransi tinggi, dapat berperan sebagai *counter balance* dalam menghadapi peningkatan radikalisme agama yang dapat membahayakan sendi-sendi demokrasi dan integrasi.

Dalam hubungannya dengan Dunia Islam, Bush hendaknya menyadari bahwa di mata Dunia Islam, termasuk Indonesia, AS selalu dipandang hegemonik-imperialistik dan ingin menciptakan bangsa-bangsa lain, termasuk Dunia Islam,

agar meniru dan menjadi Amerika yang lain.[2] Dalam hal ini, Ali Shariati menyatakan bahwa ternyata proyek Amerikanisasi itu gagal karena di mana-mana AS justru melakukan dehumanisasi: membunuh orang Irak, orang Afghanistan, orang Arab, orang Iran, orang Afrika dan seterusnya. Almarhum Ali Shariati mengatakan bahwa kita tidak boleh tergoda untuk sekedar mengejar abad 20 atau sesudahnya dalam impian dan citra Amerika. "Kita harus melawan status quo, kejumudan dan hegemoni yang diciptakan oleh Amerika," kata Ali Shariati, sang cendekiawan Muslim dari Iran yang humanis.

Persepsi Bush Tentang Islam

Seperti diketahui, pandangan akademisi Harvard University, Samuel P. Huntington, selain Bernard Lewis, amat mempengaruhi persepsi Bush tentang Islam. Huntington mendukung dilakukannya *preemptive strike* AS terhadap kaum Islam militan. Nasihat Huntington telah membentuk pola pikir "bahaya Islam" atau "ancaman Islam" dalam diri Bush, dan kemudian di-diseminasi dan disosialisasi oleh pemerintah AS/Barat sedemikian rupa. Pada awal Juni 2002, doktrin *preemptive strike* (serangan dini) dan *defensive intervention* (intervensi defensif) secara resmi diumumkan. Melalui doktrin ofensif itu, AS telah mengubah secara radikal pola "peperangan" melawan musuh. Jika sebelumnya di masa Perang Dingin tatkala menghadapi blok komunis, AS menggunakan pola *containtment* (penangkalan) dan *deterrence* (penangkisan). Dalam menghadapi musuh baru, yakni Islam militan, Gedung Putih menggunakan pola

[2] Lihat, Dr Ali Shariati, *Man and Islam* (Islamic Publications International, 2005)

preemptive strike dan *defensive intervention*.Dengan doktrin itu, AS dapat melakukan berbagai serangan ke sasaran langsung, meskipun tanpa melalui persetujuan PBB. Pola pikir Huntington, bahwa Islam lebih berbahaya dari komunis juga tampak mewarnai kebijakan politik dan militer AS di bawah Presiden Bush tersebut.

Huntington mendukung dan membenarkan kebijakan Bush yang membabi buta mendukung kekejaman Israel atas Palestina, yang menjadi satu sebab penting tumbuhnya kekecewaan dan kemarahan kaum Muslim dan umat manusia di mana-mana. Huntington selalu meyakinkan Bush bahwa Islam adalah potensi musuh besar dan bahaya bagi Barat dan AS.

Jika Edward Said, Noam Chomsky, dan William Blum tanpa ragu-ragu menjuluki AS sebagai *a leading terrorist state*, atau *a rogue state,* sementara almarhum Daniel S. Lev (mahaguru emeritus University of Washington) mengatakan AS dipimpin setan dan dibimbing kebijakan setan ketika menyerang Irak dan Aghanistan, justru Huntington menyatakan retorika perang ideologi AS dengan komunisme telah ditransformasikan menjadi perang terhadap Islam militan,*"The rhetoric of America's ideological war with militant communism has been transferred to its religious and cultural war with militant Islam*."

Huntington bahkan lebih jauh mengungkapkan bahwa masyarakat AS melihat kelompok Islam fundamentalis dan Islam politik di Irak, Iran, Sudan, Libya, Afghanistan di bawah Taliban dan negeri Muslim lainnya serta kelompok teroris Islam seperti Hamas, Hizbullah, Jihad Islam dan jaringan al-Qaeda sebagai bahaya, dan perang AS terhadap

Islam militan menjadikan kaum militan sebagai musuh pertama AS pada abad ke-21 ini:

> *"Some Americans came to see Islamic fundamentalist groups, or more broadly political Islam, as the enemy, epitomized in Iraq, Iran, Sudan, Libya, Afghanistan under Taliban, and to lesser degree other Muslim states, as well as in Islamic terrorist groups such as Hamas, Hezbollah, Islamic Jihad, and the al-Qaeda network. The cultural gap between Islam and America's Christianity and Anglo-Protestanism reinforces Islam's enemy qualifications. And on September 11, 2001, Osama bin Laden ended America's search. The attacks on New York and Washington followed by the wars with Afghanistan and Iraq and more diffuse war on terrorism make militant Islam America's first enemy of the twenty-first century."*[3]

Soft Power

Persepsi dan perspektif akademisi Huntington mengenai Islam militan itu sangat mempengaruhi persepsi dan perspektif Bush yang paranoid pasca serangan WTC. Di tengah ketakutan Bush dan kecurigaannya terhadap Islam militan, kunjungan Presiden AS itu ke Indonesia sudah pasti mengundang reaksi umat Islam dan aneka resistensi. Namun demikian, Indonesia di era SBY-Kalla bisa menggunakan *soft power*-nya – meminjam frase Joseph Nye - untuk meyakinkan Bush agar menghentikan invasi AS ke Irak dan Afghanistan serta intervensinya ke Palestina untuk meredakan ketegangan dunia. Demikian pula sebaliknya, Bush sebaiknya mendayagunakan *soft power*-nya untuk menciptakan perdamaian di Dunia Islam. Bush memiliki

[3] Baca, Samuel P. Huntington, *Who Are We?: The Challenges to America's National Identity* (New York: Simon & Schuster, 2004).

begitu banyak *soft power* seperti bantuan ekonomi, pendidikan, aneka seni dan pertukaran budaya. Dan *soft power* Indonesia maupun AS untuk itu senantiasa ada dan terbuka.

Barat dan Islam

Dewasa ini, meski modernisasi merupakan fenomena global dan seluruh kebudayaan menjadi modern dan perbedaan antara Barat dan bukan Barat (Dunia Arab, Asia, Timur) makin menipis, berkurang atau makin hilang, - meminjam diskursus Samuel P Huntington -, tidak berarti ketegangan dan permusuhan antara Dunia Barat dan bukan Barat otomatis berakhir.[4]

Setidaknya, di era globalisasi ini, hubungan AS/Barat dan Dunia Arab/Islam masih dipenuhi dengan salah pengertian, ketegangan bahkan permusuhan. Setelah serangan teroris ke Pentagon Washington DC dan World Trade Center New York 11 September 2001, aura dan atmosfer ketegangan maupun permusuhan itu bisa dilihat pada sikap dan perangai AS yang disimbolisasikan oleh sikap dan perilaku Presiden George W Bush dan para pejabat AS yang konservatif. George W Bush dan kubu neokonservatif telah menyampaikan respon keras dan mengancam terhadap negara-negara berpenduduk Islam yang dianggapnya mendukung terorisme.

Salah satu kolega utama Bush adalah Paul Wolfowitz, mantan Dubes AS untuk Indonesia. Wolfowitz adalah mantan guru besar/dekan di School of Advanced International Studies, Johns Hopkins University, AS sebelum men-

---

[4] Samuel P Huntington, "Keynote Address," *paper,* Colorado College, 1999.

duduki jabatan Deputi Menhan AS. Ia meraih gelar PhD Ilmu Politik di University of Chicago, AS. Ia dikenal ramah, santun dan cerdas, berpengetahuan luas tentang Islam Politik, Timur Tengah dan Asia Tenggara.

Namun beberapa hari setelah tragedi WTC, Wolfowitz tiba-tiba berubah perangainya menjadi "keras dan menakutkan" dengan menyatakan AS akan melenyapkan "negara-negara tertentu" yang terlibat dalam serangan terorisme terhadap WTC. Negara-negara di seluruh dunia ditekan AS untuk melakukan perang terhadap terorisme, dengan statemen "keras" yang digemakan oleh Presiden AS George W.Bush yakni "*either with us or against us*." Statemen Bush itu diperkuat gaungnya oleh Wolfowitz dengan seruan untuk melenyapkan "negara-negara tertentu" (baca: negara Muslim) yang dalam persepsi AS merupakan negara-negara pendukung dan penggalang kegiatan terorisme internasional seperti Afghanistan, Irak, Suriah, Libia dan Iran.[5] Tahun 2003 Wolfowitz mengunjungi Irak pasca runtuhnya Saddam Hussein dan sempat disambut serangan bom. Ia sendiri selamat namun menyatakan terkejut dan mengutuk aksi terorisme tersebut. Serangan ini kelak berkelanjutan dengan serangan bom bunuh diri yang banyak terjadi di Irak sebagai perlawanan terhadap intervensi AS.[6]

---

[5] Herdi Sahrasad, "AS dan Zona Krisis Pasca Serangan Teroris," opini, *Kompas*, 25 September 2001.

[6] Di masa lalu, Wolfowitz dikenal merupakan tokoh sentral yang merekayasa Ferdinand Marcos diturunkan dari kepresidenan Filipina. Segera setelah pemerintah AS menyimpulkan diktator Marcos tidak sah lagi memimpin Filipina, AS memerintahkan Wolfowitz aktif memproses penggulingannya pada 1986. Sebagai tokoh sentral di balik proses penggulingan Marcos pada waktu itu, Wolfowitz yang menjabat sebagai Asisten Menlu AS urusan Asia mendayagunakan otoritasnya dengan mengerahkan jajarannya agar melakukan kontak-kontak dengan para pimpinan berbagai kekuatan oposisi dan prodemokrasi di Filipina secara rahasia.

Nasionalisme Baru, PNAC dan Minyak

Sebagaimana banyak diketahui, peristiwa WTC dan Pentagon yang terjadi di jantung AS itu, amat mengejutkan dan memukul perasaan masyarakat Amerika, selain menimbulkan banyak sekali korban dan kerugian maha besar. Untuk itu Bush dan Paul Wolfowitz, menyadari bahwa diperlukan "nasionalisme baru" guna membangkitkan kepercayaan dan keyakinan diri bangsa Amerika agar tragedi WTC tidak menimbulkan rasa ketakutan, kekhawatiran, keresahan dan ketidakpastian yang berkepanjangan. Nasionalisme baru dalam imajinasi Bush dan Wolfowitz itu tak lain adalah "Pax Americana" dengan doktrin Bush yang lazim disebut "imperialisme demokratik" yang praktiknya kita saksikan dewasa ini di Timur Tengah (Dunia Arab).

Bush dan Wolfowitz merupakan figur elite yang amat memahami psiko-sosial-politis rakyat AS, sehingga ia segera memanfaatkan momentum tragedi WTC itu untuk meneguhkan "nasionalisme baru Amerika" agar bangsanya tidak larut dalam duka, ketakutan dan kepedihan serta kemunduran moril. Ia menyusun kebijakan garis keras terhadap negara-negara Arab/Islam yang dianggap terlibat dalam tragedi yang amat memukul Amerika itu. Sudah

Demikian halnya ketika Wolfowitz menjadi Dubes AS untuk Indonesia 1986-1989, ia menyerukan keterbukaan dan diam-diam memprakarsai dan memberlakukan upaya perubahan rezim di Indonesia. Steve H. Hanke, guru besar ekonomi Johns Hopkins University, Baltimore, mencatat Wolfowitz "membidik jatuh" Presiden Soeharto yang otoriter, seperti halnya Marcos, yang dianggap korup, diktator dan harus dijatuhkan. Pemerintah AS dengan bantuan IMF akhirnya berhasil menumbangkan rezim Soeharto. Dan tak banyak yang tahu bahwa tokoh sentral di balik upaya penumbangan Soeharto itu adalah Wolfowitz. Lebih dari itu, perannya relatif penting dalam menentukan konfigurasi politik di Asia Tenggara, juga Afghanistan dan Irak.

barang tentu keterlibatan Bush dan Wolfowitz dalam kebijakan neo-konservatif itu bukan hanya setelah tragedi WTC terjadi.

Dewasa ini masyarakat Dunia Arab/Islam menyaksikan George Bush, Paul Wolfowitz dan kolega neo-konservatif-nya memprakarsai dan mempromosikan Proyek Abad Baru Amerika atau *the Project for New American Century (PNAC),* yang diam-diam dipersiapkan sejak 1997. Para intelektual dan elite politik di Dunia Arab/Islam sangat meyakini bahwa proyek "Pax Americana" itu merupakan sumber gagasan doktrin Bush yakni "imperialisme demokratik." Doktrin ini merupakan strategi kaum neokonservatif AS yang bertujuan jangka panjang untuk mengubah dan mendominasi Dunia Arab/Islam menjadi suatu kawasan "demokratis" sesuai dengan apa yang diinginkan dan dibayangkan oleh AS (maupun Israel). Mengenai hal itu, sejarawan Arnold Toynbee telah mencatat tahun 1961 tentang posisi dan sikap AS yang sewenang-wenang terhadap bangsa-bangsa lemah. AS tidak adil dan hanya mementingkan kekuatan besar, kaya dan minoritas umat manusia sebagaimana yang dulu dilakukan oleh imperium Romawi.[7] Toynbee menulis:

> *American is today the leader of world-wide anti-revolutionary movement in the defense of vested interests. She now stands for what Rome stood for Rome consistently supported the rich against the poor in all foreign communities that fell under her sway and since the poor, so far, have always and everywhere been far more numerous than the rich, Rome's policy made for inequality, for injustice and for the least happiness of the greatest number.*

---

[7] Adian Husaini, "Menonton dan Menunggu Janji AS," *Kompas*, 1 Maret 2004

AS merencanakan perubahan demokratik di Dunia Arab/ Islam dan itu diperkuat dengan doktrin Bush tentang ″imperialisme demokratik″ di Dunia Islam sebagai proyek PNAC, yang salah satu inti sarinya menyatakan bahwa jika Dunia Arab/Islam terus *vis-à-vis AS/*Barat dan tidak berubah dalam hubungannya dengan AS/Barat, maka ia akan menjadi suatu formula malapetaka.[8]

Pasca tragedi WTC, gagasan dan agenda Bush dan kolega neo-konservatifnya semakin mendapat tempat dalam kebijakan luar negeri Washington dengan jargon "imperial-isme demokratik" tersebut. Dalam hal ini, Bush, Wolfowitz dan kubu neokonservatifnya dinilai kaum intelektual dan elite politik Dunia Arab/Islam sebagai sangat radikal, terlalu berani dan optimistik, bahkan angkuh. [9]

PNAC sendiri merupakan suatu kumpulan pemikir dan ahli strategi di Washington yang dibentuk pada Juni 1997 oleh kaum neokonservatif antara lain Bush, Wapres AS Dick Cheney, Elliot Abrams, Paula Dobrinsky, Menhan Donald Rumsfeld dan Deputi Menhan AS Paul Wolfowitz. Selain mereka, masih ada Ricard Perle dari Pentagon yang juga salah satu penggagas PNAC, kemudian Jeb Bush - adik Presiden George W. Bush-, jutawan Steve Forbes dan mantan Wapres, Dan Quayle. Tujuan utama PNAC adalah memperkokoh dukungan bagi kepemimpinan AS di dunia internasional (*Pax Americana)* dengan doktrin Bush yang kemudian dikenal sebagai ″imperialisme demokratik.″

Dalam persepsi Bush dan kaum neokonservatif, prinsip utama PNAC dan doktrin ″imperialisme demokratik,″

---

[8] Baca laporan *Washington Post* , 2/4/2003

[9] Baca laporan *Berita Harian*, Kuala Lumpur,12/4/2003

adalah bahwa AS memiliki kewajiban untuk membentuk abad baru yang memihak kepada kepentingan dan prinsip AS sendiri, dengan penekanan pentingnya hak asasi manusia, kebebasan pers dan demokratisasi. Doktrin itu menganggap AS memiliki peranan penting dalam mengekalkan perdamaian, keamanan dan keselamatan Eropa, Asia dan Timur Tengah. Jika AS mengabaikan tanggung jawab itu, maka kepentingan dasar AS akan terganggu dan menimbulkan persoalan yang musti diselesaikan. Bush dan Wolfowitz berpendapat bahwa sejarah abad ke-20 lalu mengajarkan kita mengenai pentingnya melakukan persiapan sebelum suatu krisis terjadi dan mencegah ancaman sebelum keadaan menjadi kacau dan berbahaya.

Karena itu, dalam persepsi mereka, penggulingan rezim Taliban dan Presiden Saddam Hussein merupakan pembebasan rakyat Afghan dan Irak dari cengkeraman "para diktator," suatu kebijakan yang signifikan dalam prinsip PNAC dan doktrin Bush yang menegaskan perlunya mengukuhkan hubungan dengan sekutu demokrasi dan menghancurkan negara yang melawan kepentingan dan nilai-nilai Amerika.

William Rivers Pitt menyatakan bahwa impian dan kehendak PNAC serta doktrin "imperialisme demokratik" *ala* Bush bertujuan mewujudkan imperium global AS untuk menguasai dunia dengan menggariskan beberapa kebutuhan AS untuk mewujudkan imperium globalnya yakni:

Pertama, melaksanakan imperialisme demokratik guna membebaskan Dunia Arab (Islam) dari cengkeraman para diktator, melalui agenda hak asasi manusia dan demokrasi dan untuk menjamin hal itu itu, perlu menempatkan

pasukan militer di selatan Eropa, Asia Tenggara dan Timur Tengah.

Kedua, memodernisasi tentara dan perlengkapan militer AS termasuk jet tempur, kapal selam dan kapal perangnya.

Ketiga, membangun sistem peluru kendali untuk pertahanan global dan menguasai angkasa raya.

William R. Pitt menyatakan bahwa kemarahan sebagian umat Islam dan Arab niscaya meledak dalam bentuk permusuhan atau terorisme lantaran AS menetapkan agenda masa depan dunia Islam, suatu hal yang sangat sensitif dan riskan. Kasus Irak, Palestina dan Afghanistan merupakan contoh paling telanjang dari agenda AS itu.[10]

Dalam konteks Irak dan Afghan, AS mendominasi pembangunan kembali Irak (dan Afghanistan), yang tidak semudah ketika menghancurkannya. Salah satu bukti agenda ekonomi AS di Afghan adalah proyek pipanisasi gas dan minyak miliaran dolar dari Asia Tengah melalui Afghanistan menuju Samudera Hindia. Sedangkan agenda AS di Irak pasca invasi, adalah pemerintah sipil AS di Irak ternyata telah memberikan kontrak tahap pertama kepada perusahaan AS sendiri senilai US$1 triliun dari US$100 triliun biaya total rekonstruksi Irak. Kontrak ini semuanya diberikan kepada perusahaan dan korporasi AS sehingga mengundang kritik dan kecaman dari berbagai negara seperti Jerman, Perancis, Rusia dan negara lain yang tidak kebagian. Dalam bagi-bagi proyek pasca invasi AS ke Irak, anak-anak perusahaan Halliburton Co yang menurut beberapa sumber perusahaan telah menyetor puluhan ribu dollar AS dalam

[10] Lihat, William R. Pitt , *War on Iraq dan The Greatest Sedition is Silence: Four Years in America* (Pluto Pers, 2003).

pemilihan Presiden dan Wapres AS, Bush dan Cheney, mendapat jatah paling besar. Proyek rekons-truksi kilang minyak Irak dan fasilitas publik yang rusak diperkirakan UNDP (United Nations Development Program) menelan US$30 miliar dan itu juga diberikan kepada korporasi AS.

Menanggapi situasi ini, mudah disimpulkan bahwa tak bisa dibantah, AS dewasa ini amat sibuk mencampuri politik Dunia Arab/Islam seakan melakonkan peranan sebagai imperialis global tak terkalahkan, menentukan nasib Dunia Arab/Islam dan menguasai urusan politik mereka. Makin nyata bahwa serangan militer AS ke Irak bertujuan untuk melindungi Israel, menegakkan demokrasi Barat dan Hak Asasi Manusia *ala* Amerika di Timur Tengah dan membentuk politik Islam yang lebih mudah dikendalikan, yang kesemuanya itu seiring dengan garis-garis pedoman doktrin "imperialisme demokraik" *ala* George W. Bush, Wolfowitz dan koleganya.

Dengan menyimak konteks PNAC, menjadi logis dan asimetris jika AS sangat komit dengan agenda hegemoninya di Timur Tengah, termasuk mendukung kekejaman Israel atas rakyat Palestina. Pentagon bersikap standar ganda atas sepak terjang para pemimpin Israel yang sewenang-wenang terhadap Palestina.

Di era pasca Perang Dingin ini, menyusul runtuhnya komunisme, hegemoni dan dominasi AS nyaris tanpa saingan dan lawan yang seimbang sehingga praktis hanya terorisme yang menjadi ancaman atas globalisme AS. Ironis dan paradoksal bahwa terorisme dan musuh utama AS itu ternyata hanya para lelaki tua (kakek) bernama Saddam Hussein dan Osama bin Laden. Dala hal ini, Bin Laden

dianggap sebagai tokoh sentral al-Qaeda, organisasi yang para pengikutnya merupakan barisan Mujahiddin yang justru dilatih dan dipersenjatai oleh AS untuk melawan pendudukan Uni Soviet/komunis di Afghanistan kurun 1970-an sampai 1990-an.

Dengan kehancuran rezim Saddam Hussein, sebagai suatu persyaratan utama untuk membangun kembali perekonomian dan peradaban Irak, maka AS, Barat dan Dunia Arab/Islam perlu bekerjasama untuk membuat satu paket rekonstruksi semacam *Marshall Plan*. Begitu sanksi PBB atas Irak dicabut, maka restrukturisasi utang luar negeri Irak dapat dilakukan dan mata uang Irak, dinar yang baru, dapat digunakan secara legal di pasar bebas. Aspek paling krusial dari Irak adalah bagaimana mengontrol kebangkitan kembali ekonomi Irak dengan mengontrol sumber minyak dan gas Irak yang mencapai 118 - 2000 miliar barrel untuk kemakmuran rakyat Irak sesuai janji Presiden AS George W Bush dan PM Inggris Tony Blair dalam KTT Azores menjelang invasi AS-Inggris ke Irak tahun 2003 lalu.

Dalam hal ini, Inggris pernah secara sepihak menyarankan perlunya privatisasi minyak-gas Irak, dengan model "*Texas on Tigris*", sebagai jaminan terbaik mencegah kemungkinan diktator lain muncul di Baghdad. Dikhawatirkan kemunculan diktator demikian akan menggunakan pendapatan dari minyak/gas itu untuk kepentingan pribadi dan membangun rezim kleptokrasi yang dicurigai berpotensi mendukung aktivitas terorisme dan senjata pemusnah massal.[11]

---

[11] Baca laporan *The London Financial Times*, 2/4/2003.

Sejauh ini persaingan untuk berebut minyak dan gas di Irak telah memicu konflik kepentingan di negara-negara Barat, dan persaingan atas minyak itu telah menjadi tema laten dalam sejarah rahasia Timur Tengah modern. Selain itu, politik separatisme Kurdi pasca rezim Saddam, dan barisan oposisi Syiah di Irak selatan, merupakan kartu liar lain geopolitik di Irak di era transisi saat ini, yang bersama kekuatan Muslim Sunni di Baghdad akan turut menentukan masa depan konfigurasi dan kepemilikan bisnis minyak di Irak.

Kekayaan dari minyak telah membuat Saddam seorang tiran minyak terkaya dan paling berdarah di Timur Tengah. Tak mengherankan jika AS dan Barat sangat bernafsu atas aset minyak di Irak itu, suatu kenyataan yang mengindikasikan hasrat AS dan koalisi untuk menumbangkan rezim Saddam Hussein menyimpan maksud untuk melakukan "kudeta asset" minyak di Irak

Ironis dan paradoksal bahwa tatkala rakyat Irak hancur menderita, AS telah mengkapling-kapling jatah proyek pembangunan kembali Irak. Situasi ini mudah menyulut dendam dan kemarahan sebagian umat Islam dan Arab, yang berpotensi meledak lantaran AS menetapkan agenda masa depan Irak secara sepihak, suatu hal yang sangat sensitif dan mencurigakan.[12]

Penggulingan rezim Saddam merupakan titik balik, *watershed*, bagi pembangunan ekonomi-politik Irak, asalkan AS dan Barat tidak mengkhianati dan merusak janji mereka untuk membawa demokrasi ke Irak, suatu negara yang selama 6000 tahun terakhir tidak mengenal demokrasi dan

---

[12] Baca laporan *Utusan Malaysia* dan *Berita Harian*, Kuala Lumpur, 12/4/2003

HAM. Dahulu, Rusia setelah runtuhnya Tembok Berlin tak punya pengalaman historis tentang demokrasi, demikian halnya Jepang pasca bom atom Nagasaki dan Hirosima, namun toh kini mereka memiliki demokrasi. Dalam hal ini, demokrasi di Irak musti melalui proses *in the making*. Pilihannya ialah antara demokrasi religius atau demokrasi sekuler. Transisi pasca Saddam ini merupakan momen menentukan dalam sejarah Timur Tengah di mana Irak berpeluang menjadi katalis kebangkitan ekonomi baru di Dunia Arab.

Yang harus dicamkan, tanpa campur tangan AS di Irak, maka perbedaan agama, ideologi dan loyalitas etnis berbagai kelompok masyarakat yang berseberangan justru akan bisa dipertemukan di Irak dalam bingkai demokrasi. Sebaliknya, dari pengalaman historis tahun 2003 sampai 2004, campur tangan AS di Irak menuai reaksi balik berupa serangan bom dan aksi kekerasan lainnya, sehingga konsekuensi yang tak diinginkan akhirnya jadi pilihan: konstruksi absurd di Irak dewasa ini harus diakhiri dan dibangun kembali dengan kekuatan kekerasan di bawah hegemoni dan dominasi AS. Akibatnya, sejarah kembali berdarah.

Dalam konteks itu, para pengamat Timur Tengah meramalkan pemberlakuan pemerintahan sipil , demokrasi dan HAM secara paksa di Irak, akan mendorong kemarahan Dunia Arab/Islam dalam bentuk permusuhan, terorisme dan aksi sejenisnya. Tidak ada penguasa boneka bikinan AS yang bisa memikat hati dan jiwa rakyat Irak dan Dunia Arab. Bahkan pendudukan dan serangan AS terhadap Irak hanya membangkitkan nasionalisme religius Arab, kema-

rahan umat Islam dan umat-umat beragama lain di mana-mana, tak hanya di Timur Tengah.

AS dan Dunia Islam

Menyimak manuver militer AS di Irak, mudah dimengerti bahwa penempatan militer AS di Timur Tengah itu merupakan kelanjutan dari manuver militer mereka di selatan Filipina, terutama di kawasan Islam Mindanao, kemudian di Afghanistan dan kini di Irak. Boleh jadi era baru Amerika sesuai pedoman ″PNAC″ dan Doktrin ″Imperialisme Demokratik″ Bush dan kolega neo-konser-vatifnya adalah cetak biru dinamika kebijakan luar negeri AS pasca serangan WTC 11 September yang mendorong campur tangan AS yang lebih mendalam di Dunia Arab/ Islam.

Itulah sebabnya ada kekhawatiran bahwa jika keadaan bertambah buruk, dan janji-janji Washington bagi demokrasi dan kemakmuran di Dunia Islam/Arab tidak terwujud, era baru AS sesuai "cetak biru" PNAC bakal menjadi konflik atau konfrontasi Amerika dengan Dunia Arab/Islam.

Sejauh ini, di kalangan Dunia Arab/Islam tidak ada pihak yang percaya sepenuhnya bahwa Washington tidak akan menyerang Suriah, Iran atau Libya, terbukti AS telah mencurigai dan mengawasi ketat ketiga negeri Muslim itu serta membatasi ruang gerak mereka di percaturan regional dan global.

Dalam hubungannya dengan Dunia Islam/Arab, dengan doktrin ″imperialsime demokratik″ yang nyata-nyata me-langgar HAM dan berstandar ganda, nampak jelas bahwa

AS menjadi imperium global yang melawan prinsip-prinsip dan nilai-nilai demokrasinya sendiri.

Ironis dan paradoksal bahwa *PNAC* dan doktrin ″imperial-isme demokratik″ Bush di mata Dunia Islam/Arab justru menjadi "kampiun kejahatan global" yang melindas HAM dan demokrasi yang diajarkan oleh Washington sendiri kepada Dunia Islam/Arab yang umumnya disebut Dunia Ketiga. Dalam konteks ini, berdasarkan indikasi intervensi militer AS di wilayah Balkan, Korea, Afghanistan dan Filipina selatan, bisa diprediksi kehadiran militer AS di Irak dan Timur Tengah akan lebih lama dari yang diren-canakan. Masa depan pembangunan "imperium global" (*Pax Americana*) oleh AS di Timur Tengah dan Dunia Islam akhirnya tak terelakkan.

Bush dan kubu neo-konservatifnya diperkirakan akan terus terlibat dalam ketegangan antara AS dan Dunia Arab/Islam untuk menggulingkan rezim-rezim yang dianggap tidak sah, tidak demokratis atau pendukung terorisme. Inilah yang membuat Prof Johan Galtung (perumus teori depen-densia dan strukturalisme) menyatakan bahwa, ″Dibanding serangan yang pernah dilakukan teroris, maka terorisme negara yang dilakukan AS jauh lebih berbahaya karena menggabungkan fundamentalisme agama dan fundamental-isme pasar.″ AS di mata Galtung merupakan negara adi-kuasa yang sering melanggar hukum internasional, men-campuri urusan negara lain dan tidak menghormati Islam.[13] Sinyalemen Galtung itu mengkonfirmasikan hegemoni 'imperialisme demokratik' *ala* AS yang di era Bush secara telanjang menduduki, menindas dan menghisap sumber

[13]Baca laporan *Kompas*, 17/11/2002

daya Dunia Islam (Arab).

Islamisme dan Doktrin 'Imperialisme Demokratik'

Dalam pertemuannya dengan Presiden Mesir Hosni Mubarak di Istana Presiden Heliopolis, Cairo tahun 2004, seorang diplomat AS meminta Mesir memperhatikan hak asasi manusia (HAM), melakukan keterbukaan politik, melonggarkan kebebasan pers dan menghentikan penangkapan terhadap para intelektual bebas. Apa jawab Mubarak? "Jika saya lakukan saran dan kemauan anda tersebut, maka kaum fundamentalis Islam akan berkuasa di Mesir. Inikah yang anda inginkan?" Jawaban Mubarak itu membuat pejabat AS itu terperangah.

Beberapa tahun sebelumnya, tulis Fareed Zakaria[14], nada yang hampir sama diartikulasikan Yasser Arafat di Palestina. Tatkala mendiang Presiden Yasser Arafat menyetujui rencana perdamaian Camp David pada tahun 2001. Presiden AS waktu itu, Bill Clinton, meminta Arafat memberlakukan demokrasi di Palestina. Arafat menjawab, "Jika saya lakukan apa yang anda inginkan, maka Hamas akan berkuasa di Palestina besok pagi," katanya. Demikian halnya elite Saudi Arabia, Pangeran Bandar bin Sultan, juga mengatakan kepada para pejabat AS bahwa jika kebebasan pers dan demokrasi diterapkan di Saudi maka AS akan melihat bukannya demokrasi *Jeffersonian* yang berkembang di Saudi melainkan teokrasi model Taliban yang bakal terjadi.

Agaknya, para penguasa Dunia Arab (Timur Tengah) mengidap kecemasan dan ketakutan terhadap demokrasi.

[14] Lihat, Fareed Zakaria, "Islam, Democracy..."

Namun tahun 2006 situasi berubah. Doktrin George W. Bush dan kubu konservatif di Gedung Putih yang telah lazim disebut "imperialisme demokratik" seakan menemukan tantangan baru dengan kemenangan Islamisme dalam pemilu demokratis di Dunia Islam, yang celakanya seperti dalam kasus Hamas, justru mengundang kegusaran dan kemarahan AS maupun Israel. Dalam kasus Hamas, AS menggunakan standar ganda dalam agenda "imperialisme demokratik-nya" yakni menolak atau menegasikan kemenangan kelompok Islamisme yang dianggapnya hanya akan memunculkan kekuasaan para fundamentalis, mullah *ala Iran* atau *teokrat ala* Taliban.

Perkembangan HAMAS

Di negara-negara Muslim, kemenangan Islam politik (baca: Islamisme) dalam pemilu sebenarnya merupakan suatu pengalaman dan perkembangan baru. Kemenangan elektoral Hamas di Palestina yang mengejutkan AS/Barat, seperti halnya kemenangan Refah di Turki dan FIS di Aljazair, semestinya membuka mata-hati Barat tentang betapa signifikannya saling pengertian dan pemahaman antara para pemimpin AS/Barat dan tokoh Islamisme di Dunia Muslim dalam mempraktikkan demokrasi agar tidak terjadi lagi pertikaian panjang yang menyesatkan dan merugikan. Dalam konteks Palestina, penyusunan skenario oleh AS dan Israel untuk menggulingkan Hamas,[15] dikhawatirkan kontraproduktif dan meningkatkan resonansi politik anti-Barat di Dunia Islam.

---

[15] Baca laporan *New York Times*, 14/2/2005.

Kemenangan Hamas membuktikan ketidaksahihan pandangan Islamolog di Barat yang mengemukakan bahwa Islamisme telah mundur dan gagal dalam memperjuangkan dan mempertahankan kekuasaan politik di wilayah Muslim. Olivier Roy dan Gilles Kepel mengungkapkan bahwa menjelang akhir abad ke-20 ini, gerakan-gerakan Islamis telah mundur dan gagal dalam meraih kekuasaan dengan jalan demokratis maupun non-demokratis (revolusi, kekerasan). Serangan teroris 11 September di WTC New York 2001 merupakan upaya membalikkan proses kemunduran itu, yang dalam persepsi Roy dan Kepel, tindakan itu sejatinya merupakan simbol keputusasaan dari isolasi, fragmentasi dan kemunduran Islamisme. Eksperi-men politik Islamisme di Afghanistan, Aljazair dan Afghanistan, misalnya, dianggap ketinggalan dan kedaluwarsa.[16] Pandangan Roy dan Kepel ini senada dengan Ray Takeyh yang menyatakan bahwa momen politik Islamisme sudah lewat. Para Islamis di Mesir, Turki, Aljazair dan Timur Tengah lainnya, demikian Takeyh, telah gagal mencapai impian kekuasaan mereka. Bahkan Islamisme menurutnya tidak lebih dari suatu ideologi kosong yang merongrong kaum Muslim untuk menempuh jalan kekerasan.[17]

Tapi kini sejarah berbicara lain. Pandangan para Islamolog itu tak selalu benar. Fakta historis memperlihatkan bahwa di Palestina, Hamas memenangkan pemilihan umum, di Turki Refah masih berjaya dan di Libanon Hizbullah terus berkembang, juga di Iran dan Irak politik Syiah terus menguat.

---

[16] Lihat, Olivier Roy, *Globalised Islam: the Search for a New Ummah* (Columbia University Press, 2004) dan Gilles Kepel *Jihad: The Trail of Political Islam,* trans. by Anthony F. Roberts (London, New York: I.B. Tauris, 2002)

[17] Ray Takeyh, "Islamism: Rest In Peace," *The National Interest,* No. 63, 2001, h.97.

Sementara di kawasan Asia Tengah (Uzbekistan, Kirgyztan, Kazakhtan dan Tajikistan) gerakan Hizbut Tahrir memperoleh dukungan rakyat yang meyakinkan. Hizbut Tahrir berkembang di kawasan itu karena tidak ada kelompok oposisi yang efektif. Situasi ini, meminjam studi Cornell and Spector dimanfaatkan Hizbut Tahrir dengan memperlihatkan dirinya sebagai satu-satunya kelompok oposisi terhadap elite penguasa. Tiadanya kekuatan oposisi sekuler di Asia Tengah telah mendorong Hizbut Tahrir menjadi *political vehicle* yang *reasonable*, apalagi mereka memiliki kemampuan berorganisasi yang baik dan memperoleh sumbangan dana dari negara-negara Timur Tengah untuk mengembangkan kegiatan politiknya.[18] Dalam konteks ini, harus diakui bahwa Islamisme telah berhasil mempengaruhi ruang privat maupun publik di tengah modernisme dan sekulerisme yang masiv di Dunia Islam. Setidaknya dalam beberapa dekade terakhir, Islamisme mampu mewarnai kehidupan sosial, budaya dan politik di berbagai negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Pengaruh Islamisme itu bisa dilihat dari maraknya penampilan busana dan jilbab Muslimah sampai pemberlakuan syariat Islam, yang mau tak mau mendorong pemerintahan di Dunia Islam mengakomodasikan tuntutan kaum Islamis.

Pendekatan Multikulturalisme

Berbagai kemenangan Islamisme dalam pemilu demokratis di kawasan-kawasan Muslim hendaknya membuka mata batin AS/Barat bahwa Islam *compatible* dengan demokrasi

---

[18] Cornell and Spector, "Central Asia:More Than Islamic Extremists," *The Washington Quarterly*, Vol. 25, No.1, 2002, h. 193–206.

dan ada kesempatan besar untuk mencari solusi bersama guna mewujudkan tatanan dunia yang demokratis, damai dan toleran. Saya sependapat dengan Prof. R.William Liddle (*Kompas*, Kamis, 9/2/2006) bahwa masalahnya bukanlah benturan peradaban, melainkan konflik kepentingan yang selama ini mewarnai relasi Islam dan AS/Barat. Karena itu, AS/Barat harus menaruh kepercayaan kepada kaum Islamis bahwa merekapun bisa berkiprah secara terhormat dan beradab dalam kehidupan demokratis, dan sebaliknya para Islamis juga seyogianya tidak mencurigai AS/Barat sebagai kekuatan (teroris) adidaya yang selalu bernafsu mendominasi, menghegemoni dan menundukkan Dunia Islam.

Kaum Islamis di Hamas, Refah, Hizbullah, Syiah dan Hizbut Tahrir serta organisasi sejenis di berbagai negara Muslim, harus dipandang oleh AS/Barat sebagai mitra strategis untuk memungkinkan AS/Barat mengajukan tawaran baru dan insentif guna menciptakan suatu wawasan baru yang memungkinnya terwujudnya tatanan dunia yang demokratis, damai dan toleran itu dalam batas-batas kemampuan dan sumberdaya yang ada. Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia berpotensi untuk mendayagunakan pengaruhnya (*soft power*) agar para pemimpin AS/Barat mau berdialog dan berunding dengan para tokoh Islamisme seperti Hamas, Refah, Syiah, Hizbullah, Hizbut Tahrir dan sebagainya, untuk mencapai tujuan dan cita-cita bersama bagi peradaban dunia yang lebih baik, adil dan toleran.

Dalam hal ini, para pemimpin AS/Barat dan tokoh-tokoh Islamisme di negara-negara Muslim dapat menggunakan pendekatan multikulturalisme baru untuk maju bertemu di

tengah jalan yang belum sepenuhnya buntu. Multikulturalisme baru itu adalah suatu pendekatan yang menawarkan perspektif kebudayaan dan agama dalam memahami perbedaan-perbedaan yang ada selama ini. Selain itu, multikulturalisme itu bukanlah cara pandang yang menya-makan kebenaran agama-agama, melainkan justru mendorong pihak-pihak yang berbeda untuk saling menghormati perbedaan dan kebhinekaan bukan karena pengakuan terhadap kebenaran agama dan keyakinan mereka, tetapi karena masing-masing pihak harus menghormati nilai dan tradisi pihak lain dalam kehidupan sosial, politik dan keagamaan. Pendekatan multikulturalisme ini relevan bagi upaya membangun dialog antara para pemimpin AS/Barat dan para tokoh Islamisme di negara-negara Muslim, - untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan yang terbuka di era demokratisasi dewasa ini - agar tidak terjadi salah pengertian dari masing-masing pihak. Sudah terlalu sering kedua belah pihak berbenturan akibat salah pengertian dan salah paham serta konflik kepentingan yang tak berkesudahan. Kita berharap, kedua belah pihak menyadari bahwa di era globalisasi demokrasi dewasa ini, masyarakat dunia lebih membutuhkan dialog, kerjasama, saling pengertian dan pemahaman ketimbang konflik dan perse-teruan yang berdampak multiplikasi, menghabiskan sumber daya, dan meletihkan. Kita telah melihat bahwa perang AS terhadap Irak dan Afghanistan relatif cepat diselesaikan, namun perdamaian acapkali jauh lebih sulit diwujudkan sesudah perang itu diakhiri. Sejarah sudah menunjukkan kenyataan demikian ini.

Bagi Indonesia, di tengah saling ketergantungan antarbangsa, tak ada pilihan lain kecuali menggunakan *soft power-*

nya untuk membujuk, mengimbau dan mendesak AS, termasuk pada pejabatnya seperti Presiden George W Bush, dan kolega neo-konservatifnya agar membangun dialog, saling pengertian dan kerjasama ketimbang konfrontasi dan permusuhan dengan Dunia Islam/Arab karena hanya akan memperpanjang "atmosfer ketegangan dan permusuhan" yang sudah menyala sejak krisis Palestina-Israel, pemboman WTC, yang disusul oleh serangan AS ke Afghanistan dan Irak. Diskursus ketegangan dan permusuhan itu tersirat tajam dari wacana kapitalisme, liberalisme dan globalisme, yang berhadapan diametral *(vis-a-vis)* dengan fundamentalisme, Islamisme dan terorisme. Pendekatan multikulturalisme boleh jadi menemukan relevansinya dalam masalah global ini.[*]

REFERENSI:

Zakaria, Fareed "Islam, Democracy and Constitutional Liberalism," *Political Science Quarterly*, Vol.119, No.1, 2004.

Shariati, Ali, *Man and Islam* (Islamic Publications International, 2005)

Huntington, Samuel P., *Who Are We?: The Challenges to America's National Identity* (New York: Simon & Schuster, 2004).

Huntington, Samuel P., "Keynote Address," *paper,* Colorado College, 1999.

Sahrasad, Herdi, "AS dan Zona Krisis Pasca Serangan Teroris," opini, *Kompas*, 25 September 2001

Husaini, Adian, "Menonton dan Menunggu Janji AS," *Kompas*, 1 Maret 2004

Pitt, William R., *War on Iraq dan The Greatest Sedition is Silence: Four Years in America* (Pluto Pers, 2003).

Roy, Olivier, *Globalised Islam: the Search for a New Ummah* (Columbia University Press, 2004)

Kepel, Gilles, *Jihad: The Trail of Political Islam,* trans. by Anthony F. Roberts (London, New York: I.B. Tauris, 2002)

Takeyh, Ray, "Islamism: Rest In Peace," *The National Interest,* No. 63, 2001.

Cornell & Spector, "Central Asia: More Than Islamic Extremists," *The Washington Quarterly*, Vol. 25, No.1, 2002.

ISLAMISME, KAPITALISME DAN NEGARA BANGSA MODERN

Dalam disertasi PhD-nya di Australian National University (ANU) Canberra beberapa tahun silam, Yudi Latif menjelaskan bahwa sebagian kaum intelegensia Islam merasa kalah secara traumatis karena tujuh kata Piagam Jakarta dicoret dari Pancasila.

Dalam disertasi Yudi Latif yang diterbitkan dengan judul *"Inteligensia Muslim dan Kuasa"* terungkap kekecewaan dan trauma para inteligensia Muslim itu, dengan bayangan aneka latar sosial, politik, ekonomi dan kultural yang mengitarinya.[1]

Mengejutkan bahwa kaum inteligensia Muslim ternyata masih melihat momen hilangnya tujuh kata Piagam Jakarta yang dicoret dari Pancasila itu sebagai momen yang traumatis. Menghadapi hal ini, ada kekhawatiran kalangan umat Kristiani dan non-Muslim lainnya bahwa jangan-

[1] Lihat, Yudi Latif, *Inteligensia Muslim dan Kuasa* (Bandung: Mizan, 2005).

jangan penyembuhan derita trauma itu hanya bisa terjadi jika suatu saat nanti kaum intelegensia/politisi Muslim menang secara heroik dan mutlak, serta menegakkan Piagam Jakarta dan syariah Islam di Indonesia.

Bukankah, kata Martin Lukito Sinaga, seorang inteligensia Kristen, pembungkaman dan pemarginalan atau *otherizing* akan mengendap dalam hati kaum inteligensia Muslim, jika diskursus di pentas publik oleh para intelegensia Muslim mendapat beban traumatis? Martin Lukito mengakui kekhawatiran kaum Kristiani bahwa dalam konteks hilangnya tujuh kata Piagam Jakarta itu, peran umat Kristen adalah *the other* yang menjadi *momok*, sama seperti (baca = mengulang) sikap badan *zending* Kristen di zaman kolonial dulu yang menganggap Islam sebagai *momok* yang menghalangi misi mereka.

Islam Politik

Kini sejarah sedang menyaksikan menguatnya formalisme Islam di Tanah Air. Kalangan Islam politik terus bergerak dari mesjid ke mesjid, dari *harakah* ke *harakah*, dari rumah ke rumah, dari daerah ke daerah. Mereka berupaya memberlakukan peraturan daerah (perda) kesusilaan dan keagamaan di pelbagai kota, sedikitnya 25 kota kabupaten (daerah tingkat II) di Tanah Air pada kurun 2007 saja. Pada tahun-tahun selanjutnya sangat mungkin makin marak.

Di saat begitu banyak kelompok Islam makin frontal dan radikal, kehadiran perda-perda kesusilaan dan keagamaan itu menimbulkan kecemasan kaum kebangsaan. Seakan terjadi gerak pengepungan oleh kaum Islam puritan terhadap kaum kebangsaan yang bervisi pluralistis dan

modernis sekuler. Kaum kebangsaan merasa kalangan Islam puritan melakukan pendekatan ″desa mengepung kota″ melalui perda-perda kesusilaan dan keagamaan.

Menurut persepsi Muntasir Alwy, seorang peneliti Islam, sesungguhnya dewasa ini diperlukan pemikiran tajam dan jernih untuk membongkar struktur kesadaran umat Islam dalam melihat masalah dan menyesuaikan diri dengan lingkungan geo-ekonomi, geopolitik, budaya dan peradaban di mana pun umat hidup dan berada. Muntasir Alwy dalam bukunya ″Aplikasi Islam Dalam Wilayah Kuadran, Rumusan Dasar Teoretis, Praksis dan Revolusioner Adaptasi Mukimin terhadap Kondisi-Kondisi Negara,″ melancarkan gugatan dan kritik terhadap para penguasa, ulama, politisi, aktivis dan intelektual Islam. [2]

Jika pada tingkat nasional menguat isu RUU Antipornografi dan Pornoaksi, pada tingkat lokal marak pemberlakuan peraturan daerah (perda) kesusilaan di pelbagai wilayah (sedikitnya 25 kota kabupaten/daerah tingkat II) di Tanah Air). Kesemua itu mencerminkan menguatnya politik berjubah agama yang mencerminkan sifat isolasionis agama itu sendiri, yang bisa mengarah menuju sifat konfrontasionis terhadap umat yang lain. Karenanya diperlukan koreksi kritis terhadap kaum penguasa Islam, ulama dan cendekiawan Islam yang giat mengusung syariat Islam agar tidak frontal dan brutal.

Meskipun para aktor Islam puritan menjadikan negara Madinah era Muhammad SAW sebagai contoh peradaban,

[2] Lihat, Muntasir Alwy, *Aplikasi Islam Dalam Wilayah Kuadran, Rumusan Dasar Teoretis, Praksis dan Revolusioner Adaptasi Mukimin terhadap Kondisi-Kondisi Negara* (Jakarta: Pilar Press, 2004).

inspirasi, nilai dan bandingan, hendaknya substansi negara Madinah dengan Piagam Madinah-nya bukan bacaan literal dan skriptual yang harus menjadi sumber nilai, inspirasi dan acuan umat (masyarakat madani) dalam melihat kebesaran Islam era Rasullulah SAW di masa lampau. Dengan demikian relevan dalam konteks kekinian, sebab dunia sudah berubah dibandingkan era Rasullullah.

Negara Madinah menjadi kerinduan dan rujukan umat Islam dalam berkiprah dan beribadah karena kepemimpinan, akhlak dan moralitas Rasullullah SAW dalam membangun peradaban zaman itu merupakan teladan yang paling tinggi di mata umat Islam dalam hubungannya dengan keduniawian dan kekuasaan.

Meminjam perspektif Muntasir Alwy dalam buku tersebut, di negara Madinah, seluruh aktivitas seorang pribadi Muslim sepanjang diniatkan untuk Allah SWT akan bernilai ibadah. Makan, minum, belajar di *darul ilmi*, bekerja mencari rezeki, tidur dengan istri, atau aktivitas lainnya yang membumi, akan dinilai sebagai ibadah. Dan sebaliknya, meskipun di mata manusia terlihat sebagai ibadah *mahdhah* atau amal shaleh (shalat, zakat, puasa, haji, infak, sedekah, amal jariyah, *jihad fie sabilillah*), tetapi jika dilandasi niat bukan karena Allah SWT, maka nilainya adalah nifaq.

Di negara Madinah Rasullullah menegakkan aturan ″dilarang mencuri″ karena semua kebutuhan dasar manusia dijamin negara, ″dilarang berzina″ karena pintu pernikahan dibuka selebar-lebarnya, ″dilarang membunuh″ dengan semena-mena karena jiwa manusia sangat dilindungi negara. Etika-etika yang dinilai tabu sekali pun pada masyarakat lain, misalnya poligami, memiliki budak (laki-

laki dan perempuan) bekas tawanan perang, menjadi lumrah di wilayah "bersih di mata Allah" ini. Itulah mengapa seluruh aktivitas hidup positif dinilai sebagai ibadah *ghairu mahdhah* (umum) di negara Madinah pada waktu itu.

Di negara Islam sekalipun berlaku suatu masyarakat yang terbuka dan bebas. Di situ siap menerima siapa pun yang ingin menjadi warganya. Dengan hak-hak dan kewajibannya yang dijamin oleh negara, tanpa polisi moral di dalamnya.

Para Founding Fathers membentuk Indonesia sebagai *modern nation-state* yang melindungi kebhinekaan. Kini, dengan alasan apa sebuah negara atau pemerintahan daerah membentuk "polisi moral" dan memberlakukan perda kesusilaan, apalagi negara tersebut merupakan negara kebangsaan.

Citra negatif kawasan syariat Islam di Aceh atau Bulukumba, misalnya, yang memberlakukan "polisi moral" dan syariah Islam sekarang, justru terbangun karena pemberangusan kebebasan dan hak-hak individu, di mana seluruh syariat Islam dipaksakan secara total dan membabi buta tanpa pandang bulu terhadap semua warga negara. Misalnya adanya operasi jilbab, shalat Jumat, dan sebagainya di jalan-jalan yang tidak pernah dilakukan Rasullullah Saw dan negara Madinahnya. Gambaran negara yang Islami tidaklah seperti itu, melainkan seperti negara Madinah atau Cordova (Spanyol dengan tiga agama) di masa lampau yang maju peradabannya, toleran dan modern.

Karena itu dialektika dan debat mengenai Islam dan negara merupakan suatu perjalanan dan proses panjang, yang seyogianya tidak dimakzulkan oleh formalisasi agama dan kepentingan sesaat oleh kalangan Islam, melainkan melihat

kepada kepentingan bangsa secara keseluruhan dalam jangka panjang.

Kaum inteligensia Muslim juga memproduksi Rancangan Undang-Undang (RUU) Anti-Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) beberapa tahun silam, serta peraturan daerah (perda) kesusilaan dan perda-perda syariah yang kontroversial, yang meruak di mana-mana. Berbagai kelompok Islam garis keras, seperti Jamaah Islamiyah (JI) melakukan konsolidasi eksklusifnya meski sudah digilas oleh aparat kepolisian negara. Radikalisasi kaum salafi radikal, diam-diam bertambah dan merajalela. Apalagi krisis ekonomi dan kesenjangan kaya-miskin menjadi bahan bakarnya.

Sungguh mencemaskan, demokrasi tanpa kepemimpinan luhur di segala lini, ternyata mereproduksi alienasi kerumunan 'politik berjubah agama' dan 'mobokrasi moral' yang menakutkan.

Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) mencatat di seluruh Indonesia, sedikitnya ada 25 perda syariah dan kebijakan lain di tingkat lokal serta tujuh rancangan perda (raperda) yang diperjuangkan kalangan beragama guna mengatur masalah kesusilaan. Aturan soal kesusilaan itu pada umumnya mengarah ke penanganan pelacuran dan kemaksiatan, pengaturan tentang pakaian, dan peningkatan ketakwaan. Pangkal persoalannya adalah ketidakadilan, kesenjangan sosial-kultural dan diskrepansi antara harapan dan kenyataan, diskomunikasi sosial, disilusi, benturan nilai-nilai dan kepentingan.

Realitas itu memunculkan dugaan, prasangka, pertanyaan dan gugatan perlawanan: Apakah kaum inteligensia Muslim yang kini memasuki ranah politik di lembaga eksekutif,

legislatif dan yudikatif sedang dan telah menyiapkan 'aksi pembalasan' atas kekalahan traumatis akibat hilangnya tujuh kata dalam Piagam Jakarta yang dicoret dari Pancasila tersebut, dengan menebarkan perda-perda syariah dan RUU APP?

Benar bahwa tidak ada yang salah menggunakan demokrasi untuk memperjuangkan agama, namun kalau kepentingan sempit dan aspirasi primordial mengalahkan rasionalitas, obyektifitas dan civilitas, bisa dibayangkan bagaimana runyamnya ruang publik yang sudah dipenuhi kerumunan politik (*political crowd*) –istilah Michael Mafessoli, yang berbasis agama, suku dan politik aliran, namun tanpa visi-misi profetik, transformatif dan emansipatifnya.

Alih-alih memperjuangkan *clean and good governance*, kalangan Islam skriptural dan tekstual ini ternyata lebih suka membawa ayat agama tanpa sekaligus mengusung visi-misi transformatif, emansipatif dan profetiknya. Agama dijadikan sandaran legitimasi fundamental untuk merealisasikan RUU APP dan perda-perda syariah kesusilaan, ketimbang dijadikan rujukan bagi transformasi dan emansipasi sosial yang lebih substansial, dalam semangat egaliterian dan keadaban. Sungguh, di tangan mereka, agama telah kehilangan elan vital sebagai sumber nilai dan norma bagi visi-misi profetik, transformasi dan emansipasi sosial untuk memberdayakan masyarakat guna menghadapi kekuasaan yang korup, fundamentalisme pasar atau dominasi kekuatan modal.

Padahal masyarakat yang "bebas dan berdaya" dengan demokrasi deliberatifnya, khususnya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, merupakan perwujudan riil dari

good governance itu sendiri.

Masa depan Islam toleran berada di tangan masyarakat "bebas dan berdaya" ini, yang selayaknya solid dan berpartisipasi aktif dalam menentukan berbagai kebijakan pemerintahan. Selain itu masyarakat semacam ini juga akan menjalankan fungsi pengawasan yang efektif dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.

Sebaliknya, pada masyarakat yang masih belum berdaya di hadapan negara, masih banyak timbul masalah sosial di dalamnya seperti konflik, fragmentasi dan sektarianisme kelompok, sehingga akan sangat kecil kemungkinan *good governance* bisa ditegakkan. Sementara itu, mustahil *good governance* bisa dilakukan pemerintah tanpa partisipasi dan emansipasi masyarakat. Dalam hal ini, salah satu agenda untuk mewujudkan *good governance* pada masyarakat yang belum berdaya ini adalah memecahkan masalah sosial-ekonomi dan memperjuangkan hak-hak sipil, ekonomi dan sosial-kultural.

Masalah sosial yang cukup krusial dihadapi bangsa Indonesia akhir-akhir ini adalah kemiskinan, ketidakadilan, korupsi, fundamentalisme pasar/modal, oligarkisme dan keterbelakangan.yang disertai kekerasan struktural luar biasa yang menghancurkan kemanusiaan dan telah sampai pada titik yang membahayakan kelanjutan kehidupan berbangsa bernegara. Masalah sosial itu acapkali dalam bentuk kemiskinan massal dan ketidakadilan, kekerasan komunal dan keterbuangan sosial (*social displacement and dislocation*) dengan segala variannya. Kasus-kasus seperti konflik sosial di Aceh, konflik horisontal di Ambon dan Poso sampai sentrifugalisme di Papua, adalah contoh

mengerikan dari masalah sosial tersebut, yang harus dipecahkan oleh masyarakat madani (*civil society)* dan negara secepatnya.

Selain itu, masyarakat yang bebas dan berdaya serta berdemokrasi deliberatif, meminjam perspektif Habermas, akan memungkinkan mereka untuk membantu negara dalam menegakkan kemaslahatan rakyat.

Negara Bangsa yang Modern

Soedjatmoko dan Nurcholish Madjid menggarisbawahi bahwa Para Bapak Bangsa (*Founding Fathers*) pada 17 Agustus 1945 dulu melahirkan Republik Indonesia dan konstitusinya sebagai *modern nation-state* (negara bangsa yang modern), bukan *negara sekuler* atau *negara agama*. Karena itu, sudah saatnya kalangan inteligensia Muslim, kaum terpelajar Islam dan masyarakat santeri *(civil Islam*) lebih mengkonsentrasikan diri untuk berjuang menegakkan masa depan Islam yang toleran, Islam peradaban.

Kaum Muslim yang toleran dan beradab harus berjuang bersama segenap komponen bangsa lainnya, dengan mengembangkan kepemimpinan luhur di segala lini, untuk mewujudkan *good governance*, melakukan tranformasi dan emansipasi sosial agar bangsa ini bisa keluar dari krisis multi dimensi.

Sudah terlalu banyak energi dan sumber daya yang dibuang sia-sia untuk hal-hal yang tidak krusial dan tidak substansial, sementara lebih dari sewindu reformasi, ternyata justru membawa bangsa ini di bawah bayang-bayang kehancuran sosial dan negara gagal.

Pada akhirnya, masa depan Islam toleran (Islam peradaban) di Indonesia berada di tangan kaum Muslim sendiri, bukan ditentukan 'uluran tangan' Arab Saudi, Iran dan Timur Tengah, atau AS/Barat dan sekutunya. Masa depan Islam toleran di Indonesia berada di dalam kemandirian, kecerdasaan, integritas dan kedigdayaan umat Islam sendiri.

Semoga umat Islam di Tanah Air yang mayoritas, beserta para inteligensia, ulama, politisi dan pemimpinnya tetap bersikap adil dan bijak, mawas diri dan introspeksi, berjiwa besar dan senantiasa menyantuni pluralitas dalam kerangka Bhineka Tunggal Ika yang sejati, sekalipun menghadapi segala kompleksitas masalah dan kerumitan di dalamnya.

Islamisme

Para Islamis mengatakan bahwa hanya ada satu Islam yakni Islamisme dan dalam perang gagasan, mereka mencela kalangan yang bersikap kritis terhadap Islamisme itu sebagai "Islamophobia."

Di kalangan Islam, interpretasi mengenai Syariah dan nilai-nilai Islam sangatlah beraneka ragam. Spektrumnya sangat luas. Ambillah contoh pandangan Feisal Abdul Rauf, dari komunitas Islam Ground Zero New York, yang berpendapat bahwa Deklarasi Kemerdekaan Amerika dan Konstitusi Amerika Serikat adalah perwujudan nilai-nilai Islam dan Syariah. Oleh karena itu, Abdul Rauf menegaskan, Amerika adalah "negara adidaya" yang sesuai dengan Syariah Islam. Namun begitu jelas, bahwa definisi Abdul Rauf tentang Syariah itu, adalah jauh berbeda dari apa yang dimaksudkan oleh Taliban di Afghanistan. Itulah realitas tentang pemahaman Islam di kalangan Muslim yang seringkali

beragam, bahkan berbeda dan bertentangan satu sama lain.

Dalam kaitan ini, sebagai seorang Muslim Arab yang telah tinggal di Barat selama beberapa dekade (pertama di Jerman dan sekarang di Amerika Serikat), Profesor Bassam Tibi membuat argumen penting yang membedakan Islam, agamanya, dengan ideologi politik Islamis: Islamisme.[3]

Baginya, Islamisme tidak cocok dengan demokrasi, antara lain karena di dalamnya terkandung penciptaan kembali jihadisme sebagai terorisme, penemuan kembali tradisi hukum shar'ia sebagai tatanan konstitusional, dan terdapat kebingungan para Islamis atas konsep keaslian dan kemurnian budaya.

Tibi memang berani mengambil risiko untuk dikoreksi, diprasangkai, distigmatisasi dan disalahkan oleh para Islamis atau akademisi pro-Islamis.

Tibi menganggap semua Islamis pada dasarnya sama , maka ia tidak melihat ada perbedaan antara al-Qaeda dan Kebebasan Turki dan Partai Keadilan (AKP), yang ikut mengatur para anggota NATO saat melawan al-Qaeda di Afghanistan. Juga ia tidak membedakan antara intelektual AKP dan Taliban, sesuatu yang bagi para akademisi dianggap terlalu sembrono dan naif. Jadi, bagi Tibi, apakah Islamis bertindak damai atau kekerasan tidak penting baginya. Malah sejauh ini, menurut Tibi, AKP sudah menunjukkan tendensi-tendensi otoriter dan membuka ruang bagi semangat Anti-Semitisme di Turki. Namun harus diakui, Tibi menganalisis Islamisme ini dari perspektif Islam liberal.

---

[3] Lihat, Bassam Tibi, *Islamism and Islam* (New Haven: Yale University Press, 2012).

Dalam bukunya, Tibi berhasil dalam menunjukkan bahwa tradisi Islam mengandung benih yang bisa membentuk dasar humanistik Islam modern. Namun pemahaman humanistik masa lalu dan potensi masa depan Islam telah dirusak secara rutin oleh kaum Islamis yang cukup berhasil memonopoli wacana Islam. Tibi menekankan perbedaan antara Islam sebagai agama dan Islamisme sebagai, apa yang disebutnya *"religionized politics,"* politik yang meng-alami peng-agama-an, politik yang direligikan.

Tibi bersandar berat pada teori Hannah Arendt, termasuk akademisi mutakhir seperti sejarawan Jeffery Herf, untuk menunjukkan bahwa Islamisme dengan jelas berbagi warisan intelektual dengan gerakan totaliter Eropa abad terakhir . Tibi benar ketika menekankan bahwa Islamisme adalah bukan "kebangkitan" tapi penemuan masa lalu Islam. Bahkan, banyak istilah yang dipakai Islamis seperti "Negara Islam" atau "sistem Islam," sejatinya merupakan neologisme yang tidak ada dalam sumber-sumber Islam tradisional .

Menurut Tibi, pada abad kedua puluh, banyak Islamis meminjam konsep-konsep dari gerakan totaliter di Eropa dan kemudian mengislamisasikannya.

Tibi berpendapat bahwa Islam yang mendukung kekerasan dan mereka yang mencela itu pada dasarnya sama, dan menurutnya bahwa mereka "hanya berbeda pada cara untuk melakukan, tapi bukan tujuan itu sendiri."

Meskipun memberikan wawasan berharga, bagaimanapun juga bagi sebagian akademisi dan peminat studi Islam, penggambaran Tibi tentang Islamisme bisa jadi bermasalah.

Kepada mantan Rektor UIN Jakarta, Azyumardi Azra, Tibi pernah menyatakan bahwa kehidupannya semacam Ibn Batutah, karena pernah mengajar dan memberi ceramah pada lebih dari 30 universitas di empat benua.

Seperti diakui Azyumardi Azra, sudah lama Tibi melihat, masyarakat dan peradaban Muslim mengalami kemunduran ketika pemikiran rasional tidak lagi mendapatkan tempat di tengah meningkatnya ortodoksi ulama. Perkembangan seperti ini tidak lagi memberikan akomodasi dan tempat bagi perubahan sosial-budaya di dalam masyarakat Muslim, sementara Barat terus mengalami kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hasil akhirnya adalah meningkatnya sikap defensif dan apologetik di kalangan masyarakat Muslim, yang pada gilirannya memunculkan krisis umat Islam di masa modern.

Krisis yang masih belum juga teratasi, akhirnya memunculkan gerakan-gerakan yang dengan cara-cara radikal dan kekerasan berusaha membawa umat kembali kepada apa yang mereka sebut sebagai 'Islam otentik' (*ashalah*). Islamisme menempuh dua cara: kekerasan dan moderasi, namun dua-duanya bertujuan sama yakni membentuk Negara Islam atau Syariah.

Islamisme adalah gerakan politik yang membedakannya dengan Islam itu sendiri, sehingga menurut Tibi, masyarakat harus bersikap kritis dan jernih atas dua hal yang secara ontologis terkesan saling berhimpitan ini.

Islamisme Radikal vs Kapitalisme Global

Di Dunia Islam, termasuk Indonesia, modernisasi dan globalisasi berhadapan dengan radikalisasi para Muslim yang mengalami marginalisasi dan alienasi. Beberapa dekade terakhir kita menyaksikan globalisasi telah melanda dan melumat dunia Islam, termasuk Asia Tenggara. Dan sudah menjadi fakta bahwa globalisasi pada akhirnya hanya menguntungkan segelintir orang, dan menyengsarakan sejumlah besar penduduk planet Bumi ini. William Greider dalam bukunya, *One World, Ready or Not, The Manic Global Capitalism*, melontarkan tesis bahwa motor di balik globalisasi adalah yang disebutnya "kapitalisme global."[4]

Kaum kapitalis yang rakus dan tak pernah puas beramai-ramai menguras kekayaan dunia, masuk ke dalam jaringan kapitalisme global, dengan memanfaatkan teknologi komputer, mengabaikan semua tatanan kesantunan hidup bersama. Memang para kapitalis global itu telah memungkinkan penyebaran kenyamanan dan kemudahan, tetapi itu semua hanya untuk 10 persen dari penduduk bola dunia; sementara jurang antara si kaya dan si miskin (istilah baru: *digital divide*) menjadi kian menganga. Lantas, siapa kapitalis global itu? Mereka adalah para spekulan uang yang jumlahnya tidak lebih dari 200.000 orang (yang terkenal di antaranya adalah George Soros), dan sekitar 53.000 perusahaan multinasional (*multi-national corporations*) yang mempekerjakan sekitar enam juta orang di seluruh dunia.

Harus ditambahkan di sini adalah institusi keuangan internasional, IMF (International Monetary Fund) dan World

---

[4] Lihat, William Greider, *One World, Ready or Not, The Manic Global Capitalism* (New York: Simon & Schuster, 1997).

Bank. Lembaga keuangan internasional itu didukung oleh WTO (World Trade Organization) secara langsung atau tidak langsung ikut membantu para kapitalis global untuk membuka pasar di seluruh dunia yang sampai sekitar tahun 1970-an merupakan pasar yang tertutup.

Dalam konteks ini, Edward Luttwak mengatakan bahwa peranan negara dalam proses penjarahan global ini lebih mengarah pada *geo-economics,* kalau dulu pada *geo-politics*. Dalam aras *geo-economics*, negara-negara kini berperang dengan mengerahkan pasukan mereka yang terdiri dari para pelaku bisnis internasional dan juga birokrasi yang mereka miliki. Strategi yang dipakai juga mirip pada masa lampau: membentengi diri sambil menyerang lawan. Tentu saja negara-negara maju (AS, Jepang, Eropa Barat) rata-rata memenangi peperangan ini jika mereka berhadapan dengan negara yang belum maju.[5]

Pada tingkat ekonomi, terjadilah pemaksaan pembukaan pasar-pasar di semua negara di seluruh dunia. Pada tingkat politik, terjadilah *the death of democracy* karena para politisi lebih suka menjamu para kapitalis mancanegara daripada konstituen mereka di dalam negeri. Pada tingkat ekologi, terjadilah perusakan lingkungan oleh perusahaan multi-nasional. Pada tingkat kebudayaan terjadilah *McDonaldiza-tion* - sebuah istilah tentang serbuan kebudayaan global (Amerika?) - yang menekan kebudayaan lokal sampai ke sudut yang paling sempit. Ideologi yang dipakai untuk membenarkan semua itu disebut "neoliberalisme." Di tengah era neoliberalisme itu, tiba-tiba kita disentakkan oleh

[5] Lihat, Edward Luttwak, *Turbo-Capitalism: Winners and Losers in the Global Economy* (New York: Harper Parennial, 1999).

tragedy serangan pemboman WTC New York, 11 September 2001, yang meledakkan isu terorisme Islam, fundamentalisme Islam, Islamisme dan cap-cap buruk lainnya terhadap umat Islam sehingga muncul kemudian bahasa politik "Islamisme versus kapitalisme (global)."

Islam dan Modernisme

Modernisme sekuler atau pembangunanisme era Orde Baru Soeharto (1966-1998) telah meninggalkan beban warisan utang US$150 miliar dan beban BLBI konglomerat hitam sekitar Rp600 triliun, yang amat membebani dan menyakitkan hati rakyat, dimana ketidakadilan sosial meruak, kemiskinan meluas dan korupsi merajalela.

Realitas muram itu telah mengalienasikan sebagian besar kaum Muslim dari arus perkembangan modernisasi itu sendiri. Ketimpangan struktural, disparitas ekonomi dan dislokasi sosial-kultural di tingkat lokal, nasional, regional maupun global, telah mendorong kaum Muslim mencari kembali Islam dan melakukan "*reinventing* Islam" dalam batas-batas tertentu, dengan aneka ragam persepsi, interpretasi dan imajinasi mereka. Globalisme pada skala masif telah menimbulkan marginalisasi dan periferalisasi Islam, yang sejak jatuhnya Komunisme, dipersepsikan AS/Barat sebagai ancaman baru dan musuh bebuyutan dalam paradigma "Benturan Peradaban" *ala* Samuel Huntington. Umat Islam di Indonesia pun tak terelakkan dari pusaran arus global ini, dan terkena dampaknya.

Islamolog Oliver Roy dalam studinya mengingatkan bahwa strategi gerakan kelompok-kelompok neofundamentalisme Islam atau Islamisme radikal untuk melancarkan Islamisasi

dari bawah dan kecenderungannya membentuk kelompok-kelompok kecil ultra-ortodoks, secara potensial menjadi basis bagi 'reislamisasi' sekaligus radikalisasi politik Islam militan dewasa ini.[6]

Dalam konteks ini, studi AE Priyono (2003) mengungkapkan mengenai terjadinya revitalisasi gerakan-gerakan radikal baru akibat keterlibatan kelompok-kelompok neofundamentalis atau Islam militan – istilah Samuel Huntington - dalam perang di Afghanistan dan Irak serta Timur Tengah umumnya, yang juga potensial melahirkan terbentuknya gerakan-gerakan terorisme di tingkat regional dan internasional yang lebih luas, yang berguna untuk menjelaskan latar belakang dan memetakan apa yang terjadi di lingkaran Islam radikal Indonesia dewasa ini.

Dalam hal ini, Sydney Jones mencatat adanya gambaran mengenai visi dua kelompok Islam di Indonesia, yakni Darul Islam Jaringan Ngruki dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) yang secara kuat mencerminkan tema-tema politis dan ideologis neo-fundamentalisme Islam, atau radikalisasi Islam politik di Indonesia pasca Orde Baru.

Perkembangan-perkembangan penting memang terjadi secara signifikan dalam gerakan Islam-politik di Indonesia setelah kejatuhan Orde Baru (Orba) sampai era reformasi dewasa ini. Masa transisi menuju demokrasi setelah tumbangnya pemerintahan otoritarian Orba yang secara tradisional didukung oleh tentara, telah menyebabkan gerakan-gerakan Islam politik seolah-olah muncul kembali dari bawah tanah. Meskipun Presiden Soeharto di era Orba telah berusaha mengakomodasi kelompok-kelompok Islam yang

---

[6] Lihat, Oliver Roy, *The Failure of Political Islam* (New York: I.B. Tauris, 1994).

lebih moderat dari kelas menengah Muslim melalui pembentukan ICMI pada 1990-an, tetapi tampaknya strategi ini dimaksudkan lebih untuk kepentingan politiknya sendiri dalam upaya memperluas basis dukungannya untuk menghadapi oposisi dari kelompok-kelompok pro-demokrasi yang semakin menguat.

Strategi ini bukan hanya lebih memperkuat kecenderungan konservatisme dan oportunisme di kalangan kelas menengah Muslim, tetapi juga mengeksklusifkan mereka dari perjuangan pro-demokrasi yang lebih luas. Kendati politik "merangkul Islam" ini relatif cukup berhasil menjauhkan kelas menengah Muslim dari barisan oposisi Islam, khususnya faksi modernis yang moderat, sebagian besar aspirasi politik Muslim dari faksi-faksi yang lebih radikal, tetaplah tidak diakomodasi. Lebih dari itu, menguatnya apa yang disebut Adam Schwarz sebagai "lobi-anti-ICMI" dari kalangan oposan Islam tradisional maupun fundamentalis, telah menyebabkan kesadaran politik Islam yang terus menguat sejak 1980an, khususnya dari kelas bawah. Meski tetap saja tersembunyi di bawah-tanah dan tidak muncul ke permukaan.[7]

Maka, tak terelakkan bahwa di era reformasi (1999-2007), tiba-tiba lanskap politik memperlihatkan ledakan yang mengejutkan akibat munculnya ekspresi-ekspresi yang lebih radikal dari kekuatan-kekuatan Islam-politik yang menghendaki implementasi perda-perda syariah maupun Negara Islam.

[7] Lihat, Adam Schwarz, *A Nation in Waiting: Indonesia in the 1990s* (Westview Press, 1994).

Dalam suasana seperti itu muncul kembali desakan untuk memberlakukan Piagam Jakarta, penerapan Syariah secara lebih nyata, bahkan revitalisasi Darul Islam, yang pernah diproklamasikan oleh Kartosuwirjo pada Agustus 1949. Mengenai hal ini, AE Priyono mencatat bahwa isu tentang dibentuknya pemerintahan kekhalifahan Islam Nusantara ini pertama kali muncul dalam tuduhan pemerintah Malaysia terhadap seorang aktivis Jamaah Islamiyah, Fikiruddin, alias Abu Jibril, asal Indonesia yang membangun basis gerakannya di Malaysia. Sementara itu, berdasarkan wawancara dengan aktivis Darul Islam yang pernah mengikuti rapat-rapat Rabithah Mujahidin di Malaysia, ada cukup kuat informasi tambahan bahwa gagasan kekhalifahan Asia Tenggara yang didukung pula oleh delegasi-delegasi dari Muangthai Selatan, Burma, dan Kamboja. Indonesia, Filipina Selatan, dan Malaysia. Bahkan utusan GAM (Aceh) pun hadir beberapa kali. Selain itu rapat-rapat Robithah Mujahidin - forum kepanitiaan yang memfasilitasi pembentukan kekhalifahan regional ini - seringkali dihadiri pula oleh delegasi-delegasi dari Afghanistan, Yordania, Aljazair, Kuwait, dan Arab Saudi

Lebih dari itu, muncul pula gerakan-gerakan politik Islam militan yang melibatkan berbagai aktivis Islam dari gerakan-gerakan radikal dan fundamentalis di seluruh dunia yang berjuang untuk mendirikan apa yang disebut sebagai Daulah Islamiyah Nusantara yang mencakup empat wilayah negara-bangsa di Asia Tenggara: Indonesia, Malaysia, dan Moro (Filipina Selatan). Perkembangan-perkembangan semacam ini jelas menimbulkan kejutan yang luas, khususnya bagi *civil society*, para akademisi dan pengamat yang selama ini menganggap Islam di Indonesia berwatak

moderat dan pluralis dan bahkan sering dicitrakan sebagai model yang berhasil dari simbiosis antara Islam dan negara-bangsa yang sekuler.

Para akademisi dan analis pun bertanya-tanya: Bagaimana mungkin dari masyarakat Muslim yang dikenal toleran, pluralis dan inklusif seperti Indonesia, muncul gerakan-gerakan fundamentalis-radikal yang berpotensi mengganggu stabilitas regional? Yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa di tengah-tengah maraknya ekspresi-ekspresi politik Islam radikal itu, terjadi serangkaian peristiwa kekerasan dan teror bom yang di antaranya melibatkan jaringan-jaringan kelompok Islam di belakangnya.

Dari 41 kasus peledakan bom yang terjadi di Indonesia, sejak Januari 1998 hingga Oktober 2002, yang sebagian besar identifikasi pelakunya hingga sekarang masih gelap dan tetap menimbulkan teka-teki, ada berbagai petunjuk bahwa sebagian di antaranya bisa diduga berkaitan dengan aktivitas-aktivitas teror yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang memiliki jaringan dengan gerakan neo-fundamentalisme Islam baik di tingkat lokal maupun regional. Gerakan-gerakan militan Islam tertentu itu bisa diduga terlibat karena beberapa anggotanya yang ditangkap mengakui menjadi pelaku beberapa peristiwa teror, atau mereka membeberkan keterkaitan tokoh-tokoh tertentu di kalangan gerakan militan sebagai aktor-aktor penting yang mempunyai jaringan dengan operasi-operasi teroris; atau dengan cara yang lain lagi: berbagai dokumen intelijen berhasil membuktikan peristiwa-peristiwa tersebut sebagai akibat langsung dari kebijakan pro-kekerasan yang diadopsi oleh organisasi-organisasi Islam militan tertentu.

Pada titik ini, memang harus diakui masih terjadi polemik kontroversial yang sengit untuk membuktikan secara langsung hubungan antara ideologi dan strategi fundamentalisme Islam dengan kegiatan-kegiatan teror. Ini berkaitan dengan pengalaman di masa lalu di mana banyak kasus "terorisme Islam" ternyata merupakan hasil rekayasa politik, yang justru dirancang oleh dinas-dinas intelijen negara. [8]

Namun demikian, tetap harus dikatakan bahwa ada berbagai fakta yang bisa dibeberkan tentang tema-tema politik dan ideologis dari gerakan-gerakan Islam fundamentalis yang menjustifikasi tindakan-tindakan pro-kekerasan, dan karena itu membuka peluang bagi timbulnya aksi-aksi teroris. Beberapa kelompok gerakan Islam fundamentalis pun, seperti diketahui, secara terang-terangan membangun sayap militer dalam bentuk laskar-laskar bersenjata. Misalnya, seperti diakui oleh jurubicara Darul Islam, Al Chaidar, dari 14 faksi yang terdapat di dalamnya tiga faksi di antaranya merupakan sayap militer organisasi tersebut, yakni Laskar Jundullah, Laskar Hizbullah, dan Laskar Fatahillah. Selain itu, menurut Al Chaidar pula, ada juga beberapa faksi yang mempunyai jaringan dengan organisasi al-Qaeda

Dengan anggota yang diklaim berjumlah sekitar 18 juta orang, Darul Islam memang merupakan salah satu di antara kelompok-kelompok Islam fundamentalis yang secara tegas menyatakan berjuang untuk menegakkan kembali Negara Islam Indonesia (NII) sebagaimana diproklamasikan Karto-

---

[8] Sydney Jones, "al-Qaeda in Southeast Asia: The Case of the *Ngruki Network* in Indonesia," *International Crisis Group (ICG) Reports*, 8 Agustus 2002.

soewiryo, yang kini disabot oleh pemerintah RI. Mereka menganggap perjuangan *(jihad)* itu harus dilakukan dengan cara kekerasan sejauh pemerintah RI tidak mau mengadakan perundingan dan sejauh TNI masih ikut campur tangan dalam penyelesaian konflik tersebut.

Selama kesepakatan tentang dua isu itu tidak tercapai, aktivis Darul Islam yang bergerak di bawah tanah atau di atas tanah melalui jalur organisasi massa dan kepartaian, tidak bisa menjamin bahwa tindakan-tindakan kekerasan berupa serangan terhadap sasaran-sasaran publik, termasuk gereja dan pusat perbelanjaan/*mall*, akan bisa dihentikan. Darul Islam juga berpandangan bahwa organisasinya memang berada di luar organisasi-organisasi Islam *mainstream* di Indonesia, bahkan berpendapat bahwa semua orang Indonesia yang tidak mau bergabung dengan Darul Islam, termasuk orang Islam yang menjadi warga negara Indonesia, adalah kafir.

Dikotomi Islam dan kafir oleh kalangan Darul Islam dan Islamis garis keras inilah yang melatarbelakangi para ulama dan tokoh Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah, Paramadina, Persis dan kelompok Islam toleran lainnya untuk memerangi terorisme dengan pendekatan multidisipliner dan komprehensif.

Dengan ekspektasi, radikalisme dan fundamentalisme Islam yang prokekerasan, bisa semaksimal mungkin dikikis, lantaran tak mungkin dilenyapkan habis. Dan untuk itu kerja sama yang memadai antara negara, dunia usaha dan *civil* Islam di Indonesia, merupakan suatu keniscayaan untuk membangun hari depan bersama. Ledakan bom-bom terorisme adalah pengalaman pahit dan sejarah muram di

Indonesia era reformasi, yang menunjukkan bahwa terorisme adalah musuh bersama masyarakat dan negara, yang membutuhkan langkah cerdas dan sikap tegas untuk mengatasinya. *Wallahualam.* [*]

REFERENSI:

Alwy, Muntasir, *Aplikasi Islam Dalam Wilayah Kuadran, Rumusan Dasar Teoretis, Praksis dan Revolusioner Adaptasi Mukimin terhadap Kondisi-Kondisi Negara* (Jakarta: Pilar Press, 2004).

Greider, William, *One World, Ready or Not, The Manic Global Capitalism* (New York: Simon & Schuster, 1997).

Jones, Sydney, "al-Qaeda in Southeast Asia: The Case of the *Ngruki Network* in Indonesia," *International Crisis Group (ICG) Reports*, 8 Agustus 2002.

Latif, Yudi, *Inteligensia Muslim dan Kuasa* (Bandung: Mizan, 2005).

Luttwak, Edward, *Turbo-Capitalism: Winners and Losers in the Global Economy* (New York: Harper Parennial, 1999).

Roy, Oliver, *The Failure of Political Islam* (New York: I.B. Tauris, *1994).*

Schwarz, Adam, *A Nation in Waiting: Indonesia in the 1990s* (Westview Press, 1994).

Tibi, Bassam, *Islamism and Islam* (New Haven: Yale University Press, 2012).

Santoso dan Globalisasi Terorisme

Setelah dikejar, diserbu dan dikepung oleh sekitar 3000 pasukan gabungan Polri dan TNI di hutan-hutan kawasan Poso, Sulawesi Tengah, akhirnya aksi teror Santoso alias Abu Wardah bisa diakhiri. Hemat kami, inilah *the struggle for the real* (meminjam metafora Clifford Geertz) oleh Polri/ TNI untuk menjawab tantangan Kelompok Santoso yang merasa digdaya dan berkuasa di hutan rimba Poso.

Dalam kaitan ini, pelaku dan perancang Bom Bali, Ustadz Ali Imron, menyampaikan kepada penulis bahwa pasca terbunuhnya Santoso, terorisme ke depan bisa lebih nekad dan mengerikan, tidak akan mudah dihabisi, apalagi embrio ISIS (*Islamic State of Syria and Iraq* atau Negara Islam di Irak-Suriah-NIIS) di Indonesia sudah tumbuh dengan jaringan globalnya, dimana paradigma ISIS adalah memandang orang-orang Islam yang tidak sepaham dengan mereka sebagai kafir, layak dibunuh dan mereka siap menyerang pemerintah suatu negara kapan saja. Dan kelompok

Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Santoso alias Abu Wardah, diyakininya telah berafiliasi dengan ISIS. Ingat bahwa seorang warga negara Indonesia bernama Abu Muhammad al Indonesi yang juga jaringan Santoso, sudah muncul dalam video mengajak WNI lainnya untuk bergabung dengan ISIS dan belakangan ini telah berkali-kali terjadi keberangkatan WNI ke Suriah yang diduga terkait dengan ISIS.

Ali Imron adalah perancang dan pembuat bom dalam pengeboman kafe Paddy`s Pub dan Sari Club di Jalan Kuta, Legian, Bali pada 22 Oktober 2002. Peristiwa Bom Bali I itu menjadi duka bagi seluruh dunia karena sekitar 202 orang, termasuk 164 turis asing tewas mengenaskan dalam kejadian itu.

Ali Imron dari balik penjara mengingatkan kita, baru 10 dari 400 alumni Afghanistan yang melakukan aksi terorisme yang melibatkan Santoso itu dan itu sudah menggemparkan dunia. Bagaimana kalau ratusan lainnya berbuat kekejian yang sama? Sungguh mengerikan.

Puncak Gunung Es?

Di era globalisasi terorisme dewasa ini, Kelompok Santoso hanyalah puncak gunung es dari kekuatan *real-actual and potensial* terorisme di Indonesia yang bertautan dan berjaringan global, dimana mereka memiliki *imagined solidarity among globalized Islamists,* - meminjam bahasa Prof. Asef Bayat, ahli Timur Tengah dan Islam Politik dari University of Illinois, Urbana-Champaign, AS. Setiap serangan teroris di mana pun, di Belgia, Perancis, AS, Turki, Timur Tengah dan seterusnya, selalu cenderung memicu, merangsang dan

memotivasi kelompok teroris di Indonesia untuk beraksi, bertindak sebagai dampak globalisasi.

Persebaran ideologi Islamisme radikal – meminjam bahasa Oliver Roy - terus merembes karena ketidakadilan, korupsi, penindasan dan kesenjangan sosial-ekonomi yang makin tajam meruncing. Situasi ini diperparah dengan, disadari atau tidak oleh para pemimpin, elite dan aparat negara, merembesnya gesekan atau bahkan benturan ideologis-agamis-politis di tingkat menengah ke bawah. Sudah terlalu sering kita lihat di layar kaca televisi bagaimana kelompok teroris baku tembak dengan polisi, atau FPI dan Laskar-laskar Muslim lainnya yang bentrok dengan petugas, dan banyak lagi kasus serupa.

Setelah berlalunya masa Orde Baru, Indonesia era reformasi belasan tahun terakhir ini, memasuki fase gesekan/benturan ideologis yang relatif tajam. Ideologi agama, sering disertai juga dengan kekerasan dan bentuk ekspresi emosional lainnya, menjadi ideologi oposisi radikal yang cukup kuat, meski dengan jumlah pendukung yang relatif kecil dan sporadis. Ideologi Islam di Indonesia pada periode ini muncul dalam bentuknya yang paling kasar: terorisme.

Dari pengakuan para tersangka tindak pidana terorisme Bom Bali 12 Oktober 2002, Imam Samudera, misalnya menyatakan "…Memerangi AS dan sekutunya adalah perintah Allah dan Rasul-Nya baik secara langsung ataupun tidak langsung" dan itu, jelas terlihat sebuah ekspresi emosi keagamaan. Imam bahkan menyatakan sikapnya dengan tegas dan sederhana: "... *membalas kezaliman dan kesewenangan AS dan sekutunya terhadap kaum Muslim dengan maksud agar mereka menghentikan kezalimannya."*

Ada suatu nilai yang bekerja dan mendikte jalan pikiran mereka. Ali Ghufron misalnya, menyatakan bahwa pemboman itu adalah “aksi pengabdian kepada Tuhan.” Maka, meminjam bahasa Novelis dr.Nova Riyanti Yusuf, sangat mungkin Ali Ghufron, Imam Samudra, Amrozi, dan kelompoknya merasakan suatu *delusion of grandeur*, perasaan mempunyai atau mewakili atau mendapatkan titah dan menjadi bagian dari unsur kebesaran yang berkeyakinan dirinya mengemban misi khusus dari Tuhan.

Kaum teroris senantiasa merasa diri sebagai “pejuang Tuhan,” berperang untuk Tuhan (battle for God, meminjam bahasa puitika Karen Amstrong) yang terpanggil untuk bertindak atas nama Tuhan dan agama, menjadi “tangan Tuhan” di muka bumi untuk “merealisasikan” kemurkaan-Nya dalam sebentuk resistensi: pemboman dan aksi-aksi teror lainnya. Bahkan, bagi Imam Samudera, membom adalah melaksanakan perintah Allah dalam *Qur'an surah An-Nisaa ayat 74-76.* Ini jelas tafsir yang keliru, malah salah kaprah. Akibat dari interpretasi dan ekspresi emosi keagamaan yang delusif ini, maka tragedi pun terjadi dan sejumlah besar spekulasi pun muncul di tengah-tengah publik.

Serangan Teror dan Spekulasi

Aksi serangan Kelompok Santoso dan tragedi serangkaian serangan bom kaum teroris di Bali, Makassar, Jakarta, Ambon, Poso dan lain tempat di Indonesia, telah memunculkan serangkaian spekulasi dari yang apologis hingga yang *a priori*.

Spekulasi pertama adalah tentang siapa pelaku serangan teror yang sangat terencana dan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan teknikal yang canggih. Pelakunya diidentifikasi secara arbitrer sebagai anti-AS/Barat, anti-Israel, anti-demokrasi, anti kekuatan ekonomi kapitalis, dan anti-militer global.

Spekulasi kedua adalah tentang motif kaum teroris dalam melakukan tindakan penghancuran berlebihan terhadap tempat-tempat di mana kekuatan ekonomi, politik, dan militer AS/Barat berada.

Spekulasi ketiga adalah tentang sasaran-sasaran apa lagi yang akan dituju terhadap AS/barat dan Israel. Pelakunya secara *allegedly* diidentifikasikan sebagai kaum fundamentalis Islam yang dewasa ini menjadi musuh bebuyutan Amerika Serikat (AS)/Barat, kelompok Osama bin Laden yang dulu bersembunyi di Afghanistan. Osama bin Laden pada bulan Februari 1998 pernah mengeluarkan fatwa untuk melawan kaum Yahudi dan Nasrani dan menjadi tokoh panutan bagi hampir semua tersangka teroris.[1]

Selain Osama, masyarakat dunia berasumsi bahwa pelakunya adalah Salafi radikal atau kalangan skripturalis/ fundamentalis Islam yang memiliki hubungan doktrinal dengan jaringan ISIS atau al-Qaeda atau ramifikasi/ pecahannya.

Karena Amerika Serikat hadir di mana-mana, di belahan dunia manapun termasuk di Indonesia, maka sebagaimana diketahui, kaum teroris dan skripturalis/fundamentalis Islam pun di Indonesia sangat berkarakter anti-AS, anti-

---

[1] Baca, Tim Redaksi Hot Copy, *Osama Bin Laden: Teroris atau Mujahid?* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001).

Israel, anti-demokrasi, anti kapitalis, dan anti-militer global. Motifnya, sejauh yang bisa dianalisa dari karakter politik luar negeri AS selama ini, adalah kebencian terhadap sikap AS/Barat yang —menurut persepsi mereka— sekular, anti-Islam dan terlalu posesif dan *over-protective* terhadap Israel. Sedangkan spekulasi tentang sasaran berikutnya, adalah respon biasa dari hilangnya rasa aman dan munculnya rasa takut rakyat AS/Barat yang membutuhkan jawaban segera terhadap apa yang mungkin terjadi.

Spekulasi ini wajar sekali terbentuk karena kejadian ini begitu tiba-tiba, cukup *massive* dan serempak dengan daya hancur yang luar biasa. Spekulasi ini juga wajar karena telah menimbulkan amarah yang sangat besar rakyat dan pemimpin AS/Barat yang sedang merasa nyaman hidup dalam guyubnya modernitas, sekularisme dan kesejahteraan ekonomi tiba-tiba harus menghadapi mimpi buruk yang meyakitkan dan memalukan ini. Rakyat AS/Barat bukan kali ini saja menghadapi serangan kaum teroris. Bagi kaum fundamentalis dan radikal Islam —yang lebih dikenal awam dengan istilah 'kaum teroris'— melawan AS/Barat adalah melaksanakan kewajiban personal, sebuah jihad global melawan Yahudi dan Nasrani. (Dokumen Polri, 2003)

Maka, AS/Barat pun telah menempatkan teroris Muslim sebagai musuh sejak tahun 1979 (yang memunculkan nama "Ayatollah Khomeini" sebagai nama bagi musuh yang dipersepsikan itu) pada saat terjadinya Revolusi Islam Iran dan memuncak pada peristiwa krisis teluk tahun 1990-an (dimana muncul nama "Saddam Hussein" sebagai musuh).

Dengan terbunuh atau tertangkapnya para tersangka pelaku tindak terorisme di Indonesia dan di beberapa negara Asia

Tenggara dan bahkan di Amerika dan Eropa, semakin memperlihatkan kepada kita bahwa jaringan organisasi kaum teroris sangat luas, mengglobal dan mondial.[2] Meski secara moral dan diplomasi internasional teroris diserang dengan "perang wacana" yang memojokkan mereka sebagai "kaum pengecut," "kaum ekstremis, kaum biadab," "kaum tak berperikemanusiaan" "kaum yang berbahagia di atas penderitaan orang lain," serta "kaum yang bertendensi penyakit jiwa," namun kaum teroris terus-menerus muncul dalam peta politik Indonesia dan dunia hingga kini untuk menyampaikan pesan-pesan yang sangat sulit diinter-pretasikan.

Begitu tersembunyinya musuh yang satu ini, telah menim-bulkan kesan misteri dan ketakutan psikologis tersendiri. Bagi rakyat AS/Barat, teroris adalah hantu (*spectre*) lain yang pernah dihadapi AS/Barat setelah hantu komunisme berlalu, sebentuk musuh ideologi, sekaligus musuh spiritual baru sebagaimana pernah diperingatkan oleh Samuel P. Huntington dalam *The Clash of Civilization*.

Douglas E. Streusand bahkan berani menyebut "*that specter is Islam*", yang kemudian diidentifikasi secara awam oleh publik AS/Barat sebagai "*green peril*", bahaya Hijau (Leon T. Hadar, 1992). Dan, dengan peristiwa serangan terhadap WTC dan Pentagon 11/9/2001, nama Osama bin Laden muncul sebagai "musuh" untuk mengembalikan kepercaya-an dari publik AS/Barat terhadap pemerintahnya dalam

[2] Seth Mydans, "Militant Islam Unsettles Indonesia And Its Region,"*New York Times*, 21 September 2001

menangani terorisme dari kaum muslim.[3]

Bagi kita, dalam konteks Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia, problem terorisme ini memunculkan banyak dilema: antara menjaga perasaan umat Islam dan *law enforcement,* supremasi hukum, yang mesti ditegakkan.

Lebih dari itu, ada sebuah kenyataan bahwa serangan Kelompok Santoso dan serangan brutal teroris lainnya telah terjadi dan musuh mesti didefinisikan untuk kemudian diambil langkah-langkah selanjutnya sebelum mengeksekusi para teroris selaku 'penjahat', walaupun mereka terus bersembunyi di balik simbol-simbol dan alasan agama. Terorisme adalah kejahatan kemanusiaan yang sangat berat.

Kembali ke pokok soal Santoso yang sudah diakhiri petualangan radikalnya, masyarakat dan negara harus tetap waspada dan antisipatif. Santoso adalah salah satu gembong teroris binaan program deradikalisasi, namun terbukti dia malah makin menjadi-jadi dan dengan jaringan global yang dimiliki, seakan dia kian percaya diri sampai ajal menjemputnya.

Kelompok Santoso beserta jaringan dan sel-selnya sudah berafiliasi dengan ISIS, dan itu berarti terorisme di Indonesia sudah mengintegrasikan diri dengan terorisme global kelas dunia. Oleh sebab itu, pengawasan di wilayah yang menjadi kantong teroris, harus diperketat untuk membatasi ruang gerak mereka.

Potret Santoso sebagai eks binaan deradikalisasi yang terbukti malah menjadi tokoh penting di jejaring teror nasional

---

[3] Eric Pianin and Bob Woodward, "Terror Concerns of U.S. Extend to Asia: Arrests in Singapore and Malaysia Cited," *The Washington Post*, 18 Januari 2002.

dan global, sepatutnya menjadi pelajaran berharga dan penting bagi negara. Deradikalisasi tidak boleh hanya jadi sekedar ″proyek,″ sebab dampaknya bisa fatal dan menjadi bumerang bagi pemerintah maupun masyarakat.

Kewaspadaan, mawas diri dan kesigapan negara (dan masyarakat) sangat dibutuhkan untuk mengikis dan mengatasi terorisme pasca terbunuhnya Santoso ini. Serangan balasan dari Kelompok Santoso harus diantisipasi, dan sangat mungkin ″Santoso-Santoso baru″ bermunculan kembali di sana-sini. Itulah tantangan bagi masyarakat dan negara kita ke depan terkait masalah transnasionalisasi terorisme dan globalisasi yang memperumit persoalan.[*]

FUNDAMENTALISME, RADIKALISME DAN TERORISME DI INDONESIA: SEBUAH REFLEKSI [1]

Pendahuluan

Setelah masa Orde Baru, Indonesia memasuki fase benturan ideologis yang sangat tajam. Ideologi agama, sering disertai juga dengan kekerasan dan bentuk ekspresi emosional lainnya, menjadi ideologi oposisi yang cukup kuat, meski dengan jumlah pendukung yang relatif kecil. Ideologi Islam di Indonesia pada periode ini muncul dalam bentuknya yang paling kasar: terorisme.

Dari pengakuan para tersangka tindak pidana terorisme Bom Bali 12 Oktober 2002,[2] jelas terlihat sebuah ekspresi emosi keagamaan. Ali Gufron, salah seorang tersangka teror Bom Bali, bahkan menyatakan sikapnya dengan tegas dan

---

[1] Risalah ini dipresentasikan di Sempimti Polri, 18 Juli 2016, di Lembang, Bandung.

[2] Misalnya, pengakuan Imam Samudra, "…Memerangi AS dan sekutunya adalah perintah Allah dan Rasul-Nya baik secara langsung ataupun tidak langsung." Lihat, Dokumen Polri, "Tabel Motif & Tujuan Peledakan Bom Bali 12 Oktober 2002," 2003, h. 1-3.

sederhana: "... membalas kezaliman dan kesewenangan AS dan sekutunya terhadap kaum Muslim dengan maksud agar mereka menghentikan kezalimannya."[3] Ada suatu nilai yang bekerja dan mendikte jalan pikiran mereka. Ali Ghufron misalnya, menyatakan bahwa pemboman itu adalah "aksi pengabdian kepada Tuhan." Maka Ali Ghufron, Imam Samudra, Amrozi, dan kelompoknya merasakan suatu *delusion of grandeur*, perasaan mempunyai atau mewakili atau mendapatkan titah dan menjadi bagian dari unsur kebesaran yang berkeyakinan dirinya mengemban misi khusus dari Tuhan.[4]

Kaum teroris senantiasa merasa diri sebagai "pejuang Tuhan" yang terpanggil untuk bertindak atas nama Tuhan dan agama, menjadi "tangan Tuhan" di muka bumi untuk "merealisasikan" kemurkaan-Nya dalam sebentuk resistensi: pemboman dan aksi-aksi teror lainnya.[5] Akibat dari interpretasi dan ekspresi emosi keagamaan yang delusif ini, maka tragedi pun terjadi dan sejumlah besar spekulasi pun muncul di tengah-tengah publik.

Tragedi serangkaian serangan bom kaum teroris di Bali, Makassar, Jakarta dan lain tempat di Indonesia telah memunculkan serangkaian spekulasi dari yang apologis hingga yang *a priori*.[6] Spekulasi pertama adalah tentang siapa pelaku serangan teror yang sangat terencana dan

---

[3] Dokumen Polri, "Tabel Motif & Tujuan Peledakan Bom Bali...," h. 4.

[4] Lihat Nova Riyanti Yusuf, "Delusion of grandeur", *Gatra*, 18 Oktober 2003, h. 37.

[5] Bagi Imam Samudra, membom adalah melaksanakan perintah Allah dalam al-Quran, surah An-Nisaa ayat 74-76. Lihat Polri, "Tabel Motif & Tujuan Peledakan Bom Bali...," h. 3.

[6] Lihat laporan *Kompas, Media Indonesia, Republika, Rakyat Merdeka, Pos Kota,* 28 Desember 2000.

dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan teknikal yang canggih. Pelakunya diidentifikasi secara arbitrer sebagai anti-AS, anti-Israel, anti-demokrasi, anti kekuatan ekonomi kapitalis, dan militer global. Spekulasi kedua adalah tentang motif kaum teroris dalam melakukan tindakan penghancuran berlebihan terhadap tempat-tempat di mana kekuatan ekonomi, politik, dan militer AS berada. Spekulasi ketiga adalah tentang sasaran-sasaran apa lagi yang akan dituju terhadap AS dan Israel. Pelakunya secara *allegedly* diidentifikasikan sebagai kaum fundamentalis Islam yang saat ini menjadi musuh bebuyutan Amerika Serikat (AS), Osama bin Laden yang dulu bersembunyi di Afghanistan.[7] Kalaupun bukan Osama, masyarakat dunia berasumsi bahwa pelakunya adalah orang-orang lain dari kalangan fundamentalis Islam yang memiliki hubungan doktrinal dengan jaringan Al Qaidah.

Sebagaimana diketahui, kaum fundamentalis Islam sangat berkarakter anti-AS, anti-Israel, anti-demokrasi, anti kapitalis, dan militer global. Motifnya, sejauh yang bisa dianalisa dari karakter politik luar negeri AS selama ini, adalah kebencian terhadap sikap AS yang —menurut persepsi mereka— sekular, anti-Islam dan terlalu posesif dan *overprotective* terhadap Israel.[8] Sedangkan spekulasi tentang sasaran berikutnya, adalah respon biasa dari hilangnya rasa aman dan bergentayangannya rasa takut rakyat AS yang membutuhkan jawaban segera terhadap apa yang mungkin terjadi.

---

[7] Osama bin Laden pada bulan Februari 1998 pernah mengeluarkan fatwa untuk melawan kaum Yahudi dan Nasrani dan menjadi tokoh panutan bagi hampir semua tersangka teroris. Lihat, Tim Redaksi Hot Copy, *Osama Bin Laden: Teroris atau Mujahid* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 52-56.

[8] Lihat, Dokumen Polri, "Tabel Motif & Tujuan Peledakan Bom Bali..."

Spekulasi ini wajar sekali terbentuk karena kejadian ini begitu tiba-tiba, *massive* dan serempak dengan daya hancur yang sangat luar biasa. Spekulasi ini juga wajar karena telah menimbulkan amarah yang sangat besar rakyat dan pemimpin AS yang sedang merasa nyaman hidup dalam guyubnya modernitas, sekularisme dan kesejahteraan ekonomi tiba-tiba harus menghadapi mimpi buruk yang menyakitkan dan memalukan ini. Rakyat AS bukan kali ini saja menghadapi serangan kaum teroris. Bagi kaum fundamentalis dan radikal Islam —yang lebih dikenal awam dengan istilah 'kaum teroris'— melawan AS adalah melaksanakan kewajiban personal, sebuah jihad global melawan Yahudi dan Nasrani.[9] Maka, AS pun telah menempatkan teroris Muslim sebagai musuh sejak tahun 1979 (yang memunculkan nama "Ayatollah Khomeini" sebagai nama bagi musuh yang dipersepsikan itu) pada saat terjadinya Revolusi Islam Iran dan memuncak pada peristiwa krisis teluk tahun 1990 (dimana muncul nama "Saddam Hussein" sebagai musuh).

Dengan tertangkapnya para tersangka pelaku tindak terorisme di Indonesia dan di beberapa negara Asia Tenggara dan bahkan di Amerika dan Eropa, semakin memperlihatkan kepada kita bahwa jaringan organisasi kaum teroris sangat luas.[10] Meski secara moral dan diplomasi internasional teroris diserang dengan "perang wacana" yang memojokkan mereka sebagai "kaum pengecut", "kaum tak berperikemanusiaan", "kaum yang berbahagia di atas penderitaan orang lain", serta "kaum yang

[9] Lihat, Dokumen Polri, "Tabel Motif & Tujuan Peledakan Bom Bali..."

[10] Seth Mydans, "Militant Islam Unsettles Indonesia and Its Region," *New York Times*, 21 September 2001.

bertendensi penyakit jiwa", namun kaum teroris terus-menerus muncul dalam peta politik Indonesia dan dunia hingga kini untuk menyampaikan pesan-pesan yang sangat sulit diinterpretasikan.

Begitu tersembunyinya musuh yang satu ini, telah menimbulkan kesan misteri dan ketakutan psikologis tersendiri. Bagi rakyat Amerika, teroris adalah hantu (*spectre*) lain yang pernah dihadapi AS setelah hantu komunisme, sebentuk musuh ideologi, sekaligus musuh spiritual baru sebagaimana pernah diperingatkan oleh Huntington dalam *The Clash of Civilization*. Douglas E. Streusand bahkan berani menyebut "*that specter is Islam*", yang kemudian diidentifikasi secara awam oleh publik AS sebagai "*green peril*" (bahaya hijau).[11] Dan, dengan peristiwa serangan terhadap WTC dan Pentagon dua tahun silam, nama Osama bin Laden muncul sebagai "musuh" untuk mengembalikan kepercayaan dari publik AS terhadap pemerintahnya dalam menangani terorisme dari kaum muslim.[12]

Untuk konteks Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia, problem terorisme ini memunculkan banyak dilema: antara menjaga perasaan ummat Islam dan *law enforcement* yang mesti ditegakkan.[13] Lebih dari itu, ada sebuah kenyataan bahwa serangan brutal telah terjadi dan musuh mesti didefinisikan untuk kemudian diambil langkah-langkah selanjutnya sebelum mengeksekusi 'penjahat' yang walaupun terus bersembunyi di balik simbol-simbol dan

---

[11] Leon T. Hadar, "The Green Peril: Creating the Islamic Fundamentalist Threat", *Policy Analysis,* No. 77, August 27, 1992.

[12] "Fear of Fundies," *The Economist*, February 15, 1992, h. 45-46.

[13] Eric Pianin and Bob Woodward, "Terror Concerns of U.S. Extend to Asia: Arrests in Singapore and Malaysia Cited," *Washington Post*, January 18, 2002; h. A18.

alasan agama. Untuk mengetahui konteks teoritis kemunculan "teroris" ini, perlu disimak perkembangan pemikiran fundamentalisme dalam Islam.

Secara ideologis, di kalangan muslim Indonesia, khususnya setelah Periode Reformasi (1999 – sekarang) diskursus tentang *khilafah*, negara Islam, *jihad*, *bai'at* hingga kajian tentang Piagam Madinah dan Negara Madinah, bukan hal yang asing. Sejak periode ini banyak gerakan-gerakan radikal dan fundamentalis berubah menjadi gerakan teroris. Mereka telah memonopoli tafsir atas wacana tentang negara Islam, khilafah, jihad dan terma-terma politik Islam lainnya. Di era Presiden Abdurrahman Wahid, diskursus tentang negara Islam merebak di kampus-kampus, kalangan gerakan Islam dan aktivis masjid. Tentang khilafah, negara Islam hingga kajian tentang Negara Madinah ini, mungkin, hanya ada satu negara Islam yang paling ideal, yaitu Negara Madinah dengan Piagam Madinah-nya pada masa Rasulullah Muhammad SAW (Abad VII). Namun, untuk kebanyakan orang, Negeri Madinah ini hampir-hampir bagaikan "negeri dongeng" meski ada dalam sejarah.

Untuk menghindari "mitologisasi," maka perlu kita kaji negara Islam yang pernah muncul di jantung Eropa: Spanyol zaman Islam (*Islamic Spain*). Negeri Muslim dan umat Muslim di Spanyol merupakan salah satu wilayah yang paling jauh dari jantung dunia Islam, tetapi sangat toleran. Bernard Lewis menunjukkan bahwa Islam yang lebih awal itu, ternyata cenderung lebih toleran dibanding Islam yang lebih belakangan. Pada masa Islam awal itu, banyak pergaulan sosial yang berlangsung dengan lancar antara kaum Muslim, Kristen, dan Yahudi. Meskipun menganut

agama-agama yang berbeda, mereka membentuk sebuah masyarakat yang tunggal, di mana perkawanan antar-pribadi, kemitraan dalam bisnis, hubungan guru-murid dalam kehidupan ilmu pengetahuan, dan bentuk-bentuk lain kegiatan bersama lainnya berlangsung normal dan bahkan sangat umum.

Kerja sama kultural ini tampak dalam banyak cara. Orang-orang Islam, Kristen, dan Yahudi hidup dalam suasana penuh peradaban, saling hormat, dan saling mengembangkan ilmu pengetahuan dan seni budaya. Tidak ada sedikit pun diskriminasi. Karena itu, masalah pluralisme adalah masalah bagaimana kaum Muslim mengadaptasikan diri mereka dengan dunia modern. Hal ini pasti akan melibatkan masalah-masalah bagaimana mereka memandang dan menilai sejarah Islam, dan bagaimana mereka melihat dan menilai perubahan dan keharusan membawa masuk nilai-nilai Islam yang normatif dan universal ke dalam dialog dengan realitas ruang dan waktu.

Sejarah kaum Muslim, seperti halnya sejarah komunitas umat manusia manapun, selalu memiliki potensi untuk membuat kesalahan atau berbelok dari jalan yang benar. Selain karena truisme sederhana seperti yang dikatakan penyair Inggris Alexander Pope, yakni bahwa "berbuat salah itu manusiawi," semua sejarah jelas dengan sendirinya adalah sejarah manusia, dan tidak ada seorang manusia biasa pun yang sakral dan suci. Sejarah Islam di Indonesia adalah juga sejarah pergulatan kekuasaan (*khilafah*) yang belum juga selesai hingga sekarang. Upaya mewujudkan kekuasaan itu berimplikasi pada munculnya pemberontakan (DI/TII tahun 1949) hingga terorisme (1999 hingga

sekarang).

Kerjasama kultural ini, seperti dicatat Anthony Reid, tampak dalam banyak cara orang-orang Islam, Hindu-Budha dan Kristen menjalankan kehidupan dan kebudayaan. Bahkan di era pergerakan nasional untuk mewujudkan kemerdekaan, kaum pluralis ini berjuang dalam spirit Sumpah Pemuda 1928. Dan sampai era demokrasi parlementer Bung Karno pada 1950-an, kaum Muslim dan non-Muslim itu hidup dalam suasana penuh peradaban, saling hormat, dan saling mengembangkan ilmu pengetahuan dan seni budaya. Tidak ada sedikit pun diskriminasi, karena pembangunan bangsa dan karakternya (*nation and character building*) berjalan wajar. Karena itu, masalah pluralisme adalah masalah bagaimana kaum Muslim mengadaptasikan diri mereka dengan dunia modern, yang sampai kurun 1950-an itu dijamin oleh konstitusi.

Pada kurun waktu itu Islam menghormati pluralitas dan menghargai kultur masyarakat yang ada. Semangat pluralisme dikembangkan dan toleransi ditegakkan dengan khasanah intelektual yang diperkaya. Akan tetapi, di bawah Orde Baru Soeharto, semua itu mengalami keretakan: *state building* (pembangunan negara) telah melebihi dan menghancurkan *nation building* (pembangunan bangsa). Negara kian represif dan hegemonik, melibas masyarakat di seluruh etnis, kelas, dan lapisan. Politik belah bambu dan regimentasi Orde Baru Soeharto meluluhlantakkan spirit kebangsaan dan kemanusiaan.

Karena itu, para intelektual dan elite Islam harus mencari jalan keluar dari krisis-krisis sosial, ekonomi, politik dan ideologi dewasa ini, agar reformasi tidak mengalami

stagnasi, agar bangsa ini tidak mengalami disintegrasi. Giddens menyebut politik "jalan ketiga" dengan menekankan "tak ada hak tanpa tanggung jawab". Di dalam Islam era Rasululah, "tak ada hak tanpa tanggung jawab" itu teraksentuasikan dalam Piagam Madinah, yang menjamin kebebasan, persamaan dan keadilan. Di era Islam Cordova, Spanyol, spirit dan konsepsi "Piagam Madinah" itu kemudian menjadikan mereka komunitas yang pluralistik, kosmopolit, multikultural dan universal, sehingga mereka bersedia belajar dan menerima segala yang bernilai dari pengalaman-pengalaman komunitas lain.

Kerangka Teoritis Fundamentalisme dan Radikalisme Islam

Kaum fundamentalis Islam, sebagai musuh negara-negara sekuler, adalah *"an aggressive revolutionary movement as militant and violent as the Bolshevik, Fascist, and Nazi movements of the past*", kata Amos Perlmutter, seorang ilmuwan politik. Selanjutnya, Perlmutter menyebutkan bahwa kaum fundamentalis ini sangat "*authoritarian, anti-democratic, anti-secular*," dan tidak bisa bersahabat dengan "*Christian-secular universe*"[14] dan tujuannya adalah untuk mendirikan sebuah "negara Islam transnasional yang bersifat otoriter".[15]

Martin E. Marty dan R. Scott Appleby yang sangat serius dalam 'Proyek Fundamentalisme', menyebutkan bahwa

[14] Lindsay Murdoch, "Bin Laden 'Funded Christian-haters," *Sydney Morning Herald*, 28 September 2001.

[15] Paolo Pasicolan adalah seorang policy analyst pada Asian Studies Center of the Heritage Foundation.

fundamentalisme selalu mengikuti suatu pola.[16] Mereka adalah "*embattled forms of spirituality*," yang muncul sebagai respon terhadap suatu krisis kecurigaan (*perceived crisis*). Kaum fundamentalis terlibat dalam konflik dengan musuh-musuh sekular yang dicurigai membuat kebijakan-kebijakan yang bertentangan secara frontal dengan agama. Kaum fundamentalis tidak menganggap pertentangan frontal ini sebagai sebuah "arena bermain" (*play ground)*, melainkan sebuah "medan perang" (*battle field*) yang serius, yang bukan sekadar sebuah perlawanan politik konvensional, melainkan menganggapnya sebagai sebentuk "perang kosmik" (*cosmic war*) antara kekuatan-kekuatan yang *haq* dan kekuatan yang *bathil*. Mereka takut terhadap —dan selalu merasa adanya ancaman— kaum *kafir* untuk membasmi mereka yang berasal dari kekuatan-kekuatan Barat sekular; maka mereka berusaha membentengi diri dengan doktrin dan praktek yang pernah hidup di masa lalu (doktrin dan praktek *jihad*). Untuk menghindari diri mereka dari "dunia buruk" dan menutup diri dari kontaminasi "perang kosmik" itu, kaum fundamentalis seringkali mundur dan menyempal dari *mainstream* masyarakat untuk menciptakan budaya tandingan (*counterculture*); dan kaum fundamentalis bukanlah kaum yang bermimpi di siang bolong. Mereka menyerap rasionalisme pragmatis dari modernitas, dan, di bawah bimbingan para pemimpin kharismatik mereka, menyaring apa yang perlu dari dunia teknikal untuk membuat rencana aksi yang seringkali bersifat destruktif.[17]

---

[16] Lihat, Martin E. Marty and R. Scott Appleby (eds), *Fundamentalisms Observed* (Chicago: University of Chicago Press, 1991).

[17] Lihat, Jonathan R. White, *Terrorism: An Introduction* (Wadsworth Publishing 1991).

Dari apa yang kita saksikan pada peristiwa penyerangan serempak terhadap gedung WTC (World Trade Center) dan Pentagon, Bom Bali, Bom Malam Natal, Bom Marriot dan lain-lain adalah kumpulan dari ahli-ahli yang memiliki kemampuan teknikal setaraf pilot dan teknisi yang mengerti fungsi-fungsi transponder, *black box*, radar, elemen kimia, komponen elektronika lanjut dan *global positioning tool-box* serta kemampuan manajerial lainnya.

Kaum fundamentalis merasa bahwa mereka berperang melawan kekuatan-kekuatan yang mengancam nilai-nilai yang sangat suci dari komunitas mereka dan reaksi mereka akan bersifat teror politik.[18] AS yang muncul sebagai aktor tunggal pemenang "perang dingin" semenjak runtuhnya kekuatan Komunis di blok Soviet dianggap banyak kalangan fundamentalis telah menyergap kesadaran orang-orang Islam sebagai kekuatan adidaya yang tak mungkin dikalah-kan dan siap menjadikan masyarakat muslim sebagai musuh berikutnya. Aksi serangan berbentuk teror di New York dan Washington itu sesungguhnya merupakan sebuah respon yang berisi pesan yang ingin membuktikan bahwa AS ternyata bertumpu pada "jaring laba-laba" yang begitu lemah.[19]

Selama "perang dingin" antara negara formal dengan kelom-pok teroris yang tak memiliki batas negara, para aktor perang sering kali emosional, panik dan kurang menghargai posisi masing-masing. Dari beberapa temuan studi Karen

---

[18] Lihat, Alex P. Scmid & A.J. Jongman, *Political Terrorism: A New Guide To Actors, Authors, Concepts, Data Bases, Theories, And Literature* (London: Transaction Publisher, 1983).

[19] Lihat artikel Noam Chomsky, "On the US attacks," di website www.zmag.org.

Armstrong[20], modernisasi telah membawa polarisasi masyarakat pada posisi-posisi ekstrim yang saling berlawanan, dan untuk menghindari eskalasi konflik, hanya ada satu cara: kita harus mencoba memahami *the pain and perceptions of the other side*.[21] Karena selama ini mereka sering menyatakan: "*nobody knows our trouble we see, nobody knows our problem*", maka akan sangat mengejutkan jika kemudian sebagai konsekuensinya, "*nobody knows of what our plan of action*."

Bagi kita semua yang telah mencicipi kebebasan dan prestasi modernitas, Karen Armstrong merekomendasikan, "kita tak boleh berhenti untuk berempati dan bersimpati terhadap kesusahan dan penderitaan yang dialami sebagian komunitas kaum fundamentalis Islam."[22] Ibarat pecandu narkoba, mereka tidak boleh dianggap sebagai kaum yang melanggar hukum yang harus dikejar-kejar, melainkan harus dipandang sebagai kaum yang membutuhkan perawatan untuk mengobati penyakit ketergantungan dan ketakutan irasional mereka.[23] "Modernisasi", menurut Karen Armstrong, "seringkali dirasakan tidak sebagai sebuah pembebasan melainkan sebuah serangan agresif".[24]

---

[20] Karen Armstrong, *The Battle for God* (New York: Ballantine Books, 2001), h. 6

[21] Karen Armstrong, *The Battle for God,* h.88.

[22] Karen Armstrong, *Islam: A Short History* (New York: Modern library, 2000), h. 56.

[23] Contoh yang jelas dari ketakutan irasional ini, misal salah satunya, adalah: '… saya sangat takut akan ancaman Allah jika saya tidak melaksanakan jihad terhadap kaum kafir dan sekutunya sesuai dengan Surah At-taubah ayat 39 yang berbunyi 'jika kamu tidak berperang di jalan Allah, maka Allah pasti akan mengazab (menyiksa) kamu dengan siksaan yang amat dahsyat…' Lihat pengakuan Imam Samudra dalam "Tabel Motif & Tujuan Peledakan Bom Bali 12 Oktober 2002," h. 2.

[24] Karen Armstrong, *The Battle for God,* h. 90.

Berbeda dengan kaum fundamentalis, kaum radikal Islam justru memandang bahwa memahami agama secara mengakar jauh lebih penting sebelum membuat rencana aksi yang cenderung bersifat kekerasan. Penyeragaman pandangan terhadap komunitas yang memberikan respon terhadap modernisasi, pemerintahan sekular dan budaya Barat ke dalam sebutan "fundamentalis" sesungguhnya merupakan sebuah penyederhanaan yang berlebihan. Spektrum dunia pergerakan Islam sesungguhnya menyimpan warna-warna yang kaya dalam khazanah yang cukup plural. Tidak semua kalangan yang kritis dan anti terhadap AS, Israel, budaya Barat, materialisme, kapitalisme, isu-isu feminisme, hak asasi manusia dan demokrasi dapat dikategorikan sebagai kaum 'fundamentalis'.

Kaum radikal Islam yang bangkit dengan garis yang berbeda, bahkan secara diametral berlawanan dengan fundamentalis adalah taksonomi pergerakan Islam yang mesti dilihat secara berhati-hati. Adanya fakta bahwa fundamentalisme telah muncul dalam ledakan-ledakan kecil dan besar di semua budaya (budaya agama monotheis, maupun politheis) mengindikasikan sebuah kekecewaan yang meluas terhadap masyarakat modern di mana banyak di antara kita malah merasakannya sebagai sesuatu yang membebaskan, menyenangkan dan memberdayakan. Pro-yek-proyek yang secara kasat mata dipandang baik oleh kaum liberal, di mana kaum radikal Islam juga termasuk di dalamnya, —seperti demokrasi, penciptaan perdamaian, kepedulian terhadap lingkungan, pembebasan wanita, atau kekebasan berbicara—dapat dipandang buruk, bahkan haram, oleh kaum fundamentalis.

Kaum fundamentalis seringkali mengekspresikan dirinya secara kekerasan, tapi kekerasan itu adalah cara atau jalan yang paling sederhana yang memancar dari ketakutan mereka yang mendalam akan hancurnya komunitas, tradisi, nilai dan budaya yang mereka anggap luhur. Dilihat dari latar-belakang pendidikan, mereka adalah kaum intelektual —yang oleh Bruce Hoffman[25] disebut sebagai "*violent intellectual*"— yang berusaha mencapai tujuannya karena dimotivasi oleh doktrin-doktrin agama yang mereka persepsikan secara berbeda (*out of mainstream*).

Setiap gerakan kaum fundamentalis yang pernah saya teliti, terdapat sebuah ketakutan irrasional akan proses penghancuran terhadap mereka secara sistematis. Menurut Scott Appleby, kemapanan kaum sekular bertujuan untuk menghapuskan keberadaan mereka sebagai kaum beragama dari muka bumi ini, sekalipun di AS sendiri. Kaum fundamentalis yakin bahwa respon mereka secara kekerasan adalah sebentuk perlawanan terhadap kekuatan-kekuatan yang telah menakut-nakuti mereka selama ini. Kaum fundamentalis percaya bahwa mereka selama ini melawan demi mempertahankan agama dan mempertahankan masyarakat yang beradab.

Sekarang banyak masyarakat dalam komunitas dunia Islam yang menolak persepsi bahwa Barat sebagai tak bertuhan, tidak adil, dan dekaden. Kaum Islam radikal baru tidaklah sesederhana kaum fundamentalis yang membenci Barat.[26]

---

[25] Lihat Bruce Hoffman, *Inside Terrorism* (New York: Columbia University Press, 1998).

[26] Karen Armstrong, dalam bukunya *Muhammad: A Biography Of The Prophet* (2000), mengingatkan tanggung-jawab Barat terhadap munculnya bentuk radikalisme baru Islam, yang dalam pengertian tersembunyi akan bangkit secara tiba-tiba seperti dalam fantasi-fantasi lama masyarakat Barat.

Bagaimanapun, kaum radikal baru Islam tidak merupakan gerakan yang homogen. Muslim radikal pada pokoknya berupaya meletakkan rumah mereka sendiri dalam suatu tata-aturan yang berbeda sesuai dengan yang mereka persepsikan. Tidak sebagaimana kaum fundamentalis yang mengidap dislokasi kultural yang parah, kaum radikal juga merasa nyaman dengan zaman modern.

Adalah mustahil untuk menggeneralisasi bentuk-bentuk ekstrim kelompok agama karena mereka bukan hanya berbeda antara tiap-tiap negara, tapi juga berbeda antara tiap-tiap kota bahkan di tiap-tiap kampung dan desa. Hanya sebagian kecil saja dari kelompok fundamentalis yang setia dengan aksi-aksi teror, sementara banyak kaum radikal Islam bahkan sangat bersahabat, menginginkan perdamaian, berpengharapan pada hukum dan tata-aturan, dan menerima nilai-nilai positif dari masyarakat modern.

Jika kaum fundamentalis tidak pernah punya waktu untuk berbicara tentang demokrasi, pluralisme, toleransi beragama, penciptaan perdamaian, kebebesan individu atau pemisahan antara agama dan negara, maka komunitas lainnya bahkan yang radikal sekalipun justru menganggap semua itu adalah sublimasi nilai-nilai agama dalam bahasa profan. Semoga AS —dan negara-negara yang sedang dilanda semangat anti teroris karena serangkaian bom yang meledak di tempat-tempat ibadah Nasrani atau di tempat-tempat di mana terjadinya penetrasi kapitalisme, liberalisme dan sekularisme Barat— tidak panik dan salah dalam membedakan mana yang fundamentalis dan mana yang radikal.

Terorisme di Indonesia: Integrasi Fundamentalisme dan Radikalisme

Sebenarnya, kaum teroris bukanlah kelompok baru dalam dunia pergerakan radikal dan fundamentalis Indonesia. Kaum teroris adalah gabungan dari inti ajaran fundamentalis dan radikal yang bertemu dalam satu titik perencanaan perang melawan apa yang mereka persepsikan sebagai 'kezaliman'. Di Indonesia, kelompok teroris ini berjumlah kecil: (1) Jamaah Islamiyyah, dan (2) Darul Islam (terbatas pada faksi tertentu). Bagan di bawah ini memperlihatkan bagaimana anatomi pemikiran ideologis kaum teroris.

Kategorisasi Kaum Fundamentalis, Radikal dan Teroris
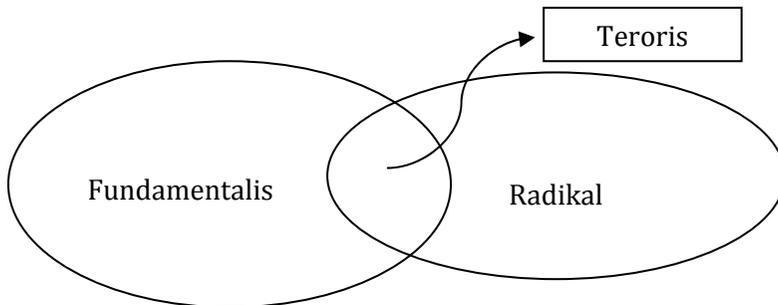
Dari bagan di atas, jelas terlihat bahwa terorisme Islam terbentuk dari adanya *overlapping of interest* dari paham fundamentalisme dan paham radikalisme Islam. Dengan demikian, cara mengatasi terorisme pun, secara ideologis adalah memisahkan antara paham fundamentalisme Islam dan paham radikalisme Islam untuk tidak bertemu dalam satu wadah yang utuh. Jika pemisahan ini berhasil dilakukan, maka terorisme akan mengalami kematiannya secara pelan-pelan.

Namun, jika radikalisme dan fundamentalisme terus-menerus mendapatkan momentum untuk bersatu, maka akan sulit sekali mengatasi terorisme. Terorisme akan tumbuh subur di kalangan di mana antara simbol dan hakikat bertemu. Jama'ah Islamiyyah pada awalnya bukanlah organisasi teroris, ia merupakan organisasi radikal yang mengalami fundamentalisasi di Malaysia setelah bertemu dengan banyak kalangan fundamentalis di luar Indonesia. Sementara Darul Islam yang mempraktekkan terorisme hanyalah sebagian kecil saja.

Peristiwa Bom Bali yang menelan ratusan korban jiwa yang tak berdosa pada tanggal 12 Oktober 2002 telah memunculkan kaum fundamentalis Islam (Jama'ah Islamiyah)[27] sebagai "teroris" dalam peta bumi politik dunia saat ini. Kaum yang berusaha melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam secara *kaffah* (totalitas) dalam kehidupan keseharian-nya ini dipandang sebagai kaum yang tidak bisa hidup berdampingan secara damai dengan masyarakat "modern" yang menerapkan cara-cara hidup Barat. Bagi mereka, Barat (termasuk seluruh kultur dan bahkan orang-orangnya) adalah haram dan najis berada di dunia ini.

Pada akhir abad ke-20, fundamentalisme Islam telah muncul sebagai kekuatan yang sangat dahsyat di dunia yang berusaha menyaingi dominasi nilai-nilai sekular modern dan kehadirannya ini dianggap telah mengancam perdamaian dan harmoni jagat bumi ini. Kaum fundamentalis adalah kaum militan yang selalu menerapkan sikap tegas terhadap anasir-anasir yang dianggap menyimpang dari nilai-nilai

[27] Untuk pembahasan awal tentang Jama'ah Islamiyah, lihat *Nida'ul Islam*, February - March 1997, h.7-11.

agama ini dan merasa bahwa hanya dengan agama mereka bisa mengembalikan keseimbangan dunia ini ke keadaan semula. Manifestasi perbedaan cara pandang ini dalam panggung politik sering mengejutkan terutama dengan serangan terorismenya yang memakan banyak korban yang tak berdosa.

Kaum fundamentalis memiliki kerangka nilai dan tata-aturan tersendiri dan sering mereka sendiri mempersepsi-kannya sebagai sesuatu yang *incompatible with modernity.* Bagi mereka, korban sipil dan korban lainnya yang sering disebut awam sebagai "tak berdosa", justru dipandang sebagai masyarakat yang zalim yang harus menerima dampak dan akibat, baik langsung maupun tidak langsung dari semua aksi-aksi yang mengejutkan yang mereka buat.

Bagi kaum fundamentalis Islam di Indonesia, mereka merasa bahwa kultur liberal yang umumnya berasal dari Barat telah begitu menghancurkan entitas nila-nilai luhur yang hidup dan bersemi di dalam komunitas mereka sejak lama. Reaksi terhadap perubahan nilai-nilai sosial inilah yang kemudian, menurut Karen Armstrong, mengarahkan kaum funda-mentalis berperang dan membunuh atas nama dan untuk Tuhan (*the battle for God*). Apa yang terjadi pada tahun 1978 dengan "Peristiwa Komando Jihad", tahun 1982 dengan "Peristiwa Usroh", tahun 1984 dengan "Peristiwa Teror Warman", tahun 1985 dengan "Peledakan Candi Boro-budur", tahun 1989 dengan "Tragedi Talangsari Jamaah Warsidi", tahun 1986 dengan "Peristiwa Cicendo", tahun 1987 dengan "Pembajakan Pesawat Woyla", tahun 2000 dengan "Persitiwan Bom Malam Natal di 18 kota", Bom Bali dan terakhir bom di Hotel JW Marriot, adalah ekspresi emosi

keagamaan kaum fundamentalis dan radikal Indonesia. Mereka juga berjuang keras membawa hal-hal sakral ke dalam dunia politik dan memaksakannya masuk ke pergulatan kebangsaan —yang *incompatible* dengan ajaran-ajaran agama— agar tercipta sebuah "harmoni baru" menurut apa yang mereka persepsikan.

Selalu saja pada setiap masyarakat, di setiap zaman dan tradisi ada orang-orang yang melakukan perlawanan terhadap modernitas. Ini merupakan sebuah reaksi terhadap kultur ilmiah dan sekular yang berawal dari Barat namun telah berakar di semua tempat di dunia ini. Barat telah mengembangkan "*an entirely unprecedented and wholly different type of civilization*", sehingga respon agama terhadap Barat menjadi sangat unik. Gerakan kaum fundamentalis di zaman modern sekarang memiliki hubungan simbiotik dengan modernitas itu sendiri. Mereka mungkin saja menolak rasionalisme ilmiah Barat, namun mereka tidak dapat lari darinya. Peradaban Barat telah mengubah dunia, dan kaum Fundamentalis pun akan berusaha mengembalikannya sejauh yang telah diubah oleh Barat tersebut.

Kaum fundamentalis juga melawan hegomoni kaum sekularis (Barat) yang dianggap telah menghilangkan ruang bagi improvisasi kaum agamawan. Kaum sekuler juga menganggap bahwa semakin rasional suatu masyarakat, maka akan semakin berkurang kebutuhan spiritualnya yang biasanya dipasok oleh agama. Maka, kaum fundamentalis selalu merasakan dirinya sedang berada dalam peperangan melawan nilai-nilai mereka yang paling sakral (*battling*

against forces that threaten their most sacred values).[28] Ketika perasaan berada dalam situasi perang semakin menghimpit mereka, maka baik pihak sekuler maupun fundamentalis, seperti apa yang ditulis Karen Armstrong, *it is very difficult for combatants to appreciate one another's position*[29]. Perang terbuka pun sangat mungkin untuk terjadi.

Pada akhir tahun 1970-an, kaum fundamentalis Islam di Indonesia mulai mengadakan gerakan pemberontakan terhadap hegemoni kaum sekuler dan mencoba secara paksa mendudukkan kembali agama dari posisi marjinal ke posisi sentral dalam panggung pergulatan politik.[30] Di atas panggung ini, kaum fundamentalis telah menikmati sukses yang spektakular. Agama mulai saat itu sekali lagi telah menjadi sebuah kekuatan di mana, seperti ditulis Martin E. Marty dan Scott Appleby (1979), "*no government can safely ignore*."[31]

Fundamentalisme sekarang merupakan bagian esensial dari pemandangan modern dan akan terus-menerus memainkan peran penting dalam politik, sosial, budaya, ekonomi dan

---

[28] Dalam bahasa yang lain, Karen Armstrong menyatakan, *"..but during the 20th century, the militant form of piety often known as fundamentalism erupted in every major religion as a rebellion against modernity. Every fundamentalist movement I have studied in Judaism, Christianity and Islam is convinced that liberal, secular society is determined to wipe out religion."* Lihat, Karen Armstrong, "The True, Peaceful Face Of Islam,"majalah *Time*, October 1, 2001, Vol. 158 No. 15.

[29] Lihat Karen Armstrong, *A History of God*, *The 4000-Year Quest of Judaism, Christianity and Islam* (New York: Random House, 1996). Lihat juga laporan *The Economist,* 21 Desember 1996.

[30] R. William Liddle, 1995, "Islam and Politics in Late New Order Indonesia," unpublished paper presented at the Conference on Religion and Society in the Modern World: Islam in Southeast Asia, Jakarta, 29-31 May 1995, organised by the Indonesian Institute of Science (LIPI), American-Indonesian Exchange Foundation (AMINEF) and IAIN Syarif Hidayatullah, *Conference on Religion and Society in the Modern World*, Jakarta.

[31] Lihat, E. Marty and R. Scott Appleby (eds), *Fundamentalisms Observed* (Chicago: University of Chicago Press, 1991).

keamanan domestik di masa depan. Perkembangan ini telah mengarah kepada problem yang semakin krusial yang mengundang rasa heran banyak peneliti dan ilmuwan sosial sehingga, seperti ditulis Marty dan Appleby, "*therefore, that we try to understand what this type of religiosity means, how and for what reasons it has developed, what it can tell us about our culture, and how best we should deal with it*."[32] Kaum fundamentalis menjadi sebuah entitas yang hampir tak terdefinisikan dan tidak ada satu orang pun yang tahu pasti bagaimana mengetasi mereka.

Semua tendensi ini semakin mengarahkan kepada apa yang disebut Karen Armstrong bahwa "*new fundamentalism has been an attempt to get Islamic history back on the right track and to make the umma [Muslim community] effective and strong once again.*"[33] Mereka tidak akan berhenti menjadi fundamentalis sebelum seluruh pluralitas ini bernaung di bawah kekuasaan mereka. Dapat kita pastikan, para pemimpin yang akan muncul dan berpengaruh di masa depan kebanyakan berasal dari kalangan ini.

Di Indonesia, kaum fundamentalis berkembang ke arah kaum skripturalis di mana mereka diidentifikasi dengan adanya *literal interpretation* terhadap teks-teks agama dan penajaman doktrin-doktrin inti tertentu seperti *jihad* dan *syari'at*.[34] Dua inti ajaran ini ternyata sangat berpengaruh terhadap problem disharmoni antara kaum fundamentalis dan kaum sekuler. Disharmoni ini dapat berubah menjadi sebuah medan perang manakala dipicu oleh isu-isu massal

[32] Lihat, E. Marty and R. Scott Appleby (eds), *Fundamentalisms Observed*...

[33] Lihat, Karen Armstrong, *The Battle for God*…

[34] Lihat, Abdul Aziz, Imam Tholkhah & Soetarman, *Gerakan Islam Kontemporer di Indonesia* (Jakarta, Pustaka Firdaus, 1991).

di mana moral agama menjadi wasit utamanya. Saat ini kaum fundamentalis juga berkembang ke arah impresi bahwa kaum fundamentalis secara inheren bersifat konservatif dan senantiasa merujuk ke masa lalu namun dengan penambahan kemampuan-kemampuan esensial tertentu yang modern dan sangat inovatif. Maka, medan ini di masa depan sudah pasti akan dimenangkan oleh kaum fundamentalis.[35]

Mereka sekarang telah menyerap rasionalisme pragmatis dari modernitas dan di bawah asuhan para pemimpin kharismatik mereka, mereka menyaring apa-apa yang "fundamental" untuk menciptakan sebuah ideologi yang memberikan mereka sebuah *plan of action*. Sehingga sekarang mereka tampak menyerang balik dan mencoba untuk meresakralisasi dunia yang telah dibuat semakin skeptis dan kabur oleh kaum sekeler. Semua itu mereka jadikan sebagai alat untuk mengeksplorasi implikasi-implikasi dari respon global terhadap kultur modern.[36]

Pada gerakan-gerakan kaum fundamentalis Islam tertentu, di mana banyak di antaranya yang sangat tersohor dan berpengaruh, seperti kaum Darul Islam (DI-TII)[37], respon global terhadap kultur modern ini ditunjukkan dengan motivasi yang bersifat patologi psikologis seperti yang disebutkan oleh Karen Armstrong: "*common fears, anxieties,*

[35] Martin van Bruinessen, "Gerakan Sempalan di Kalangan Umat Islam Indonesia: Latar Belakang Sosial-Budaya" [Splinter Movements within the Indonesian Muslim Community], *Jurnal Ulumul Qur'an* (Jakarta), 3, 1, 1992, h. 16-27.

[36] Manning Nash, "Islamic Resurgence in Malaysia and Indonesia", dalam Martin E. Marty, and R. Scott Appleby, (eds), *Fundamentalism Observed* (Chicago/ London, University of Chicago Press, 1991), [Vol. 1], h. 691-739.

[37] Untuk bahasan tentang DI/TII, lihat Hold Harald Dengel, *Kartosuwiryo dan Darul Islam*, (trj.), (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), h. 58.

and desires that seem to be a not unusual response to some of the peculiar difficulties of life in the modern secular world."

Gejala patologis ini tidak hilang meskipun mereka mengalami kemajuan-kemajuan dalam gerakannya dan, meskipun AS sekarang mendapat musibah, mereka masih tetap saja merasa ketakutan irasional. Ketakutan irasional ini sebagian besar disebabkan oleh posisi mereka yang cenderung *underground*, tertutup, anti-demokrasi dan hanya percaya dengan cara-cara *primitive rebels* dalam bentuk kekerasan. Patologi psikologis berat ini tentu saja telah memisahkan mereka dari dunia modern yang serba demokratis, terbuka, lembut dan institusional. Melihat kenyataan semacam ini, maka tidak ada satu pihak pun yang berkenan menghampiri mereka, apalagi untuk menolong.

Jika pilihannya mengisolasi kaum fundamentalis, maka sama artinya bahwa kaum sekuler —yang banyak mendapatkan pencerahan Barat— memberi jarak yang cukup bagi kaum fundamentalis untuk mengambil ancang-ancang sebelum menyerang. Seharusnya kaum fundamentalis diajak berdialog dalam atmosfir yang terbuka, hangat, bersahabat dan tanpa ancaman-ancaman yang semakin menjauhkan mereka. Untuk kasus Darul Islam dan Jama'ah Islamiyah[38] di Indonesia, masih memungkinkan untuk dilakukan serangkaian transformasi yang bisa menghilangkan patologi psikologis yang sering secara irasional menghinggapi mereka.

Mereka haruslah dikeluarkan dari dunia bawah tanah yang suram, gelap dan penuh intrik ke dunia terbuka, hangat dan

[38] Untuk keterangan sejarah singkat Jamaah Islamiyah yang berasal dari gerakan Darul Islam atau Negara Islam Indonesia, lihat "Transkrip Dialog Para Ulama dan Tokoh Masyarakat Se-Jateng dengan Tersangka Pelaku Terror Kelompok Jamaah Islamiyah (JI)", Bahan Kepolisian Negara RI, 25 September 2003, h. 4.

saling menghargai. Mereka haruslah di intitusionalisasikan melalui lembaga yang permanen, agar perasaan *nothing to loose* mereka berubah menjadi sikap yang bertanggung jawab.[39] Mereka haruslah disadarkan bahwa kekerasan bukanlah cara yang baik menyelesaikan masalah. Mereka juga harus dipahamkan bahwa hanya dengan iklim demokratislah mereka dijamin bisa berdemonstrasi, meskipun demokrasi senantiasa mereka persepsikan *incompatible* dengan Islam. Untuk memahami semua sisi tentang "para pejuang Tuhan" ini, maka perlu dibentuk sebuah pusat studi tentang radikalisme dan terorisme. Keberadaan pusat studi semacam ini terasa sangat urgent mengingat proliferasinya yang semakin meluas dan keberadaannya yang sulit dideteksi.

Kemunculan ISIS

Teka-teki yang muncul atas motif apakah yang mendasari makin maraknya kaum profesional yang berkecukupan tergiur untuk menjadi tentara Negara Islam Irak dan Suriah (NIIS) atau yang lebih dikenal dengan ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*). Hingga saat ini sudah sekitar 518 warga negara Indonesia diduga begabung dengan ISIS. Menurut catatan Sidney Jones dari *Institute for Policy Analysis of Conflict* (IPAC), sudah lebih dari 800 warga negara Indonesia yang sudah berangkat dan bergabung dengan gerakan "teroris" tersebut di Suriah.

The Intercept (8 Juli 2015) mengungkapkan dua pilot Indonesia (Ridwan Agustin alias Ridwan Ahmad al-Indunesiy

---

[39] Andreas Harsono, "Democracy will keep Indonesia 'friendly'", *The Nation*, January 22, 2002.

dan kapten Tommy Hendratno alias Tommy Abu Al Fatih Hendratno) yang pernah menjadi aparat keamanan negara dan kemudian menjadi pilot sebuah maskapai multi-nasional, kini bergabung dengan ISIS. Banyak yang kemudian khawatir atas pilihan hidup yang dijalani dua profesional di usianya yang masih sangat produktif ini. Tidak sedikit pula yang mempertanyakan tentang motif keduanya ikut bergabung menjadi tentara ISIS, membela sesuatu yang mungkin dianggap sangat ideal di suatu tempat nun jauh di sana di luar tanah Indonesia. Bahkan kalangan politisi di dunia Barat cemas dengan rekam jejak mereka yang sebelumnya pernah bergabung dengan kesatuan keamanan negara yang sangat disegani di kawasan Asia Tenggara.

Sebelumnya, seorang anggota polisi aktif di Jambi, Syah-putra (alias Abu Azzayn al Indunesiy) meninggalkan anak istrinya dan berangkat melalui Medan ke Suriah untuk berjihad melawan apa yang mereka persepsikan sebagai "thoghut" (musuh) yaitu rezim Bashir Al Asad. Statusnya sebagai anggota kepolisian negara ini dengan gaji yang berkecukupan tentu mengundang tanda-tanya besar: ada apa di balik semua ini? Tindakannya meninggalkan anak istri untuk berjihad ke sana, menceburkan diri ke dalam kancah perang, tentulah bukan sebuah keputusan rasional biasa. Ada sesuatu yang tak teridentifikasi dari realitas sosial yang problematik ini.

Semua kekhawatiran dan kecemasan berbagai kalangan ini sangat rasional. Kaum profesional dengan basis status sosial ekonomi kelas menengah dan dengan latar-belakang keluar-ga yang relatif sakinah ini tentunya mengharapkan jawaban

nyata atas tanya yang membingungkan. Tindakan Syahputra menceraikan istrinya dan pergi ke tanah asing berperang tentunya tidak bisa dijelaskan dari perspektif psikososial generik. Pasti ada alasan-alasan teologis atau bahkan eskatologis dari tindakan yang tidak biasa ini.

Dari perspektif modern, banyak analisis tentang daya tarik finansial yang ditawarkan ISIS kepada sesiapa yang berkenan bergabung dengan bala tentara multi nasionalnya. Peluang ini disambut baik oleh banyak kalangan yang, menurut perhitungan berbagai ahli, berasal dari kaum marjinal yang berusaha mencari penghidupan ekonomi yang lebih layak. Bahkan ada juga yang menyebutkan tentang motif seksual yang melatari keinginan sebagian kecil warga Indonesia untuk berpartisipasi di dalam perang atau konflik di Suriah dan Irak tersebut. Ketika maraknya pencekalan terhadap orang-orang yang diduga hendak berangkat ke Suriah di berbagai bandara di Indonesia dan Malaysia sejak tahun 2013 hingga 2014, analisis *economic interest* sebagai motif sangat mendominasi penjelasan tentang latar-belakang kaum marjinal ini. Hampir tidak ada satu analisis pun yang mengaitkannya dengan kesadaran ideologis para aktor pendukung ISIS tersebut. Bahkan Daniel Bell (1960) dan Francis Fukuyama (1996) sangat yakin bahwa ideologi telah mati dan tak bisa memengaruhi kebangkitan dunia Timur. Akan tetapi, analisis kepentingan ekonomi, atau motif material apa pun, menjadi tidak mampu menjelaskan mengapa kaum profesional ikut terlibat dalam konflik yang sangat mengerikan bagi banyak kalangan.

Dibutuhkan satu penjelasan yang lain yang secara akademis bisa dipertanggungjawabkan untuk memberikan jawaban atas fenomena yang sangat mengejutkan dunia ini. Secara antropologis, D'Andrade dan Strauss (1992) pernah mengajukan motif kultural yang bersifat ideologis atas fenomena maraknya perlawanan bersenjata dan konflik komunal di berbagai belahan dunia. Gupta dan Ferguson (1992) mencoba menjabarkan motif *cultural model* tersebut sebagai "a sense of loss territorial root" dimana nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme sudah mulai pudar atau sedang terjadinya "an erosion of the cultural distinctiveness of place" yang kemudian menghasilkan sebuah produk sampingan dari globalisasi yang disebut sebagai "deterritorialization of identity" dimana identitas tidak lagi dilekatkan pada tempat dimana seseorang dilahirkan atau dibesarkan dalam suatu periode *formative age* yang sangat menentukan. Identitas yang berdasarkan lokalitas tergan-tikan oleh apa yang sejak lama dikenal sebagai ideologi. Ideologi Islam telah menjadi pilihan bagi dua pilot dan satu polisi dari Indonesia yang tentunya telah terasuh di bawah ideologi Pancasila dan digaji oleh hasil pajak warga negara yang hidup di alam demokrasi.

Ridwan Agustin dan Tommy Hendratno serta Syahputra yang telah mengalami indoktrinasi ideologi sekuler ini kemudian menggantikannya dengan ideologi yang baru dipeluknya. Ke manakah nasionalisme dan patriotisme yang sempat diajarkan oleh negara ini? Nasionalisme dan patriotisme adalah ideologi yang berbasis tempat dan akan mudah hilang ketika kenangan tentang tempat itu semakin memudar di tengah kosmopolitnya dunia yang sekuler dan materialistis ini. Edward Said (1979: 18) menjelaskan situasi

ideologi yang menembus batas-batas nasionalitas dan lokalitas lainnya sebagai "a generalized condition of home-lessness". Inilah yang mungkin bisa kita sebut sebagai ideologi transnasional keagamaan yang selama ini menyebar semenjak berakhirnya perang dingin antara Blok Kapitalis dan Blok Komunis/Sosialis. Kedua blok ideologis ini, oleh kalangan gerakan Islam transnasional dianggap telah menyebarkan polusi mental dan mengancam kesucian agama. Konsep "pollution and purity" (Louis Dumont, 1970 [1966]) inilah yang kemudian dikembangkan secara akade-mis untuk menjelaskan mengapa pilihan ideologis menjadi rasional di atas pilihan-pilihan material dan ekonomis lainnya.

Analisis ideologis menjadi penting ketika penjelasan-penje-lasan motif ekonomi, sosio-psikologis dan politik menjadi lumpuh di hadapan realitas sosial yang problematik ini (Talal Asad, 1979; Louis Althusser, 1977; George Marcus, 1986; Maurice Bloch, 1983 dan 1986). Renato Rosaldo (1988) memperlihatkan bagaimana ideologi tidak lagi mengenal batas-batas tempat dan merasuki ke berbagai kalangan yang disebutnya sebagai "people without culture" ini. Ideologi jihadisme yang selama ini dianggap bertanggung jawab atau setidaknya berada di belakang semua perlawanan berdarah dengan segala kesemrawutan sosiologisnya, setidaknya bisa memberikan penjelasan tentang fenomena kembalinya ideologi dalam analisis ilmu-ilmu sosial dan humaniora.

Kecenderungan semakin materialnya analisis sosial atas berbagai gejala munculnya gerakan-gerakan perlawanan dan konflik keagamaan haruslah diimbangi dengan analisis kultural yang memadai. Kembalinya ideologi bagi banyak

kalangan dari berbagai latar belakang sosial ekonomi menunjukkan bahwa faktor non-material jauh lebih kuat dalam memengaruhi motif seseorang atau sekelompok orang dalam melakukan tindakan-tindakan perlawanan. Geertz (1973: 220) menyebutkan bahwa ideologi adalah bagian dari sistem budaya yang memetakan realitas-realitas sosial yang problematik dan menjadi matriks bagi terciptanya kesadaran sosial. Ideologi inilah yang mendasari Ridwan Agustin, Tommy Hendratno, Syahputra dan juga Heri Kustiyanto meninggalkan segala kecukupan duniawi dan membuang semua *spirit in the material world* yang pernah mereka anut sebelumnya. Mereka menuju ke sebuah harapan baru yang masih belum jelas secara material, namun sangat jelas secara ideologis: janji surga bagi yang syahid dan syafaat bagi keluarga batih dan kerabatnya.

Matriks kesadaran sosial ini dibangun oleh kalangan yang merasakan adanya luka moral (*moral torment*) yang disebabkan oleh serangan ideologi lain (Joel Robbins, 2004). Kesadaran sosial keterjajahan inilah yang kemudian menggerakkan mereka untuk menuntut balas atas luka moral yang masih menganga tersebut. Kesadaran sosial ini bukan dibangun atas dasar nasionalisme atau etnisitas, melainkan berdiri secara transnasional sebagai sebuah kesadaran baru yang disebut oleh Michael Francis Laffan (2003) sebagai *Islamic nationhood*. Di sinilah konsep *ummah* dibangun sebagai sebuah kesadaran sosial yang memengaruhi berbagai orang untuk berpartisipasi di dalam pembentukan sebuah negara Islam di Suriah dan Irak. [40]

---

[40] Lihat, Michael Francis Laffan, *Islamic Nationhood and Colonial Indonesia*: *The Umma Below the Wind* (New York: Routledge Curzon, 2003).

Konsep Michael Laffan (2003) tentang spirit bela negara dalam komunitas Islam ini begitu membahana dan setidaknya menjadi ketertarikan politik bagi gerakan-gerakan lainnya. Ideologi *Islamic nationhood* ini mempengaruhi banyak gerakan-gerakan radikal dan teroris di berbagai belahan dunia. Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di Poso segera menyatakan sumpah setia (baiat) kepada khalifah Al Baghdadi yang memimpin ISIS (2013), juga Boko Haram di Negeria tersirap dengan peragaan kekerasaan yang diperlihatkan ISIS (2014). [41]

Beberapa faksi mujahidin di Suriah, Afghanistan, Palestina, Lebanon, dan wilayah-wilayah lainnya menyatakan solidaritasnya untuk mendukung dan bergabung dengan gerakan yang dianggap sebagai representasi alam bawah sadar mereka untuk menggentarkan musuh-musuh agama yang telah menorehkan *moral torment* terhadap umat Islam selama berabad-abad.

Bahkan belum lama ini Fakhruddin bin Kasem alias Din Robot, mantan panglima *sagoe* Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Julok, Aceh Timur (7/9/2015) menyatakan hasratnya untuk bergabung dengan ISIS. Meskipun hasrat politik yang tersendat ini dianggap banyak pihak sebagai langkah sensasional saja, setidaknya realitas sosial problematik ini dipengaruhi oleh merebaknya ideologi kebangsaan Islam yang diembuskan oleh ISIS. Bayangan akan sebuah *tamkin* negara Islam yang *de facto* menjadi daya tarik utama bagi banyak gerakan pemberontakan. al-Qaeda pun kewalahan menghadapi berbagai serangan ISIS di basis-basis yang sudah mereka rebut sebelumnya di Suriah, Irak

[41] Lihat, Michael Francis Laffan, *Islamic Nationhood*...

dan Afghanistan. al-Qaeda kalah cepat dalam mewujudkan idealitas arkaik yang sangat diharapkan banyak kalangan radikal dan fundamentalis Islam, yaitu keinginan untuk memiliki sebuah *tamkin* (negara) yang definitif. Posisi *tanzhim* (gerakan) al-Qaeda perlahan-lahan mulai tergeser oleh ISIS yang rajin mempertontonkan kebiadaban dan kekerasan sebagai kabar gembira dan peringatan untuk memuaskan dendam keterjajahan lama di bawah sistem kapitalisme dan neo-liberalisme Barat.

Motif kultural atau motif ideologis inilah yang mungkin sedang disemai oleh kaum profesional yang selama ini merasakan hidupnya yang berkecukupan tersebut belumlah cukup secara teologis dan eskatologis. Ada kekeringan spiritual yang akut di sana. Ada tujuan-tujuan akhirat yang mendasari tindakan mereka dalam bergabung dengan ISIS nun jauh di Suriah sana. Negeri yang jauh itu tidak dipandang akan memberikan kesejahteraan material bagi pemuasan nafsu badaniah, melainkan perang itu adalah peluang bagi mereka untuk menggapai hasrat teologis dan eskatologis mereka untuk menuju ke surga dan bercengkerama dengan para bidadari yang senantiasa perawan. Ini adalah sebuah keyakinan, sebuah ideologi yang tidak bisa ditukar dengan imbalan material sebesar apa pun. Ideologi millenarian inilah yang selama ini dicari, dan ketika ditemukan, maka kelezatan duniawi apa pun akan ditinggalkan dengan serta-merta.

Tipologi Wahabisme

Fenomena merebaknya benturan mazhab antara Wahabi dan kalangan tradisional Islam telah membuat banyak orang

bertanya-tanya tentang apa itu Wahabi, bagaimana sejarahnya dan apa bahaya dari mewabahnya aliran atau sekte yang dianggap radikal ini? Tulisan ini berusaha menjawab pertanyaan tersebut secara sekilas untuk mendudukkan perkara yang sebenarnya agar tidak terjadi kesalahpahaman yang bisa berakibat fatal. Agama adalah unsur kebudayaan yang paling sulit diubah (Achmad Fedyani Saifuddin, 2012) dan pengaruhnya paling sulit dikendalikan (Houston Smith, 1976). Benturan peradaban atau *clash of civilization* (Samuel Huntington, 1978)[42] terjadi karena agama. Benturan di dalam peradaban atau *clash within civilization* juga terjadi karena agama (Hans Dieter Senghaas, 2002).

Paham keagamaan yang dituduh paling banyak menyumbangkan konflik, perang, terorisme dan kekerasan komunal adalah, salah satunya, paham Wahabisme. Maka kita perlu memahami Wahabi secara sosiologis, teologis, sejarah, politik dan antropologis. Tulisan ini tidak akan bisa menjelaskan semua itu hanya dalam uraian ringkas beberapa frasa kalimat saja. Tulisan ini lebih merupakan *executive summary* untuk kalangan awam atau semacam *policy brief* untuk yang super sibuk, yang bahan-bahannya dikumpulkan dari kalangan “Wahabi” sendiri yang menjadi subyek penelitian saya selama ini.

Pada dasarnya, Islam itu hanya satu, namun karena perkembangan sejarah, politik, ekonomi dan budaya, maka Islam ikut berkembang berdasarkan wilayah persebarannya. Geopolitik Islam kontemporer sekarang ini menjadi tidak lagi satu, monolitik dan integral seperti pada masa nabi

[42] Lihat, Dieter Senghaas *The Clash within Civilisations-Coming to terms with Cultural Conflicts*, (London & New York: Routledge, 2002).

Muhammad SAW. Kini terdapat banyak kelompok, pecahan, aliran, sekte dan mazhab yang cukup beragam. Perpecahan pertama adalah pembelahan ideologis yang sangat besar antara (1) Sunni, dan (2) Syiah. Sunni dan Syiah ini juga terpecah dalam berbagai kelompok-kelompok atau sekte dan mazhab yang semuanya mengklaim dirinya yang paling benar. Tidak akan ada kemunculan kelompok baru tanpa klaim kebenaran. Klaim kebenaran inilah yang menyebabkan terjadinya perpecahan di dalam Islam.

Sunni adalah mazhab besar kaum pengikut *ahlus sunnah wal jamaah* yang sangat menghormati Nabi, berserta seluruh sahabat dan juga keluarganya. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), Persis, Al Washliyah, Al Irsyad, Perti, Masyumi, DI atau NII, JI, MMI, JAT, JAS adalah termasuk ke dalam kelompok Sunni. Syiah adalah mazhab yang selektif dalam mengakui sahabat Nabi dan juga keluarganya, mereka hanya mengagumi Ali ibn Abi Thalib r.a dan anaknya yang kedua, Husen, dari 11 anak Ali r.a. Karena minoritas, kelompok Syiah di Indonesia hanya sedikit saja dan organisasinya pun (beserta pecahannya) tak begitu tampil ke permukaan. Antara Sunni dan Syiah pun sering terjadi bentrokan yang melibatkan kekerasan berdarah.

Di kalangan Sunni perpecahan juga banyak terjadi dan membentuk banyak kelompok keagamaan, mazhab, sekte dan aliran yang sangat beragam. Wahabi adalah salah sebuah mazhab dalam kalangan Sunni. Baru baru ini di Madura ada sebuah lagu yang berjudul “Wahabi” yang sangat lugas menggambarkan apa itu aliran yang dianggap radikal oleh banyak kalangan. Lagu itu menggambarkan

Wahabi tidak suka maulid nabi, tidak mau tahlilan, tidak setuju ziarah kubur, tidak mengakui qunut, dan menganggap semua orang Islam di luar kelompoknya sebagai sesat, bid'ah atau bahkan kafir. Stigma buruk sering disematkan kepada Wahabi dan label ekstrim sering ditujukan kepada kelompok ini. Dalam banyak hal lagu ini ada benarnya, namun tidak semua Wahabi berperilaku demikian.

Menurut Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu (1986), Wahabi adalah paham keagamaan yang dianut kalangan yang tidak suka kepada adat-istiadat dan kebiasaan yang menyimpang yang mengharap kekuatan leluhur, melanggar tradisi adat, tidak mau ikut maulidan Nabi, tidak percaya kepada sunan, wali dan keramat-keramatnya, anti tahyul, khurafat dan bid'ah. Kata Wahabi adalah nisbat kepada Muhammad bin Abdul Wahab, padahal Abdul Wahab adalah nama ayahnya yang tidak pernah menulis satu kitab fiqh pun. Nisbat kepada nama Abdul Wahab ini dibuat oleh kalangan ilmuwan Barat yang biasanya mengambil nama belakang untuk katalogisasi kepustakaan.

Wahabi digagas oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab (1703-1792), seorang reformis (*mujaddid*) Islam dari Najd, Arab Saudi yang muncul di tengah galaunya ummat Islam yang lama terasuh di bawah empat mazhab statis (Syafii, Maliki, Hambali dan Hanafi). Ia adalah seorang mufti dari Daulah Suudiyah, cikal bakal Kerajaan Arab Saudi yang kita kenal sekarang. Muhammad bin Abdul Wahab menyeru kaumnya kepada tauhid, hanya berdoa memohon kepada Allah tanpa perantara, tidak mengagungkan para wali dan orang alim atau ulama atau orang-orang sholeh sebagai

orang yang lebih istimewa dan menolak menyembah kuburan. Wahabi menganut prinsip egaliter dalam beribadah. Muhammad bin Abdul Wahab ini dianggap sebagai pembuat mazhab kelima setelah mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi dan Maliki. Muhammad bin Abdul Wahab ini banyak menulis kitab yang isinya sejalan dengan pemikiran-pemikiran Ibnu Taymiyyah, Ibnu al-Qayyim,dan Ahmad bin Hanbal. Karena dipengaruhi oleh pemikiran dari Ahmad bin Hanbal, Wahabiisme ini agak mirip dengan mazhab Hambali. Pemikiran Wahabi ini kemudian dikembangkan oleh Bin Baz, Utsaymin, Syek Ahmad Khan, Jamaluddin Al Afghani, Rashid Ridha, Muhammad Abduh, HOS Tjokroaminoto, SM Kartosoewirjo. Kemudian pada periode pasca kolonialisme, ideologi Wahabi dikembangkan lebih sistematis lagi oleh Sayyid Qutb, Muhammad Qutb, Hasan Al Banna, Abul A'la Al Maududi, Yusuf Qardhawi, dan Nashiruddin Al Albani. Kemudian pada masa revolusi di Afghanistan ideologi ini dikemas rapi dalam buku-buku karya Abdullah Azzam, Osama Bin Laden, Ayman Al Zawahiry, hingga ke periode konflik Iraq dan Suriah oleh Abu Mushab As Shuri.

Wahabi tidak monolitik, artinya kelompok ini juga terpecah ke dalam beberapa varian yang satu sama lainnya tidak bersahabat, terkadang saling bermusuhan atau bahkan juga bisa menjurus ke konflik berdarah. Wahabi sebenarnya adalah istilah yang generik untuk menyebut atau merujuk kepada kelompok Salafi. Namun karena kaum tradisional Islam pun mengklaim dirinya sebagai Salafi (yang melaksanakan tradisi Salafussholeh), maka label Wahabi dipilih agar mudah membedakannya secara teologis dengan kelompok-kelompok yang bukan Wahabi. Terminologi Wahabi pun

dipakai sebagai euphemisme karena ada kelompok tertentu yang sangat sensitif dengan nama Salafi. Secara antropologis, terdapat setidaknya tiga tipologi Wahabisme di Indonesia yang bisa saya amati. Pertama, Wahabi Shururi atau Wahabi yang dianggap anti maulid, anti azan dua kali, anti tahlil, anti ziarah kubur dan anti jihad dan sering menganggap masyarakat yang melawan pemerintah sebagai *bughot* (pemberontak). Kedua, Wahabi Jihadi, yatu kelompok yang lebih fokus pada jihad dan berusaha melawan setiap kebijakan pemerintah, juga memiliki sikap penolakan yang sama dengan kelompok pertama. Wahabi Jihadi di Indonesia pernah muncul dengan nama Darul Islam (DI) di Jawa Barat tahun 1949 [dengan tokohnya Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo], Jawa Tengah tahun 1950 [Amir Fatah Widjaja Kusuma], Sulawesi Selatan tahun 1951 [Kahar Muzakkar], Kalimantan Selatan tahun1952 [Ibnu Hajar] dan Aceh tahun 1953 [Daud Beureu'eh], kemudian Jamaah Islamiyyah (JI) tahun 1992 hingga tahun 2010 yang dituduhkan kepada Ustadz Abdullah Sungkar dan Abubakar Ba'asyir, Dr Azhari, Noordin Mat Top, Amrozi, Imam Samudra, Ali Ghufron dan Ali Imron. Terakhir, kelompok Wahabi Jihadi ini muncul dalam bentuk Tanzhim al-Qaeda Serambi Mekkah (TQSM) dan banyak aktivisnya yang tertangkap setelah terbongkar-nya kegiatan *i'dad* (persiapan/latihan perang) di Bukit Jalin, Aceh Besar pada 2010. Kelompok Wahabi Jihadi ini kini lebih kalem dan memilih jalur dakwah *bil hikmah* dalam kegiatan kesehariannya. Ketiga, Wahabi Takfiri yang suka menuduh orang lain di luar kelompoknya sebagai pelaku *bid'ah* atau malah kafir. Kelompok ini ada di Aceh saat ini dan masih setia dengan *bai'at*-nya untuk mendukung Negara Islam Irak dan Syam

(NIIS) atau lebih dikenal dengan ISIS.

Di internal kalangan Wahabi ini sendiri juga terjadi saling tuding dan saling tuduh sesat menyesatkan. Kalangan Wahabi Shururi sering menuduh Wahabi Jihadi sebagai *bughot*. Wahabi Jihadi lebih banyak pasif dan tak bereaksi secara sosial dan politik. Wahabi Jihadi lebih mengutamakan ibadah-ibadah *mahdhoh* (ritual) dan menghindari friksi dengan pihak manapun, aktif dalam berbagai acara penyadaran tauhid ummat. Sementara kalangan Wahabi Takfiri sangat hiperaktif dalam dakwahnya dan menuduh banyak kalangan Jihadi sebagai *bid'ah*, sesat atau kafir terhadap banyak kelompok karena tidak mau menerima khilafah Al-Baghdadi di Suriah dan Iraq. Melalui media sosial kelompok Wahabi Takfiri ini mengumbar seruan-seruannya yang berisik dan penuh ancaman dan tudingan sembari memperlihatkan sikap intolerannya secara asertif.

Di tengah kiprah Wahabi dalam konflik komunal di Peristiwa Cumbok di Aceh (1946), Ambon (1999) Poso (2001) dan lain-lain tempat, juga ada kiprah Wahabi dalam kekerasan politik di Sulawesi Selatan serta kiprah Wahabi dalam terorisme yang diperankan oleh Jamaah islamiyyah, Darul Islam, dan lain-lain sebagainya sejak tahun 2000 hingga tahun 2014. Inilah yang kemudian membuat Wahabi menjadi *paragon of ugly* yang sulit untuk dibantah. Seharusnya Wahabi lebih tampil sebagai *paragon of beauty* dan mengharumkan agama Islam di mata dunia. Kejadian-kejadian kekerasan di Iraq dan Suriah dimana ISIS memperlihatkan kekejamannya yang mengerikan telah membuat Wahabi sebagai pihak yang dianggap bertanggungjawab secara teologis atas kekerasan dan kebiadaban ini.

Padahal, banyak sekali jasa Wahabi dalam membela kaum tertindas di muka bumi ini. Bantuan kepada pengungsi Rohingya justru datang dari Arab Saudi yang dianggap sebagai negara Wahabi. Kita haruslah menilai Wahabi ini secara lebih adil sebelum menjatuhkan stigma atau label radikal, ekstrimis dan teroris kepada semuanya yang berasal dari *mainstream* Wahabi. Padahal ada Wahabi yang anti jihad, yang anti pemberontakan, dan juga Wahabi yang bisa menerima ziarah kubur, tahlil, maulidan dan juga masih bersedia datang ke kenduri-kenduri untuk menyantap hidangan.

Di tengah banyaknya tudingan terhadap kalangan Wahabi yang dianggap telah mempermalukan agama Islam, namun harus diakui bahwa ada banyak jasa Wahabi dalam membela kaum tertindas, khususnya yang beragam Islam. Hampir dapat dipastikan kebanyakan yang dibela oleh Wahabi adalah ummat Islam tanpa membedakan sekte dan mazhab. Bantuan kemanusiaan yang diberikan kaum Wahabi menyebar ke seluruh dunia dalam bentuk filantropi zakat, sedekah, qurban dan pembangunan masjid serta lembaga pendidikan.

Kesimpulan

Gerakan politik Islam radikal di Indonesia sedang meng-alami kerumitan, semacam situasi disorientasi, dislokasi dan diposisi yang kemungkinan akan mengalami titik-balik (*turning point*) lahirnya pemimpin baru yang berbeda atau lebih baik pasca Ustadz Abdusshomad atau yang lebih dikenal dengan nama Ustadz Abubakar Ba'asyir (ABB). ABB adalah pemimpin kharismatik terakhir dari kalangan jihadis

Indonesia yang mengalami gonjang-ganjing perpecahan dalam kurun sejarah pergolakan yang panjang. Perpecahan terakhir yang terjadi setelah pernyataan *bai'at*-nya ke Daulah Khilafah Islamiyyah Irak dan Syam pimpinan Abubakar Al-Baghdadi adalah panggung terakhir (*the last frontier*) bagi figur yang sangat dikagumi kalangan pergerak-an radikal Indonesia dan sangat disegani oleh para jihadis di berbagai belahan dunia. Pernyataan *bai'at* ABB ini menyebabkan munculnya perpecahan (*firqah*) penghujung dari serang-kaian perpecahan yang terjadi dalam sejarah panjang pergerakan jihad di Indonesia.

Sejarah pergerakan jihad di Indonesia hampir sama dengan sejarah munculnya kesadaran nasionalisme Indonesia di akhir abad ke-19. Sejarah pada masa awalnya ini adalah sejarah modern kontinuitas (*continuity*) atau estafeta kepemimpinan jihad di Nusantara. Dimulai dari Hadji Samanhoedi di Surakarta dengan Sarekat Dagang Islam (SDI) pada tahun 1905, dilanjutkan dengan Hadji Mas Tirtoadisoerjo, kemudian dibentuk kesadaran yang lebih politis oleh Hadji Oemar Said atau yang lebih dikenal dengan nama HOS Tjokroaminoto dengan Sarekat Islam-nya (SI), berlanjut dengan dibentuknya Partij Sjarikat Islam Indonesia (PSII) dan kemudian Masjoemi (Madjlis Sjoera Muslimin Indonesia). Kontinuitas gerakan modern jihad ini mencapai puncak kesempurnaannya ketika Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo memproklamirkan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) tahun 1949. Sejarah panjang pergerakan Islam pasca SM Kartosoewirjo selanjutnya adalah sejarah perpecahan panjang dan rumit.

Pasca tahun 1962, perkembangan gerakan jihad mengalami

titik involusi yang rumit dan melelahkan dari semenjak Abdul Fatah Wirananggapati, secara asinkronik ke Tahmid Rahmad Kartoesoewirjo, kemudian Adjengan Masduki, berliku ke Haji Ismail Pranoto (Hispran), ke Ustadz Abdul Halim atau Abdullah Sungkar hingga kemudian jatuh ke tangan ABB. Pasca 1962, sejarah gerakan jihad ini tidak dapat disebut dengan sejarah kontinuitas, juga tidak dapat disebut diskontinuitas karena masih terus berlangsung dalam proses yang tidak menentu. Sejarah pasca 1962 ini adalah sejarah perubahan (*history of change*) atau sejarah perpecahan (*history of split*) gerakan jihad Indonesia yang tidak bisa direkatkan lagi dalam bentuk integrasi. Saya memprediksikan, titik-balik yang akan terjadi setelah ini adalah titik integrasi yang akan berdampak pada seluruh komunitas *polity* Indonesia. Atau akan munculnya apa yang disebut oleh Clifford Geertz (1972) sebagai revolusi integrasi.

Karl Jackson (1976) menggambarkan bahwa gerakan politik Islam sangat ditentukan oleh pemimpin kharismatik. Faktor figur kepemimpinan yang spiritual, kadang mistik dan bahkan magis menjadi alasan utama bersatunya ummat (*Islamic polity*) Indonesia di bawah asuhan para ustadz penggerak kesadaran politik yang bahkan menyeruak hingga ke alam modern. SM Kartosoewirjo dalam konteks ini adalah figur kharismatik yang mampu menjadi negarawan. Negara sebagai entitas politik modern diasuh dalam manajemen ilmiah di bawah Imam Kartosoewirjo hingga NII menjadi tonggak penting sejarah politik Islam di Indonesia yang mengubah gaya tradisional ke gaya modern. Adalah Abdullah Sungkar yang kemudian melanjutkan gaya modern ini ke dalam bentuk korporasi jihad yang

ultra-modern dengan mengadopsi plot dari al-Qaeda di bawah Osamah bin Laden. Plot rencana al-Qaeda 2020 adalah blueprint korporasi politik radikal Islam yang ikut mempengaruhi Jamaah Islamiyyah (JI) Indonesia hingga bersublimasi ke gerakan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI).

Kepemimpinan kharismatik ABB dibangun mulai dari kasus makar yang dituduhkan Orde Baru terhadap Abdullah Sungkar dan ABB di Jawa Tengah. Para gembong pelanjut Hispran melihat cahaya spiritual bersinar dari sikap konsisten dan konsekuennya dalam mempertahankan kebenaran di tengah otoriterisme Orde baru yang terkenal kejam dan bengis. Kemampuan ABB dalam referensi Islam dan manajemen pergerakan yang berhasil mengirimkan para pengikutnya ke Moro dan Afghanistan telah membuat ABB dianggap sebagai titisan atman ilahi. Kharisma tidak bisa bertahan terlalu lama dalam iklim politik yang terus berubah.

Perpecahan awal pada tahun 1992, ketika lahirnya Jamaah Islamiyyah setelah terbelahnya para jihadis Indonesia yang berjihad dan berhasil ikut serta bersama Thaliban dalam proses *futuh* (kemenangan) Afghan tahun 1989. Abdullah Sungkar dan ABB memisahkan diri dari Negara Islam Indonesia (NII) atau Darul Islam (DI) dan *restart* dari entitas awal, Jama'ah Islamiyyah (JI). Sebagamana yang diakui oleh Nasir Abbas, keberangkatannya ke Afghanistan adalah representasi dari NII dan, oleh karenanya, futuh Afghan adalah partisipasi politik kaum jihadis Darul Islam di pentas global. JI kemudian berjalan sendiri karena marasa NII telah dibajak secara *ashobiyyah* oleh puak tradisional di Jawa

Barat. Dalam perkembangan selanjutnya, JI menjadi mitra politik tunggal al-Qaeda di Indonesia, bahkan Asia Tenggara. Terpaan terorisme telah menjadikan JI sebagai organisasi tertutup dan terpaksa menyelam di kedalaman samudra harakah jihad yang tersembunyi. Tertangkapnya beberapa mujahidin dan juga para syahid menjadikan JI mati suri. Pengakuan ABB yang menolak kesaksian Faiz Bafana di persidangan Bom Bali menjadi titik didih perpecahan korporasi jihad JI yang sudah dibangun lama di negeri pengasingan, Malaysia. Korporasi jihad ini kemudian dikayuh oleh Dr Azhari dan Noordin M Top dengan biduk yang berbeda dan bertahan hingga kini dalam situasi yang nanar.

Perpecahan Kedua, semenjak berdirinya Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) tahun 2000. MMI adalah organisasi yang mencoba memberikan napas bagi JI yang sudah mati suri di awal millenium ini. ABB terangkat ke permukaan dan muncul secara sangat *notorious* di dalam sorotan mata dunia. Selama satu dekade berada di atas biduk baru yang penuh semilir angin dakwah yang penuh keterbukaan dan reformasi, ABB tetap konsisten hingga pada suatu waktu ia tidak menyukai sistem politik internal MMI yang dianggapnya mengadopsi sistem Yahudi. Perpecahan pun membasahi pipi para mujahidin yang terpuruk dalam sikap tawadhu' dan hanya berani bertahan dalam perlawanannya terhadap sosok kharismatik ABB.

Perpecahan ketiga, ketika berdirinya Jamaah Ansharut Tauhid tahun 2010. Perpecahan ini membuat komunitas jihad Indonesia hanya tertinggal beberapa gerbong saja. Dengan gerbong yang sedikit, laju JAT semakin dekat ke

tujuan sementara: persinggahan di penjara. JAT semakin terjerumus ke lembah radikalisme dan intoleransi yang semakin menjauhkannya dari publik Islam yang sudah mulai begah dengan gaya keras dan mulai mengambil posisi sebagai konstituen partai politik dan sesekali menghirup segarnya udara demokrasi. Situasi yang dialami JAT dari tahun 2010 hingga 2014 ini adalah situasi *jihad dealock* yang memperlihatkan disorientasi, dislokasi dan disposisi yang sangat parah bersamaan dengan mendekamnya ABB di penjara Nusa Kambangan. Penjara tidak selamanya merupakan tempat yang bisa memberikan pengaruh simpati pendukung, justru terkadang malah bisa menyebabkan munculnya friksi dan faksionalisme. Apalagi ditemani oleh Aman Abdurrahman yang banyak menyumbangkan ide-ide over-radikal paham Wahabi yang kemudian menyebabkan keruntuhan kharisma ABB hingga ke titik nadir.

Perpecahan keempat, ketika munculnya isu ISIS (*Islamic State of Iraq and Syam*) dan pernyataan sumpah setia ABB kepada figur Abubakar Al-Baghdadi yang mengakibatkan pecahnya JAT dan lahirnya JAS (Jamaah Ansharus Syariah) di bawah pimpinan Ustadz Achwan dan Abu Tholut (Imron Rosyidi). ABB sudah ditinggalkan oleh para pembela setianya, bahkan anaknya pun terpaksa terlontar keluar dan membentuk ikatan baru dari serpihan-serpihan yang terbuang. Perpecahan ini adalah perpecahan terakhir sebuah organisasi jihad di Nusantara yang tidak akan mungkin bisa terpecah lagi setelahnya. Ibarat gelas yang jatuh berkeping-keping, maka perpecahan ini adalah keping terkecil yang jikapun dilempar lagi tidak mampu untuk berpecah lagi (*least ability to split*). Saya memprediksikan, setelah perpecahan ini akan mengalami suatu titik balik dimana revolusi

integrasi adalah sesuatu yang sangat *historical inevitability*. Keniscayaan sejarah ini tentu membutuhkan analisis lebih komprehensif tentang ausnya perpecahan gerakan jihad di Nusantara hingga *futuh* Indonesia terjadi dan tibanya ajal Pancasila.

Kondisi keruntuhan kepemimpinan kharismatik jihad Indonesia ABB akan merupakan situasi *vacuum of leadership* yang akan membuka peluang bagi tokoh-tokoh muda yang sudah lama merajut impian integrasi umat Islam secara politik. Tokoh-tokoh muda radikal Islam di negeri ini tersisa hanya sedikit. Para tokoh dengan kemampuan agamis dan manajemen pergerakan modern yang mungkin akan muncul adalah Ustadz Irfan S. Awwas dan Imron Rosyadi (Abu Tholut). Keduanya merupakan sosok idealis, ideologis dan saleh secara sosial, tentu saja juga mengandung kelemahan manusiawi, namun *performance* dan *track record* keduanya relatif kuat dan meyakinkan.

Kedua sosok ini harus kita dekati, kita ajak dialog dan kita ”wongke” dalam kerangka humanisasi religius sebagai sesama anak bangsa yang terus mencari jati diri dalam upaya mewujudkan *baldatun* thayyibatun wa rabbun *ghafûr*, negara yang adil dan sejahtera dalam ampunan Allah SWT. Belum terlambat, kita masih ada waktu dan kesempatan. Tokoh muda lainnya dianggap tidak memiliki kapasitas keislaman yang memadai meski dengan visi politik yang berlebih. Tokoh mudah radikal Islam Indonesia yang lain umumnya lebih bergelimang dengan asupan demokrasi dan mengepul dalam asap kapitalisme dan liberalisme.[*]

REFERENSI:

Aziz, Abdul; Tholkhah, Imam & Soetarman, *Gerakan Islam Kontemporer di Indonesia* (Jakarta, Pustaka Firdaus, 1991).

Armstrong, Karen, "The True, Peaceful Face Of Islam,"majalah *Time*, October 1, 2001, Vol. 158, No. 15.

Armstrong, Karen,, *A History of God, The 4000-Year Quest of Judaism, Christianity and Islam* (New York: Random House, 1996)

Armstrong, Karen,, *Islam: A Short History* (New York: Modern library, 2000).

Armstrong, Karen,, *The Battle for God,* (New York: Ballantine Books, 2001).

Chomsky, Noam, "On the US attacks," di website www.zmag.org.

Dengel, Hold Harald, *Kartosuwiryo dan Darul Islam*, (trj.), (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999).

Dokumen Polri, "Tabel Motif & Tujuan Peledakan Bom Bali 12 Oktober 2002," 2003.

Francis Laffan, Michael, *Islamic Nationhood and Colonial Indonesia*: *The Umma Below the Wind* (New York: Routledge Curzon, 2003).

Harsono, Andreas, "Democracy will keep Indonesia 'friendly'," *The Nation*, January 22, 2002.

Hoffman, Bruce, *Inside Terrorism* (New York: Columbia University Press, 1998).

Liddle, R. William, "Islam and Politics in Late New Order Indonesia," unpublished paper presented at the Conference on Religion and Society in the Modern World: Islam in Southeast Asia, Jakarta, 29-31 May 1995, organised by the Indonesian Institute of Science

(LIPI), American-Indonesian Exchange Foundation (AMINEF) and IAIN Syarif Hidayatullah, *Conference on Religion and Society in the Modern World*, Jakarta.

Marty, E. & Appleby, R. Scott (eds), *Fundamentalisms Observed* (Chicago: University of Chicago Press, 1991).

Murdoch, Lindsay, "Bin Laden 'Funded Christian-haters," *Sydney Morning Herald*, 28 September 2001.

Mydans, Seth, "Militant Islam Unsettles Indonesia And Its Region," *New York Times*, 21 September 2001.

Nash, Manning, "Islamic Resurgence in Malaysia and Indonesia", dalam Martin E. Marty, and R. Scott Appleby, (eds), *Fundamentalism Observed* (Chicago/ London: University of Chicago Press, 1991), [Vol. 1].

P. Scmid, Alex & Jongman, A.J., *Political Terrorism: A New Guide To Actors, Authors, Concepts, Data Bases, Theories, And Literature* (London: Transaction Publisher, 1983).

Pianin, Eric & Woodward, Bob, "Terror Concerns of U.S. Extend to Asia: Arrests in Singapore and Malaysia Cited," *Washington Post*, January 18, 2002.

R. White, Jonathan, *Terrorism: An Introduction* (Wadsworth Publishing 1991).

Riyanti Yusuf, Nova, "Delusion of grandeur", *Gatra*, 18 Oktober 2003.

Senghaas, Dieter, *The Clash within Civilisations-Coming to terms with Cultural Conflicts*, (London & New York: Routledge, 2002).

T. Hadar, Leon, "The Green Peril: Creating the Islamic Fundamentalist Threat", *Policy Analysis,* No. 77, August 27, 1992.

Tim Redaksi Hot Copy, *Osama Bin Laden: Teroris atau Mujahid* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001).

van Bruinessen, Martin, “Gerakan Sempalan di Kalangan Umat Islam Indonesia: Latar Belakang Sosial-Budaya” [Splinter Movements within the Indonesian Muslim Community], *Jurnal Ulumul Qur'an* (Jakarta), 3, 1, 1992.

__________, “Fear of Fundies,” *The Economist*, February 15, 1992.

__________, “Transkrip Dialog Para Ulama dan Tokoh Masyarakat Se-Jateng dengan Tersangka Pelaku Terror Kelompok Jamaah Islamiyah (JI)”, Bahan Kepolisian Negara RI, 25 September 2003.

KONTRA WACANA TERORISME: KERANGKA KONSEPSIONAL PENGGUNAAN DISKURSUS KEAGAMAAN DALAM PROGRAM ANTI-TEROR[1]

Pendahuluan: Kondisi Obyektif

Mengapa terorisme, radikalisme dan primordialisme negative beserta diskursus-diskursusnya masih subur di negeri ini? Luasnya *fertile ground* bagi radikalisme dan terorisme itu bukan karena semata meluasnya radikalisasi ideologi berjubah agama (Islam), melainkan karena kondisi obyektif sosial-ekonomi kita memang sungguh parah dan makin jauh dari Konstitusi dan Pancasila. Rezim-rezim reformasi yang demokratis dan menjanjikan keadilan sosial, secara sengaja atau tidak malah membawa Indonesia

---

[1] Risalah ini disampaikan pada diskusi Lembaga Ta'lif wan Nasyr (LTN) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, tentang Pemetaan dan Penguatan Jejaring Media Islam Dalam Program Deradikalisasi Agama, Kerjasama LTN PBNU & Tifa Foundation, bekerja sama dengan Tifa Foundation, di Treva International Hotel, Jakarta, 26 Oktober 2016.

menjauh dari kontrak sosial dalam Konstitusinya. Bayangkan, dana para taipan dan orang kaya yang diparkir di luar negeri mencapai lebih dari Rp11.000 trilyun, sementara jutaan kaum muda dan pelajar di negeri ini tidak punya kepastian bayangan masa depannya, kecuali pesimisme, galau dan kelabu. Akibatnya, terorisme, radikalisme dan primordialisme negative beserta wacana-wacananya tetap memiliki *fertile ground* untuk tumbuh dan berkembang seirama arus zaman. Mari kita periksa lebih lanjut.

Di Indonesia, di tengah era kapitalisme global abad 21 yang sangat canggih, dengan para elite, *sophistrokrat,* taipan dan teknokrat yang hebat, terbukti tidak mampu mengatasi masalah ratusan ribu warganya (TKW dan TKI) justru menjadi buruh migran, bahkan budak belian di manca negara sebagai pembantu rumah tangga, buruh perkebunan dan buruh rendahan lainnya. Sungguh, mereka itulah *the blue collar, unskilled labours dan the victims of developmentalism,* para korban pembangunan. Situasi ini sangat memprihatinkan para santeri yang saleh, berpandangan tauhid radikal dan takzim kepada para ulama sepuh seperti Abu Bakar Basyir dan ulama senior semacamnya. Dengan kata lain, radikalisme mereka tidak muncul tiba-tiba dari kevakuman dan kekosongan sosial, melainkan dari kemuraman situasional yang tidak menguntungkan, bahkan dirasakan sangat merugikan dan menindas kaum Muslim, menurut persepsi mereka.

Mengacu kepada pernyataan Ali Imron (pelaku pengeboman Legian Bali 12 Oktober 2002) yang mengartikulasikan alasan-alasan mengapa dirinya melakukan *jihad* pengeboman, setidaknya alasan teroris lain pun memiliki benang

merah yang sangat mungkin serupa dengan pandangannya, meski tidak persis sama, yakni sebagai berikut [2]:

Pertama, Para teroris mengidap perasaan tidak puas terhadap pemerintahan yang ada. Tidak adanya imamah telah menyebabkan berbagai kerusakan dan kemaksiatan, baik itu munculnya aliran-aliran sesat, pergaulan bebas, hingga kaum Muslim harus tunduknya kepada kepemimpinan orang lain (Amerika dan Barat).

Kedua, tidak diberlakukannya syariat Islam secara menyeluruh. Melalui aksi pengeboman, ia berharap memicu terjadinya revolusi yang menghantarkan terbentuknya *imamah* dan pemberlakukan syariat Islam secara menyeluruh.

Ketiga, harapan terbukanya *jihad fi sabilillah*. Satu-satunya cara yang efektif untuk melawan kemungkaran adalah dengan membuka medan *jihad*, yaitu peperangan antara kebenaran dan kebatilan. Denganmelakukan pengeboman yang menewaskan orang-orang asing di Bali, ia berharap akan membuka medan peran antara kaum Muslimin dan orang-orang kafir.

Keempat, melaksanakan kewajiban *jihad*. *Jihad* adalah prang suci di jalan Allah. Menurutnya, dengan melibatkan diri dalam aksi pengeboman tersebut berarti telah melaksanakan *jihad* di jalan Allah.

Kelima, membalas kaum kafi. Tindakan bom bali dan pengeboman gereja-gereja di malam Natal merupakan aksi pembalasan terhadap kebiadaban Zionis Israel dan Amerika

---

[2]Lihat, Ali Imron, *Sang Pengebom* (Jakarta: Penerbit Republika, 2007); M. Zaki Mubarak, "Dari NII ke ISIS Transformasi Ideologi dan Gerakan dalam Islam Radikal di Indonesia Kontemporer," *Jurnal Epistemé,* Vol. 10 No. 1, Juni 2015.

terhadap umat Islam baik yang ada di Palestina, Afghanistan, Somalia, Kashmir, Chechnya dan sebagainya. Juga pembalasan bagi pihak Kristen terkait kasus Ambon dan Poso.

Memang ada agenda penghapuskan kemiskinan, dan itu menjadi patform Jokowi, seperti halnya Yudhoyono (SBY). Namun, kalau anda baca koran, maka diskursus, pembicaraan dan pembahasan ″global competitiveness, lalu soal capital market, SBI, ada SUN, ORI, Sertifikat Bank Indonesia, surat utang negara, kemudian ORI, lalu ada business confidence (kepercayaan bisnis) dll, nyaris tidak berkaitan dengan kehidupan nyata rakyat yang miskin dan tertinggal.

Hal-hal Itulah yang dibicarakan tentang ekonomi Indonesia setiap hari di media massa. Bukan soal-soal kemiskinan dan pengangguran yang nyata, bukan soal sektor riil yang melemah, bukan soal makin sulitnya lapangan pekerjaan, meluanya deprivasi sosial-ekonomi, demoralisasi dan melebarnya kesenjangan.

Maka, ketika membicarakan ekonomi, *global competitiveness*, lalu soal *capital market*, SBI, ada SUN, ORI, Sertifikat Bank Indonesia, surat utang negara, kemudian ORI, lalu ada *business confidence* (kepercayaan bisnis) dll itulah yang dibahas, bukan soal kesenjangan, pemiskinan, pengangguran, disparitas, keadilan sosial, masalah sektor riil dan industrialisasi.

Akademisi STF Driyarkara Romo Herry Priyono PhD mengingatkan, pembicaraan dan diskusi semacam itu tidaklah cukup untuk sebuah negara—yang menurut World Bank November 2006-2015 itu ada lebih dari 108 juta penduduk itu dibawah 2 dolar AS— dan itu jelas *a big, big*

problem. Karena tiket untuk sanitasi, tiket untuk pendidikan, tiket untuk akses hukum dan lainnya itu tidak dianggap sebagai masalah human rights, tapi daya beli. Maka untuk negara yang sebagian penduduknya punya daya beli *no problem*, tetapi untuk sebuah negara yang sepauh penduduknya itu sangat miskin, tentu saja menjadi masalah sangat besar. Dan itulah mengapa kita perlu hati-hati berbicara soal hak asasi. Hak asasi sipil dan politik itu sungguh lain dengan hak asasi ekonomi dan sosial. Apa yang berkembang di Indonesia itu adalah sipil dan politik, belum menyentuh masalah akses ekonomi dan hak ekonomi, sosial dan hak-hak dasar lainnya. [3]

Kondisi kemiskinan warga negara juga diperparah dengan beratnya beban utang swasta dan utang pemerintah, yang jelas banyak bocor dan korupsinya. Utang swasta dari sebelumnya 50,6 miliar dollar AS pada akhir 2005 menjadi 80 miliar dollar AS pada akhir 2007, dan menjadi 156,2 miliar dollar AS pada akhir Agustus 2014. Posisi ULN swasta pada Desember 2014 mencapai 163,47 dollar AS. Angka itu telah mencapai 53,8 persen dari total ULN Indonesia.[4]

Tahun 2015 ini, angka ULN swasta pada kuartal I-2015 mencapai 165,3 miliar dollar AS. Praktis, rasio pembayaran ULN swasta terhadap pendapatan ekspor atau yang dikenal dengan istilah *debt service ratio* (DSR) juga meningkat dari sekitar 15 persen pada 2005-2007 menjadi sekitar 54 persen pada 2015. Kondisi ini mengakibatkan kerentanan pada

---

[3] B. Herry-Priyono, "Neoliberalisme, Kolonisasi Homo Ekonomikus dan Homo Finansialis," *paper,* dipresentasikan dalam diskusi Neoliberalisme dan Kemiskinan di Pusat Analisis Sosial Akatiga, 04 Juni 2007

[4] Herdi Sahrasad, "Jokowi dan Utang Swasta," *Kompas,* opini, 24 Juli 2015

kondisi makroekonomi, karena tingginya DSR itu sudah memasuki fase "lampu merah". Selama delapan bulan pertama berkuasa, pemerintah telah meminjam dana dari World Bank senilai US$ 12 miliar atau setara Rp143 triliun dan dari Tiongkok Rp650 triliun, pemerintah juga meminta pinjaman IDB sebesar Rp66 triliun. Terakhir pemerintah menjual surat utang negara (SUN) dalam valuta asing berdenominasi euro seri RIEURO725 senilai 1,25 miliar euro dengan tenor 10 tahun.

Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir kuartal II 2016 tercatat sebesar 323,8 miliar dollar AS. Besaran ULN ini mengalami peningkatan sebesar 6,2 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Jokowi menambah utang dengan cepat, dan hal ini membuat rupiah semakin tertekan. Mazhab bahwa utang luar negeri sebagai jalan untuk memacu pertumbuhan ekonomi, jelas keliru dan menyesatkan. Apa hendak dikata, tim ekuin Kabinet Kerja relatif mandul dan tak kredibel. Akibatnya, menambah utang jadi pilihan dan itu bumerang bagi Trisakti Soekarno dan Nawa Cita. "Pak Jokowi, kita mau dibawa kemana?" kata Kwik Kian Gie, mantan Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur.

Selain itu, akibat kebijakan neoliberal oleh pemerintah yang mencabut subsidi demi membayar utang luar negeri (total utang negara dan swasta mencapai 134,362 milyar dollar AS) dan utang dalam negeri (beban BLBI Rp650 trilyun) , hak-hak dasar sosial, politik dan ekonomi rakyat mengalami reduksi dan terabaikan. Hal ini ditambah lagi dengan pelbagi perilaku dan keputusan para penyelenggara negara yang tampak lemah dalam berhadapan dengan tekanan dan

kepentingan asing (WTO, IMF, World Bank). Semua itu menyulitkan kehidupan rakyat kita yang umumnya saleh, santun dan nerimo. Dalam kaitan ini, di bawah ini penulis sampaikan beberapa persoalan yang membuat kehidupan social-ekonomi kita makin pengap dan mampat :

Pertama, Fakta memperlihatkan bahwa proses-proses ekonomi-politik yang terjadi umumnya tidak berada pada posisi yang berpihak kepada kelompok-kelompok lapis bawah. Sebaliknya, kelompok-kelompok dominan yang awalnya diperkirakan akan mengalami pukulan telak sebagai akibat gerakan reformasi terbukti tetap memegang kendali atas jalannya kekuasaan ekonomi dan politik. Perbedaannya dengan era Orde Baru hanyalah terletak pada bentuk kekuasaan yang relatif lebih cair, terbuka, dan terdesentralisasi.[5]

Kedua, Dominasi kelompok-kelompok lama dalam proses-proses ekonomi-politik pasca-Soeharto di satu sisi serta lemahnya kelompok-kelompok masyarakat lapis bawah di sisi lain, menurut pengamatan Vedi, merupakan sebuah warisan historis yang akar-akarnya dapat ditelusuri pada periode Orde Baru. Tidak diragukan lagi bahwa pengalaman disorganisasi dan deideologisasi sistematik terhadap berbagai kekuatan masyarakat sipil di bawah kediktatoran Orde Baru yang berlangsung selama lebih dari tiga dasawarsa itu memiliki konsekuensi politik yang cukup serius. Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan apabila berbagai kelompok masyarakat sipil, terutama kalangan masyarakat lapis bawah, tidak terlalu siap dengan agenda-

[5] Baca, Richard Robison & Vedi R. Hadiz, *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets* (London: Routledge 2004).

agenda transformatif ketika peluang mulai terbuka bersamaan dengan lengsernya Soeharto dari kekuasaan di tahun 1998.

Ketiga, Sementara itu, gelombang reformasi ternyata juga tidak cukup memiliki kemampuan untuk menyapu bersih kelompok-kelompok dominan ″eks″ Orde Baru. Bahkan, kelompok-kelompok ini mampu menyesuaikan diri terhadap logika reformasi. Melalui kerangka kelembagaan baru di era reformasi ini yakni partai politik, pemilu, parlemen, dan desentralisasi pemerintahan kelompok-kelompok dominan dengan cepat melakukan penataan diri kembali dan tetap memiliki akses yang sangat kuat atas proses-proses ekonomi-politik di Indonesia. Akibatnya, pasca Orde Baru, Indonesia yang semula memasuki gerbang demokrasi yang lebih partisipatif, ternyata kemudian bergerak ke arah yang ″lain″. Hingga hari ini, lembaga-lembaga demokrasi hasil reformasi tetap kebal dari kepentingan mayoritas masyarakat lapis bawah sekalipun telah tersedia ruang artikulasi yang relatif lebih terbuka.

Keempat, dan lebih dari itu, kehadiran lembaga-lembaga demokrasi ternyata tidak serta-merta diiringi oleh munculnya praktik politik yang lebih beradab, melainkan telah ditandai oleh merajalelanya praktik politik uang, eksploitasi simbol-simbol identitas melalui jalur etnis dan agama, serta kekerasan dan premanisme. Sementara itu, ″perubahan″ di bidang ekonomi pasca-Soeharto juga tidak disertai munculnya rule of law, transparansi, dan akuntabilitas publik sebagaimana layaknya sistem ekonomi pasar bebas. Malah melainkan justru menyuburkan praktik KKN gaya baru, dimana demokrasi konstitusional dibajak oleh

kekuatan modal.

Keenam, Yang menyedihkan, sampai hari ini korupsi menggerakkan denyut nadi kehidupan masyarakat, dan menjadi perilaku sosial keseharian. Meskipun publik tanpa kenal lelah menyuarakan kecaman dan kutukan atas praktik korupsi, namun perilaku korup di birokrasi, instansi dan lembaga-lembaga justru kian tak terkendali tanpa ada satu kekuatan pun yang mampu menghentikannya meski sangat dibenci publik. Kejahatan korupsi,termasuk pungutan liar (pungli), sungguh di luar nalar publik untuk dapat mencer-nanya, terutama ketika korupsi justru kian subur di dalam sistem politik demokrasi.

Sebagai bangsa, kita memilih sistem demokrasi dengan alasan untuk melepaskan belenggu penguasa korup dalam sistem pemerintahan otoriter Orde Baru. Masyarakat tahu dansadar bahwa, hal yang paling dibenci dari rezim Orde Baru adalah praktik korupsi yang menggerogoti sendi-sendi kekuasaan negara, selain watak represif yang mengekang kebebasan politik dan memasung hak-hak sipil rakyat. Celakangan korupsi itu sampai hari ini tetap merajalela.

Ketujuh, para politisi mengusung isu demokrasi sebagai dagangan politik untuk menjadi jembatan bagi para komprador ekonomi kapitalis global-nasional-lokal agar mereka dapat mengoperasikan kegiatan bisnis, dan perbu-ruan rente.[6] Inilah gejala paradoksal korupsi-kapitalisme demokrasi menemukan bentuk nyata ketika terjadi liberali-sasi politik, yang kemudian menyuburkan praktik *money politics.*

---

[6] Baca, Richard Robison & Vedi R. Hadiz, *Reorganising Power in Indonesia...*

Praktik money politics dalam konteks liberalisasi politik telah mengubah demokrasi sebagai sistem kendali kekuasaan menjadi demokrasi uang, yang menjadikan kekuasaan sebagai medium akumulasi kapital. Demokrasi uang ditandai oleh dominasi para pemilik modal dalam percaturan politik nasional terutama dalam peristiwa pemilu legislatif, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah. Maka setiap kali muncul isu agama, akan memantik isu SARA (suku, agama, ras,antargolongan) yang amat sensitive dan berbahaya. Kasus permintaan maaf Ahok terkait ayat suci al-Quran, menjadi pelajaran berharga bagi kita untuk mengendalikan emosi, menahan diri dan saling bermaafan-berangkulan-bekerjasama, bukan untuk perta-rungan politik yang menjurus ke benturan material dan fisik.

Negara Ketidakadilan

Harus jujur kita akui, Indonesia masih merupakan negara ketidakadilan, bukan negara keadilan, apalagi negara kesejahteraan. Faktanya, tingkat kesenjangan sosial Indonesia kian lebar seperti terlihat dari rasio gini yang sudah berkisar 0,41 saat ini. Angka nol menunjukkan kondisi tiada kesenjangan sosial. Sedang angka satu menunjukkan kesenjangan sempurna antara yang kaya dan yang miskin. Kesenjangan sosial di Indonesia saat ini sudah berada di level rawan. Kecemburuan sosial makin mencuat dan jika kesenjangan sosial tidak menurun, bahkan kian lebar, berbagai situasi yang tidak diinginkan bisa menjadi bom waktu "huru-hara sosial". Kerusuhan masal seperti Mei 1998 bisa terulang kembali.

Harus kita sadari kehidupan sosial-ekonomi kita masih pengap. Pelbagai media sudah melaporkan, tahun pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ditandai oleh kenaikan angka pengangguran. Hanya dalam waktu enam bulan, Maret hingga Agustus 2016, pengangguran terbuka bertambah 320.000 menjadi 7,56 juta (6,18 persen). Meski angka kemiskinan selama April menurut laporan BPS hingga September 2016 turun tipis sekiar 80.000, namun jumlah penduduk miskin sebesar 28,51 juta bukan angka kecil. Jumlah itu mencapai 11,13 persen dari total penduduk Indonesia dan lebih banyak dua juta dibanding penduduk Malaysia.

Data BPS menunjukkan, masyarakat bawah hanya mendapat distribusi pendapatan sekitar 13 persen. Sedang porsi pendapatan masyarakat menengah menurun hingga di bawah 35 persen dari total pendapatan nasional. Tetapi, masyarakat level atas yang jumlahnya hanya 20 persen dari penduduk Indonesia menguasai hampir 50 persen pendapatan negara. Sedangkan golongan kaya ini kurang percaya kepada pemerintah, kurang empati dan kurang teposeliro kepada kaum miskin di negeri kita, terbukti mereka lebih suka menaruh uang/hartanya di luar negeri mencapai lebih dari Rp11.000 trilyun.

Bahkan, kesenjangan ekonomi antargolongan dan antarindividu makin tajam, dimana sekitar satu persen rumah tangga Indonesia menguasai 20 persen kekayaan nasional. Survei-survei menunjukkan, sekitar 50.000 orang Indonesia superkaya atau *high networth individual* (HNWI) memiliki kekayaan sekitar Rp 1.500 triliun. Jika tidak ada intervensi terukur dari pemerintah, kesenjangan sosial ini akan

menjadi lahan subur bagi tumbuhnya paham separatisme, radikalisme, ekstremisme, bahkan terorisme.

Populasi Indonesia nomor 4 dunia, dengan penduduk usia produktif (20-55 tahun) tahun 2000 sebesar 99 juta (48%). Pada tanun 2020 ini diproyeksi menjadi 132 juta (52%). Mereka menjadi anugerah bila bekerja. Sebaliknya, akan menjadi bencana, andai banyak menganggur. Kelas menengah tahun 2010 sebanyak 45 juta dan diproyeksi tahun 2020 menjadi 85 juta. Demikian juga pada tahun 2030 berjumlah 135 juta. Ini hanya bisa dicapai bila ekonomi tumbuh rata-rata 5-6% tiap tahun. Angkanya bisa jadi 170 juta apabila tumbuh rata-rata 7%. Tapi dalam kenyataan, pertumbuhan ekonomi kita stagnan dan pemerataan di tubir jurang kegagalan.

Dengan paparan di atas, maka dasar pemikiran bagi risalah ″kontra wacana″ ini,termasuk penalaran dan pembahasan selanjutnya bisa kita koherensikan di bawah ini.

—Dasar Pemikiran—

Program *counter-discourse* (kontra wacana) adalah program yang berusaha menciptakan "*a way of thinking that opposes an institutionalized discourse*". Selama ini wacana kaum fundamentalis, kaum radikal hinga kelompok-kelompok teroris sudah terlembaga sedemikian rupa di Indonesia melalui proses yang panjang dalam sejarah sosial politik negeri ini. Teka-teki yang muncul atas motif apakah yang mendasari makin maraknya kaum profesional yang berkecukupan tergiur untuk menjadi tentara Negara Islam Irak dan Suriah (NIIS) atau yang lebih dikenal dengan ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*). Hingga saat ini sudah sekitar 518 warga

negara Indonesia diduga begabung dengan ISIS. Menurut catatan Sidney Jones dari *Institute for Policy Analysis of Conflict* (IPAC), sudah lebih dari 800 warga negara Indonesia yang sudah berangkat dan bergabung dengan gerakan "teroris" tersebut di Suriah.

Baru-baru ini, *The Intercept* (8 Juli 2015) mengungkapkan dua pilot Indonesia (Ridwan Agustin alias Ridwan Ahmad al-Indunesiy dan kapten Tommy Hendratno alias Tommy Abu Al Fatih Hendratno) yang pernah menjadi aparat keamanan negara dan kemudian menjadi pilot sebuah maskapai multinasional, kini bergabung dengan ISIS. Banyak yang kemudian khawatir atas pilihan hidup yang dijalani dua profesional di usianya yang masih sangat produktif ini. Tidak sedikit pula yang mempertanyakan tentang motif keduanya ikut bergabung menjadi tentara ISIS, membela sesuatu yang mungkin dianggap sangat ideal di suatu tempat nun jauh di sana di luar tanah Indonesia. Bahkan kalangan politisi di dunia Barat cemas dengan rekam jejak mereka yang sebelumnya pernah bergabung dengan kesatuan keamanan negara yang sangat disegani di kawasan Asia Tenggara.

Sebelumnya, seorang anggota polisi aktif di Jambi, Syahputra (alias Abu Azzayn al Indunesiy) meninggalkan anak istrinya dan berangkat melalui Medan ke Suriah untuk berjihad melawan apa yang mereka persepsikan sebagai "thoghut" (musuh) yaitu rezim Bashar Al Assad. Statusnya sebagai anggota kepolisian negara ini dengan gaji yang berkecukupan tentu mengundang tanda-tanya besar: ada apa di balik semua ini? Tindakannya meninggalkan anak istri untuk berjihad ke sana, menceburkan diri ke dalam

kancah perang, tentulah bukan sebuah keputusan rasional biasa. Ada sesuatu yang tak teridentifikasi dari realitas sosial yang problematik ini.

Semua kekhawatiran dan kecemasan berbagai kalangan ini sangat rasional. Kaum profesional dengan basis status sosial ekonomi kelas menengah dan dengan latar-belakang keluarga yang relatif sakinah ini tentunya mengharapkan jawaban nyata atas tanya yang membingungkan. Tindakan Syahputra menceraikan istrinya dan pergi ke tanah asing berperang tentunya tidak bisa dijelaskan dari perspektif psiko-sosial generik. Pasti ada alasan-alasan teologis atau bahkan eskatologis dari tindakan yang tidak biasa ini.

Dari perspektif modern, banyak analisis tentang daya tarik finansial yang ditawarkan ISIS kepada sesiapa yang berkenan bergabung dengan bala tentara multi nasionalnya. Peluang ini disambut baik oleh banyak kalangan yang, menurut perhitungan berbagai ahli, berasal dari kaum marjinal yang berusaha mencari penghidupan ekonomi yang lebih layak. Bahkan ada juga yang menyebutkan tentang motif seksual yang melatari keinginan sebagian kecil warga Indonesia untuk berpartisipasi di dalam perang atau konflik di Suriah dan Irak tersebut. Ketika maraknya pencekalan terhadap orang-orang yang diduga hendak berangkat ke Suriah di berbagai bandara di Indonesia dan Malaysia sejak tahun 2013 hingga 2014, analisis *economic interest* sebagai motif sangat mendominasi penjelasan tentang latar-belakang kaum marjinal ini. Hampir tidak ada satu analisis pun yang mengaitkannya dengan kesadaran ideologis para aktor pendukung ISIS tersebut. Bahkan Daniel Bell (1960) dan Francis Fukuyama (1996) sangat yakin

bahwa ideologi telah mati dan tak bisa memengaruhi kebangkitan dunia Timur. Akan tetapi, analisis kepentingan ekonomi, atau motif material apa pun, menjadi tidak mampu menjelaskan mengapa kaum profesional ikut terlibat dalam konflik yang sangat mengerikan bagi banyak kalangan.

Dibutuhkan satu penjelasan yang lain yang secara akademis bisa dipertanggungjawabkan untuk memberikan jawaban atas fenomena yang sangat mengejutkan dunia ini. Secara antropologis, D'Andrade dan Strauss (1992) pernah mengajukan motif kultural yang bersifat ideologis atas fenomena maraknya perlawanan bersenjata dan konflik komunal di berbagai belahan dunia. Gupta dan Ferguson (1992) mencoba menjabarkan motif *cultural model* tersebut sebagai "*a sense of loss territorial root*" dimana nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme sudah mulai pudar atau sedang terjadinya "*an erosion of the cultural distinctiveness of place*" yang kemudian menghasilkan sebuah produk sampingan dari globalisasi yang disebut sebagai "*deterritorialization of identity*" dimana identitas tidak lagi dilekatkan pada tempat dimana seseorang dilahirkan atau dibesarkan dalam suatu periode *formative age* yang sangat menentukan. Identitas yang berdasarkan lokalitas tergantikan oleh apa yang sejak lama dikenal sebagai ideologi. Ideologi Islam telah menjadi pilihan bagi dua pilot dan satu polisi dari Indonesia yang tentunya telah terasuh di bawah ideologi Pancasila dan digaji oleh hasil pajak warga negara yang hidup di alam demokrasi.

Ridwan Agustin dan Tommy Hendratno serta Syahputra yang telah mengalami indoktrinasi ideologi sekuler ini

kemudian menggantikannya dengan ideologi yang baru dipeluknya. Ke manakah nasionalisme dan patriotisme yang sempat diajarkan oleh negara ini? Nasionalisme dan patriotisme adalah ideologi yang berbasis tempat dan akan mudah hilang ketika kenangan tentang tempat itu semakin memudar di tengah kosmopolitnya dunia yang sekuler dan materialistis ini. Edward Said (1979: 18) menjelaskan situasi ideologi yang menembus batas-batas nasionalitas dan lokalitas lainnya sebagai "*a generalized condition of home-lessness*". Inilah yang mungkin bisa kita sebut sebagai ideologi transnasional keagamaan yang selama ini menyebar semenjak berakhirnya perang dingin antara Blok Kapitalis dan Blok Komunis/Sosialis. Kedua blok ideologis ini, oleh kalangan gerakan Islam transnasional dianggap telah menyebarkan polusi mental dan mengancam kesucian agama. Konsep "*pollution and purity*" (Louis Dumont, 1970 [1966]) inilah yang kemudian dikembangkan secara akademis untuk menjelaskan mengapa pilihan ideologis menjadi rasional di atas pilihan-pilihan material dan ekonomis lainnya.

Analisis ideologis menjadi penting ketika penjelasan-penjelasan motif ekonomi, sosio-psikologis dan politik menjadi lumpuh di hadapan realitas sosial yang problematik ini (Talal Asad, 1979; Louis Althusser, 1977; George Marcus, 1986; Maurice Bloch, 1983 dan 1986). Renato Rosaldo (1988) memperlihatkan bagaimana ideologi tidak lagi mengenal batas-batas tempat dan merasuki ke berbagai kalangan yang disebutnya sebagai "*people without culture*" ini. Ideologi jihadisme yang selama ini dianggap bertanggung jawab atau setidaknya berada di belakang semua perlawanan berdarah dengan segala kesemrawutan sosiologisnya, setidaknya bisa

memberikan penjelasan tentang fenomena kembalinya ideologi dalam analisis ilmu-ilmu sosial dan humaniora.

Kecenderungan semakin materialnya analisis sosial atas berbagai gejala munculnya gerakan-gerakan perlawanan dan konflik keagamaan haruslah diimbangi dengan analisis kultural yang memadai. Kembalinya ideologi bagi banyak kalangan dari berbagai latar belakang sosial ekonomi menunjukkan bahwa faktor non-material jauh lebih kuat dalam memengaruhi motif seseorang atau sekelompok orang dalam melakukan tindakan-tindakan perlawanan. Geertz (1973: 220) menyebutkan bahwa ideologi adalah bagian dari sistem budaya yang memetakan realitas-realitas sosial yang problematik dan menjadi matriks bagi terciptanya kesadaran sosial. Ideologi inilah yang mendasari Ridwan Agustin, Tommy Hendratno, Syahputra dan juga Heri Kustiyanto meninggalkan segala kecukupan duniawi dan membuang semua *spirit in the material world* yang pernah mereka anut sebelumnya. Mereka menuju ke sebuah harapan baru yang masih belum jelas secara material, namun sangat jelas secara ideologis: janji surga bagi yang syahid dan syafaat bagi keluarga batih dan kerabatnya.

Matriks kesadaran sosial ini dibangun oleh kalangan yang merasakan adanya luka moral (*moral torment*) yang disebabkan oleh serangan ideologi lain (Joel Robbins, 2004). Kesadaran sosial keterjajahan inilah yang kemudian menggerakkan mereka untuk menuntut balas atas luka moral yang masih menganga tersebut. Kesadaran sosial ini bukan dibangun atas dasar nasionalisme atau etnisitas, melainkan berdiri secara transnasional sebagai sebuah kesadaran baru yang disebut oleh Michael Francis Laffan

(2003) sebagai *Islamic nationhood*. Di sinilah konsep *ummah* dibangun sebagai sebuah kesadaran sosial yang memengaruhi berbagai orang untuk berpartisipasi di dalam pembentukan sebuah negara Islam di Suriah dan Irak (ISIS).

Konsep Laffan (2003) tentang spirit bela negara dalam komunitas Islam ini begitu membahana dan setidaknya menjadi ketertarikan politik bagi gerakan-gerakan lainnya. Ideologi *Islamic nationhood* ini mempengaruhi banyak gerakan-gerakan radikal dan teroris di berbagai belahan dunia. Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di Poso segera menyatakan sumpah setia (*bai'at*) kepada khalifah Al Baghdadi yang memimpin ISIS (2013), juga Boko Haram di Negeria tersirap dengan peragaan kekerasaan yang diperlihatkan ISIS (2014). Beberapa faksi mujahidin di Suriah, Afghanistan, Palestina, Lebanon, dan wilayah-wilayah lainnya menyatakan solidaritasnya untuk mendukung dan bergabung dengan gerakan yang dianggap sebagai representasi alam bawah sadar mereka untuk menggentarkan musuh-musuh agama yang telah menorehkan *moral torment* terhadap umat Islam selama berabad-abad.

Bahkan belum lama ini Fakhruddin bin Kasem alias Din Robot, mantan panglima *sagoe* Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Julok, Aceh Timur (Serambi Indonesia, 7/9/2015) menyatakan hasratnya untuk bergabung dengan ISIS. Meskipun hasrat politik yang tersendat ini dianggap banyak pihak sebagai langkah sensasional saja, setidaknya realitas sosial problematik ini dipengaruhi oleh merebaknya ideologi kebangsaan Islam yang diembuskan oleh ISIS. Bayangan akan sebuah *tamkin* (kekuasaan riil de facto)

negara Islam yang *de facto* menjadi daya tarik utama bagi banyak gerakan pemberontakan. Al-Qaeda pun kewalahan menghadapi berbagai serangan ISIS di basis-basis yang sudah mereka rebut sebelumnya di Suriah, Irak dan Afghanistan. Al-Qaeda kalah cepat dalam mewujudkan idealitas arkaik yang sangat diharapkan banyak kalangan radikal dan fundamentalis Islam, yaitu keinginan untuk memiliki sebuah *tamkin* (negara) yang definitif. Posisi *tanzhim* (gerakan, kekuasaan de jure) al-Qaeda perlahan-lahan mulai tergeser oleh ISIS yang rajin mempertontonkan kebiadaban dan kekerasan sebagai kabar gembira dan peringatan untuk memuaskan dendam keterjajahan lama di bawah sistem kapitalisme dan neo-liberalisme Barat.

Motif kultural atau motif ideologis inilah yang mungkin sedang disemai oleh kaum profesional yang selama ini merasakan hidupnya yang berkecukupan tersebut belumlah cukup secara teologis dan eskatologis. Ada kekeringan spiritual yang akut di sana. Ada tujuan-tujuan akhirat yang mendasari tindakan mereka dalam bergabung dengan ISIS nun jauh di Suriah sana. Negeri yang jauh itu tidak dipandang akan memberikan kesejahteraan material bagi pemuasan nafsu badaniah, melainkan perang itu adalah peluang bagi mereka untuk menggapai hasrat teologis dan eskatologis mereka untuk menuju ke surga dan bercengkerama dengan para bidadari yang senantiasa perawan. Ini adalah sebuah keyakinan, sebuah ideologi yang tidak bisa ditukar dengan imbalan material sebesar apa pun. Ideologi millenarian inilah yang selama ini dicari, dan ketika ditemukan, maka kelezatan duniawi apa pun akan ditinggalkan dengan serta-merta.

—Tipologi Wahabisme—

Fenomena merebaknya benturan mazhab antara Wahabi dan kalangan tradisional Islam telah membuat banyak orang bertanya-tanya tentang apa itu Wahabi, bagaimana sejarahnya dan apa bahaya dari mewabahnya aliran atau sekte yang dianggap radikal ini? GNMT berusaha menjawab pertanyaan tersebut secara sekilas untuk mendudukkan perkara yang sebenarnya agar tidak terjadi kesalahpahaman yang bisa berakibat fatal. Agama adalah unsur kebudayaan yang paling sulit diubah (Achmad Fedyani Saifuddin, 2012) dan pengaruhnya paling sulit dikendalikan (Houston Smith, 1976). Benturan peradaban atau *clash of civilization* (Samuel Huntington, 1978) terjadi karena agama. Benturan di dalam peradaban atau *clash within civilization* juga terjadi karena agama (Hans Dieter Senghaas, 2002). Paham keagamaan yang dituduh paling banyak menyumbangkan konflik, perang, terorisme dan kekerasan komunal adalah, salah satunya, paham Wahabisme. Maka kita perlu memahami Wahabi secara sosiologis, teologis, sejarah, politik dan antropologis. Tulisan ini tidak akan bisa menjelaskan semua itu hanya dalam uraian ringkas beberapa frasa kalimat saja. Tulisan ini lebih merupakan *executive summary* untuk kalangan awam atau semacam *policy brief* untuk yang super sibuk, yang bahan-bahannya dikumpulkan dari kalangan "Wahabi" sendiri yang menjadi subyek penelitian saya selama ini.

Pada dasarnya, Islam itu hanya satu, namun karena perkembangan sejarah, politik, ekonomi dan budaya, maka Islam ikut berkembang berdasarkan wilayah persebarannya. Geopolitik Islam kontemporer sekarang ini menjadi tidak lagi satu, monolitik dan integral seperti pada masa nabi

Muhammad SAW. Kini terdapat banyak kelompok, pecahan, aliran, sekte dan mazhab yang cukup beragam. Perpecahan pertama adalah pembelahan ideologis yang sangat besar antara (1) Sunni, dan (2) Syiah. Sunni dan Syiah ini juga terpecah dalam berbagai kelompok-kelompok atau sekte dan mazhab yang semuanya mengklaim dirinya yang paling benar. Tidak akan ada kemunculan kelompok baru tanpa klaim kebenaran. Klaim kebenaran inilah yang menyebabkan terjadinya perpecahan di dalam Islam.

Sunni adalah mazhab besar kaum pengikut *ahlus sunnah wal jamaah* yang sangat menghormati Nabi, berserta seluruh sahabat dan juga keluarganya. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), Persis, Al Washliyah, Al Irsyad, Perti, Masyumi, DI atau NII, JI, MMI, JAT, JAS adalah termasuk ke dalam kelompok Sunni. Syiah adalah mazhab yang selektif dalam mengakui sahabat Nabi dan juga keluarganya, mereka hanya mengagumi Ali ibn Abi Thalib r.a dan anaknya yang kedua, Husen, dari 11 anak Ali r.a. Karena minoritas, kelompok Syiah di Indonesia hanya sedikit saja dan organisasinya pun (beserta pecahannya) tak begitu tampil ke permukaan. Antara Sunni dan Syiah pun sering terjadi bentrokan yang melibatkan kekerasan berdarah.

Di kalangan Sunni perpecahan juga banyak terjadi dan membentuk banyak kelompok keagamaan, mazhab, sekte dan aliran yang sangat beragam. Wahabi adalah salah sebuah mazhab dalam kalangan Sunni. Baru baru ini di Madura ada sebuah lagu yang berjudul “Wahabi” yang sangat lugas menggambarkan apa itu aliran yang dianggap radikal oleh banyak kalangan. Lagu itu menggambarkan

Wahabi tidak suka maulid nabi, tidak mau tahlilan, tidak setuju ziarah kubur, tidak mengakui qunut, dan menganggap semua orang Islam di luar kelompoknya sebagai sesat, bid'ah atau bahkan kafir. Stigma buruk sering disematkan kepada Wahabi dan label ekstrim sering ditujukan kepada kelompok ini. Dalam banyak hal lagu ini ada benarnya, namun tidak semua Wahabi berperilaku demikian.

Menurut Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu (1986), Wahabi adalah paham keagamaan yang dianut kalangan yang tidak suka kepada adat-istiadat dan kebiasaan yang menyimpang yang mengharap kekuatan leluhur, melanggar tradisi adat, tidak mau ikut maulidan Nabi, tidak percaya kepada sunan, wali dan keramat-keramatnya, anti tahyul, khurafat dan bid'ah. Kata Wahabi adalah nisbat kepada Muhammad bin Abdul Wahab, padahal Abdul Wahab adalah nama ayahnya yang tidak pernah menulis satu kitab fiqh pun. Nisbat kepada nama Abdul Wahab ini dibuat oleh kalangan ilmuwan Barat yang biasanya mengambil nama belakang untuk katalogisasi kepustakaan.

Wahabi digagas oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab (1703-1792), seorang reformis (*mujaddid*) Islam dari Najd, Arab Saudi yang muncul di tengah galaunya ummat Islam yang lama terasuh di bawah empat mazhab statis (Syafii, Maliki, Hambali dan Hanafi). Ia adalah seorang mufti dari Daulah Suudiyah, cikal bakal Kerajaan Arab Saudi yang kita kenal sekarang. Muhammad bin Abdul Wahab menyeru kaumnya kepada tauhid, hanya berdoa memohon kepada Allah tanpa perantara, tidak mengagungkan para wali dan orang alim atau ulama atau orang-orang sholeh sebagai

orang yang lebih istimewa dan menolak menyembah kuburan. Wahabi menganut prinsip egaliter dalam beribadah. Muhammad bin Abdul Wahab ini dianggap sebagai pembuat mazhab kelima setelah mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi dan Maliki. Muhammad bin Abdul Wahab ini banyak menulis kitab yang isinya sejalan dengan pemikiran-pemikiran Ibnu Taymiyyah, Ibnu al-Qayyim,dan Ahmad bin Hanbal. Karena dipengaruhi oleh pemikiran dari Ahmad bin Hanbal, Wahabiisme ini agak mirip dengan mazhab Hambali. Pemikiran Wahabi ini kemudian dikem-bangkan oleh Bin Baz, Utsaymin, Syek Ahmad Khan, Jamaluddin Al Afghani, Rashid Ridha, Muhammad Abduh, HOS Tjokroaminoto, SM Kartosoewirjo. Kemudian pada periode pasca kolonialisme, ideologi Wahabi dikembangkan lebih sistematis lagi oleh Sayyid Qutb, Muhammad Qutb, Hasan Al Banna, Abul A'la Al Maududi, Yusuf Qardhawi, dan Nashiruddin Al Albani. Kemudian pada masa revolusi di Afghanistan ideologi ini dikemas rapi dalam buku-buku karya Abdullah Azzam, Osama Bin Laden, Ayman Al Zawahiry, hingga ke periode konflik Iraq dan Suriah oleh Abu Mushab As Shuri.

Wahabi tidak monolitik, artinya kelompok ini juga terpecah ke dalam beberapa varian yang satu sama lainnya tidak bersahabat, terkadang saling bermusuhan atau bahkan juga bisa menjurus ke konflik berdarah. Wahabi sebenarnya adalah istilah yang generik untuk menyebut atau merujuk kepada kelompok Salafi. Namun karena kaum tradisional Islam pun mengklaim dirinya sebagai Salafi (yang melaksanakan tradisi Salafussholeh), maka label Wahabi dipilih agar mudah membedakannya secara teologis dengan kelompok-kelompok yang bukan Wahabi. Terminologi Wahabi

pun dipakai sebagai euphemisme karena ada kelompok tertentu yang sangat sensitif dengan nama Salafi. Secara antropologis, terdapat setidaknya tiga tipologi Wahabisme di Indonesia yang bisa saya amati. Pertama, Wahabi Shururi atau Wahabi yang dianggap anti maulid, anti azan dua kali, anti tahlil, anti ziarah kubur dan anti jihad dan sering menganggap masyarakat yang melawan pemerintah sebagai *bughot* (pemberontak). Kedua, Wahabi Jihadi, yatu kelompok yang lebih fokus pada jihad dan berusaha melawan setiap kebijakan pemerintah, juga memiliki sikap penolakan yang sama dengan kelompok pertama. Wahabi Jihadi di Indonesia pernah muncul dengan nama Darul Islam (DI) di Jawa Barat tahun 1949 [dengan tokohnya Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo], Jawa Tengah tahun 1950 [Amir Fatah Widjaja Kusuma], Sulawesi Selatan tahun 1951 [Kahar Muzakkar], Kalimantan Selatan tahun 1952 [Ibnu Hajar] dan Aceh tahun 1953 [Daud Beureu'eh], kemudian Jamaah Islamiyyah (JI) tahun 1992 hingga tahun 2010 yang dituduhkan kepada Ustadz Abdullah Sungkar dan Abubakar Ba'asyir, Dr Azhari, Noordin Mat Top, Amrozi, Imam Samudra, Ali Ghufron dan Ali Imron. Terakhir, kelompok Wahabi Jihadi ini muncul dalam bentuk Tanzhim al-Qaeda Serambi Mekkah (TQSM) dan banyak aktivisnya yang tertangkap setelah terbongkarnya kegiatan *i'dad* (persiapan/ latihan perang) di Bukit Jalin, Aceh Besar pada 2010. Kelompok Wahabi Jihadi ini kini lebih kalem dan memilih jalur dakwah bil hikmah dalam kegiatan kesehariannya. Ketiga, Wahabi Takfiri yang suka menuduh orang lain di luar kelompoknya sebagai pelaku *bid'ah* atau malah kafir. Kelompok ini ada di Aceh saat ini dan masih setia dengan *bai'at*-nya untuk mendukung Negara Islam Irak dan Syam

(NIIS) atau lebih dikenal dengan ISIS.

Di internal kalangan Wahabi ini sendiri juga terjadi saling tuding dan saling tuduh sesat menyesatkan. Kalangan Wahabi Shururi sering menuduh Wahabi Jihadi sebagai *bughot*. Wahabi Jihadi lebih banyak pasif dan tak bereaksi secara sosial dan politik. Wahabi Jihadi lebih mengutamakan ibadah-ibadah *mahdhoh* (ritual) dan menghindari friksi dengan pihak manapun, aktif dalam berbagai acara penyadaran tauhid ummat. Sementara kalangan Wahabi Takfiri sangat hiperaktif dalam dakwahnya dan menuduh banyak kalangan Jihadi sebagai *bid'ah*, sesat atau kafir terhadap banyak kelompok karena tidak mau menerima khilafah Al-Baghdadi di Suriah dan Iraq. Melalui media sosial kelompok Wahabi Takfiri ini mengumbar seruan-seruannya yang berisik dan penuh ancaman dan tudingan sembari memperlihatkan sikap intolerannya secara asertif.

Di tengah kiprah Wahabi dalam konflik komunal di Peristiwa Cumbok di Aceh (1946), Ambon (1999) Poso (2001) dan lain-lain tempat, juga ada kiprah Wahabi dalam kekerasan politik di Sulawesi Selatan serta kiprah Wahabi dalam terorisme yang diperankan oleh Jamaah islamiyyah, Darul Islam, dan lain-lain sebagainya sejak tahun 2000 hingga tahun 2014. Inilah yang kemudian membuat Wahabi menjadi *paragon of ugly* yang sulit untuk dibantah. Seharusnya Wahabi lebih tampil sebagai *paragon of beauty* dan mengharumkan agama Islam di mata dunia. Kejadian-kejadian kekerasan di Iraq dan Suriah dimana ISIS memper-lihatkan kekejamannya yang mengerikan telah membuat Wahabi sebagai pihak yang dianggap bertanggungjawab secara teologis atas kekerasan dan kebiadaban ini.

Padahal, banyak sekali jasa Wahabi dalam membela kaum tertindas di muka bumi ini. Bantuan kepada pengungsi Rohingya justru datang dari Arab Saudi yang dianggap sebagai negara Wahabi. Kita haruslah menilai Wahabi ini secara lebih adil sebelum menjatuhkan stigma atau label radikal, ekstrimis dan teroris kepada semuanya yang berasal dari *mainstream* Wahabi. Padahal ada Wahabi yang anti jihad, yang anti pemberontakan, dan juga Wahabi yang bisa menerima ziarah kubur, tahlil, maulidan dan juga masih bersedia datang ke kenduri-kenduri untuk menyantap hidangan.

Di tengah banyaknya tudingan terhadap kalangan Wahabi yang dianggap telah mempermalukan agama Islam, namun harus diakui bahwa ada banyak jasa Wahabi dalam membela kaum tertindas, khususnya yang beragam Islam. Hampir dapat dipastikan kebanyakan yang dibela oleh Wahabi adalah ummat Islam tanpa membedakan sekte dan mazhab. Bantuan kemanusiaan yang diberikan kaum Wahabi menyebar ke seluruh dunia dalam bentuk filantropi zakat, sedekah, qurban dan pembangunan masjid serta lembaga pendidikan.

—Peluang bagi Program Kontra Wacana Terorisme—

Gerakan politik Islam radikal di Indonesia sedang meng-alami kerumitan, semacam situasi disorientasi, dislokasi dan diposisi yang kemungkinan akan mengalami titik-balik (*turning point*) lahirnya pemimpin baru yang berbeda atau lebih baik pasca Ustadz Abdusshomad atau yang lebih dikenal dengan nama Ustadz Abubakar Ba'asyir (ABB). ABB adalah pemimpin kharismatik terakhir dari kalangan jihadis

Indonesia yang mengalami gonjang-ganjing perpecahan dalam kurun sejarah pergolakan yang panjang. Perpecahan terakhir yang terjadi setelah pernyataan *bai'at*-nya ke Daulah Khilafah Islamiyyah Irak dan Syam pimpinan Abubakar Al-Baghdadi adalah panggung terakhir (*the last frontier*) bagi figur yang sangat dikagumi kalangan pergerakan radikal Indonesia dan sangat disegani oleh para jihadis di berbagai belahan dunia. Pernyataan *bai'at* ABB ini menyebabkan munculnya perpecahan (*firqah*) penghujung dari serang-kaian perpecahan yang terjadi dalam sejarah panjang pergerakan jihad di Indonesia.

Sejarah pergerakan jihad di Indonesia hampir sama dengan sejarah munculnya kesadaran nasionalisme Indonesia di akhir abad ke-19. Sejarah pada masa awalnya ini adalah sejarah modern kontinuitas (*continuity*) atau estafeta kepe-mimpinan jihad di Nusantara. Dimulai dari Hadji Saman-hoedi di Surakarta dengan Sarekat Dagang Islam (SDI) pada tahun 1905, dilanjutkan dengan Hadji Mas Tirtoadisoerjo, kemudian dibentuk kesadaran yang lebih politis oleh Hadji Oemar Said atau yang lebih dikenal dengan nama HOS Tjokroaminoto dengan Sarekat Islam-nya (SI), berlanjut dengan dibentuknya Partij Sjarikat Islam Indonesia (PSII) dan kemudian Masjoemi (Madjlis Sjoera Muslimin Indo-nesia). Kontinuitas gerakan modern jihad ini mencapai puncak kesempurnaannya ketika Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo memproklamirkan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) tahun 1949. Sejarah panjang pergerakan Islam pasca SM Kartosoewirjo selanjutnya adalah sejarah perpecahan panjang dan rumit.

Pasca tahun 1962, perkembangan gerakan jihad mengalami titik involusi yang rumit dan melelahkan dari semenjak Abdul Fatah Wirananggapati, secara asinkronik ke Tahmid Rahmad Kartoesoewirjo, kemudian Adjengan Masduki, berliku ke Haji Ismail Pranoto (Hispran), ke Ustadz Abdul Halim atau Abdullah Sungkar hingga kemudian jatuh ke tangan ABB. Pasca 1962, sejarah gerakan jihad ini tidak dapat disebut dengan sejarah kontinuitas, juga tidak dapat disebut diskontinuitas karena masih terus berlangsung dalam proses yang tidak menentu. Sejarah pasca 1962 ini adalah sejarah perubahan (*history of change*) atau sejarah perpecahan (*history of split*) gerakan jihad Indonesia yang tidak bisa direkatkan lagi dalam bentuk integrasi. Saya memprediksikan, titik-balik yang akan terjadi setelah ini adalah titik integrasi yang akan berdampak pada seluruh komunitas *polity* Indonesia. Atau akan munculnya apa yang disebut oleh Clifford Geertz (1972) sebagai revolusi integrasi.

Karl Jackson (1976) menggambarkan bahwa gerakan politik Islam sangat ditentukan oleh pemimpin kharismatik. Faktor figur kepemimpinan yang spiritual, kadang mistik dan bahkan magis menjadi alasan utama bersatunya ummat (*Islamic polity*) Indonesia di bawah asuhan para ustadz penggerak kesadaran politik yang bahkan menyeruak hingga ke alam modern. SM Kartosoewirjo dalam konteks ini adalah figur kharismatik yang mampu menjadi negarawan. Negara sebagai entitas politik modern diasuh dalam manajemen ilmiah di bawah Imam Kartosoewirjo hingga NII menjadi tonggak penting sejarah politik Islam di Indonesia yang mengubah gaya tradisional ke gaya modern. Adalah Abdullah Sungkar yang kemudian melanjutkan

gaya modern ini ke dalam bentuk korporasi jihad yang ultra-modern dengan mengadopsi plot dari al-Qaeda di bawah Osamah bin Laden. Plot rencana al-Qaeda 2020 adalah blueprint korporasi politik radikal Islam yang ikut mempengaruhi Jamaah Islamiyyah (JI) Indonesia hingga bersublimasi ke gerakan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI).

Kepemimpinan kharismatik ABB dibangun mulai dari kasus makar yang dituduhkan Orde Baru terhadap Abdullah Sungkar dan ABB di Jawa Tengah. Para gembong pelanjut Hispran melihat cahaya spiritual bersinar dari sikap konsisten dan konsekuennya dalam mempertahankan kebenaran di tengah otoriterisme Orde baru yang terkenal kejam dan bengis. Kemampuan ABB dalam referensi Islam dan manajemen pergerakan yang berhasil mengirimkan para pengikutnya ke Moro dan Afghanistan telah membuat ABB dianggap sebagai titisan atman ilahi. Kharisma tidak bisa bertahan terlalu lama dalam iklim politik yang terus berubah.

Perpecahan awal pada tahun 1992, ketika lahirnya Jamaah Islamiyyah setelah terbelahnya para jihadis Indonesia yang berjihad dan berhasil ikut serta bersama Thaliban dalam proses *futuh* (kemenangan) Afghan tahun 1989. Abdullah Sungkar dan ABB memisahkan diri dari Negara Islam Indonesia (NII) atau Darul Islam (DI) dan *restart* dari entitas awal, Jama'ah Islamiyyah (JI). Sebagamana yang diakui oleh Nasir Abbas, keberangkatannya ke Afghanistan adalah representasi dari NII dan, oleh karenanya, futuh Afghan adalah partisipasi politik kaum jihadis Darul Islam di pentas global. JI kemudian berjalan sendiri karena marasa NII telah

dibajak secara *ashobiyyah* oleh puak tradisional di Jawa Barat. Dalam perkembangan selanjutnya, JI menjadi mitra politik tunggal al-Qaeda di Indonesia, bahkan Asia Tenggara. Terpaan terorisme telah menjadikan JI sebagai organisasi tertutup dan terpaksa menyelam di kedalaman samudra harakah jihad yang tersembunyi. Tertangkapnya beberapa mujahidin dan juga para syahid menjadikan JI mati suri. Pengakuan ABB yang menolak kesaksian Faiz Bafana di persidangan Bom Bali menjadi titik didih perpecahan korporasi jihad JI yang sudah dibangun lama di negeri pengasingan, Malaysia. Korporasi jihad ini kemudian dikayuh oleh Dr Azhari dan Noordin M Top dengan biduk yang berbeda dan bertahan hingga kini dalam situasi yang nanar.

Perpecahan Kedua, semenjak berdirinya Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) tahun 2000. MMI adalah organisasi yang mencoba memberikan napas bagi JI yang sudah mati suri di awal millenium ini. ABB terangkat ke permukaan dan muncul secara sangat *notorious* di dalam sorotan mata dunia. Selama satu dekade berada di atas biduk baru yang penuh semilir angin dakwah yang penuh keterbukaan dan reformasi, ABB tetap konsisten hingga pada suatu waktu ia tidak menyukai sistem politik internal MMI yang dianggapnya mengadopsi sistem Yahudi. Perpecahan pun membasahi pipi para mujahidin yang terpuruk dalam sikap *tawadhu'* dan hanya berani bertahan dalam perlawanannya terhadap sosok kharismatik ABB.

Perpecahan ketiga, ketika berdirinya Jamaah Ansharut Tauhid tahun 2010. Perpecahan ini membuat komunitas jihad Indonesia hanya tertinggal beberapa gerbong saja.

Dengan gerbong yang sedikit, laju JAT semakin dekat ke tujuan sementara: persinggahan di penjara. JAT semakin terjerumus ke lembah radikalisme dan intoleransi yang semakin menjauhkannya dari publik Islam yang sudah mulai begah dengan gaya keras dan mulai mengambil posisi sebagai konstituen partai politik dan sesekali menghirup segarnya udara demokrasi. Situasi yang dialami JAT dari tahun 2010 hingga 2014 ini adalah situasi *jihad deadlock* yang memperlihatkan disorientasi, dislokasi dan disposisi yang sangat parah bersamaan dengan mendekamnya ABB di penjara Nusa Kambangan. Penjara tidak selamanya merupakan tempat yang bisa memberikan pengaruh simpati pendukung, justru terkadang malah bisa menyebabkan munculnya friksi dan faksionalisme. Apalagi ditemani oleh Aman Abdurrahman yang banyak menyumbangkan ide-ide over-radikal paham Wahabi yang kemudian menyebabkan keruntuhan kharisma ABB hingga ke titik nadir.

Perpecahan keempat, ketika munculnya isu ISIS (*Islamic State of Iraq and Syam*) dan pernyataan sumpah setia ABB kepada figur Abubakar Al-Baghdadi yang mengakibatkan pecahnya JAT dan lahirnya JAS (Jamaah Ansharus Syariah) di bawah pimpinan Ustadz Achwan dan Abu Tholut (Imron Rosyidi). ABB sudah ditinggalkan oleh para pembela setia-nya, bahkan anaknya pun terpaksa terlontar keluar dan membentuk ikatan baru dari serpihan-serpihan yang terbuang. Perpecahan ini adalah perpecahan terakhir sebuah organisasi jihad di Nusantara yang tidak akan mungkin bisa terpecah lagi setelahnya. Ibarat gelas yang jatuh berkeping-keping, maka perpecahan ini adalah keping terkecil yang jikapun dilempar lagi tidak mampu untuk berpecah lagi (*least ability to split*). Saya memprediksikan, setelah perpe-

cahan ini akan mengalami suatu titik balik dimana revolusi integrasi adalah sesuatu yang sangat *historical inevitability*. Keniscayaan sejarah ini tentu membutuhkan analisis lebih komprehensif tentang ausnya perpecahan gerakan jihad di Nusantara hingga *futuh* Indonesia terjadi dan tibanya ajal Pancasila.

Kondisi keruntuhan kepemimpinan kharismatik jihad Indonesia ABB akan merupakan situasi *vacuum of leadership* yang akan membuka peluang bagi tokoh-tokoh muda yang sudah lama merajut impian integrasi umat Islam secara politik. Tokoh-tokoh muda radikal Islam di negeri ini tersisa hanya sedikit. Tokoh dengan kemampuan agamis dan manajemen pergerakan modern yang mungkin akan muncul adalah Ustadz Irfan S. Awwas dan Imron Rosyadi (Abu Tholut). Tokoh muda lainnya dianggap tidak memiliki kapasitas keislaman yang memadai meski dengan visi politik yang berlebih. Tokoh mudah radikal Islam Indonesia yang lain umumnya lebih bergelimang dengan asupan demokrasi dan mengepul dalam asap kapitalisme dan liberalisme.

Filsuf Perancis dan sejarawan sosial Michel Foucault (1980) berpendapat bahwa setiap wacana sosial yang melibatkan dihasilkan politik kebenaran klaim bertemu counter-wacana yang menantang legitimasi wacana asli. Kebenaran untuk Foucault sering tampaknya tidak lebih dari hasil perjuangan antara wacana bersaing. Dengan demikian daya menghasilkan atau menciptakan pengertian tentang 'kebenaran'. Hal ini mengingatkan tetapi juga berbeda dari ide bahwa 'mungkin benar', sebuah ide yang mendengarkan kembali ke Plato. Di dalam buku *Republik,* Thrasymachus berpendapat

bahwa gagasan keadilan dalam kepentingan penguasa, yang seringkali tidak adil. Foucault, bagaimanapun, tampaknya hampir tak peduli dengan membuat pertimbangan nilai, setidaknya pada tingkat teoretis, dan lebih peduli untuk hanya menguraikan pandangannya tentang apa yang ada.

Sementara beberapa mempertahankan bahwa ide Foucault kontra-wacana membawa pemikirannya sejalan dengan dialektika Hegelian, Foucault sendiri berpendapat terhadap perbandingan seperti itu. Sementara tesis - antitesis *a la* Hegelian secara bersamaan muncul dalam kesesuaian dengan teleologi diusulkan di mana Roh Dunia berlangsung melalui sejarah, Foucault menunjukkan bahwa kontra-wacana muncul setelah pelaksanaan wacana. Selain itu, Foucault membayangkan ada, rencana induk grand teleologis berlangsung seperti dalam pemikiran Hegelian. Sebaliknya, perspektif *post-structural*-nya terputus-putus dan sebagian besar terbuka.

Dalam arti wacana yang paling sederhana adalah percakap-an, atau informasi. Untuk Michel Foucault adalah melalui wacana (melalui pengetahuan) bahwa kita diciptakan. Pikirkan cara ini: Jika benar bahwa kita adalah jumlah dari pengalaman kita (pengetahuan yang kita hadapi), maka mereka mengendalikan kehidupan awal kami memiliki kekuatan yang sangat besar. Dalam sebuah keluarga terisolasi, pengetahuan anak tergantung pada hanya bebe-rapa orang. Dalam arti, mereka beberapa orang menciptakan identitas anak. anak tidak bisa tahu apa-apa tapi apa yang dikomunikasikan oleh mereka. Wacana bergabung kekuatan dan pengetahuan, dan kekuatannya berikut dari penerimaan kasual kita tentang "realitas yang kita disajikan". Jika

identitas kita diciptakan oleh media, karena semakin, pandangan dunia kita terbatas pada pandangan dunia mereka terisolasi, kaya, individu; kita dibuat untuk berpikir bahwa kita juga harus memiliki mercedes (sehingga membuat mereka dalam kontrol lebih kaya). Wacana dibuat dan diabadikan oleh orang-orang yang memiliki kekuatan dan sarana komunikasi. Mereka yang berada dalam kendali memutuskan siapa kita dengan memutuskan apa yang kita diskusikan. Semua wacana bertindak dengan cara ini. Menurut Foucault, kebenaran, moralitas, dan makna diciptakan melalui wacana. Setiap usia memiliki kelompok dominan unsur diskursif bahwa orang hidup di tidak sadar. Sehingga wacana di kelas kuliah, lebih khusus, pada akhirnya akan ide-ide hak istimewa apa yang normal (moral ″baik″ dan ″normatif″); dengan menekankan nilai-nilai ini, pendidikan secara implisit akan meminggirkan mereka yang tidak memegang nilai-nilai tersebut. Memvisualisasikan wacana sebagai susunan ide dan konsep di mana dunia dikenal. Jika kita tidak akrab dengan ide, maka kita cenderung menolak gagasan atau konsep dari tangan, karena kita tidak bisa menggunakan pengetahuan masa lalu untuk menghantam konsep itu. Perubahan hanya bisa terjadi ketika elemen kontra-diskursif baru mulai menerima perhatian luas melalui sarana komunikasi. Perubahan membutuhkan kepemilikan sarana komunikasi, repre-sentasi diri. Wacana tidak pernah benar-benar ″murni″; wacana akan selalu mengandung beberapa ukuran elemen kontra-diskursif. Dalam pandangan dunia Foucault tidak ada moralitas mutlak. Moralitas diciptakan melalui penggunaan kekuasaan.

—Tujuan Program—

Program *counter discourse* ini bertujuan (1) untuk memantau dan mengumpulkan data yang akurat dan sebanyak-banyaknya tentang terorisme, radikalisme dan fundamentalisme di Indonesia dan di beberapa tempat lainnya, mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan data tersebut untuk lebih memahami dan gerakan-gerakan, tendensi dan potensi yang mungkin muncul. Program kontra wacana ini juga akan (2) menerbitkan berbagai hasil kajian atau penelitian tentang rujukan-rujukan (referensi) terorisme, radikalisme serta fundamentalisme untuk mendisseminasikan konsep, gagasan dan teori dalam kerangka ilmu pengetahuan dan untuk kebutuhan praktis. Dengan menggunakan metodologi *counter-insurgency research* dari WF Wertheim dan Christian Snouck Hurgronje, lprogram kontra wacana ini akan (3) berusaha untuk memberikan kontribusi dalam bentuk wacana tandingan, rekomendasi aksi, solusi, model dan metode dalam menangani kasus-kasus terorisme, radikalisme serta fundamentalisme di Indonesia dengan menghadirkan wacana tandingan (*contesting discourse*). Berbagai wacana tandingan akan disebarkan melalui *website* (halaman ruang maya dan media sosial), buku dan pamflet.

—Target Program—

Program kontra wacana ini menyasar (1) kelompok-kelompok gerakan radikal dan (2) fundamentalis serta (3) kelompok-kelompok teroris yang ada di Indonesia melalui berbagai *website* dan media sosial (telegram ®, whatsApp ®) untuk mengimbangi wacana-wacana yang sedang mereka perbincangkan: *imamah, daulah, khilafah, jihad, isytisyhad, amaliah jihadiah, bai'at*, dll.

—Signifikansi Program—

Program kontra wacana ini sangat bermanfaat bagi (1) meneguhkan kembali ideologi negara sebagai *common-ground* yang lebih rasional dan bisa diterima oleh banyak kalangan ketimbang ideologi sektarian dari kelompok-kelompok agama yang parokial; (2) juga menjadi program yang akan mengaktualisasikan kembali sistem demokrasi yang inklusif sebagai alternatif bagi kelompok-kelompok fundamentalis dan radikal yang cenderung suka berkonflik satu sama lainnya bahkan (3) menciptakan konflik internal antara mereka sendiri dengan menghadirkan banyak pemikiran berbagai tokoh yang menjadi rujukan mereka sendiri. Program ini akan menyerupai konsep "wacana/counter-wacana" yang terletak di perbatasan antara sejarah budaya dan kritik sastra yang menggabungkan wawasan teoritis dan praktek semiotika, yang mencoba untuk menggambarkan fungsi budaya dari teks-teks suci dan profan. Berfokus pada sejarah negara Perancis selama periode transformasi budaya, sosial, dan politik yang luar biasa, Richard Terdiman (1989: 221) mengkaji bagaimana wacana-borjuis yang dominan novel, koran, dan bentuk media massa lain dari ekspresi-dan upaya intelektual untuk merancang kontra-wacana untuk memeranginya.[7] Bahkan di masa lalu kontra wacana sudah digunakan sebagai strategi ampuh melawan ideologi yang mulai menggurita di dalam masyarakat.

[7] Baca, Richard Terdiman, *Discourse/Counter-Discourse: The Theory and Practice of Symbolic Resistance in Nineteenth-Century France* (Ithaca: Cornell University Press, 1989).

—Metodologi *Counter Discourse*—

Radikalisme, fundamentalisme dan terorisme selalu mengikuti suatu pola.[8] Mereka adalah "*embattled forms of spirituality*," yang muncul sebagai respon terhadap suatu krisis kecurigaan (*perceived crisis*). Kaum fundamentalis terlibat dalam konflik dengan musuh-musuh sekular yang dicurigai membuat kebijakan-kebijakan yang bertentangan secara frontal dengan agama. Kaum fundamentalis tidak menganggap pertentangan frontal ini sebagai sebuah "arena bermain" (*play ground)*, melainkan sebuah "medan perang" (*battle field*) yang serius, yang bukan sekadar sebuah perlawanan politik konvensional, melainkan menganggap-nya sebagai sebentuk "perang kosmik" (*cosmic war*) antara kekuatan-kekuatan yang *haq* dan kekuatan yang *bathil*. Mereka takut terhadap —dan selalu merasa adanya ancaman— kaum *kafir* untuk membasmi mereka yang berasal dari kekuatan-kekuatan Barat sekular; maka mereka berusaha membentengi diri dengan doktrin dan praktek yang pernah hidup di masa lalu (doktrin dan praktek *jihad*). Untuk menghindari diri mereka dari "dunia buruk" dan menutup diri dari kontaminasi "perang kosmik" itu, kaum fundamentalis seringkali mundur dan menyempal dari *mainstream* masyarakat untuk menciptakan budaya tanding-an (*counter-culture*); dan kaum fundamentalis bukanlah kaum yang bermimpi di siang bolong. Mereka menyerap rasionalisme pragmatis dari modernitas, dan, di bawah bimbingan para pemimpin kharismatik mereka, menyaring apa yang perlu dari dunia teknikal untuk membuat rencana

[8] Baca, Martin E. Marty and R. Scott Appleby (eds), *Fundamentalisms Observed*, (Chicago: University of Chicago Press, 1991).

aksi yang seringkali bersifat destruktif.[9]

Kontra wacana berangkat dari situasi dimana (1) wacana sebagai tesis; dalam pengertian ini kontra wacana akan kemudian hanya menjadi sisi berlawanan dari ide awal. Ini adalah rasa yang lebih tua dari wacana kata. (2) wacana sebagai praktik sosial, cara untuk mewakili dunia, semacam deskripsi cara yang lebih kontemporer menggunakan wacana sesuai penulis di bidang analisis wacana dan analisis wacana kritis (misalnya, Potter dan Wetherell karya awal, Fairclough, van Dijk, dll) Dalam wacana tradisi counter, dipengaruhi oleh Foucault, juga akan menunjukkan sisi yang berlawanan/versi, tapi lebih bernuansa sejauh bahwa banyak curah keluar hubungan antara posisi argumentatif dan mengapa studi mereka adalah yang bersangkutan. Secara khusus mereka mengandaikan bahwa masyarakat adalah terstruktur dengan wacana; itu terdiri 'cara berbicara' (Michael Foucault) yang masuk akal dari hal tetapi sering melakukannya dengan cara yang mendominasi, menindas dan membatasi kemampuan pelaku. Kita tidak bisa tahu di luar bahasa dan kata-kata yang kita dapat (tidak) menggunakan dalam masyarakat kita, setelah semua.

Van Dijk berpendapat bahwa kontra wacana terdiri dari suara tertindas seperti perempuan, imigran dan orang kulit hitam, dimana wacana dominan terdiri dari orang kulit putih elit, yang kedua harus dipelajari dalam rangka untuk memecah "pemeliharaan ketidaksetaraan". Macgilchrist, berikut Laclau & Mouffe, berpendapat bahwa kontra wacana adalah bagian penting dari upaya terus-menerus

[9] Baca, Jonathan R. White, *Terrorism: An Introduction* (Wadsworth Publishing, 1991).

untuk membangun pandangan tertentu sebagai dominan, yang kita secara teratur mengalami misalnya, melalui debat pada obat-obatan, jenis kelamin, aborsi, dll. Macgilchrist juga menambahkan bahwa untuk berhasil 'kontra' pandangan 'utama' dari hari kita, kita perlu tahu dalam hal retorika apa yang 'bekerja' dalam hal persuasif, yang merupakan tujuan sosial utama bagi mereka yang terlibat dalam aktivisme, seperti penelitian, amal dan pendidikan.

Jadi dalam sebuah bidang kajian, counter wacana dapat cukup digambarkan sebagai counter-argumen, tapi lebih secara teoritis, sebagai argumen yang terletak di dalam konteks sosial budaya menangani isu-isu tertentu yang dianggap oleh aktivis sebagai bermasalah. Kita bisa melihat proses ini baik melalui Marxis, lensa feminis atau LGBT ketika kita berpikir tentang bagaimana suara-suara minoritas advokasi hak-hak, pengakuan dan sebagainya dalam waktu mengalahkan argumen 'utama' dan bergoyang opini di dunia barat.

Hal yang sama kita melihat pemandangan seperti berjuang untuk bertahan di tempat lain, atau bahkan akan mundur. Ini adalah perjuangan diskursif tersirat dalam banyak teori wacana, perlawanan dan perubahan sosial. Seperti kejadian terungkap, bergeser bolak-balik dapat terjadi dan salah satu dari banyak keindahan bidang besar ini pekerjaan adalah bahwa hal-hal tersebut dapat dilihat sebagai berlangsung lancar; 'Kemajuan' dan konsep pencerahan seperti menjadi bagian dari campuran dan tidak ditinggikan sebagai kebajikan yang saleh. Richard Rorty membuat titik ini dengan menyatakan bahwa argumen sosial yang lebih kondusif untuk memikirkan jika mereka dinilai oleh

bagaimana kita memandang hasil dalam waktu saat ini kita hidup di tataran standar abstrak.

Dalam metode yang lebih sederhana, Foucault menyebutkan bahwa "*Rules are empty are empty in themselves, violent and unfinalized; they are impersonal and can be bent to any purpose. The successes of history belong to those who are capable of seizing those rules, to replace those who had used them, to disguise themselves so as to pervert them, invert their meaning, and redirect them against those who had initially imposed them; so as to overcome the rulers through their own rules*."[10] Wacana bisa digunakan oleh siapapun untuk tujuan apapun untuk menantang sebuah kekuasaan, bahkan sebuah negara, dengan cara membalikkan makna. Maka, makna *jihad, daulah, khilafah, bai'at*, dan lain-lain bisa saja dimaknai secara lain untuk kepentingan tertentu.

—Proses dan Tahap-Tahap Program—

Program kontra wacana adalah program yang mencoba menghadirkan wacana tandingan yang dominan atau terlembagakan dengan beberapa wacana alternatif. Program ini terdiri dari beberapa kegiatan prosesual. Kegiatan tersebut berupa: (1) identifkasi wacana asal, dalam bentuk diskusi tertutup dengan para ahli; (2) menghimpun dan merumuskan interpretasi alternatif; (3) merumuskan wacana baru (counter-discourse) yang akan mampu menghantam wacana yang sudah terlembagakan (institutionalized

---

[10] Michel Foucault, *Language, Counter-Memory, Practice: Selected Essays and Interviews*, ed. with a preface by Donald F. Bouchard; trans. Donald F. Bouchard and Sherry Simon (Oxford: Blackwell, 1977), p. 151.

discourse); (4) membawa wacana tandingan ke domain publik melalui berbagai media (website dan media sosial); (5) mengevaluasi program dan kegiatan.

— Bentuk-Bentuk Kegiatan dari Program Kontra Wacana —

Program kontra wacana ini akan dikemas dalam berbagai bentuk kegiatan yang tidak kentara sebagai sebuah kegiatan afirmasi politik. Bentuk-bentuk kegiatan tersebut adalah: (1) kegiatan diskusi ahli secara tematik; (2) kegiatan FGD mengidentifikasi wacana dominan yang beredar; (3) diskusi perumusan wacana tandingan; (4) publikasi website; (5) disseminasi melalui media sosial; (6) publikasi buku-buku tematik yang membahas beragam tema radikal, fundamentalis dan teroris; (7) mengelola perang wacana secara ilmiah dengan rujukan bibliografis yang lengkap; (8) menerjemahkan buku-buku klasik karya ulama yang menjadi rujukan; (9) menerjemahkan buku-buku/kitab kontemporer yang menjadi rujukan para pengikut aliran fundamentalisme, radikalisme dan terorisme; (10) mendistribusikan Al Quran; (11) mendistribusikan buku-buku hadist shahih; (12) memberikan beasiswa bagi anak-anak dari keluarga radikal, fundamentalis dan teroris untuk kuliah di jurusan-jurusan yang mengenalkan multikulturalisme.

Kegiatan lainnya dapat dirumuskan dalam bentuk sub-kegiatan atau sub-program yang berdasarkan evaluasi diperkirakan akan perlu dilakukan.

—Penutup—

Program kontra wacana ini tidak akan bisa berjalan tanpa dukungan dari berbagai pihak yang mengerti tentang situasi yang dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah. Program ini merupakan program elaborasi pemikiran dan hati kaum radikal, kaum ekstrem atau kaum militan atau kaum teroris. Masyarakat menghendaki adanya program nyata untuk memerangi terorisme yang bersifat *straight-forward* dan bukan sekedar program yang bersifat formalistik apalagi yang legalistik. Terorisme muncul dari penafsiran atas satu wacana yang kemudian dikemas dalam bentuk ideologi oleh gerakan-gerakan sosial politik keagamaan. Cara mereduksi-nya pun haruslah melalui metode penafsiran yang dihadir-kan oleh berbagai kalangan (dengan berbagai rujukan) untuk menghantam ideologi yang dianut oleh gerakan-gerakan sosial politik keagamaan tersebut. "*There are no relations of power without resistances; the latter are all the more real and effective because they are formed right at the point where relations of power are exercised; resistance to power does not have to come from elsewhere to be real, nor is it inexorably frustrated through being the compatriot of power. It exists all the more by being in the same place as power* ."[11] Bahkan bila perlu, budaya tandingan (*counter-culture*) terhadap ideologi radikal dan fundamentalis tersebut mustilah dihadirkan dalam berbagai bentuk yang mungkin di berbagai domain dan sektor kehidupan.[*]

[11] Michel Foucault, *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972-1977*, ed. Colin Gordon (Brighton: Harvester, 1980), p. 142.

REFERENSI:

Imron, Ali, *Sang Pengebom* (Jakarta: Penerbit Republika, 2007).

Mubarak, M. Zaki, "Dari NII ke ISIS Transformasi Ideologi dan Gerakan dalam Islam Radikal di Indonesia Kontemporer," *Jurnal Epistemé,* Vol. 10 No. 1, Juni 2015.

Priyono, B. Herry, "Neoliberalisme, Kolonisasi Homo Ekonomikus dan Homo Finansialis," *paper,* dipresen-tasikan dalam diskusi Neoliberalisme dan Kemiskinan di Pusat Analisis Sosial Akatiga, 04 Juni 2007

Sahrasad, Herdi, "Jokowi dan Utang Swasta," *Kompas,* opini, 24 Juli 2015

Robison, Richard & R. Hadiz, Vedi, *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets* (London: Routledge 2004).

Terdiman, Richard, *Discourse/Counter-Discourse: The Theory and Practice of Symbolic Resistance in Nineteenth-Century France* (Ithaca: Cornell University Press, 1989).

Marty, Martin E. & Appleby, R. Scott (eds), *Fundamentalisms Observed*, (Chicago: University of Chicago Press, 1991).

White, Jonathan R., *Terrorism: An Introduction* (Wadsworth Publishing, 1991).

Foucault, Michael, *Language, Counter-Memory, Practice: Selected Essays and Interviews*, ed. with a preface by Donald F. Bouchard; trans. Donald F. Bouchard and Sherry Simon (Oxford: Blackwell, 1977).

Foucault, Michael, *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972-1977*, ed. Colin Gordon (Brighton: Harvester, 1980).

TERORISME, DERADIKALISASI DAN HUMANISASI

Melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, pemerintah Joko Widodo mempertimbangkan untuk memberikan grasi ke seluruh anggota kelompok Santoso jika menyerah. Sebelumnya, amnesti juga dijanjikan untuk Din Minimi, mantan pemimpin kelompok bersenjata di Aceh, yang menyerah. (*Kompas,* 22/7/16).

Dengan menekankan pada kekuatan persuasif dalam menanggulangi terorisme, hal itu menjadi bukti bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo mengedepankan pendekatan humanis untuk melengkapi program deradi-kalisi, sehingga bisa membuka harapan untuk menyadarkan para teroris di Poso dan daerah lainnya untuk kembali ke pelukan ibu pertiwi, seraya menghindari jatuhnya korban lebih banyak lagi.

Dengan pendekatan humanis, pemerintah Jokowi telah menunjukkan humanisasi nyata berdasarkan Pancasila (ideo-

logi negara) dalam menangani teroris yang menganut ideologi ekstrim sebagai alternatif untuk mengacaukan negara. Pendekatan ini mendayagunakan ”intelektualisme” karena kaum teroris umunya anti-intelektualisme, berwatak doktriner dan berideologi radikal dengan pemahaman dangkal. Humanisasi juga bisa membatalkan asumsi para teroris bahwa pemerintah ingin agar mereka dibunuh atau ditangkap, sehingga dalam persepsi mereka hanya ada satu pilihan: untuk melawan, membunuh atau dibunuh.

Hemat penulis, pendekatan humanis bagi teroris Poso ini, bisa membuka jendela harapan bagi mereka untuk turun gunung dan menyerah. Dan, adalah mungkin bahwa di masa depan, mereka tidak merasa sebagai warga negara terkutuk dan tercela, dikecam sebagai musuh negara yang harus dihancurkan atau dibasmi selamanya.

Menanggapi pendekatan bijak dan manusiawi dari pemerintahan Jokowi, para teroris itu, melalui keluarga, jaringan dan relasi mereka yang sudah bertobat dan meninggalkan ekstremisme, bisa juga membuka dialog dengan pejabat yang berwenang tentang apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka butuhkan sebelum menyerah, turun gunung.

Dalam menangani terorisme, sejauh ini humanisasi jarang ditemukan dibandingkan Program Deradikalisasi dan inilah saatnya untuk menggunakan humanisasi dalam menangani terorisme yang yang tidak kunjung berakhir atau berhenti.

Memerangi terorisme harus dilakukan dengan berbagai cara dan metode, dan Program Humanisasi merupakan pendekatan yang relevan dan penting untuk melengkapi Program Deradikalisasi karena menempatkan prioritas pada sisi kemanusiaan dan intelektualisme. Kekerasan tidak harus

diselesaikan dengan kekerasan, mengacu pada pandangan Mahatma Gandhi dan Johan Galtung. Dan itulah alasan praktisnya, mengapa humanisasi dibutuhkan dalam mengatasi terorisme di negeri ini.

Para teroris adalah anak-anak bangsa yang ”untuk sementara” tidak percaya terhadap Pancasila, kecewa dan frustasi, yang celakanya menemukan ideologi ekstrim dan menyimpang, menempuh jalan sesat dan salah menafsirkan al-Quran dan Hadits. Mereka membutuhkan pencerahan dan memerlukan Islam peradaban yang membuka cakrawala. Sebagai manusia berideologis ektrim, mereka membutuhkan lingkungan baru dan teman-teman baru, mengenal tentang perbedaan, pluralisme dan multikulturalisme. Humanisasi membukakan pintu untuk itu.

Harus dipahami bahwa narapidana dalam kasus terorisme perlu dibantu secara sosial-ekonomi untuk melepaskan diri atau melarikan diri dari jaringan lama atau kelompok lama mereka. Langkah ini, jika disertai pendekatan humanis, diyakini menjadi langkah deradikalisasi yang efektif. Tanpa program pelepasan mereka dari kelompok lama dan jaringan lama, narapidana terorisme akan sulit untuk melepaskan diri dari jaringan berbahaya dan ekstrim itu.

Sudah terbukti, ketidakmampuan keluarga, masyarakat terdekat dan pemerintah untuk melepaskan para bekas teroris dengan jaringan lama dan kelompok radikal lama, telah berkontribusi pada kegagalan program deradikalisasi. Buktinya, sejumlah mantan narapidana terorisme tetap menjadi radikal, bahkan lebih berbahaya ketika mereka keluar dari penjara.

Santoso Abu Wardah, pemimpin Mujahidin Indonesia Timur, juga Sunakim alias Afif, pelaku bom Thamrin, Jakarta Januari 2016 lalu, dan Bahrun Naim yang menjadi salah satu artikulator ISIS (NIIS-Negara Islam di Irak dan Suriah), adalah narapidana binaan Program Deradikalisasi yang justeru makin radikal dan menjadi-jadi setelah keluar dari penjara. Demikian juga Fadli Sadama, residivis aksi perampokan di Medan dan Aceh yang menggunakan hasil uangnya untuk melakukan aksi terorisme. Fadli Sadama sempat mengikuti program deradikalisasi yang dilakukan oleh pemerintah namun ia kemudian kembali melakukan teror.

Narapidana dalam kasus terorisme umumnya juga memiliki kebencian terhadap kelompok, atau pihak yang berbeda dari mereka. Oleh karena itu, humanisasi melalui keluarga dan teman-teman terdekat, seperti pengenalan budaya, pluralisme dan multikultualisme ″dalam bahasa mereka″ sangat dibutuhkan.

Narapidana kasus terorisme harus diperkenalkan oleh keluarga dan teman-teman terdekat serta komunitas terdekat, dengan kebhinekaan, kemajemukan dan kelompok-kelompok yang berbeda, sampai kehadiran mereka yang berbeda itu bisa menjadi bagian penting dalam persepsi, pandangan dan sikap hidup para bekas teroris tersebut.

Sekali lagi, ini kita sebut Program Humanisasi, di mana bersama keluarga, teman-teman dan komunitas terdekat, jiwa humanis dan inklusif para mantan teroris itu harus ditumbuhkan kembali karena mereka umumnya memiliki pandangan atau pemahaman yang keliru terhadap manusia lain dan kelompok yang berbeda.

Humanisasi dapat dilakukan melalui dialog intensif dan pengenalan budaya atau kelompok yang berbeda dari mereka (teroris). Kekerasan lebih mudah dihadapi dengan kelembutan dan cinta, ketimbang dengan kekerasan dan kebencian itu sendiri.

Dengan kata lain, program humanisasi dapat membantu para teroris membebaskan diri dari mental dan mindset lama setelah mereka lepas dari penjara, agar menjadi manusia baru yang bebas dan merdeka, lepas dari jaringan lama, beban suasana lama dan ideologi lama.

Salah satu program humanisasi adalah mengajarkan para narapidana terorisme untuk berdialog dengan keluarga, teman-teman dan komunitas terdekat, tidak hanya ulama, akademisi dan tokoh masyarakat, juga perlunya pelatihan untuk menghasilkan berbagai hal yang produktif, membawa para pelaku teror kepada para korban terorisme dan memasuki pemahaman baru mengenai pluralisme dan multikulturalisme dengan "bahasa" yang mereka pahami, sesuai dengan nilai-nilai dan cara-cara "budaya" mereka.

Pertemuan antara para tahanan dan korban terorisme menjadi salah satu cara untuk menyentuh hati mereka, dan membuat mereka sadar bahwa tindakan mereka telah menyebabkan penderitaan bagi orang lain. Dalam hal ini, untuk mencegah penyebaran pemahaman radikal di penjara, adalah penting untuk membuat segregasi nerapidana terorisme dengan narapidana lain sesegera mungkin.

Dengan cara ini, diharapkan, setelah mereka bebas dari penjara, terpidana teroris tidak lagi kembali ke perilaku lama dan hubungan lama yang menjerumuskan mereka ke dalam lingkungan kekerasan dan dunia teror.

Dalam program humanisasi ini, bagaimanapun, tidak semua metode bekerja dengan hasil memuaskan, karena keberhasil-an metode ini juga tergantung pada kecenderungan setiap teroris itu sendiri. Namun langkah humanisasi jelas bisa melengkapi deradikalisasi agar tepat guna, bermanfaat dan tidak sia-sia.

Humanisasi Melengkapi Deradikalisasi

Dewasa ini, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Aga-ma, Badan Nasional Pemberantasan Terorisme (BNPT), dan Badan Intelijen Negara (BIN) masih menggunakan program deradikalisasi sebagai program rehabilitasi non-klinis. Namun, program tersebut tidak terpadu satu sama lain. Malahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) seringkali membantah program deradikalisasi ini gagal.

Ada baiknya BNPT dan BIN menelaah kajian Sidney Jones (2015) yang menyebutkan empat alasan lemah dan gagalnya program deradikalisasi di Indonesia. *Pertama*, meskipun gagasan bahwa mantan radikal memiliki kredibilitas untuk mempengaruhi kaum radikal lainnya masuk akal, upaya ini sangat terbatas keberhasilannya. Kaum radikal yang dikenal telah bekerja sama dengan polisi akhirnya dideskreditkan oleh kelompoknya. *Kedua*, program rehabilitasi yang didanai pemerintah untuk menangani para jihadis yang dibebaskan dari penjara terbukti gagal. Kaum radikal tidak memiliki keterampilan, tidak ada pekerjaan, dan akhirnya kembali ke lingkaran militan yang mereka kenal. *Ketiga*, kurangnya anggaran resmi untuk program deradikalisasi sehingga karena kesulitan keuangan, polisi gagal untuk memenuhi

janji-janji untuk bantuan yang telah mereka janjikan kepada kelompok radikal. Akibatnya, kaum teroris kecewa dan tidak lagi tertarik memberikan informasi. *Keempat*, sistem penjara Indonesia yang korup telah terbukti merusak program deradikalisasi.

Program deradikalisasi yang mengandalkan pada perubahan ideologi semata, tidak lagi dianggap efektif mengatasi persoalan radikalisme dan terorisme.

Peran Keluarga dan Teman Dekat

Yang paling krusial, dalam banyak kasus deradikalisasi, program itu menjadi rusak akibat kebijakan pemerintah yang dianggap keluarga mantan teroris sebagai anti-Islam, anti-Muslim dan juga akibat "konsultasi psikologis" yang melelahkan bagi para mantan teroris yang melihat upaya deradikalisasi itu sebagai tindakan yang tidak tulus, berbau kamuflase dan hipokrisi.

Ada baiknya kita juga belajar dari berbagai negara dalam mensukseskan program deradikalisasi, misalnya, dari gagasan dan pengalaman di Jerman dan Australia serta Mesir.

Jerman mengadopsi pendekatan humanis dengan mengandalkan keluarga dan teman-teman narapidana Neo-Nazi. Pendekatan itu pertama kali digunakan pada kelompok neo-Nazi, dengan menyimpulkan bahwa orang-orang berideologi garis keras, radikal dan ekstrim tidak dapat dideradikalisasi melalui kekuatan koersi dan kooptasi, melainkan oleh daya bujuk dan kelembutan/kehangatan dari keluarga dan teman-teman dekat mereka sendiri.

Di Australia, Ahli Kontra Terorisme Dr Anne Aly dari Edith Cowan University Australia mengungkapkan, deradikalisasi sebagian besar telah diprogram secara luas, dengan pencegahan melalui peningkatan kohesi sosial seperti pendidikan multikulturalisme dan pluralisme, hibah untuk kompetisi olahraga dan pelatihan/seminar kepemimpinan inklusif. Namun studi oleh Universitas Nasional Australia dan Pusat Riset Terorisme Global menemukan fakta upaya deradikalisasi itu telah ”gagal untuk mencapai target bagi mereka yang paling membutuhkan bantuan.”

Dan, baru setelah melakukan pendekatan humanis dengan mendayagunakan keluarga dan orang-orang yang paling dekat dengan subjek terorisme dan perilaku antisosial, program deradikalisasi itu bisa membuahkan hasil.

Di Australia, keterlibatan dari imam penjara dan psikolog dibutuhkan, namun hal itu tidak cukup, sehingga focus utama tetap pada unit keluarga. Bahkan di Australia, kontributor kunci untuk deradikalisasi (dan sebaliknya yakni radikalisasi), adalah keluarga para mantan teroris itu sendiri. Itulah sebabnya unit kleurga sangat penting dalam Program Humanisasi, peran keluarga dan teman-teman terdekat menjadi sangat relevan dan signifikan, untuk melengkapi deradikalisasi yang dianggap kontroversial dan gagal.

Di Mesir, selama periode 1980-an dan 1990-an, ada tiga kekuatan yang membuat deradikalisasi berbasis ideologi di Mesir berjalan efektif. *Pertama,* deradikalisasi menyentuh aspek doktrin keagamaan yang disampaikan hingga ruang-ruang keluarga para mantan teroris. Para tokoh Islam Mesir, terutama tokoh Jamaah Islamiyah (JI), memahami, sejumlah

ajaran keagamaan telah disalahpahami oleh kelompok teroris-anarkis dan keluarga mereka serta menjadi "pegangan" mereka dalam menjalankan aksi berdarah tanpa merasa bersalah. Dalam konteks ini, deradikalisasi berbasis ideologi berhasil menghancurkan kekuatan utama kelompok teroris-anarkis dan meyakinkan keluarga mereka agar menjadi Muslim yang toleran, bajik dan benar.

Kedua, deradikalisasi Mesir hingga para teroris dan keluarganya itu dilengkapi dan diperkuat dengan kekuatan struktural, khususnya di internal JI Mesir. Hal ini karena deradikalisasi diprakarsai dan dilakukan oleh tokoh-tokoh spiritual JI, seperti Sheikh Najih Ibrahim Abdullah, Sheikh Ali Syarif, dan Sheikh Usamah Ibrahim Hafiz. *Ketiga,* otoritas ilmu keislaman. Sheikh Najih Ibrahim Abdullah, Sheikh Ali Syarif, Sheikh Usamah Ibrahim Hafiz, dan lainnya disegani karena mereka adalah tokoh dengan ilmu keislaman mumpuni, baik di internal JI maupun dalam konteks publik Mesir secara umum. Deradikalisasi bisa efektif karena melibatkan orang-orang yang menempati posisi puncak dalam struktur organisasi JI Mesir. Kekuatan struktural inilah yang mampu membawa gerbong keluarga JI Mesir untuk berjalan konsisten dengan isi maklumat deradikalisasi. (Hasibullah Satrawi, 2011).

Dewasa ini di bawah pemerintahan Abdel Fattah Saeed Hussein Khalil El-Sisi, mantan Panglima Angkatan Bersenjata Mesir yang berperan mengakhiri Presiden Islamis Mohamed Morsi, dan disahkan sebagai Presiden Mesir selepas Pilihan Raya Presiden Mesir Mei 2014, program deradikalisasi disertai humanisasi, difokuskan untuk menanggulangi dan mengatasi radikalisme kelompok Ikh-

wanul Muslimin (IM), mantan teroris dan keluarga mereka, dengan cara dan metode yang berdasarkan kondisi sosial dan kultural Mesir yang ada. Humanisasi melengkapi deradikalisasi agar bisa berjalan baik dan efektif.

Sekali lagi, deradikalisasi seyogianya dilengkapi humanisasi karena butuh partisipasi tulus dan perhatian serius dari keluarga mantan teroris, teman-teman dekat dan lingkungan masyarakat terdekatnya, karena mereka yang lebih tahu kebutuhan untuk para mantan teroris itu. Merekalah yang diperkirakan paling tahu langkah apa yang harus disesuaikan secara individu dan sosial bagi para mantan teroris dan radikalis, berdasarkan alasan-alasan yang beragam, guna mencegah para teroris dan radikalis itu kembali ke ekstremisme kekerasan. Semoga!.[*]

WAHABISME DAN MUSLIM TRADISIONAL: TEGANGAN DAN PERBENTURAN

Fenomena merebaknya benturan mazhab antara Wahabi dan kalangan tradisional Islam telah membuat banyak orang bertanya-tanya tentang apa itu Wahabi, bagaimana sejarah-nya dan apa bahaya dari mewabahnya aliran atau sekte yang dianggap radikal ini? Tulisan ini berusaha menjawab pertanyaan tersebut secara sekilas untuk mendudukkan perkara yang sebenarnya agar tidak terjadi kesalahpahaman yang bisa berakibat fatal. Agama adalah unsur kebudayaan yang paling sulit diubah (Achmad Fedyani Saifuddin, 2012) dan pengaruhnya paling sulit dikendalikan (Houston Smith, 1976). Benturan peradaban atau *clash of civilization* (Samuel Huntington, 1978) terjadi karena agama. Benturan di dalam peradaban atau *clash within civilization* juga terjadi karena agama (Hans Dieter Senghaas, 2002).

Paham keagamaan yang dituduh paling banyak menyum-bangkan konflik, perang, terorisme dan kekerasan komunal adalah, salah satunya, paham Wahabisme. Maka kita perlu

memahami Wahabi secara sosiologis, teologis, sejarah, politik dan antropologis. Tulisan ini tidak akan bisa menjelaskan semua itu hanya dalam uraian ringkas beberapa frasa kalimat saja. Tulisan ini lebih merupakan *executive summary* untuk kalangan awam atau semacam *policy brief* untuk yang super sibuk, yang bahan-bahannya dikumpulkan dari kalangan "Wahabi" sendiri yang menjadi subyek penelitian saya selama ini.

Pada dasarnya, Islam itu hanya satu, namun karena perkembangan sejarah, politik, ekonomi dan budaya, maka Islam ikut berkembang berdasarkan wilayah persebarannya. Geopolitik Islam kontemporer sekarang ini menjadi tidak lagi satu, monolitik dan integral seperti pada masa nabi Muhammad SAW. Kini terdapat banyak kelompok, pecahan, aliran, sekte dan mazhab yang cukup beragam. Perpecahan pertama adalah pembelahan ideologis yang sangat besar antara (1) Sunni, dan (2) Syiah. Sunni dan Syiah ini juga terpecah dalam berbagai kelompok-kelompok atau sekte dan mazhab yang semuanya mengklaim dirinya yang paling benar. Tidak akan ada kemunculan kelompok baru tanpa klaim kebenaran. Klaim kebenaran inilah yang menyebabkan terjadinya perpecahan di dalam Islam.

Sunni adalah mazhab besar kaum pengikut *ahlus sunnah wal jamaah* yang sangat menghormati Nabi, berserta seluruh sahabat dan juga keluarganya. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), Persis, Al Washliyah, Al Irsyad, Perti, Masyumi, DI atau NII, JI, MMI, JAT, JAS adalah termasuk ke dalam kelompok Sunni.

Syiah adalah mazhab yang selektif dalam mengakui sahabat Nabi dan juga keluarganya, mereka hanya mengagumi Ali

ibn Abi Thalib r.a dan anaknya yang kedua, Husen, dari 11 anak Ali r.a. Karena minoritas, kelompok Syiah di Indonesia hanya sedikit saja dan organisasinya pun (beserta pecahannya) tak begitu tampil ke permukaan. Antara Sunni dan Syiah pun sering terjadi bentrokan yang melibatkan kekerasan berdarah.

Di kalangan Sunni perpecahan juga banyak terjadi dan membentuk banyak kelompok keagamaan, mazhab, sekte dan aliran yang sangat beragam. Wahabi adalah salah sebuah mazhab dalam kalangan Sunni. Baru baru ini di Madura ada sebuah lagu yang berjudul "Wahabi" yang sangat lugas menggambarkan apa itu aliran yang dianggap radikal oleh banyak kalangan. Lagu itu menggambarkan Wahabi tidak suka maulid nabi, tidak mau tahlilan, tidak setuju ziarah kubur, tidak mengakui qunut, dan menganggap semua orang Islam di luar kelompoknya sebagai sesat, bid'ah atau bahkan kafir. Stigma buruk sering disematkan kepada Wahabi dan label ekstrim sering ditujukan kepada kelompok ini. Dalam banyak hal lagu ini ada benarnya, namun tidak semua Wahabi berperilaku demikian.

Pengertian Wahabi

Menurut Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu (1986), Wahabi adalah paham keagamaan yang dianut kalangan yang tidak suka kepada adat-istiadat dan kebiasaan yang menyimpang yang mengharap kekuatan leluhur, melanggar tradisi adat, tidak mau ikut maulidan Nabi, tidak percaya kepada sunan, wali dan keramat-keramatnya, anti tahyul, khurafat dan bid'ah. Kata Wahabi adalah nisbat kepada Muhammad bin Abdul Wahab, padahal Abdul Wahab adalah nama ayahnya

yang tidak pernah menulis satu kitab fiqh pun. Nisbat kepada nama Abdul Wahab ini dibuat oleh kalangan ilmuwan Barat yang biasanya mengambil nama belakang untuk katalogisasi kepustakaan.

Sejarah Wahabi

Wahabi digagas oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab (1703-1792), seorang reformis (*mujaddid*) Islam dari Najd, Arab Saudi yang muncul di tengah galaunya ummat Islam yang lama terasuh di bawah empat mazhab statis (Syafii, Maliki, Hambali dan Hanafi). Ia adalah seorang mufti dari Daulah Su'udiyah, cikal bakal Kerajaan Arab Saudi yang kita kenal sekarang. Muhammad bin Abdul Wahab menyeru kaumnya kepada tauhid, hanya berdoa memohon kepada Allah tanpa perantara, tidak mengagungkan para wali dan orang alim atau ulama atau orang-orang sholeh sebagai orang yang lebih istimewa dan menolak menyembah kuburan. Wahabi menganut prinsip egaliter dalam beribadah. Muhammad bin Abdul Wahab ini dianggap sebagai pembuat mazhab kelima setelah mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi dan Maliki. Muhammad bin Abdul Wahab ini banyak menulis kitab yang isinya sejalan dengan pemikiran-pemikiran Ibnu Taymiyyah, Ibnu al-Qayyim, dan Ahmad bin Hanbal. Karena dipengaruhi oleh pemikiran dari Ahmad bin Hanbal, Wahabiisme ini agak mirip dengan mazhab Hambali. Pemikiran Wahabi ini kemudian dikembangkan oleh Bin Baz, Utsaymin, Syek Ahmad Khan, Jamaluddin Al Afghani, Rashid Ridha, Muhammad Abduh, HOS Tjokroaminoto, SM Kartosoewirjo. Kemudian pada periode pasca kolonialisme, ideologi Wahabi dikembangkan lebih sistema-

tis lagi oleh Sayyid Qutb, Muhammad Qutb, Hasan Al Banna, Abul A'la Al Maududi, Yusuf Qardhawi, dan Nashiruddin Al Albani. Kemudian pada masa revolusi di Afghanistan ideologi ini dikemas rapi dalam buku-buku karya Abdullah Azzam, Osama Bin Laden, Ayman Al Zawahiry, hingga ke periode konflik Iraq dan Suriah oleh Abu Mushab As Shuri.

Tipologi Wahabi

Wahabi tidak monolitik, artinya kelompok ini juga terpecah ke dalam beberapa varian yang satu sama lainnya tidak bersahabat, terkadang saling bermusuhan atau bahkan juga bisa menjurus ke konflik berdarah. Wahabi sebenarnya adalah istilah yang generik untuk menyebut atau merujuk kepada kelompok Salafi. Namun karena kaum tradisional Islam pun mengklaim dirinya sebagai Salafi (yang melaksanakan tradisi Salafussholeh), maka label Wahabi dipilih agar mudah membedakannya secara teologis dengan kelompok-kelompok yang bukan Wahabi. Terminologi Wahabi pun dipakai sebagai euphemisme karena ada kelompok tertentu yang sangat sensitif dengan nama Salafi. Secara antropologis, terdapat setidaknya tiga tipologi Wahabisme di Indonesia yang bisa diamati. *Pertama*, Wahabi Shururi atau Wahabi yang dianggap anti maulid, anti azan dua kali, anti tahlil, anti ziarah kubur dan anti jihad dan sering menganggap masyarakat yang melawan pemerintah sebagai *bughot* (pemberontak). *Kedua*, Wahabi Jihadi, yatu kelompok yang lebih fokus pada jihad dan berusaha melawan setiap kebijakan pemerintah, juga memiliki sikap penolakan yang sama dengan kelompok pertama. Wahabi Jihadi di Indo-

nesia pernah muncul dengan nama Darul Islam (DI) di Jawa Barat tahun 1949 [dengan tokohnya Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo], Jawa Tengah tahun 1950 [Amir Fatah Widjaja Kusuma], Sulawesi Selatan tahun 1951 [Kahar Muzakkar], Kalimantan Selatan tahun1952 [Ibnu Hajar] dan Aceh tahun 1953 [Daud Beureu'eh], kemudian Jamaah Islamiyyah (JI) tahun 1992 hingga tahun 2010 yang dituduhkan kepada Ustadz Abdullah Sungkar dan Abubakar Ba'asyir, Dr Azhari, Noordin Mat Top, Amrozi, Imam Samudra, Ali Ghufron dan Ali Imron. Terakhir, kelompok Wahabi Jihadi ini muncul dalam bentukTanzhim al-Qaeda Serambi Mekkah (TQSM) dan banyak aktivisnya yang tertangkap setelah terbongkarnya kegiatan *i'dad* (persiapan /latihan perang) di Bukit Jalin, Aceh Besar pada 2010. Kelompok Wahabi Jihadi ini kini lebih kalem dan memilih jalur dakwah bil hikmah dalam kegiatan kesehariannya. *Ketiga*, Wahabi Takfiri yang suka menuduh orang lain di luar kelompoknya sebagai pelaku *bid'ah* atau malah kafir. Kelompok ini ada di Aceh saat ini dan masih setia dengan *bai'at*-nya untuk mendukung Negara Islam Irak dan Syam (NIIS) atau lebih dikenal dengan ISIS.

Di internal kalangan Wahabi ini sendiri juga terjadi saling tuding dan saling tuduh sesat menyesatkan. Kalangan Wahabi Shururi sering menuduh Wahabi Jihadi sebagai *bughot*. Wahabi Jihadi lebih banyak pasif dan tak bereaksi secara sosial dan politik. Wahabi Jihadi lebih mengutamakan ibadah-ibadah *mahdhoh* (ritual) dan menghindari friksi dengan pihak manapun, aktif dalam berbagai acara penyadaran tauhid ummat. Sementara kalangan Wahabi Takfiri sangat hiperaktif dalam dakwahnya dan menuduh banyak kalangan Jihadi sebagai *bid'ah*, sesat atau kafir

terhadap banyak kelompok karena tidak mau menerima khilafah Al-Baghdadi di Suriah dan Iraq. Melalui media sosial kelompok Wahabi Takfiri ini mengumbar seruan-seruannya yang berisik dan penuh ancaman dan tudingan sembari memperlihatkan sikap intolerannya secara asertif.

Di tengah kiprah Wahabi dalam konflik komunal di Peristiwa Cumbok di Aceh (1946), Ambon (1999) Poso (2001) dan lain-lain tempat, juga ada kiprah Wahabi dalam kekerasan politik di Sulawesi Selatan serta kiprah Wahabi dalam terorisme yang diperankan oleh Jamaah islamiyyah, Darul Islam, dan lain-lain sebagainya sejak tahun 2000 hingga tahun 2014. Inilah yang kemudian membuat Wahabi menjadi *paragon of ugly* yang sulit untuk dibantah. Seharusnya Wahabi lebih tampil sebagai *paragon of beauty* dan mengharumkan agama Islam di mata dunia. Kejadian-kejadian kekerasan di Iraq dan Suriah dimana ISIS memperlihatkan kekejamannya yang mengerikan telah membuat Wahabi sebagai pihak yang dianggap bertang-gungjawab secara teologis atas kekerasan dan kebiadaban ini.

Padahal, banyak sekali jasa Wahabi dalam membela kaum tertindas di muka bumi ini. Bantuan kepada pengungsi Rohingya justru datang dari Arab Saudi yang dianggap sebagai negara Wahabi. Kita haruslah menilai Wahabi ini secara lebih adil sebelum menjatuhkan stigma atau label radikal, ekstrimis dan teroris kepada semuanya yang berasal dari *mainstream* Wahabi. Padahal ada Wahabi yang anti jihad dalam arti kekerasan, yang anti pemberontakan, dan juga Wahabi yang bisa menerima ziarah kubur, tahlil, maulidan dan juga masih bersedia datang ke kenduri-kenduri untuk

menyantap hidangan.

Di tengah banyaknya tudingan terhadap kalangan Wahabi yang dianggap telah mempermalukan agama Islam, namun harus diakui bahwa ada banyak jasa Wahabi dalam membela kaum tertindas, khususnya yang beragam Islam. Hampir dapat dipastikan kebanyakan yang dibela oleh Wahabi adalah ummat Islam tanpa membedakan sekte dan mazhab. Bantuan kemanusiaan yang diberikan kaum Wahabi menyebar ke seluruh dunia dalam bentuk filantropi zakat, sedekah, qurban dan pembangunan masjid serta lembaga pendidikan.

Wahabi dan Bukan Wahabi di Aceh

Setelah insiden "kudeta mimbar" Masjid Raya Baiturrahman di Banda Aceh pada hari Jumat 19 Juni 2015 yang baru lalu, yang dilakukan oleh para ulama dayah tradisional yang tergabung dalam HUDA (Himpunan Ulama Dayah Aceh), MUNA (Majelis Ulama Nanggroe Aceh), dan FPI (Front Pembela Islam) yang menuntut tata laksana shalat Jumat yang harus sesuai dengan mazhab Syafi'iyah dan Maturidiyah, maka merebaklah perbincangan di kalangan masyarakat arus bawah tentang Wahabisme. "Kudeta mimbar" masjid itu menyuratkan tuntutan teologis yang spesifik, bahwa pelaksanaan shalat Jumat mustilah sesuai dengan tradisi ritual kongregasi dari mazhab Syafi'iyah yang dalam rumpun teologis *Ahlussunah wal Jamaah* harus ada kumandang azan dua kali, khatib memegang tongkat berbentuk tombak trisula dan mengulang pembacaan doa pada khutbah kedua. Tuntutan dari para aktor "kudeta mimbar" masjid ini selanjutnya adalah tentang pelaksanaan shalat

taraweh yang harus 20 rakaat ditutup dengan tiga rakaat witir, shalawat sayyidina dan pembacaan doa-doa untuk para pelaksana pemerintahan di Aceh. Intinya, mereka menolak tata-laksana ritual yang mereka anggap sebagai menguatnya aliran atau mazhab Wahabi yang sangat mewabah kini di Aceh.

Kini masyarakat ramai membicarakan insiden tak berdarah tersebut sebagai kondisi perpecahan antar mazhab yang biasanya terjadi secara sangat kentara di kampung-kampung yang multi-mazhab. Banyak kalangan membicarakan tentang Wahabi, ciri-cirinya (bahkan hingga ke ciri fisik kelompok), tata-cara beribadahnya, bacaan-bacaan dalam ritual dan doa dan juga shalawat, tokoh-tokohnya, saluran medianya hingga ke orientasi misoginis dan pemikiran yang dianggap radikal. Salah satu pemikiran yang dianggap kalangan tradisional sebagai pemikiran radikal kaum Wahabi adalah sikap *takfiri* (mengkafirkan) terhadap orang di luar kelompoknya dan *ghuluw* (bersikap ekstrim) terhadap sesama muslim. Orientasi pemikiran lain yang dianggap tidak sesuai dengan tradisi Islam Aceh adalah adanya anggapan bahwa maulid Nabi Muhammad SAW sebagai *bid'ah*; setiap yang *bid'ah* pasti sesat, dan setiap kesesatan pasti bermuara ke neraka.

Wahabi adalah paham keagamaan yang dianut kalangan yang tidak suka kepada adat-istiadat dan kebiasaan yang menyimpang yang mengharap kekuatan leluhur, melanggar tradisi adat, tidak mau ikut maulidan Nabi, tidak percaya kepada sunan, wali dan keramat-keramatnya, anti tahyul, khurafat dan bid'ah. Wahabi digagas oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab (1703-1792), seorang reformis

(*mujaddid*) Islam dari Najd, Arab Saudi yang muncul di tengah galaunya ummat Islam yang lama terasuh di bawah empat mazhab statis (Syafii, Maliki, Hambali dan Hanafi). Ia adalah seorang mufti dari Daulah Suudiyah, cikal bakal Kerajaan Arab Saudi yang kita kenal sekarang. Muhammad bin Abdul Wahab menyeru kaumnya kepada tauhid, hanya berdoa memohon kepada Allah tanpa perantara, tidak mengagungkan para wali dan orang alim atau ulama atau orang-orang sholeh sebagai orang yang lebih istimewa dan menolak menyembah kuburan. Wahabi menganut prinsip egaliter dalam beribadah. Kata Wahabi adalah nisbat kepada Muhammad bin Abdul Wahab, padahal Abdul Wahab adalah nama ayahnya yang tidak pernah menulis satu kitab fiqh pun. Nisbat kepada nama Abdul Wahab ini dibuat oleh kalangan ilmuwan Barat yang biasanya mengambil nama belakang untuk katalogisasi kepustakaan.

Keresahan Kaum Tradisional

Banyak ulama Aceh tradisional yang merasa resah dengan berkembangnya aliran Wahabi yang mengklaim dirinya tak bermazhab ini. Suasana masyarakat yang tadinya guyub dan bersahaja, mulai terbelah ke dalam dua kutub yang saling menganggap dirinya benar. Di kalangan bawah, masyarakat akar rumput bahkan mengalami konflik ini sudah berdarah-darah. Di Sawang, Aceh Utara, beberapa hari lalu terjadi penikaman terhadap seorang warga kampung yang mengejek seorang ulama tradisional di kampung tersebut dan rumahnya dibakar warga. Di Kutablang, Kabupaten Bireuen, pada saat hari raya Idul Qurban, jamaah masjid bahkan ada yang bersembahyang dengan meng-

gunakan sistem *shift* (pergiliran) meskipun ruang *meunasah* (masjid kampung) masih sangat lapang untuk semuanya beribadah shalat jamaah secara bersama-sama. Bahkan ketika mengumpulkan zakat qurban pun, masing-masing kelompok mengumpulkan untuk kelompoknya sendiri-sendiri dan membagikannya untuk kalangan yang mereka anggap memiliki keyakinan teologis yang sama dengan mereka.

Banyak kalangan ulama dan masyarakat yang sedih dan resah dengan situasi perpecahan internal ummat di kampungnya. Ada yang bertanya dalam lantunan lirik lagu *Ordinary World* dari Duran-Duran: "*What's happened to us? Crazy some said. Where is the life that I recognize*?" Suasana yang menyesakkan dada ini bertambah pilu ketika dalam satu rumah terdapat dua atau tiga mazhab yang berbeda. Mazhab telah membelah keluarga sebagai komponen masyarakat terkecil; ada yang masih menjalankan tradisi ritual lama seperti maulid Nabi, membaca doa qunut dan membaca shalawat sayyidina; ada yang anti qunut dan tidak mau berpartisipasi dalam kegiatan maulid Nabi dan kenduri-kenduri seremonial adat lainnya. Pada awalnya, sekitar tahun-tahun 1980-an, perbedaan ini belum mengarah ke benturan atau friksi antar mazhab, namun kini benturan ini sangat jelas terasa. Masjid atau *meunasah* adalah arena benturan ini terjadi selain di tempat-tempat lainnya. *Meunasah* atau masjid yang tadinya menjadi arena berkumpul, bersuka-cita dan berduka-cita masyarakat dalam berbagai kegiatan komunal seperti maulid, ceramah, penyuluhan dari posyandu, pertemuan aparat desa, kelompok tani dan nelayan, shalat jamaah Jumat, *fardhu kifayah* (pengurusan orang yang meninggal) dan juga pertemuan-

pertemuan resmi dengan aparat kecamatan dan tempat dimana masyarakat menerima mahasiswa yang melaksanakan kuliah kerja nyata bahkan menjadi *rendez-vous* dengan LSM membahas program pemberdayaan masyarakat pun berlangsung di *meunasah* atau masjid.

Kini tempat berkumpul itu tidak lagi seperti dulu. Mirip seperti yang digambarkan oleh AA Navis (1976) dalam "Robohnya Surau Kami", *meunasah* telah menjadi arena bertemunya ide-ide yang *hostile* dan konfliktual. Suasana yang tadinya damai dan penuh keakraban khas Aceh kini berubah dengan sikap saling curiga dan lontaran-lontaran pemikiran monolitik yang memercik ke semua jamaah. Perubahan sosial ini tentunya sangat meresahkan kaum tradisional Islam di kampung-kampung dan juga di wilayah urban dimana kaum tradisional bermazhab Syafiiyah ini berada. Mazhab Syafiiyah yang telah berkembang dan hidup lama menemani keguyuban masyarakat Aceh ini adalah mazhab dominan Ahlussunah wal Jamaah di Asia Tenggara. MPU Aceh pun pernah mengeluarkan fatwa 13 kriteria aliran sesat (2007) yang mencantumkan sikap mengkafirkan orang di luar kelompoknya sebagai anti-tesa atas merebaknya Wahabi.

Pun demikian halnya dengan Wahabisme, aliran yang menolak untuk disamakan dengan mazhab. Kalangan penganut Wahabisme di Aceh ada yang modern ada juga yang tampil dengan gaya sarungan dan pakaian jubah *ala* Pakistan dan *fashion* Timur Tengah.

Kehadiran mereka yang sangat asertif ini terkadang terlihat dengan gaya celana cingkrang, jenggot yang terbiarkan, minyak wangi semerbak dan baju khas yang tampak

berbeda dengan gaya orang kampung yang sederhana di sekitarnya. Pada awalnya kehadiran kaum Wahabi ini diterima di *gampong-gampong* dalam suasana saling menghargai dan dalam semangat silaturrahmi keberislaman yang kental. Namun seiring dengan berjalannya waktu, bersamaan dengan terjadinya peningkatan jumlah pengikutnya yang mulai ramai, benturan pun tak bisa terelakkan. *Meunasah-meunasah* seakan dibajak oleh mereka yang lebih sering berada di masjid ketimbang penduduk asli yang banyak menghabiskan waktunya di sawah, ladang, tambak atau di laut lepas. Sedikit demi sedikit kebiasaan ritual tertentu mulai bergeser. Beberapa bacaan doa pun mulai ditinggalkan, berganti dengan *spelling* yang lebih *up-to-date* yang diklaim sudah diverifikasi oleh para Syekh di Arab.

Wahabi Aceh

Berbagai taksonomi atau kategorisasi kaum Wahabisme di Aceh di atas masih belum lengkap tanpa menyertakan kelompok Wahabi Aceh (*Achenized Wahabist*) yang jauh berbeda dengan umumnya kelompok Wahabi. Natana DeLong-Bas (2004:56) menunjukkan banyak aspek ideologi Wahabi modern yang berbahaya pada abad 20 dan 21 sekarang ini. Dalam ideologi Wahabi dikenal adanya kosmografi *darul Islam* (negara Islam) dan *darul kuffar* (negara kafir). Siapa saja yang tidak berasal dari Darul Islam harus diperangi. Ekstrimisme lainnya dari Wahabi di Arab adalah penekanan pada jihad, misogyny, martir, dan militansi. Banyak kelompok Wahabi Aceh yang terasuh di bawah ilmu-ilmu modern namun mereka tidak memandang Barat sebagai musuh atau *darul kufur*. Meski mereka bersifat

misoginis, setidaknya dalam pemikiran, namun hampir tak ada dari mereka yang hidup dalam sistem kekerabatan yang poligamis dan bias gender.

Kaum Wahabi Aceh ini memang berbeda secara diametral dengan kaum tradisional dayah, namun mereka bisa hidup koeksisten secara damai dengan berbagai kalangan dari mazhab yang berbeda. Kaum Wahabi Aceh umumnya adalah kalangan yang bisa menyerap tradisi maulid, tahlil dan ziarah kubur, serta modernisme dan tak mempersoal-kannya. Bahkan mereka pun mampu berdamai dengan sejawat ideologisnya dari kalangan Syiah yang memiliki tradisi dan keyakinan yang tidak sama dengan kalangan Sunni pada umumnya. Hubungan ini terus terjalin dan tidak pernah sedikitpun terjadi friksi atau pergesekan apalagi benturan diametral dengan berbagai kalangan. Wahabi Aceh umumnya adalah kalangan ulama yang memahami ilmu-ilmu keislaman dan memadukannya dengan ilmu pengeta-huan modern di kampus-kampus. Kalangan Wahabi Aceh lebih menyerupai kelompok Islam pluralis di Jawa atau kelompok Islam Nusantara yang lebih mengutamakan toleransi, perdamaian, kerjasama inklusif dan saling meng-hargai perbedaan keyakinan personal masing-masing.[*]

HAMBALI: AKTOR KEPERCAYAAN OSAMA BIN LADEN DI ASIA TENGGARA

Pasca Bom Bali I tahun 2002, Hambali adalah sosok yang paling dicari Amerika Serikat (AS) karena di mata Gedung Putih, ia 'berhasil' menempatkan Asia Tenggara dalam peta terorisme dunia. [1]

Sebelum dicokok dan ditahan di Penjara Guantanamo milik AS, di media massa nama Hambali begitu sering disebut

[1] Tulisan ini merupakan risalah untuk diskusi the Freedom Foundation dan LSIK di Jakarta Agustus 2015, melalui studi kepustakaan dan berbagai sumber dari aparat kepolisian dan intelijen di berbagai forum, analisis media massa, dokumen resmi, kajian lembaga-lembaga, percakapan personal dan penelitian lapangan serta laporan pers antara lain harian *Kompas, Koran Tempo, Antara, Reuter, AP, Media Indonesia, Republika, Sinar Harapan, Suara Pembaruan, Jawa Pos, Pelita, Sabili, Majalah Tempo,Gatra dan the Jakarta Post* edisi sepanjang tahun 2003 (Januari-Desember 2003). Dengan mendayagunakan segenap laporan dan tulisan di media massa itu, analisis dan interpretasi untuk tulisan ini, menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.

dan seakan tak pernah absen di setiap aksi teror di Asia Tenggara. [2]

Hambali diduga kuat mempunyai peran penting dalam peristiwa berdarah Bom Bali 2002 yang menghancurkan Sari Club dan Paddy's Bar tanggal 12 Oktober 2002 yang menewaskan 202 orang, termasuk 88 warga negara Australia. Tiga penggerak utama peristiwa berdarah tersebut, Amrozi dan Mukhlas bersaudara dan Imam Samudra telah dihukum mati di Nusakambangan pada bulan November 2008.

Media melaporkan, Encep Nurjaman (atau dikenal dengan nama samaran Hambali atau Riduan Isamuddin, lahir di Sukamanah, Cibeber, Cianjur, 4 April 1966) adalah mantan pemimpin militer Jemaah Islamiyah, sebuah organisasi

---

[2] Rangkaian teror di Indonesia dipercaya dilakukan oleh duet gembong teroris Malaysia, Noordin M Top dan mendiang Dr Azahari. Meski demikian, mantan pemimpin Jamaah Islamiyah, Nasir Abas mengatakan keduanya datang dan beraksi atas undangan warga Indonesia, dan salah satu pengundangnya adalah Hambali. "Ini keinginan dari warga Indonesia. Hambali, Muklas [kakak kandung Amrozi] mengundang dan memindahkan mereka [Noordin dan Azahari] ke Indonesia," kata Nasir Abas kepada penulis dalam diskusi di Universitas Paramadina tahun 2008..

Kalangan Islam radikal (FPI) memiliki persepsi bahwa Agen-agen CIA bekerja dengan agen-agen nasional mempersiapkan sebuah operasi yang kemudian terkenal dengan bom Bali. Muncullah nama-nama Mukhlas, Imam Samudra, dan lainnya yang direkrut Hambali sebagai operator. Dan akhirnya terkuak bahwa ternyata Hambali bekerja dan dibiayai oleh Tgk Fauzi Hasbi bersama A Haris yang agen BIN. Kini, Tgk Fauzi sudah meninggal, A Haris tidak ketahuan rimbanya, sementara al-Farouk dan Hambali ditangkap pemerintah Amerika. Menurut kalangan FPI, fakta adanya bom besar yang terbuat dari RDX ataupun micronuc dengan daya ledak dahsyat yang beredar terbatas dan hanya dimiliki oleh negara-negara tertentu jelas menambah keyakinan adanya konspirasi tingkat tinggi dalam peristiwa bom Bali. Pemilihan Bali sebagai daerah sasaran yang sangat strategis untuk menarik perhatian dunia internasional adalah langkah strategis yang tidak mungkin terpikirkan oleh orang sekelas Hambali, Imam Samudra, ataupun Mukhlas. Sementara pemerintah Amerika telah memasukkan Jamaah Islamiyah sebagai sayap perjuangan al-Qaeda Asia Tenggara, yang konon dipimpin Hambali dan Abu Ba'asyir

berbasis Islam garis keras di Indonesia yang diduga kuat berhubungan dengan al-Qaeda.

Riduan Isomuddin alias Hambali menjadi satu-satunya warga Indonesia yang masih ditahan di penjara super ketat AS di Guantanamo, Kuba. Nasibnya bersama sekitar 165 tahanan lainnya menjadi perhatian dunia setelah 100 tahanan mogok makan sejak dua bulan lalu. Presiden Amerika Barack Obama, Selasa 30 April 2013, akhirnya kembali menyampaikan janjinya untuk menutup penjara itu. [3]

Menurut Pentagon, Hambali merupakan tahanan berisiko tinggi dan bernilai tinggi karena memiliki kedekatan dengan anggota senior al-Qaeda, memfasilitasi operasinya, dan dinilai bertanggung jawab atas beberapa pemboman di Asia Tenggara, termasuk bom Bali 12 Oktober 2002 yang menewaskan lebih dari 200 orang. Ia bertindak sebagai perencana operasional dalam beberapa serangan teroris. Ia memfasilitasinya dengan uang, personel, dan perlengkapan untuk al Qaedadan operasi Jemaah Islamiyah (JI)

Riduan Isomuddin memiliki banyak nama alias, di antaranya: Hambali, Encep Nurjaman, Mizi, Azman, Alejandro Davidson Gonzalez, Hendrawan, Kahar, Muzakkar, Halim Osmann, Samsuri, Daniel Suarez Naveira.

---

[3] Ridwan Isomudin alias Hambali sempat menjadi perhatian khusus Amerika merupakan satu-satunya tahanan asal Indonesia yang kini masih mendekam di Guantanamo Kuba. Meski saat ini operasionalnya sudah ditutup oleh Barack Obama, namun pria asal Pamokolan Kecamatan Karang Tengah, Kab. Cianjur itu masih mendekam di sel tahanan yang dihuni para tahanan yang tidak pernah divonis oleh pengadilan. Kondisi Hambali dalam kondisi yang cukup baik. Meski kasusnya belum pernah dipersidangkan, ia kini masih mendekam di sebuah sel di penjara Guantanamo Kuba. Aktivitasnya tidak jauh berbeda saat baru menghuni sel neraka itu. Lihat laporan *Pikiran Rakyat*, 19 Januari, 2016.

Pada tahun 1985, ia pindah ke Malaysia untuk bekerja dan menikah dengan perempuan setempat. Ia direkrut di masjid di Malaysia oleh Abdullah Sungkar. Ia menghadiri sesi belajar Islam dan ceramah dengan Abdullah Sungkar dan organisasinya selama kurang lebih enam bulan. Ia menyebut istilah ″dicuci otak″ untuk menggambarkan pelajaran yang ia terima dan itu meyakinkan dia untuk berjihad. Pada akhir masa belajarnya, pemimpin kelompok memilihnya untuk berlatih di Afghanistan.[4]

Pada akhir 1986, ia melakukan perjalanan ke Peshawar, Pakistan. Dari sana, ia melakukan perjalanan ke Camp Sada di Afghanistan untuk mengikuti pelatihan. Ia di Afghanistan dan Pakistan selama kurang lebih satu setengah tahun, untuk mengikuti pelatihan dan bertempur dan kembali ke Malaysia pada tahun 1988.

Setelah kembali dari Afghanistan, ia melakukan perjalanan ke seluruh Asia Tenggara dan mempromosikan ekstrem-isme. Sepanjang tahun 1990, ia mengembangkan hubungan Jemaah Islamiyah dan kelompok Islam lainnya. Pada pertengahan tahun 1991, Hambali melakukan perjalanan dari Malaysia ke Filipina untuk melakukan dakwah. Selama perjalanannya, ia mengunjungi camp Abu Bakar Front Pembebasan Islam Moro (MILF). Pada pertengahan tahun 1997, ia dikirim oleh pimpinan Jemaah Islamiyah untuk bertemu dengan Rohingyan Solidaritas Organization (RSO) di Bangladesh untuk membahas kegiatan RSO.

Pada akhir tahun 1997, ia sekali lagi melakukan perjalanan ke Filipina untuk bertemu dengan anggota MILF, untuk meninjau kamp Abu Bakar. Tahun berikutnya, pelatihan JI

---

[4] Lihat laporan *Koran Tempo dan Tempo Interaktif,* Senin, 06 Mei 2013.

dimulai pada di sana.

Selama tahun 1998, ia ditunjuk sebagai pemimpin kelompok daerah JI, yang mencakup Malaysia dan Singapura. Pada pertengahan 1998, Hambali melakukan perjalanan lagi ke Thailand untuk bertemu dengan seseorang yang terkait dengan Jamaat Salafi. Tujuan kunjungan ini adalah untuk memperkenalkan JI dengan organisasi tersebut.

Pada awal 1999, ia melakukan perjalanan ke Kandahar, Afganistan, dan bertemu dengan Khalid Syaikh Muhammad, untuk membahas hubungan antara JI dan al-Qaeda, serta pembentukan pelatihan bagi anggota JI di Afghanistan.

Pada pertengahan-1999, ia bertemu lagi dengan kepemimpinan Jamaat Salafi, kali ini untuk membahas kegiatan militan di Thailand. Pada bulan September 1999, ia pergi ke Ambon, Indonesia, untuk mengumpulkan informasi untuk kepemimpinan JI mengenai konflik Islam-Kristen di Ambon.

Pada awal tahun 2000, ia pergi lagi ke Kandahar untuk mengunjungi anggota JI dari grup regionalnya yang melakukan pelatihan di sana dan juga bertemu dengan Abu Hafs al-Masri alias Muhammad Ati. Pada Desember 2000, ia berwisata bersama Faiz Bafana ke Manila. Mereka bertemu dengan pelaksana operasi JI, Fathur Rahman al-Ghozi, mengenai rencana penyerangan.[5]

Setelah pemboman malam natal 2000 di Indonesia, ia menjadi buronan dan melarikan diri ke Malaysia dengan istrinya. Ia tiba di Kandahar melalui Karachi, Pakistan. Selama bulan Agustus 2001, Hambali dan Yazid Sufaat pergi

[5] Baca laporan CNN Indonesia, "Apa Kabar Hambali di Guantanamo?," *http://www.cnnindonesia.com/internasional/20141209163053-106-17012/apa-kabar-hambali-di-guantanamo/*

ke Karachi selama dua sampai tiga minggu untuk membeli peralatan laboratorium dan untuk mengunjungi saudaranya.

Mereka kembali ke Kandahar setelah serangan 11 September 2001. Pada bulan November 2001, ia dan istrinya meninggalkan Kandahar menuju Karachi, Pakistan. Mereka tinggal di wisma Abu Ahmad al-Kuwaiti selama dua minggu. Pada Desember 2001, ia dan istrinya berangkat Karachi menuju Thailand, melalui Sri Lanka.

Di Thailand, Hambali bertemu dengan anggota Jamaah Salafi. Ia kemudian melanjutkan perjalanan ke Malaysia, tinggal selama satu atau dua minggu, dan kemudian menuju Indonesia untuk mendapatkan dokumen baru. Pada Januari 2002, ia telah bergabung kembali dengan istrinya di Thailand.

Pada bulan September 2002, ia melakukan perjalanan ke Kamboja untuk empat sampai lima bulan untuk mendapatkan dokumen palsu. Pada bulan Februari atau Maret 2003, kembali ke Thailand melalui Kamboja. Hambali ditangkap pada 14 Agustus 2003 di Thailand, melalui operasi gabungan AS-Thailand. Ia dikirim ke Guantanamo pada 4 September 2006 dan masih di sana ketika tulisan ini diselesaikan.

Hambali di mata AS adalah tokoh gerakan fundamentalis yang tidak muncul begitu saja sebagai reaksi spontan terhadap gerakan modernisasi yang dinilai telah keluar terlalu jauh, tetapi lahir seiring dengan ditempuhnya cara ekstrim ketika jalan moderat dianggap tidak membantu.[6]

---

[6] Lihat, Karen Armstrong, *Sepintas Sejarah Islam,* terj. (Yogyakarta: Ikon Teralitera, 2002); dan Ismal Fahmi Panimbang, "Geopolitik Islam vis-à-vis Barat:, Perspektif tentang Fundamentalisme Islam," *Jurnal Pemikiran Islam,* Vol.1, No.3,

Fundamentalisme Islam dengan demikian hanya salah satu jenis dari fenomena global yang baru dalam politik internasional dengan masing-masing latar belakang lebih pada ideologi politis. Dalam pandangan Bassam Tibi, fundamentalisme merupakan gejala ideologis dari ide *clash of civilizations* (benturan peradaban). Gejala ini bukan disebab-kan krisis yang melanda dunia saat ini, tetapi lebih-lebih muncul baik dari ekspresi krisis tersebut maupun respon atasnya.[7]

Hambali menyangkal terkait dengan al-Qaeda saat ia menjadi anggota JI. Bantahan ini berdasarkan transkrip yang dirilis penguasa keamanan AS di Pentagon atas pertanyaan kepada Hambali yang dilakukan oleh komisi militer di Guantanamo. [8]

Masalahnya, banyak pihak, termasuk penulis, masih mempertanyakan: Benarkah Hambali yang orang Sunda kampung yang polos, tidak fasih berbahasa Inggris dan Arab itu merupakan "gembong teroris" di Asia Tenggara? Ataukah ia hanya "aktor wayang" dari kepentingan AS? Ataukah dia hanya hasil rekayasa AS seolah-olah teroris besar "big fish," meski sebenarnya ia hanya "small fish" yang direkayasa Amerika untuk kepentingan AS sendiri sedemikian rupa?

Ceritanya dimulai dari sini: Di persidangan bom Bali terbukti bahwa Hambali menjadi koordinator lapangan dan penyandang dana peledakan bom Bali. Pertanyaan dari publik: Mungkinkah Hambali yang hanya seorang penjual kebab dan asongan itu mendapatkan dana besar untuk membeli berbagai jenis bahan bom dan biaya operasi yang

---

September 2003, International Institute of Islamic Thought Indonesia.

[7] Bassam Tibi, *The Challenge of Fundamentalism: Political Islam and the New World Disorder* (Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1998), h.2.

[8] Laporan *Republika*, 14 April 2007.

tentunya sangat mahal? Tentu "proyek terorisme" ini memiliki sponsor yang kuat sebagai penyandang dana. [9]

Dari sini keganjilan dimulai: Beberapa orang yang pernah ditemui dan diajak singgah di rumah Hambali, mengungkapkan bahwa Hambali sangat sederhana, sebuah kamar dengan ruang tamu berukuran 3x4, tanpa kursi tamu ataupun TV. Dia memperkenalkan istrinya seorang muallaf keturunan Cina dari Sabah. Hambali sendiri tidak memiliki mobil seperti beberapa tetangganya yang digunakan untuk berdagang.

Jika dihubungkan lebih jauh dengan beberapa keganjilan bom Bali, maka makin jelaslah duduk perkaranya. Misalnya bom jenis apakah yang telah meledakkan Sari Club? Ada yang bilang RDX, TNT, dan mantan Kepala Bakin, ZA Maulani, dengan tegas menyatakan bahwa bom yang meledak sejenis micronuc (nuklir mikro). Namun, para pelaku mengaku meracik bom dari belerang dan potasium nitrat, bahan untuk membuat petasan. Lalu, mereka dihukum tanpa diberikan kesempatan untuk merekonstruksikan perbuatan mereka, terutama dalam meracik bom yang menimbulkan daya ledak amat dahsyat. [10]

---

[9] Pemerintah AS kabarnya tidak akan menyerahkan gembong teroris Hambali ke pemerintah Indonesia. Hal ini diungkapkan sumber-sumber kepolisian antiteroris Indonesia seperti dilansir harian Australia, *Sydney Morning Herald*, Sabtu (7/3/2009). Menurut sumber-sumber senior tersebut, AS telah menegaskan bahwa mereka tidak akan menyerahkan Hambali setelah penjara Guantanamo ditutup. Hambali kemungkinan akan dipindahkan ke sebuah penjara di AS. Sebab Hambali merupakan satu dari 14 tahanan "bernilai tinggi". Sebelumnya harian Singapura, *Straits Times* memberitakan, otoritas AS telah mengizinkan pejabat antiteroris Indonesia menemui dan mewawancarai Hambali di Guantanamo. Pertemuan itu terjadi berdekatan dengan kunjungan Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton ke Jakarta. Selama ini pemerintah AS selalu menolak permintaan Indonesia untuk mewawancarai Hambali.

[10] Ini sebagian dari kesaksian Hilmy Bakar Almascaty, Ketua DPP Front

Bahkan salah seorang pelaku, Imam Samudra, melalui pengacaranya, menyatakan kekagetannya atas ledakan yang ditimbulkan bom buatannya. Sementara tim independen MUI yang dibentuk tidak pernah mengeluarkan hasil investigasinya, padahal dianggotai oleh pakar-pakar yang kridibel. Belum lagi jika dihubungkan dengan salah seorang waitress (pelayan) Sari Club yang bernama Kadek. Dalam wawancara dengan pers, dia mengaku melihat seorang bule meninggalkan bungkusan di bawah meja beberapa saat sebelum bom meledak. [11]

Akhirnya Kadek dievakuasi paksa ke Australia dengan alasan medis, padahal dokter mengatakan, dia cukup dirawat di Bali. Akhirnya, Kadek pulang sudah dalam bentuk abu setelah dikremasi. Yang lebih fantastis, para pelaku bom diketahui dalam waktu singkat. Padahal, konon, mereka teroris profesional. Sedangkan untuk mengungkap dan menangkap pelaku bom di berbagai tempat lain di Indonesia, Polri membutuhkan waktu panjang. Ada apa di balik semua ini? Di Malaysia Hambali memang dekat dengan para pelaku bom Bali, baik Mukhlas ataupun Imam Samudra.

Untuk itulah kemudian Hambali, "urang Sunda" yang tak lain sang penjual kebab yang polos ini dicitrakan sebagai direktur operasional al-Qaeda Asia Tenggara yang memiliki sumber dana tak terbatas. Kalau memang Hambali seorang teroris sejati, hidupnya tidak seperti penjual asongan, dia

---

Pembela Islam mengisahkan siapa Hambali yang dikenalnya menurut perspektif dirinya di koran *Republika*. Baca laporan *Republika*, "Hilmy Bakar Almascaty Mengungkap Kemisteriusan Hambali," *Republika*. 26-/27 Maret 2004.

[11] Laporan *Republika*, "Hilmy Bakar Almascaty Mengungkap Kemisteriusan Hambali"

pasti akan hidup seperti Abu Nidal, pemimpin sayap perjuangan PLO yang setiap minggu ganti wajah dan hidup dalam persembunyian dari satu negara ke lainnya, yang tidak seorang pun dapat mengenalnnya.

Dengan dana yang besar, buat apa Hambali repot-repot jual kebab dan tinggal di rumah kontrakan yang dekat dengan rumah Ustad Ba'asyir? Itu berbagai misteri dan pertanyaan yang menyelimuti Hambali.

Lantas, mungkinkah pergaulannya adalah bagian dari sebuah rencana terselubung? Atau, dia hanyalah korban jahat sebuah konspirasi kejahatan internasional karena kepolosan dan keluguannya? Hal itu mungkin untuk penyamaran! Tapi tambah bodoh lagi kalau dia hanya menyamar dengan cara seperti itu. Pribadi Hambali yang terkesan polos dan berpenampilan ala Mujahidin yang lengkap dengan jenggot dan baju panjang Afghan, sama sekali jauh dari citra seorang teroris profesional yang berbahaya. Bahkan ketika rumahnya mau digrebek, sebenar-nya Hambali ada di sekitar sana, tapi akibat kebodohan polisi dan kepolosan polisi Malaysia yang tidak berani bertindak tanpa surat izin, Hambali dapat kabur saat itu. Tapi itulah misteri Hambali, yang kini masih tahanan di Guantanamo. Seorang tetangganya sempat menasihati dan memberikan sangu kepada Hambali ketika mau melarikan diri dari penangkapan aparat polisi Malaysia. Justru kaburnya Hambali secara misterius semakin menguak jati dirinya yang polos. Konon, sebenarnya sebelum ditangkap, Hambali sudah disimpan dulu untuk tujuan tertentu, dan tunggu jadwal untuk diumumkan sebagaimana yang terjadi

pada Fathurrahman al-Ghozi. [12]

Tak hanya dipercaya sebagai otak Bom Bali, Hambali juga dituding merancang teror di negeri jiran, meledakan Jembatan Johor dan menebar teror di Bandara Changi, Singapura dengan plot serupa dengan pengeboman menara kembar World Trade Centre 11 September 2001, membajak pesawat dan menabrakannya ke area bandara. Tapi sebelum aksi di Singapura itu tercapai, Hambali keburu dibekuk di Thailand.[13]

Akibat agenda dan aksinya yang "mengejutkan" itu, oleh badan intelijen Amerika Serikat (CIA), Hambali disebut-sebut sebagai 'Osama Bin Laden' Asia Tenggara.

Teroris Kelas Global Atau Kelas Lokal?

Sebagai seorang teroris legendaris di Asia Tenggara, Hambali mungkin menyadari bahwa dirinya dipandang "sangat berbahaya" oleh dunia internasional. Karena kebesaran namanya sebagai teroris. *Wikileaks*, misalnya, membocorkan dokumen rahasia 700 tahanan Guantanamo, termasuk di dalamnya Syaikh Hambali Hafizahullah. Dokumen yang memuat Hambali sebanyak 12 lembar.

Dalam foto terbaru yang berlatarbelakang biru itu wajah Hambali tampak lebih tua dibanding foto dirinya yang beredar luas selama ini. Satu ciri yang khas adalah bibir tebalnya. Hambali tampak mengenakan baju tahanan ber-

---

[12] Laporan *Republika*, "Hilmy Bakar Almascaty Mengungkap Kemisteriusan Hambali"

[13] . Aksi Hambali dihentikan pasukan CIA dan Kepolisian Thailand pada 11 Agustus 2003. Sebanyak 22 pasukan berpakaian preman mendobrak apartemen Ayutthaya, menahan Hambali dan istrinya. Saat ditangkap, Hambali tak memakai jubah. [13]

warna putih. Janggut tebal dan kumis memenuhi wajahnya.

Dalam dokumen itu disebutkan Hambali berkewarga-negaraan Indonesia lahir pada 4 April 1964 di Cianjur. Setelah ditangkap otoritas AS di Thailand, Hambali tercatat sudah 4 tahun 7 bulan dan 21 hari menghuni Guantanamo sejak tiba pada 4 September 2006 dengan nomor registrasi tahanan US9ID-010019DP

Dokumen itu menyingkapkan bahwa Syaikh Hambali adalah anggota senior JI yang memiliki hubungan dan akses langsung dengan anggota senior al Qaeda, memfasilitasi sejumlah operasi al-Qaeda di Asia Tenggara, dan bertang-gungjawab atas aksi Bom Bali 12 Oktober 2002 yang menewaskan 200 orang termasuk warga negara AS.

Hambali juga dikenal dekat dengan Syaikh Usamah Bin Laden. Begitu penting dan vitalnya Hambali dalam kaitan terorisme di Indonesia, sampai-sampai Sydney Jones pernah mendesak AS agar Pemerintah Indonesia memperoleh akses untuk ikut memeriksa Hambali. Akses ini untuk mencegah skeptisisme di kalangan masyarakat Indonesia.[14]

Menurut Sidney, bagaimanapun juga akses pemeriksaan secara langsung terhadap Hambali harus diberikan. Dia berharap soal ini akan ditanyakan oleh Pemerintah Indonesia atau tokoh-tokoh masyarakat yang akan bertemu Presiden AS George Bush di Bali, 22 Oktober 2002.

Mengenai maraknya isu bahwa Hambali bukanlah sosok yang nyata dan hanya rekaan AS belaka, Sidney sendiri secara tandas membantahnya. Dia yakin itu Hambali, karena AS tidak begitu bodoh menangkap orang yang bukan Ham-

[14] Laporan *Tempo,* "Sidney Jones: Indonesia Harus Diberi Akses ke Hambali," *Koran Tempo* Jumat (17/10/2003).

bali dan bilang itu Hambali.[15]

Direktur Eksekutif Ma'arif Institute, Dr. Moeslim Abdurrahman, pada Oktober 2002 juga meminta agar persoalan Hambali ini dijernihkan. Sebab harus ada bukti-bukti sehingga masyarakat yakin bahwa Hambali benar-benar ada.

Dalam kaitan ini, di Jakarta, polisi terus berupaya membuktikan aliran dana dari Hambali dan kawan-kawan untuk membiayai aksi teror di Indonesia.

Ada aliran dana yang dikirim Hambali sebesar USD45 ribu, yang ketika itu belum dapat dipastikan untuk membiayai pengeboman di Jakarta, termasuk Marriott. Dari keterangan beberapa tersangka yang ditangkap, belum ditemukan bukti kuat yang menyebutkan keterkaitan antara dana yang dikirim Hambali dengan bom Marriott. [16]

Hambali adalah tersangka utama bom Natal tahun 2000 era kepresidenan Gus Dur, bom Atrium Senen dan bom Bali. Saat bom Natal, Hambali sebenarnya masih berada di Cianjur, namun polisi terlambat mengejarnya sehingga Hambali berhasil kabur ke Malaysia. Di sana Hambali menyamar sebagai tukang kain, kemudian kabur lari ke Timur Tengah, Pakistan dan Bangkok.

Dalam rapat JI di Bangkok yang dipimpin Hambali sebenarnya belum menyebut secara spesifik sasaran pengeboman di

---

[15] Perlu diketahui, kekecewaan pemerintah Amerika terhadap sistem peradilan di Indonesia rupanya tidak main-main. Deplu dan Polri telah menerima 125 berkas bukti baru yang dikirim otoritas AS mengenai keterlibatan Hambali dan Abu Bakar Ba'asyir dalam berbagai aksi terorisme. Kebanyakan bukti baru yang disodorkan itu dari cuplikan transkrip pemeriksaan terhadap Hambali oleh aparat intelijen Amerika. Konon kabarnya berkas tersebut tengah diselidiki dan didalami oleh pihak terkait.

[16] Keterangan Kabareskrim Komjen Polisi Erwin Mapaseng, dimuat *Kompas* dan *Koran Tempo*, sepanjang Oktober 2002

Bali. Waktu itu hanya disebutkan akan melakukan aksi teror di wilayah Mantiki dua yakni Sumatera, Jawa dan NTB, namun pada tanggal 12 Oktober 2002 Bali meledak.

Kepentingan pemerintah menghadirkan Hambali di Indonesia, selain untuk mempertanggungjawabkan keterlibatannya dalam kasus bom, juga untuk mengorek rencana kelompok Hambali pada aksi teror berikutnya.

Situs pembocor dokumen rahasia WikiLeaks juga mengungkapkan sasaran serangan Hambali di Indonesia meliputi perusahaan Amerika, seperti Caltex dan ExxonMobil yang beroperasi di Selat Malaka, sebuah tambang emas, dan Kedutaan Besar Amerika di Jakarta. Kedutaan Besar AS di Jakarta, misalnya, direncanakan diserang dengan menggunakan helikopter pada 1999.

Situs yang membocorkan dokumen rahasia Departemen Pertahanan Amerika bernomor US9ID-010019DP ini juga mengungkap bahwa Hambali pada mulanya tak merencanakan mengebom Kuta, Bali. Ia mendapat dana USD83 ribu dari al-Qaeda lima bulan setelah serangan 11 September 2001. Saat bertemu dengan pemimpin JI di Bangkok, dana itu direncanakan dipakai untuk menyerang kepentingan Amerika yang berdampak finansial besar: kilang minyak Caltex dan Exxon Mobil di Selat Malaka.

Hambali kemudian mengontak Dr. Azhari, pakar bom asal Malaysia. Tapi, Azhari bilang operasi itu sulit dan Bali pun dipilih. Setelah sukses, dokumen itu menyebutkan al-Qaeda kemudian mengirim duit USD130 ribu ke JI sebagai imbalan dan bantuan dana untuk serangan berikutnya. Setahun kemudian, dana USD100 ribu dikirimkan dari Pakistan untuk operasi pengeboman Hotel JW Marriott dan Kedutaan

Besar Australia di Jakarta.

WikiLeaks menyebut otak Bom Bali I pada 12 Oktober 2002 itu terhitung sebagai tahanan yang kooperatif dan memberikan informasi secara sukarela kepada para interogator. Namun, jika dilepas tanpa rehabilitasi dan pengawasan ketat, menurut dokumen ini, dia diduga akan mencoba terlibat kembali dengan para aktivis ekstrem.

Hambali digambarkan sebagai perencana operasional dalam beberapa serangan teroris. Ia juga mendanai serta menyuplai personel dan perlengkapan operasi al-Qaeda dan JI. Dari keterangan Hambali inilah hubungan antara al-Qaeda dan JI, yang telah lama dispekulasikan, terjawab.

Hambali menuturkan tumbuh di Cianjur, lalu pergi ke Malaysia pada 1985. Di negara ini dia direkrut Abdullah Sungkar, pria yang mendirikan JI dengan Abu Bakar Baasyir. Sungkar mendidiknya enam bulan dan membujuknya berjihad. Konon, Hambali tak menunjukkan penyesalan atas apa yang ia lakukan.

Selama ditahan AS, Hambali masih rajin mengirim surat kepada keluarganya. Menurut adik Hambali, Kankan, isi surat Hambali di antaranya bercerita tentang kondisi kesehatannya. "Dia bilang baik-baik saja dan sehat wal afiat. Kalau soal keadaan di sana, dia tidak cerita," kata Kankan.

Konon pada setiap perayaan hari besar, Hambali memang tak pernah absen mengirimkan ucapan selamat. Namun, karena proses administrasi, ucapan selamat tersebut datangnya tidak tepat waktu.[17]

[17] *Associated Press*, Sabtu 16 Januari 2010, "Karena proses administrasi, kartu ucapan selamat Lebaran pada tahun 2007 misalnya, bisa baru sampai tahun 2008,"

Pemerintah AS belum menentukan kapan pastinya pengadilan atas Hambali akan digelar.

Kantor berita AS juga menyebutkan, aparat keamanan AS sibuk mempersiapkan sistem keamanan di Washington menjelang proses pengadilan.

Menggelar pengadilan terhadap anggota teroris yang dianggap berbahaya di Ibukota AS ini, mencerminkan penolakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden AS sebelumnya, George W Bush.

Pemerinta Bush yang menganggap penangkapan Hambali sebagai keberhasilan besar dalam perang melawan teroris, lebih memusatkan proses penanganan dan penyelidikan terhadap anggota teroris di luar wilayah AS.

Kontroversi: AS, Thailand dan RI Silang Pendapat

Tanggal 11 Agustus 2003, Riduan Isamudin (39) alias Hambali ditangkap di Ayutthaya, sebuah kota kecil sekitar 80 kilometer utara Bangkok. Tiga hari kemudian, Presiden George Walker Bush mengumumkan keberhasilan penangkapan itu.

Hambali dianggap "big fish" dalam aksi teror di Asia Tenggara yang mengganggu kepentingan Amerika dan ASEAN sendiri.

Tak mengherankan bila dalam pidatonya di pangkalan angkatan udara Amerika Serikat (AS) dekat San Diego (14/8/2003), Bush mengatakan, aparat keamanan AS, bekerjasama dengan pemerintah setempat, berhasil menangkap Hambali di salah satu negara di Asia Tenggara. Hambali

kata Kankan, adik Hambali.

lalu segera diterbangkan ke salah satu tempat di bawah pengawasan AS. "Hambali adalah salah satu teroris paling berbahaya di dunia," kata Bush.

Dan esok harinya Pemerintah Thailand bereaksi. Menteri Pertahanan (Menhan) Thailand Thamarak Issarangkun Na Ayutthaya mengadakan jumpa pers. Tanpa menyebut AS, ia mengungkapkan keberhasilan aparat keamanan Thailand menangkap Hambali. "Hambali sudah dikirim ke Indonesia karena keterlibatannya dalam banyak kasus kriminal di sana," ujarnya.[18]

Pemerintah Indonesia terperanjat dan membantah pernyataan Menhan Thailand. Kepala Polri Jenderal (Pol) Da'i Bachtiar mengatakan tidak mengetahuinya. Namun banyak pihak berpendapat, dalam jumpa pers yang dihadiri wartawan asing, Menhan Thailand pastilah tahu membedakan AS dengan Indonesia. Lagi pula penjelasannya sangat masuk akal, yakni Hambali dibutuhkan Pemerintah Indonesia karena terlibat berbagai tindak kriminal. Selain itu, Menhan Thamarak tidak meralat pernyataan deportasi Hambali ke Indonesia.

Pemerintah Malaysia dan Singapura juga mengadakan jumpa pers sekitar penangkapan Hambali. Kedua pemerintah mengatakan, Hambali ditangkap atas informasi intelijen yang disampaikan kedua negara ini ke Pemerintah Thailand.

Lantas, mengapa tiga negara tersebut sampai perlu memberi penjelasan yang versinya berbeda dengan apa yang dikemukakan Presiden Bush? Apakah Presiden Bush berbohong?

---

[18] Laporan *Kompas*, 17/10/2003.

Barangkali hanya Hambali yang dapat menjawabnya. Menteri Luar Negeri (Menlu) Hassan Wirajuda menyatakan, Presiden Bush sudah menelepon Presiden Megawati Soekarnoputri menginformasikan tertangkapnya Hambali. Bush berjanji akan membuka akses seluas-luasnya akses bagi Pemerintah RI untuk memperoleh pengakuan Hambali.

Namun, jangankan bertemu Hambali, lokasi penahanan Hambali pun dirahasiakan oleh AS. Tadinya disebut-sebut di Guantanamo, kemudian di AS, setelah itu Bagram (Afganistan), terakhir di sebuah pulau yang diawasi AS dan Inggris. Ketertutupan demikian memperkuat kecurigaan selama ini atas keterlibatan CIA merekrut teroris.

Tangan kanan Hambali di Malaysia, Yazid Sufaat, misalnya, disebut-sebut direkrut agen intel Inggris, MI-6. Atas perintah Hambali, mantan kapten angkatan darat Malaysia ini menyediakan fasilitas akomodasi bagi dua pembajak serangan 11 September 2001, Nawaf al-Hazmi dan al-Midhar, ketika hadir dalam pertemuan di Kuala Lumpur, Malaysia, Januari 2000. Sufaat ditangkap Desember 2001. Pemerintah Malaysia menolak ekstradisinya ke AS.

Lepas dari kemungkinan itu, beberapa kali utusan Pemerintah RI, termasuk Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Susilo Bambang Yudhoyono dan Kepala Polri Da'i Bachtiar pada 2003-2004 berangkat ke AS untuk membicarakan realisasi akses terhadap Hambali, hasilnya tetap saja nihil. Lagi-lagi janji tinggal janji. Sekarang yang sisa hanya kegelisahan, menunggu kapan Presiden Bush berbaik hati menepati janjinya.

Inilah perang melawan terorisme yang digembar-gemborkan AS. Perang yang disebutnya menuntut kerjasama antar-

negara, keterbukaan informasi, dan akuntabilitas. Lantas ketika Presiden Megawati mengikuti anjuran tersebut, kita pun mirip pariah. Mengemis untuk bertemu Hambali.

Pada pekan ketiga September 2003, media internasional kembali memberitakan warga Indonesia ditangkap. Kali ini di Karachi, Pakistan. Mereka disebut-sebut sebagai jaringan Kelompok Jemaah Islamiyah (KJI). Jumlahnya masih simpang siur pada waktu itu.

Departemen Luar Negeri (Deplu) dan Departemen Dalam Negeri (Depdagri) Pakistan membantah mahasiswa Indonesia ditangkap. Mereka hanya dimintai keterangan dan segera akan dideportasikan ke Indonesia. Anehnya, pejabat di dua departemen itu sempat membantah bahwa Rusman Gunawan (26) alias Gun Gun alias Abdul Hadi adalah adik Hambali. Lebih tidak masuk akal, tadinya disebut penahanan dilakukan tanggal 20 September 2003. Namun, setelah pers melakukan investigasi, tanggal tersebut berubah dan diakui menjadi 1 September 2003, atau berbeda 20 hari.

Pakar terorisme internasional dan analis intelijen asal India, B Raman, menulis paper No 749, *Hambali's Brother: Another Tell-Tale Arrest,* dalam *South Asia Analysis Group (23/9/2003*). Dengan mengutip berita televisi Pemerintah Pakistan tanggal 21 September, Raman menulis, "*Badan Investigasi Federal (FIA) telah menahan 13 mahasiswa asal Malaysia dan dua asal Indonesia di Karachi, kemarin. Mereka terlibat dalam aktivitas yang bertentangan dengan kepentingan nasional Pakistan. Hal ini telah diinformasikan kepada pemerintah negara asal mahasiswa yang bersangkutan. Pemerintah Malaysia dan Indonesia telah*

mencabut izin belajar mahasiswa tersebut di Pakistan."[19]

Akan tetapi, esok harinya, tanggal 22 September, surat kabar di Pakistan mengutip berita-berita dari Jakarta, "Pemerintah Indonesia telah mengirimkan nota protes kepada Pemerintah Pakistan atas penahanan dua mahasiswa yang diduga terkait aktivitas Islam militan."

Sementara itu, Direktur National Crisis Management Cell yang berada di bawah Depdagri Pakistan, Brigjen Javed Cheema, mengatakan, "Penahanan itu atas permintaan pemerintah negara asal mahasiswa, yang menghendaki mereka dideportasikan. Sebab, mahasiswa ini mempunyai informasi yang lebih baik untuk menjelaskan jaringan Jemaah Islamiyah."

Rusman Gunawan dijemput polisi sebulan sebelumnya. Di kantor polisi Gulshan-e-Iqbal, Rusman Gunawan diinterogasi seorang kolonel tentara dan kemudian dibawa ke suatu tempat yang dirahasiakan. Sejak itu tidak ada kabar beritanya. Rusman Gunawan kuliah di Pakistan sejak tahun 1999 atas beasiswa Pemerintah Pakistan.[20]

Menurut Yaqoob Tahir, tanggal 20 September beberapa orang berpakaian sipil dari Badan Investigasi Federal datang ke Abubakar Islamic University. Mereka minta dihadirkan enam mahasiswa, yang namanya disebut Ahmed Maaz, Muhammad razi, Amin, Akhwan, Firdous (semua asal Malaysia), dan Saifuddin (Indonesia).

---

[19] Baca laporan *Kompas* edisi 1-30 Oktober 2003

[20] Laporan surat kabar Pakistan, *The News* (23/9/2003), mengutip keterangan Yaqoob Tahir, staf administrasi Abubakar Islamic University, yang lokasinya di kawasan Gulshan-e-Iqbal, Karachi.

Sebelum memboyong mahasiswa, agen intel itu menjelaskan, pemerintah negara asal mereka memberi nama-nama tersebut kepada Deplu Pakistan dan minta mereka dideportasi ke negaranya.

Kita tidak tahu nasib warga negara Indonesia tersebut seandainya pers tidak membocorkannya. Namun, yang pasti, pejabat di Pakistan berjanji akan segera mendeportasikan para mahasiswa tersebut ke Indonesia. Dalam pertemuan dengan Presiden Megawati di New York, AS, Presiden Pakistan Pervez Musharraf mengucapkan janji yang sama. Namun, lagi-lagi janji hanyalah kata-kata.

Seiring dengan Hambali dan Gun Gun, pada hari Minggu (12/10/2003), sekitar pukul 20.00, giliran Fathur Rohman Al-Ghozi tewas ditembak aparat keamanan Filipina di kota kecil Pigkawayan, sebelah Provinsi Catabato Utara. Pemerintah Filipina mengatakan, Al-Ghozi tewas dalam kontak senjata. Pada saat itu pasukan khusus kepresidenan yang memburu pria asal Madiun, Jawa Timur, itu melakukan penyisiran dan menghentikan kendaraan yang ditumpangi Al-Ghozi. Aparat membalas tembakan yang lebih dulu dilepaskan Al-Ghozi.[21]

Warga memang melaporkan adanya letusan senjata. Namun ketika polisi tiba di sana, tidak tampak tanda-tanda terjadinya kontak senjata.[22]

Senator Ramon Magsaysay, Ketua Komisi Nasional untuk Pertahanan dan Keamanan, menyebut peristiwa ini mem-

[21] "Saya pastikan, tidak ada kontak senjata, tidak ada rentetan tembakan berbalasan," kata Inspektur Raulito Suyom, Kepala Kepolisian Pigkawayan, seperti dikutip surat kabar Singapura, *Strait Times* (14/10/2003).

[22] *Strait Times* (14/10/2003)

perkuat dugaan sebelumnya, Al-Ghozi sebenarnya sudah lama ditangkap pihak militer. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk dieksekusi.

Kalangan oposisi di Filipina menyebut, eksekusi Al-Ghozi hanya untuk cari muka kepada Presiden Bush yang akan singgah di Manila. Sementara kelompok oposisi lain mengatakan, eksekusi itu dimaksudkan agar Al-Ghozi tidak membeberkan nama penerima suap ketika ia melarikan diri dari ruang tahanan detasemen antiteroris di Markas Kepolisian Filipina, Camp Crame, 14 Juli 2003. Wakil Kepala Kepolisian Filipina sempat disebut-sebut di antara penerima suap.

Al-Ghozi divonis hukuman penjara 17 tahun atas pemilikan senjata api dan bahan peledak. Tadinya ia akan disidangkan berkaitan dengan peristiwa peledakan bom di di Manila tanggal 30 Desember 2002 yang menewaskan 22 orang dan ratusan lainnya cedera.

Al-Ghozi belum bisa dibuktikan terlibat dalam peledakan bom di Manila. Demikian pula Hambali maupun Gun Gun dalam jaringan al-Qaeda. Sebab, semuanya tertutup oleh kabut misteri dan di luar batas hukum. Aisyiah, anak pertama Al-Ghozi yang baru berusia 15 bulan, tidak akan pernah bertemu ayahnya lagi.

Dengan melihat deskripsi di atas, pada era informasi dewasa ini, kita menjadi buta dan hanya bisa meraba, siapa sebenarnya teroris versis AS, dan Barat? Apakah mereka yang mempertahankan identitasnya ataukah mereka yang mempertahankan kezaliman kekuasaannya? AS/Barat yang mungkin bisa secara pasti menjawabnya.

Hambali, Poso, Maluku dan Asia Tenggara

Tak dinyana bahwa Hambali ternyata memiliki jaringan yang mampu masuk dan berperan dalam konflik Maluku dan Poso sehingga konflik sosial berdarah-darah itu bukan hanya sekedar benturan kepentingan lokal dengan menggunakan instrumen kekerasan. Masuknya sukarelawan asing telah memberi dimensi international, pada konflik yang tadinya – menurut para pakar – terjadi akibat perubahan komposisi demografis dan politik.[23]

Sumber-sumber intelijen di media massa dalam maupun luar negri, sejumlah pria asal Afganistan, Pakistan, Timur Tengah, Afrika, dan Asia Tenggara, ikut bertempur di Maluku dan Poso. Mereka masuk ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta. Dengan manyaru sebagai pekerja sosial, mereka menyeberang ke daerah konflik.

Media memberitakan penangkapan Taufik Abdul Halim (26) alias Dhani alias Dodi, anggota KMM (Kumpulan Mujahiddin Malaysia), misalnya, yang pernah terjun di medan laga Maluku. Taufik di tangkap aparat polisi setelah bom yang diledakkannya di Plaza Atrium Senen, Jakarta Pusat, 1 Agustus 2001, mencederai kakinya, hingga perlu di amputasi. Polisi curiga setelah di sakunya di temukan kartu tanda penduduk Aceh.

Arsitek lulusan University of Technology MARA, Johor Bahru, Malaysia, ini mengaku sebagai pelaku peledakan bom di Gereja HKBP Jatiwaringin dan Gereja Santa Ana di Duren Sawit, Jakarta timur, 22 Juli 2002. Bom ini meledak hampir bersamaan, mencederai puluhan umat yang sedang

---

[23] Maruli Tobing, "Menangkap Pesan Teroris," *Kompas*, Oktober 2003. Baca juga, Muhtadin AR, "Menangkap Pesan Para Teroris," Kompas, 8 Agustus 2003.

beribadah.

Tidak lama setelah itu, Polri menangkap 13 orang dalam suatu penggrebekan di sebuah desa di Kabupaten Rangkas-bitung. Dari mereka disita delapan pucuk senjata laras pan-jang dan pendek. Didaerah ini para tersangka peledakan bom malam Natal 2000 membuka kamp latihan.

Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) AM Hendropriyono, pernah menyebut kamp latihan di Sulawesi tengah, melibatkan al-Qaeda. Pernyataan itu dikemukakannya usai sidang kabinet 13 November 2001, dan kontan mendapat reaksi dari beberapa kalangan..

Hendropriyono membantah pernyataannya sendiri akibat tekanan lobi kelompok garis keras. Sementara itu, media massa di luar negeri menyebut, ratusan teroris dilatih di kamp ini. Artinya, Hendropriyono bersikap realistis karena melihat situasi domestik masih panas.[24]

Kalau kita periksa, laporan Hendropriyono sebenarnya tidaklah mengada-ada sebab memiliki resonansi dan benang merah dengan kajian RAND Corporation. Sehari sebelum Hendropriyono mengeluarkan pernyataan kontroversial tersebut, atau tepatnya 12 Desember 2001, Angel Rabasa, peneliti senior RAND di Washington, tampil di depan Sub-Komisi Kongres AS untuk urusan Asia Timur dan Pasifik. Dengan kertas kerja berjudul *Southeast Asia After 9/11: Regional Trends and US Interests,* menyebut degradasi kondisi sosial-ekonomi akibat krisis, menyebabkan kawasan Asia Tenggara menjadi lahan subur bagi perkembangan jaringan terorisme international.

---

[24] Laporan *The New York Times* (10/3/2003).

Pada waktu itu tiga negara (Indonesia, Malaysia, dan Filipina) dilanda persoalan kebangkitan kelompok garis keras. Thailand juga tidak luput dari persoalan separatisme Pattani di wilayah selatan, yang berbatasan dengan Malaysia. Mereka angkat senjata untuk mendirikan negara Islam.

Dari hasil riset yang dilakukannya, Angel Rabasa mengungkapkan, terdapat suatu jalinan erat antar kelompok garis keras tersebut. Kaitannya dengan al-Qaeda juga jelas. Salah satu contoh ia merujuk kasus penangkapan delapan orang anggota al-Qaeda di Spanyol pada awal Desember tahun lalu. Seorang tersangka bernama Luis Jose Gallant Gonzales, alias Jusuf Gallant, mengaku kepada pemeriksa memperoleh pendidikan militer di sebuah kamp di Indonesia, Juli 2001. Kamp ini dioperasikan oleh al Qaeda.

Jusuf Gallant mengaku, kontak utamanya di Indonesia adalah Parlindungan Siregar alias Parlin, yang masuk dalam struktur salah satu organisasi kelompok garis keras.

Ketika Polisi menyerbu rumah Jusuf Gallant di Madrid, ditemukan sejumlah bahan peledak, senjata, pisau komando, rompi anti peluru, identitas palsu, dokumen perjalanan ke Indonesia, serta foto di suatu kamp di Indonesia.

Sementara itu laporan media massa lain menyebut, Parlin berkenalan dengan sejumlah aktivis al-Qaeda ketika melanjutkan kuliah di Spanyol. Parlin pula yang menemani salah satu tokoh al-Qaeda yang berkunjung ke Indonesia dan berkeliling ke beberapa provinsi tahun 2000. Utusan al-Qaeda ini membawa agenda membuka kamp latihan militer. Parlin kemudian menjadi komandan di kamp tersebut. Tapi berbagai pihak, termasuk keluarga Parlindungan Siregar,

membantah keterlibatan itu.

Hingga saat ini Pemerintah Malaysia sudah menangkap 47 anggota KMM dan JI, di antaranya tiga orang warga Indonesia. Di Singapura, polisi menangkap sedikitnya 13 anggota JI akhir Desember 2000. Kedua negara ini menggunakan Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri, yang memberi wewenang pada pemerintah melakukan penangkapan, tanpa harus melalui proses hukum.

Dari pengembangan hasil penangkapan ini pula diketahui, Fathur Rohman Al-Ghozy dan Abu Bakar Ba'asyir disebut sebagai pemimpin spiritual, atau pemimpin tertinggi. Sedangkan posisi eksekutif dipegang Hambali.

Namun, menurut versi Fathur Rohman Al-Ghozy, kekuasaan tertinggi berada di majelis syuro, yang anggotanya Mohammad Iqbal Abdul Rahman, Abu Bakar Ba'asyir, dan Hambali. Mohammad Iqbal alias Abu Jibril, mubaligh asal Lombok (NTB) yang mengungsi ke negara Jiran itu ditahan sejak Juni tahun lalu, setelah polisi Malaysia berhasil membongkar kasus perampokan bank dan pencurian senjata di gudang militer, yang melibatkan anggota KMM.

Dalam penggrebekan di rumah salah satu anggota KMM, polisi menemukan foto Hambali. Wajah di foto ini cocok dengan foto yang ditemukan di apartemen Ramzy Yousef di Manila tahun 1995. CIA menuduh Ramzy dan Wali Khan Amin Shah sebagai dalang serangan bom mobil di World Trade Center (WTC) New York tahun 1993.

Bom yang diledakkan di areal parkir di bawah bangunan tertinggi di dunia itu, menimbulkan kepanikan luar biasa, karena terjadi pada saat jam kerja. Lima orang tewas dan sekitar 100 cedera. Kegiatan di pusat keuangan dan saham

AS itu di hentikan hari itu.

Tadinya, Ramzy merancang bom yang berkekuatan lebih satu ton akan merubuhkan Gedung WTC. Runtuhannya akan menimpa gedung kembarannya, hingga keduanya rubuh. Impian Ramzy baru terwujud 8 tahun kemudian, melalui serangan 11 September. Saat ini, Ramzy sedang menjalani hukuman seumur hidup di AS.

Menurut Maruli Tobing dari *Kompas,* media massa di luar negri menyebut Abu Bakar Ba'asyir, pengasuh pondok pesantren Al-Mukmin, Ngruki, Sukoharjo (Jateng), sebagai Osama Asia Tenggara. Tapi, Ba'asyir berulangkali membantahnya melalui berbagai pernyataan, dan menyebut media tersebut sebagai terompet Yahudi dan Nasrani. Terakhir ia malah balik mengadukan Menteri Senior Singapura, Lee Kuan Yeuw, karena melakukan pencemaran nama baik.[25]

Pers melaporkan bahwa Ba'asyir sempat diperiksa polisi di Jakarta, berkaitan dengan aktivitasnya di Malaysia. Ia mengaku kenal dengan Muhammad Iqbal dan Hambali di berbagai pengajian. Selain itu Hambali adalah tetangganya di Selangor. Ba'asyir pernah di hukum penjara 19 tahun, karena menolak asas tunggal. Pada waktu banding hukumannya dikurangi menjadi 15 tahun. Namun baru empat tahun menjalani hukuman, ia diberi status tahanan rumah. Ba'asyir dan Abdullah Sungkar hengkang ke Malaysia tahun 1985.

Pers pun mengungkapkan, Abdullah Sungkar adalah pendiri pondok pesantren Al-Mukmin. Masih menurut penga-

[25] Laporan *The Washington Post*, (3/2/2002).

kuan yang didapat polisi Malaysia dan singapura, Ba'asyir bersama Muhammad Iqbal dan Hambali aktif dalam berbagai pengajian di Malaysia. Bahkan berhasil menarik anggota KMM. Ketiganya memprakarsai pembentukan JI sekitar tahun 1995. namun, di atas JI masih ada Daulah Islamiyah Nusantara (DIN), yang bertujuan menciptakan negara Islam di Asia Tenggara, meliputi Malaysia, Brunei, Filipina Selatan, dan Indonesia. Hambali dan Ba'asyir kemudian menempatkan kelompoknya ini dalam jaringan al-Qaeda.

Keterlibatan warga Indonesia dalam aktivitas terorisme International terdengar pertama kalinya setelah Agus H ditangkap di AS. Ia diduga memfasilitasi salah satu teroris, hingga bisa menetap di AS. Tapi, sebenarnya peran lebih dahsyat dimainkan oleh Hambali.

Dua pembajak – Khalid al Midhar dan Nawaf al Hazim – yang mencoba menghancurkan Pentagon dalam peristiwa 11 September, masuk ke Malaysia sekitar Januari 2000 sebagai tamu Hambali. Yazid Safaat, kepercayaan Hambali dan mantan kapten Angkatan Darat Malaysia, menyiapkan akomodasi di apartemennya. Khalid dan Nawaf tewas bersama pesawat terbang bajakannya, American Airlines bernomor penerbangan 77, setelah menabrak bangunan Pentagon.

Zacarias Moussaoui, Warga Negara Perancis, yang sedang menjalani proses hukum di AS, juga sempat singgah di Malaysia. Lagi-lagi Yazid menyiapkan akomodasi dan surat rekomendasi yang memudahkan Zacarias masuk ke Malaysia.

Jauh sebelum itu, menurut Maruli Tobing dari *Kompas*, Hambali juga berteman dengan Ramzy Jousef dan Wali Khan Amin Shah. Kedua pria ini dan Hambali pernah berencana meledakkan 12 pesawat penumpang sipil milik AS tahun 1994, sebagai lanjutan bom mobil di WTC tahun 1993. Polisi Malaysia lalu menangkap Wali Khan di Pulau Langkawi, kemudian menyerahkannya kepada pemerintah AS. Akan tetapi, persoalannya kemudian, apakah keterlibatan sejumlah orang itu dapat dijadikan alasan menarik kesimpulan, Indonesia sekarang menjadi sarang terorisme international ?

Dalam suatu jumpa pers di markasnya di Pejaten, Jakarta Selatan, juru bicara Darul Islam, Al Chaidar, menyebut tiga dari 14 faksi dalam tubuh DI, terlibat dalam berbagai aksi kekerasan. Termasuk pengeboman dan perampokan Bank BCA di jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat. Faksi ini mempunyai hubungan dengan intelijen militer, dan dibina sejak periode Ali Moertopo.[26]

---

[26] Menurut Maruli Tobing, wartawan Kompas, lepas dari semua itu, sejauh diartikan sebagai serangan terencana untuk menimbulkan efek psikologis dan pembentukan opini publik, semua tahu nyaris tidak ada negara di dunia ini yang luput dari aktivitas terorisme. Jika kemudian perkembangannya berskala international, ini hanyalah persoalan waktu, strategi, perencanaan, kualitas organisasi, dan sumber daya pendukungnya.

Tidak mengherankan jika di Afganistan juga ditemukan anggota al-Qaeda warga negara AS, Australia, Perancis, Inggris dan seterusnya. Mereka bahkan ikut bertempur melawan serangan pasukan koalisi Afganistan dan pasukan khusus AS. Kecuali ada kepentingan tersembunyi, kenyataan ini tidak dapat dijadikan kesimpulan bahwa negara asal milisi al-Qaeda itu telah menjadi sarang terorisme international.

Sebutan terorisme international memang amat sangat menyakitkan, karena membawa konsekwensi berbahaya, seperti halnya stigma komunis di masa silam. Itu sebabnya Pemerintah AS tidak gegabah segera mengirim pasukannya ke Indonesia. Akan tetapi, pembentukan opini international ke arah itu seharusnya menjadi peringatan bagi kita, bahwa pemerintah harus tegas dan konsisten menangani masalah ini.

Termasuk terhadap petinggi TNI/POLRI yang aktif maupun purnawirawan, yang memberi angin bagi munculnya aktivitas yang sangat membahayakan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. [*]

REFERENSI:

AR, Muhtadin, "Menangkap Pesan Para Teroris," Kompas, 8 Agustus 2003

Armstrong, Karen, *Islam A Short History* (*Sepintas Sejarah Islam*), (Yogyakarta: Ikon Teralitera, 2002)

Barry, Robert L., "Benturan Peradaban atau Persatuan dalam Keanekaragaman?" *Kompas*, 4 Oktober 1993

Falaakh, M. Fajrul, "Harmoni Antarperadaban: Pertemuan Inklusif," *Kompas*, 15 November 1993.

Huntington, Samuel P., *The Clash of civilizations and the Remaking of World Order* (London: Simon & Schulster, 1996).

Naisbitt, John, *Global Paradox* (New York: Avon, 1994).

Panimbang, Ismal Fahmi, "Geopolitik Islam vis-à-vis Barat: Perspektif tentang Fundamentalisme Islam," *Jurnal Pemikiran Islam,* Vol.1, No.3, September 2003, International Institute of Islamic Thought Indonesia.

Pfaff, William, "The Clash of Civilizations is for Historys Dustbin," *International Herald Tribune*, Oktober 18, 2001.

Tibi, Bassam, *The Challenge of Fundamentalism: Political Islam and the New World Disorder* (Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1998).

Tobing, Maruli, "Menangkap Pesan Teroris," *Kompas*, Oktober 2003.

ISLAM DAN RADIKALISME: DARI AYAT SUCI SAMPAI ALLAHCRACY [1]

Pasca jatuhnya Orde Baru Soeharto 1998, pelbagai gesekan sosial yang konfliktual di kalangan internal Islam makin sering terjadi, terutama menyangkut maraknya radikalisme agama. Gesekan sosial itu seyogianya menjadi kepedulian dan keprihatinan para cendekiawan di Indonesia, khususnya cendekiawan Islam. Pelbagai masalah internal Islam itu perlu dipecahkan dan untuk itu, sungguh dibutuhkan dialog dan *public deliberations* dengan kelapangan jiwa, sanubari dan akal budi agar –meminjam Karen Amstrong- "*Islam tidak dibajak oleh para pengikutnya sendiri,*" yang menyimpang jauh dari pinsip-prinsip Piagam Madinah. [2]

---

[1] Artikel ini ditulis oleh Herdi Sahrasad bersama Dede Rodin LC MA, dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. Dede Rodin adalah alumnus Universitas Al Azhar Mesir dan UIN Sunan Gunung Djati, Bandung.Terimakasih atas sumbangan pemikirannya yang tentu bernilai bagi buku ini.

[2] Herdi Sahrasad, "Jangan Lupakan *Radikalisme Agama,*" *Koran Tempo*, opini, Kamis, 22 Juni 2006.

Persoalan internal Islam di Indonesia selama ini lebih sering disebabkan oleh perbedaan penafsiran, yang bertalian dengan konflik kepentingan dan politik. Sekedar misal, insiden pengusiran mantan presiden Abdurahman Wahid oleh kelompk Islam radikal dalam suatu pertemuan di Purwakarta dan pro-kontra RUU Antipornografi dan Porno-aksi pada era pemerintahan SBY-Kalla 2004-2009, yang telah menimbulkan gesekan sosial, sesungguhnya mencerminkan suasana dalam tubuh bangsa kita yang ditandai dengan kian memudarnya semangat inklusifitas dan toleransi di kalangan umat Islam sendiri. Sementara, radikalisme dan intolerasni agama menguat tajam.

Pelbagai kelompok Islam radikal yang ekspresif dan arti-kulatif seperti Front Pembela Islam (FPI), Majlis Mujahidin Indonesia (MMI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Jemaah Islamiyah dan jaringannya, mungkin tidak menyadari bahwa kehadiran mereka telah mencemaskan dan menakut-kan banyak pihak. Pada beberapa tahun lalu, kelompok Ahmadiyah, Islam Jama'ah (LDII), Jaringan Islam Liberal (JIL) serta Pusaka, sebuah LSM pendukung pluralisme yang berkantor di Padang, telah diserang atau diintimidasi atau dinyatakan "sesat" oleh kelompok-kelompok Islam radikal itu. Bahkan kelompok-kelompok Muslim radikal ini tak hanya menyerang "kelompok sesat" dalam lingkungan Islam sendiri, mereka juga menutup secara sepihak puluhan gereja di Jawa Barat dengan alasan tak memiliki ijin resmi.

Pasca jatuhnya Orde Baru Soeharto, dua strategi gerakan radikal Islam ini menjadi penting ketika rezim yang berkuasa memberikan angin segar kebebasan setelah lama gerakan Islam dipinggirkan secara politik oleh rezim Orde

Baru itu. *Strategi pertama* melalui jalur kepartaian dan *strategi kedua* membentuk ormas-ormas Islam yang memperjuangkan syariat Islam melalui jalur kultural; dakwah Islam dan aksi unjuk rasa, baik ke parlemen maupun ke istana negara.

Kolaborasi ini tampaknya menjadi kekuatan yang cukup signifikan untuk melakukan perubahan secara bertahap di dalam sistem sosial dan kenegaraan bangsa Indonesia. Pada gilirannya, atribut, slogan, dan nama-nama Islam begitu ramai diteriakkan sebagai bagian dari pentas kekuatan dan panggung pergulatan.

Pergerakan Islam radikal memang sedang merambah ke wilayah-wilayah yang berpenduduk mayoritas Muslim di seluruh dunia. Indonesia, Filipina dan Malaysia, yang secara statistik berpenduduk mayoritas Muslim telah mengalami gejala globalisasi Islam radikal. Realitas ini dapat dilihat dari perkembangan kelompok Abu Sayyaf pimpinan Abu Bakar Janjalani di Filipina, Laskar Jihad dan Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin, Ikhwanul Muslimin, dan lain sebaginya di Indonesia, dan Kelompok Mujahidin Malaysia (KMM) sebuah organisasi di bawah payung PAS di Malaysia. Mereka dianggap telah mengembangkan operasi selama beberapa tahun terakhir, menghimpun dana, melatih milisi, materi dan pengalaman untuk melawan Barat dan kekuatan sekuler, di samping memperjuangkan Islam secara radikal.

Kebangkitan Islam sendiri menurut Gilles Kepel (1996) merupakan bagian dari gerakan bawah tanah guna mengislamkan kembali kehidupan dan tradisi keseharian dan mengorganisasikan kembali eksistensi individual sesuai dengan ajaran Kitab Suci.

Studi Hermann Frederick Eilts (1987) menunjukkan bahwa, kebangkitan Islam dimulai semenjak lengsernya Shah Iran Reza Pahlevi, yang kemudian ditandai dengan tampilnya Imam Khoemaini sebagai pemimpin revolusi Iran. Ditambah lagi, pada fase pertengahan terakhir 1970-an terjadi pergolakan di Iran, Mesir, Saudi Arabia, Syria, Pakistan, dan Afghanistan yang menyadarkan Barat tentang bangkitnya "Islam militan" atau "kebangkitan Islamisme."[3]

Berdasarkan studi AE Priyono dan Khamami Zada, ketertarikan umat Islam terhadap gerakan-gerakan yang sifatnya radikal di Indonesia sesungguhnya disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama,* doktrin agama yang sangat kaku dengan seruan kembali ke masa klasik Islam secara *kaffah.* Pandangan ini menunjukkan sikap literal mereka dalam memahami teks-teks agama sehingga harus sesuai atau sama dengan perilaku Nabi Saw. Padahal, Islam adalah agama kontekstual, yang sesuai dengan perubahan zaman. Pada gilirannya, mereka frustasi terhadap perubahan dunia yang begitu cepat, sementara respons Islam sangat terlambat dan ketinggalan dibandingkan dengan masyarakat Barat-sekuler. Tak heran, jika konsep-konsep modern, seperti sekularisasi, demokrasi, dan HAM sebagai produk Barat, mereka tolak secara radikal. Proses radikalisasi ini disebabkan oleh doktrin agama yang dipahami secara literal dan kaku, sehingga sulit menemukan relasinya dengan dunia modern.

Kedua, penguasa yang meminggirkan Islam justru mempersubur radikalisme. Dua rezim yang dialami umat Islam;

---

[3] Hermann Frederick Eilts,. "Reviving the Middle East Peace Process: An International Conference,"*Middle East Insight,* vol. 5, no. 3 (1987).

rezim Soekarno dan Soeharto, telah menunjukkan kebijakan politik yang merugikan bagi umat Islam. Tidak diakomodirnya Islam sebagai dasar negara sejak 1957 telah melahirkan gerakan radikalisme yang berlebihan. Gerakan Darul Islam adalah bukti betapa Islam mesti menjadi dasar negara Republik Indonesia. Begitu pula, proyek depolitisasi Islam rezim Orde Baru yang berhasil menekan Islam politik di pentas nasional; seperti larangan rehabilitasi Masyumi, fusi partai yang dilakukan untuk memecah belah kekuatan politik Islam, dan penerapan asas tunggal Pancasila yang dipaksakan kepada semua partai politik dan ormas telah mengecewakan umat Islam. Kesemuanya ini membuat umat Islam frustasi dan melakukan gerakan pembangkangan kepada rezim penguasa. Bahkan, sikap keras penguasa yang ditunjukkan kepada Islam sebagai "ekstrem kanan" telah membangkitkan sikap radikalisme di dalam komunitas Islam.

Ketiga, kelompok-kelompok Islam radikal melihat masyarakat kita mengalami sekularisasi, dekadensi moral dan krisis kepemimpinan memantapkan keyakinan mereka bahwa solusinya adalah Islam. Pergaulan bebas, permisivisme, aborsi, kenakalan remaja, lemahnya supremasi hukum (KKN), dan semakin tidak bermoralnya para pemimpin bangsa memberikan keyakinan bahwa sekularisasi telah gagal menjadi bagian dari kehidupan bangsa. Karena itulah, Islam adalah solusi yang tepat dengan cara menerapkan syariat Islam secara *kaffah.* Radikalisasi yang tumbuh di kalangan Muslim adalah efek domino dari kebobrokan sistem sosial masyarakat yang yang sudah tidak lagi mengindahkan peraturan agama. Itu sebabnya, mereka yakin bahwa Islam mampu menyelesaikan semua problem

masyarakat agar menjadi lebih Islami; agar tidak ada KKN, agar pergaulan antar remaja lebih Islami, dan tidak ada lagi perilaku amoral di bumi Indonesia.

Keempat, radikalisasi juga dipengaruhi oleh penyebaran wacana dan gerakan Islam di Timur Tengah seperti; Hasan al-Bana, Sayyid Qutub, Muhamad Qutb (Ikhwanul Muslimin), Abu A'la al-Maududi (Jamaati Islami),Taqiyudin an-Nabhani (HizbutTahrir), Luthfi Sayyid (Takfir wal Hijrah) Hasan al-Turabi (National Islamic Front/NIF, Syaikh Abbasi Madani dan Ali Benhadj (FIS), Syeh Yasin (Hammas),Refah (Turki),Taliban (Afghanistan), Al-Mujahidin (Irak), Jam'iyah Ruhaniyah Mobarez (Iran), Hizbullah (Libanon), Wahabi (Arab Saudi), Hizb an-Nahdlah (Tunisia), al-Ikhwan (Suriah) dan seterusnya.

Situasi ini kemudian dieksploitasi oleh kelompok-kelompok dan aktor-aktor baru gerakan Islam yang memiliki akar ideologis dan gerakan yang ditransmisikan dari Timur Tengah. Mereka berciri puritanisme radikal yakni semangat berlebihan untuk mewujudkan kembali apa yang mereka citrakan sebagai Islam yang murni seperti yang ada pada masa Nabi, sahabat dan *tabi`in* (Islam Salaf). Ciri menonjol dari kelompok-kelompok baru ini adalah literalisme dalam memahami ayat suci, eksklusif dalam orientasi perjuangan dan intoleran dalam pola hidup bersama "yang lain" (*the others*).

Aura kebebasan yang muncul dari semangat reformasi memungkinkan kelompok semacam FPI, MMI, Jamaah Islamiyah, HTI dan ormas Islam radikal atau fundamental sejenisnya menyebarkan pemahamannya secara leluasa. Radikalisme Islam atau fundamentalisme Islam dalam persepsi

publik Indonesia maupun masyarakat Barat, berkonotasi negatif. Sebutan Islam fundamentalis, misalnya, merupakan stigmatisasi kepada gerakan kaum Muslim yang berperilaku radikal, bersikap kaku dan berperangai kekerasan.

Studi Ahmad S Moussali menyingkapkan bahwa, Islam fundamentalis merupakan manifestasi awal atas gerakan sosial masif yang mengartikulasikan agama dan aspirasi peradaban dan mempertanyakan isu-isu di seputar moralitas teknologi, distribusi ala kapitalis, legitimasi non-negara, dan paradigma non-negara bangsa.

Islam fundamentalis, lebih dari sekadar gerakan lokal. Ia beraksi dan bereaksi melingkupi negara-bangsa dan tatanan dunia. Ia mempersoalkan tak hanya isu dan aspirasi yang berdimensi lokal, tetapi juga regional dan universal. Fundamentalisme itu sendiri bisa bersifat moderat dan radikal. Bagi Moussalli, "*to radical fundamentalism, tawhid becomes a justification for the domination of others; to moderate fundamentalism, it becomes a justification for not being dominated by others*" (bagi fundamentalisme radikal, menjadikan tauhid sebagai pembenaran bagi pendominasian terhadap yang lain; (adapun) fundamentalisme moderat, menjadikan tauhid bukan untuk mendominasi yang lain). [4]

Persepsi Barat melihat, pengertian Islam fundamentalis berhimpitan dengan pemahaman mengenai Islam radikalis karena perilaku dan praktik keagamaan mereka diwarnai dengan aksi dan tindakan yang nyaris sama atau serupa berupa kekerasan, eksklusifisme, intoleran dan anti-Barat. Bahkan kaum Islam fundamantalis atau Islam radikalis ini

[4] Baca, Ahmad S Moussali, *Moderate and Radical Islamic Fundamentalism: The Quest for Modernity, Legitimacy, and the Islamic State* (University Press of Florida, 1999),

acapkali tidak segan-segan mengkafirkan pihak lain yang tidak sepaham dengan kelompok mereka.

Secara historis, fenomena fundamentalisme Islam bisa dirunut dalam rentang sejarah yang sedemikian panjang hingga pada era awal perkembangan agama Muhammad tersebut. Upaya-upaya pembunuhan yang didalangi oleh sekte Khawarij terhadap tokoh-tokoh sahabat Nabi seperti Ali bin Abi Thalib, Mu'awiyah dan Amr bin Ash sebagai rangkaian lanjutan dari peristiwa *taḥkim* merupakan cikal-bakal kelahiran gerakan-gerakan fundamentalisme Islam.

Argumentasi yang dijadikan pembenaran oleh sekte Khawarij atas tindakan-tindakan kekerasan mereka juga berlatar belakang keagamaan, yaitu bahwa mereka yang dijadikan korban adalah tokoh-tokoh yang melegalkan *tahkīm* yang menurut mereka haram untuk dilakukan. Padahal, menurut mereka, umat Islam harus menyelesaikan persoalan-persoalan mereka dengan didasarkan pada al-Qur'an sebagai satu-satunya sumber kebenaran.[5]

Dalam sejarah pemikiran Islam awal, dalil kekafiran tersebut telah digunakan oleh kelompok Khawarij untuk menghakimi Ali bin Abi Thalib, 'Amr bin Ash, dan Mu'awiyah bin Abi Sufyan, Abu Musa al-Asy'ari yang melakukan *tahkīm* (perdamaian) dalam Perang Siffīn pada 37 H /657 M dengan mengangkat al-Qur'an di atas ujung tombak.

Golongan yang menolak *tahkīm* karena dianggap tidak sesuai dengan hukum Allah sehingga keluar dari barisan Ali dalam musyawarah perdamaian di Daumatul Jandal dengan mengkafirkan para sahabat senior ini, dipimpin oleh

---

[5] Nur Rosidah, "Fundamentalisme Agama", Jurnal *Walisongo,* Volume 20, Nomor 1, Mei 2012, h. 1-23

Abdullah Ibn Wahab Al Rasyidi dengan jumlah 12.000 pasukan. Perkembangan corak pemikiran kelompok Khawarij dengan berbagai sekte-sekte di dalamnya setidaknya dapat dipahami melalui identitas yang sama, yaitu membatasi dalil agama hanya pada al-Qur'an dan al-Hadits. Oleh karenanya, terjadi penolakan atas *ijma'* (kesepakatan para ulama) dan *qiyās* (analogi) yang keduanya sangat dekat dengan penggunaan akal atau logika dalam penentuan hukum yang tidak terdapat di dalam al-Qur'an dan Hadits terutama menyangkut urusan duniawi. Metodologi *ta'wil* (penafsiran terhadap dalil) dengan menggunakan akal atau logika dianggapnya hanya akan membuat agama tidak murni lagi karena terkontaminasi pendapat-pendapat manusia yang tidak memiliki wewenang menetapkan syariat [6]

Dalam sejarahnya, fundamentalisme Islam lebih banyak menekankan—atau setidaknya membenarkan—penggunaan kekerasan atas nama agama. Islam dianggap mengajarkan pada para pemeluknya yang fanatik untuk melakukan tindakan kekerasan tersebut sebagai manifestasi dari keimanan. Dalam pembicaraan mengenai sekte ini, orang kemudian membayangkan adanya sekelompok orang beriman yang meyakini—mungkin secara salah—bahwa Tuhan telah menyuruhnya untuk melakukan apa saja yang mungkin dapat dilakukan untuk membela agama-Nya.[7]

---

[6] Harun Nasution, *Theologi Islam, Sejarah Analisa dan Perbandingan* (Jakarta: UI Press, 1991), h. 23; Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1999), h. 112-113; Philip K. Hitti, *History of The Arabs* (London: The Macmilan Press LTD, 1974), h. 181-183

[7] Machasin, "Fundamentalisme dan Terorisme," makalah yang dipresentasikan dalam Moslem Scholars Congress dengan tema "Reading of The Religious Texts and The Roots of Fundamentalism," Saphir Yogyakarta, Minggu, 13 Juni 2004

Meminjam telaah Azyumardi Azra, fundamentalisme Islam, sebagaimana juga fundamentalisme dalam agama lain, memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dengan sekte lain. *Pertama,* skripturalisme, yaitu keyakinan harfiah terhadap kitab suci yang merupakan firman Tuhan dan dianggap tidak mengandung kesalahan.

Kedua, penolakan terhadap hermeneutika. Teks al-Qur'an dalam pandangan sekte ini harus dipahami secara literal sebagaimana bunyinya. Nalar dipandang tidak mampu memberikan interpretasi yang tepat terhadap teks, bahkan terhadap teks-teks yang satu sama lain bertentangan sekalipun.

Ketiga, penolakan terhadap pluralisme dan relativisme yang dianggap merongrong kesucian teks.

Keempat, penolakan terhadap perkembangan historis dan sosiologis yang dianggap membawa manusia semakin jauh melenceng dari doktrin literal kitab suci.[8]

Fenomena Abu Bakar Ba'Asyir dan *Allahcracy*

Di Indonesia, salah satu ulama yang dianggap sebagai tokoh Islam fundamentalis adalah Ustadz Abu Bakar Ba'asyir . Sebelum ditangkap dan diproses hukum oleh pemerintah dengan tuduhan terlibat terorisme, Ustadz Abu Bakar Ba'asyir (Amir Majelis Mujahidin Indonesia) di pelbagai kota menegaskan pentingnya penerapan peraturan daerah (perda) berdasar syariat Islam. Baginya, Islam seharusnya tidak hanya diamalkan secara individual tetapi juga dalam

[8] Azyumardi Azra, "Fenomena Fundamentalisme dalam Islam," *Ulumul Qur'an,* No. 3, Vol. IV, tahun 1993, h. 18-19

kehidupan bernegara. Ba'asyir menegaskan bahwa pemerintah perlu turut campur tangan dalam pelaksanaan syariat Islam, dan ia menambahkan umat Islam jangan hanya puas dengan adanya Departemen Agama. Ba'asyir juga menegaskan bahwa syariat Islam adalah harga mati yang tidak bisa ditawar, dan karena itu ia tak gentar jika dicap Islam garis keras dan Islam fundamentalis.

Ba'asyir juga menyatakan pentingnya penerapan *Allahcracy* yang didasarakan hukum-hukum Allah dengan alasan kalau hukum Allah ditegakkan, semuanya pasti berjalan baik. Ia juga menyebut demokrasi sebagai ajaran "syirik" karena menempatkan kekuasaan negara ditangan manusia," Mau melaksanakan perintah Allah *kok* pakai *voting*," katanya di depan tabligh akbar Forum Umat Islam Cirebon .[9]

Dengan melihat *passion* dan *articulation* Ba'asyir yang multi tafsir, penulis mencoba memahami aspirasi dan kerinduan Abu Ba'asyir, kelompok dan jaringannya kepada penerapan syariat Islam dan *Allahcracry* itu. Di tengah kegagalan modernisme Orde Baru dan Orde Reformasi untuk menciptakan kadilan sosial, emansipasi dan kemaslahatan rakyat, penegasan Abu Ba'asyir itu harus dilihat sebagai "political outcry" dan sebuah harapan sekaligus pencarian, - yang meski berbau demagogi -, tidak perlu dihadapi dengan hukuman dan kekerasan.

Di sini akal budi kita harus bisa menjawab masalah dan tantangan dari kelompok Ba'asyir dan sejenisnya dalam upaya bersama menggapai keindonesiaan yang dibayangkan.

---

[9] Baca laporan *Kompas*, 5/7/2006

Duduk Perkara

Dalam pelbagai aktivitas dan artikulasi Abu Ba'asyir, para pengikut dan kelompok sejenisnya, gagasan untuk mewujudkan "syariat Islam dan *Allahcracy*" senantiasa didengungkan untuk memberikan harapan. Kita maklum dan mahfum namun harus tetap mawas diri, cermat dan waspada, karena wacana syariat Islam dan *Allahcracry* itu bisa mengarah kepada *bad turn in politics,* perkembangan buruk dan celaka dalam politik di Indonesia. Mengapa? Karena mereka belum bisa membedakan antara bangsa (*nation*) dan negara (*state)* sehingga semangat akan syariat Islam dan *Allahcracy* bisa membelah bangsa ke dalam *socio-cultural cleavages.*

Bangsa adalah suatu konsepsi kultural tentang suatu komunitas yang diimajinasikan sebagai entitas dari suatu *kinship* (kerabat) – yang biasanya diikat oleh suatu kemampuan mengatur dan mengelola diri sendiri (*self-rule)*. Karena itu, bangsa beroperasi atas dasar kekariban. Sedangkan negara (*state*) adalah suatu konsepsi politik tentang sebuah entitas politik yang tumbuh berdasarkan kontrak sosial yang meletakkan individu ke dalam kerangka kewarganegaraan (*citizenship*). Dalam kerangka ini, individu dipertautkan kepada suatu unit politik (negara) dalam kedudukan yang sederajat di depan hukum. Karena itu, negara beroperasi atas prinsip hukum dan keadilan. [10]

Konsepsi negara bangsa mengisyaratkan perlu adanya keserasian (*congruency*) antara unit kultural (bangsa) dengan unit politik (negara). Karena itu, yang menjadi persoalan dalam konteks gagasan dan kemauan politik Abu Basyir dan

[10] Baca, Yudi Latif, *Gerak Politik yang Tertawan: Menggagas Ulang Prinsip-prinsip Lembaga Kepresidenan* (Jakarta: CPPS, 2004).

kelompoknya untuk menerapkan peraturan daerah (perda) Syariat Islam dan *Allahcracy*, adalah bagaimana bisa dike-temukan bangun dan jiwa kenegaraan yang mampu meng-akomodasi keragaman dan kebhinekaan kebangsaan dengan pemberlakukan perda syariat Islam dan *Allahcracy* itu? Sungguh rumit dan pelik.

Abu Ba'asyir hampir pasti tidak paham dan tidak menyadari bahwa Republik Indonesia didirikan oleh para bapak bangsa (Founding Fathers) sebagai *modern nation-state,* bukan *Islamic state.* Indonesia didirikan dengan *keragaman dalam kesatuan* dan *kesatuan dalam keragaman.* Karena itu tujuh kata dalam Piagam Jakarta dihapuskan atas usul Bung Hatta untuk mewujudkan Republik Indonesia yang beraneka ragam etnis, agama, budaya dan golongannya, dengan bentangan wilayah kepulauan dan lautan yang membujur dari ujung barat sampai ujung timur (dari Sabang sampai Merauke), atas jiwa besar dan kearifan para pemimpin Islam dan nasionalis pada waktu itu. Para pemimpin Islam dan nasionalis di era kemerdekaan bersikap bijak, lapang dada dan adil serta tidak mau bersikap absolut, mutlak-mutlakan.

Karena itu, penerapan syariat Islam dan *Allahcracy* versi Abu Ba'asyir menjadi *defying the logic*, deviasi sekaligus negasi *the modern nation-state* yang dicita-citakan *founding Fathers* karena akan menjungkirbalikkan konsepsi politik dan kontrak sosial yang disepakati bersama oleh para pemimpin dan bangsa kita di masa lalu maupun masa kini. Bagai-manapun Indonesia lebih tepat disebut sebagai *nations in nation,* dimana kebhinekaan dan keragaman yang luar biasa, hanya bisa diakomodasikan ke dalam negara kebangsaan dengan *common platform* Pancasila dan UUD 1945.

Keindonesiaan yang selama ini berlangsung merupakan refleksi dari adanya kehendak bersama pelbagai gugus bangsa untuk bersatu. Masalah lain yang sangat mungkin tidak disadari Abu Baa'syir adalah bahwa perda syariat Islam dan *Allahcary* akan menjontrongkan bangsa kita ke dalam penyeragaman yang sektarian, yang berbasis formalisme Islam, yang dirasakan sebagai 'ancaman' atas HAM dan kebebasan dan kemerdekaan kreatif masyarakat luas. Dalam hal ini, Abu Ba'asyir dengan impian kekhalifahan, perda syariat Islam dan *Allahcracy,* penulis melihat lebih sebagai respon dan cara dia dalam menghadapi developmentalisme, Westernisasi, modernisasi dan globalisasi yang masih menimbulkan dehumanisasi dan diskrepansi antara harapan dan kenyataan.

Penulis tidak ingin menghakimi dan menolak mentah aspirasi dan kerinduan Abu Ba'asyir dan kelompoknya, namun akal sehat dan akhlak yang mulia seyogianya menjadi acuan bagi kita dalam mengisi dan mengelola kehidupan berbangsa bernegara. Jika mereka tetap memaksakan *syariat Islam* dan *Allahcracy*, mungkin hanya soal waktu mereka akan menjadi kelompok yang dilindas hukum besi sejarah. Hukum besi sejarah di Indonesia berkali-kali menunjukkan bahwa setiap pemaksaan yang bertentangan dengan fitrah manusia dan akal sehat publik, hanya akan mengundang pemakzulan karena ketidakcocokan dengan watak bangsanya.Tragedi Kartosuwiryo, Soekarno dan Soeharto sudah membuktikan hal ini.

Kini yang diperlukan rakyat kita adalah reformasi pengelolaan negara, bukan formalisasi syariat Islam dan *Allahcracy* yang hampir pasti berbenturan dengan nilai-nilai dan

prinsip negara kebangsaan modern. Reformasi pengelolaan negara dibutuhkan untuk mendorong pembentukan formasi sosial baru yang berbasis kewarganegaraan dengan memperjuangkan keadilan sosial, kesetaraan, distribusi ekonomi, politik dan budaya bagi seluruh warga negara. Dengan atau tanpa Abu Ba'asyir, masyaraka madani (*civil society*) tengah bergerak ke arah sana. Apa yang diartikulasikan Abu Bakar Basyir sebagai seruan Jihad itu, adalah tipologi radikalisme agama yang dianut kelompoknya dengan semboyan *Allah-cracy* dan artikulasi semacam itu tidaklah tepat, bahkan menyimpang dari nilai-nilai demokrasi substansial dan prinsip negara kebangsaan modern yang kita anut selama ini. Namun tidak dipungkiri bahwa pengikut dan penganut paham semacam Abu Bakar Basyir, tidaklah sedikit sebab radikalisme Islam terus berkembang dalam berbagai bentuk gerakan salafi atau salafisme, dan gerakan-gerakan radikal lainnya akibat kekecewaan mereka terhadap dominasi Barat, sekulerisme, korupsi yang meraja lela, ketidakadilan dan kesenjangan kaya-miskin yang kian tajam di Indonesia. Apakah seruan Jihad yang dilakukan kelompok Abu Bakar Basyir, kelompok Muslim radikal dan kaum teroris di Indonesia dibenarkan menurut agama Islam?

Dalam kaitan ini, wacana radikalisme dalam agama selalu menghadirkan nama Tuhan. Ini dapat dimengerti karena agama memiliki otoritas yang kuat di atas berbagai kekuatan lain. Termasuk Islam, yang sejak awal kelahirannya mendeklarasikan diri sebagai agama yang sarat dengan nilai-nilai kedamaian, ajaran-ajarannya oleh sebagian orang kerapkali dijadikan justifikasi atas berbagai tindakan kekerasan. Salah satu penyebabnya adalah pemahaman yang keliru atas ayat-ayat al-Quran –dan juga hadis-hadis Nabi–

tentang jihad dan perang.

Oleh sebab itu, perlu kita telaah ayat-ayat al-Quran dengan memperhatikan makna dan konteks kesejarahannya sehingga dihasilkan pemahaman yang benar dan komprehensif. Harus kita garis bawahi bahwa Jihad dan perang (*qitāl*) dalam al-Quran berbeda dengan tindakan radikalisme. Tujuan utama jihad adalah *human welfare* dan bukan *warfare*. Maka, jihad menjadi kewajiban setiap muslim sepanjang hidupnya, sedangkan *qital* bersifat kondisional, temporal dan sebagai upaya paling akhir setelah tidak ada cara lain kecuali perlawanan fisik. Selain itu pelaksanaan perang pun harus memenuhi berbagai persyaratan yang sangat ketat.

Radikalisme Agama: Kajian Atas Ayat-Ayat Kekerasan dalam al-Quran

Pengalaman di Dunia Islam, termasuk di Indonesia dan Timur Tengah menunjukkan bahwa gejala radikalisme agama tidak pernah berhenti dalam rentang perjalanan sejarah umat Islam hingga sekarang. Bahkan wacana tentang hubungan agama (Islam) dan radikalisme belakangan semakin menguat seiring dengan munculnya berbagai tindakan kekerasan dan lahirnya gerakan-gerakan radikal, khususnya pasca peristiwa 9 September 2001 di New York, Washington DC dan Philadelphia, yang kemudian diikuti pengeboman di Bali (12/10/2002 dan 1/10/2005), Madrid (11/3/2004), London (7/7/2005), Paris (13/10/2015), Brussels Belgia (2016), dan Jerman (2016)

Pandangan stereotipikal Islam dengan radikalisme semakin meningkat, dan juga membangkitkan kembali gelombang Islamofobia, baik dalam hal agama, budaya, maupun politik

di kalangan masyarakat Eropa, Amerika, dan Australia. Islam dan umat Islam menjadi pihak yang tertuduh dalam berbagai aksi tersebut.Berbagai stigma dilekatkan bahwa Islam identik dengan radikalisme, terorisme dan kekerasan. Stigma ini seakan membenarkan pandangan beberapa pemikir Barat yang melihat Islam sebagai ancaman setelah runtuhnya Soviet, sebagaimana tesis Samuel Huntington tentang *clash of civilization* (benturan peradaban).

Sejarah kekerasan dan radikalisme seringkali membawa nama agama. Hal ini dapat dipahami karena agama memiliki kekuatan yang dahsyat, yang melebihi kekuatan politik, sosial dan budaya.Agama bahkan bisa diangkat sampai pada tingkat supranatural. Atas nama agama, kemudian radikalisme diabsahkan dalam berbagai tindakan. Mulai dari mengkafirkan orang-orang yang tak sepaham (*takfīr*) sampai melakukan pembunuhan terhadap musuh yang tidak seideologi dengannya.

Banyak faktor yang menyebabkan tumbuh dan berkembang-nya gerakan radikal yang mengatasnamakan agama. Salah satunya, menurut Fealy dan Hooker, adalah akibat terbukanya kran demokratisasi pasca reformasi.[11] Sementara itu, menurut Huntington, sumber konflik yang dominan saat ini bukan bersifat kultural, bukan ideologis maupun ekonomis. Konflik akan terjadi antara negara dan kelompok yang memiliki peradaban yang berbeda. Huntington mendefinisikan peradaban sebagai entitas kultural tertinggi dan identitas terbesar yang dimiliki manusia. Lebih jauh ia juga mengidentifikasi tujuh peradaban besar, yaitu, Barat,

[11] Greg Fealy dan Virginia Hooker (ed.), *Voices of Islam in Southeast Asia: A Contemporary Sourcebook* (Singapore: ISEAS, 2006), h. 4

Konfusius, Jepang, Islam, Hindu, Slavia-ortodoks, dan Amerika Latin. Menurutnya, dari ketujuh peradaban besar itu, Islamlah yang paling potensial untuk mengancam peradaban Barat yang kini sedang berada di puncak kekuasaannya.[12]

Walaupun faktor-faktor munculnya radikalisme beragama sangat kompleks dan beragam, namun sebagaimana diungkapkan oleh John L. Esposito bahwa peperangan dan kekerasan dalam agama selalu bermula dari faktor keimanan manusia.[13]

Menurut Yusuf al-Qardhawi, faktor utama munculnya radikalisme dalam beragama adalah kurangnya pemahaman yang benar dan mendalam atas esensi ajaran agama Islam itu sendiri dan pemahaman literalistik atas teks-teks agama.[14] Menurut Arkoun, al-Quran telah digunakan kaum Muslim untuk mengabsahkan perilaku, menjustifikasi tindakan peperangan, melandasi berbagai apresiasi, memelihara berbagai harapan, dan memperkukuh identitas kolektif.[15]

---

[12] Samuel P. Huntington, "Benturan Peradaban, Masa Depan Politik Dunia," *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu dan Kebudayaan,* (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF, 1993), Vol. 4, No. 5, h. 11-25. Pandangan Huntington ini banyak mendapat reaksi dan tantangan cukup signifikan dari penulis Barat sendiri, seperti John L. Esposito.Esposito termasuk sarjana Barat yang giat menyuarakan pandangan yang positif tentang Islam di berbagai tulisan dan media Barat. Oleh karenanya, kata Esposito, ... most Islamic Movement are not necessarily anti-Western, anti-American, or anti-Democratic. Baca, John L. Esposito, *Islamic Threat: Myth or Reality*, (Oxford: Oxford University Press, 1992), h. 212.

[13] John L. Esposito, *Unholy War: Teror Atas Nama Islam* (Yogyakarta: Ikon, 2003), h. 30.

[14] Yusuf al-Qardhawi, *al-Shahwah al-Islāmiyyah Bayna al-Juhūd wa al-Tatharruf*, cet. ke-1, (Kairo: Dār al-Syurūq, 2001), h. 51-57.

[15]Mohammed Arkoun, *Berbagai Pembacaan Al-Qur'an*, terj.Machasin (Jakarta: INIS, 1997), h. 9.

Dan pada kenyataannya, sebagian kaum Muslim yang melakukan tindakan kekerasan seringkali merujuk kepada ayat-ayat al-Quran dan hadis Nabi SAW yang dijadikan legitimasi dan dasar tindakannya. Padahal Islam adalah agama universal dan moderat (*wasathiyah*) yang mengajarkan nilai-nilai toleransi (*tasāmuh*) yang menjadi salah satu ajaran inti Islam yang sejajar dengan ajaran lain seperti, keadilan (*'adl*), kasih sayang (rahmat), dan kebijaksanaan (hikmat). Sebagai rahmat bagi semesta alam, al-Quran mengakui kemajemukan keyakinan dan keberagamaan. Tetapi, sayang aksi dan tindakan kekerasan masih juga seringkali terjadi. Dan, sekali lagi, itu diabsahkan dengan dalil ayat-ayat al-Quran dan hadis Nabi SAW.

Dari latar belakang inilah, tulisan ini bermaksud menelah ayat-ayat al-Quran yang seringkali dijadikan landasan dan justifikasi radikalisme atas nama agama (Islam), khususnya ayat-ayat jihad dan perang. Dengan pendekatan tematik, ayat-ayat tersebut akan ditelaah sesuai dengan maknanya, aspek kesejarahannya*(asbāb al-nuzūl)* dan konteks sosialnya sehingga ditemukan ide moral dari ayat-ayat tersebut.

Isitilah (Term) Radikalisme dan Maknanya

Belum ada kesepakatan di antara para ahli untuk menggambarkan gerakan radikal sehingga memunculkan banyak terminologi, antara lain Neo-Khawarij,[16] Khawarij abad ke-20,[17] Islam radikal (Emmanuel Sivan), dan fundamentalisme. Fazlur Rahman menyebutnya sebagai gerakan neo-revival-

[16] M.A. Shaban, *Islamic History*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1994), h.56

[17] Harun Nasution, *Islam Rasional* (Bandung: Mizan, 1995), h.125

isme atau neofundamentalisme untuk membedakan gerakan modern klasik dengan gerakan fundamentalisme post-modernisme, sebagai sebuah gerakan anti Barat.Sedangkan Esposito dan Dekmejian menggunakan istilah *Islamic Revivalism* ketimbang istilah fundamentalisme yang dinilainya merupakan istilah yang khas Protestan. Al-Jabiri dan Gilles Kepel menyebut gerakan tersebut sebagai ekstrimisme Islam, sedangkan Al-Fadl menyebutnya gerakan Islam Puritan.[18]

Namun, dari berbagai istilah tersebut, istilah radikalisme dipandang lebih tepat ketimbang fundamentalisme dan istilah-istilah lain, karena fundamentalisme sendiri memiliki makna yang multitafsir. Fundamentalisme dalam perspektif Barat, berarti paham orang-orang kaku dan ekstrim serta tidak segan-segan melakukan kekerasan dalam mempertahankan ideologinya. Sementara dalam pemikiran teologi keagamaan, istilah fundamentalisme lebih mengarah kepada gerakan untuk mengembalikan seluruh perilaku kaum Muslim untuk merujuk kepada al-Quran dan hadis. Fundamentalis juga terkadang ditujukan kepada kelompok yang berupaya mengembalikan Islam (revivalis).[19] Menurut Kuntowijoyo fundamentalisme juga diartikan sebagai radikalisme dan terorisme dikarenakan gerakan ini memiliki implikasi politik yang membahayakan negara-negara industri di Barat.[20] Sedangkan menurut Fazlur Rahman, funda-

---

[18]Akhmad Elang Muttaqin, "Mengakrabi Radikalisme," *https://elangmutaqin.wordpress.com/2012/05/26/mengakrabi-radikalisme/,* diakses 5 Januari 2016.

[19] Lihat Akbar S. Ahmed, *Posmodernisme: Bahaya dan Harapan bagi Islam*, terj. M. Sirozi, (Bandung: Mizan, 1993), h. 171; William Montgmery Watt, *Islamic Fundamentalism And Modernity* (London: T.J. Press, 1998), h.2.; H.A.R. Gibb, *Aliran-Aliran Moderen Dalam Islam*, terj. Machnun Husein, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), h. 52.

[20] Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam* (Bandung: Mizan, 1997), h. 49.

mentalisme berarti anti-pembaratan (westernisme).[21]

Secara bahasa, radikalisme berasal dari bahasa Latin, *radix,* yang berarti "akar". Ia adalah paham yang menghendaki adanya perubahan dan perombakan besar untuk mencapai kemajuan. Dalam perspektif ilmu sosial, radikalisme erat kaitannya dengan sikap atau posisi yang mendambakan perubahan terhadap *status quo* dengan cara menggantinya dengan sesuatu yang sama sekali baru dan berbeda.[22] Radikalisme merupakan respons terhadap kondisi yang sedang berlangsung yang muncul dalam bentuk evaluasi, penolakan, atau bahkan perlawanan terhadap ide, asumsi, kelembagaan, atau nilai.

Secara sederhana, radikalisme adalah pemikiran atau sikap yang ditandai oleh empat hal yang sekaligus menjadi karakteristiknya, yaitu: *Pertama,* sikap tidak toleran dan tidak mau menghargai pendapat atau keyakinan orang lain. *Kedua,* sikap fanatik, yakni sikap yang membenarkan diri sendiri dan menyalahkan orang lain. *Ketiga,* sikap eksklusif, yakni sikap tertutup dan berusaha berbeda dengan kebiasaan orang banyak. *Keempat,* sikap revolusioner, yakni kecenderungan untuk menggunakan kekerasan dalam mencapai tujuan.[23]

Menurut Azyumardi Azra, radikalisme merupakan bentuk ekstrim dari revivalisme. Revivalisme merupakan intensifikasi keislaman yang lebih berorientasi ke dalam *(inward*

---

[21] Fazlur Rahman, *Islam And Modernity* (Chicago: The University of Chicago Press, 1982), h.136

[22] Edi Susanto, "Kemungkinan Munculnya Paham Islam Radikal di Pesantren," *Jurnal Tadris,* Pamekasan: Sekolah Tinggi Agama Islam Pamekasan, Vol. 2, No. 1, 2007), h.3.

[23] Agil Asshofie, "Radikalisme Gerakan Islam", h*ttp://agil-asshofie.blogspot.com/2011/10/radikalisme-gerakan-politik.html,* diakses pada 25 Januari 2016.

oriented), dengan artian pengaplikasian dari sebuah kepercayaan hanya diterapkan untuk diri pribadi.Sedangkan bentuk radikalisme yang cenderung berorientasi keluar *(outward oriented),* atau kadang dalam penerapannya cenderung menggunakan aksi kekerasan lazim disebut fundamentalisme.[24]

Dalam bahasa Arab, kekerasan dan radikalisme disebut dengan beberapa istilah, antara lain *al-'unf, at-tatharruf, al-ghuluww* dan *al-irhāb. Al-'unf* adalah antonim dari *al-rifq* yang berarti lemah lembut dan kasih sayang. Abdullah al-Najjar, mendefiniskan *al-'unf* dengan penggunaan kekuatan secara ilegal (main hakim sendiri) untuk memaksanakan kehendak dan pendapat.[25] Sekalipun kata ini tidak digunakan dalam al-Quran, tetapi beberapa hadis Nabi SAW menyebutnya, baik kata *al-'unf* maupun lawannya (*al-rifq*), antara lain:

> *Dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak mengutusku sebagai orang yang keras (mu'annif) tetapi Dia mengutusku sebagai pengajar (mu'allim) yang memudahkan (HR. Ahmad)*
>
> *Dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda: Hai Aisyah, sesungguhnya Allah Mahalembut dan menyukai sikap lemah lembut(al-rifq). Dia akan memberikan pada sikap lemah lembutsesuatu yang Dia tidak berikan pada sikap keras (HR. Muslim)*
>
> *Ketika serombongan Yahudi datang kepada Rasulullah SAW, mereka berkata: Kecelakaan bagi kalian (as-Sāmu*

---

[24] Azyumardi Azra, *Islam Reformis: Dinamika Intelektual dan Gerakan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 46-47

[25] Dikutip dari Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, jilid 1 (Jakarta: Kamil Pustaka, 2014), h. 97

> *'alaikum). Aisyah menjawab: Kecelakaan dan laknat atas kalian. Rasulullah SAW menegurnya: Hai Aisyah, sesungguhnya Allah menyukai sikap lembut dalam segala urusan (HR. Muslim)*

Dari penggunaan kata tersebut dalam hadis-hadis di atas, tampak jelas bahwa Islam adalah agama yang tidak menyukai kekerasan terhadap siapa pun, termasuk penganut agama yang berbeda. Sebaliknya Islam adalah agama yang penuh dengan kelembutan.

Kata *at-tatharruf* secara bahasa berasal dari kata *at-tharf* yang mengandung arti "ujung atau pinggir". Maksudnya berada di ujung atau pinggir, baik di ujung kiri atau kanan. Karenanya, dalam bahasa Arab modern kata *at-tatharruf* berkonotasi makna radikal, ekstrim dan berlebihan.[26] Dengan demikian, *at-tatharruf ad-dīny* berarti segala perbuatan yang berlebihan dalam beragama, yang merupakan lawan kata dari *al-wasath* (tengah/moderat) yang memiliki makna baik dan terpuji.

Sedangkan kata *al-ghuluww* – yang secara bahasa berarti berlebihan atau melampaui batas - sering digunakan untuk menyebut praktik pengamalan agama yang ekstrim sehingga melebihi batas kewajaran. al-Quran mengecam keras sikap Ahli Kitab yang terlalu berlebihan dalam beragama sebagaimana firman Allah berikut ini:

> *Wahai Ahli Kitab, janganlah kalian berlebihan (lā taghlū) dalam agamamu, dan janganlah kalian mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih, Isa putera Maryam itu, adalah utusan Allah dan (yang dicipta-*

---

[26] Muchlis M. Hanafi, "Konsep Al-Wasathiyyah dalam Islam", dalam *HARMONI: Jurnal Multikultural & Multireligius*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang & Diklat Departemen Agama RI), Volume VIII, Nomor 32, Oktober-Desember 2009, h. 39

> *kan dengan) kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan (dengan tiupan) ruh dari-Nya. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan para rasul-Nya dan janganlah kalian mengatakan, "(Tuhan itu) tiga,". Berhentilah (dari ucapan itu). (Itu) lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan Yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak, segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan-Nya. Dan cukuplah Allah sebagai Pelindung* (Q.S. an-Nisa' [4]:171)
>
> *Katakanlah: Hai Ahli Kitab, janganlah kalian berlebihan (lā taghlū) dengan cara tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka tersesat dari jalan yang lurus* (Q.S. al-Maidah [5]:77)

Sikap berlebihan itu pula, yang membuat tatanan kehidupan umat terdahulu menjadi rusak sebagaimana disabdakan Nabi SAW :"Wahai manusia, jauhilah sikap berlebihan (*al-ghuluww*) dalam beragama. Sesungguhnya sikap berlebihan dalam beragama telah membinasakan umat sebelum kalian" (HR. Ibnu Majah dan an-Nasa'i).

Sabda Nabi ini muncul dalam peristiwa Haji Wada. Ketika itu, Nabi Saw.meminta kepada Ibnu 'Abbas di pagi hari jumrah Aqabah agar mengambilkan kerikil untuk melempar jumrah di Mina. Ketika Ibnu 'Abbas mengambilkan kerikil sebesar kerikil ketapel, beliau berkata: Dengan kerikil-kerikil semacam inilah hendaknya kalian melempar. Kemudian beliau bersabda sebagaimana hadis di atas. Dalam hadis lain, dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah Saw bersabda: "Celakalah orang-orang yang melampaui batas (*al-mutanaththi'ūn*)"(HR. Muslim). Perkataan tersebut diulang tiga kali, untuk mengindikasikan bahwa Nabi Saw sangat

tidak menyukai umatnya yang mempraktikkan agama secara berlebihan, baik ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri. Sebaliknya beliau ingin mengajarkan sikap beragama yang moderat dan menghindari sikap *ghuluww* (radikal) dalam beragama.

Adapun istilah terorisme sendiri baru populer pada tahun 1793 sebagai akibat revolusi Perancis, tepatnya ketika Robespierre mengumumkan era baru yang disebut *Reign of Terror* di Perancis (10 Maret 1793-27 Juli 1794). Dari nama era inilah kemudian istilah terorisme dipakai dalam bahasa Inggris (*terrorism*) dan Perancis (*terrorisme*). Selama berlangsung Revolusi Perancis, Robespierre dan yang sejalan dengannya, seperti St. Just dan Couthon, melancarkan kekerasan politik secara masif di seluruh wilayah Perancis. Di Paris saja, diperkirakan 1.366 penduduk Perancis, laki-laki dan perempuan, terbunuh hanya dalam waktu 6 minggu terakhir dari masa teror. Mereka juga memenggal kepala 40 ribu penduduk asli Perancis dengan alat pemancung kepala dan menangkap serta memenjarakan 300 ribu orang.[27]

Dalam Kamus Oxford, *terrorist* dimaknai dengan orang yang melakukan kekerasan terorganisir untuk mencapai tujuan politik tertentu. Aksinya dinamakan terrorisme, yakni penggunaan kekerasan dan kengerian atau ancaman, terutama untuk tujuan-tujuan politis.[28] Sedangkan dalam bahasa Arab, istilah yang umum dipakai untuk menyebut terorisme adalah *al-irhāb* dan pelakunya disebut *irhābiy*. Kamus *al-*

[27] Muhammad al-Hawari, "Al-Irhāb: al-Mafhūm wa al-Asbāb wa Subul al-Ilāj", *http://www.assakina.com/ book/6007.html*, diakses 7 Januari 2016

[28] Joyce M. Hawkins, *Oxford Universal Dictionary* (Oxford: Oxford University Press, 1981), h. 89

Mu'jam al-Wasith, memberikan definisi *al-irhāb* dengan "sifat yang dimiliki oleh mereka yang menempuh kekerasan dan menebar kecemasan untuk mewujudkan tujuan-tujuan politik."[29] *Al-Irhāb* dalam pengertian di atas tidak ditemukan dalam al-Quran dan kamus-kamus Arab klasik, karena istilah itu belum dikenal di masa klasik. Bahkan penyebutan 8 kali penyebutan kata *al-irhāb* dan berbagai derivasinya (5 kali dalam surah-surah Makiyyah dan 4 kali dalam surah-surah Madaniyyah) selalu bermakna positif. Salah satunya adalah perintah Allah kepada kaum Mukmin untuk mempersiapkan berbagai kekuatan dan senjata yang dapat menggentarkan musuh Allah dan musuh mereka:

> *Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kalian sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yangdengan persiapan itu) kalian menggentarkan (turhibūna) musuh-musuh Allah dan musuh kalian, serta orang-orang selain mereka yang kalian tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya.* (Q.S. al-Anfal [8]:80).

Secara bahasa, kata *turhibūn* terambil dari *ra-hi-ba* yang berarti "takut/gentar". Ini bukan berarti melakukan teror. Memang dalam perkembangan bahasa Arab kontemporer, teror disebut *irhāb,* tetapi perlu dicatat bahwa al-Quran tidak menggunakan istilah *irhāb* dalam pengertian sebagaimana dimaksud dewasa ini. Makna-makna penggunaan *irhāb* dan derivasinya dalam al-Quran , tidak keluar dari makna kebahasaan; sebagiannya menunjuk arti takut dan gentar, dan yang lainnya bermakna sikap kependetaan (*rahbāniyyah*) (Q.S. al-Hadid [57]:27). Perlu juga dicatat

---

[29] Ibrahim Anis, dkk, *al-Mu'jam al-Wasīth,* jilid 1, (Kairo: Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, 1972), h. 376

bahwa yang digentarkan bukan masyarakat yang tidak bersalah, bahkan bukan semua yang bersalah, tetapi musuh agama Allah dan musuh masyarakat.

Kalimat "menggentarkan musuh-musuh kalian" menunjukkan bahwa kekuatan yang dipersiapkan itu tujuannya bukan untuk menindas atau menjajah, tetapi dalam rangka mencegah pihak lain yang ingin melakukan agresi. Tujuan dari persiapan kekuatan dimaksud sama dengan apa yang diistilahkan oleh para pakar militer modern dengan nama *deterrent effect*. hal ini karena mereka yang bermaksud jahat, jika menyadari besarnya kekuatan yang akan dihadapinya, tentu ia akan mempertimbangkan untuk melakukan penyerangan. Selain itu, al-Quran menggunakan kata *quwwah* (kekuatan) dengan berbagai derivasinya dalam arti kekuatan untuk menghadapi pembangkang, bukan untuk menganiaya dan memusnahkan, bahkan tidak menggunakannya tetapi sekadar "memamerkan"sehingga musuh merasa gentar. Karena itu, penggunaan kekuatan dalam sedapat mungkin harus dihindari, dan jika terpaksa digunakan ia digunakan untuk menghadapi "musuh Allah dan masyarakat", yakni mereka yang berusaha menimpakan bahaya orang lain. Sementara yang tidak melakukan itu, maka ia tidak perlu digentarkan. Juga perlu ditambahkan bahwa penggunaan senjata dalam rangka membela diri dan agama sama sekali tidak dapat dipersamakan dengan teror.[30]

Dari penggunaan berbagai kata yang menunjuk radikalisme dan kekerasan dalam teks keagamaan (al-Quran dan hadis), terlihat dengan jelas bahwa pada prinsipnya Islam sangat

[30] M. Quraish Shihab, *Ayat-ayat Fitna: Sekelumit Keadaban Islam di Tengah Purbasangka*, cet. I (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2008), h. 9-10.

menentang kekerasan dan radikalisme dalam berba-gai bentuknya. Sebaliknya, sejak awal kemunculannya Islam telah memproklamirkan dirinya sebagai agama yang sarat dengan ajaran moderat *(wasaṭiyah)* yang senantiasa meng-ajarkan perdamaian, kedamaian, dan ko-eksistensi.

Akar Genealogis Radikalisme dalam Islam

Di suatu subuh, 14 Ramadhan 40 H, tiga orang militan yang merencanakan pembunuhan terhadap 3 orang tokoh penting kaum Muslim di Mekah ketika itu, berusaha mencari saat yang tepat untuk melakukan pembunuhan. Mereka adalah 'Amr bin Bakr, Al-Barak bin Abdullah dan Abdurrahman bin Muljam yang semuanya merupakan anggota dari kaum Khawarij –kelompok yang keluar dan memisahkan diri dari mainstream Muslim – yang tidak puas dengan kepemim-pinan umat ketika itu. Mereka pada awalnya adalah pengikut dari salah seorang dari 3 pemimpin yang sedang mereka rencanakan pembunuhannya itu, yakni; Ali bin Abi Thalib, khalifah yang sah pada saat itu, tapi mereka tidak setuju pada kesediaan sang khalifah untuk menerima *tahkīm* (arbritase) antara sang khalifah dengan musuhnya, Mu'awiyah bin Abi Sufyan melalui orang yang ditunjuknya, yakni 'Amr bin 'Ash. Mereka juga menilai Mu'awiyah sebagai pemberontak terhadap kepemimpinan yang sah (*bughāt*), sehingga ia pun harus diperangi.[31]

Mereka menggunakan argumentasi al-Quran bahwa *lā hukma illal-Lāh* (tidak ada hukum kecuali hukum Allah) yang dielaborasi dari Q.S. al-Ma'idah [5]:44. Dan karena tidak

[31] Haidar Bagir, "Takfirisme: Asal-Usul dan Perkembangannya," dalam *haidarbagir.com*, diakses 12 Januari 2016

ditaatinya hukum Allah itu, maka *chaos* (*fitnah*) pun sehingga memunculkan dualisme pemerintahan di tengah kaum Muslim. Dan, karena tidak mau mengikuti hukum Allah, sang khalifah pun dituduh kafir, sebagaimana juga Mu'awiyah dan 'Amr bin 'Ash. Maka, selain khalifah, mereka pun mengirimkan orang untuk membunuh Mu'a-wiyah dan 'Amr bin 'Ash. Pada akhirnya mereka gagal membunuh Mu'awiyah dan 'Amr bin 'Ash, dan hanya berhasil membunuh Ali bin Abi Thalib ketika sedang shalat subuh di masjid. Dua sampai tiga hari sang khalifah masih bisa bertahan hidup sebelum akhirnya wafat. Sebelum menghembuskan nafas, dia sempat memberikan wasiat kepada kedua anaknya: Hasan dan Husain, yang isinya antara lain bahwa "orang-orang (Khawarij) ini masih akan terus dilahirkan dari tulang-tulang sulbi ayah mereka."[32]

Gerakan kaum Khawarij yang muncul di akhir masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib dengan prinsip-prinsipnya yang radikal inilah kemudian yang sering dijadikan contoh gerakan fundamentalisme klasik dalam sejarah Islam dan juga menandai terbentuknya gejala takfirisme (*takfiriyah*) dalam Islam. Suatu doktrin yang mengkafirkan sesama Muslim yang berbeda dengan mereka, bahkan sampai menghalalkan darahnya. Lebih jauh dari itu, mereka juga mengembangkan doktrin khusus elaboratif tentang takfir yang cukup *sophisticated* berdasarkan pemahaman mereka terhadap teks-teks keagamaan (al-Quran dan hadis) dan pemikiran "kaum salaf". Dan doktrin takfirisme ini tidak hanya terbatas pada tataran wacana, tetapi juga dikaitkan dengan anggapan bahwa yang bersangkutan dipandang

[32] Haidar Bagir, "Takfirisme: Asal-Usul dan Perkembangannya"...

telah keluar dari agama (murtad) sehingga boleh dimusnahkan di dunia dan di akhirat mereka dianggap celaka sebagai akibat dari perbuatan kufur tersebut.[33]

Dari rekaman sejarah tersebut dapat dilihat bahwa fundamentalisme Islam lebih banyak menekankan –atau setidaknya membenarkan– penggunaan radikalisme atas nama agama. Islam dianggap mengajarkan para pemeluknya yang fanatik untuk melakukan tindakan kekerasan tersebut sebagai manifestasi dari keimanan. Pandangan teologis radikal tersebut diikuti oleh sikap politik yang ekstrim dan radikal pula sehingga menganggap orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka dianggap kafir dan boleh dibunuh. Bahkan,mereka kemudian membagi wilayah menjadi dua: wilayah *dār al Islām* yang harus dilindungi dan wilayah *dār al-kuffār* yang harus diperangi dan dihancurkan.

Pada masa pra-modern, gerakan fundamentalisme radikal muncul pada abad 12 H di semenanjung Arabia di bawah pimpinan Muhammad ibn 'Abd al-Wahhab (1703-1792/1787) yang kemudian dikenal sebagai gerakan Wahabi. Inilah yang kemudian membentuk Salafisme awal, dengan Ibn Taimiyah sebagai tokoh utamanya. Meski mereka mengklaim mengikuti kaum salaf –figur-figur terkemuka dari generasi awal Islam hingga abad ke-2 H– tetapi pada praktiknya Salafisme cenderung mengikuti mazhab Hanbali yang cenderung ketat dan literal.

---

[33] Hal ini berbeda dengan penggunaan istilah takfir pada tataran wacana dan bersifat diskriminatif, yang juga tidak disertai ancaman pemusnahan di dunia atau ketidakselamatan di akhirat.Contohnya kasus pengafiran yang dilancarkan oleh Imam Ghazali kepada para filosof dalam bukunya *Tahāfut al-Falāsifah*. Bahkan, dengan hati-hati Imam Ghazali menjelaskan bahwa kategori kafir yang digunakannya tidak sama dengan kategori yang mengakibatkan si tertuduh kafir dihukumi keluar dari agama (*Ibid*)

Pada mulanya, gerakan ini bertujuan untuk memurnikan ajaran Islam serta mengajak kembali kepada ajaran al-Quran dan Sunnah Nabi Saw, sebagaimana yang diamalkan oleh generasi awal umat Islam (salaf). Namun dalam perkembangan selanjutnya, gerakan Salafiyah tidak hanya menyentuh dimensi purifikasi *credo* dan ritual, namun juga mulai menyentuh dimensi intelektual dan politik.[34] Bahkan, sebagaimana dicatat oleh para pengamat terhadap mazhab Hanbali, bahwa sejak masa Ibnu Taimiyah kelompok Islam ini memulai tradisi mengecam hingga mengkafirkan kelompok-kelompok Muslim yang tidak mengikuti pan-dangan Ibn Taimiyah. Dan ini tidak hanya terbatas terhadap kaum Syiah, yang diserang keras dalam bukunya *Minhaj as-Sunnah*, tetapi juga terhadap kelompok-kelompok Sunni lain seperti Asy'ariyah, Hanafiyah, kaum sufi, dan lain-lain. Tradisi pengecaman ini kemudian diteruskan oleh para murid Ibn Taimiyah, termasuk Ibn Qayyim al-Jauziyah.[35] Demikian pula sejarah mencatat gerakan ini juga melakukan tindak kekerasan dengan menghancurkan monumen-monumen historis di Mekah dan Madinah.

Dengan demikian nampak fundamentalisme radikal klasik dan pra modern banyak dipengaruhi oleh landasan teologi fundamental yang didasari oleh semangat kebangkitan Islam *(revivalisme of Islam)*. Sementara fundamentalisme radikal dalam Islam belakangan ini lebih banyak sebagai

---

[34]Edi Susanto, "Kemungkinan Munculnya Paham Islam Radikal...," h. 7-9.

[35]Tentu perlu dicatat bahwa kecenderungan takfiri ini tidak dapat dinisbatkan kepada semua aliran dalam Salafisme karena mereka memiliki spektrum tersendiri, dari yang paling moderat hingga yang paling ekstrem. Selain itu, perlu juga ditegaskan bahwa kelompok takfiri ini terpecah-pecah ke dalam banyak kelompok kecil-kecil. Bahkan, tidak jarang kelompok yang satu mengafirkan yang lain. Bahkan, sebagian di antara mereka menuduh kelompok lainnya sebagai Khawarij.

respon Islam atas Barat, meskipun tema-tema yang berkaitan dengan *inward oriented* tetap menjadi *concern* dan pilihan ideologis mereka. Setidaknya, ada dua masalah besar yang menjadi perhatian kelompok ini. *Pertama,* menolak sekularisme Barat yang memisahkan agama dari politik, gereja dari negara. Hal ini dianggap berbahaya karena dapat mengancam Islam sebagai agama yang tidak memisahkan antara dunia dan akhirat. *Kedua,* mereka menginginkan aturan Islam –yang disarikan dari al-Quran dan hadis Nabi Saw– menjadi aturan dan landasan bernegara.[36]

Dari paparan historis di atas dapat dikatakan bahwa radikalisme dan fundamentalisme Islam, sebagaimana juga fundamentalisme dalam agama lain, memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dengan kelompok lain. *Pertama*, skripturalisme, yaitu pemahaman harfiah dan tektualis atas ayat-ayat al-Quran . Karenanya mereka menolak hermeneutika sebagai cara dalam memahami al-Quran . *Kedua*, penolakan terhadap pluralisme dan relativisme yang dianggap akan merusak kesucian teks. *Ketiga,* penolakan terhadap pendekatan historis dan sosiologis yang dipandang akan membawa manusia melenceng jauh dari doktrin literal kitab suci. *Keempat*, memonopoli kebenaran atas tafsir agama, dimana mereka menganggap dirinya yang paling berwenang dalam menafsirkan kitab suci dan memandang yang lainnya sebagai kelompok yang sesat.[37]

---

[36] Kareen Armstrong, *Berperang Demi Tuhan, Fundamentalisme dalam Islam, Kristen dan Yahudi* (Jakarta: Serambi, 2001), h. ix.

[37] Martin E. Marty, "What is Fundamentalisme?Theological Perspective" dalam Hans Kung dan Jurgen Moltmann (eds.) *Fundamentalism as a Ecumanical Challenge* (London: Mac Millan, 1992), h. 3-13.

Ketika teks-teks keagamaan dipahami secara dangkal, maka tidak menutup kemungkinan akan melahirkan paham dan gerakan radikal. Karena itulah, untuk menangkal gerakan radikal, salah satu langkah yang diperlukan adalah pemahaman yang benar dan komprehensif atas teks-teks keagamaan tersebut. Inilah yang akan dijelaskan dalam paragraf-paragraf berikut ini.

Telaah atas Ayat-ayat "Kekerasan" dalam al-Quran

Ayat-ayat al-Quran yang seringkali disalahpahami dan dijadikan dalil bagi tindakan-tindakan radikal adalah ayat-ayat jihad dan ayat-ayat perang. Karena itu, menjadi penting untuk memahami ayat-ayat tersebut sesuai dengan konteks dan maksud pensyariatannya. Berikut ini akan diuraikan tentang kedua kelompok ayat tersebut.

Pertama, Ayat-ayat jihad

Bagi sebagian kelompok, jihad terkadang diartikan perang melawan musuh Islam, sehingga tindakan kekerasan terhadap segala sesuatu yangdianggap musuh Islam, merupakan perbuatan jihad yang mulia. Akibatnya kata jihad menjadi sesuatu yang mengerikan, dan mengakibatkan Islam menjadi tertuduh.Islam dipandang oleh orang di luar Islam dan Barat sebagai agama teroris. Sehingga tidak berlebihan jika dikatakan bahwa istilah jihad merupakan salah satu konsepsi Islam yang paling sering disalahpahami, khususnya di kalangan para ahli dan pengamat Barat.

Padahal jika kita telusuri kata jihad dalam al-Quran sebagaimana akan dijelaskan dalam paparan berikut berbeda dengan radikalisme dan peperangan. Jihad selain meru-

pakan salah satu inti ajaran Islam, juga tidak bisa disederhanakan dan diindentikkan dengan perang (*qitāl*). Perang selalu merujuk kepada pertahanan diri dan perlawanan yang bersifat fisik, sementara jihad memiliki makna lebih luas. Di sisi lain, *qitāl* sebagai terma keagamaan baru muncul pada periode Madinah, sementara *jihad* telah menjadi dasar teologis sejak periode Mekah.[38]

Menurut Seyyed Hossein Nasr, dari 36 ayat al-Quran yang mengandung (sekitar) 39 kata *ja-ha-da* dengan berbagai derivasinya, tidak lebih dari 10 ayat yang terkait dengan perang. Selebihnya kata tersebut merujuk kepada segala aktivitas lahir dan batin, serta upaya intens dalam rangka menghadirkan kehendak Allah di muka bumi, yang pada dasarnya merupakan pengembangan nilai-nilai moralitas luhur, dari mulai penegakan keadilan hingga kedamaian dan kesejahteraan umat manusia. dengan kata lain, jihad adalah kesungguhan hati untuk mengerahkan segala kemampuan untuk membumikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan. Pada tataran ini, pengabdian (ibadah) yang tulus dan penuh kesungguhan serta hubungan antar sesama manusia yang dilandasi kejujuran dan ketulusan adalah bagian dari jihad.[39]

Secara leksikal, menurut Ibn Faris (w. 395 H), kata *juhd*, pada awalnya mengandung arti kesulitan atau kesukaran.[40]

---

[38]Abd. A'la, "Pembumian Jihad dalam Konteks Indonesia Kekinian: Pengentasan Masyarakat dari Kemiskinan dan Keterbelakangan", dalam *HARMONI: Jurnal Multikultural & Multireligius*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang & Diklat Departemen Agama RI), Volume VIII, Nomor 32, Oktober-Desember 2009, h. 55

[39] Seyyed Hossein Nasr, *The Heart of Islam: Pesan-Pesan Universal Islamuntuk Kemanusiaan* (Bandung: Mizan, 2003), h. 313-314

[40] Ibn Faris, *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah,* muhaqqiq Abd al-Salām Muhammad Hārūn, jilid 1 (Beirut: Dār al-Fikr, 1979), h. 486

Jihad memang sulit dan menyebabkan keletihan. Ada juga yang berpendapat bahwa jihad berasal dari akar kata *juhd* yang berarti "kemampuan". Ini karena jihad menuntut kemampuan, dan harus dilakukan dengan kemampuan yang maksimal.[41] Selain sulit, jihad juga menuntut seseorang untuk mengerahkan segala daya dan upayanya untuk menggapai tujuan. Karena itu jihad adalah pengorbanan, dan dengan demikian sang mujahid tidak menuntut atau mengambil tetapi memberi semua yang dimilikinya.

Menurut Ibn Mandzur, kata *jāhada-yujāhidu-mujāhadah-jihād* artinya berusaha sungguh-sungguh dengan mencurahkan jerih payah dalam rangka melaksanakan perintah Allah; berjuang.[42]

Menurut ar-Ragib al-Ashfahani, jihad (dan *mujāhadah*) adalah upaya mengerahkan segala upaya untuk mengalah-kan musuh.[43]

Sebagaimana dimaklumi, dalam jiwa setiap manusia terdapat kebaikan dan keburukan. Demikian pula dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang terdiri dari berbagai individu. Dari sini lahirlah perjuangan (jihad), baik dalam skala individu maupun masyarakat dan negara. Karena itu, al-Ashfahani membagi jihad ke dalam tiga macam: (1) menghadapi musuh yang nyata, (2) menghadapi setan, dan (3) menghadapi nafsu yang terdapat dalam setiap orang. Ketiga macam jihad ini dicakup oleh Q.S. al-Hajj

[41]M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudh'ui atas Pelbagai Persoalan Umat,* cet. ke-2, (Bandung: Mizan, 1996), h. 501.

[42] Ibn Mandzur, *Lisān al-'Arab* (Kairo: Dār al-Hadīts, 2003), h. 239-41; Anis, dkk, *al-Mu'jam al-Wasīth*, jilid 1, h.142.

[43]al-Ragib al-Ashfahani, *al-Mufradāt fī Garīb al-Qurān,* cet ke-1, jilid 1 (Damaskus: Dār al-Qalam, 1412 H), h. 187.

[22]:78; at-Taubah [9]:41 dan al-Anfal [8]:72.[44]

Dari kata yang sama tersusun ucapan *jahida bi ar-rajul* (seseorang sedang mengalami ujian). Kalimat ini mengan-dung makna ujian dan cobaan, sesuatu yang wajar karena jihad memang merupakan ujian dan cobaan bagi kualitas seseorang, sebagaimana firman Allah: *Apakah kalian menduga akan dapat masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang yang berjihad di antara kalian dan (belum nyata) orang-orang yang sabar.* (Q.S. Ali Imran [3]:142).

Secara umum, al-Quran menjelaskan jihad dalam konteks pembahasan yang beragam, namun semuanya menjelaskan bahwa jihad menurut al-Quran adalah perjuangan untuk mewujudkan *as-salām*, *as-salāmah*, *al-shalāh*, dan *al-ihsan*, yakni perjuangan untuk mewujudkan perdamaian, kesejahteraan, dan perbaikan kualitas hidup sesuai ajaran al-Quran . Perjuangan untuk mewujudkan itu semua disebut *jihādfī sabīlillāh* (perjuangan di jalan Allah).[45]

Dalam Q.S. al-Maidah [5]:35 perjuangan mewujudkan kesejahteraan hidup lahir-batin, dunia-akhirat adalah merupakan kewajiban setiap orang beriman yang harus dilakukan atas dasar ketakwaan kepada Allah dan usaha (ikhtiar) orang beriman sebagai khalifah Allah di muka bumi untuk mengubah keadaan agar lebih baik dan lebih berkualitas lahir batin guna mendapatkan *al-falāh*; keberuntungan dunia dan akhirat.

Jihad di jalan Allah juga harus diawali dengan hijrah, yakni mengubah pikiran, keyakinan, emosi, persepsi, sikap, dan perilaku yang tidak sesuai dengan pesan al-Quran .Jadi,

[44]al-Ragib al-Ashfahani, *al-Mufradāt fī Garīb al-Qurān*...

[45]Kementerian Agama, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, jilid 1, h, 82-83

hijrah merupakan prakondisi yang diperlukan untuk bisa melaksanakan perintah berjihad, setelah seseorang beriman dan bertakwa. Oleh sebab itu, dalam banyak ayat dalam al-Quran, Allah meletakkan hijrah setelah beriman dan sebelum berjihad sebagaimana ayat-ayat berikut ini:

> *Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.* (Q.S. al-Baqarah [2]:218)
>
> *Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman.Mereka memperoleh ampunan dan rezeki (nikmat) yang mulia.*(Q.S.al-Anfal [8]:74)

al-Quran menegaskan dua cara untuk melaksanakan jihad di jalan Allah, yakni dengan harta (*māl, amwāl*) dan jiwa (*nafs, anfus*) sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. an-Nisa [4]:95; al-Anfal [8]:72; at-Taubah [9]:20, 44, 81, 88; al-Hujurat [49]:15; al-Shaff [61]:11). Berbagai tujuan jihad sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya tidak akan tercapai, tanpa kesediaan untuk mengorbankan harta sebab harta merupakan penopang utama jihad di jalan Allah. Jihad dengan harta bisa disalurkan melalui wakaf, infak, sedekah maupun program penggalangan dana untuk berbagai kepentingan umat.

Sedangkan kata *anfus* dalam al-Quran memiliki banyak arti, seperti nyawa, hati, jenis, dan totalitas manusia tempat terpadu jiwa dan raganya, serta segala sesuatu yang tidak dapat terpisah darinya. al-Quran menggambarkan eksistensi seseorang di hadapan Allah dan masyarakat dalam

bahasa *nafs*. Jadi, tidaklah keliru jika kata itu dalam konteks jihad dipahami dalam makna totalitas manusia, yang mencakup nyawa, emosi, pikiran, pengetahuan, tenaga, waktu dan tempat yang terkait dengannya.Makna ini diperkuat dengan adanya perintah dalam al-Quran untuk berjihad tanpa menyebutkan *nafs* atau harta benda (seperti dalam Q.S. al-Hajj [22]:78).[46] Menurut M. Quraish Shihab, kesalahpahaman jihad yang lebih dimaknai sebagai perjuangan fisik, antara lain diakibatkan oleh terjemahan yang kurang tepat atas ayat-ayat al-Quran yang berbicara jihad dengan *anfus,* dimanakata *anfus* sering diterjemahkan sebagai jiwa (nyawa) yang kemudian dikesankan sebagai pengorbanan nyawa (fisik) saja.[47]

Dengan demikian, memaknai jihad hanya dalam pengertian perjuangan fisik atau perlawanan senjata adalah keliru. Apalagi jika melihat penggunaan kata tersebut dalam al-Quran . Ayat-ayat tentang jihad sudah turun sejak Nabi SAW berada di Makkah, jauh sebelum turunnya perintah perang dan adanya izin mengangkat senjata untuk membela diri dan agama.Q.S. al-Furqan [25]:52 yang berbunyi, "Maka jangan kamu taati orang-orang kafir, dan berjihadlah melawan mereka menggunakan al-Quran dengan jihad yang besar", disepakati oleh ulama turun di Mekah.

Pada umumnya, ayat-ayat yang berbicara tentang jihad tidak menyebutkan objek yang harus dihadapi. Yang secara tegas dinyatakan objeknya adalah berjihad menghadapi orang kafir dan munafik sebagaimana disebutkan ayat berikut ini:

---

[46]M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, h. 506
[47]M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, h. 506

> *Wahai Nabi, berjihadlah menghadapi orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahannam dan itu adalah seburuk-buruk tempat.* (Q.S. At-Taubah [9]:73; at-Tahrim [66]:9)

Tetapi ini tidak berarti bahwa hanya kedua objek itu yang harus dihadapi dengan jihad, karena dalam ayat-ayat lain disebutkan musuh-musuh yang dapat menjerumuskan manusia ke dalam kejahatan, yakni setan dan nafsu manusia sendiri.Keduanya pun harus dihadapi dengan perjuangan.

> *Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya dia merupakan musuh yang nyata bagimu.* (Q.S. al-Baqarah [2]: 168).

> *Siapa lagi yang lebih sesat daripada yang mengikuti hawa nafsunya, tanpa petunjuk dan Allah?* (Q.S. al-Qashash [28]: 50).

> *Aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan) karena sesungguhnya (hawa) nafsu selalu mendorong kepada kejahatan kecuali yang diberi rahmat oleh Tuhanku.* (Q.S. Yusuf [12]: 53

Jihad dalam Islam merupakan aktivitas menyeluruh yang menyertai semua kegiatan lain. Karena tidak ada ada satu aktivitas pun – apalagi aktivitas keagamaan – yang tidak memerlukan jihad. Paling tidak, jihad diperlukan untuk menghambat rayuan nafsu yang selalu mengajak pada kedurhakaan dan pengabaian tuntunan agama. Karena itu, seorang Mukmin pastilah mujahid, karena jihad merupakan perwujudan identitas kepribadian Muslim (Q.S. al-Ankabut [29]:6). Jihad baginya tidak perlu menunggu izin (restu) untuk melakukannya. Ini berbeda dengan orang munafik (Q.S. at-Taubah [9]:44, 81).

Keluasan makna jihad sebagaimana ditunjukkan ayat-ayat al-Quran di atas inilah yang menjadikan ajaran Islam sebagai *powerful symbol* bagi ketekunan, kerja keras dan keberhasilan dalam sejarah Islam. Jihadlah yang mengantar-kan kaum Muslim menjadi khalifah Allah yang mengisi semua aspek kehidupannya dengan peradaban agung. Dengan kata lain, peradaban Islam dari waktu ke waktu merupakan perwujudan dari jihad. Dengan memaknai jihad semacam itu, kaum Muslim menggapai puncak prestasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, sekaligus pembumiannya dalam kehidupan sepanjang sejarah yang dilalui.

Namun dalam sejarah pula, jihadmengalami reduksi makna yang pada mulanya terkait erat dengan kondisi tertentu yang menuntut penekanan jihad pada bentuk pertahanan dan pembelaan diri. Hal ini berhubungan dengan keadaan pada masa pra-Islam, di mana wilayah Arab berada dalam *state of war* yang sebenarnya juga merupakan ciri umum dunia sebelum abad modern.[48] Kondisi ini menyebabkan setiap komunitas harus terlibat dalam perang demi melindungi dan mempertahankan diri agar tidak diserang oleh kelompok lain. Ketika Islam datang, fenomena kehidupan seperti itu terus berlangsung dalam kehidupan umat. Maka, ketika Nabi SAW Dan kaum Muslim hijrah ke Madinah, dan mereka diizinkan untuk melawan kaum musyrik, jihad dititikberatkan pada upaya mempertahankan diri dari ancaman dan serangan yang terus mereka hadapi. Di sisi ini, perlawanan kaum Muslim awal itu tidak terlepas dari ayat-ayat *qitāl* (perang) yang turun saat itu, sebagaimana yang

[48] Lihat Abdul Hakim Sherman Jackson, "Jihad in the Modern World", *www.lamppostproductions.com/wp-content/.../JIHAD_MOD_WLD.pdf*, diakses 2 Januari 2016.

akan dijelaskan pada paragraf berikutnya.

Secara garis besar, pesan jihad dalam al-Quran meliputi lima komponen: tujuan, pelaku, sarana, sasaran, imbalan, dan sanksi. Tujuan jihad ialah mewujudkan ide-ide Islam dalam al-Quran dan al-Sunnah, yakni tegaknya kalimah Allah [*li i'lāi kalimatillāh*] (Q.S. al-Baqarah [2]:218; Ali Imran [3]:142; al-Anfal [8]:74; al-Ankabut [29]:62; al-Mumtahanah [60]:1). Pelakunya adalah Rasulullah SAW dan kaum Mukmin (QS Ali Imran [3]:142; al-Ma'idah [5]:54; al-Anfal [8]:75; at-Taubah [9]:24, 44, 86, 88; Muhammad [47]:31). Imbalannya adalah memperoleh kebaikan, kemenangan dan kemuliaan di dunia, ampunan, dan surga penuh kebahagiaan di akhirat (Q.S. an-Nisa' [4]:95; al-Anfal [8]:74; at-Taubah [9]:20, 41).

Adapun mereka yang tidak berjihad mendapat predikat fasik dan diancam neraka jahannam di akhirat (Q.S. at-Taubah [9]:24, 81). Sasarannya, setidaknya dua hal, yakni musuh-musuh Allah yang tampak: orang-orang kafir, musyrik, munafik, dan para pelaku kejahatan maupun musuh yang tak tampak, yakni setan dan hawa nafsu (Q.S. al-Ma'idah [5]:35; al-Anfal [8]:72; al-Taubah [9]:41, 44, 73, 81; al-Furqan [25]:52; al-Ankabut [29]:6, 69; at-Tahrim [66]:9). Sarananya adalah harta dan jiwa. Jihad dilakukan dengan perkataan maupun perbuatan, baik melalui lisan, tulisan, kekuatan fisik, maupun dengan membelanjakan harta benda (Q.S. al-Nisa' [4]:95; al-Anfal [8]:72; al-Taubah [9]:20, 41, 44, 81 dan 88; al-Hujurat [49]:15).[49]

[49] Muhammad Chirzin, "Reaktualisasi Jihad fî Sabîl al-Lâh dalam Konteks Kekinian dan Keindonesiaan", dalam *Jurnal Ulumuna*, (Mataram: IAIN Mataram, 2006), Volume X Nomor 1 Januari-Juni 2006, h. 61

Sejalan dengan pemaknaan jihad dalam al-Quran yang sangat luas, banyak kaum Muslim kontemporer menawarkan perluasan lahan jihad sesuai dengan konteks kekinian. Ronald Alan Bull, seorang antropolog dari Amerika Serikat, dalam bukunya *Jihad Ala Pesantren di Mata Antropolog Amerika* menggambarkan bagaimana pesantren telah turut mengembangkan jihad damai (*peaceful jihad*). Menurutnya, jihad pesantren adalah bagaimana menciptakan modernitas yang cocok untuk umat Islam dan mampu bersaing di pasar dunia, tapi menghilangkan identitas keislamannya. Dia menganggap bahwa perjuangan damai lewat dakwah dan pendidikan dianggap jihad paling besar.[50]

Farid Esack, pemikir muslim kontemporer, merumuskan jihad sebagai perjuangan, mencurahkan daya upaya untuk melakukan transformasi pada tataran individu dan masyarakat.[51] Munawar Ahmad Anees mendefinisikan jihad sebagai perjuangan terus-menerus secara individual dan komunal ke arah pembangunan dan peningkatan menurut struktur dan kerangka nilai Islam untuk mewujudkan ideal-ideal yang tercantum dalam al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang merupakan konsep holistik bagi rekonstruksi sosial di mana anggota masyarakat terlibat dalam aksi positif untuk memperbaiki masyarakat.[52]

Moniruzzaman berusaha mengekplorasi jihad dalam konteks dunia kontemporer ke dalam tiga ranah yang meru-

---

[50] Ronald Alan Lukens-Bull, *Jihad Ala Pesantren di Mata Antropolog Amerika,* (Yogyakarta: Gama Media, 2004)

[51] Farid Esack, *Quran, Liberation, and Pluralism: An Islamic Perspective of Interreligious Solidarity Against Oppression,* (Oxford: Oneworld, 1997), h. 107.

[52]Munawar Ahmad Anees dalam Ziauddin Sardar dan Merryl Wyn Davis (ed.), *Wajah-wajah Islam*, ter. A.E. Priono dan Ade Armando (Bandung: Mizan, 1992), h.107

pakan persoalan cukup menantang dan sangat terkait dengan upaya pencapaian kesejahteraan umat Islam dan umat manusia, yakni *eco-political jihad*, *humanist (human rights) Jihad*, dan *jihad against international terrorism*.[53] Karenanya jihad dapat disesuaikan dengan konteks dan problematika yang dihadapi oleh sebuah bangsa. Dalam konteks Indonesia kekinian, misalnya, persoalan umat dan bangsa yang cukup menantang untuk dijadikan lahan jihad adalah masalah korupsi, penjarahan kekayaan negara, kemiskinan dan keterbelakangan, dan isu-isu lain.

Menurut Tim Penulis *Tafsir al-Quran Tematik*, jihad pada jalan Allah memiliki spektrum yang luas, yang tidak terbatas pada perang melawan musuh-musuh Allah, tetapi juga (1) Perjuangan untuk melindungi kaum duafa dari kekufuran, kefakiran, kemiskinan dan ketertinggalan; (2) Mendorong kaum Muslim untuk mengamalkan ajaran agama dengan sebaik-baiknya; (3) Membangun berbagai sarana dan prasarana dakwah, pendidikan, pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (4) Membangun kualitas hidup kaum Muslim sehingga menjadi umat yang cerdas dalam aspek intelektualitas, emosional dan spiritualitas; (5) Mendorong umat Islam untuk peduli terhadap pelbagai masalah sosial dan kemanusiaan guna

---

[53]*Eco-political jihad* adalah upaya keras untuk melakukan penghijauan, pelestarian binatang langka, gerakan anti polusi, dan pengembangan politik lingkungan akibat dari degradasi lingkungan, pemanasan global,dan penipisan lapisan ozon. *Humanist (human rights) jihad* mengacu kepada gerakan melawan penindasan, pelanggaran hak asasi manusia, tirani, atau diktatorial. Sedangkan *jihad against international terrorism* selain upaya eliminasi terorisme, juga terkait dengan upaya penyelesaian kekerasan dan pembersihan etnis, serta endemik global. Lihat, M. Moniruzzaman, "Jihad and Terrorism: An Alternative Explanation", *Journal of Religion & Society,* US: The Rabbi Myer and Dorothy Kripke Center for the Study of Religion and Society at Creighton University, Volume 10, 2008, h. 8-10.

mewujudkan perdamaian bagi seluruh manusia; (6) Menyadarkan umat Islam tentang perlunya menjaga kesehatan secara kuratif, preventif, dan promotif, termasuk kesehatan lingkungan agar mereka menjadi komunitas yang sehat, serta memiliki andil dalam pembangunan kualitas manusia yang unggul.[54]

Kedua, Ayat-ayat perang

Selain ayat-ayat jihad, ayat-ayat yang kerapkali dijadikan dasar pengembangan *stereotype* untuk mengidentifikasi Islam sebagai agama pro-kekerasan dan mendukung aksi terorisme adalah ayat-ayat perang. Karena itu, dalam paparan berikut ini ayat-ayat tersebut akan dikaji sesuai dengan konteks dan maknanya dalam perspektif al-Quran .

Kata *qitāl* (perang) dengan berbagai bentuknya disebut dalam al-Quran sebanyak 12 kali.[55] Secara bahasa, *qitāl* berasal dari *qa-ta-la* yang membentuk kata benda, *al-qatl* yang bermakna melenyapkan ruh/kehidupan dari tubuh seseorang.[56] Sedangkan menurut Ibnu Manẓur, kata *qa-ta-la* memiliki dua makna: *la'ana* (mengutuk) dan *al-muqātalah* (saling membunuh) dan *al-muhārabah* (saling membinasakan antara dua orang).[57]

Menurut al-Quran , perang merupakan alternatif terakhir dari berbagai pilihan yang harus diupayakan dalam mewujudkan perdamaian yang merupakan pesan esensial al-Quran . Ketika perdamaian ini ada yang mengganggu dan

---

[54] Kementerian Agama, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, jilid 1, h. 83-84

[55]Program CD Al-Quran, *Holy Quran*, versi 6.50 terbitan Sakhr, 1997

[56]al-Asfahani, *al-Mufradāt,* jilid 1, h. 655

[57]Ibnu Manẓur, *Lisān al-'Arab,* jilid 11, h. 654

tidak dihargai dan ketika kaum Muslim dizalimi, maka Allah mengizinkan kaum Muslim untuk memeranginya. Ia semacam pintu darurat yang hanya diizinkan dalam kondisi tertentu. Allah Ta'ala berfirman:

> *Diizinkan (berperang) kepada mereka yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizalimi. Dan sungguh Allah Mahakuasa menolong mereka (Yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, "Tuhan kami adalah Allah. "Sekiranya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah Maha kuat dan Maha perkasa.* (Q.S. al-Hajj [22]:39-40)

Ayat ini adalah ayat pertama kali yang turun terkait dengan perintah perang dalam Islam, setelah selama lebih dari sepuluh tahun di Makkah, kaum Muslim dianiaya. Sebelum diizinkan untuk berperang, mereka diperintahkan untuk menahan diri (Q.S. al-Nisa [4]:77 dan tetap bersabar dan berteguh hati (Q.S. al-Baqarah [2]:109; al-Ankabut [29]:59 dan al-Nahl [16]:42). Setelah kaum Muslim terusir dari kampung halaman mereka dan orang-orang yang tetap tinggal bahkan mengalami perlakuan yang lebih kejam, barulah Allah mengizinkan mereka untuk berperang sebagaimana ayat di atas.

Tetapi, sebagaimana dikemukakan Syalabi, siapa yang mendalami ayat tersebut akan melihat bahwa Islam sebenarnya tidaklah menginginkan peperangan. Ini bisa dilihat dari penggunaan kata kerja pada awal ayat yang menggunakan term *mabny majhūl* (*użina*) dimana pelaku (*fā'il*)-nya

yang dalam hal ini Allah disembunyikan. Ini menggambarkan betapa Allah tidak senang dengan peperangan. Secara fitrah, memang manusia cenderung tidak menyukai perang dan kekerasan (Q.S. al-Baqarah [2]:216). Karenanya, ketika ayat ini turun, ada kaum Muslim ada yang belum cukup yakin dengan ayat ini untuk dijadikan alasan untuk melakukan peperangan.[58]

Dari sini, maka hubungan Islam dengan dunia luar dibangun atas dasar perdamaian. Namun, dalam kondisi tertentu, seperti ada pihak yang memerangi Islam dan mengganggu agama, maka perang pun kemudian dibenarkan. Bahkan, perang dalam rangka membela agama bukan hanya dibenarkan oleh Islam. Agama kristen yang sering digambarkan sebagai agama yang sangat toleran dan penuh kasih juga membolehkan perang dalam situasi manakala dipandang membahayakan diri (Injil Lukas [22], 35-38, Lukas [12], 49-52.

Setelah ayat itu, kemudian Allah Swt menurunkan ayat yang menegaskan tentang diperbolehkannya perang sebagai penguat ayat di atas. Yakni firman Allah:

> *Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian, tetapi janganlah kalian melampaui batas, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.* (Q.S. al-Baqarah [2]:190)

Pemberian izin perang dalam ayat ini tidaklah mutlak, melainkan bersyarat bahwa peperangan itu dilakukan kepada orang yang memerangi saja dan tidak melampaui batas. Nabi Saw dan para penerusnya, ketika mengirimkan

---

[58] A. Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam,* jilid I, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994), h. 154.

pasukan perang, selalu memberikan intruksi agar tidak menyerang penduduk sipil –kaum wanita, orang tua, umat beragama yang sedang beribadah– atau memusnahkan hasil panen dan ternak mereka. Artinya, Islam melihat peperangan lebih sebagai tindakan defensif. Ofensif hanya dipandang *legitimate* untuk membela kebebasan beragama (Q.S. al-Hajj [22]:39-41), melawan penyerangan dan membela diri (Q.S. al-Baqarah [2]:190), membela orang-orang yang tertindas atas penindasan kelompok lain,[59] pengkhianatan terhadap perjanjian, dan penganiayaan (*fitnah*) sebagaimana dijelaskan ayat-ayat yang lalu dan ayat-ayat berikut ini:

> *Mengapa kalian tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah, baik laki-laki, wanita, maupun anak-anak yang semuanya berdoa, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi-Mu dan berilah kami penolong dari sisi-Mu."* (Q.S. an-Nisa' [4]:75)

> *Dan seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian umat manusia atas sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia (yang dicurahkan) atas semesta alam.* (Q.S. al-Baqarah [2]:251)

> *Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah orang-orang kafir (yakni, yang menolak kebenaran) karena mereka tidak beriman.(Yaitu) orang-orang yang terikat perjanjian denganmu, kemudian setiap kali berjanji, mereka mengkhianati janjinya, sedang mereka tidak peduli (kepada Allah). Maka, jika engkau (Muhammad) mengungguli mereka dalam peperangan maka cerai-beraikanlah orang-orang yang*

[59] Karena itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Zaki Pasya, sejarawan kontemporer, semua peperangan yang terjadi pada masa Nabi, dilaksanakan hanya untuk membela diri atau menghalau serangan yang sudah berada di ambang pintu (Lihat Abbas Mahmud al-Aqqad, *Haqāiq al-Islām wa Abātīl Khusūmih,* (Kairo: Mu'assasah Hindawi, 2013), h. 149-151.

> *di belakang mereka, agar mereka mengambil pelajaran.* (Q.S. al-Anfal [8]:55-57)

> *Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnahdan supaya kepatuhan semata-mata untuk Allah.Jika mereka berhenti (dari kekafiran), maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.* (Q.S. al-Anfal [8]:39)

> *Dan bunuhlah mereka di mana saja kalian jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kalian (Mekah); dan fitnah lebih keras/kejam daripada pembunuhan, dan janganlah kalian memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kalian di tempat itu.Jika mereka memerangi kalian (di tempat itu), maka bunuhlah mereka.Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Maka jika mereka berhenti (menganiaya kalian), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada lagi fitnah dan sehingga kepatuhan hanya semata-mata (terhadap) Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim.* (Q.S. al-Baqarah [2]:191-193).

Jika Q.S. al-Anfal [8]:190 berbicara tentang kapan peperangan diizinkan untuk dimulai oleh kaum Muslim, maka ayat 193 menjelaskan kapan peperangan harus mereka hentikan serta konsekuensi yang dipikul oleh yang enggan menghentikannya. Ia dapat dimulai saat ada musuh yang menyerang. Mereka itulah yang diperangi sedang peperangan harus dihentikan bukan saat agama Islam tersebar ke seluruh dunia, tetapi ia harus dihentikan saat penganiayaan berakhir, karena tujuan peperangan adalah menghentikan penganiayaan.

> *Perangilah mereka sampai batas berakhirnya penganiayaan, dan agama itu hanya untuk Allah belaka. Jika mereka telah berhenti dari penganiayaan, tidak lagi dibenarkan permu-*

> *suhan kecuali atas orang-orang yang zalim.* (Q.S. al-Baqarah [2]:193).

Begitu pentingnya penghentian peperangan dan keinginan al-Quran untuk mencipatakan perdamaian sampai Allah mengingatkan dalam al-Quran :

> *Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dan jika mereka bermaksud menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah (menjadi pelindungmu). Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongan-Nya dan dengan kaum mukmin.* (Q.S. al-Anfal [8]:61).

Ketika perang selesai pun, al-Quran maupun hadis memberikan berbagai ketentuan menyangkut perlakuan terhadap tawanan perang dan hubungan baru dengan kaum non-Muslim. Perang tentu saja tidak dilihat sebagai alat dalam agama untuk mengubah agama masyarakat lain. Pembagian wilayah menjadi *dār al-harb* dan *dār al-Islām* sama sekali tidak terdapat dalam al-Quran dan hadis, tetapi hasil ijtihad para ulama. Mereka yang menggunakan istilah tersebut, saat itu tengah berbicara tentang memerangi musuh di negeri-negeri yang berada di sekitar negeri Muslim. Bahkan bagi ulama-ulama tersebut, yang ada bukan dikotomi, melainkan trikotomi, yakni dengan bagian ketiganya adalah *dār al-shulh* (negeri yang terikat perjanjian dengan negeri Muslim).[60]

Jadi dalam perang sekalipun, al-Quran mengaitkan perintah berperang dengan perintah agar tidak melampaui batas, siap memaafkan, dan mendahulukan perdamaian. Balasan

---

[60] Muhammad Abdul Halim, *Menafsirkan Al-Quran dengan Metode Menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran,* terj. Rofik Suhud, cet. ke-3 (Bandung: Penerbit MARJA, 2012), h. 97

atas kezaliman pihak lain diingatkan al-Quran agar dengan carayang setimpal dan mengembalikan situasi kepada keadaan yang normal (seimbang), sebagaimana firman Allah berikut ini:

> *Dan jika kalian membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kalian bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar.* (Q.S. an-Nahl [16]:16).[61]

Ayat itu turun terkait dengan kemarahan Rasulullah Saw atas kematian pamannya, Hamzah bin Abdul Muthalib, yang sangat mengenaskan dan diperlakukan secara tidak manusiawi dalam perang Uhud. Melihat hal itu, kaum Muslim bermaksud membunuh 70 orang Makkah sebagai ganti nyawa mereka.

Karena itu, jika menelaah teks-teks keagamaan dan sejarah peperangan dalam Islam, Islam memberikan sejumlah etika dalam peperangan yang sejalan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan.Syekh Ali Jumu'ah, Mufti Agung Mesir, menyebutkan 6 syarat dan etika perang dalam Islam yang membedakannya dengan terorisme, yakni: (1) cara dan tujuannya jelas dan mulia, (2) perang hanya dibolehkan terhadap pasukan yang memerangi, bukan penduduk sipil, (3) perang harus dihentikan bila pihak lawan telah menyerah dan memilih perdamaian, (4) melindungi tawanan perang dan memperlakukannya secara manusiawi, (5) memelihara lingkungan, antara lain tidak membunuh binatang tanpa alasan, membakar pohon, merusak tanaman, mencemari air dan sumur, dan merusak rumah/bangunan, dan (6) menjaga hak kebebasan beragama para agamawan dan

---

[61] Perintah untuk membalas yang setimpal dan tidak berlebihan juga dinyatakan dalam Q.S. al-Syūrā [42]:40 dan Q.S. al-Hajj [22]:60)

pendeta dengan tidak melukai mereka.[62]

Dengan demikian, kendati perang (*qitāl*)mendapatlegitimasi, ayat-ayat mengenai keharusan kaum Muslim untuk ber-pegang pada etika-moral luhur dan jihad dalam makna luas, tetap berlaku. Bahkan melalui pengaitan *qitāl* dengan jihad, umat Islam dituntut untuk tetap berpegang teguh dengan keluhuran akhlak kendati saat melakukan perlawanan yang bersifat fisik. Hal ini diperkuat dengan ayat-ayat yang mengajarkan agar kaum Muslim berbuat baik dan adil terhadap orang kafir, selama mereka tidak memerangi, mengganggu, atau mengkhianati perjanjian dengan kaum Muslim, sebagaimana terbaca dalam ayat berikut ini:

> *Allah tidak melarang kalian berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusirmu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kalian menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangimu dalam urusan agama dan mengusirmu dari kampung halamanmu serta membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang yang zalim.* (QS Al-Mumtahanah [60]: 8-9).

Memang, bukan tidak ada kejadian dalam peperangan yang di dalamnya, tawanan dijatuhi hukuman mati.Khususnya, dalam kasus pengkhianatan kaum Yahudi dalam Perang Khandaq/Ahzab. Namun, jika dipelajari, hukuman itu dijatuhkan Nabi Saw.justru mereka sendiri memilih dan menunjuk pelaku arbitrase dari kalangan mereka (Yahudi) sendiri –yang, dengan berdasar hukum Yahudi, kemudian

[62] Ali Jumu'ah, "al-Jihād fī al-Islām", dalam *Haqīqāt al-Islām fī 'Alam Mutaghayyir* (Kairo: Kementerian Wakaf Mesir, 2003), h. 700

memutuskan bahwa seluruh tawanan laki-laki yang menjadi kombatan harus dihukum mati. Walhasil, jelaslah bahwa Islam melihat perang dan penggunaan kekerasan pada umumnya, sebagai pengecualian, bukan prinsip umum dalam memecahkan masalah pertentangan.

Ayat lain yang perlu dijelaskan dan dipahami dengan baik adalah ayat berikut ini yang sering dijuluki dengan "ayat-ayat pedang" (*ayāt al-sayf, sword verses*)

> *Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah ketika Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kalian menganiaya dirimu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah (qātilū) kaum musyrik itu semuanya sebagai-mana mereka memerangimu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa.* (Q.S. at-Taubah [9]:36)
>
> *Lalu, apabila telah habis bulan-bulan haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrik itu di mana saja kalian jumpai mereka, tangkaplah mereka, kepunglah mereka dan intailah mereka di tempat pengintaian.Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang.* (Q.S. al-Tawbah [9]:5)

Secara sepintas, ayat tersebut dengan keras memerintahkan untuk memerangi kaum musyrik secara keseluruhan, mem-bunuh, menangkap, mengepung dan mengintai mereka. Ayat ini turun dimana kebencian dan permusuhan sengit kaum musyrik dan penganiaan [*fitnah*] (Q.S. al-Baqarah [2]:193; al-Anfal [8]:39) terhadap kaum Muslim tumbuh semakin kuat. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kaum Muslim, berupaya keras untuk mengembalikan kaum

Muslim kepada paganisme (Q.S. al-Baqarah [2]:217) dan berulang kali mereka melanggar perjanjian. Kepada orang-orang musyrik yang seperti itulah kemudian kaum Muslim diperintahkan untuk memerangi mereka.

Bahkan terhadap musuh seperti itu pun kaum Muslim tidak serta merta diperintahkan untuk menyerbu mereka dan melakukan pembalasan secara membabi buta.Namun sebaliknya, sebagaimana dinyatakan dalam ayat tersebut – "apabila telah habis bulan-bulan haram itu" – menunjukkan bahwa kaum Muslim mesti memerhatikan berbagai aturan dan perjanjian yang berlaku antara mereka.

Di samping itu, al-Quran pun mengecualikan orang-orang musyrik yang tidak melanggar perjanjian mereka dan menjaga perdamaian dengan kaum Muslim (Q.S. at-Taubah [9]:7). Al-Quran juga memerintahkan agar musuh yang meminta perlindungan harus dilindungi dan diselamatkan ke tempat aman yang mereka cari (Q.S. at-Taubah [9]:6). Konteks dan keutuhan ayat di atas, dengan segala pembatasannya, yang kerapkali diabaikan oleh mereka yang menjadikan ayat tersebut sebagai landasan ayat yang mendorong radikalisme dan kekerasan, sampai menyebut ayat ini sebagai "ayat pedang" padahal tidak ada sepatah pun kata "pedang" muncul dalam al-Quran .

Makna jihad dan perang (*qitāl*) dalam al-Quran sebagaimana telah dijelaskan banyak didistorsi oleh sarjana Barat dan bahkan oleh sebagian penulis Muslim. Hal ini timbul salahsatunya sebagai akibat kesalahpahaman terhadap terminologinya, atau – yang paling sering terjadi – penggunaan kutipan-kutipan yang berada di luar konteksnya.[63]

[63] Halim, *Menafsirkan Al-Quran,* h. 90

Kalimat Asghar Ali Engginer di bawah ini bisa menggambarkan kesalahpahaman tersebut:

> *"In fact as far the Qur'an is concerned the concept of "jihad" has nothing to do with violence. The Qur'an does not use this word in any sense of war at all. It is much later usage with which we are not concerned here. It is highly regrettable that not only non-muslims even Muslims in general think that the Qur'an uses the term jihad for war and that is duty of Muslims to wage jihad (i.e. in the sense of war) in the way of Allah. The word jihad unfortunately has been so misused in the history of Muslims that even an Arabic dictionary al-Qamus al 'Asri by Elias Antoon (Cairo, 1972) gives its meaning as "militancy, fighting" and jihad fi sabil al din as "holy or religious war". This is how original meanings are distorted through popular practice".*[64]

Konklusi

Dari paparan di atas, tampak jelas perbedaan antara jihad, perang (*qitāl*) dan tindakan radikalisme dan terorisme.al-Quran tidak menggunakan istilah jihadsemata-mata untuk maksud perang.Untuk menunjuk perang atau pertempuran, al-Quran menggunakan kata *qitāl.* Tujuan utama jihad adalah *human welfare* dan bukan *warfare*.[65] Maka jihad bersifat mutlak dan tak terbatas sehingga jihad menjadi kewajiban setiap muslim sepanjang hidupnya. Sedangkan *qital* bersifat kondisional dan temporal, dibatasi oleh kondisi tertentu dan sebagai upaya paling akhir setelah tidak ada cara lain kecuali perlawanan fisik. Jihad adalah sesuatu yang pada dasarnya baik, sementara *qitāl* tidak demikian. Selain itu

[64] Asghar Ali Engineer, "Islam and Doctrines of Peace and Non-Violence," *Jurnal Internasional "Ihya 'Ulumuddin"*, PPs IAIN Walisongo, Vol. 3, (Semarang: Walisongo Press, 2001), h. 121

[65]Moniruzzaman, "Jihad and Terrorism", h. 7

pelaksanaan *qital* harus memenuhi segala persyaratan yang sangat ketat.

Dari ayat-ayat yang telah ditelaah, tampak tidak ada satu pun ayat jihad dan perang yang berkonotasi untuk melegalkan tindak kekerasan dalam menyelesaikan setiap persoalan. Sebaliknya, jihad dan perang semata-mata ditekankan untuk meningkatkan ibadah baik vertikal maupun horisontal. Inilah titik awal kesalahan penafsiran tentang jihad dan perang yang kemudian dijadikan alat justifikasi oleh sebagian penafsir untuk melakukan ekspresi radikalisme agama. Menurut Yusuf al-Qardhawi, faktor utama munculnya radikalisme keagamaan adalah minimnya pemahaman yang benar dan mendalam atas esensi ajaran agama Islam itu sendiri, dimana Islam hanya dipahami secara dangkal dan parsial.[66] Karena itu, salah satu butir hasil keputusan sidang Majma' al-Fiqh al-Islamiy nomor 128 tentang Hak-hak Asasi Manusia dan Kekerasan Internasional, poin kelima menyatakan: perlu diperjelas pengertian beberapa istilah seperti jihad, terorisme, dan kekerasan yang banyak digunakan media masa. Istilah-istilah tersebut tidak boleh dimanipulasi dan harus dipahami sesuai dengan makna yang sebenarnya.[67]

[66] Al-Qaradhawi, *as-Ṣahwah al-Islāmiyyah...*, h. 59-67.
[67] Kementerian Agama, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, jilid 1, h.107

REFERENSI:

A'la, Abd., "Pembumian Jihad dalam Konteks Indonesia Kekinian: Pengentasan Masyarakat dari Kemiskinan dan Keterbelakangan," *HARMONI: Jurnal Multikultural & Multireligius*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang & Diklat Departemen Agama RI), Volume VIII, Nomor 32, Oktober-Desember 2009

Ahmed, Akbar S., *Posmodernisme: Bahaya dan Harapan bagi Islam*, terj. M. Sirozi, Bandung: Mizan, 1993

Al-Aqqad, Abbas Mahmud, *Haqāiq al-Islām wa Abātīl Khusūmih* (Kairo: Mu'assasah Hindawi, 2013).

Al-Aṣfahani, al-Ragib, *al-Mufradāt fī Garīb al-Qurān,* cet ke-1, jilid 1, (Damaskus: Dār al-Qalam, 1412 H)

Al-Hawari, Muhammad, "Al-Irhāb: al-Mafhūm wa al-Asbāb wa Subul al-Ilāj", *http://www.assakina.com/book/6007.html*, diakses 7 Januari 2016

Al-Qardhawi, Yusuf, *al-Ṣahwah al-Islāmiyyah Bayna al-Juhūd wa al-Taṭarruf*, cet. ke-1, (Kairo: Dār al-Syurūq, 2001).

Anis, Ibrahim, dkk, *al-Mu'jam al-Wasīṭ,* jilid 1 (Kairo: Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, 1972)

Arkoun, Mohammed, *Berbagai Pembacaan al-Quran* , terj. Machasin (Jakarta: INIS, 1997).

Armstrong, Kareen, *Berperang Demi Tuhan, Fundamentalisme dalam Islam, Kristen dan Yahudi* (Jakarta: Serambi, 2001).

Asshofie, Agil, "Radikalisme Gerakan Islam", *http://agil-asshofie.blogspot.com/2011/10/radikalisme-gerakan-politik.html*, diakses pada 25 Januari 2016.

Azra, Azyumardi, "Fenomena Fundamentalisme dalam Islam," dalam *Ulumul Qur'an* No. 3, Vol. IV, tahun 1993.

Bagir, Haidar, "Takfirisme: Asal-Usul dan Perkembangannya," dalam *haidarbagir.com*, diakses 12 Januari 2016

Azra, Azyumardi, *Islam Reformis: Dinamika Intelektual dan Gerakan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999).

Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1999)

Chirzin, Muhammad, "Reaktualisasi Jihad fî Sabîl al-Lâh dalam Konteks Kekinian dan Keindonesiaan", dalam *Jurnal Ulumuna*, Mataram: IAIN Mataram, 2006, Volume X Nomor 1 Januari-Juni 2006

Engineer, Asghar Ali, "Islam and Doctrines of Peace and Non-Violence," *Jurnal Internasional "Ihya 'Ulumuddin"*, PPs IAIN Walisongo, Vol. 3, Semarang: Walisongo Press, 2001

Esack, Farid, *Quran, Liberation, and Pluralism: An Islamic Perspective of Interreligious Solidarity Against Oppression,* (Oxford: Oneworld, 1997).

Esposito, John L., *Islamic Threat: Myth or Reality*, Oxford: Oxford University Press, 1992

Faris, Ibn, *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah,* muhaqqiq Abd al-Salām Muhammad Hārūn,jilid 1, Beirut: Dār al-Fikr, 1979

Fealy, Greg & Hooker, Virginia (ed.), *Voices of Islam in Southeast Asia: A Contemporary Sourcebook* (Singapore: ISEAS, 2006)

Gibb, H.A.R., *Aliran-Aliran Moderen Dalam Islam*, terj. Machnun Husein (Jakarta: Rajawali Press, 1990).

Halim, Muhammad Abdul, *Menafsirkan al-Quran dengan Metode Menafsirkan al-Quran dengan al-Quran* , terj. Rofik Suhud, cet. ke-3, (Bandung: Penerbit MARJA, 2012).

Hanafi, Muchlis M., "Konsep Al-Wasathiyyah dalam Islam", dalam *HARMONI: Jurnal Multikultural & Multireligius*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan

Litbang & Diklat Departemen Agama RI), Volume VIII, Nomor 32, Oktober-Desember 2009

Hawkins, Joyce M., *Oxford Universal Dictionary* (Oxford: Oxford University Press, 1981).

Herdi Sahrasad, "Jangan Lupakan *Radikalisme Agama," Koran Tempo*, opini, Kamis, 22 Juni 2006.

Hermann Frederick Eilts,. "Reviving the Middle East Peace Process: An International Conference," *Middle East Insight,* vol. 5, no. 3, 1987.

Hitti, Philip K. , *History of The Arabs* (London: The Macmilan Press LTD, 1974).

Huntington, Samuel P., "Benturan Peradaban, Masa Depan Politik Dunia", *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu dan Kebudayaan,* (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF, 1993), Vol. 4, No. 5.

Jackson, Abdul Hakim Sherman, "Jihad in the Modern World", *www.lamppostproductions.com/wp-content/.../ JIHAD_MOD_WLD.pdf*, diakses 2 Januari 2016

Jumu'ah, Ali, "al-Jihād fī al-Islām", dalam *Haqīqāt al-Islām fī 'Alam Mutaghayyir* (Kairo: Kementerian Wakaf Mesir, 2003).

Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam* (Bandung: Mizan, 1997).

Lajnah Pentashihan Mushaf al-Quran Kementerian Agama, *Tafsir al-Quran Tematik*, jilid 1 (Jakarta: Kamil Pustaka, 2014).

Lukens-Bull, Ronald Alan, *Jihad Ala Pesantren di Mata Antropolog Amerika* (Yogyakarta: Gama Media, 2004).

Machasin, "Fundamentalisme dan Terorisme," makalah yang dipresentasikan dalam Moslem Scholars Congress dengan tema "Reading of The Religious Texts and The Roots of Fundamentalism," Saphir Yogyakarta,

Minggu, 13 Juni 2004

Hans Kung dan Jurgen Moltmann (eds.) *Fundamentalism as a Ecumanical Challenge* (London: Mac Millan, 1992).

Moniruzzaman, M., "Jihad and Terrorism: An Alternative Explanation", *Journal of Religion & Society,* US: The Rabbi Myer and Dorothy Kripke Center for the Study of Religion and Society at Creighton University, Volume 10, 2008

Moussali, Ahmad S, *Moderate and Radical Islamic Fundamentalism: The Quest for Modernity, Legitimacy, and the Islamic State* (1999), dalam Manẓur, Ibn, *Lisān al-'Arab* (Kairo: Dār al-Hadīṡ, 2003).

Muttaqin, Akhmad Elang, "Mengakrabi Radikalisme," *https://elangmutaqin.wordpress.com/2012/05/26/mengakrabi-radikalisme/*, diakses 5 Januari 2016.

Nasr, Seyyed Hossein, *The Heart of Islam: Pesan-Pesan Universal Islamuntuk Kemanusiaan* (Bandung: Mizan, 2003).

Nasution, Harun, *Theologi Islam, Sejarah Analisa dan Perbandingan* (Jakarta: UI Press, 1991).

Nasution, Harun, *Islam Rasional*, (Bandung: Mizan, 1995).

Program CD al-Quran , *Holy Quran*, versi 6.50 terbitan Sakhr, 1997.

Program CD Hadis, *Mausū`at al-Hadīs al-Syarīf*, edisi 6.2, Harf Information Technology Company, 1998-2000.

Rahman, Fazlur, *Islam And Modernity* (Chicago: The University of Chicago Press, 1982).

Rosidah, Nur, "'Fundamentalisme Agama," *Jurnal Walisongo,* Volume 20, Nomor 1, Mei 2012.

Sardar, Ziauddin, dan Merryl Wyn Davis (ed.), *Wajah-wajah Islam*, ter. A.E. Priono dan Ade Armando (Bandung: Mizan, 1992).

Shaban, M.A., *Islamic History* (Cambridge: Cambridge University Press, 1994).

Shihab, M. Quraish, *Ayat-ayat Fitna: Sekelumit Keadaban Islam di Tengah Purbasangka*, cet. ke-1 (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2008).

Susanto, Edi, "Kemungkinan Munculnya Paham Islam Radikal di Pesantren," *JurnalTadris,* Pamekasan: Sekolah Tinggi Agama Islam Pamekasan, Vol. 2, No. 1, 2007.

Syalabi, A., *Sejarah dan Kebudayaan Islam,* jilid 1 (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994).

Watt, William Montgmery, *Islamic Fundamentalism And Modernity* (London: T.J. Press, 1998).

Yudi Latif, *Gerak Politik yang Tertawan: Menggagas Ulang Prinsip-prinsip Lembaga Kepresidenan* (Jakarta: CPPS, 2004).

---------, *Unholy War: Teror Atas Nama Islam,* (Yogyakarta: Ikon, 2003).

--------, *Wawasan al-Quran : Tafsir Maudh'ui atas Pelbagai Persoalan Umat,* cet. ke-2 (Bandung: Mizan, 1996).

Bibliografi

A'la, Abd., "Pembumian Jihad dalam Konteks Indonesia Kekinian: Pengentasan Masyarakat dari Kemiskinan dan Keterbelakangan," *HARMONI: Jurnal Multikultural & Multireligius*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang & Diklat Departemen Agama RI), Volume VIII, Nomor 32, Oktober-Desember 2009

Abdalla, Abshar, Ulil dan Sahrasad, Herdi, "Meruntuhkan Hegemoni Tafsir, Menghidupkan Kembali Teks," *Ulumul Quran,* Nomor 3 Vol.5 tahun 1994.

Abdalla, Abshar, Ulil, dkk, *Islam Liberal dan Fundamental: Sebuah Pertarungan Wacana* (Yogyakarta: Elsaq, 2003).

Adian Husaini, "Paradoks Kebangkitan Islam," *www.icmi.org*, diakses pada 20 Desember 2004.

Ahmed, Akbar S., *Posmodernisme: Bahaya dan Harapan bagi Islam*, terj. M. Sirozi, Bandung: Mizan, 1993

Al Qurtuby, Sumanto, "Quo Vadis Jaringan Islam Liberal?," *Islamlib.com,* 10 maret 2005.

Al-Aqqad, Abbas Mahmud, *Haqāiq al-Islām wa Abātīl Khusūmih* (Kairo: Mu'assasah Hindawi, 2013).

Al-Aṣfahani, al-Ragib, *al-Mufradāt fī Garīb al-Qurān,* cet ke-1, jilid 1, (Damaskus: Dār al-Qalam, 1412 H)

Al-Hawari, Muhammad, "Al-Irhāb: al-Mafhūm wa al-Asbāb wa Subul al-Ilāj", *http://www.assakina.com/book/6007.html*, diakses 7 Januari 2016

Al-Qardhawi, Yusuf, *al-Ṣahwah al-Islāmiyyah Bayna al-Juhūd wa al-Taṭarruf*, cet. ke-1, (Kairo: Dār al-Syurūq, 2001).

Alwy, Muntasir, *Aplikasi Islam Dalam Wilayah Kuadran, Rumusan Dasar Teoretis, Praksis dan Revolusioner Adaptasi Mukimin terhadap Kondisi-Kondisi Negara* (Jakarta: Pilar Press, 2004).

Anis, Ibrahim, dkk, *al-Mu'jam al-Wasīṭ,* jilid 1 (Kairo: Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, 1972)

AR, Muhtadin, "Menangkap Pesan Para Teroris," Kompas, 8 Agustus 2003

Arief, Sritua, "Ekonomi Indonesia: Demokrasi Ekonomi atau Eksploitasi Ekonomi?", *Jurnal Konfrontasi*, no.1 1999.

Arifin, Syamsul, "Menakar Otentitas Islam Liberal," *Jawa Pos,* 1 Februari 2000.

Arkoun, Mohammed, *Berbagai Pembacaan al-Quran* , terj. Machasin (Jakarta: INIS, 1997).

Arkoun, Muhammad, *Aina Huwal Fikrul Islamy Al-Mu'ashir* (Beirut: Darus Saqi, 1993).

Armstrong, Kareen, *Berperang Demi Tuhan: Fundamentalisme dalam Islam, Kristen dan Yahudi* (Jakarta: Serambi, 2001).

Armstrong, Karen, "The True, Peaceful Face Of Islam", *Time*, October 1, 2001 Vol. 158 No. 15.

Armstrong, Karen, *Sepintas Sejarah Islam*, terj. (Yogyakarta: Ikon Teralitera, 2002)

Armstrong, Karen, *The Battle for God* (New York: Ballantine Books, 2001).

Armstrong, Karen,, *A History of God, The 4000-Year Quest of Judaism, Christianity and Islam* (New York: Random House, 1996).

Armstrong, Karen, *Islam: A Short History* (New York: Modern library, 2000).

Armstrong, Karen, *Muhammad: A Biography Of The Prophet* (2000).

Asshofie, Agil, "Radikalisme Gerakan Islam", *http://agil-asshofie.blogspot.com/2011/10/radikalisme-gerakan-politik.html*, diakses pada 25 Januari 2016.

Aziz, Abdul; Tholkhah, Imam & Soetarman, *Gerakan Islam Kontemporer di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991).

Azra, Azyumardi, "Fenomena Fundamentalisme dalam Islam," dalam *Ulumul Qur'an* No. 3, Vol. IV, tahun 1993.

Azra, Azyumardi, *Islam Reformis: Dinamika Intelektual dan Gerakan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999).

Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1999)

Bagir, Haidar, "Takfirisme: Asal-Usul dan Perkembangannya," dalam *haidarbagir.com*, diakses 12 Januari 2016

Bahri, Syaiful, "Korupsi, Demokrasi, dan Reformasi", *Sinar Harapan*, 21 Mei 2005.

Bakti, Ikrar Nusa, "Hubungan Baru Sipil-Militer", dalam Ninok Leksono, editor, *Indonesia Abad XXI*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2000).

Bakti, Ikrar Nusa, dkk, "Military Politics, Ethnicity and Conflict in Indonesia," *Working Paper*, No. 62, Januari 2009, (Oxford: Center for Research Inequality, Human Security and Ethnicity (CRISE), 2009).

Barry, Robert L., "Benturan Peradaban atau Persatuan dalam

Keanekaragaman?" *Kompas*, 4 Oktober 1993

Barton, Greg, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Antara Paramadina, 1999).

Bashori, Agus Hasan, "Bahaya Islam Liberal," *Risalah,* 22 April 2004.

Boy ZTF, Pradana, "Orientalisme dan Dialog AntarKitab," *Paper* (Canberra: ANU, 2004).

Brumberg, Daniel, "Islam, Elections and Reform in Algeria," *Journal of Democracy*, Vol. 2, Musim Dingin 1991

Buku Saku, Visi, Misi dan Strategi Staf Umum Teritorial TNI-AD, 2000.

Chirzin, Muhammad, "Reaktualisasi Jihad fî Sabîl al-Lâh dalam Konteks Kekinian dan Keindonesiaan," dalam *Jurnal Ulumuna*, Mataram: IAIN Mataram, 2006, Volume X Nomor 1 Januari-Juni 2006

Chomsky, Noam, "On the US attacks", www.zmag.org.

Cornell & Spector, "Central Asia: More Than Islamic Extremists," *The Washington Quarterly*, Vol. 25, No.1, 2002.

Dengel, Hold Harald, *Kartosuwiryo dan Darul Islam*, (trans.), (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999).

Dokumen Polri, "Tabel Motif & Tujuan Peledakan Bom Bali 12 Oktober 2002," 2003.

D. Jackson, Karl & Pye, Lucian W., *Political Power and Communications in Indonesia*, (Berkeley University of California Press, 1978).

E. Marty & Appleby, R. Scott (eds), *Fundamentalisms Observed*, (Chicago: University of Chicago Press, 1991).

Engineer, Asghar Ali, "Islam and Doctrines of Peace and Non-Violence," *Jurnal Internasional "Ihya 'Ulumuddin"*,

PPs IAIN Walisongo, Vol. 3, Semarang: Walisongo Press, 2001

Esack, Farid, *Quran, Liberation, and Pluralism: An Islamic Perspective of Interreligious Solidarity Against Oppression,* (Oxford: Oneworld, 1997).

Esposito, John L., *Islamic Threat: Myth or Reality*, Oxford: Oxford University Press, 1992

Falaakh, M. Fajrul, "Harmoni Antarperadaban: Pertemuan Inklusif," *Kompas*, 15 November 1993.

Faris, Ibn, *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah,* muhaqqiq Abd al-Salām Muhammad Hārūn,jilid 1, Beirut: Dār al-Fikr, 1979

Fealy, Greg & Hooker, Virginia (ed.), *Voices of Islam in Southeast Asia: A Contemporary Sourcebook* (Singapore: ISEAS, 2006)

Foucault, Michael, *Language, Counter-Memory, Practice: Selected Essays and Interviews*, ed. with a preface by Donald F. Bouchard; trans. Donald F. Bouchard and Sherry Simon (Oxford: Blackwell, 1977).

Foucault, Michael, *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972-1977*, ed. Colin Gordon (Brighton: Harvester, 1980).

Francis Laffan, Michael, *Islamic Nationhood and Colonial Indonesia*: *The Umma Below the Wind* (New York: Routledge Curzon, 2003).

Gazali, Hatim, "Menyikapi Hal Yang Dianggap Benar," *Wacana,* 6 Juli 2004.

Gibb, H.A.R., *Aliran-Aliran Moderen Dalam Islam*, terj. Machnun Husein (Jakarta: Rajawali Press, 1990).

Greider, William, *One World, Ready or Not, The Manic Global Capitalism* (New York: Simon & Schuster, 1997).

Halim, Muhammad Abdul, *Menafsirkan al-Quran dengan Metode Menafsirkan al-Quran dengan al-Quran* , terj. Rofik Suhud, cet. ke-3, (Bandung: Penerbit MARJA, 2012).

Hanafi, Muchlis M., "Konsep Al-Wasathiyyah dalam Islam", dalam *HARMONI: Jurnal Multikultural & Multireligius*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang & Diklat Departemen Agama RI), Volume VIII, Nomor 32, Oktober-Desember 2009

Hans Kung dan Jurgen Moltmann (eds.) *Fundamentalism as a Ecumanical Challenge* (London: Mac Millan, 1992).

Harsono, Andreas, "Democracy will keep Indonesia 'friendly'," *The Nation*, January 22, 2002.

Hatta, Mohammad, "Beladjar Ekonomi", dalam *buku Peringatan Dies Natalis III Mahasiswa FEUI*, 1953.

Hawkins, Joyce M., *Oxford Universal Dictionary* (Oxford: Oxford University Press, 1981).

Herdi Sahrasad, "Jangan Lupakan *Radikalisme Agama," Koran Tempo*, opini, Kamis, 22 Juni 2006.

Hermann Frederick Eilts,. "Reviving the Middle East Peace Process: An International Conference," *Middle East Insight,* vol. 5, no. 3, 1987.

Hitti, Philip K. , *History of The Arabs* (London: The Macmilan Press LTD, 1974).

Hoffman, Bruce, *Inside Terrorism* (New York: Columbia University Press, 1998).

Hofmann, Murad, *Islam: The Alternative*, terj. Christiane Banerji dan Murad Hofmann (United Kingdom: Garnet Publishing, 1993).

Huntington, Samuel P., "Benturan Peradaban, Masa Depan Politik Dunia," *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu dan Kebu-*

dayaan, (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF, 1993), Vol. 4, No. 5.

Huntington, Samuel P., "Keynote Address," *paper,* Colorado College, 1999.

Huntington, Samuel P., *The Clash of civilizations and the Remaking of World Order* (London: Simon & Schulster, 1996).

Huntington, Samuel P., *Who Are We?: The Challenges to America's National Identity* (New York: Simon & Schuster, 2004).

Huntington, Samuel, *Political Order in Changing Societies*, (Yale University Press, 1968).

Husaini, Adian, "Menonton dan Menunggu Janji AS," *Kompas*, 1 Maret 2004

Imron, Ali, *Sang Pengebom* (Jakarta: Penerbit Republika, 2007).

Jackson, Abdul Hakim Sherman, "Jihad in the Modern World", *www.lamppostproductions.com/wp-content/.../JIHAD_MOD_WLD.pdf*, diakses 2 Januari 2016

Jones, Sydney, "al-Qaeda in Southeast Asia: The Case of the *Ngruki Network* in Indonesia," *International Crisis Group (ICG) Reports*, 8 Agustus 2002.

Jumu'ah, Ali, "al-Jihād fī al-Islām," dalam *Haqīqāt al-Islām fī 'Alam Mutaghayyir* (Kairo: Kementerian Wakaf Mesir, 2003).

K. Emmerson, Donald (ed.), *Indonesia Beyond Soeharto: Negara, Ekonomi, Masyarakat, Transisi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001).

Keck and Sikkink, *Activists Beyond Borders: Transnational Advocacy Networks in International Politics* (Ithaca: Cornell University Press, 1998).

Kepel, Gilles, *Jihad: The Trail of Political Islam,* trans. by Anthony F. Roberts (London, New York: I.B. Tauris, 2002)

Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam* (Bandung: Mizan, 1997).

Kurzman Charles, (ed), *Wacana Islam Liberal,* (Jakarta: Paramadina, 2001).

Kurzman, Charles (ed.), *Liberal Islam, A Sourcebook* (Oxford University Press, 1998).

Kurzman, Charles "Pengantar," dalam *Islam Liberal dan Konteks Islaminya* (Jakarta: Paramadina, 2001).

Lajnah Pentashihan Mushaf al-Quran Kementerian Agama, *Tafsir al-Quran Tematik*, jilid 1 (Jakarta: Kamil Pustaka, 2014).

Latif, Yudi, "Kejarangan Membawa Nilai," *Kompas*, 2 Juli 2005.

Latif, Yudi, *Inteligensia Muslim dan Kuasa* (Bandung: Mizan, 2005).

Lewis, Bernard, *What Went Wrong? Western Impact and Middle Eastern Response* (London: Phoenix, 2002)

Liddle, R. William, "Islam and Politics in Late New Order Indonesia," unpublished paper presented at the Conference on Religion and Society in the Modern World: Islam in Southeast Asia, Jakarta, 29-31 May 1995, organised by the Indonesian Institute of Science (LIPI), American-Indonesian Exchange Foundation (AMINEF) and IAIN Syarif Hidayatullah, *Conference on Religion and Society in the Modern World*, Jakarta.

Lukens-Bull, Ronald Alan, *Jihad Ala Pesantren di Mata Antropolog Amerika* (Yogyakarta: Gama Media, 2004).

Luttwak, Edward, *Turbo-Capitalism: Winners and Losers in the Global Economy* (New York: Harper Parennial, 1999).

Machasin, “Fundamentalisme dan Terorisme,” makalah yang dipresentasikan dalam Moslem Scholars Congress dengan tema “Reading of The Religious Texts and The Roots of Fundamentalism,” Saphir Yogyakarta, Minggu, 13 Juni 2004

Madjid, Nurcholish, “Mewujudkan Masyarakat Madani dalam Semangat Reformasi”, *Kompas*, 5-6 Oktober 2001.

Marty, E. & Appleby, R. Scott (eds), *Fundamentalisms Observed* (Chicago: University of Chicago Press, 1991).

Maruih, Sufandi, “Dialog Dengan Aktivis JIL,” *Harian Terbit,* 30 Januari 2004.

Mas'oed, Mohtar, “The State Reorganisation of Society under the New Order,” *Prisma,* edisi bahasa Inggris, No. 47.

Mas'oed, Mohtar, *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*, terj. Rusli Karim (Jakarta: LP3ES, 1989).

McVey, Ruth (Ed.), *Southeast Asian Capitalists*, (SEAP Cornell University, 1992).

Moniruzzaman, M., “Jihad and Terrorism: An Alternative Explanation,” *Journal of Religion & Society,* US: The Rabbi Myer and Dorothy Kripke Center for the Study of Religion and Society at Creighton University, Volume 10, 2008

Moussali, Ahmad S, *Moderate and Radical Islamic Fundamentalism: The Quest for Modernity, Legitimacy, and the Islamic State* (1999), dalam Manẓur, Ibn, *Lisān al-'Arab* (Kairo: Dār al-Hadīṡ, 2003).

Mu'adz, Muhammad Arkoun, “Anggitan Tentang Cara-Cara Tafsir al-Quran ,” *Jurnal Salam,* vol.3 No. 1/2000.

Mubarak, M. Zaki, ”Dari NII ke ISIS Transformasi Ideologi dan Gerakan dalam Islam Radikal di Indonesia Kontemporer,” *Jurnal Epistemé,* Vol. 10 No. 1, Juni 2015.

Muhtadin AR, “Islam Jalan Damai”, *Media Indonesia* 7 Januari 2003.

Murdoch, Lindsay, ”Bin Laden 'Funded Christian-haters,” *Sydney Morning Herald*, 28 September 2001.

Muttaqin, Akhmad Elang, “Mengakrabi Radikalisme,” *https://elangmutaqin.wordpress.com/2012/05/26/mengakrabi-radikalisme/*, diakses 5 Januari 2016.

Mydans, Seth, ”Militant Islam Unsettles Indonesia And Its Region,” *New York Times*, 21 September 2001.

Naisbitt, John, *Global Paradox* (New York: Avon, 1994).

Nasr, Seyyed Hossein, *The Heart of Islam: Pesan-Pesan Universal Islamuntuk Kemanusiaan* (Bandung: Mizan, 2003).

Nasution, Harun, *Islam Rasional*, (Bandung: Mizan, 1995).

Nasution, Harun*, Theologi Islam, Sejarah Analisa dan Perbandingan* (Jakarta: UI Press, 1991).

P. Scmid, Alex & Jongman, A.J., *Political Terrorism*: *A New Guide to Actors, Authors, Concepts, Data Bases, Theories, and Literature* (USA: Transaction Publisher, 2005), 2nd Edition.

Panimbang, Ismal Fahmi, ”Geopolitik Islam vis-à-vis Barat: Perspektif tentang Fundamentalisme Islam,” *Jurnal Pemikiran Islam,* Vol.1, No.3, September 2003, International Institute of Islamic Thought Indonesia.

Pfaff, William, ”The Clash of Civilizations is for Historys Dustbin,” *International Herald Tribune*, 18 Oktober 2001.

Pianin, Eric & Woodward, Bob, ”Terror Concerns of U.S. Extend to Asia: Arrests in Singapore and Malaysia Cited,” *Washington Post*, January 18, 2002; h. A18.

Piliang, Yasraf Amir, *Sebuah Dunia yang Menakutkan*, (Bandung: Mizan, 2001).

Pitt, William R., *War on Iraq dan The Greatest Sedition is Silence: Four Years in America* (Pluto Pers, 2003).

Priyono, B. Herry, "Neoliberalisme, Kolonisasi Homo Ekonomikus dan Homo Finansialis," *paper*, dipresentasikan dalam diskusi Neoliberalisme dan Kemiskinan di Pusat Analisis Sosial Akatiga, 04 Juni 2007.

Program CD al-Quran , *Holy Quran*, versi 6.50 terbitan Sakhr, 1997.

Program CD Hadis, *Mausū`at al-Hadīs al-Syarīf*, edisi 6.2, Harf Information Technology Company, 1998-2000.

R. White, Jonathan, *Terrorism: An Introduction* (Wadsworth Publishing 1991).

Rachman, M. Fadjroel; Sahrasad, Herdi & Chadidar, Al, *Gerakan Mahasiswa, Rezim Tirani dan Ideologi Reformasi*, (Jakarta: Madani Press, 2000).

Rachman, Munawar, Budhy, "Perjumpaan Kristen-Islam perlu Toleransi Sejati," *Kompas,* 20 Agustus 2005.

Rahman, Fazlur, *Islam And Modernity* (Chicago: The University of Chicago Press, 1982).

Riyanti Yusuf, Nova, "Delusion of Grandeur," *Gatra*, 18 Oktober 2003, h. 37.

Robison, Richard & R. Hadiz, Vedi, *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets* (London: Routledge 2004).

Robison, Richard, *Indonesia: The Rise of Capital* (Sydney: Allen and Unwin, 1986).

Rosidah, Nur, "'Fundamentalisme Agama," *Jurnal Walisongo,* Volume 20, Nomor 1, Mei 2012.

Roy, Oliver, *The Failure of Political Islam* (New York: I.B. Tauris, *1994).*

Roy, Olivier, *Globalised Islam: the Search for a New Ummah* (Columbia University Press, 2004)

S. Karni, Asrori, "Komunitas", *GATRA*, 17 Nopember 2003.

Sahal, Ahmad, "MUI dan Fatwa Antidemokrasi," *Tempo*, 21 Agustus 2005.

Sahrasad, Herdi, "AS dan Zona Krisis Pasca Serangan Teroris," opini, *Kompas*, 25 September 2001

Sahrasad, Herdi, "Jokowi dan Utang Swasta," *Kompas*, opini, 24 Juli 2015

Sardar, Ziauddin, dan Merryl Wyn Davis (ed.), *Wajah-wajah Islam*, terj. A.E. Priono dan Ade Armando (Bandung: Mizan, 1992).

Schiller, James, "Development Ideology in New Order Indonesia," *Magister Thesis* (Ohio: Ohio University, 1978).

Schwarz, Adam, *A Nation in Waiting: Indonesia in the 1990s* (Westview Press, 1994).

Senghaas, Dieter, *The Clash within Civilisations-Coming to terms with Cultural Conflicts* (London & New York: Routledge, 2002).

Serres, Michel, *Conversations on Science, Culture and Time* (Michigan: The University of Michigan Press, 1995).

Serres, Michel, *Genesis* (Michigan: The University of Michigan Press, 1996).

Shaban, M.A., *Islamic History* (Cambridge: Cambridge University Press, 1994).

Shariati, Ali, *Man and Islam* (Islamic Publications International, 2005)

Shihab, M. Quraish, *Ayat-ayat Fitna: Sekelumit Keadaban Islam di Tengah Purbasangka*, cet. ke-1 (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2008).

Sinayangsah, Darmawan, “Peran Militer di era Reformasi”, *makalah*, 2003.

Suhelmi, Ahmad, *Pemikiran Politik Barat* (Jakarta: Gramedia, 2001).

Sundhaussen, Ulf, *The Road to Power: Indonesian Military Politics 1945-1967,* (Kualalumpur: Oxford University, Press, 1982)

Supriyo, Agung, “Hubungan Sipil dan Militer pada pemerintahan Sipil di Indonesia 1989 – 2000,” *Skripsi Sarjana*, (Depok: FISIP UI, 2002).

Susanto, Edi, “Kemungkinan Munculnya Paham Islam Radikal di Pesantren,” *Jurnal Tadris,* Pamekasan: Sekolah Tinggi Agama Islam Pamekasan, Vol. 2, No. 1, 2007.

Sutarto, Endriartono, “Militer Indonesia Menatap Masa Depan, Belajar dari Masa Lalu,” *Kompas,* 4 Oktober 2003.

Syahnakri, Kiki, “Demokratisasi dan Reformasi Internal TNI,” *Kompas*, 4 Oktober 2003.

Syalabi, A., *Sejarah dan Kebudayaan Islam,* jilid 1 (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994).

T. Hadar, Leon, “The Green Peril: Creating the Islamic Fundamentalist Threat”, *Policy Analysis,* No. 77, August 27, 1992.

Takeyh, Ray, ”Islamism: Rest In Peace,” *The National Interest,* No. 63, 2001.

Tarrow, Sidney, *Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics* (Cambridge University Press, 1998).

Terdiman, Richard, *Discourse/Counter-Discourse: The Theory and Practice of Symbolic Resistance in Nineteenth-Century France* (Ithaca: Cornell University Press, 1989).

Tibi, Bassam, *Islamism and Islam* (New Haven: Yale University Press, 2012).

Tibi, Bassam, *The Challenge of Fundamentalism: Political Islam and the New World Disorder* (Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1998).

Tim Redaksi Hot Copy, *Osama Bin Laden: Teroris atau Mujahid* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001).

Tobing, Maruli, "Menangkap Pesan Teroris," *Kompas,* Oktober 2003.

Van Bruinessen, Martin, "Gerakan Sempalan di Kalangan Umat Islam Indonesia: Latar Belakang Sosial-Budaya" [Splinter Movements within the Indonesian Muslim Community], *Jurnal Ulumul Qur'an* (Jakarta), 3, 1, 1992.

Watt, William Montgmery, *Islamic Fundamentalism And Modernity* (London: T.J. Press, 1998).

White, Jonathan R., *Terrorism: An Introduction* (Wadsworth Publishing, 1991).

Yudi Latif, *Gerak Politik yang Tertawan: Menggagas Ulang Prinsip-prinsip Lembaga Kepresidenan* (Jakarta: CPPS, 2004).

Yusuf, Nova Riyanti, "Delusion of Grandeur," *Gatra*, 18 Oktober 2003.

Zakaria, Fareed "Islam, Democracy and Constitutional Liberalism," *Political Science Quarterly*, Vol.119, No.1, 2004.

_____, *Unholy War: Teror Atas Nama Islam,* (Yogyakarta: Ikon, 2003).

_____, *Wawasan al-Quran : Tafsir Maudh'ui atas Pelbagai Persoalan Umat,* cet. ke-2 (Bandung: Mizan, 1996).

_____, "Fear of Fundies," *The Economist*, February 15, 1992.

_____, "Transkrip Dialog Para Ulama dan Tokoh Masyarakat Se-Jateng dengan Tersangka Pelaku Terror

Kelompok Jamaah Islamiyah (JI)", Bahan Kepolisian Negara RI, 25 September 2003.

______, "Tabel Motif & Tujuan Peledakan Bom Bali 12 Oktober 2002", Dokumen Polri, 2003.

______, "Transkrip Dialog Para Ulama dan Tokoh Masyarakat Se-Jateng dengan Tersangka Pelaku Terror Kelompok Jamaah Islamiyah (JI)", Bahan Kepolisian Negara RI, 25 September 2003.

______, *Nida'ul Islam*, February - March 1997.

______,*The Economist,* 21-December 1996.

______, "Gado-Gado Islam Liberal," *Sabili, No. 15, Thn IX/2001.*

______, "Ulama Dihina, Tumpas Gerombolan Liberal," *Majalah Sabili,* No. 3, Tahun XIII, 25 Agustus 2005.

BIOGRAFI

HERDI SAHRASAD lulusan sarjana studi Rusia FIB Universitas Padjadjaran dan meraih Doktor dari UIN Yogyakarta. Ia juga pernah menjadi visiting researcher di Russian and East European Institute, Indiana University, Bloomington, USA (1989). Intelegensia sederhana dan mantan aktivis PBHMI ini juga pernah melakukan perjalanan jurnalistik sebagai wartawan perang ke Timur Tengah (Mesir, Jordania, Israel, Palestina, Saudi 1990) dan meliput kudeta militer di Manila 1989. Ia memperoleh training postgraduate Asian Studies di United Nations University & University of Phillipines (Manila, 1991); menjadi visiting fellow di Center of Southeast Asian Studies, dan Slavic/Russian studies, Monash University Australia atas kebaikan Prof John Legge dan Prof Herbert Feith dan Prof Milicent Vladiv Glover (1992); melakukan perjalanan jurnalistik dan berdiskusi di Charles University of Praha (Ceko), Universitas Hamburg, Jerman dan London School of Economics (a Talk with Prof Michael Leifer, LSE), London (1993); dan juga menjadi visiting journalist pada "Southeast Asia Program" Cornell University, Ithaca, New York, USA atas kebaikan Prof Benedict Anderson (1994).

Selain itu, ia juga menempuh post graduate training and courses setingkat Master "Energy and Sustainable Development International Session, Universidad da Costa Rica, 1994; Trade and Sustainable Development Course, Chiang Mai

University, Thailand, 1995; Harare Africa (1996), Leadership for Environment and Development Course, 1994-1996, LEAD based in New York funded by Rockefeller Foundation. Selain itu, Herdi juga merupakan alumnus The International Academy for Leadership, Gummersbach, Bonn, Jerman 1995, funded by FNS; menjadi visiting PhD student ISEAS Singapore/Institute of China Studies University of Malaya (2007); menjadi peneliti tamu (research scholar) untuk postdoctoral research tahun 2012, di Southeast Asian Center, Henry M Jackson School of International Studies, University of Washington Seattle atas kebaikan Prof Laurie Sears/Loren Ryter PhD/ Arlene Lev dan Department of Political Science, University of California Berkeley, USA, atas kebaikan Prof. M. Steven Fish.

Tulisannya dimuat pelbagai jurnal dan koran antara lain: harian Kompas, the Jakarta Post, Prisma, Koran Tempo/ Tempo Interaktif, Ulumul Quran, Suara Pembaruan, Sinar Harapan, Jawa Pos, Republika, Pikiran Rakyat, Suara Merdeka, Bisnis Indonesia dan sebagainya. Sajak-sajaknya dipublikasikan harian Kompas, Republika, Suara Pembaruan, Koran Tempo, Media Indonesia, Suara Merdeka, majalah Horison dan Pikiran Rakyat.

Agar tidak sia-sia dan hilang ditelan zaman, maka ratusan artikel, makalah dan tulisannya diterbitkan dalam bentuk buku, antara lain: *LSM, Demokrasi & Keadilan: Catatan dari Arena Masyarakat dan Negara* (Jakarta: LP3ES, 1999), *Negara Madinah: Refleksi tentang Agama dan Pluralisme* (bersama Al Chaidar, Jakarta: Madani Press, 2000), *Gerakan Mahasiswa, Rezim Tirani dan Ideologi Reformasi* (bersama M Fadjroel Rachman & Al Chaidar, diterbitkan Madani Press, 2000),

Rizal Ramli dan Blok Perubahan (Freedom Foundation dan PSIK Paramadina, 2009), *Prabowo the Raising Star* (Freedom Foundation dan PSIK Paramadina, 2009), *Kallanomics* (Balai Pustaka, 2009), *Islamism and Fundamentalism* (bersama Al Chaidar, diterbitkan Malikussaleh Press, 2012), *Asia Tenggara: Kuasa dan Kepemimpinan* (Media Institute dan CTSS-UI, 2013), *Teknokrasi Habibie dan Diaspora Teknolog IPTN di Amerika* (LSAF, 2013), *Arab Spring, Risalah Studi Wilayah Timur Tengah* (Media Institute dan LSAF, 2013), *Media, State and Society* (Media Institute dan LSAF, 2014), *Indonesia: Ketidakadilan, Korupsi dan Kekerasan* (CSSUI, 2016), *Aceh, Krisis dan Transisi sebelum Perjanjian Helsinki* (CSS-UI dan Labfit UIN Jakarta, 2016), dll.

AL CHAIDAR, lahir di Lhokseumawe, Aceh, 22 November 1969. Meraih MA dari pasca sarjana Fisip UI dan kini mahasiswa PhD Antropologi UI, Depok. Dikenal sebagai pengamat terorisme dan peneliti/dosen di Fisip Universitas Malikussaleh Aceh.

Seorang Neo-Modernis muda muslim, Deputi Direktur Freedom Foundation ini menyelesaikan S1 jurusan Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Indonesia tahun 1996 dengan skripsi berjudul Diskursus Politik Islam Dalam Gerakan Darul Islam dan Moro National Liberation Front dengan predikat memuaskan. Pengalamannya antara lain menjadi Redaksi Pelaksana dari Jurnal mahasiswa Ilmu Politik dan Sosial FISIP UI (1992-

1994); Ketua Lingkaran Studi Creative Minority (LSCM) 1989-1993; Anggota Indonesia Student Association for International Studies (ISAFIS) 1990; Anggota editor pada Jurnal mahasiswa yang dikeluarkan oleh Jaringan Kekerabatan Antropologi se Indonesia; Anggota dari forum diskusi Majelis Sinergi Kalam (Masika) di bawah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI); Peneliti pada Studi Evaluasi P3DT yang diadakan oleh Lembaga Pengkajian Pembangunan Nasional (LPPN) 1998; Melakukan penelitian mengenai Jemaah Tabligh dan Depolitisasi Umat Islam di Aceh dengan beasiswa dari The Toyota Foundation melalui Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial (YIIS)1998.

Semasa mahasiswa, penulis aktif di berbagai kegiatan di kampus. Dalam lingkup dunia akademis internasional, menjadi pembicara dengan paper berjudul *Indonesia and Japan: From a bitter past toward a better prospect* di forum pada The Third International Student Association of Japan, 1992; Melakukan studi awal mengenai masyarakat dan budaya Jepang Tokyo, Kyoto, Osaka, Okayama, Kobe, Hiroshima dan Kyushu, 1992; Melakukan studi komparatif ke Malaysia dan Singapura dalam bentuk rangkaian diskusi mengenai isu-isu Politik dan Hak Asasi Manusia dengan mahasiswa di University of Malaya dan National University of Singapore 1992; Melakukan kunjungan balasan ke Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) di Singapura dan membuat rencana penelitian mengenai Islam Nusantara 1992; Direktur proyek pada program diplomasi mahasiswa ke berbagai universitas di Inggris (University of London, SOAS, London School of Economics and Political Science), Jerman (Hamburg University) dan Cekoslovakia (Universitas Karlovi). Sejak remaja, penulis sudah aktif menulis di berbagai media

massa maupun jurnal ilmiah; selain itu penterjemah buku karangan Jack Sewards yang berjudul *Hara-kiri, A Japanese Ritual Suicide* (Hara-kiri, Bunuh diri Ala Jepang, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994); Tim penulis buku *Beras, Koperasi dan Politik Orde Baru: 70 tahun Bustanil Arifin* (Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1995); Co-editor buku *Pancaran Rahmat dari Arun* (Jakarta: PT Arun LNG, 1998); *Penulis buku Reformasi Prematur: Jawaban Islam terhadap Reformasi Total* (Jakarta: Pustaka Darul Falah, 1998), *Aceh Bersimbah Darah: Mengungkap Penerapan Status DOM di Aceh 1989-1998* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1998), *Wacana Ideologi Negara Islam: Studi Harakah Darul Islam dan Moro National Liberation Front* (Jakarta: Pustaka Darul Falah, 1999), *Pemilu 1999: Pertarungan Ideologis Partaipartai Islam vs Partai-partai Sekuler* (Jakarta: Pustaka Darul Falah, 1999), *Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia S. M. Kartosoewirjo: Data dan Fakta Sejarah Darul Islam* (Jakarta: Pustaka Darul Falah, 1999), *Sepak Terjang KW9 Abu Toto Menyelewengkan NKA-NII Pasca S. M. Kartosoewirjo: Serial Musuh-Musuh Darul Islam* (Jakarta: Madani Press, 2000), dll.[*]

Kelompok-kelompok Muslim radikal di Indonesia melihat masyarakat kita mengalami sekularisasi, dekadensi moral dan krisis kepemimpinan. Untuk mengatasinya, mereka meyakini Islam sebagai solusinya. Pergaulan bebas, permisivisme, aborsi, kenakalan remaja, lemahnya supremasi hukum (KKN), dan semakin tidak bermoralnya para pemimpin bangsa memberikan keyakinan bahwa sekularisasi telah gagal menjadi bagian dari kehidupan bangsa.

Karena itulah, bagi mereka menerapkan syariat Islam secara kaffah dianggap sebagai solusi yang tepat. Radikalisasi yang tumbuh di kalangan muslim adalah efek domino dari kebobrokan sistem sosial masyarakat yang yang sudah tidak lagi mengindahkan moral dan peraturan agama. Itu sebabnya, mereka yakin bahwa Islam mampu menyelesaikan semua problem masyarakat agar menjadi lebih Islami; agar tidak ada KKN, agar pergaulan antar remaja lebih Islami, dan tidak ada lagi perilaku tidak bermoral di bumi Indonesia. Tentu saja, kalau dibentangkan, masih banyak alasan dan masalah yang membuat radikalisasi umat Islam itu terjadi.

ISBN 154-0-371-034
978154 0371034